PUCUK BANG

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 2 TAHUN 2023



TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

TAHUN 2023

BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

Menimbang :

a. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan salah satu kegiatan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan kemanfaatan;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan

Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indoneseia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI

dan

BUPATI BANGLI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah berupa laporan keuangan memuat:
   a. laporan realisasi anggaran;
   b. laporan saldo anggaran lebih;
   c. neraca;
   d. laporan operasional
   e. laporan arus kas;
   f. laporan perubahan ekuitas; dan
   g. catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2022 sebagai berikut:

a	pendapatan	Rp1.105.440.499.468,50
b	belanja	Rp1.098.740.995.424,60
	surplus/defisit	Rp (134.412.553.224,10)
c	pembiayaan :	
	1. penerimaan	Rp 178.295.260.106,06
	2. pengeluaran	Rp 3.000.000.000,00
	3. pembiayaan netto	Rp 175.295.260.106,06

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diuraikan sebagai berikut:

a selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp37.764.571.519,50 (tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh empat juta lima ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus sembilan belas rupiah lima puluh sen)dengan rincian sebagai berikut :

1.	anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp1.143.205.070.988,00
2.	realisasi	Rp1.105.440.499.468,50
	selisih lebih/kurang	Rp 37.764.571.519,50

b selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp81.812.756.975,40 (delapan puluh satu miliar delapan ratus dua belas juta tujuh ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah empat puluh sen)dengan rincian sebagai berikut:

1.	anggaran belanja setelah perubahan	Rp1.180.553.752.400,00
2.	realisasi	Rp1.098.740.995.424,60
	selisih lebih/kurang	Rp 81.812.756.975,40

c selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp3.229.370.385,94 (tiga miliar dua ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu tiga ratus

delapan puluh lima rupiah sembilan puluh empat sen)dengan rincian sebagai berikut:

1.	anggaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp178.524.630.492,00
2.	realisasi	Rp. 75.295.260.106,06
	selisih lebih/kurang	Rp 3.229.370.385,94

Pasal 4

Laporan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

a.	saldo anggaran lebih awal	Rp117.208.560.191,51
b.	penggunaan sisa anggaran lebih sebagai pembiayaan tahun berjalan	Rp117.202.607.549,06
c.	koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	Rp (5.952.642,45)
d.	sisa lebih pembiayaan anggaran	Rp 40.882.706.881,96
	sisa anggaran lebih akhir	Rp 40.882.706.881,96

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

a.	jumlah aset	Rp1.517.960.855.187,34
b.	jumlah kewajiban	Rp 100.607.968.846,70
c.	ekuitas	Rp1.417.352.886.340,64

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

a.	pendapatan operasional	Rp1.095.624.789.264,36
b.	beban	Rp1.023.137.809.771,11
c.	surplus/defisit operasional	Rp 72.486.979.493,25
d.	surplus/defisit non operasional	Rp 1.183.122.056,01
	surplus/defisit setelah pos luar biasa	Rp (41.000.000,00)
e.	surplus/defisit – laporan operasional	Rp 73.629.101.549,26

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut :

a.	saldo kas awal per 1 Januari 2022	Rp117.209.643.226,51

b.	arus kas dari aktivitas operasi	Rp159.289.066.718,71
c.	arus kas dari aktivitas investasi	Rp(293.701.619.942,81)
d.	arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp 58.092.652.557,00
e.	arus kas dari aktivitas transitoris	Rp (337.581,00)
f.	saldo kas akhir per 31 Desember 2022	Rp 42.470.903.814,35

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut :

a.	ekuitas awal	Rp1.336.079.836.287,24
b.	surplus/defisit laporan operasional	Rp 73.629.101.549,26
c.	dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar	Rp 7.643.948.504,14
d.	ekuitas akhir	Rp1.417.352.886.340,64

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g, tahun anggaran 2022 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

a. Lampiran I : laporan realisasi anggaran;
   1. Lampiran I.1 : ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
   2. Lampiran I.2 : ringkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
   3. Lampiran I.3 : rincian anggaran pendapatan dan belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
   4. Lampiran I.4 : rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;

b. Lampiran II : laporan perubahan saldo anggaran lebih;
c. Lampiran III : laporan operasional;
d. Lampiran IV : laporan perubahan ekuitas;
e. Lampiran V : neraca;
f. Lampiran VI : laporan arus kas;
g. Lampiran VII : catatatan atas laporan keuangan;
h. Lampiran VIII : daftar rekapitulasi piutang daerah;
i. Lampiran IX : daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
j. Lampiran X : daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
k. Lampiran XI : daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
l. Lampiran XII : daftar rekapitulasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
m. Lampiran XIII : daftar rekapitulasi aset tetap;
n. Lampiran XIV : daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
o. Lampiran XV : daftar rekapitulasi aset lainnya;
p. Lampiran XVI : daftar dana cadangan daerah;
q. Lampiran XVII : daftar kewajiban jangka pendek;
r. Lampiran XVIII : daftar kewajiban jangka panjang;
s. Lampiran XIX : daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
t. Lampiran XX : iktisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah;
   1. Lampiran XX.1 : ikhtisar laporan keuangan (neraca) badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah;
   2. Lampiran XX.2 : ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah.

Pasal 11

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX.1 dan Lampiran XX.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 15 Agustus 2023

BUPATI BANGLI,

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 15 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2023 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI, PROVINSI BALI :
(2,24/2023)

DAFTAR ISI

Lampiran I LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Lampiran I.1 RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Lampiran I.2 RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lampiran I.3 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2. Dinas Kesehatan
3. Rumah Sakit Umum Daerah
4. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
5. Satuan Polisi Pamong Praja
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran
7. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8. Dinas Lingkungan Hidup
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
11. Dinas Perhubungan
12. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
13. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja
14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
15. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
16. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
17. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
18. Sekretariat Daerah
19. Sekretariat DPRD
20. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
21. Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

22. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
23. Inspektorat
24. Kecamatan Bangli
25. Kecamatan Kintamani
26. Kecamatan Susut
27. Kecamatan Tembuku
28. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Lampiran I.4	REKAPITULASI REALISASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
Lampiran II	LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
Lampiran III	LAPORAN OPERASIONAL
Lampiran IV	LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Lampiran V	NERACA
Lampiran VI	LAPORAN ARUS KAS
Lampiran VII	CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Lampiran VIII	DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH
Lampiran IX	DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
Lampiran X	DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR
Lampiran XI	DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVENSTASI) PEMERINTAH DAERAH
Lampiran XII	DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
Lampiran XIII	DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP
Lampiran XIV	DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN
Lampiran XV	DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA
Lampiran XVI	DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH
Lampiran XVII	DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Lampiran XVIII	DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
Lampiran XIX	DAFTAR SUB KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022 DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA
Lampiran XX	IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH
Lampiran XX.1	IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (NERACA) BADAN USAHA MILIK DAERAH/ PERUSAHAAN DAERAH

Lampiran XX.2 IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN LABA/RUGI) BADAN USAHA MILIK DAERAH/ PERUSAHAAN DAERAH

LAMPIRAN I

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Bangli
Nomor : 2 Tahun 2023
Tanggal : 15 Agustus 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	REFF CALK	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI TA 2021
PENDAPATAN	**5.1.1**	**1.143.205.070.988,00**	**1.105.440.499.468,50**	**96,70**	**1.150.283.515.663,56**
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**5.1.1.1**	**147.126.416.529,00**	**144.005.842.858,50**	**97,88**	**163.537.095.767,82**
Pajak Daerah	5.1.1.1.1	21.862.350.000,00	36.707.060.479,07	167,90	23.318.329.220,50
Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	45.249.975.000,00	36.328.299.166,20	80,28	8.281.617.975,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	5.020.327.749,00	5.597.430.541,18	111,50	6.101.592.913,01
Lain - lain PAD yang Sah	5.1.1.1.4	74.993.763.780,00	65.373.052.672,05	87,17	125.835.555.659,31
PENDAPATAN TRANSFER	**5.1.1.2**	**995.207.663.459,00**	**960.732.038.900,00**	**96,54**	**949.349.146.346,74**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**5.1.1.2.1**	**831.842.424.560,00**	**805.596.462.637,00**	**96,84**	**857.733.621.031,00**
Dana Perimbangan	5.1.1.2.1.1	765.766.706.560,00	739.520.744.637,00	96,57	703.032.171.031,00
Dana Insentif Daerah (DID)	5.1.1.2.1.2	10.515.789.000,00	10.515.789.000,00	100,00	89.588.187.000,00
Dana Desa	5.1.1.2.1.3	55.559.929.000,00	55.559.929.000,00	100,00	65.113.263.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	**5.1.1.2.2**	**163.365.238.899,00**	**155.135.576.263,00**	94,96	**91.615.525.315,74**
Pendapatan Bagi Hasil	5.1.1.2.2.1	100.289.668.615,00	92.910.305.211,00	92,64	66.727.321.041,74
Bantuan Keuangan	5.1.1.2.2.2	63.075.570.284,00	62.225.271.052,00	92,64	24.888.204.274,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	**5.1.1.3**	**870.991.000,00**	**702.617.710,00**	**80,67**	**37.397.273.549,00**
Pendapatan Hibah	5.1.1.3	870.991.000,00	702.617.710,00	80,67	37.397.273.549,00
JUMLAH PENDAPATAN		**1.143.205.070.988,00**	**1.105.440.499.468,50**	**96,70**	**1.150.283.515.663,56**
BELANJA DAERAH	**5.1.2**	**1.180.553.752.400,00**	**1.098.740.995.424,60**	**93,07**	**958.622.956.460,90**
BELANJA OPERASI	**5.1.2.1**	**864.171.523.836,00**	**802.381.255.582,79**	**92,85**	**771.933.545.742,31**
Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	542.479.656.508,00	515.867.247.541,00	95,09	504.713.738.147,38
Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	307.036.954.923,00	273.729.368.016,95	89,15	258.938.376.121,93
Belanja Bunga	5.1.2.1.3	4.845.729.167,00	3.297.019.892,57	68,04	138.750.000,00
Belanja Hibah	5.1.2.1.4	9.547.987.238,00	9.234.589.134,27	96,72	7.904.115.473,00
Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.5	261.196.000,00	253.030.998,00	96,87	238.566.000,00
BELANJA MODAL	**5.1.2.2**	**312.893.319.489,00**	**293.929.282.841,81**	**93,94**	**183.280.091.201,59**
Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1	14.393.673.100,00	14.134.423.669,00	98,20	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	66.300.747.644,00	60.358.662.837,00	91,04	40.977.923.944,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	185.928.218.376,00	180.104.496.229,81	96,87	89.033.687.223,59
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.1.2.2.4	44.494.451.733,00	37.746.357.806,00	84,83	49.366.499.234,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	1.776.228.636,00	1.585.342.300,00	89,25	3.901.980.800,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	**5.1.2.3**	**3.488.909.075,00**	**2.430.457.000,00**	**69,66**	**3.409.319.517,00**
Belanja Tidak Terduga	5.1.2.3	3.488.909.075,00	2.430.457.000,00	69,66	3.409.319.517,00
JUMLAH BELANJA DAERAH		**1.180.553.752.400,00**	**1.098.740.995.424,60**	**93,07**	**958.622.956.460,90**
TRANSFER	**5.1.3**	**141.175.949.080,00**	**141.112.057.268,00**	**99,95**	**150.187.975.462,00**
Belanja Bagi Hasil	5.1.3.1	6.711.232.500,00	6.717.100.000,00	100,09	3.410.243.000,00
Belanja Bantuan Keuangan	5.1.3.2	134.464.716.580,00	134.394.957.268,00	99,95	146.777.732.462,00
JUMLAH TRANSFER		**141.175.949.080,00**	**141.112.057.268,00**	**99,95**	**150.187.975.462,00**
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		**1.321.729.701.480,00**	**1.239.853.052.692,60**	**93,81**	**1.108.810.931.922,90**
SURPLUS/DEFISIT		**(178.524.630.492,00)**	**(134.412.553.224,10)**	**75,29**	**41.472.583.740,66**
PEMBIAYAAN	**5.1.4**	**178.524.630.492,00**	**175.295.260.106,06**	**98,19**	**75.735.976.450,85**
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**5.1.4.1**	**181.524.630.492,00**	**178.295.260.106,06**	**98,22**	**75.735.976.450,85**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.1.4.1.1	117.208.560.192,00	117.202.607.549,06	99,99	65.052.046.750,85
Penerimaan Pinjaman Daerah	5.1.4.1.2	64.316.070.300,00	61.092.652.557,00	94,99	10.683.929.700,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**5.1.4.2**	**3.000.000.000,00**	**3.000.000.000,00**	**100,00**	**-**
Penyertaan Modal Daerah	5.1.4.2	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00	0,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo					

URAIAN	REFF CALK	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI TA 2021
Pemberian Pinjaman Daerah					
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan					
PEMBIAYAAN NETO		**178.524.630.492,00**	**175.295.260.106,06**	**98,19**	**75.735.976.450,85**
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN SEBELUM KOREKSI*					
KOREKSI SILPA*					
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**5.1.5**	**-**	**40.882.706.881,96**	**-**	**117.208.560.191,51**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

BUPATI BANGLI

I SANG NYOMAN SEDANA ARTA

LAMPIRAN I.1

RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Lampiran I.1 : Peraturan Daerah Kabupaten Bangli
Nomor : 2 Tahun 2023
Tanggal : 15 Agustus 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Tahun Anggaran 2022

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
4	**PENDAPATAN DAERAH**	1.143.205.070.988,00	1.105.440.499.468,50	(37.764.571.519,50)	96,70
4.1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	71.626.747.480,00	100.160.788.845,26	28.534.041.365,26	139,84
4.1.01	**PENDIDIKAN**	50.600.000,00	38.225.378.620,00	38.174.778.620,00	75.544 ,23
4.1.01.1-01.2-19.0-00.03	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	50.600.000,00	38.225.378.620,00	38.174.778.620,00	75.544 ,23
4.1.02	**KESEHATAN**	70.523.347.480,00	61.361.148.285,26	(9.162.199.194,74)	87,01
4.1.02.1-02.0-00.0-00.01	Dinas Kesehatan	14.808.041.000,00	11.044.315.179,02	(3.763.725.820,98)	74,58
4.1.02.1-02.0-00.0-00.02	Rumah Sakit Umum Daerah	55.715.306.480,00	50.316.833.106,24	(5.398.473.373,76)	90,31
4.1.03	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	1.052.800.000,00	574.261.940,00	(478.538.060,00)	54,55
4.1.03.1-03.1-04.0-00.01	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.052.800.000,00	574.261.940,00	(478.538.060,00)	54,55
4.2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	1.365.814.000,00	998.900.410,00	(366.913.590,00)	73,14
4.2.11	**LINGKUNGAN HIDUP**	125.928.000,00	97.953.000,00	(27.975.000,00)	77,78
4.2.11.2-11.0-00.0-00.01	Dinas Lingkungan Hidup	125.928.000,00	97.953.000,00	(27.975.000,00)	77,78
4.2.15	**PERHUBUNGAN**	1.063.710.000,00	798.047.410,00	(265.662.590,00)	75,02
4.2.15.2-15.0-00.0-00.01	Dinas Perhubungan	1.063.710.000,00	798.047.410,00	(265.662.590,00)	75,02
4.2.16	**KOMUNIKASI & INFORMATIKA**	176.176.000,00	102.900.000,00	(73.276.000,00)	58,41
4.2.16.2-16.2-21.2-20.03	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	176.176.000,00	102.900.000,00	(73.276.000,00)	58,41
4.3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	42.071.950.000,00	34.933.260.415,00	(7.138.689.585,00)	83,03
4.3.26	**PARIWISATA**	37.557.930.000,00	32.575.707.115,00	(4.982.222.885,00)	86,73
4.3.26.3-26.2-22.0-00.01	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	37.557.930.000,00	32.575.707.115,00	(4.982.222.885,00)	86,73
4.3.27	**PERTANIAN**	365.060.000,00	270.222.000,00	(94.838.000,00)	74,02
4.3.27.3-27.3-25.2-09.01	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	365.060.000,00	270.222.000,00	(94.838.000,00)	74,02
4.3.31	**PERINDUSTRIAN**	4.148.960.000,00	2.087.331.300,00	(2.061.628.700,00)	50,31
4.3.31.3-31.3-30.0-00.02	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.148.960.000,00	2.087.331.300,00	(2.061.628.700,00)	50,31
4.5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	1.028.140.559.508,00	969.347.549.798,24	(58.793.009.709,76)	94,28
4.5.02	**KEUANGAN**	1.028.140.559.508,00	969.347.549.798,24	(58.793.009.709,76)	94,28
4.5.02.5-02.0-00.0-00.04	Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	1.028.140.559.508,00	969.347.549.798,24	(58.793.009.709,76)	94,28
5	**BELANJA DAERAH**	1.321.729.701.480,00	1.239.853.052.692,60	(81.876.648.787,40)	93,81
5.1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	834.239.198.198,00	779.542.601.994,75	(54.696.596.203,25)	93,44
5.1.01	**PENDIDIKAN**	328.191.112.267,00	314.329.284.699,23	(13.861.827.567,77)	95,78

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.1.01.1-01.2-19.0-00.03	**Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga**	328.191.112.267,00	314.329.284.699,23	(13.861.827.567,77)	95,78
5.1.01.1-01.2-19.0-00.03.1	BELANJA OPERASI	266.165.332.674,00	253.372.894.996,23	(12.792.437.677,77)	95,19
5.1.01.1-01.2-19.0-00.03.1.01	Belanja Pegawai	208.228.443.042,00	198.776.363.924,00	(9.452.079.118,00)	95,46
5.1.01.1-01.2-19.0-00.03.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.357.793.632,00	49.125.653.212,96	(3.232.140.419,04)	93,83
5.1.01.1-01.2-19.0-00.03.1.05	Belanja Hibah	5.326.400.000,00	5.224.781.859,27	(101.618.140,73)	98,09
5.1.01.1-01.2-19.0-00.03.1.06	Belanja Bantuan Sosial	252.696.000,00	246.096.000,00	(6.600.000,00)	97,39
5.1.01.1-01.2-19.0-00.03.2	BELANJA MODAL	62.025.779.593,00	60.956.389.703,00	(1.069.389.890,00)	98,28
5.1.01.1-01.2-19.0-00.03.2.01	Belanja Modal Tanah	14.393.673.100,00	14.134.423.669,00	(259.249.431,00)	98,20
5.1.01.1-01.2-19.0-00.03.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.501.355.617,00	22.896.386.484,00	(604.969.133,00)	97,43
5.1.01.1-01.2-19.0-00.03.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	23.970.139.851,00	23.861.232.850,00	(108.907.001,00)	99,55
5.1.01.1-01.2-19.0-00.03.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	160.611.025,00	64.346.700,00	(96.264.325,00)	40,06
5.1.02	**KESEHATAN**	365.148.513.618,00	336.070.970.239,72	(29.077.543.378,28)	92,04
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01	**Dinas Kesehatan**	131.791.936.118,00	115.665.903.136,75	(16.126.032.981,25)	87,76
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	122.270.425.566,00	109.261.945.965,75	(13.008.479.600,25)	89,36
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	52.985.683.468,00	50.268.163.029,00	(2.717.520.439,00)	94,87
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.934.742.098,00	58.645.562.899,75	(10.289.179.198,25)	85,07
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	350.000.000,00	348.220.037,00	(1.779.963,00)	99,49
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	9.521.510.552,00	6.403.957.171,00	(3.117.553.381,00)	67,26
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.947.030.552,00	5.837.147.944,00	(3.109.882.608,00)	65,24
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	364.480.000,00	358.898.565,00	(5.581.435,00)	98,47
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	210.000.000,00	207.910.662,00	(2.089.338,00)	99,01
5.1.02.1-02.0-00.0-00.02	**Rumah Sakit Umum Daerah**	233.356.577.500,00	220.405.067.102,97	(12.951.510.397,03)	94,45
5.1.02.1-02.0-00.0-00.02.1	BELANJA OPERASI	103.884.515.500,00	95.665.296.100,12	(8.219.219.399,88)	92,09
5.1.02.1-02.0-00.0-00.02.1.01	Belanja Pegawai	69.949.894.033,00	64.053.351.405,00	(5.896.542.628,00)	91,57
5.1.02.1-02.0-00.0-00.02.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.088.892.300,00	28.314.924.802,55	(773.967.497,45)	97,34
5.1.02.1-02.0-00.0-00.02.1.03	Belanja Bunga	4.845.729.167,00	3.297.019.892,57	(1.548.709.274,43)	68,04
5.1.02.1-02.0-00.0-00.02.2	BELANJA MODAL	129.472.062.000,00	124.739.771.002,85	(4.732.290.997,15)	96,34
5.1.02.1-02.0-00.0-00.02.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.017.999.700,00	25.201.615.122,00	(816.384.578,00)	96,86
5.1.02.1-02.0-00.0-00.02.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	102.804.062.300,00	99.038.337.880,85	(3.765.724.419,15)	96,34
5.1.02.1-02.0-00.0-00.02.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	0
5.1.02.1-02.0-00.0-00.02.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	550.000.000,00	499.818.000,00	(50.182.000,00)	90,88
5.1.03	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	117.288.422.373,00	106.482.095.115,80	(10.806.327.257,20)	90,79
5.1.03.1-03.1-04.0-00.01	**Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman**	117.288.422.373,00	106.482.095.115,80	(10.806.327.257,20)	90,79
5.1.03.1-03.1-04.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	40.180.681.740,00	36.180.407.849,80	(4.000.273.890,20)	90,04
5.1.03.1-03.1-04.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	11.838.282.000,00	11.619.640.584,00	(218.641.416,00)	98,15
5.1.03.1-03.1-04.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.342.399.740,00	24.560.767.265,80	(3.781.632.474,20)	86,66
5.1.03.1-03.1-04.0-00.01.2	BELANJA MODAL	77.107.740.633,00	70.301.687.266,00	(6.806.053.367,00)	91,17
5.1.03.1-03.1-04.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	714.307.300,00	704.387.998,00	(9.919.302,00)	98,61
5.1.03.1-03.1-04.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	32.371.524.000,00	32.146.942.200,00	(224.581.800,00)	99,31
5.1.03.1-03.1-04.0-00.01.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	43.821.909.333,00	37.252.489.068,00	(6.569.420.265,00)	85,01

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.1.03.1-03.1-04.0-00.01.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	200.000.000,00	197.868.000,00	(2.132.000,00)	98,93
5.1.05	**KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	17.943.145.918,00	17.275.936.188,00	(667.209.730,00)	96,28
5.1.05.1-05.0-00.0-00.01	**Satuan Polisi Pamong Praja**	10.938.585.118,00	10.496.350.111,00	(442.235.007,00)	95,96
5.1.05.1-05.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	10.938.585.118,00	10.496.350.111,00	(442.235.007,00)	95,96
5.1.05.1-05.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	9.593.848.200,00	9.207.765.500,00	(386.082.700,00)	95,98
5.1.05.1-05.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.344.736.918,00	1.288.584.611,00	(56.152.307,00)	95,82
5.1.05.1-05.0-00.0-00.09	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran**	7.004.560.800,00	6.779.586.077,00	(224.974.723,00)	96,79
5.1.05.1-05.0-00.0-00.09.1	BELANJA OPERASI	6.746.325.800,00	6.552.500.501,00	(193.825.299,00)	97,13
5.1.05.1-05.0-00.0-00.09.1.01	Belanja Pegawai	5.573.780.800,00	5.408.753.556,00	(165.027.244,00)	97,04
5.1.05.1-05.0-00.0-00.09.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.172.545.000,00	1.143.746.945,00	(28.798.055,00)	97,54
5.1.05.1-05.0-00.0-00.09.2	BELANJA MODAL	258.235.000,00	227.085.576,00	(31.149.424,00)	87,94
5.1.05.1-05.0-00.0-00.09.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	58.235.000,00	29.992.200,00	(28.242.800,00)	51,50
5.1.05.1-05.0-00.0-00.09.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	200.000.000,00	197.093.376,00	(2.906.624,00)	98,55
5.1.06	**SOSIAL**	5.668.004.022,00	5.384.315.752,00	(283.688.270,00)	94,99
5.1.06.1-06.2-08.0-00.02	**Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	5.668.004.022,00	5.384.315.752,00	(283.688.270,00)	94,99
5.1.06.1-06.2-08.0-00.02.1	BELANJA OPERASI	5.626.454.022,00	5.343.015.532,00	(283.438.490,00)	94,96
5.1.06.1-06.2-08.0-00.02.1.01	Belanja Pegawai	4.332.747.472,00	4.196.383.988,00	(136.363.484,00)	96,85
5.1.06.1-06.2-08.0-00.02.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.285.206.550,00	1.139.696.546,00	(145.510.004,00)	88,68
5.1.06.1-06.2-08.0-00.02.1.06	Belanja Bantuan Sosial	8.500.000,00	6.934.998,00	(1.565.002,00)	81,59
5.1.06.1-06.2-08.0-00.02.2	BELANJA MODAL	41.550.000,00	41.300.220,00	(249.780,00)	99,40
5.1.06.1-06.2-08.0-00.02.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.550.000,00	41.300.220,00	(249.780,00)	99,40
5.2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	83.648.493.886,00	78.553.999.295,96	(5.094.494.590,04)	93,91
5.2.11	**LINGKUNGAN HIDUP**	37.680.856.900,00	36.031.588.145,00	(1.649.268.755,00)	95,62
5.2.11.2-11.0-00.0-00.01	**Dinas Lingkungan Hidup**	37.680.856.900,00	36.031.588.145,00	(1.649.268.755,00)	95,62
5.2.11.2-11.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	33.216.429.225,00	31.782.271.437,00	(1.434.157.788,00)	95,68
5.2.11.2-11.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	25.347.339.700,00	24.546.800.157,00	(800.539.543,00)	96,84
5.2.11.2-11.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.869.089.525,00	7.235.471.280,00	(633.618.245,00)	91,95
5.2.11.2-11.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	4.464.427.675,00	4.249.316.708,00	(215.110.967,00)	95,18
5.2.11.2-11.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	657.611.125,00	629.546.255,00	(28.064.870,00)	95,73
5.2.11.2-11.0-00.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.406.816.550,00	3.221.724.453,00	(185.092.097,00)	94,57
5.2.11.2-11.0-00.0-00.01.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	400.000.000,00	398.046.000,00	(1.954.000,00)	99,51
5.2.12	**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	6.070.925.724,00	5.907.708.605,00	(163.217.119,00)	97,31
5.2.12.2-12.0-00.0-00.01	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	6.070.925.724,00	5.907.708.605,00	(163.217.119,00)	97,31
5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	6.049.825.724,00	5.888.284.605,00	(161.541.119,00)	97,33
5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	4.310.307.800,00	4.286.244.574,00	(24.063.226,00)	99,44
5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.739.517.924,00	1.602.040.031,00	(137.477.893,00)	92,10
5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	21.100.000,00	19.424.000,00	(1.676.000,00)	92,06
5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.100.000,00	19.424.000,00	(1.676.000,00)	92,06
5.2.13	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	10.185.467.570,00	8.543.581.002,00	(1.641.886.568,00)	83,88
5.2.13.2-13.2-14.0-00.09	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	10.185.467.570,00	8.543.581.002,00	(1.641.886.568,00)	83,88

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.2.13.2-13.2-14.0-00.09.1	BELANJA OPERASI	9.847.482.570,00	8.261.553.076,00	(1.585.929.494,00)	83,90
5.2.13.2-13.2-14.0-00.09.1.01	Belanja Pegawai	4.317.025.120,00	4.224.369.232,00	(92.655.888,00)	97,85
5.2.13.2-13.2-14.0-00.09.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.470.457.450,00	3.977.183.844,00	(1.493.273.606,00)	72,70
5.2.13.2-13.2-14.0-00.09.1.05	Belanja Hibah	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00
5.2.13.2-13.2-14.0-00.09.2	BELANJA MODAL	337.985.000,00	282.027.926,00	(55.957.074,00)	83,44
5.2.13.2-13.2-14.0-00.09.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	334.000.000,00	279.427.926,00	(54.572.074,00)	83,66
5.2.13.2-13.2-14.0-00.09.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.985.000,00	2.600.000,00	(1.385.000,00)	65,24
5.2.15	**PERHUBUNGAN**	9.001.954.550,00	8.421.536.350,96	(580.418.199,04)	93,55
5.2.15.2-15.0-00.0-00.01	**Dinas Perhubungan**	9.001.954.550,00	8.421.536.350,96	(580.418.199,04)	93,55
5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	8.691.037.550,00	8.121.022.404,00	(570.015.146,00)	93,44
5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	4.588.656.300,00	4.411.027.706,00	(177.628.594,00)	96,13
5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.102.381.250,00	3.709.994.698,00	(392.386.552,00)	90,44
5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	310.917.000,00	300.513.946,96	(10.403.053,04)	96,65
5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	214.117.000,00	204.825.670,00	(9.291.330,00)	95,66
5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	96.800.000,00	95.688.276,96	(1.111.723,04)	98,85
5.2.16	**KOMUNIKASI & INFORMATIKA**	7.710.968.373,00	7.129.897.905,00	(581.070.468,00)	92,46
5.2.16.2-16.2-21.2-20.03	**Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian**	7.710.968.373,00	7.129.897.905,00	(581.070.468,00)	92,46
5.2.16.2-16.2-21.2-20.03.1	BELANJA OPERASI	7.609.856.673,00	7.039.234.330,00	(570.622.343,00)	92,50
5.2.16.2-16.2-21.2-20.03.1.01	Belanja Pegawai	3.753.438.373,00	3.700.708.074,00	(52.730.299,00)	98,60
5.2.16.2-16.2-21.2-20.03.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.856.418.300,00	3.338.526.256,00	(517.892.044,00)	86,57
5.2.16.2-16.2-21.2-20.03.2	BELANJA MODAL	101.111.700,00	90.663.575,00	(10.448.125,00)	89,67
5.2.16.2-16.2-21.2-20.03.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51.111.700,00	41.163.575,00	(9.948.125,00)	80,54
5.2.16.2-16.2-21.2-20.03.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	50.000.000,00	49.500.000,00	(500.000,00)	99,00
5.2.17	**KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**	6.319.540.686,00	6.130.873.129,00	(188.667.557,00)	97,01
5.2.17.2-17.2-07.0-00.06	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja**	6.319.540.686,00	6.130.873.129,00	(188.667.557,00)	97,01
5.2.17.2-17.2-07.0-00.06.1	BELANJA OPERASI	6.154.540.686,00	5.991.752.744,00	(162.787.942,00)	97,35
5.2.17.2-17.2-07.0-00.06.1.01	Belanja Pegawai	4.698.666.686,00	4.596.287.143,00	(102.379.543,00)	97,82
5.2.17.2-17.2-07.0-00.06.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.455.874.000,00	1.395.465.601,00	(60.408.399,00)	95,85
5.2.17.2-17.2-07.0-00.06.2	BELANJA MODAL	165.000.000,00	139.120.385,00	(25.879.615,00)	84,32
5.2.17.2-17.2-07.0-00.06.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.000.000,00	39.605.000,00	(395.000,00)	99,01
5.2.17.2-17.2-07.0-00.06.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	125.000.000,00	99.515.385,00	(25.484.615,00)	79,61
5.2.18	**PENANAMAN MODAL**	6.678.780.083,00	6.388.814.159,00	(289.965.924,00)	95,66
5.2.18.2-18.0-00.0-00.01	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**	6.678.780.083,00	6.388.814.159,00	(289.965.924,00)	95,66
5.2.18.2-18.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	6.528.780.083,00	6.239.659.269,00	(289.120.814,00)	95,57
5.2.18.2-18.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	5.618.678.083,00	5.517.376.881,00	(101.301.202,00)	98,20
5.2.18.2-18.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	910.102.000,00	722.282.388,00	(187.819.612,00)	79,36
5.2.18.2-18.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	150.000.000,00	149.154.890,00	(845.110,00)	99,44
5.2.18.2-18.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.000.000,00	49.700.000,00	(300.000,00)	99,40
5.2.18.2-18.0-00.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	99.454.890,00	(545.110,00)	99,45
5.3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	67.667.671.876,00	57.099.008.977,89	(10.568.662.898,11)	84,38

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.3.26	**PARIWISATA**	31.284.556.283,00	22.303.062.513,89	(8.981.493.769,11)	71,29
5.3.26.3-26.2-22.0-00.01	**Dinas Pariwisata dan Kebudayaan**	31.284.556.283,00	22.303.062.513,89	(8.981.493.769,11)	71,29
5.3.26.3-26.2-22.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	29.760.141.283,00	21.604.225.163,89	(8.155.916.119,11)	72,59
5.3.26.3-26.2-22.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	6.943.549.483,00	4.917.394.916,00	(2.026.154.567,00)	70,82
5.3.26.3-26.2-22.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.357.591.800,00	14.437.830.247,89	(5.919.761.552,11)	70,92
5.3.26.3-26.2-22.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	2.459.000.000,00	2.249.000.000,00	(210.000.000,00)	91,46
5.3.26.3-26.2-22.0-00.01.2	BELANJA MODAL	1.524.415.000,00	698.837.350,00	(825.577.650,00)	45,84
5.3.26.3-26.2-22.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	545.915.000,00	462.498.000,00	(83.417.000,00)	84,72
5.3.26.3-26.2-22.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	840.000.000,00	165.056.950,00	(674.943.050,00)	19,65
5.3.26.3-26.2-22.0-00.01.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	135.000.000,00	71.282.400,00	(63.717.600,00)	52,80
5.3.26.3-26.2-22.0-00.01.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	0
5.3.27	**PERTANIAN**	28.919.480.527,00	27.949.814.280,00	(969.666.247,00)	96,65
5.3.27.3-27.3-25.2-09.01	**Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan**	28.919.480.527,00	27.949.814.280,00	(969.666.247,00)	96,65
5.3.27.3-27.3-25.2-09.01.1	BELANJA OPERASI	28.623.723.127,00	27.702.444.780,00	(921.278.347,00)	96,78
5.3.27.3-27.3-25.2-09.01.1.01	Belanja Pegawai	24.235.072.200,00	23.770.235.346,00	(464.836.854,00)	98,08
5.3.27.3-27.3-25.2-09.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.388.650.927,00	3.932.209.434,00	(456.441.493,00)	89,60
5.3.27.3-27.3-25.2-09.01.2	BELANJA MODAL	295.757.400,00	247.369.500,00	(48.387.900,00)	83,64
5.3.27.3-27.3-25.2-09.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	121.200.000,00	115.390.000,00	(5.810.000,00)	95,21
5.3.27.3-27.3-25.2-09.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	74.000.000,00	73.197.200,00	(802.800,00)	98,92
5.3.27.3-27.3-25.2-09.01.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	23.557.400,00	14.982.300,00	(8.575.100,00)	63,60
5.3.27.3-27.3-25.2-09.01.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	77.000.000,00	43.800.000,00	(33.200.000,00)	56,88
5.3.31	**PERINDUSTRIAN**	7.463.635.066,00	6.846.132.184,00	(617.502.882,00)	91,73
5.3.31.3-31.3-30.0-00.02	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	7.463.635.066,00	6.846.132.184,00	(617.502.882,00)	91,73
5.3.31.3-31.3-30.0-00.02.1	BELANJA OPERASI	6.540.239.391,00	5.925.858.909,00	(614.380.482,00)	90,61
5.3.31.3-31.3-30.0-00.02.1.01	Belanja Pegawai	4.570.019.880,00	4.247.496.017,00	(322.523.863,00)	92,94
5.3.31.3-31.3-30.0-00.02.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.970.219.511,00	1.678.362.892,00	(291.856.619,00)	85,19
5.3.31.3-31.3-30.0-00.02.2	BELANJA MODAL	923.395.675,00	920.273.275,00	(3.122.400,00)	99,66
5.3.31.3-31.3-30.0-00.02.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	923.395.675,00	920.273.275,00	(3.122.400,00)	99,66
5.4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	124.273.681.090,00	117.956.439.268,00	(6.317.241.822,00)	94,92
5.4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**	70.779.316.640,00	66.315.280.316,00	(4.464.036.324,00)	93,69
5.4.01.4-01.2-23.2-24.01	**Sekretariat Daerah**	70.779.316.640,00	66.315.280.316,00	(4.464.036.324,00)	93,69
5.4.01.4-01.2-23.2-24.01.1	BELANJA OPERASI	58.674.360.540,00	55.787.559.791,00	(2.886.800.749,00)	95,08
5.4.01.4-01.2-23.2-24.01.1.01	Belanja Pegawai	22.939.970.640,00	21.974.412.508,00	(965.558.132,00)	95,79
5.4.01.4-01.2-23.2-24.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.423.389.900,00	33.502.147.283,00	(1.921.242.617,00)	94,58
5.4.01.4-01.2-23.2-24.01.1.05	Belanja Hibah	311.000.000,00	311.000.000,00	0,00	100,00
5.4.01.4-01.2-23.2-24.01.2	BELANJA MODAL	12.104.956.100,00	10.527.720.525,00	(1.577.235.575,00)	86,97
5.4.01.4-01.2-23.2-24.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.465.950.000,00	2.411.825.150,00	(1.054.124.850,00)	69,59
5.4.01.4-01.2-23.2-24.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8.540.000.000,00	8.018.395.375,00	(521.604.625,00)	93,89
5.4.01.4-01.2-23.2-24.01.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	99.006.100,00	97.500.000,00	(1.506.100,00)	98,48
5.4.02	**SEKRETARIAT DPRD**	53.494.364.450,00	51.641.158.952,00	(1.853.205.498,00)	96,54

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01	**Sekretariat DPRD**	53.494.364.450,00	51.641.158.952,00	(1.853.205.498,00)	96,54
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	40.777.364.450,00	39.270.917.023,00	(1.506.447.427,00)	96,31
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	23.782.887.302,00	23.547.870.383,00	(235.016.919,00)	99,01
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.994.477.148,00	15.723.046.640,00	(1.271.430.508,00)	92,52
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	12.717.000.000,00	12.370.241.929,00	(346.758.071,00)	97,27
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	717.000.000,00	673.680.000,00	(43.320.000,00)	93,96
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	12.000.000.000,00	11.696.561.929,00	(303.438.071,00)	97,47
5.5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	177.327.653.687,00	173.100.570.389,00	(4.227.083.298,00)	97,62
5.5.01	**PERENCANAAN**	5.785.869.200,00	5.667.700.198,00	(118.169.002,00)	97,96
5.5.01.5-01.5-05.0-00.00	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**	5.785.869.200,00	5.667.700.198,00	(118.169.002,00)	97,96
5.5.01.5-01.5-05.0-00.00.1	BELANJA OPERASI	5.565.219.200,00	5.447.812.202,00	(117.406.998,00)	97,89
5.5.01.5-01.5-05.0-00.00.1.01	Belanja Pegawai	3.980.329.200,00	3.916.762.739,00	(63.566.461,00)	98,40
5.5.01.5-01.5-05.0-00.00.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.584.890.000,00	1.531.049.463,00	(53.840.537,00)	96,60
5.5.01.5-01.5-05.0-00.00.2	BELANJA MODAL	220.650.000,00	219.887.996,00	(762.004,00)	99,65
5.5.01.5-01.5-05.0-00.00.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	220.650.000,00	219.887.996,00	(762.004,00)	99,65
5.5.02	**KEUANGAN**	161.314.024.047,00	157.623.258.886,00	(3.690.765.161,00)	97,71
5.5.02.5-02.0-00.0-00.04	**Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah**	161.314.024.047,00	157.623.258.886,00	(3.690.765.161,00)	97,71
5.5.02.5-02.0-00.0-00.04.1	BELANJA OPERASI	15.998.065.081,00	13.477.425.318,00	(2.520.639.763,00)	84,24
5.5.02.5-02.0-00.0-00.04.1.01	Belanja Pegawai	11.069.979.781,00	9.391.298.838,00	(1.678.680.943,00)	84,84
5.5.02.5-02.0-00.0-00.04.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.928.085.300,00	4.086.126.480,00	(841.958.820,00)	82,92
5.5.02.5-02.0-00.0-00.04.2	BELANJA MODAL	651.100.811,00	603.319.300,00	(47.781.511,00)	92,66
5.5.02.5-02.0-00.0-00.04.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	240.625.000,00	195.970.800,00	(44.654.200,00)	81,44
5.5.02.5-02.0-00.0-00.04.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	212.000.000,00	209.748.000,00	(2.252.000,00)	98,94
5.5.02.5-02.0-00.0-00.04.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	198.475.811,00	197.600.500,00	(875.311,00)	99,56
5.5.02.5-02.0-00.0-00.04.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.488.909.075,00	2.430.457.000,00	(1.058.452.075,00)	69,66
5.5.02.5-02.0-00.0-00.04.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.488.909.075,00	2.430.457.000,00	(1.058.452.075,00)	69,66
5.5.02.5-02.0-00.0-00.04.4	BELANJA TRANSFER	141.175.949.080,00	141.112.057.268,00	(63.891.812,00)	99,95
5.5.02.5-02.0-00.0-00.04.4.01	Belanja Bagi Hasil	6.711.232.500,00	6.717.100.000,00	5.867.500,00	100,09
5.5.02.5-02.0-00.0-00.04.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	134.464.716.580,00	134.394.957.268,00	(69.759.312,00)	99,95
5.5.03	**KEPEGAWAIAN**	10.227.760.440,00	9.809.611.305,00	(418.149.135,00)	95,91
5.5.03.5-03.5-04.0-00.01	**Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**	10.227.760.440,00	9.809.611.305,00	(418.149.135,00)	95,91
5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	10.154.524.740,00	9.737.311.455,00	(417.213.285,00)	95,89
5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	4.481.576.440,00	4.415.064.902,00	(66.511.538,00)	98,52
5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.672.948.300,00	5.322.246.553,00	(350.701.747,00)	93,82
5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.2	BELANJA MODAL	73.235.700,00	72.299.850,00	(935.850,00)	98,72
5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.600.000,00	35.436.750,00	(163.250,00)	99,54
5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	37.635.700,00	36.863.100,00	(772.600,00)	97,95
5.6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**	7.693.854.665,00	7.498.103.365,00	(195.751.300,00)	97,46
5.6.01	**INSPEKTORAT**	7.693.854.665,00	7.498.103.365,00	(195.751.300,00)	97,46
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01	**Inspektorat**	7.693.854.665,00	7.498.103.365,00	(195.751.300,00)	97,46

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	7.553.854.665,00	7.368.118.368,00	(185.736.297,00)	97,54
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	6.219.304.665,00	6.110.972.277,00	(108.332.388,00)	98,26
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.334.550.000,00	1.257.146.091,00	(77.403.909,00)	94,20
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	140.000.000,00	129.984.997,00	(10.015.003,00)	92,85
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	140.000.000,00	129.984.997,00	(10.015.003,00)	92,85
5.7	**UNSUR KEWILAYAHAN**	21.717.698.040,00	21.078.015.465,00	(639.682.575,00)	97,05
5.7.01	**KECAMATAN**	21.717.698.040,00	21.078.015.465,00	(639.682.575,00)	97,05
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01	**Kecamatan Bangli**	10.670.015.320,00	10.251.399.933,00	(418.615.387,00)	96,08
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	10.456.613.570,00	10.062.805.933,00	(393.807.637,00)	96,23
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	6.216.410.320,00	6.172.340.572,00	(44.069.748,00)	99,29
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.240.203.250,00	3.890.465.361,00	(349.737.889,00)	91,75
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	213.401.750,00	188.594.000,00	(24.807.750,00)	88,38
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	113.401.750,00	89.125.000,00	(24.276.750,00)	78,59
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	99.469.000,00	(531.000,00)	99,47
5.7.01.7-01.0-00.0-00.02	**Kecamatan Kintamani**	3.951.823.600,00	3.910.936.427,00	(40.887.173,00)	98,97
5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.1	BELANJA OPERASI	3.951.823.600,00	3.910.936.427,00	(40.887.173,00)	98,97
5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.1.01	Belanja Pegawai	3.251.013.600,00	3.215.479.727,00	(35.533.873,00)	98,91
5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.1.02	Belanja Barang dan Jasa	700.810.000,00	695.456.700,00	(5.353.300,00)	99,24
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03	**Kecamatan Susut**	3.069.790.720,00	3.005.458.615,00	(64.332.105,00)	97,90
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.1	BELANJA OPERASI	3.069.790.720,00	3.005.458.615,00	(64.332.105,00)	97,90
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.1.01	Belanja Pegawai	2.655.480.720,00	2.598.347.204,00	(57.133.516,00)	97,85
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.1.02	Belanja Barang dan Jasa	414.310.000,00	407.111.411,00	(7.198.589,00)	98,26
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04	**Kecamatan Tembuku**	4.026.068.400,00	3.910.220.490,00	(115.847.910,00)	97,12
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.1	BELANJA OPERASI	4.026.068.400,00	3.910.220.490,00	(115.847.910,00)	97,12
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.1.01	Belanja Pegawai	3.695.628.400,00	3.583.930.669,00	(111.697.731,00)	96,98
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.1.02	Belanja Barang dan Jasa	330.440.000,00	326.289.821,00	(4.150.179,00)	98,74
5.8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**	5.161.450.038,00	5.024.313.937,00	(137.136.101,00)	97,34
5.8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	5.161.450.038,00	5.024.313.937,00	(137.136.101,00)	97,34
5.8.01.8-01.0-00.0-00.01	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	5.161.450.038,00	5.024.313.937,00	(137.136.101,00)	97,34
5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	5.109.462.138,00	4.973.972.187,00	(135.489.951,00)	97,35
5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	3.301.642.800,00	3.192.405.690,00	(109.237.110,00)	96,69
5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	766.232.100,00	739.979.259,00	(26.252.841,00)	96,57
5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	1.041.587.238,00	1.041.587.238,00	0,00	100,00
5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	51.987.900,00	50.341.750,00	(1.646.150,00)	96,83
5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51.987.900,00	50.341.750,00	(1.646.150,00)	96,83
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	184.524.630.492,00	181.295.260.106,06	(3.229.370.385,94)	98,25
6.1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	0,00	(5.952.642,45)	(5.952.642,45)	0
6.1.01	**PENDIDIKAN**	0,00	(5.952.642,45)	(5.952.642,45)	0
6.1.01.1-01.2-19.0-00.03	**Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga**	0,00	(5.952.642,45)	(5.952.642,45)	0
6.1.01.1-01.2-19.0-00.03.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	(5.952.642,45)	(5.952.642,45)	0

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
6.1.01.1-01.2-19.0-00.03.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	(5.952.642,45)	(5.952.642,45)	0
6.5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	184.524.630.492,00	181.301.212.748,51	(3.223.417.743,49)	98,25
6.5.02	**KEUANGAN**	184.524.630.492,00	181.301.212.748,51	(3.223.417.743,49)	98,25
6.5.02.5-02.0-00.0-00.04	**Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah**	184.524.630.492,00	181.301.212.748,51	(3.223.417.743,49)	98,25
6.5.02.5-02.0-00.0-00.04.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	181.524.630.492,00	178.301.212.748,51	(3.223.417.743,49)	98,22
6.5.02.5-02.0-00.0-00.04.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	117.208.560.192,00	117.208.560.191,51	(0,49)	100,00
6.5.02.5-02.0-00.0-00.04.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	64.316.070.300,00	61.092.652.557,00	(3.223.417.743,00)	94,99
6.5.02.5-02.0-00.0-00.04.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	100,00
6.5.02.5-02.0-00.0-00.04.2.02	Penyertaan Modal Daerah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	100,00

BUPATI BANGLI,

I GUSTI NYOMAN SEDANA ARTA

LAMPIRAN I.2

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lampiran I.2 : Peraturan Daerah Kabupaten Bangli
Nomor : 2 Tahun 2023
Tanggal : 15 Agustus 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2022

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
4	**PENDAPATAN DAERAH**	1.143.205.070.988,00	1.105.440.499.468,50	96,70	1.150.283.515.663,56
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	147.126.416.529,00	144.005.842.858,50	97,88	163.537.095.767,82
4.1.01	**Pajak Daerah**	21.862.350.000,00	36.707.060.479,07	167,90	23.318.329.220,50
4.1.02	**Retribusi Daerah**	45.249.975.000,00	36.328.299.166,20	80,28	8.265.989.775,00
4.1.03	**Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**	5.020.327.749,00	5.597.430.541,18	111,50	6.101.592.913,01
4.1.04	**Lain-lain PAD yang Sah**	74.993.763.780,00	65.373.052.672,05	87,17	125.851.183.859,31
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	995.207.663.459,00	960.732.038.900,00	96,54	949.349.146.346,74
4.2.01	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	831.842.424.560,00	805.596.462.637,00	96,84	857.733.621.031,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	765.766.706.560,00	739.520.744.637,00	96,57	703.032.171.031,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	10.515.789.000,00	10.515.789.000,00	100,00	89.588.187.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	55.559.929.000,00	55.559.929.000,00	100,00	65.113.263.000,00
4.2.02	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	163.365.238.899,00	155.135.576.263,00	94,96	91.615.525.315,74
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	100.289.668.615,00	92.910.305.211,00	92,64	66.727.321.041,74
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	63.075.570.284,00	62.225.271.052,00	98,65	24.888.204.274,00
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	870.991.000,00	702.617.710,00	80,67	37.397.273.549,00
4.3.01	**Pendapatan Hibah**	870.991.000,00	702.617.710,00	80,67	37.397.273.549,00
5	**BELANJA DAERAH**	1.321.729.701.480,00	1.239.853.052.692,60	93,81	1.108.810.931.922,90
5.1	**BELANJA OPERASI**	864.171.523.836,00	802.381.255.582,79	92,85	771.933.545.742,31
5.1.01	**Belanja Pegawai**	542.479.656.508,00	515.867.247.541,00	95,09	504.713.738.147,38
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	307.036.954.923,00	273.729.368.016,95	89,15	258.938.376.121,93
5.1.03	**Belanja Bunga**	4.845.729.167,00	3.297.019.892,57	68,04	138.750.000,00
5.1.05	**Belanja Hibah**	9.547.987.238,00	9.234.589.134,27	96,72	7.904.115.473,00
5.1.06	**Belanja Bantuan Sosial**	261.196.000,00	253.030.998,00	96,87	238.566.000,00
5.2	**BELANJA MODAL**	312.893.319.489,00	293.929.282.841,81	93,94	183.280.091.201,59
5.2.01	**Belanja Modal Tanah**	14.393.673.100,00	14.134.423.669,00	98,20	0,00
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	66.300.747.644,00	60.358.662.837,00	91,04	40.977.923.944,00
5.2.03	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**	185.928.218.376,00	180.104.496.229,81	96,87	89.033.687.223,59
5.2.04	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**	44.494.451.733,00	37.746.357.806,00	84,83	49.366.499.234,00
5.2.05	**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**	1.776.228.636,00	1.585.342.300,00	89,25	3.901.980.800,00
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	3.488.909.075,00	2.430.457.000,00	69,66	3.409.319.517,00
5.3.01	**Belanja Tidak Terduga**	3.488.909.075,00	2.430.457.000,00	69,66	3.409.319.517,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
5.4	**BELANJA TRANSFER**	141.175.949.080,00	141.112.057.268,00	99,95	150.187.975.462,00
5.4.01	**Belanja Bagi Hasil**	6.711.232.500,00	6.717.100.000,00	100,09	3.410.243.000,00
5.4.02	**Belanja Bantuan Keuangan**	134.464.716.580,00	134.394.957.268,00	99,95	146.777.732.462,00
	SURPLUS / DEFISIT	(178.524.630.492,00)	(134.412.553.224,10)	0	41.472.583.740,66
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	181.524.630.492,00	178.295.260.106,06	98,22	75.735.976.450,85
6.1.01	**Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**	117.208.560.192,00	117.202.607.549,06	99,99	65.052.046.750,85
6.1.04	**Penerimaan Pinjaman Daerah**	64.316.070.300,00	61.092.652.557,00	94,99	10.683.929.700,00
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00	0,00
6.2.02	**Penyertaan Modal Daerah**	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	178.524.630.492,00	175.295.260.106,06	98,19	75.735.976.450,85
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		**0,00**	**40.882.706.881,96**	**0**	**117.208.560.191,51**

BUPATI BANGLI,

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

LAMPIRAN I.3

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN,

BELANJA DAN PEMBIAYAAN

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Bangli
Nomor : 2 Tahun 2023
Tanggal : 15 Agustus 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2022

Urusan Pemerintahan : 1.01 PENDIDIKAN

SKPD : 1-01.2-19.0-00.03 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.4	**PENDAPATAN DAERAH**	50.600.000,00	38.225.378.620,00	38.174.778.620,00	75.544,23	
00.0.00.00.4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	50.600.000,00	0,00	(50.600.000,00)	0	
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	50.600.000,00	0,00	(50.600.000,00)	0	
00.0.00.00.4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	0,00	38.225.378.620,00	38.225.378.620,00	0	
00.0.00.00.4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	0,00	38.225.378.620,00	38.225.378.620,00	0	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	328.191.112.267,00	314.329.284.699,23	(13.861.827.567,77)	95,78	
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	203.781.581.042,00	194.348.958.209,00	(9.432.622.833,00)	95,37	
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.800.000,00	0,00	(40.800.000,00)	0	
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.800.000,00	0,00	(40.800.000,00)	0	
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	40.800.000,00	0,00	(40.800.000,00)	0	
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.800.000,00	0,00	(40.800.000,00)	0	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	201.077.231.042,00	191.931.605.457,00	(9.145.625.585,00)	95,45	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	201.077.231.042,00	191.931.605.457,00	(9.145.625.585,00)	95,45	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	201.077.231.042,00	191.931.605.457,00	(9.145.625.585,00)	95,45	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	201.077.231.042,00	191.931.605.457,00	(9.145.625.585,00)	95,45	
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	97.197.500,00	65.617.500,00	(31.580.000,00)	67,51	
01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	97.197.500,00	65.617.500,00	(31.580.000,00)	67,51	
01.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	97.197.500,00	65.617.500,00	(31.580.000,00)	67,51	
01.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.197.500,00	65.617.500,00	(31.580.000,00)	67,51	
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	436.009.200,00	345.459.900,00	(90.549.300,00)	79,23	
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.895.900,00	8.873.500,00	(22.400,00)	99,75	
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	8.895.900,00	8.873.500,00	(22.400,00)	99,75	
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.895.900,00	8.873.500,00	(22.400,00)	99,75	
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	22.217.300,00	13.986.800,00	(8.230.500,00)	62,95	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	15.077.300,00	13.986.800,00	(1.090.500,00)	92,77	
01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.077.300,00	13.986.800,00	(1.090.500,00)	92,77	
01.2.06.03.5.2	BELANJA MODAL	7.140.000,00	0,00	(7.140.000,00)	0	
01.2.06.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.140.000,00	0,00	(7.140.000,00)	0	
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	308.856.200,00	255.777.200,00	(53.079.000,00)	82,81	
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	308.856.200,00	255.777.200,00	(53.079.000,00)	82,81	
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	308.856.200,00	255.777.200,00	(53.079.000,00)	82,81	
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50.169.800,00	45.889.400,00	(4.280.400,00)	91,47	
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	50.169.800,00	45.889.400,00	(4.280.400,00)	91,47	
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.169.800,00	45.889.400,00	(4.280.400,00)	91,47	
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.970.000,00	6.370.000,00	(600.000,00)	91,39	
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	6.970.000,00	6.370.000,00	(600.000,00)	91,39	
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.970.000,00	6.370.000,00	(600.000,00)	91,39	
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	38.900.000,00	14.563.000,00	(24.337.000,00)	37,44	
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	38.900.000,00	14.563.000,00	(24.337.000,00)	37,44	
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.900.000,00	14.563.000,00	(24.337.000,00)	37,44	
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	277.542.500,00	267.544.500,00	(9.998.000,00)	96,40	
01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	277.542.500,00	267.544.500,00	(9.998.000,00)	96,40	
01.2.07.10.5.1	BELANJA OPERASI	142.580.000,00	137.730.000,00	(4.850.000,00)	96,60	
01.2.07.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	142.580.000,00	137.730.000,00	(4.850.000,00)	96,60	
01.2.07.10.5.2	BELANJA MODAL	134.962.500,00	129.814.500,00	(5.148.000,00)	96,19	
01.2.07.10.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	134.962.500,00	129.814.500,00	(5.148.000,00)	96,19	
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.161.710.000,00	1.130.723.252,00	(30.986.748,00)	97,33	
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	172.610.000,00	141.623.252,00	(30.986.748,00)	82,05	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	172.610.000,00	141.623.252,00	(30.986.748,00)	82,05	
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	172.610.000,00	141.623.252,00	(30.986.748,00)	82,05	
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	971.100.000,00	971.100.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	971.100.000,00	971.100.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	971.100.000,00	971.100.000,00	0,00	100,00	
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	691.090.800,00	608.007.600,00	(83.083.200,00)	87,98	
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	287.425.800,00	263.121.600,00	(24.304.200,00)	91,54	
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	287.425.800,00	263.121.600,00	(24.304.200,00)	91,54	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	287.425.800,00	263.121.600,00	(24.304.200,00)	91,54	
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.300.000,00	14.090.000,00	(36.210.000,00)	28,01	
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	50.300.000,00	14.090.000,00	(36.210.000,00)	28,01	
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.300.000,00	14.090.000,00	(36.210.000,00)	28,01	
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	353.365.000,00	330.796.000,00	(22.569.000,00)	93,61	
01.2.09.09.5.2	BELANJA MODAL	353.365.000,00	330.796.000,00	(22.569.000,00)	93,61	
01.2.09.09.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	353.365.000,00	330.796.000,00	(22.569.000,00)	93,61	
02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	105.296.494.025,00	101.415.170.561,96	(3.881.323.463,04)	96,31	
02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	60.361.208.362,00	58.205.641.791,90	(2.155.566.570,10)	96,43	
02.2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2.936.698.000,00	2.933.583.000,00	(3.115.000,00)	99,89	
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	176.270.000,00	173.155.000,00	(3.115.000,00)	98,23	
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	176.270.000,00	173.155.000,00	(3.115.000,00)	98,23	
02.2.01.03.5.2	BELANJA MODAL	2.760.428.000,00	2.760.428.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.760.428.000,00	2.760.428.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	430.104.000,00	428.424.000,00	(1.680.000,00)	99,61	
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	61.680.000,00	60.000.000,00	(1.680.000,00)	97,28	
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.680.000,00	60.000.000,00	(1.680.000,00)	97,28	
02.2.01.04.5.2	BELANJA MODAL	368.424.000,00	368.424.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.04.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	368.424.000,00	368.424.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	510.082.000,00	508.802.000,00	(1.280.000,00)	99,75	
02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	31.280.000,00	30.000.000,00	(1.280.000,00)	95,91	
02.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.280.000,00	30.000.000,00	(1.280.000,00)	95,91	
02.2.01.05.5.2	BELANJA MODAL	478.802.000,00	478.802.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.05.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	478.802.000,00	478.802.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.893.245.400,00	1.882.933.000,00	(10.312.400,00)	99,46	
02.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	129.295.400,00	121.764.000,00	(7.531.400,00)	94,18	
02.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.295.400,00	121.764.000,00	(7.531.400,00)	94,18	
02.2.01.06.5.2	BELANJA MODAL	1.763.950.000,00	1.761.169.000,00	(2.781.000,00)	99,84	
02.2.01.06.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.763.950.000,00	1.761.169.000,00	(2.781.000,00)	99,84	
02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	1.266.738.600,00	1.263.791.600,00	(2.947.000,00)	99,77	
02.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	25.580.000,00	24.000.000,00	(1.580.000,00)	93,82	
02.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.580.000,00	24.000.000,00	(1.580.000,00)	93,82	
02.2.01.08.5.2	BELANJA MODAL	1.241.158.600,00	1.239.791.600,00	(1.367.000,00)	99,89	
02.2.01.08.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.241.158.600,00	1.239.791.600,00	(1.367.000,00)	99,89	
02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	182.265.000,00	179.111.000,00	(3.154.000,00)	98,27	
02.2.01.11.5.2	BELANJA MODAL	182.265.000,00	179.111.000,00	(3.154.000,00)	98,27	
02.2.01.11.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	182.265.000,00	179.111.000,00	(3.154.000,00)	98,27	
02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	50.000.000,00	48.883.000,00	(1.117.000,00)	97,77	
02.2.01.12.5.2	BELANJA MODAL	50.000.000,00	48.883.000,00	(1.117.000,00)	97,77	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.01.12.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	50.000.000,00	48.883.000,00	(1.117.000,00)	97,77	
02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	87.696.000,00	87.696.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.21.5.1	BELANJA OPERASI	87.696.000,00	87.696.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.21.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	87.696.000,00	87.696.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	16.250.000.000,00	16.109.340.000,00	(140.660.000,00)	99,13	
02.2.01.23.5.2	BELANJA MODAL	16.250.000.000,00	16.109.340.000,00	(140.660.000,00)	99,13	
02.2.01.23.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.250.000.000,00	16.109.340.000,00	(140.660.000,00)	99,13	
02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	117.319.750,00	92.773.712,00	(24.546.038,00)	79,08	
02.2.01.25.5.1	BELANJA OPERASI	46.955.750,00	24.195.248,00	(22.760.502,00)	51,53	
02.2.01.25.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.955.750,00	24.195.248,00	(22.760.502,00)	51,53	
02.2.01.25.5.2	BELANJA MODAL	70.364.000,00	68.578.464,00	(1.785.536,00)	97,46	
02.2.01.25.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70.364.000,00	68.578.464,00	(1.785.536,00)	97,46	
02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	11.280.500.000,00	11.268.250.000,00	(12.250.000,00)	99,89	
02.2.01.26.5.1	BELANJA OPERASI	11.280.500.000,00	11.268.250.000,00	(12.250.000,00)	99,89	
02.2.01.26.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.280.500.000,00	11.268.250.000,00	(12.250.000,00)	99,89	
02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	96.880.000,00	87.925.000,00	(8.955.000,00)	90,76	
02.2.01.28.5.1	BELANJA OPERASI	96.880.000,00	87.925.000,00	(8.955.000,00)	90,76	
02.2.01.28.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.880.000,00	87.925.000,00	(8.955.000,00)	90,76	
02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	24.700.503.612,00	22.756.233.479,90	(1.944.270.132,10)	92,13	
02.2.01.29.5.1	BELANJA OPERASI	19.779.019.068,00	18.157.156.791,90	(1.621.862.276,10)	91,80	
02.2.01.29.5.1.01	Belanja Pegawai	3.943.134.000,00	3.686.168.467,00	(256.965.533,00)	93,48	
02.2.01.29.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.835.885.068,00	14.470.988.324,90	(1.364.896.743,10)	91,38	
02.2.01.29.5.2	BELANJA MODAL	4.921.484.544,00	4.599.076.688,00	(322.407.856,00)	93,45	
02.2.01.29.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.844.589.719,00	4.571.737.188,00	(272.852.531,00)	94,37	
02.2.01.29.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	76.894.825,00	27.339.500,00	(49.555.325,00)	35,55	
02.2.01.31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	559.176.000,00	557.896.000,00	(1.280.000,00)	99,77	
02.2.01.31.5.1	BELANJA OPERASI	37.280.000,00	36.000.000,00	(1.280.000,00)	96,57	
02.2.01.31.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.280.000,00	36.000.000,00	(1.280.000,00)	96,57	
02.2.01.31.5.2	BELANJA MODAL	521.896.000,00	521.896.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.31.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	521.896.000,00	521.896.000,00	0,00	100,00	
02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	37.531.412.913,00	35.965.658.520,06	(1.565.754.392,94)	95,83	
02.2.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	838.674.000,00	836.154.000,00	(2.520.000,00)	99,70	
02.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	47.520.000,00	45.000.000,00	(2.520.000,00)	94,70	
02.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.520.000,00	45.000.000,00	(2.520.000,00)	94,70	
02.2.02.04.5.2	BELANJA MODAL	791.154.000,00	791.154.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.04.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	791.154.000,00	791.154.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	1.663.620.000,00	1.660.440.000,00	(3.180.000,00)	99,81	
02.2.02.06.5.1	BELANJA OPERASI	57.180.000,00	54.000.000,00	(3.180.000,00)	94,44	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.02.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.180.000,00	54.000.000,00	(3.180.000,00)	94,44	
02.2.02.06.5.2	BELANJA MODAL	1.606.440.000,00	1.606.440.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.06.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.606.440.000,00	1.606.440.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	902.627.000,00	899.880.000,00	(2.747.000,00)	99,70	
02.2.02.12.5.1	BELANJA OPERASI	62.507.000,00	59.760.000,00	(2.747.000,00)	95,61	
02.2.02.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.507.000,00	59.760.000,00	(2.747.000,00)	95,61	
02.2.02.12.5.2	BELANJA MODAL	840.120.000,00	840.120.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.12.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	840.120.000,00	840.120.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	9.446.003.000,00	9.440.878.000,00	(5.125.000,00)	99,95	
02.2.02.14.5.1	BELANJA OPERASI	93.180.000,00	90.000.000,00	(3.180.000,00)	96,59	
02.2.02.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.180.000,00	90.000.000,00	(3.180.000,00)	96,59	
02.2.02.14.5.2	BELANJA MODAL	9.352.823.000,00	9.350.878.000,00	(1.945.000,00)	99,98	
02.2.02.14.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9.352.823.000,00	9.350.878.000,00	(1.945.000,00)	99,98	
02.2.02.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	301.550.000,00	300.590.000,00	(960.000,00)	99,68	
02.2.02.15.5.1	BELANJA OPERASI	15.960.000,00	15.000.000,00	(960.000,00)	93,98	
02.2.02.15.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.960.000,00	15.000.000,00	(960.000,00)	93,98	
02.2.02.15.5.2	BELANJA MODAL	285.590.000,00	285.590.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.15.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	285.590.000,00	285.590.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	53.639.000,00	52.799.000,00	(840.000,00)	98,43	
02.2.02.16.5.1	BELANJA OPERASI	12.840.000,00	12.000.000,00	(840.000,00)	93,46	
02.2.02.16.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.840.000,00	12.000.000,00	(840.000,00)	93,46	
02.2.02.16.5.2	BELANJA MODAL	40.799.000,00	40.799.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.16.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	40.799.000,00	40.799.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	301.550.000,00	300.590.000,00	(960.000,00)	99,68	
02.2.02.17.5.1	BELANJA OPERASI	15.960.000,00	15.000.000,00	(960.000,00)	93,98	
02.2.02.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.960.000,00	15.000.000,00	(960.000,00)	93,98	
02.2.02.17.5.2	BELANJA MODAL	285.590.000,00	285.590.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.17.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	285.590.000,00	285.590.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	350.000.000,00	345.494.000,00	(4.506.000,00)	98,71	
02.2.02.18.5.2	BELANJA MODAL	350.000.000,00	345.494.000,00	(4.506.000,00)	98,71	
02.2.02.18.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	350.000.000,00	345.494.000,00	(4.506.000,00)	98,71	
02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.196.121.001,00	1.192.511.000,00	(3.610.001,00)	99,70	
02.2.02.24.5.1	BELANJA OPERASI	50.860.000,00	48.000.000,00	(2.860.000,00)	94,38	
02.2.02.24.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.860.000,00	48.000.000,00	(2.860.000,00)	94,38	
02.2.02.24.5.2	BELANJA MODAL	1.145.261.001,00	1.144.511.000,00	(750.001,00)	99,93	
02.2.02.24.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.145.261.001,00	1.144.511.000,00	(750.001,00)	99,93	
02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	160.000.000,00	154.400.000,00	(5.600.000,00)	96,50	
02.2.02.32.5.1	BELANJA OPERASI	160.000.000,00	154.400.000,00	(5.600.000,00)	96,50	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.02.32.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	160.000.000,00	154.400.000,00	(5.600.000,00)	96,50	
02.2.02.36	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	253.388.300,00	226.304.500,00	(27.083.800,00)	89,31	
02.2.02.36.5.1	BELANJA OPERASI	253.388.300,00	226.304.500,00	(27.083.800,00)	89,31	
02.2.02.36.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	248.388.300,00	222.304.500,00	(26.083.800,00)	89,50	
02.2.02.36.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.000.000,00	4.000.000,00	(1.000.000,00)	80,00	
02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	7.120.750.000,00	7.024.500.000,00	(96.250.000,00)	98,65	
02.2.02.39.5.1	BELANJA OPERASI	7.120.750.000,00	7.024.500.000,00	(96.250.000,00)	98,65	
02.2.02.39.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.120.750.000,00	7.024.500.000,00	(96.250.000,00)	98,65	
02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	14.927.263.612,00	13.515.593.020,06	(1.411.670.591,94)	90,54	
02.2.02.42.5.1	BELANJA OPERASI	12.802.239.014,00	11.614.366.988,06	(1.187.872.025,94)	90,72	
02.2.02.42.5.1.01	Belanja Pegawai	3.208.078.000,00	3.158.590.000,00	(49.488.000,00)	98,46	
02.2.02.42.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.594.161.014,00	8.455.776.988,06	(1.138.384.025,94)	88,13	
02.2.02.42.5.2	BELANJA MODAL	2.125.024.598,00	1.901.226.032,00	(223.798.566,00)	89,47	
02.2.02.42.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.041.308.398,00	1.864.218.832,00	(177.089.566,00)	91,32	
02.2.02.42.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	83.716.200,00	37.007.200,00	(46.709.000,00)	44,21	
02.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	16.227.000,00	15.525.000,00	(702.000,00)	95,67	
02.2.02.43.5.1	BELANJA OPERASI	16.227.000,00	15.525.000,00	(702.000,00)	95,67	
02.2.02.43.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.227.000,00	15.525.000,00	(702.000,00)	95,67	
02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	7.308.612.750,00	7.149.010.250,00	(159.602.500,00)	97,82	
02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.249.075.000,00	1.234.401.250,00	(14.673.750,00)	98,83	
02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	66.000.750,00	52.587.000,00	(13.413.750,00)	79,68	
02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.000.750,00	52.587.000,00	(13.413.750,00)	79,68	
02.2.03.02.5.2	BELANJA MODAL	1.183.074.250,00	1.181.814.250,00	(1.260.000,00)	99,89	
02.2.03.02.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.183.074.250,00	1.181.814.250,00	(1.260.000,00)	99,89	
02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	369.000.000,00	299.542.000,00	(69.458.000,00)	81,18	
02.2.03.03.5.2	BELANJA MODAL	369.000.000,00	299.542.000,00	(69.458.000,00)	81,18	
02.2.03.03.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	369.000.000,00	299.542.000,00	(69.458.000,00)	81,18	
02.2.03.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	2.156.460.000,00	2.087.620.000,00	(68.840.000,00)	96,81	
02.2.03.11.5.1	BELANJA OPERASI	2.019.469.000,00	1.950.629.000,00	(68.840.000,00)	96,59	
02.2.03.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	247.069.000,00	255.229.000,00	8.160.000,00	103,30	
02.2.03.11.5.1.05	Belanja Hibah	1.772.400.000,00	1.695.400.000,00	(77.000.000,00)	95,66	
02.2.03.11.5.2	BELANJA MODAL	136.991.000,00	136.991.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.11.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	136.991.000,00	136.991.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	3.496.500.000,00	3.491.250.000,00	(5.250.000,00)	99,85	
02.2.03.15.5.1	BELANJA OPERASI	3.496.500.000,00	3.491.250.000,00	(5.250.000,00)	99,85	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.03.15.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.496.500.000,00	3.491.250.000,00	(5.250.000,00)	99,85	
02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	37.577.750,00	36.197.000,00	(1.380.750,00)	96,33	
02.2.03.18.5.1	BELANJA OPERASI	37.577.750,00	36.197.000,00	(1.380.750,00)	96,33	
02.2.03.18.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.577.750,00	36.197.000,00	(1.380.750,00)	96,33	
02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	95.260.000,00	94.860.000,00	(400.000,00)	99,58	
02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	95.260.000,00	94.860.000,00	(400.000,00)	99,58	
02.2.04.12.5.1	BELANJA OPERASI	95.260.000,00	94.860.000,00	(400.000,00)	99,58	
02.2.04.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.260.000,00	94.860.000,00	(400.000,00)	99,58	
02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	431.730.000,00	390.234.000,00	(41.496.000,00)	90,39	
02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	431.730.000,00	390.234.000,00	(41.496.000,00)	90,39	
02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	431.730.000,00	390.234.000,00	(41.496.000,00)	90,39	
02.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	431.730.000,00	390.234.000,00	(41.496.000,00)	90,39	
02.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	431.730.000,00	390.234.000,00	(41.496.000,00)	90,39	
03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	18.440.187.500,00	17.952.373.428,27	(487.814.071,73)	97,35	
03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	61.187.500,00	0,00	(61.187.500,00)	0	
03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	61.187.500,00	0,00	(61.187.500,00)	0	
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	61.187.500,00	0,00	(61.187.500,00)	0	
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.187.500,00	0,00	(61.187.500,00)	0	
03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.379.000.000,00	3.354.381.859,27	(24.618.140,73)	99,27	
03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	3.379.000.000,00	3.354.381.859,27	(24.618.140,73)	99,27	
03.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	3.379.000.000,00	3.354.381.859,27	(24.618.140,73)	99,27	
03.2.03.03.5.1.05	Belanja Hibah	3.379.000.000,00	3.354.381.859,27	(24.618.140,73)	99,27	
03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	15.000.000.000,00	14.597.991.569,00	(402.008.431,00)	97,32	
03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	15.000.000.000,00	14.597.991.569,00	(402.008.431,00)	97,32	
03.2.05.01.5.1	BELANJA OPERASI	590.326.900,00	447.861.400,00	(142.465.500,00)	75,87	
03.2.05.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	590.326.900,00	447.861.400,00	(142.465.500,00)	75,87	
03.2.05.01.5.2	BELANJA MODAL	14.409.673.100,00	14.150.130.169,00	(259.542.931,00)	98,20	
03.2.05.01.5.2.01	Belanja Modal Tanah	14.393.673.100,00	14.134.423.669,00	(259.249.431,00)	98,20	
03.2.05.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.000.000,00	15.706.500,00	(293.500,00)	98,17	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
04	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	66.119.700,00	47.548.500,00	(18.571.200,00)	71,91	
04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	66.119.700,00	47.548.500,00	(18.571.200,00)	71,91	
04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	32.310.000,00	20.210.000,00	(12.100.000,00)	62,55	
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	32.310.000,00	20.210.000,00	(12.100.000,00)	62,55	
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.310.000,00	20.210.000,00	(12.100.000,00)	62,55	
04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	33.809.700,00	27.338.500,00	(6.471.200,00)	80,86	
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	33.809.700,00	27.338.500,00	(6.471.200,00)	80,86	
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.809.700,00	27.338.500,00	(6.471.200,00)	80,86	
04	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	100,00	
04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.03.5.1.05	Belanja Hibah	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	100,00	
	SURPLUS / DEFISIT	(328.140.512.267,00)	(276.103.906.079,23)	52.036.606.187,77	0	
	PEMBIAYAAN					
00.0.00.00.6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	0,00	(5.952.642,45)	(5.952.642,45)	0	
00.0.00.00.6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	(5.952.642,45)	(5.952.642,45)	0	
	PEMBIAYAAN NETTO	0,00	(5.952.642,45)	(5.952.642,45)	0	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**(328.140.512.267,00)**	**(276.109.858.721,68)**	**52.030.653.545,32**	**0**	

BUPATI BANGLI,

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

DINAS KESEHATAN

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Bangli
Nomor : 2 Tahun 2023
Tanggal : 15 Agustus 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2022

Urusan Pemerintahan : 1.02 KESEHATAN

SKPD : 1-02.0-00.0-00.01 Dinas Kesehatan

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.4	**PENDAPATAN DAERAH**	14.808.041.000,00	11.044.315.179,02	(3.763.725.820,98)	74,58	
00.0.00.00.4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	14.808.041.000,00	11.044.315.179,02	(3.763.725.820,98)	74,58	
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	681.311.000,00	63.687.500,00	(617.623.500,00)	9,35	
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	14.126.730.000,00	10.980.627.679,02	(3.146.102.320,98)	77,73	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	131.791.936.118,00	115.665.903.136,75	(16.126.032.981,25)	87,76	
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	62.556.891.926,00	56.875.508.347,75	(5.681.383.578,25)	90,92	
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000,00	13.808.000,00	(6.192.000,00)	69,04	
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.000.000,00	13.808.000,00	(6.192.000,00)	69,04	
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	13.808.000,00	(6.192.000,00)	69,04	
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	13.808.000,00	(6.192.000,00)	69,04	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	42.571.779.309,00	42.012.063.870,00	(559.715.439,00)	98,69	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	42.571.779.309,00	42.012.063.870,00	(559.715.439,00)	98,69	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	42.571.779.309,00	42.012.063.870,00	(559.715.439,00)	98,69	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	42.571.779.309,00	42.012.063.870,00	(559.715.439,00)	98,69	
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	534.688.100,00	476.634.771,00	(58.053.329,00)	89,14	
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	33.774.300,00	33.294.228,00	(480.072,00)	98,58	
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	33.774.300,00	33.294.228,00	(480.072,00)	98,58	
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.774.300,00	33.294.228,00	(480.072,00)	98,58	
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	46.135.500,00	43.592.500,00	(2.543.000,00)	94,49	
01.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	11.579.400,00	10.657.500,00	(921.900,00)	92,04	
01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.579.400,00	10.657.500,00	(921.900,00)	92,04	
01.2.06.03.5.2	BELANJA MODAL	34.556.100,00	32.935.000,00	(1.621.100,00)	95,31	
01.2.06.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.556.100,00	32.935.000,00	(1.621.100,00)	95,31	
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	386.153.200,00	332.388.743,00	(53.764.457,00)	86,08	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	386.153.200,00	332.388.743,00	(53.764.457,00)	86,08	
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	386.153.200,00	332.388.743,00	(53.764.457,00)	86,08	
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	63.105.100,00	61.879.300,00	(1.225.800,00)	98,06	
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	63.105.100,00	61.879.300,00	(1.225.800,00)	98,06	
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.105.100,00	61.879.300,00	(1.225.800,00)	98,06	
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.520.000,00	5.480.000,00	(40.000,00)	99,28	
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	5.520.000,00	5.480.000,00	(40.000,00)	99,28	
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.520.000,00	5.480.000,00	(40.000,00)	99,28	
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30.792.000,00	24.350.000,00	(6.442.000,00)	79,08	
01.2.07.05	Pengadaan Mebel	22.852.000,00	20.300.000,00	(2.552.000,00)	88,83	
01.2.07.05.5.2	BELANJA MODAL	22.852.000,00	20.300.000,00	(2.552.000,00)	88,83	
01.2.07.05.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.852.000,00	20.300.000,00	(2.552.000,00)	88,83	
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.940.000,00	4.050.000,00	(3.890.000,00)	51,01	
01.2.07.06.5.1	BELANJA OPERASI	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	100,00	
01.2.07.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	100,00	
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	3.890.000,00	0,00	(3.890.000,00)	0	
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.890.000,00	0,00	(3.890.000,00)	0	
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	799.721.000,00	587.868.885,00	(211.852.115,00)	73,51	
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	26.860.000,00	26.860.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	26.860.000,00	26.860.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.860.000,00	26.860.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	469.601.000,00	269.148.885,00	(200.452.115,00)	57,31	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	469.601.000,00	269.148.885,00	(200.452.115,00)	57,31	
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	469.601.000,00	269.148.885,00	(200.452.115,00)	57,31	
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	303.260.000,00	291.860.000,00	(11.400.000,00)	96,24	
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	303.260.000,00	291.860.000,00	(11.400.000,00)	96,24	
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	303.260.000,00	291.860.000,00	(11.400.000,00)	96,24	
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	563.440.000,00	375.504.174,00	(187.935.826,00)	66,64	
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	503.440.000,00	331.770.174,00	(171.669.826,00)	65,90	
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	503.440.000,00	331.770.174,00	(171.669.826,00)	65,90	
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	503.440.000,00	331.770.174,00	(171.669.826,00)	65,90	
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.000.000,00	43.734.000,00	(16.266.000,00)	72,89	
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	43.734.000,00	(16.266.000,00)	72,89	
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	43.734.000,00	(16.266.000,00)	72,89	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	18.036.471.517,00	13.385.278.647,75	(4.651.192.869,25)	74,21	
01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	18.036.471.517,00	13.385.278.647,75	(4.651.192.869,25)	74,21	
01.2.10.01.5.1	BELANJA OPERASI	12.414.586.965,00	9.368.943.309,75	(3.045.643.655,25)	75,47	
01.2.10.01.5.1.01	Belanja Pegawai	9.929.007.128,00	7.891.911.959,00	(2.037.095.169,00)	79,48	
01.2.10.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.485.579.837,00	1.477.031.350,75	(1.008.548.486,25)	59,42	
01.2.10.01.5.2	BELANJA MODAL	5.621.884.552,00	4.016.335.338,00	(1.605.549.214,00)	71,44	
01.2.10.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.507.404.552,00	3.904.701.244,00	(1.602.703.308,00)	70,90	
01.2.10.01.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	114.480.000,00	111.634.094,00	(2.845.906,00)	97,51	
02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	67.350.303.192,00	57.218.764.178,00	(10.131.539.014,00)	84,96	
02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	8.863.440.580,00	5.060.100.142,00	(3.803.340.438,00)	57,09	
02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	200.000.000,00	198.223.471,00	(1.776.529,00)	99,11	
02.2.01.09.5.2	BELANJA MODAL	200.000.000,00	198.223.471,00	(1.776.529,00)	99,11	
02.2.01.09.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	198.223.471,00	(1.776.529,00)	99,11	
02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.095.000.000,00	1.082.251.662,00	(12.748.338,00)	98,84	
02.2.01.13.5.2	BELANJA MODAL	1.095.000.000,00	1.082.251.662,00	(12.748.338,00)	98,84	
02.2.01.13.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	835.000.000,00	825.300.000,00	(9.700.000,00)	98,84	
02.2.01.13.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	50.000.000,00	49.041.000,00	(959.000,00)	98,08	
02.2.01.13.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	210.000.000,00	207.910.662,00	(2.089.338,00)	99,01	
02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.548.989.180,00	1.057.647.800,00	(1.491.341.380,00)	41,49	
02.2.01.14.5.1	BELANJA OPERASI	7.955.680,00	6.030.500,00	(1.925.180,00)	75,80	
02.2.01.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.955.680,00	6.030.500,00	(1.925.180,00)	75,80	
02.2.01.14.5.2	BELANJA MODAL	2.541.033.500,00	1.051.617.300,00	(1.489.416.200,00)	41,39	
02.2.01.14.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.541.033.500,00	1.051.617.300,00	(1.489.416.200,00)	41,39	
02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	1.166.011.400,00	586.301.001,00	(579.710.399,00)	50,28	
02.2.01.16.5.1	BELANJA OPERASI	1.163.717.000,00	584.006.601,00	(579.710.399,00)	50,18	
02.2.01.16.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.163.717.000,00	584.006.601,00	(579.710.399,00)	50,18	
02.2.01.16.5.2	BELANJA MODAL	2.294.400,00	2.294.400,00	0,00	100,00	
02.2.01.16.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.294.400,00	2.294.400,00	0,00	100,00	
02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	3.793.440.000,00	2.076.873.958,00	(1.716.566.042,00)	54,75	
02.2.01.17.5.1	BELANJA OPERASI	3.793.440.000,00	2.076.873.958,00	(1.716.566.042,00)	54,75	
02.2.01.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.793.440.000,00	2.076.873.958,00	(1.716.566.042,00)	54,75	
02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	60.000.000,00	58.802.250,00	(1.197.750,00)	98,00	
02.2.01.18.5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	58.802.250,00	(1.197.750,00)	98,00	
02.2.01.18.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	58.802.250,00	(1.197.750,00)	98,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	58.106.233.612,00	51.929.346.860,00	(6.176.886.752,00)	89,37	
02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	663.415.200,00	636.950.535,00	(26.464.665,00)	96,01	
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	663.415.200,00	636.950.535,00	(26.464.665,00)	96,01	
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	663.415.200,00	636.950.535,00	(26.464.665,00)	96,01	
02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	328.798.000,00	258.486.800,00	(70.311.200,00)	78,62	
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	328.798.000,00	258.486.800,00	(70.311.200,00)	78,62	
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	328.798.000,00	258.486.800,00	(70.311.200,00)	78,62	
02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	238.384.500,00	222.665.000,00	(15.719.500,00)	93,41	
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	238.384.500,00	222.665.000,00	(15.719.500,00)	93,41	
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	238.384.500,00	222.665.000,00	(15.719.500,00)	93,41	
02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	789.059.600,00	763.003.100,00	(26.056.500,00)	96,70	
02.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	789.059.600,00	763.003.100,00	(26.056.500,00)	96,70	
02.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	789.059.600,00	763.003.100,00	(26.056.500,00)	96,70	
02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	372.946.000,00	348.455.000,00	(24.491.000,00)	93,43	
02.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	372.946.000,00	348.455.000,00	(24.491.000,00)	93,43	
02.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	372.946.000,00	348.455.000,00	(24.491.000,00)	93,43	
02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	172.863.300,00	158.074.600,00	(14.788.700,00)	91,44	
02.2.02.06.5.1	BELANJA OPERASI	172.863.300,00	158.074.600,00	(14.788.700,00)	91,44	
02.2.02.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	172.863.300,00	158.074.600,00	(14.788.700,00)	91,44	
02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	296.549.000,00	267.437.600,00	(29.111.400,00)	90,18	
02.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	296.549.000,00	267.437.600,00	(29.111.400,00)	90,18	
02.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	296.549.000,00	267.437.600,00	(29.111.400,00)	90,18	
02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	97.700.000,00	96.730.000,00	(970.000,00)	99,01	
02.2.02.08.5.1	BELANJA OPERASI	97.700.000,00	96.730.000,00	(970.000,00)	99,01	
02.2.02.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.700.000,00	96.730.000,00	(970.000,00)	99,01	
02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	71.450.000,00	70.080.000,00	(1.370.000,00)	98,08	
02.2.02.09.5.1	BELANJA OPERASI	71.450.000,00	70.080.000,00	(1.370.000,00)	98,08	
02.2.02.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.450.000,00	70.080.000,00	(1.370.000,00)	98,08	
02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	60.431.000,00	57.506.000,00	(2.925.000,00)	95,16	
02.2.02.10.5.1	BELANJA OPERASI	60.431.000,00	57.506.000,00	(2.925.000,00)	95,16	
02.2.02.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.431.000,00	57.506.000,00	(2.925.000,00)	95,16	
02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	103.530.000,00	89.980.000,00	(13.550.000,00)	86,91	
02.2.02.11.5.1	BELANJA OPERASI	103.530.000,00	89.980.000,00	(13.550.000,00)	86,91	
02.2.02.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.530.000,00	89.980.000,00	(13.550.000,00)	86,91	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	71.430.000,00	58.630.000,00	(12.800.000,00)	82,08	
02.2.02.12.5.1	BELANJA OPERASI	71.430.000,00	58.630.000,00	(12.800.000,00)	82,08	
02.2.02.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.430.000,00	58.630.000,00	(12.800.000,00)	82,08	
02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	878.324.000,00	767.901.900,00	(110.422.100,00)	87,43	
02.2.02.13.5.1	BELANJA OPERASI	878.324.000,00	767.901.900,00	(110.422.100,00)	87,43	
02.2.02.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	878.324.000,00	767.901.900,00	(110.422.100,00)	87,43	
02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	353.380.000,00	351.559.037,00	(1.820.963,00)	99,48	
02.2.02.14.5.1	BELANJA OPERASI	353.380.000,00	351.559.037,00	(1.820.963,00)	99,48	
02.2.02.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.380.000,00	3.339.000,00	(41.000,00)	98,79	
02.2.02.14.5.1.05	Belanja Hibah	350.000.000,00	348.220.037,00	(1.779.963,00)	99,49	
02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.007.612.750,00	855.245.670,00	(152.367.080,00)	84,88	
02.2.02.15.5.1	BELANJA OPERASI	1.007.612.750,00	855.245.670,00	(152.367.080,00)	84,88	
02.2.02.15.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.007.612.750,00	855.245.670,00	(152.367.080,00)	84,88	
02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	56.678.000,00	53.652.000,00	(3.026.000,00)	94,66	
02.2.02.16.5.1	BELANJA OPERASI	56.678.000,00	53.652.000,00	(3.026.000,00)	94,66	
02.2.02.16.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.678.000,00	53.652.000,00	(3.026.000,00)	94,66	
02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	641.512.500,00	516.438.885,00	(125.073.615,00)	80,50	
02.2.02.17.5.1	BELANJA OPERASI	641.512.500,00	516.438.885,00	(125.073.615,00)	80,50	
02.2.02.17.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	641.512.500,00	516.438.885,00	(125.073.615,00)	80,50	
02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	257.484.950,00	219.025.600,00	(38.459.350,00)	85,06	
02.2.02.18.5.1	BELANJA OPERASI	257.484.950,00	219.025.600,00	(38.459.350,00)	85,06	
02.2.02.18.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	257.484.950,00	219.025.600,00	(38.459.350,00)	85,06	
02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	106.245.000,00	79.869.000,00	(26.376.000,00)	75,17	
02.2.02.20.5.1	BELANJA OPERASI	106.245.000,00	79.869.000,00	(26.376.000,00)	75,17	
02.2.02.20.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.245.000,00	79.869.000,00	(26.376.000,00)	75,17	
02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	4.595.000,00	4.595.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.21.5.1	BELANJA OPERASI	4.595.000,00	4.595.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.21.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.595.000,00	4.595.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	39.900.000,00	39.750.000,00	(150.000,00)	99,62	
02.2.02.22.5.1	BELANJA OPERASI	39.900.000,00	39.750.000,00	(150.000,00)	99,62	
02.2.02.22.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.900.000,00	39.750.000,00	(150.000,00)	99,62	
02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	218.175.000,00	202.325.000,00	(15.850.000,00)	92,74	
02.2.02.23.5.1	BELANJA OPERASI	218.175.000,00	202.325.000,00	(15.850.000,00)	92,74	
02.2.02.23.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	218.175.000,00	202.325.000,00	(15.850.000,00)	92,74	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.02.24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	62.690.000,00	46.528.100,00	(16.161.900,00)	74,22	
02.2.02.24.5.1	BELANJA OPERASI	62.690.000,00	46.528.100,00	(16.161.900,00)	74,22	
02.2.02.24.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.690.000,00	46.528.100,00	(16.161.900,00)	74,22	
02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2.017.965.000,00	1.600.371.182,00	(417.593.818,00)	79,31	
02.2.02.25.5.1	BELANJA OPERASI	2.017.965.000,00	1.600.371.182,00	(417.593.818,00)	79,31	
02.2.02.25.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.017.965.000,00	1.600.371.182,00	(417.593.818,00)	79,31	
02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	47.059.495.112,00	42.673.510.200,00	(4.385.984.912,00)	90,68	
02.2.02.26.5.1	BELANJA OPERASI	47.059.495.112,00	42.673.510.200,00	(4.385.984.912,00)	90,68	
02.2.02.26.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.059.495.112,00	42.673.510.200,00	(4.385.984.912,00)	90,68	
02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	7.715.000,00	7.115.000,00	(600.000,00)	92,22	
02.2.02.28.5.1	BELANJA OPERASI	7.715.000,00	7.115.000,00	(600.000,00)	92,22	
02.2.02.28.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.715.000,00	7.115.000,00	(600.000,00)	92,22	
02.2.02.29	Penyelenggaraaan Kabupaten/Kota Sehat	33.361.000,00	30.188.000,00	(3.173.000,00)	90,49	
02.2.02.29.5.1	BELANJA OPERASI	33.361.000,00	30.188.000,00	(3.173.000,00)	90,49	
02.2.02.29.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.361.000,00	30.188.000,00	(3.173.000,00)	90,49	
02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.590.272.700,00	1.268.418.651,00	(321.854.049,00)	79,76	
02.2.02.33.5.1	BELANJA OPERASI	1.590.272.700,00	1.268.418.651,00	(321.854.049,00)	79,76	
02.2.02.33.5.1.01	Belanja Pegawai	484.897.031,00	364.187.200,00	(120.709.831,00)	75,11	
02.2.02.33.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.105.375.669,00	904.231.451,00	(201.144.218,00)	81,80	
02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	317.316.000,00	0,00	(317.316.000,00)	0	
02.2.02.35.5.1	BELANJA OPERASI	317.316.000,00	0,00	(317.316.000,00)	0	
02.2.02.35.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	317.316.000,00	0,00	(317.316.000,00)	0	
02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	21.955.000,00	21.955.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.36.5.1	BELANJA OPERASI	21.955.000,00	21.955.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.36.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.955.000,00	21.955.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	165.000.000,00	162.900.000,00	(2.100.000,00)	98,73	
02.2.02.39.5.1	BELANJA OPERASI	165.000.000,00	162.900.000,00	(2.100.000,00)	98,73	
02.2.02.39.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	165.000.000,00	162.900.000,00	(2.100.000,00)	98,73	
02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	48.000.000,00	46.385.500,00	(1.614.500,00)	96,64	
02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	48.000.000,00	46.385.500,00	(1.614.500,00)	96,64	
02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	48.000.000,00	46.385.500,00	(1.614.500,00)	96,64	
02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.000.000,00	46.385.500,00	(1.614.500,00)	96,64	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota	332.629.000,00	182.931.676,00	(149.697.324,00)	55,00	
02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	332.629.000,00	182.931.676,00	(149.697.324,00)	55,00	
02.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	332.629.000,00	182.931.676,00	(149.697.324,00)	55,00	
02.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	332.629.000,00	182.931.676,00	(149.697.324,00)	55,00	
03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	1.760.850.000,00	1.449.977.500,00	(310.872.500,00)	82,35	
03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota	31.000.000,00	30.920.000,00	(80.000,00)	99,74	
03.2.01.02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	31.000.000,00	30.920.000,00	(80.000,00)	99,74	
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	31.000.000,00	30.920.000,00	(80.000,00)	99,74	
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.000.000,00	30.920.000,00	(80.000,00)	99,74	
03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	1.538.850.000,00	1.233.250.000,00	(305.600.000,00)	80,14	
03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	1.538.850.000,00	1.233.250.000,00	(305.600.000,00)	80,14	
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.538.850.000,00	1.233.250.000,00	(305.600.000,00)	80,14	
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.538.850.000,00	1.233.250.000,00	(305.600.000,00)	80,14	
03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	191.000.000,00	185.807.500,00	(5.192.500,00)	97,28	
03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	191.000.000,00	185.807.500,00	(5.192.500,00)	97,28	
03.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	191.000.000,00	185.807.500,00	(5.192.500,00)	97,28	
03.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	191.000.000,00	185.807.500,00	(5.192.500,00)	97,28	
05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	123.891.000,00	121.653.111,00	(2.237.889,00)	98,19	
05.2.02	Pelaksadan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	110.777.000,00	108.550.311,00	(2.226.689,00)	97,99	
05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	110.777.000,00	108.550.311,00	(2.226.689,00)	97,99	
05.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	110.777.000,00	108.550.311,00	(2.226.689,00)	97,99	
05.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.777.000,00	108.550.311,00	(2.226.689,00)	97,99	
05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	13.114.000,00	13.102.800,00	(11.200,00)	99,91	
05.2.03.01	Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	13.114.000,00	13.102.800,00	(11.200,00)	99,91	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
05.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	13.114.000,00	13.102.800,00	(11.200,00)	99,91	
05.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.114.000,00	13.102.800,00	(11.200,00)	99,91	
	SURPLUS / DEFISIT	(116.983.895.118,00)	(104.621.587.957,73)	12.362.307.160,27	0	
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		**(116.983.895.118,00)**	**(104.621.587.957,73)**	**12.362.307.160,27**	**0**	

BUPATI BANGLI,

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Bangli
Nomor : 2 Tahun 2023
Tanggal : 15 Agustus 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2022

Urusan Pemerintahan : 1.02 KESEHATAN

SKPD : 1-02.0-00.0-00.02 Rumah Sakit Umum Daerah

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.4	**PENDAPATAN DAERAH**	55.715.306.480,00	50.316.833.106,24	(5.398.473.373,76)	90,31	
00.0.00.00.4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	55.715.306.480,00	50.316.833.106,24	(5.398.473.373,76)	90,31	
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	55.715.306.480,00	50.316.833.106,24	(5.398.473.373,76)	90,31	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	233.356.577.500,00	220.405.067.102,97	(12.951.510.397,03)	94,45	
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	139.144.778.033,00	131.559.882.030,55	(7.584.896.002,45)	94,55	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	39.455.268.622,00	38.835.905.391,00	(619.363.231,00)	98,43	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	39.455.268.622,00	38.835.905.391,00	(619.363.231,00)	98,43	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	39.455.268.622,00	38.835.905.391,00	(619.363.231,00)	98,43	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	39.455.268.622,00	38.835.905.391,00	(619.363.231,00)	98,43	
01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	99.689.509.411,00	92.723.976.639,55	(6.965.532.771,45)	93,01	
01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	99.689.509.411,00	92.723.976.639,55	(6.965.532.771,45)	93,01	
01.2.10.01.5.1	BELANJA OPERASI	59.037.517.411,00	52.986.370.816,55	(6.051.146.594,45)	89,75	
01.2.10.01.5.1.01	Belanja Pegawai	30.494.625.411,00	25.217.446.014,00	(5.277.179.397,00)	82,69	
01.2.10.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.542.892.000,00	27.768.924.802,55	(773.967.197,45)	97,29	
01.2.10.01.5.2	BELANJA MODAL	40.651.992.000,00	39.737.605.823,00	(914.386.177,00)	97,75	
01.2.10.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.018.000.000,00	1.795.054.823,00	(222.945.177,00)	88,95	
01.2.10.01.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	37.983.992.000,00	37.442.733.000,00	(541.259.000,00)	98,58	
01.2.10.01.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	0	
01.2.10.01.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	550.000.000,00	499.818.000,00	(50.182.000,00)	90,88	
02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	94.211.799.467,00	88.845.185.072,42	(5.366.614.394,58)	94,30	
02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	94.211.799.467,00	88.845.185.072,42	(5.366.614.394,58)	94,30	
02.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	69.665.799.467,00	64.892.624.773,42	(4.773.174.693,58)	93,15	
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.845.729.167,00	3.297.019.892,57	(1.548.709.274,43)	68,04	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.01.01.5.1.03	Belanja Bunga	4.845.729.167,00	3.297.019.892,57	(1.548.709.274,43)	68,04	
02.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	64.820.070.300,00	61.595.604.880,85	(3.224.465.419,15)	95,03	
02.2.01.01.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	64.820.070.300,00	61.595.604.880,85	(3.224.465.419,15)	95,03	
02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	834.000.000,00	803.550.300,00	(30.449.700,00)	96,35	
02.2.01.12.5.1	BELANJA OPERASI	300,00	0,00	(300,00)	0	
02.2.01.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300,00	0,00	(300,00)	0	
02.2.01.12.5.2	BELANJA MODAL	833.999.700,00	803.550.300,00	(30.449.400,00)	96,35	
02.2.01.12.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	833.999.700,00	803.550.300,00	(30.449.400,00)	96,35	
02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	23.712.000.000,00	23.149.009.999,00	(562.990.001,00)	97,63	
02.2.01.14.5.1	BELANJA OPERASI	546.000.000,00	546.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	546.000.000,00	546.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.14.5.2	BELANJA MODAL	23.166.000.000,00	22.603.009.999,00	(562.990.001,00)	97,57	
02.2.01.14.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.166.000.000,00	22.603.009.999,00	(562.990.001,00)	97,57	
	SURPLUS / DEFISIT	(177.641.271.020,00)	(170.088.233.996,73)	7.553.037.023,27	0	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**(177.641.271.020,00)**	**(170.088.233.996,73)**	**7.553.037.023,27**	**0**	

BUPATI BANGLI,

I WAYAN SANG NYOMAN SEDANA ARTA

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Bangli
Nomor : 2 Tahun 2023
Tanggal : 15 Agustus 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2022

Urusan Pemerintahan : 1.03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

SKPD : 1-03.1-04.0-00.01 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.4	**PENDAPATAN DAERAH**	1.052.800.000,00	574.261.940,00	(478.538.060,00)	54,55	
00.0.00.00.4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	1.052.800.000,00	574.261.940,00	(478.538.060,00)	54,55	
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	1.052.800.000,00	371.424.500,00	(681.375.500,00)	35,28	
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	202.837.440,00	202.837.440,00	0	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	117.288.422.373,00	106.482.095.115,80	(10.806.327.257,20)	90,79	
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	14.080.612.000,00	13.580.081.384,00	(500.530.616,00)	96,45	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.838.282.000,00	11.619.640.584,00	(218.641.416,00)	98,15	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.838.282.000,00	11.619.640.584,00	(218.641.416,00)	98,15	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	11.838.282.000,00	11.619.640.584,00	(218.641.416,00)	98,15	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	11.838.282.000,00	11.619.640.584,00	(218.641.416,00)	98,15	
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	877.557.600,00	834.331.598,00	(43.226.002,00)	95,07	
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.320.000,00	9.320.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	9.320.000,00	9.320.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.320.000,00	9.320.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	340.350.000,00	334.636.998,00	(5.713.002,00)	98,32	
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	340.350.000,00	334.636.998,00	(5.713.002,00)	98,32	
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	340.350.000,00	334.636.998,00	(5.713.002,00)	98,32	
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	471.277.800,00	441.711.600,00	(29.566.200,00)	93,73	
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	471.277.800,00	441.711.600,00	(29.566.200,00)	93,73	
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	471.277.800,00	441.711.600,00	(29.566.200,00)	93,73	
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	52.889.800,00	44.943.000,00	(7.946.800,00)	84,97	
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	52.889.800,00	44.943.000,00	(7.946.800,00)	84,97	
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.889.800,00	44.943.000,00	(7.946.800,00)	84,97	
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.720.000,00	3.720.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	3.720.000,00	3.720.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.720.000,00	3.720.000,00	0,00	100,00	
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	270.000.000,00	267.000.000,00	(3.000.000,00)	98,89	
01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	270.000.000,00	267.000.000,00	(3.000.000,00)	98,89	
01.2.07.01.5.2	BELANJA MODAL	270.000.000,00	267.000.000,00	(3.000.000,00)	98,89	
01.2.07.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	270.000.000,00	267.000.000,00	(3.000.000,00)	98,89	
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98.872.000,00	78.199.052,00	(20.672.948,00)	79,09	
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	61.650.000,00	42.928.052,00	(18.721.948,00)	69,63	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	61.650.000,00	42.928.052,00	(18.721.948,00)	69,63	
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.650.000,00	42.928.052,00	(18.721.948,00)	69,63	
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.222.000,00	20.271.000,00	(1.951.000,00)	91,22	
01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	17.544.700,00	15.771.000,00	(1.773.700,00)	89,89	
01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.544.700,00	15.771.000,00	(1.773.700,00)	89,89	
01.2.08.03.5.2	BELANJA MODAL	4.677.300,00	4.500.000,00	(177.300,00)	96,21	
01.2.08.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.677.300,00	4.500.000,00	(177.300,00)	96,21	
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	995.900.400,00	780.910.150,00	(214.990.250,00)	78,41	
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.920.000,00	34.076.100,00	(4.843.900,00)	87,55	
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	38.920.000,00	34.076.100,00	(4.843.900,00)	87,55	
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.920.000,00	34.076.100,00	(4.843.900,00)	87,55	
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	429.940.400,00	346.868.127,00	(83.072.273,00)	80,68	
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	429.940.400,00	346.868.127,00	(83.072.273,00)	80,68	
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	429.940.400,00	346.868.127,00	(83.072.273,00)	80,68	
01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	495.230.000,00	372.410.923,00	(122.819.077,00)	75,20	
01.2.09.03.5.1	BELANJA OPERASI	495.230.000,00	372.410.923,00	(122.819.077,00)	75,20	
01.2.09.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	495.230.000,00	372.410.923,00	(122.819.077,00)	75,20	
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.810.000,00	22.605.000,00	(4.205.000,00)	84,32	
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	26.810.000,00	22.605.000,00	(4.205.000,00)	84,32	
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.810.000,00	22.605.000,00	(4.205.000,00)	84,32	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.000,00	4.950.000,00	(50.000,00)	99,00	
01.2.09.09.5.2	BELANJA MODAL	5.000.000,00	4.950.000,00	(50.000,00)	99,00	
01.2.09.09.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	4.950.000,00	(50.000,00)	99,00	
02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	641.123.333,00	503.125.450,00	(137.997.883,00)	78,48	
02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	641.123.333,00	503.125.450,00	(137.997.883,00)	78,48	
02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	641.123.333,00	503.125.450,00	(137.997.883,00)	78,48	
02.2.02.14.5.1	BELANJA OPERASI	200.420.000,00	196.765.000,00	(3.655.000,00)	98,18	
02.2.02.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.420.000,00	196.765.000,00	(3.655.000,00)	98,18	
02.2.02.14.5.2	BELANJA MODAL	440.703.333,00	306.360.450,00	(134.342.883,00)	69,52	
02.2.02.14.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	440.703.333,00	306.360.450,00	(134.342.883,00)	69,52	
02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	125.000.000,00	112.722.000,00	(12.278.000,00)	90,18	
02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	125.000.000,00	112.722.000,00	(12.278.000,00)	90,18	
02.2.06.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	125.000.000,00	112.722.000,00	(12.278.000,00)	90,18	
02.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	125.000.000,00	112.722.000,00	(12.278.000,00)	90,18	
02.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	112.722.000,00	(12.278.000,00)	90,18	
03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	10.278.847.700,00	8.469.869.600,00	(1.808.978.100,00)	82,40	
03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	10.278.847.700,00	8.469.869.600,00	(1.808.978.100,00)	82,40	
03.2.01.19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	10.278.847.700,00	8.469.869.600,00	(1.808.978.100,00)	82,40	
03.2.01.19.5.1	BELANJA OPERASI	10.278.847.700,00	8.469.869.600,00	(1.808.978.100,00)	82,40	
03.2.01.19.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.278.847.700,00	8.469.869.600,00	(1.808.978.100,00)	82,40	
03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	3.393.631.000,00	2.609.000.000,00	(784.631.000,00)	76,88	
03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01	Survei dan Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	3.339.631.000,00	2.555.000.000,00	(784.631.000,00)	76,51	
03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	3.339.631.000,00	2.555.000.000,00	(784.631.000,00)	76,51	
03.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	3.339.631.000,00	2.555.000.000,00	(784.631.000,00)	76,51	
03.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.339.631.000,00	2.555.000.000,00	(784.631.000,00)	76,51	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
04	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	2.526.307.500,00	2.526.045.000,00	(262.500,00)	99,99	
04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	2.526.307.500,00	2.526.045.000,00	(262.500,00)	99,99	
04.2.01.03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	2.526.307.500,00	2.526.045.000,00	(262.500,00)	99,99	
04.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	2.526.307.500,00	2.526.045.000,00	(262.500,00)	99,99	
04.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.526.307.500,00	2.526.045.000,00	(262.500,00)	99,99	
05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	3.027.755.840,00	3.005.025.000,00	(22.730.840,00)	99,25	
05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.027.755.840,00	3.005.025.000,00	(22.730.840,00)	99,25	
05.2.01.12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	3.027.755.840,00	3.005.025.000,00	(22.730.840,00)	99,25	
05.2.01.12.5.1	BELANJA OPERASI	3.027.755.840,00	3.005.025.000,00	(22.730.840,00)	99,25	
05.2.01.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.027.755.840,00	3.005.025.000,00	(22.730.840,00)	99,25	
05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	500.000.000,00	397.899.000,00	(102.101.000,00)	79,58	
05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	500.000.000,00	397.899.000,00	(102.101.000,00)	79,58	
05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	500.000.000,00	397.899.000,00	(102.101.000,00)	79,58	
05.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	500.000.000,00	397.899.000,00	(102.101.000,00)	79,58	
05.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000,00	397.899.000,00	(102.101.000,00)	79,58	
06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	90.400.000,00	89.979.000,00	(421.000,00)	99,53	
06.2.01	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	90.400.000,00	89.979.000,00	(421.000,00)	99,53	
06.2.01.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	90.400.000,00	89.979.000,00	(421.000,00)	99,53	
06.2.01.07.5.2	BELANJA MODAL	90.400.000,00	89.979.000,00	(421.000,00)	99,53	
06.2.01.07.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	90.400.000,00	89.979.000,00	(421.000,00)	99,53	
07	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**	1.300.000.000,00	1.063.793.182,80	(236.206.817,20)	81,83	
07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota	1.300.000.000,00	1.063.793.182,80	(236.206.817,20)	81,83	
07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota	1.300.000.000,00	1.063.793.182,80	(236.206.817,20)	81,83	
07.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.300.000.000,00	1.063.793.182,80	(236.206.817,20)	81,83	
07.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000.000,00	1.063.793.182,80	(236.206.817,20)	81,83	
08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	23.036.335.000,00	22.952.214.300,00	(84.120.700,00)	99,63	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	23.036.335.000,00	22.952.214.300,00	(84.120.700,00)	99,63	
08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	646.995.000,00	570.039.800,00	(76.955.200,00)	88,11	
08.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	646.995.000,00	570.039.800,00	(76.955.200,00)	88,11	
08.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	646.995.000,00	570.039.800,00	(76.955.200,00)	88,11	
08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	16.937.511.500,00	17.881.660.160,00	944.148.660,00	105,57	
08.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	193.945.000,00	(6.055.000,00)	96,97	
08.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	193.945.000,00	(6.055.000,00)	96,97	
08.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	16.737.511.500,00	17.687.715.160,00	950.203.660,00	105,68	
08.2.01.02.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	16.737.511.500,00	17.687.715.160,00	950.203.660,00	105,68	
08.2.01.13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	5.451.828.500,00	4.500.514.340,00	(951.314.160,00)	82,55	
08.2.01.13.5.2	BELANJA MODAL	5.451.828.500,00	4.500.514.340,00	(951.314.160,00)	82,55	
08.2.01.13.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.451.828.500,00	4.500.514.340,00	(951.314.160,00)	82,55	
09	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	11.567.874.000,00	11.310.606.700,00	(257.267.300,00)	97,78	
09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	11.567.874.000,00	11.310.606.700,00	(257.267.300,00)	97,78	
09.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	100.000.000,00	99.191.000,00	(809.000,00)	99,19	
09.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	100.000.000,00	99.191.000,00	(809.000,00)	99,19	
09.2.01.01.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	99.191.000,00	(809.000,00)	99,19	
09.2.01.02	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	82.184.000,00	81.742.000,00	(442.000,00)	99,46	
09.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	82.184.000,00	81.742.000,00	(442.000,00)	99,46	
09.2.01.02.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	82.184.000,00	81.742.000,00	(442.000,00)	99,46	
09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	11.385.690.000,00	11.129.673.700,00	(256.016.300,00)	97,75	
09.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	985.690.000,00	960.602.000,00	(25.088.000,00)	97,45	
09.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	985.690.000,00	960.602.000,00	(25.088.000,00)	97,45	
09.2.01.03.5.2	BELANJA MODAL	10.400.000.000,00	10.169.071.700,00	(230.928.300,00)	97,78	
09.2.01.03.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.000.000.000,00	9.777.779.700,00	(222.220.300,00)	97,78	
09.2.01.03.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	200.000.000,00	193.424.000,00	(6.576.000,00)	96,71	
09.2.01.03.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	200.000.000,00	197.868.000,00	(2.132.000,00)	98,93	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	46.202.916.000,00	39.390.654.499,00	(6.812.261.501,00)	85,26	
10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	46.202.916.000,00	39.390.654.499,00	(6.812.261.501,00)	85,26	
10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	42.949.269.017,00	36.903.031.618,00	(6.046.237.399,00)	85,92	
10.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	258.463.017,00	257.380.000,00	(1.083.017,00)	99,58	
10.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	258.463.017,00	257.380.000,00	(1.083.017,00)	99,58	
10.2.01.08.5.2	BELANJA MODAL	42.690.806.000,00	36.645.651.618,00	(6.045.154.382,00)	85,84	
10.2.01.08.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	42.690.806.000,00	36.645.651.618,00	(6.045.154.382,00)	85,84	
10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	2.853.646.983,00	2.470.548.881,00	(383.098.102,00)	86,58	
10.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	2.837.046.983,00	2.453.948.881,00	(383.098.102,00)	86,50	
10.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.837.046.983,00	2.453.948.881,00	(383.098.102,00)	86,50	
10.2.01.11.5.2	BELANJA MODAL	16.600.000,00	16.600.000,00	0,00	100,00	
10.2.01.11.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.600.000,00	16.600.000,00	0,00	100,00	
10.2.01.23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	400.000.000,00	17.074.000,00	(382.926.000,00)	4,27	
10.2.01.23.5.2	BELANJA MODAL	400.000.000,00	17.074.000,00	(382.926.000,00)	4,27	
10.2.01.23.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	400.000.000,00	17.074.000,00	(382.926.000,00)	4,27	
12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	517.620.000,00	471.080.000,00	(46.540.000,00)	91,01	
12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	434.120.000,00	388.430.000,00	(45.690.000,00)	89,48	
12.2.01.01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	96.800.000,00	96.396.100,00	(403.900,00)	99,58	
12.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	96.800.000,00	96.396.100,00	(403.900,00)	99,58	
12.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.800.000,00	96.396.100,00	(403.900,00)	99,58	
12.2.01.03	Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	337.320.000,00	292.033.900,00	(45.286.100,00)	86,57	
12.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	259.640.000,00	215.332.900,00	(44.307.100,00)	82,94	
12.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	259.640.000,00	215.332.900,00	(44.307.100,00)	82,94	
12.2.01.03.5.2	BELANJA MODAL	77.680.000,00	76.701.000,00	(979.000,00)	98,74	
12.2.01.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	77.680.000,00	76.701.000,00	(979.000,00)	98,74	
12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	83.500.000,00	82.650.000,00	(850.000,00)	98,98	
12.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum bidang Penataan Ruang	83.500.000,00	82.650.000,00	(850.000,00)	98,98	
12.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	83.500.000,00	82.650.000,00	(850.000,00)	98,98	
12.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.500.000,00	82.650.000,00	(850.000,00)	98,98	
	SURPLUS / DEFISIT	(116.235.622.373,00)	(105.907.833.175,80)	10.327.789.197,20	0	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**(116.235.622.373,00)**	**(105.907.833.175,80)**	**10.327.789.197,20**	**0**	

BUPATI BANGLI,

I NYOMAN SEDANA ARTA

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Bangli
Nomor : 2 Tahun 2023
Tanggal : 15 Agustus 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2022

Urusan Pemerintahan : 1.05 KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

SKPD : 1-05.0-00.0-00.01 Satuan Polisi Pamong Praja

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	10.938.585.118,00	10.496.350.111,00	(442.235.007,00)	95,96	
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	10.005.953.700,00	9.568.630.611,00	(437.323.089,00)	95,63	
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	227.459.900,00	192.769.900,00	(34.690.000,00)	84,75	
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	225.072.400,00	190.422.400,00	(34.650.000,00)	84,60	
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	225.072.400,00	190.422.400,00	(34.650.000,00)	84,60	
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	225.072.400,00	190.422.400,00	(34.650.000,00)	84,60	
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.387.500,00	2.347.500,00	(40.000,00)	98,32	
01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	2.387.500,00	2.347.500,00	(40.000,00)	98,32	
01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.387.500,00	2.347.500,00	(40.000,00)	98,32	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.593.848.200,00	9.207.765.500,00	(386.082.700,00)	95,98	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.593.848.200,00	9.207.765.500,00	(386.082.700,00)	95,98	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	9.593.848.200,00	9.207.765.500,00	(386.082.700,00)	95,98	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	9.593.848.200,00	9.207.765.500,00	(386.082.700,00)	95,98	
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	54.491.100,00	52.441.270,00	(2.049.830,00)	96,24	
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.630.300,00	1.605.500,00	(24.800,00)	98,48	
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.630.300,00	1.605.500,00	(24.800,00)	98,48	
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.630.300,00	1.605.500,00	(24.800,00)	98,48	
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.398.200,00	5.350.000,00	(48.200,00)	99,11	
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	5.398.200,00	5.350.000,00	(48.200,00)	99,11	
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.398.200,00	5.350.000,00	(48.200,00)	99,11	
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	43.802.600,00	42.305.770,00	(1.496.830,00)	96,58	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	43.802.600,00	42.305.770,00	(1.496.830,00)	96,58	
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.802.600,00	42.305.770,00	(1.496.830,00)	96,58	
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.360.000,00	2.880.000,00	(480.000,00)	85,71	
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	3.360.000,00	2.880.000,00	(480.000,00)	85,71	
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.360.000,00	2.880.000,00	(480.000,00)	85,71	
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.984.500,00	11.736.793,00	(5.247.707,00)	69,10	
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.434.500,00	9.186.793,00	(5.247.707,00)	63,64	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	14.434.500,00	9.186.793,00	(5.247.707,00)	63,64	
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.434.500,00	9.186.793,00	(5.247.707,00)	63,64	
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	113.170.000,00	103.917.148,00	(9.252.852,00)	91,82	
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	103.170.000,00	93.917.148,00	(9.252.852,00)	91,03	
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	103.170.000,00	93.917.148,00	(9.252.852,00)	91,03	
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.170.000,00	93.917.148,00	(9.252.852,00)	91,03	
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	932.631.418,00	927.719.500,00	(4.911.918,00)	99,47	
02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	771.139.500,00	768.465.000,00	(2.674.500,00)	99,65	
02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	642.288.300,00	640.213.800,00	(2.074.500,00)	99,68	
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	642.288.300,00	640.213.800,00	(2.074.500,00)	99,68	
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	642.288.300,00	640.213.800,00	(2.074.500,00)	99,68	
02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	116.457.200,00	116.127.200,00	(330.000,00)	99,72	
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	116.457.200,00	116.127.200,00	(330.000,00)	99,72	
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.457.200,00	116.127.200,00	(330.000,00)	99,72	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	12.394.000,00	12.124.000,00	(270.000,00)	97,82	
02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	12.394.000,00	12.124.000,00	(270.000,00)	97,82	
02.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.394.000,00	12.124.000,00	(270.000,00)	97,82	
02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	151.491.918,00	149.292.000,00	(2.199.918,00)	98,55	
02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	18.588.000,00	18.408.000,00	(180.000,00)	99,03	
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	18.588.000,00	18.408.000,00	(180.000,00)	99,03	
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.588.000,00	18.408.000,00	(180.000,00)	99,03	
02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota	132.903.918,00	130.884.000,00	(2.019.918,00)	98,48	
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	132.903.918,00	130.884.000,00	(2.019.918,00)	98,48	
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.903.918,00	130.884.000,00	(2.019.918,00)	98,48	
02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	10.000.000,00	9.962.500,00	(37.500,00)	99,63	
02.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	10.000.000,00	9.962.500,00	(37.500,00)	99,63	
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.962.500,00	(37.500,00)	99,63	
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.962.500,00	(37.500,00)	99,63	
	SURPLUS / DEFISIT	(10.938.585.118,00)	(10.496.350.111,00)	442.235.007,00	0	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**(10.938.585.118,00)**	**(10.496.350.111,00)**	**442.235.007,00**	**0**	

BUPATI BANGLI,

I GUSTI NGURAH SANG NYOMAN SEDANA ARTA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Bangli
Nomor : 2 Tahun 2023
Tanggal : 15 Agustus 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2022

Urusan Pemerintahan : 1.05 KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

SKPD : 1-05.0-00.0-00.09 Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	7.004.560.800,00	6.779.586.077,00	(224.974.723,00)	96,79	
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	6.004.148.800,00	5.788.656.501,00	(215.492.299,00)	96,41	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.573.780.800,00	5.408.753.556,00	(165.027.244,00)	97,04	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.573.780.800,00	5.408.753.556,00	(165.027.244,00)	97,04	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	5.573.780.800,00	5.408.753.556,00	(165.027.244,00)	97,04	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	5.573.780.800,00	5.408.753.556,00	(165.027.244,00)	97,04	
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	70.702.500,00	63.313.950,00	(7.388.550,00)	89,55	
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	839.400,00	839.400,00	0,00	100,00	
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	839.400,00	839.400,00	0,00	100,00	
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	839.400,00	839.400,00	0,00	100,00	
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	539.800,00	539.800,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	539.800,00	539.800,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	539.800,00	539.800,00	0,00	100,00	
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48.108.200,00	41.755.700,00	(6.352.500,00)	86,80	
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	48.108.200,00	41.755.700,00	(6.352.500,00)	86,80	
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.108.200,00	41.755.700,00	(6.352.500,00)	86,80	
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.973.100,00	17.984.050,00	(989.050,00)	94,79	
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	18.973.100,00	17.984.050,00	(989.050,00)	94,79	
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.973.100,00	17.984.050,00	(989.050,00)	94,79	
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.222.000,00	1.175.000,00	(47.000,00)	96,15	
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	1.222.000,00	1.175.000,00	(47.000,00)	96,15	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.222.000,00	1.175.000,00	(47.000,00)	96,15	
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	44.100.000,00	15.873.000,00	(28.227.000,00)	35,99	
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.100.000,00	15.873.000,00	(28.227.000,00)	35,99	
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	44.100.000,00	15.873.000,00	(28.227.000,00)	35,99	
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.100.000,00	15.873.000,00	(28.227.000,00)	35,99	
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	118.231.000,00	109.950.310,00	(8.280.690,00)	93,00	
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.870.000,00	3.870.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.870.000,00	3.870.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.870.000,00	3.870.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.981.000,00	14.700.310,00	(8.280.690,00)	63,97	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	22.981.000,00	14.700.310,00	(8.280.690,00)	63,97	
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.981.000,00	14.700.310,00	(8.280.690,00)	63,97	
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	91.380.000,00	91.380.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	91.380.000,00	91.380.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.380.000,00	91.380.000,00	0,00	100,00	
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	197.334.500,00	190.765.685,00	(6.568.815,00)	96,67	
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	188.684.500,00	183.205.685,00	(5.478.815,00)	97,10	
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	188.684.500,00	183.205.685,00	(5.478.815,00)	97,10	
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	188.684.500,00	183.205.685,00	(5.478.815,00)	97,10	
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.600.000,00	7.560.000,00	(40.000,00)	99,47	
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	7.600.000,00	7.560.000,00	(40.000,00)	99,47	
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.600.000,00	7.560.000,00	(40.000,00)	99,47	
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.050.000,00	0,00	(1.050.000,00)	0	
01.2.09.10.5.1	BELANJA OPERASI	1.050.000,00	0,00	(1.050.000,00)	0	
01.2.09.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.050.000,00	0,00	(1.050.000,00)	0	
03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	694.557.000,00	685.090.376,00	(9.466.624,00)	98,64	
03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	694.557.000,00	685.090.376,00	(9.466.624,00)	98,64	
03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	30.765.000,00	29.715.000,00	(1.050.000,00)	96,59	
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	30.765.000,00	29.715.000,00	(1.050.000,00)	96,59	
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.765.000,00	29.715.000,00	(1.050.000,00)	96,59	
03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	446.190.000,00	440.730.000,00	(5.460.000,00)	98,78	
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	446.190.000,00	440.730.000,00	(5.460.000,00)	98,78	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	446.190.000,00	440.730.000,00	(5.460.000,00)	98,78	
03.2.02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	217.602.000,00	214.645.376,00	(2.956.624,00)	98,64	
03.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	17.602.000,00	17.552.000,00	(50.000,00)	99,72	
03.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.602.000,00	17.552.000,00	(50.000,00)	99,72	
03.2.02.07.5.2	BELANJA MODAL	200.000.000,00	197.093.376,00	(2.906.624,00)	98,55	
03.2.02.07.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	200.000.000,00	197.093.376,00	(2.906.624,00)	98,55	
04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	305.855.000,00	305.839.200,00	(15.800,00)	99,99	
04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	291.720.000,00	291.720.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	291.720.000,00	291.720.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	291.720.000,00	291.720.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	291.720.000,00	291.720.000,00	0,00	100,00	
04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	14.135.000,00	14.119.200,00	(15.800,00)	99,89	
04.2.02.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	14.135.000,00	14.119.200,00	(15.800,00)	99,89	
04.2.02.01.5.2	BELANJA MODAL	14.135.000,00	14.119.200,00	(15.800,00)	99,89	
04.2.02.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.135.000,00	14.119.200,00	(15.800,00)	99,89	
	SURPLUS / DEFISIT	(7.004.560.800,00)	(6.779.586.077,00)	224.974.723,00	0	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**(7.004.560.800,00)**	**(6.779.586.077,00)**	**224.974.723,00**	**0**	

BUPATI BANGLI

BUPATI BANGLI,

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Bangli
Nomor : 2 Tahun 2023
Tanggal : 15 Agustus 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2022

Urusan Pemerintahan : 1.06 SOSIAL

SKPD : 1-06.2-08.0-00.02 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	5.668.004.022,00	5.384.315.752,00	(283.688.270,00)	94,99	
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	5.177.810.322,00	4.953.060.524,00	(224.749.798,00)	95,66	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.332.747.472,00	4.196.383.988,00	(136.363.484,00)	96,85	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.332.747.472,00	4.196.383.988,00	(136.363.484,00)	96,85	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.332.747.472,00	4.196.383.988,00	(136.363.484,00)	96,85	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	4.332.747.472,00	4.196.383.988,00	(136.363.484,00)	96,85	
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	425.644.850,00	376.955.250,00	(48.689.600,00)	88,56	
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.018.500,00	1.986.000,00	(32.500,00)	98,39	
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.018.500,00	1.986.000,00	(32.500,00)	98,39	
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.018.500,00	1.986.000,00	(32.500,00)	98,39	
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.938.900,00	7.465.900,00	(473.000,00)	94,04	
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	7.938.900,00	7.465.900,00	(473.000,00)	94,04	
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.938.900,00	7.465.900,00	(473.000,00)	94,04	
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	379.759.700,00	342.934.850,00	(36.824.850,00)	90,30	
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	379.759.700,00	342.934.850,00	(36.824.850,00)	90,30	
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	379.759.700,00	342.934.850,00	(36.824.850,00)	90,30	
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.190.350,00	14.160.000,00	(10.030.350,00)	58,54	
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	24.190.350,00	14.160.000,00	(10.030.350,00)	58,54	
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.190.350,00	14.160.000,00	(10.030.350,00)	58,54	
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.420.000,00	5.520.000,00	(900.000,00)	85,98	
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	6.420.000,00	5.520.000,00	(900.000,00)	85,98	
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.420.000,00	5.520.000,00	(900.000,00)	85,98	
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.317.400,00	4.888.500,00	(428.900,00)	91,93	
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	5.317.400,00	4.888.500,00	(428.900,00)	91,93	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.317.400,00	4.888.500,00	(428.900,00)	91,93	
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	41.550.000,00	41.300.220,00	(249.780,00)	99,40	
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41.550.000,00	41.300.220,00	(249.780,00)	99,40	
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	41.550.000,00	41.300.220,00	(249.780,00)	99,40	
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.550.000,00	41.300.220,00	(249.780,00)	99,40	
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47.800.000,00	40.226.918,00	(7.573.082,00)	84,16	
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.450.000,00	5.253.000,00	(197.000,00)	96,39	
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	5.450.000,00	5.253.000,00	(197.000,00)	96,39	
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.450.000,00	5.253.000,00	(197.000,00)	96,39	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.050.000,00	19.673.918,00	(7.376.082,00)	72,73	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	27.050.000,00	19.673.918,00	(7.376.082,00)	72,73	
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.050.000,00	19.673.918,00	(7.376.082,00)	72,73	
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	100,00	
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	330.068.000,00	298.194.148,00	(31.873.852,00)	90,34	
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	277.168.000,00	246.324.148,00	(30.843.852,00)	88,87	
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	277.168.000,00	246.324.148,00	(30.843.852,00)	88,87	
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	277.168.000,00	246.324.148,00	(30.843.852,00)	88,87	
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.900.000,00	22.205.000,00	(695.000,00)	96,97	
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	22.900.000,00	22.205.000,00	(695.000,00)	96,97	
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.900.000,00	22.205.000,00	(695.000,00)	96,97	
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000,00	29.665.000,00	(335.000,00)	98,88	
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	29.665.000,00	(335.000,00)	98,88	
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	29.665.000,00	(335.000,00)	98,88	
02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	144.619.000,00	125.687.130,00	(18.931.870,00)	86,91	
02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	144.619.000,00	125.687.130,00	(18.931.870,00)	86,91	
02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	37.562.000,00	37.218.760,00	(343.240,00)	99,09	
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	37.562.000,00	37.218.760,00	(343.240,00)	99,09	
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.562.000,00	37.218.760,00	(343.240,00)	99,09	
02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	70.577.500,00	57.565.370,00	(13.012.130,00)	81,56	
02.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	70.577.500,00	57.565.370,00	(13.012.130,00)	81,56	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.577.500,00	57.565.370,00	(13.012.130,00)	81,56	
02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	36.479.500,00	30.903.000,00	(5.576.500,00)	84,71	
02.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	36.479.500,00	30.903.000,00	(5.576.500,00)	84,71	
02.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.479.500,00	30.903.000,00	(5.576.500,00)	84,71	
02	**PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	41.465.200,00	40.729.820,00	(735.380,00)	98,23	
02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	11.465.200,00	11.287.320,00	(177.880,00)	98,45	
02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	11.465.200,00	11.287.320,00	(177.880,00)	98,45	
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	11.465.200,00	11.287.320,00	(177.880,00)	98,45	
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.465.200,00	11.287.320,00	(177.880,00)	98,45	
02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	30.000.000,00	29.442.500,00	(557.500,00)	98,14	
02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	30.000.000,00	29.442.500,00	(557.500,00)	98,14	
02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	29.442.500,00	(557.500,00)	98,14	
02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	29.442.500,00	(557.500,00)	98,14	
03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	19.154.800,00	16.068.000,00	(3.086.800,00)	83,88	
03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	19.154.800,00	16.068.000,00	(3.086.800,00)	83,88	
03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	19.154.800,00	16.068.000,00	(3.086.800,00)	83,88	
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	19.154.800,00	16.068.000,00	(3.086.800,00)	83,88	
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.154.800,00	16.068.000,00	(3.086.800,00)	83,88	
04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	117.621.000,00	95.281.918,00	(22.339.082,00)	81,01	
04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	78.641.950,00	69.968.118,00	(8.673.832,00)	88,97	
04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	8.925.950,00	7.360.718,00	(1.565.232,00)	82,46	
04.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	8.925.950,00	7.360.718,00	(1.565.232,00)	82,46	
04.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	425.950,00	425.720,00	(230,00)	99,95	
04.2.01.03.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	8.500.000,00	6.934.998,00	(1.565.002,00)	81,59	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	69.716.000,00	62.607.400,00	(7.108.600,00)	89,80	
04.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	69.716.000,00	62.607.400,00	(7.108.600,00)	89,80	
04.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.716.000,00	62.607.400,00	(7.108.600,00)	89,80	
04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	38.979.050,00	25.313.800,00	(13.665.250,00)	64,94	
04.2.02.02	Pemberian Layanan Kedaruratan	13.540.050,00	0,00	(13.540.050,00)	0	
04.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	13.540.050,00	0,00	(13.540.050,00)	0	
04.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.540.050,00	0,00	(13.540.050,00)	0	
04.2.02.03	Penyediaan Permakanan	25.439.000,00	25.313.800,00	(125.200,00)	99,51	
04.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	25.439.000,00	25.313.800,00	(125.200,00)	99,51	
04.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.439.000,00	25.313.800,00	(125.200,00)	99,51	
05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	82.876.450,00	81.725.830,00	(1.150.620,00)	98,61	
05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	82.876.450,00	81.725.830,00	(1.150.620,00)	98,61	
05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	82.876.450,00	81.725.830,00	(1.150.620,00)	98,61	
05.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	82.876.450,00	81.725.830,00	(1.150.620,00)	98,61	
05.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.876.450,00	81.725.830,00	(1.150.620,00)	98,61	
06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	38.370.050,00	31.790.250,00	(6.579.800,00)	82,85	
06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	38.370.050,00	31.790.250,00	(6.579.800,00)	82,85	
06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	38.370.050,00	31.790.250,00	(6.579.800,00)	82,85	
06.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	38.370.050,00	31.790.250,00	(6.579.800,00)	82,85	
06.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.370.050,00	31.790.250,00	(6.579.800,00)	82,85	
06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	46.087.200,00	39.972.280,00	(6.114.920,00)	86,73	
06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	46.087.200,00	39.972.280,00	(6.114.920,00)	86,73	
06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	40.770.000,00	35.108.000,00	(5.662.000,00)	86,11	
06.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	40.770.000,00	35.108.000,00	(5.662.000,00)	86,11	
06.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.770.000,00	35.108.000,00	(5.662.000,00)	86,11	
06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5.317.200,00	4.864.280,00	(452.920,00)	91,48	
06.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	5.317.200,00	4.864.280,00	(452.920,00)	91,48	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
06.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.317.200,00	4.864.280,00	(452.920,00)	91,48	
	SURPLUS / DEFISIT	(5.668.004.022,00)	(5.384.315.752,00)	283.688.270,00	0	
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		**(5.668.004.022,00)**	**(5.384.315.752,00)**	**283.688.270,00**	**0**	

BUPATI BANGLI,

SANG N YOMAN SEDANA ARTA

URUSAN PEMERINTAHANWAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Bangli
Nomor : 2 Tahun 2023
Tanggal : 15 Agustus 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2022

Urusan Pemerintahan : 2.11 LINGKUNGAN HIDUP

SKPD : 2-11.0-00.0-00.01 Dinas Lingkungan Hidup

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.4	**PENDAPATAN DAERAH**	125.928.000,00	97.953.000,00	(27.975.000,00)	77,78	
00.0.00.00.4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	125.928.000,00	97.953.000,00	(27.975.000,00)	77,78	
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	125.928.000,00	88.953.000,00	(36.975.000,00)	70,64	
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	37.680.856.900,00	36.031.588.145,00	(1.649.268.755,00)	95,62	
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	26.358.247.175,00	25.336.316.680,00	(1.021.930.495,00)	96,12	
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.560.000,00	4.578.900,00	(981.100,00)	82,35	
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.350.000,00	4.038.900,00	(311.100,00)	92,85	
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.350.000,00	4.038.900,00	(311.100,00)	92,85	
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.350.000,00	4.038.900,00	(311.100,00)	92,85	
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.210.000,00	540.000,00	(670.000,00)	44,63	
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	1.210.000,00	540.000,00	(670.000,00)	44,63	
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.210.000,00	540.000,00	(670.000,00)	44,63	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25.347.954.700,00	24.547.254.357,00	(800.700.343,00)	96,84	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25.347.339.700,00	24.546.800.157,00	(800.539.543,00)	96,84	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	25.347.339.700,00	24.546.800.157,00	(800.539.543,00)	96,84	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	25.347.339.700,00	24.546.800.157,00	(800.539.543,00)	96,84	
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	615.000,00	454.200,00	(160.800,00)	73,85	
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	615.000,00	454.200,00	(160.800,00)	73,85	
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	615.000,00	454.200,00	(160.800,00)	73,85	
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	378.379.350,00	335.115.692,00	(43.263.658,00)	88,57	
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.022.500,00	3.618.600,00	(403.900,00)	89,96	
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.022.500,00	3.618.600,00	(403.900,00)	89,96	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.022.500,00	3.618.600,00	(403.900,00)	89,96	
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.742.000,00	18.374.940,00	(4.367.060,00)	80,80	
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	22.742.000,00	18.374.940,00	(4.367.060,00)	80,80	
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.742.000,00	18.374.940,00	(4.367.060,00)	80,80	
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	324.412.500,00	288.004.901,00	(36.407.599,00)	88,78	
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	324.412.500,00	288.004.901,00	(36.407.599,00)	88,78	
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	324.412.500,00	288.004.901,00	(36.407.599,00)	88,78	
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.582.350,00	17.497.251,00	(2.085.099,00)	89,35	
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	19.582.350,00	17.497.251,00	(2.085.099,00)	89,35	
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.582.350,00	17.497.251,00	(2.085.099,00)	89,35	
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.620.000,00	7.620.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	7.620.000,00	7.620.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.620.000,00	7.620.000,00	0,00	100,00	
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	118.053.125,00	115.623.005,00	(2.430.120,00)	97,94	
01.2.07.05	Pengadaan Mebel	26.562.500,00	25.718.700,00	(843.800,00)	96,82	
01.2.07.05.5.2	BELANJA MODAL	26.562.500,00	25.718.700,00	(843.800,00)	96,82	
01.2.07.05.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.562.500,00	25.718.700,00	(843.800,00)	96,82	
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	91.490.625,00	89.904.305,00	(1.586.320,00)	98,27	
01.2.07.06.5.1	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
01.2.07.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	90.290.625,00	88.704.305,00	(1.586.320,00)	98,24	
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	90.290.625,00	88.704.305,00	(1.586.320,00)	98,24	
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	97.170.000,00	86.221.052,00	(10.948.948,00)	88,73	
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	68.970.000,00	58.021.052,00	(10.948.948,00)	84,13	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	68.970.000,00	58.021.052,00	(10.948.948,00)	84,13	
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.970.000,00	58.021.052,00	(10.948.948,00)	84,13	
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	21.300.000,00	21.300.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	21.300.000,00	21.300.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.300.000,00	21.300.000,00	0,00	100,00	
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	411.130.000,00	247.523.674,00	(163.606.326,00)	60,21	
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	395.980.000,00	235.898.674,00	(160.081.326,00)	59,57	
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	395.980.000,00	235.898.674,00	(160.081.326,00)	59,57	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	395.980.000,00	235.898.674,00	(160.081.326,00)	59,57	
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.150.000,00	11.625.000,00	(3.525.000,00)	76,73	
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	15.150.000,00	11.625.000,00	(3.525.000,00)	76,73	
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.150.000,00	11.625.000,00	(3.525.000,00)	76,73	
03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	114.182.475,00	105.453.530,00	(8.728.945,00)	92,36	
03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	72.490.925,00	64.874.930,00	(7.615.995,00)	89,49	
03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	65.481.125,00	62.720.430,00	(2.760.695,00)	95,78	
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	15.481.125,00	12.789.300,00	(2.691.825,00)	82,61	
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.481.125,00	12.789.300,00	(2.691.825,00)	82,61	
03.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	50.000.000,00	49.931.130,00	(68.870,00)	99,86	
03.2.01.01.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	50.000.000,00	49.931.130,00	(68.870,00)	99,86	
03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	7.009.800,00	2.154.500,00	(4.855.300,00)	30,74	
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	7.009.800,00	2.154.500,00	(4.855.300,00)	30,74	
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.009.800,00	2.154.500,00	(4.855.300,00)	30,74	
03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	30.000.000,00	29.424.000,00	(576.000,00)	98,08	
03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	30.000.000,00	29.424.000,00	(576.000,00)	98,08	
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	29.424.000,00	(576.000,00)	98,08	
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	29.424.000,00	(576.000,00)	98,08	
03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	11.691.550,00	11.154.600,00	(536.950,00)	95,41	
03.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	11.691.550,00	11.154.600,00	(536.950,00)	95,41	
03.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	11.691.550,00	11.154.600,00	(536.950,00)	95,41	
03.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.691.550,00	11.154.600,00	(536.950,00)	95,41	
04	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	4.314.814.100,00	4.036.533.169,00	(278.280.931,00)	93,55	
04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	4.314.814.100,00	4.036.533.169,00	(278.280.931,00)	93,55	
04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	4.314.814.100,00	4.036.533.169,00	(278.280.931,00)	93,55	
04.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	1.057.275.100,00	950.564.696,00	(106.710.404,00)	89,91	
04.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.057.275.100,00	950.564.696,00	(106.710.404,00)	89,91	
04.2.01.04.5.2	BELANJA MODAL	3.257.539.000,00	3.085.968.473,00	(171.570.527,00)	94,73	
04.2.01.04.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.857.539.000,00	2.687.922.473,00	(169.616.527,00)	94,06	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
04.2.01.04.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	400.000.000,00	398.046.000,00	(1.954.000,00)	99,51	
05	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	521.565.300,00	506.033.600,00	(15.531.700,00)	97,02	
05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	521.565.300,00	506.033.600,00	(15.531.700,00)	97,02	
05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	521.565.300,00	506.033.600,00	(15.531.700,00)	97,02	
05.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	22.287.750,00	22.162.750,00	(125.000,00)	99,44	
05.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.287.750,00	22.162.750,00	(125.000,00)	99,44	
05.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	499.277.550,00	483.870.850,00	(15.406.700,00)	96,91	
05.2.01.02.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	499.277.550,00	483.870.850,00	(15.406.700,00)	96,91	
06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	81.365.000,00	81.070.000,00	(295.000,00)	99,64	
06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	81.365.000,00	81.070.000,00	(295.000,00)	99,64	
06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	81.365.000,00	81.070.000,00	(295.000,00)	99,64	
06.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	81.365.000,00	81.070.000,00	(295.000,00)	99,64	
06.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.365.000,00	81.070.000,00	(295.000,00)	99,64	
09	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	49.014.400,00	46.399.000,00	(2.615.400,00)	94,66	
09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	49.014.400,00	46.399.000,00	(2.615.400,00)	94,66	
09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	49.014.400,00	46.399.000,00	(2.615.400,00)	94,66	
09.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	49.014.400,00	46.399.000,00	(2.615.400,00)	94,66	
09.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.014.400,00	46.399.000,00	(2.615.400,00)	94,66	
10	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	23.290.000,00	23.200.000,00	(90.000,00)	99,61	
10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	23.290.000,00	23.200.000,00	(90.000,00)	99,61	
10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	23.290.000,00	23.200.000,00	(90.000,00)	99,61	
10.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	23.290.000,00	23.200.000,00	(90.000,00)	99,61	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
10.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.290.000,00	23.200.000,00	(90.000,00)	99,61	
11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	6.218.378.450,00	5.896.582.166,00	(321.796.284,00)	94,83	
11.2.01	Pengelolaan Sampah	6.218.378.450,00	5.896.582.166,00	(321.796.284,00)	94,83	
11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	5.321.168.250,00	5.038.479.271,00	(282.688.979,00)	94,69	
11.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	5.321.168.250,00	5.038.479.271,00	(282.688.979,00)	94,69	
11.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.321.168.250,00	5.038.479.271,00	(282.688.979,00)	94,69	
11.2.01.04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	52.634.000,00	48.734.770,00	(3.899.230,00)	92,59	
11.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	52.634.000,00	48.734.770,00	(3.899.230,00)	92,59	
11.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.634.000,00	48.734.770,00	(3.899.230,00)	92,59	
11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	844.576.200,00	809.368.125,00	(35.208.075,00)	95,83	
11.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	303.818.200,00	294.244.875,00	(9.573.325,00)	96,85	
11.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	303.818.200,00	294.244.875,00	(9.573.325,00)	96,85	
11.2.01.07.5.2	BELANJA MODAL	540.758.000,00	515.123.250,00	(25.634.750,00)	95,26	
11.2.01.07.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	540.758.000,00	515.123.250,00	(25.634.750,00)	95,26	
	SURPLUS / DEFISIT	(37.554.928.900,00)	(35.933.635.145,00)	1.621.293.755,00	0	
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		**(37.554.928.900,00)**	**(35.933.635.145,00)**	**1.621.293.755,00**	**0**	

BUPATI BANGLI,

I GANG NYOMAN SEDANA ARTA

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Bangli
Nomor : 2 Tahun 2023
Tanggal : 15 Agustus 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2022

Urusan Pemerintahan : 2.12 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

SKPD : 2-12.0-00.0-00.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	6.070.925.724,00	5.907.708.605,00	(163.217.119,00)	97,31	
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	4.872.857.800,00	4.782.796.255,00	(90.061.545,00)	98,15	
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.847.500,00	4.670.000,00	(177.500,00)	96,34	
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.847.500,00	4.670.000,00	(177.500,00)	96,34	
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	4.847.500,00	4.670.000,00	(177.500,00)	96,34	
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.847.500,00	4.670.000,00	(177.500,00)	96,34	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.310.307.800,00	4.286.244.574,00	(24.063.226,00)	99,44	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.310.307.800,00	4.286.244.574,00	(24.063.226,00)	99,44	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.310.307.800,00	4.286.244.574,00	(24.063.226,00)	99,44	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	4.310.307.800,00	4.286.244.574,00	(24.063.226,00)	99,44	
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	187.049.400,00	162.042.600,00	(25.006.800,00)	86,63	
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.406.900,00	21.174.800,00	(232.100,00)	98,92	
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	21.406.900,00	21.174.800,00	(232.100,00)	98,92	
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.406.900,00	21.174.800,00	(232.100,00)	98,92	
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.115.700,00	7.590.300,00	(1.525.400,00)	83,27	
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	8.015.700,00	7.590.300,00	(425.400,00)	94,69	
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.015.700,00	7.590.300,00	(425.400,00)	94,69	
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	0	
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	0	
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	123.281.800,00	100.932.500,00	(22.349.300,00)	81,87	
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	123.281.800,00	100.932.500,00	(22.349.300,00)	81,87	
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.281.800,00	100.932.500,00	(22.349.300,00)	81,87	
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.625.000,00	18.725.000,00	(900.000,00)	95,41	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	19.625.000,00	18.725.000,00	(900.000,00)	95,41	
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.625.000,00	18.725.000,00	(900.000,00)	95,41	
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.620.000,00	8.620.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	8.620.000,00	8.620.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.620.000,00	8.620.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	211.200.000,00	201.055.981,00	(10.144.019,00)	95,20	
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	53.950.000,00	43.805.981,00	(10.144.019,00)	81,20	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	53.950.000,00	43.805.981,00	(10.144.019,00)	81,20	
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.950.000,00	43.805.981,00	(10.144.019,00)	81,20	
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	153.850.000,00	153.850.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	153.850.000,00	153.850.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	153.850.000,00	153.850.000,00	0,00	100,00	
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	159.453.100,00	128.783.100,00	(30.670.000,00)	80,77	
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	105.479.700,00	91.884.100,00	(13.595.600,00)	87,11	
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	105.479.700,00	91.884.100,00	(13.595.600,00)	87,11	
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.479.700,00	91.884.100,00	(13.595.600,00)	87,11	
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	53.973.400,00	36.899.000,00	(17.074.400,00)	68,37	
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	33.973.400,00	17.475.000,00	(16.498.400,00)	51,44	
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.973.400,00	17.475.000,00	(16.498.400,00)	51,44	
01.2.09.06.5.2	BELANJA MODAL	20.000.000,00	19.424.000,00	(576.000,00)	97,12	
01.2.09.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	19.424.000,00	(576.000,00)	97,12	
02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	669.462.900,00	644.676.150,00	(24.786.750,00)	96,30	
02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	20.400.000,00	19.300.000,00	(1.100.000,00)	94,61	
02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	20.400.000,00	19.300.000,00	(1.100.000,00)	94,61	
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	20.400.000,00	19.300.000,00	(1.100.000,00)	94,61	
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.400.000,00	19.300.000,00	(1.100.000,00)	94,61	
02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	303.862.900,00	296.008.400,00	(7.854.500,00)	97,42	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.02.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	303.862.900,00	296.008.400,00	(7.854.500,00)	97,42	
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	303.862.900,00	296.008.400,00	(7.854.500,00)	97,42	
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	303.862.900,00	296.008.400,00	(7.854.500,00)	97,42	
02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	345.200.000,00	329.367.750,00	(15.832.250,00)	95,41	
02.2.03.02	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	345.200.000,00	329.367.750,00	(15.832.250,00)	95,41	
02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	345.200.000,00	329.367.750,00	(15.832.250,00)	95,41	
02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	345.200.000,00	329.367.750,00	(15.832.250,00)	95,41	
03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	309.587.100,00	287.891.000,00	(21.696.100,00)	92,99	
03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	165.079.500,00	147.022.500,00	(18.057.000,00)	89,06	
03.2.01.05	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	165.079.500,00	147.022.500,00	(18.057.000,00)	89,06	
03.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	165.079.500,00	147.022.500,00	(18.057.000,00)	89,06	
03.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	165.079.500,00	147.022.500,00	(18.057.000,00)	89,06	
03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	144.507.600,00	140.868.500,00	(3.639.100,00)	97,48	
03.2.02.03	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	23.980.000,00	23.903.500,00	(76.500,00)	99,68	
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	23.980.000,00	23.903.500,00	(76.500,00)	99,68	
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.980.000,00	23.903.500,00	(76.500,00)	99,68	
03.2.02.04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	120.527.600,00	116.965.000,00	(3.562.600,00)	97,04	
03.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	120.527.600,00	116.965.000,00	(3.562.600,00)	97,04	
03.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.527.600,00	116.965.000,00	(3.562.600,00)	97,04	
04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	194.017.924,00	192.345.200,00	(1.672.724,00)	99,14	
04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	22.220.000,00	21.950.200,00	(269.800,00)	98,79	
04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	17.050.000,00	17.050.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	17.050.000,00	17.050.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.050.000,00	17.050.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	5.170.000,00	4.900.200,00	(269.800,00)	94,78	
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	5.170.000,00	4.900.200,00	(269.800,00)	94,78	
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.170.000,00	4.900.200,00	(269.800,00)	94,78	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	146.630.000,00	145.985.000,00	(645.000,00)	99,56	
04.2.03.05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	146.630.000,00	145.985.000,00	(645.000,00)	99,56	
04.2.03.05.5.1	BELANJA OPERASI	146.630.000,00	145.985.000,00	(645.000,00)	99,56	
04.2.03.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	146.630.000,00	145.985.000,00	(645.000,00)	99,56	
04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	25.167.924,00	24.410.000,00	(757.924,00)	96,99	
04.2.04.01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	25.167.924,00	24.410.000,00	(757.924,00)	96,99	
04.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	25.167.924,00	24.410.000,00	(757.924,00)	96,99	
04.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.167.924,00	24.410.000,00	(757.924,00)	96,99	
05	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	0	
05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	0	
05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	0	
05.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	0	
05.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	0	
	SURPLUS / DEFISIT	(6.070.925.724,00)	(5.907.708.605,00)	163.217.119,00	0	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**(6.070.925.724,00)**	**(5.907.708.605,00)**	**163.217.119,00**	**0**	

BUPATI BANGLI,

I GUSTI PUTU SANG NYOMAN SEDANA ARTA

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Bangli
Nomor : 2 Tahun 2023
Tanggal : 15 Agustus 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2022

Urusan Pemerintahan : 2.13 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

SKPD : 2-13.2-14.0-00.09 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	10.185.467.570,00	8.543.581.002,00	(1.641.886.568,00)	83,88	
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	5.106.138.420,00	4.851.456.093,00	(254.682.327,00)	95,01	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.317.025.120,00	4.224.369.232,00	(92.655.888,00)	97,85	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.317.025.120,00	4.224.369.232,00	(92.655.888,00)	97,85	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.317.025.120,00	4.224.369.232,00	(92.655.888,00)	97,85	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	4.317.025.120,00	4.224.369.232,00	(92.655.888,00)	97,85	
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	398.409.300,00	326.217.535,00	(72.191.765,00)	81,88	
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.571.750,00	1.535.685,00	(36.065,00)	97,71	
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.571.750,00	1.535.685,00	(36.065,00)	97,71	
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.571.750,00	1.535.685,00	(36.065,00)	97,71	
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.075.500,00	26.875.500,00	(1.200.000,00)	95,73	
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	28.075.500,00	26.875.500,00	(1.200.000,00)	95,73	
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.075.500,00	26.875.500,00	(1.200.000,00)	95,73	
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	337.331.500,00	271.740.450,00	(65.591.050,00)	80,56	
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	337.331.500,00	271.740.450,00	(65.591.050,00)	80,56	
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	337.331.500,00	271.740.450,00	(65.591.050,00)	80,56	
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.952.550,00	14.733.900,00	(5.218.650,00)	73,84	
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	19.952.550,00	14.733.900,00	(5.218.650,00)	73,84	
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.952.550,00	14.733.900,00	(5.218.650,00)	73,84	
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.940.000,00	8.940.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	8.940.000,00	8.940.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.940.000,00	8.940.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.538.000,00	2.392.000,00	(146.000,00)	94,25	
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	2.538.000,00	2.392.000,00	(146.000,00)	94,25	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.538.000,00	2.392.000,00	(146.000,00)	94,25	
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72.770.000,00	40.160.888,00	(32.609.112,00)	55,19	
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.670.000,00	10.670.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	10.670.000,00	10.670.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.670.000,00	10.670.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	52.500.000,00	19.890.888,00	(32.609.112,00)	37,89	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	52.500.000,00	19.890.888,00	(32.609.112,00)	37,89	
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.500.000,00	19.890.888,00	(32.609.112,00)	37,89	
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	317.934.000,00	260.708.438,00	(57.225.562,00)	82,00	
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	284.434.000,00	229.803.438,00	(54.630.562,00)	80,79	
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	284.434.000,00	229.803.438,00	(54.630.562,00)	80,79	
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	284.434.000,00	229.803.438,00	(54.630.562,00)	80,79	
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.500.000,00	30.905.000,00	(2.595.000,00)	92,25	
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	33.500.000,00	30.905.000,00	(2.595.000,00)	92,25	
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.500.000,00	30.905.000,00	(2.595.000,00)	92,25	
02	**PROGRAM PENATAAN DESA**	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	587.200.000,00	532.503.868,00	(54.696.132,00)	90,69	
02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	587.200.000,00	532.503.868,00	(54.696.132,00)	90,69	
02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	553.165.000,00	505.462.750,00	(47.702.250,00)	91,38	
02.2.02.11.5.1	BELANJA OPERASI	553.165.000,00	505.462.750,00	(47.702.250,00)	91,38	
02.2.02.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	553.165.000,00	505.462.750,00	(47.702.250,00)	91,38	
02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	34.035.000,00	27.041.118,00	(6.993.882,00)	79,45	
02.2.02.13.5.1	BELANJA OPERASI	34.035.000,00	27.041.118,00	(6.993.882,00)	79,45	
02.2.02.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.035.000,00	27.041.118,00	(6.993.882,00)	79,45	
03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	1.546.472.000,00	987.927.691,00	(558.544.309,00)	63,88	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	397.241.000,00	296.492.915,00	(100.748.085,00)	74,64	
03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4.375.000,00	4.148.000,00	(227.000,00)	94,81	
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.375.000,00	4.148.000,00	(227.000,00)	94,81	
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.375.000,00	4.148.000,00	(227.000,00)	94,81	
03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	25.000.000,00	16.720.920,00	(8.279.080,00)	66,88	
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	16.720.920,00	(8.279.080,00)	66,88	
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	16.720.920,00	(8.279.080,00)	66,88	
03.2.01.03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	60.000.000,00	33.890.000,00	(26.110.000,00)	56,48	
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	33.890.000,00	(26.110.000,00)	56,48	
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	33.890.000,00	(26.110.000,00)	56,48	
03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang	70.640.000,00	49.997.995,00	(20.642.005,00)	70,78	
03.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	70.640.000,00	49.997.995,00	(20.642.005,00)	70,78	
03.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.640.000,00	49.997.995,00	(20.642.005,00)	70,78	
03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	62.400.000,00	59.160.000,00	(3.240.000,00)	94,81	
03.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	62.400.000,00	59.160.000,00	(3.240.000,00)	94,81	
03.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.400.000,00	59.160.000,00	(3.240.000,00)	94,81	
03.2.01.07	Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK	81.000.000,00	47.278.000,00	(33.722.000,00)	58,37	
03.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	81.000.000,00	47.278.000,00	(33.722.000,00)	58,37	
03.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.000.000,00	47.278.000,00	(33.722.000,00)	58,37	
03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	93.826.000,00	85.298.000,00	(8.528.000,00)	90,91	
03.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	93.826.000,00	85.298.000,00	(8.528.000,00)	90,91	
03.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.826.000,00	85.298.000,00	(8.528.000,00)	90,91	
03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	345.600.000,00	345.534.000,00	(66.000,00)	99,98	
03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	345.600.000,00	345.534.000,00	(66.000,00)	99,98	
03.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	345.600.000,00	345.534.000,00	(66.000,00)	99,98	
03.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	345.600.000,00	345.534.000,00	(66.000,00)	99,98	
03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	510.381.000,00	154.599.776,00	(355.781.224,00)	30,29	
03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	9.000.000,00	5.100.000,00	(3.900.000,00)	56,67	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	9.000.000,00	5.100.000,00	(3.900.000,00)	56,67	
03.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	5.100.000,00	(3.900.000,00)	56,67	
03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	437.896.000,00	96.127.850,00	(341.768.150,00)	21,95	
03.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	437.896.000,00	96.127.850,00	(341.768.150,00)	21,95	
03.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	437.896.000,00	96.127.850,00	(341.768.150,00)	21,95	
03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	54.485.000,00	44.496.926,00	(9.988.074,00)	81,67	
03.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	169.000,00	(1.331.000,00)	11,27	
03.2.03.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	169.000,00	(1.331.000,00)	11,27	
03.2.03.06.5.2	BELANJA MODAL	52.985.000,00	44.327.926,00	(8.657.074,00)	83,66	
03.2.03.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.000.000,00	41.727.926,00	(7.272.074,00)	85,16	
03.2.03.06.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.985.000,00	2.600.000,00	(1.385.000,00)	65,24	
03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	9.000.000,00	8.875.000,00	(125.000,00)	98,61	
03.2.03.08.5.1	BELANJA OPERASI	9.000.000,00	8.875.000,00	(125.000,00)	98,61	
03.2.03.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	8.875.000,00	(125.000,00)	98,61	
03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	293.250.000,00	191.301.000,00	(101.949.000,00)	65,23	
03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	293.250.000,00	191.301.000,00	(101.949.000,00)	65,23	
03.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	293.250.000,00	191.301.000,00	(101.949.000,00)	65,23	
03.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	293.250.000,00	191.301.000,00	(101.949.000,00)	65,23	
04	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	336.000.000,00	295.398.000,00	(40.602.000,00)	87,92	
04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa	336.000.000,00	295.398.000,00	(40.602.000,00)	87,92	
04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	87.745.000,00	85.050.000,00	(2.695.000,00)	96,93	
04.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	87.745.000,00	85.050.000,00	(2.695.000,00)	96,93	
04.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.745.000,00	85.050.000,00	(2.695.000,00)	96,93	
04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	28.000.000,00	27.867.000,00	(133.000,00)	99,53	
04.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	28.000.000,00	27.867.000,00	(133.000,00)	99,53	
04.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	27.867.000,00	(133.000,00)	99,53	
04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	136.160.000,00	111.550.000,00	(24.610.000,00)	81,93	
04.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	136.160.000,00	111.550.000,00	(24.610.000,00)	81,93	
04.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.160.000,00	111.550.000,00	(24.610.000,00)	81,93	
04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	28.500.000,00	28.440.000,00	(60.000,00)	99,79	
04.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	28.500.000,00	28.440.000,00	(60.000,00)	99,79	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
04.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.500.000,00	28.440.000,00	(60.000,00)	99,79	
04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	6.255.000,00	4.765.000,00	(1.490.000,00)	76,18	
04.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	6.255.000,00	4.765.000,00	(1.490.000,00)	76,18	
04.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.255.000,00	4.765.000,00	(1.490.000,00)	76,18	
04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	7.000.000,00	4.830.000,00	(2.170.000,00)	69,00	
04.2.01.13.5.1	BELANJA OPERASI	7.000.000,00	4.830.000,00	(2.170.000,00)	69,00	
04.2.01.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	4.830.000,00	(2.170.000,00)	69,00	
04.2.01.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	33.840.000,00	25.820.000,00	(8.020.000,00)	76,30	
04.2.01.14.5.1	BELANJA OPERASI	33.840.000,00	25.820.000,00	(8.020.000,00)	76,30	
04.2.01.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.840.000,00	25.820.000,00	(8.020.000,00)	76,30	
04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	8.500.000,00	7.076.000,00	(1.424.000,00)	83,25	
04.2.01.18.5.1	BELANJA OPERASI	8.500.000,00	7.076.000,00	(1.424.000,00)	83,25	
04.2.01.18.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	7.076.000,00	(1.424.000,00)	83,25	
04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	1.794.037.000,00	1.088.100.000,00	(705.937.000,00)	60,65	
04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.794.037.000,00	1.088.100.000,00	(705.937.000,00)	60,65	
04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	673.057.000,00	567.680.000,00	(105.377.000,00)	84,34	
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	388.057.000,00	329.980.000,00	(58.077.000,00)	85,03	
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	388.057.000,00	329.980.000,00	(58.077.000,00)	85,03	
04.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	285.000.000,00	237.700.000,00	(47.300.000,00)	83,40	
04.2.01.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	285.000.000,00	237.700.000,00	(47.300.000,00)	83,40	
04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1.120.980.000,00	520.420.000,00	(600.560.000,00)	46,43	
04.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	1.120.980.000,00	520.420.000,00	(600.560.000,00)	46,43	
04.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.120.980.000,00	520.420.000,00	(600.560.000,00)	46,43	
05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	815.220.150,00	787.795.350,00	(27.424.800,00)	96,64	
05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	815.220.150,00	787.795.350,00	(27.424.800,00)	96,64	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	64.626.000,00	64.596.000,00	(30.000,00)	99,95	
05.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	64.626.000,00	64.596.000,00	(30.000,00)	99,95	
05.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.626.000,00	64.596.000,00	(30.000,00)	99,95	
05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1.500.000,00	1.476.000,00	(24.000,00)	98,40	
05.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.476.000,00	(24.000,00)	98,40	
05.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.476.000,00	(24.000,00)	98,40	
05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	25.000.000,00	24.930.000,00	(70.000,00)	99,72	
05.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	24.930.000,00	(70.000,00)	99,72	
05.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	24.930.000,00	(70.000,00)	99,72	
05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	23.246.000,00	21.319.000,00	(1.927.000,00)	91,71	
05.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	23.246.000,00	21.319.000,00	(1.927.000,00)	91,71	
05.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.246.000,00	21.319.000,00	(1.927.000,00)	91,71	
05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	700.848.150,00	675.474.350,00	(25.373.800,00)	96,38	
05.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	700.848.150,00	675.474.350,00	(25.373.800,00)	96,38	
05.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	640.848.150,00	615.474.350,00	(25.373.800,00)	96,04	
05.2.01.09.5.1.05	Belanja Hibah	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	
	SURPLUS / DEFISIT	(10.185.467.570,00)	(8.543.581.002,00)	1.641.886.568,00	0	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**(10.185.467.570,00)**	**(8.543.581.002,00)**	**1.641.886.568,00**	**0**	

BUPATI BANGLI,

I NYOMAN SEDANA ARTA

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

DINAS PERHUBUNGAN

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Bangli
Nomor : 2 Tahun 2023
Tanggal : 15 Agustus 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2022

Urusan Pemerintahan : 2.15 PERHUBUNGAN

SKPD : 2-15.0-00.0-00.01 Dinas Perhubungan

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.4	**PENDAPATAN DAERAH**	1.063.710.000,00	798.047.410,00	(265.662.590,00)	75,02	
00.0.00.00.4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	1.063.710.000,00	798.047.410,00	(265.662.590,00)	75,02	
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	1.063.710.000,00	753.869.500,00	(309.840.500,00)	70,87	
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	44.177.910,00	44.177.910,00	0	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	9.001.954.550,00	8.421.536.350,96	(580.418.199,04)	93,55	
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	5.669.097.550,00	5.380.284.138,00	(288.813.412,00)	94,91	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.588.656.300,00	4.411.027.706,00	(177.628.594,00)	96,13	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.588.656.300,00	4.411.027.706,00	(177.628.594,00)	96,13	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.588.656.300,00	4.411.027.706,00	(177.628.594,00)	96,13	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	4.588.656.300,00	4.411.027.706,00	(177.628.594,00)	96,13	
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	208.812.750,00	191.756.100,00	(17.056.650,00)	91,83	
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.995.400,00	4.995.400,00	0,00	100,00	
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.995.400,00	4.995.400,00	0,00	100,00	
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.995.400,00	4.995.400,00	0,00	100,00	
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.615.300,00	6.697.000,00	(918.300,00)	87,94	
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	7.615.300,00	6.697.000,00	(918.300,00)	87,94	
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.615.300,00	6.697.000,00	(918.300,00)	87,94	
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	133.206.200,00	122.063.700,00	(11.142.500,00)	91,64	
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	133.206.200,00	122.063.700,00	(11.142.500,00)	91,64	
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	133.206.200,00	122.063.700,00	(11.142.500,00)	91,64	
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40.605.850,00	39.760.000,00	(845.850,00)	97,92	
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	40.605.850,00	39.760.000,00	(845.850,00)	97,92	
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.605.850,00	39.760.000,00	(845.850,00)	97,92	
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.220.000,00	5.220.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	5.220.000,00	5.220.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.220.000,00	5.220.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	17.170.000,00	13.020.000,00	(4.150.000,00)	75,83	
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	17.170.000,00	13.020.000,00	(4.150.000,00)	75,83	
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.170.000,00	13.020.000,00	(4.150.000,00)	75,83	
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	83.800.000,00	79.154.688,00	(4.645.312,00)	94,46	
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	83.800.000,00	79.154.688,00	(4.645.312,00)	94,46	
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	83.800.000,00	79.154.688,00	(4.645.312,00)	94,46	
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	83.800.000,00	79.154.688,00	(4.645.312,00)	94,46	
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	427.305.000,00	386.649.794,00	(40.655.206,00)	90,49	
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49.445.000,00	29.789.794,00	(19.655.206,00)	60,25	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	49.445.000,00	29.789.794,00	(19.655.206,00)	60,25	
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.445.000,00	29.789.794,00	(19.655.206,00)	60,25	
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	370.860.000,00	349.860.000,00	(21.000.000,00)	94,34	
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	370.860.000,00	349.860.000,00	(21.000.000,00)	94,34	
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	370.860.000,00	349.860.000,00	(21.000.000,00)	94,34	
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	360.523.500,00	311.695.850,00	(48.827.650,00)	86,46	
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	287.023.500,00	239.140.850,00	(47.882.650,00)	83,32	
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	287.023.500,00	239.140.850,00	(47.882.650,00)	83,32	
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	287.023.500,00	239.140.850,00	(47.882.650,00)	83,32	
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.500.000,00	23.305.000,00	(195.000,00)	99,17	
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	23.500.000,00	23.305.000,00	(195.000,00)	99,17	
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.500.000,00	23.305.000,00	(195.000,00)	99,17	
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000,00	49.250.000,00	(750.000,00)	98,50	
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	49.250.000,00	(750.000,00)	98,50	
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.250.000,00	(750.000,00)	98,50	
02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	3.232.150.700,00	2.940.596.612,96	(291.554.087,04)	90,98	
02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	635.221.900,00	634.901.000,00	(320.900,00)	99,95	
02.2.01.03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	635.221.900,00	634.901.000,00	(320.900,00)	99,95	
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	635.221.900,00	634.901.000,00	(320.900,00)	99,95	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	635.221.900,00	634.901.000,00	(320.900,00)	99,95	
02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1.957.017.600,00	1.707.536.442,96	(249.481.157,04)	87,25	
02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1.957.017.600,00	1.707.536.442,96	(249.481.157,04)	87,25	
02.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	1.734.900.600,00	1.491.077.184,00	(243.823.416,00)	85,95	
02.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.734.900.600,00	1.491.077.184,00	(243.823.416,00)	85,95	
02.2.02.04.5.2	BELANJA MODAL	222.117.000,00	216.459.258,96	(5.657.741,04)	97,45	
02.2.02.04.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	125.317.000,00	120.770.982,00	(4.546.018,00)	96,37	
02.2.02.04.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	96.800.000,00	95.688.276,96	(1.111.723,04)	98,85	
02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	126.618.600,00	86.455.600,00	(40.163.000,00)	68,28	
02.2.04.01	Fasilitasi pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	126.618.600,00	86.455.600,00	(40.163.000,00)	68,28	
02.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	126.618.600,00	86.455.600,00	(40.163.000,00)	68,28	
02.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.618.600,00	86.455.600,00	(40.163.000,00)	68,28	
02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	374.340.600,00	372.827.070,00	(1.513.530,00)	99,60	
02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	374.340.600,00	372.827.070,00	(1.513.530,00)	99,60	
02.2.05.01.5.1	BELANJA OPERASI	369.340.600,00	367.927.070,00	(1.413.530,00)	99,62	
02.2.05.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	369.340.600,00	367.927.070,00	(1.413.530,00)	99,62	
02.2.05.01.5.2	BELANJA MODAL	5.000.000,00	4.900.000,00	(100.000,00)	98,00	
02.2.05.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	4.900.000,00	(100.000,00)	98,00	
02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	81.049.500,00	80.974.000,00	(75.500,00)	99,91	
02.2.07.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	81.049.500,00	80.974.000,00	(75.500,00)	99,91	
02.2.07.01.5.1	BELANJA OPERASI	81.049.500,00	80.974.000,00	(75.500,00)	99,91	
02.2.07.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.049.500,00	80.974.000,00	(75.500,00)	99,91	
02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	57.902.500,00	57.902.500,00	0,00	100,00	
02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	57.902.500,00	57.902.500,00	0,00	100,00	
02.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	57.902.500,00	57.902.500,00	0,00	100,00	
02.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.902.500,00	57.902.500,00	0,00	100,00	
03	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	100.706.300,00	100.655.600,00	(50.700,00)	99,95	
03.2.05	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai Dengan Domisili Badan Usaha	100.706.300,00	100.655.600,00	(50.700,00)	99,95	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.05.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	100.706.300,00	100.655.600,00	(50.700,00)	99,95	
03.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	100.706.300,00	100.655.600,00	(50.700,00)	99,95	
03.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.706.300,00	100.655.600,00	(50.700,00)	99,95	
	SURPLUS / DEFISIT	(7.938.244.550,00)	(7.623.488.940,96)	314.755.609,04	0	
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		**(7.938.244.550,00)**	**(7.623.488.940,96)**	**314.755.609,04**	**0**	

BUPATI BANGLI,

I GUSTI NGURAH SANG NYOMAN SEDANA ARTA

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Bangli
Nomor : 2 Tahun 2023
Tanggal : 15 Agustus 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2022

Urusan Pemerintahan : 2.16 KOMUNIKASI & INFORMATIKA

SKPD : 2-16.2-21.2-20.03 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.4	**PENDAPATAN DAERAH**	176.176.000,00	102.900.000,00	(73.276.000,00)	58,41	
00.0.00.00.4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	176.176.000,00	102.900.000,00	(73.276.000,00)	58,41	
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	176.176.000,00	100.599.371,20	(75.576.628,80)	57,10	
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	2.300.628,80	2.300.628,80	0	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	7.710.968.373,00	7.129.897.905,00	(581.070.468,00)	92,46	
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	4.033.868.373,00	3.935.069.345,00	(98.799.028,00)	97,55	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.753.438.373,00	3.700.708.074,00	(52.730.299,00)	98,60	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.753.438.373,00	3.700.708.074,00	(52.730.299,00)	98,60	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.753.438.373,00	3.700.708.074,00	(52.730.299,00)	98,60	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	3.753.438.373,00	3.700.708.074,00	(52.730.299,00)	98,60	
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	43.404.500,00	30.782.000,00	(12.622.500,00)	70,92	
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.522.500,00	1.460.000,00	(62.500,00)	95,89	
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.522.500,00	1.460.000,00	(62.500,00)	95,89	
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.522.500,00	1.460.000,00	(62.500,00)	95,89	
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.259.900,00	330.000,00	(929.900,00)	26,19	
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.259.900,00	330.000,00	(929.900,00)	26,19	
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.259.900,00	330.000,00	(929.900,00)	26,19	
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.862.100,00	20.992.000,00	(9.870.100,00)	68,02	
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	30.862.100,00	20.992.000,00	(9.870.100,00)	68,02	
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.862.100,00	20.992.000,00	(9.870.100,00)	68,02	
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.040.000,00	4.280.000,00	(1.760.000,00)	70,86	
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	6.040.000,00	4.280.000,00	(1.760.000,00)	70,86	
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.040.000,00	4.280.000,00	(1.760.000,00)	70,86	
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.720.000,00	3.720.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	3.720.000,00	3.720.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.720.000,00	3.720.000,00	0,00	100,00	
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	178.009.500,00	159.588.327,00	(18.421.173,00)	89,65	
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.130.000,00	3.880.500,00	(249.500,00)	93,96	
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.130.000,00	3.880.500,00	(249.500,00)	93,96	
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.130.000,00	3.880.500,00	(249.500,00)	93,96	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	95.599.500,00	77.427.827,00	(18.171.673,00)	80,99	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	95.599.500,00	77.427.827,00	(18.171.673,00)	80,99	
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.599.500,00	77.427.827,00	(18.171.673,00)	80,99	
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	78.280.000,00	78.280.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	78.280.000,00	78.280.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.280.000,00	78.280.000,00	0,00	100,00	
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.016.000,00	43.990.944,00	(15.025.056,00)	74,54	
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	59.016.000,00	43.990.944,00	(15.025.056,00)	74,54	
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	59.016.000,00	43.990.944,00	(15.025.056,00)	74,54	
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.016.000,00	43.990.944,00	(15.025.056,00)	74,54	
02	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	1.165.488.800,00	1.042.896.295,00	(122.592.505,00)	89,48	
02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.165.488.800,00	1.042.896.295,00	(122.592.505,00)	89,48	
02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1.087.661.500,00	982.514.220,00	(105.147.280,00)	90,33	
02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	1.080.661.500,00	975.804.220,00	(104.857.280,00)	90,30	
02.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.080.661.500,00	975.804.220,00	(104.857.280,00)	90,30	
02.2.01.05.5.2	BELANJA MODAL	7.000.000,00	6.710.000,00	(290.000,00)	95,86	
02.2.01.05.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.000.000,00	6.710.000,00	(290.000,00)	95,86	
02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	43.825.100,00	36.063.500,00	(7.761.600,00)	82,29	
02.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	43.825.100,00	36.063.500,00	(7.761.600,00)	82,29	
02.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.825.100,00	36.063.500,00	(7.761.600,00)	82,29	
02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	34.002.200,00	24.318.575,00	(9.683.625,00)	71,52	
02.2.01.12.5.1	BELANJA OPERASI	8.602.200,00	8.465.000,00	(137.200,00)	98,41	
02.2.01.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.602.200,00	8.465.000,00	(137.200,00)	98,41	
02.2.01.12.5.2	BELANJA MODAL	25.400.000,00	15.853.575,00	(9.546.425,00)	62,42	
02.2.01.12.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.400.000,00	15.853.575,00	(9.546.425,00)	62,42	
02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	42.348.500,00	39.509.200,00	(2.839.300,00)	93,30	
02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	42.348.500,00	39.509.200,00	(2.839.300,00)	93,30	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	42.348.500,00	39.509.200,00	(2.839.300,00)	93,30	
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	42.348.500,00	39.509.200,00	(2.839.300,00)	93,30	
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.348.500,00	39.509.200,00	(2.839.300,00)	93,30	
02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	148.000.000,00	101.930.004,00	(46.069.996,00)	68,87	
02.2.01	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	148.000.000,00	101.930.004,00	(46.069.996,00)	68,87	
02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	40.925.000,00	29.925.000,00	(11.000.000,00)	73,12	
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	40.925.000,00	29.925.000,00	(11.000.000,00)	73,12	
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.925.000,00	29.925.000,00	(11.000.000,00)	73,12	
02.2.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	88.700.000,00	59.387.500,00	(29.312.500,00)	66,95	
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	88.700.000,00	59.387.500,00	(29.312.500,00)	66,95	
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.700.000,00	59.387.500,00	(29.312.500,00)	66,95	
02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	9.000.000,00	4.077.504,00	(4.922.496,00)	45,31	
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	9.000.000,00	4.077.504,00	(4.922.496,00)	45,31	
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	4.077.504,00	(4.922.496,00)	45,31	
02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	9.375.000,00	8.540.000,00	(835.000,00)	91,09	
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	9.375.000,00	8.540.000,00	(835.000,00)	91,09	
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.375.000,00	8.540.000,00	(835.000,00)	91,09	
03	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	2.321.262.700,00	2.010.493.061,00	(310.769.639,00)	86,61	
03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.234.970.000,00	930.889.567,00	(304.080.433,00)	75,38	
03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1.234.970.000,00	930.889.567,00	(304.080.433,00)	75,38	
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.234.970.000,00	930.889.567,00	(304.080.433,00)	75,38	
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.234.970.000,00	930.889.567,00	(304.080.433,00)	75,38	
03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.086.292.700,00	1.079.603.494,00	(6.689.206,00)	99,38	
03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	250.000.000,00	247.500.000,00	(2.500.000,00)	99,00	
03.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	198.000.000,00	(2.000.000,00)	99,00	
03.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	198.000.000,00	(2.000.000,00)	99,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.07.5.2	BELANJA MODAL	50.000.000,00	49.500.000,00	(500.000,00)	99,00	
03.2.02.07.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	50.000.000,00	49.500.000,00	(500.000,00)	99,00	
03.2.02.08	Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	663.338.000,00	660.675.000,00	(2.663.000,00)	99,60	
03.2.02.08.5.1	BELANJA OPERASI	647.338.000,00	644.775.000,00	(2.563.000,00)	99,60	
03.2.02.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	647.338.000,00	644.775.000,00	(2.563.000,00)	99,60	
03.2.02.08.5.2	BELANJA MODAL	16.000.000,00	15.900.000,00	(100.000,00)	99,38	
03.2.02.08.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.000.000,00	15.900.000,00	(100.000,00)	99,38	
03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	12.034.700,00	10.508.494,00	(1.526.206,00)	87,32	
03.2.02.09.5.1	BELANJA OPERASI	9.323.000,00	7.808.494,00	(1.514.506,00)	83,76	
03.2.02.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.323.000,00	7.808.494,00	(1.514.506,00)	83,76	
03.2.02.09.5.2	BELANJA MODAL	2.711.700,00	2.700.000,00	(11.700,00)	99,57	
03.2.02.09.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.711.700,00	2.700.000,00	(11.700,00)	99,57	
03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	160.920.000,00	160.920.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.10.5.1	BELANJA OPERASI	160.920.000,00	160.920.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.920.000,00	160.920.000,00	0,00	100,00	
	SURPLUS / DEFISIT	(7.534.792.373,00)	(7.026.997.905,00)	507.794.468,00	0	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**(7.534.792.373,00)**	**(7.026.997.905,00)**	**507.794.468,00**	**0**	

BUPATI BANGLI,

I GUSTI NGURAH PUTRA SEDANA ARTA

URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Bangli
Nomor : 2 Tahun 2023
Tanggal : 15 Agustus 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2022

Urusan Pemerintahan : 2.17 KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

SKPD : 2-17.2-07.0-00.06 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	6.319.540.686,00	6.130.873.129,00	(188.667.557,00)	97,01	
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	5.071.377.636,00	4.928.270.344,00	(143.107.292,00)	97,18	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.698.666.686,00	4.596.287.143,00	(102.379.543,00)	97,82	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.698.666.686,00	4.596.287.143,00	(102.379.543,00)	97,82	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.698.666.686,00	4.596.287.143,00	(102.379.543,00)	97,82	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	4.698.666.686,00	4.596.287.143,00	(102.379.543,00)	97,82	
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	179.630.950,00	167.203.650,00	(12.427.300,00)	93,08	
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.131.700,00	1.131.700,00	0,00	100,00	
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.131.700,00	1.131.700,00	0,00	100,00	
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.131.700,00	1.131.700,00	0,00	100,00	
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.406.000,00	1.329.000,00	(77.000,00)	94,52	
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.406.000,00	1.329.000,00	(77.000,00)	94,52	
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.406.000,00	1.329.000,00	(77.000,00)	94,52	
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	161.195.600,00	148.911.400,00	(12.284.200,00)	92,38	
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	161.195.600,00	148.911.400,00	(12.284.200,00)	92,38	
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	161.195.600,00	148.911.400,00	(12.284.200,00)	92,38	
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.497.650,00	13.431.550,00	(66.100,00)	99,51	
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	13.497.650,00	13.431.550,00	(66.100,00)	99,51	
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.497.650,00	13.431.550,00	(66.100,00)	99,51	
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	40.000.000,00	39.605.000,00	(395.000,00)	99,01	
01.2.07.05	Pengadaan Mebel	30.110.000,00	29.780.000,00	(330.000,00)	98,90	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.07.05.5.2	BELANJA MODAL	30.110.000,00	29.780.000,00	(330.000,00)	98,90	
01.2.07.05.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.110.000,00	29.780.000,00	(330.000,00)	98,90	
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.890.000,00	9.825.000,00	(65.000,00)	99,34	
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	9.890.000,00	9.825.000,00	(65.000,00)	99,34	
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.890.000,00	9.825.000,00	(65.000,00)	99,34	
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78.662.500,00	56.527.319,00	(22.135.181,00)	71,86	
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57.762.500,00	35.627.319,00	(22.135.181,00)	61,68	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	57.762.500,00	35.627.319,00	(22.135.181,00)	61,68	
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.762.500,00	35.627.319,00	(22.135.181,00)	61,68	
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	15.900.000,00	15.900.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	15.900.000,00	15.900.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.900.000,00	15.900.000,00	0,00	100,00	
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74.417.500,00	68.647.232,00	(5.770.268,00)	92,25	
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	65.617.500,00	60.052.232,00	(5.565.268,00)	91,52	
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	65.617.500,00	60.052.232,00	(5.565.268,00)	91,52	
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.617.500,00	60.052.232,00	(5.565.268,00)	91,52	
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.800.000,00	8.595.000,00	(205.000,00)	97,67	
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	8.800.000,00	8.595.000,00	(205.000,00)	97,67	
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.800.000,00	8.595.000,00	(205.000,00)	97,67	
03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	332.154.000,00	322.604.000,00	(9.550.000,00)	97,12	
03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	310.134.000,00	304.498.000,00	(5.636.000,00)	98,18	
03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	310.134.000,00	304.498.000,00	(5.636.000,00)	98,18	
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	310.134.000,00	304.498.000,00	(5.636.000,00)	98,18	
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	310.134.000,00	304.498.000,00	(5.636.000,00)	98,18	
03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	22.020.000,00	18.106.000,00	(3.914.000,00)	82,23	
03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	22.020.000,00	18.106.000,00	(3.914.000,00)	82,23	
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	22.020.000,00	18.106.000,00	(3.914.000,00)	82,23	
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.020.000,00	18.106.000,00	(3.914.000,00)	82,23	
03	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	26.219.750,00	26.219.750,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Kean;taannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	26.219.750,00	26.219.750,00	0,00	100,00	
03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	26.219.750,00	26.219.750,00	0,00	100,00	
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	26.219.750,00	26.219.750,00	0,00	100,00	
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.219.750,00	26.219.750,00	0,00	100,00	
04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	70.020.000,00	67.935.500,00	(2.084.500,00)	97,02	
04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	70.020.000,00	67.935.500,00	(2.084.500,00)	97,02	
04.2.03.03	Job Fair/Bursa Kerja	70.020.000,00	67.935.500,00	(2.084.500,00)	97,02	
04.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	70.020.000,00	67.935.500,00	(2.084.500,00)	97,02	
04.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.020.000,00	67.935.500,00	(2.084.500,00)	97,02	
04	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	39.839.300,00	36.439.300,00	(3.400.000,00)	91,47	
04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	39.839.300,00	36.439.300,00	(3.400.000,00)	91,47	
04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	21.329.700,00	18.249.700,00	(3.080.000,00)	85,56	
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	21.329.700,00	18.249.700,00	(3.080.000,00)	85,56	
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.329.700,00	18.249.700,00	(3.080.000,00)	85,56	
04.2.01.02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	18.509.600,00	18.189.600,00	(320.000,00)	98,27	
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	18.509.600,00	18.189.600,00	(320.000,00)	98,27	
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.509.600,00	18.189.600,00	(320.000,00)	98,27	
05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	58.520.000,00	58.509.400,00	(10.600,00)	99,98	
05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	58.520.000,00	58.509.400,00	(10.600,00)	99,98	
05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	58.520.000,00	58.509.400,00	(10.600,00)	99,98	
05.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	58.520.000,00	58.509.400,00	(10.600,00)	99,98	
05.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.520.000,00	58.509.400,00	(10.600,00)	99,98	
05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	190.000.000,00	188.399.650,00	(1.600.350,00)	99,16	
05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	190.000.000,00	188.399.650,00	(1.600.350,00)	99,16	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	190.000.000,00	188.399.650,00	(1.600.350,00)	99,16	
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	190.000.000,00	188.399.650,00	(1.600.350,00)	99,16	
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	190.000.000,00	188.399.650,00	(1.600.350,00)	99,16	
06	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	101.950.000,00	101.940.800,00	(9.200,00)	99,99	
06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	101.950.000,00	101.940.800,00	(9.200,00)	99,99	
06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	101.950.000,00	101.940.800,00	(9.200,00)	99,99	
06.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	101.950.000,00	101.940.800,00	(9.200,00)	99,99	
06.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.950.000,00	101.940.800,00	(9.200,00)	99,99	
07	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	304.460.000,00	301.039.000,00	(3.421.000,00)	98,88	
07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	304.460.000,00	301.039.000,00	(3.421.000,00)	98,88	
07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	90.260.000,00	89.995.000,00	(265.000,00)	99,71	
07.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	90.260.000,00	89.995.000,00	(265.000,00)	99,71	
07.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.260.000,00	89.995.000,00	(265.000,00)	99,71	
07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	214.200.000,00	211.044.000,00	(3.156.000,00)	98,53	
07.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	214.200.000,00	211.044.000,00	(3.156.000,00)	98,53	
07.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	214.200.000,00	211.044.000,00	(3.156.000,00)	98,53	
08	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	125.000.000,00	99.515.385,00	(25.484.615,00)	79,61	
08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	125.000.000,00	99.515.385,00	(25.484.615,00)	79,61	
08.2.01.01	Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	125.000.000,00	99.515.385,00	(25.484.615,00)	79,61	
08.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	125.000.000,00	99.515.385,00	(25.484.615,00)	79,61	
08.2.01.01.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	125.000.000,00	99.515.385,00	(25.484.615,00)	79,61	
	SURPLUS / DEFISIT	(6.319.540.686,00)	(6.130.873.129,00)	188.667.557,00	0	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**(6.319.540.686,00)**	**(6.130.873.129,00)**	**188.667.557,00**	**0**	

BUPATI BANGLI,

I GUSTI NYOMAN SEDANA ARTA

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PENANAMAN MODAL

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Bangli
Nomor : 2 Tahun 2023
Tanggal : 15 Agustus 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2022

Urusan Pemerintahan : 2.18 PENANAMAN MODAL

SKPD : 2-18.0-00.0-00.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	6.678.780.083,00	6.388.814.159,00	(289.965.924,00)	95,66	
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	6.080.904.083,00	5.933.792.159,00	(147.111.924,00)	97,58	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.618.678.083,00	5.517.376.881,00	(101.301.202,00)	98,20	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.618.678.083,00	5.517.376.881,00	(101.301.202,00)	98,20	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	5.618.678.083,00	5.517.376.881,00	(101.301.202,00)	98,20	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	5.618.678.083,00	5.517.376.881,00	(101.301.202,00)	98,20	
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	81.910.800,00	66.602.850,00	(15.307.950,00)	81,31	
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	734.300,00	521.000,00	(213.300,00)	70,95	
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	734.300,00	521.000,00	(213.300,00)	70,95	
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	734.300,00	521.000,00	(213.300,00)	70,95	
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.780.000,00	2.353.150,00	(426.850,00)	84,65	
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	2.780.000,00	2.353.150,00	(426.850,00)	84,65	
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.780.000,00	2.353.150,00	(426.850,00)	84,65	
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	70.329.900,00	56.777.900,00	(13.552.000,00)	80,73	
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	70.329.900,00	56.777.900,00	(13.552.000,00)	80,73	
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.329.900,00	56.777.900,00	(13.552.000,00)	80,73	
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.044.100,00	4.139.800,00	(904.300,00)	82,07	
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	5.044.100,00	4.139.800,00	(904.300,00)	82,07	
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.044.100,00	4.139.800,00	(904.300,00)	82,07	
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.100.000,00	2.076.000,00	(24.000,00)	98,86	
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	2.100.000,00	2.076.000,00	(24.000,00)	98,86	
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.076.000,00	(24.000,00)	98,86	
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	922.500,00	735.000,00	(187.500,00)	79,67	
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	922.500,00	735.000,00	(187.500,00)	79,67	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	922.500,00	735.000,00	(187.500,00)	79,67	
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	150.000.000,00	149.154.890,00	(845.110,00)	99,44	
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000,00	29.700.000,00	(300.000,00)	99,00	
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	30.000.000,00	29.700.000,00	(300.000,00)	99,00	
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.000.000,00	29.700.000,00	(300.000,00)	99,00	
01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000,00	99.454.890,00	(545.110,00)	99,45	
01.2.07.09.5.2	BELANJA MODAL	100.000.000,00	99.454.890,00	(545.110,00)	99,45	
01.2.07.09.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	99.454.890,00	(545.110,00)	99,45	
01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.07.10.5.2	BELANJA MODAL	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.07.10.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	140.070.000,00	131.257.114,00	(8.812.886,00)	93,71	
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.290.000,00	23.477.114,00	(8.812.886,00)	72,71	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	32.290.000,00	23.477.114,00	(8.812.886,00)	72,71	
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.290.000,00	23.477.114,00	(8.812.886,00)	72,71	
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	103.080.000,00	103.080.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	103.080.000,00	103.080.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.080.000,00	103.080.000,00	0,00	100,00	
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.245.200,00	69.400.424,00	(20.844.776,00)	76,90	
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	83.045.200,00	62.240.424,00	(20.804.776,00)	74,95	
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	83.045.200,00	62.240.424,00	(20.804.776,00)	74,95	
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.045.200,00	62.240.424,00	(20.804.776,00)	74,95	
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.200.000,00	7.160.000,00	(40.000,00)	99,44	
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	7.200.000,00	7.160.000,00	(40.000,00)	99,44	
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	7.160.000,00	(40.000,00)	99,44	
02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	40.136.000,00	35.975.900,00	(4.160.100,00)	89,63	
02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	16.146.000,00	12.375.900,00	(3.770.100,00)	76,65	
02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	10.400.000,00	8.596.800,00	(1.803.200,00)	82,66	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	10.400.000,00	8.596.800,00	(1.803.200,00)	82,66	
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.400.000,00	8.596.800,00	(1.803.200,00)	82,66	
02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	5.746.000,00	3.779.100,00	(1.966.900,00)	65,77	
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	5.746.000,00	3.779.100,00	(1.966.900,00)	65,77	
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.746.000,00	3.779.100,00	(1.966.900,00)	65,77	
02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	23.990.000,00	23.600.000,00	(390.000,00)	98,37	
02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	23.990.000,00	23.600.000,00	(390.000,00)	98,37	
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	23.990.000,00	23.600.000,00	(390.000,00)	98,37	
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.990.000,00	23.600.000,00	(390.000,00)	98,37	
03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	11.459.000,00	11.332.000,00	(127.000,00)	98,89	
03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	11.459.000,00	11.332.000,00	(127.000,00)	98,89	
03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	875.000,00	830.000,00	(45.000,00)	94,86	
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	875.000,00	830.000,00	(45.000,00)	94,86	
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	875.000,00	830.000,00	(45.000,00)	94,86	
03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	10.584.000,00	10.502.000,00	(82.000,00)	99,23	
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	10.584.000,00	10.502.000,00	(82.000,00)	99,23	
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.584.000,00	10.502.000,00	(82.000,00)	99,23	
04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	148.280.000,00	142.232.500,00	(6.047.500,00)	95,92	
04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	148.280.000,00	142.232.500,00	(6.047.500,00)	95,92	
04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	65.440.000,00	61.310.000,00	(4.130.000,00)	93,69	
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	65.440.000,00	61.310.000,00	(4.130.000,00)	93,69	
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.440.000,00	61.310.000,00	(4.130.000,00)	93,69	
04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	39.210.000,00	39.110.000,00	(100.000,00)	99,74	
04.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	39.210.000,00	39.110.000,00	(100.000,00)	99,74	
04.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.210.000,00	39.110.000,00	(100.000,00)	99,74	
04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	13.680.000,00	12.440.000,00	(1.240.000,00)	90,94	
04.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	13.680.000,00	12.440.000,00	(1.240.000,00)	90,94	
04.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.680.000,00	12.440.000,00	(1.240.000,00)	90,94	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
04.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	29.950.000,00	29.372.500,00	(577.500,00)	98,07	
04.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	29.950.000,00	29.372.500,00	(577.500,00)	98,07	
04.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.950.000,00	29.372.500,00	(577.500,00)	98,07	
05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	394.226.000,00	261.706.600,00	(132.519.400,00)	66,38	
05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	394.226.000,00	261.706.600,00	(132.519.400,00)	66,38	
05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	299.163.550,00	193.025.800,00	(106.137.750,00)	64,52	
05.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	299.163.550,00	193.025.800,00	(106.137.750,00)	64,52	
05.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	299.163.550,00	193.025.800,00	(106.137.750,00)	64,52	
05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	95.062.450,00	68.680.800,00	(26.381.650,00)	72,25	
05.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	95.062.450,00	68.680.800,00	(26.381.650,00)	72,25	
05.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.062.450,00	68.680.800,00	(26.381.650,00)	72,25	
06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	3.775.000,00	3.775.000,00	0,00	100,00	
06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.775.000,00	3.775.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	3.775.000,00	3.775.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.775.000,00	3.775.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.775.000,00	3.775.000,00	0,00	100,00	
	SURPLUS / DEFISIT	(6.678.780.083,00)	(6.388.814.159,00)	289.965.924,00	0	
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		**(6.678.780.083,00)**	**(6.388.814.159,00)**	**289.965.924,00**	**0**	

BUPATI BANGLI,

I GUSTI NGURAH PUTRA SEDANA ARTA

URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Bangli
Nomor : 2 Tahun 2023
Tanggal : 15 Agustus 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2022

Urusan Pemerintahan : 3.26 PARIWISATA

SKPD : 3-26.2-22.0-00.01 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.4	**PENDAPATAN DAERAH**	37.557.930.000,00	32.575.707.115,00	(4.982.222.885,00)	86,73	
00.0.00.00.4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	37.557.930.000,00	32.575.707.115,00	(4.982.222.885,00)	86,73	
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	37.557.930.000,00	32.575.707.115,00	(4.982.222.885,00)	86,73	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	31.284.556.283,00	22.303.062.513,89	(8.981.493.769,11)	71,29	
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	7.756.479.483,00	5.564.908.131,00	(2.191.571.352,00)	71,75	
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.620.000,00	7.960.000,00	(13.660.000,00)	36,82	
01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.000.000,00	1.650.000,00	(350.000,00)	82,50	
01.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	1.650.000,00	(350.000,00)	82,50	
01.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.650.000,00	(350.000,00)	82,50	
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19.620.000,00	6.310.000,00	(13.310.000,00)	32,16	
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	19.620.000,00	6.310.000,00	(13.310.000,00)	32,16	
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.620.000,00	6.310.000,00	(13.310.000,00)	32,16	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.944.549.483,00	4.918.119.916,00	(2.026.429.567,00)	70,82	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.943.549.483,00	4.917.394.916,00	(2.026.154.567,00)	70,82	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	6.943.549.483,00	4.917.394.916,00	(2.026.154.567,00)	70,82	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	6.943.549.483,00	4.917.394.916,00	(2.026.154.567,00)	70,82	
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.000.000,00	725.000,00	(275.000,00)	72,50	
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	725.000,00	(275.000,00)	72,50	
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	725.000,00	(275.000,00)	72,50	
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	473.997.600,00	378.122.643,00	(95.874.957,00)	79,77	
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.403.300,00	3.376.500,00	(26.800,00)	99,21	
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.403.300,00	3.376.500,00	(26.800,00)	99,21	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.403.300,00	3.376.500,00	(26.800,00)	99,21	
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.568.700,00	3.511.500,00	(57.200,00)	98,40	
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	3.568.700,00	3.511.500,00	(57.200,00)	98,40	
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.568.700,00	3.511.500,00	(57.200,00)	98,40	
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	267.902.600,00	230.614.500,00	(37.288.100,00)	86,08	
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	267.902.600,00	230.614.500,00	(37.288.100,00)	86,08	
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	267.902.600,00	230.614.500,00	(37.288.100,00)	86,08	
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	189.925.000,00	135.029.143,00	(54.895.857,00)	71,10	
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	189.925.000,00	135.029.143,00	(54.895.857,00)	71,10	
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	189.925.000,00	135.029.143,00	(54.895.857,00)	71,10	
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.118.000,00	1.511.000,00	(3.607.000,00)	29,52	
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	5.118.000,00	1.511.000,00	(3.607.000,00)	29,52	
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.118.000,00	1.511.000,00	(3.607.000,00)	29,52	
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12.100.000,00	12.075.000,00	(25.000,00)	99,79	
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.100.000,00	12.075.000,00	(25.000,00)	99,79	
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	12.100.000,00	12.075.000,00	(25.000,00)	99,79	
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.100.000,00	12.075.000,00	(25.000,00)	99,79	
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	188.820.000,00	139.083.153,00	(49.736.847,00)	73,66	
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	141.520.000,00	91.783.153,00	(49.736.847,00)	64,86	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	141.520.000,00	91.783.153,00	(49.736.847,00)	64,86	
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	141.520.000,00	91.783.153,00	(49.736.847,00)	64,86	
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	33.300.000,00	33.300.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	33.300.000,00	33.300.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.300.000,00	33.300.000,00	0,00	100,00	
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	115.392.400,00	109.547.419,00	(5.844.981,00)	94,93	
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	108.312.400,00	102.617.419,00	(5.694.981,00)	94,74	
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	108.312.400,00	102.617.419,00	(5.694.981,00)	94,74	
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.312.400,00	102.617.419,00	(5.694.981,00)	94,74	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.080.000,00	6.930.000,00	(150.000,00)	97,88	
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	7.080.000,00	6.930.000,00	(150.000,00)	97,88	
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.080.000,00	6.930.000,00	(150.000,00)	97,88	
02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	2.719.000.000,00	2.481.570.000,00	(237.430.000,00)	91,27	
02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	302.362.000,00	278.750.000,00	(23.612.000,00)	92,19	
02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	302.362.000,00	278.750.000,00	(23.612.000,00)	92,19	
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	302.362.000,00	278.750.000,00	(23.612.000,00)	92,19	
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.362.000,00	58.750.000,00	(13.612.000,00)	81,19	
02.2.01.01.5.1.05	Belanja Hibah	230.000.000,00	220.000.000,00	(10.000.000,00)	95,65	
02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.416.638.000,00	2.202.820.000,00	(213.818.000,00)	91,15	
02.2.03.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	2.416.638.000,00	2.202.820.000,00	(213.818.000,00)	91,15	
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.416.638.000,00	2.202.820.000,00	(213.818.000,00)	91,15	
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	187.638.000,00	173.820.000,00	(13.818.000,00)	92,64	
02.2.03.01.5.1.05	Belanja Hibah	2.229.000.000,00	2.029.000.000,00	(200.000.000,00)	91,03	
02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	18.350.791.800,00	12.317.592.882,89	(6.033.198.917,11)	67,12	
02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	17.883.200.800,00	12.158.038.040,00	(5.725.162.760,00)	67,99	
02.2.01.02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	800.000.000,00	283.074.600,00	(516.925.400,00)	35,38	
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	80.000.000,00	77.283.250,00	(2.716.750,00)	96,60	
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	77.283.250,00	(2.716.750,00)	96,60	
02.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	720.000.000,00	205.791.350,00	(514.208.650,00)	28,58	
02.2.01.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0	
02.2.01.02.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	590.000.000,00	142.508.950,00	(447.491.050,00)	24,15	
02.2.01.02.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	80.000.000,00	63.282.400,00	(16.717.600,00)	79,10	
02.2.01.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	17.083.200.800,00	11.874.963.440,00	(5.208.237.360,00)	69,51	
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	16.614.700.800,00	11.436.708.440,00	(5.177.992.360,00)	68,83	
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.614.700.800,00	11.436.708.440,00	(5.177.992.360,00)	68,83	
02.2.01.03.5.2	BELANJA MODAL	468.500.000,00	438.255.000,00	(30.245.000,00)	93,54	
02.2.01.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	458.500.000,00	430.255.000,00	(28.245.000,00)	93,84	
02.2.01.03.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	10.000.000,00	8.000.000,00	(2.000.000,00)	80,00	
02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	417.591.000,00	117.902.882,89	(299.688.117,11)	28,23	
02.2.03.04	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	417.591.000,00	117.902.882,89	(299.688.117,11)	28,23	
02.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	97.276.000,00	75.186.882,89	(22.089.117,11)	77,29	
02.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.276.000,00	75.186.882,89	(22.089.117,11)	77,29	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.03.04.5.2	BELANJA MODAL	320.315.000,00	42.716.000,00	(277.599.000,00)	13,34	
02.2.03.04.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.315.000,00	20.168.000,00	(5.147.000,00)	79,67	
02.2.03.04.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	250.000.000,00	22.548.000,00	(227.452.000,00)	9,02	
02.2.03.04.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	45.000.000,00	0,00	(45.000.000,00)	0	
02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	41.651.960,00	(8.348.040,00)	83,30	
02.2.04.05	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	50.000.000,00	41.651.960,00	(8.348.040,00)	83,30	
02.2.04.05.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	41.651.960,00	(8.348.040,00)	83,30	
02.2.04.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	41.651.960,00	(8.348.040,00)	83,30	
03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	948.565.000,00	942.404.000,00	(6.161.000,00)	99,35	
03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	948.565.000,00	942.404.000,00	(6.161.000,00)	99,35	
03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	948.565.000,00	942.404.000,00	(6.161.000,00)	99,35	
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	948.565.000,00	942.404.000,00	(6.161.000,00)	99,35	
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	948.565.000,00	942.404.000,00	(6.161.000,00)	99,35	
03	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	327.500.000,00	258.039.000,00	(69.461.000,00)	78,79	
03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	327.500.000,00	258.039.000,00	(69.461.000,00)	78,79	
03.2.01.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	158.500.000,00	129.750.000,00	(28.750.000,00)	81,86	
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	158.500.000,00	129.750.000,00	(28.750.000,00)	81,86	
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	158.500.000,00	129.750.000,00	(28.750.000,00)	81,86	
03.2.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik dalam dan Luar Negeri	89.750.000,00	73.844.000,00	(15.906.000,00)	82,28	
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	86.250.000,00	73.844.000,00	(12.406.000,00)	85,62	
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.250.000,00	73.844.000,00	(12.406.000,00)	85,62	
03.2.01.03.5.2	BELANJA MODAL	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	0	
03.2.01.03.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	0	
03.2.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri	79.250.000,00	54.445.000,00	(24.805.000,00)	68,70	
03.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	79.250.000,00	54.445.000,00	(24.805.000,00)	68,70	
03.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.250.000,00	54.445.000,00	(24.805.000,00)	68,70	
04	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	93.500.000,00	79.562.000,00	(13.938.000,00)	85,09	
04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	93.500.000,00	79.562.000,00	(13.938.000,00)	85,09	
04.2.01.03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	93.500.000,00	79.562.000,00	(13.938.000,00)	85,09	
04.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	93.500.000,00	79.562.000,00	(13.938.000,00)	85,09	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
04.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.500.000,00	79.562.000,00	(13.938.000,00)	85,09	
05	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	103.500.000,00	94.741.000,00	(8.759.000,00)	91,54	
05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	103.500.000,00	94.741.000,00	(8.759.000,00)	91,54	
05.2.01.02	Penetapan Cagar Budaya	103.500.000,00	94.741.000,00	(8.759.000,00)	91,54	
05.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	103.500.000,00	94.741.000,00	(8.759.000,00)	91,54	
05.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.500.000,00	94.741.000,00	(8.759.000,00)	91,54	
05	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	985.220.000,00	564.245.500,00	(420.974.500,00)	57,27	
05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	985.220.000,00	564.245.500,00	(420.974.500,00)	57,27	
05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	985.220.000,00	564.245.500,00	(420.974.500,00)	57,27	
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	985.220.000,00	564.245.500,00	(420.974.500,00)	57,27	
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	985.220.000,00	564.245.500,00	(420.974.500,00)	57,27	
	SURPLUS / DEFISIT	6.273.373.717,00	10.272.644.601,11	3.999.270.884,11	163,75	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**6.273.373.717,00**	**10.272.644.601,11**	**3.999.270.884,11**	**163,75**	

BUPATI BANGLI,

I WAYAN NYOMAN SEDANA ARTA

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Bangli
Nomor : 2 Tahun 2023
Tanggal : 15 Agustus 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2022

Urusan Pemerintahan : 3.27 PERTANIAN

SKPD : 3-27.3-25.2-09.01 Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.4	**PENDAPATAN DAERAH**	365.060.000,00	270.222.000,00	(94.838.000,00)	74,02	
00.0.00.00.4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	365.060.000,00	270.222.000,00	(94.838.000,00)	74,02	
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	365.060.000,00	270.222.000,00	(94.838.000,00)	74,02	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	28.919.480.527,00	27.949.814.280,00	(969.666.247,00)	96,65	
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	24.933.172.200,00	24.395.087.566,00	(538.084.634,00)	97,84	
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.400.000,00	35.383.000,00	(17.000,00)	99,95	
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	35.400.000,00	35.383.000,00	(17.000,00)	99,95	
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	35.400.000,00	35.383.000,00	(17.000,00)	99,95	
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.400.000,00	35.383.000,00	(17.000,00)	99,95	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	24.235.072.200,00	23.770.235.346,00	(464.836.854,00)	98,08	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	24.235.072.200,00	23.770.235.346,00	(464.836.854,00)	98,08	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	24.235.072.200,00	23.770.235.346,00	(464.836.854,00)	98,08	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	24.235.072.200,00	23.770.235.346,00	(464.836.854,00)	98,08	
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	333.501.200,00	325.273.500,00	(8.227.700,00)	97,53	
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35.080.000,00	35.018.000,00	(62.000,00)	99,82	
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	35.080.000,00	35.018.000,00	(62.000,00)	99,82	
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.080.000,00	35.018.000,00	(62.000,00)	99,82	
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.400.000,00	34.201.500,00	(198.500,00)	99,42	
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	34.400.000,00	34.201.500,00	(198.500,00)	99,42	
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.400.000,00	34.201.500,00	(198.500,00)	99,42	
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	203.413.650,00	198.055.200,00	(5.358.450,00)	97,37	
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	203.413.650,00	198.055.200,00	(5.358.450,00)	97,37	
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	203.413.650,00	198.055.200,00	(5.358.450,00)	97,37	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	32.842.550,00	31.658.800,00	(1.183.750,00)	96,40	
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	32.842.550,00	31.658.800,00	(1.183.750,00)	96,40	
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.842.550,00	31.658.800,00	(1.183.750,00)	96,40	
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	27.765.000,00	26.340.000,00	(1.425.000,00)	94,87	
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	27.765.000,00	26.340.000,00	(1.425.000,00)	94,87	
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.765.000,00	26.340.000,00	(1.425.000,00)	94,87	
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	125.730.000,00	119.280.120,00	(6.449.880,00)	94,87	
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	23.770.000,00	23.770.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	23.770.000,00	23.770.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.770.000,00	23.770.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	101.960.000,00	95.510.120,00	(6.449.880,00)	93,67	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	101.960.000,00	95.510.120,00	(6.449.880,00)	93,67	
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.960.000,00	95.510.120,00	(6.449.880,00)	93,67	
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	203.468.800,00	144.915.600,00	(58.553.200,00)	71,22	
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	116.611.000,00	96.819.600,00	(19.791.400,00)	83,03	
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	116.611.000,00	96.819.600,00	(19.791.400,00)	83,03	
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.611.000,00	96.819.600,00	(19.791.400,00)	83,03	
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48.097.800,00	48.096.000,00	(1.800,00)	100,00	
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	48.097.800,00	48.096.000,00	(1.800,00)	100,00	
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.097.800,00	48.096.000,00	(1.800,00)	100,00	
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	38.760.000,00	0,00	(38.760.000,00)	0	
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	31.202.600,00	0,00	(31.202.600,00)	0	
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.202.600,00	0,00	(31.202.600,00)	0	
01.2.09.09.5.2	BELANJA MODAL	7.557.400,00	0,00	(7.557.400,00)	0	
01.2.09.09.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7.557.400,00	0,00	(7.557.400,00)	0	
02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	462.713.327,00	389.343.700,00	(73.369.627,00)	84,14	
02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	316.713.327,00	249.134.200,00	(67.579.127,00)	78,66	
02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	316.713.327,00	249.134.200,00	(67.579.127,00)	78,66	
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	316.713.327,00	249.134.200,00	(67.579.127,00)	78,66	
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	316.713.327,00	249.134.200,00	(67.579.127,00)	78,66	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	146.000.000,00	140.209.500,00	(5.790.500,00)	96,03	
02.2.02.01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	146.000.000,00	140.209.500,00	(5.790.500,00)	96,03	
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	146.000.000,00	140.209.500,00	(5.790.500,00)	96,03	
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	146.000.000,00	140.209.500,00	(5.790.500,00)	96,03	
03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	635.000.000,00	459.753.100,00	(175.246.900,00)	72,40	
03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	511.000.000,00	336.287.100,00	(174.712.900,00)	65,81	
03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	31.000.000,00	30.138.800,00	(861.200,00)	97,22	
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	31.000.000,00	30.138.800,00	(861.200,00)	97,22	
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.000.000,00	30.138.800,00	(861.200,00)	97,22	
03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	156.000.000,00	154.082.300,00	(1.917.700,00)	98,77	
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	156.000.000,00	154.082.300,00	(1.917.700,00)	98,77	
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	156.000.000,00	154.082.300,00	(1.917.700,00)	98,77	
03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	324.000.000,00	152.066.000,00	(171.934.000,00)	46,93	
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	324.000.000,00	152.066.000,00	(171.934.000,00)	46,93	
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	324.000.000,00	152.066.000,00	(171.934.000,00)	46,93	
03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	124.000.000,00	123.466.000,00	(534.000,00)	99,57	
03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	124.000.000,00	123.466.000,00	(534.000,00)	99,57	
03.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	124.000.000,00	123.466.000,00	(534.000,00)	99,57	
03.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.000.000,00	123.466.000,00	(534.000,00)	99,57	
04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	41.184.000,00	40.662.000,00	(522.000,00)	98,73	
04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	41.184.000,00	40.662.000,00	(522.000,00)	98,73	
04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	41.184.000,00	40.662.000,00	(522.000,00)	98,73	
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	41.184.000,00	40.662.000,00	(522.000,00)	98,73	
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.184.000,00	40.662.000,00	(522.000,00)	98,73	
04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	1.795.588.500,00	1.684.822.311,00	(110.766.189,00)	93,83	
04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1.795.588.500,00	1.684.822.311,00	(110.766.189,00)	93,83	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	176.829.500,00	171.408.800,00	(5.420.700,00)	96,93	
04.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	126.029.500,00	122.736.500,00	(3.293.000,00)	97,39	
04.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.029.500,00	122.736.500,00	(3.293.000,00)	97,39	
04.2.04.03.5.2	BELANJA MODAL	50.800.000,00	48.672.300,00	(2.127.700,00)	95,81	
04.2.04.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.800.000,00	33.690.000,00	(1.110.000,00)	96,81	
04.2.04.03.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	16.000.000,00	14.982.300,00	(1.017.700,00)	93,64	
04.2.04.04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	140.430.000,00	129.672.000,00	(10.758.000,00)	92,34	
04.2.04.04.5.1	BELANJA OPERASI	115.430.000,00	108.672.000,00	(6.758.000,00)	94,15	
04.2.04.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.430.000,00	108.672.000,00	(6.758.000,00)	94,15	
04.2.04.04.5.2	BELANJA MODAL	25.000.000,00	21.000.000,00	(4.000.000,00)	84,00	
04.2.04.04.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.000.000,00	21.000.000,00	(4.000.000,00)	84,00	
04.2.04.06	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	1.478.329.000,00	1.383.741.511,00	(94.587.489,00)	93,60	
04.2.04.06.5.1	BELANJA OPERASI	1.295.329.000,00	1.234.844.311,00	(60.484.689,00)	95,33	
04.2.04.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.295.329.000,00	1.234.844.311,00	(60.484.689,00)	95,33	
04.2.04.06.5.2	BELANJA MODAL	183.000.000,00	148.897.200,00	(34.102.800,00)	81,36	
04.2.04.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.000.000,00	31.900.000,00	(100.000,00)	99,69	
04.2.04.06.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	74.000.000,00	73.197.200,00	(802.800,00)	98,92	
04.2.04.06.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	77.000.000,00	43.800.000,00	(33.200.000,00)	56,88	
04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	301.600.000,00	298.277.500,00	(3.322.500,00)	98,90	
04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	251.600.000,00	251.531.500,00	(68.500,00)	99,97	
04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	251.600.000,00	251.531.500,00	(68.500,00)	99,97	
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	251.600.000,00	251.531.500,00	(68.500,00)	99,97	
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	251.600.000,00	251.531.500,00	(68.500,00)	99,97	
04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	46.746.000,00	(3.254.000,00)	93,49	
04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	50.000.000,00	46.746.000,00	(3.254.000,00)	93,49	
04.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	46.746.000,00	(3.254.000,00)	93,49	
04.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	46.746.000,00	(3.254.000,00)	93,49	
05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	41.000.000,00	40.631.000,00	(369.000,00)	99,10	
05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	41.000.000,00	40.631.000,00	(369.000,00)	99,10	
05.2.01.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	41.000.000,00	40.631.000,00	(369.000,00)	99,10	
05.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	41.000.000,00	40.631.000,00	(369.000,00)	99,10	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
05.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.000.000,00	40.631.000,00	(369.000,00)	99,10	
05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	56.000.000,00	54.564.300,00	(1.435.700,00)	97,44	
05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	56.000.000,00	54.564.300,00	(1.435.700,00)	97,44	
05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	56.000.000,00	54.564.300,00	(1.435.700,00)	97,44	
05.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	56.000.000,00	54.564.300,00	(1.435.700,00)	97,44	
05.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.000.000,00	54.564.300,00	(1.435.700,00)	97,44	
06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	406.922.500,00	363.281.003,00	(43.641.497,00)	89,28	
06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	35.400.000,00	19.664.003,00	(15.735.997,00)	55,55	
06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	35.400.000,00	19.664.003,00	(15.735.997,00)	55,55	
06.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	35.400.000,00	19.664.003,00	(15.735.997,00)	55,55	
06.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.400.000,00	19.664.003,00	(15.735.997,00)	55,55	
06.2.03	Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	371.522.500,00	343.617.000,00	(27.905.500,00)	92,49	
06.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	371.522.500,00	343.617.000,00	(27.905.500,00)	92,49	
06.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	359.522.500,00	331.917.000,00	(27.605.500,00)	92,32	
06.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	359.522.500,00	331.917.000,00	(27.605.500,00)	92,32	
06.2.03.01.5.2	BELANJA MODAL	12.000.000,00	11.700.000,00	(300.000,00)	97,50	
06.2.03.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.000.000,00	11.700.000,00	(300.000,00)	97,50	
07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	246.300.000,00	223.391.800,00	(22.908.200,00)	90,70	
07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	246.300.000,00	223.391.800,00	(22.908.200,00)	90,70	
07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	35.500.000,00	35.270.000,00	(230.000,00)	99,35	
07.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	35.500.000,00	35.270.000,00	(230.000,00)	99,35	
07.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.500.000,00	35.270.000,00	(230.000,00)	99,35	
07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	84.000.000,00	61.913.600,00	(22.086.400,00)	73,71	
07.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	84.000.000,00	61.913.600,00	(22.086.400,00)	73,71	
07.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.000.000,00	61.913.600,00	(22.086.400,00)	73,71	
07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	126.800.000,00	126.208.200,00	(591.800,00)	99,53	
07.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	109.400.000,00	109.108.200,00	(291.800,00)	99,73	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
07.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.400.000,00	109.108.200,00	(291.800,00)	99,73	
07.2.01.03.5.2	BELANJA MODAL	17.400.000,00	17.100.000,00	(300.000,00)	98,28	
07.2.01.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.400.000,00	17.100.000,00	(300.000,00)	98,28	
	SURPLUS / DEFISIT	(28.554.420.527,00)	(27.679.592.280,00)	874.828.247,00	0	
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		**(28.554.420.527,00)**	**(27.679.592.280,00)**	**874.828.247,00**	**0**	

BUPATI BANGLI,

I GUSTI NGURAH PUTU SEDANA ARTA

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Bangli
Nomor : 2 Tahun 2023
Tanggal : 15 Agustus 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2022

Urusan Pemerintahan : 3.31 PERINDUSTRIAN

SKPD : 3-31.3-30.0-00.02 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.4	**PENDAPATAN DAERAH**	4.148.960.000,00	2.087.331.300,00	(2.061.628.700,00)	50,31	
00.0.00.00.4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	4.148.960.000,00	2.087.331.300,00	(2.061.628.700,00)	50,31	
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	4.148.960.000,00	2.087.331.300,00	(2.061.628.700,00)	50,31	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	7.463.635.066,00	6.846.132.184,00	(617.502.882,00)	91,73	
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	5.191.971.280,00	4.817.913.209,00	(374.058.071,00)	92,80	
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.847.850,00	580.000,00	(1.267.850,00)	31,39	
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.847.850,00	580.000,00	(1.267.850,00)	31,39	
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.847.850,00	580.000,00	(1.267.850,00)	31,39	
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.847.850,00	580.000,00	(1.267.850,00)	31,39	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.580.771.880,00	4.258.233.017,00	(322.538.863,00)	92,96	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.570.019.880,00	4.247.496.017,00	(322.523.863,00)	92,94	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.570.019.880,00	4.247.496.017,00	(322.523.863,00)	92,94	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	4.570.019.880,00	4.247.496.017,00	(322.523.863,00)	92,94	
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.752.000,00	10.737.000,00	(15.000,00)	99,86	
01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	10.752.000,00	10.737.000,00	(15.000,00)	99,86	
01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.752.000,00	10.737.000,00	(15.000,00)	99,86	
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	302.807.550,00	295.237.500,00	(7.570.050,00)	97,50	
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.993.500,00	2.627.000,00	(366.500,00)	87,76	
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.993.500,00	2.627.000,00	(366.500,00)	87,76	
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.993.500,00	2.627.000,00	(366.500,00)	87,76	
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.499.400,00	1.379.500,00	(1.119.900,00)	55,19	
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	2.499.400,00	1.379.500,00	(1.119.900,00)	55,19	
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.499.400,00	1.379.500,00	(1.119.900,00)	55,19	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	269.985.250,00	263.952.000,00	(6.033.250,00)	97,77	
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	269.985.250,00	263.952.000,00	(6.033.250,00)	97,77	
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	269.985.250,00	263.952.000,00	(6.033.250,00)	97,77	
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.079.400,00	21.029.000,00	(50.400,00)	99,76	
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	21.079.400,00	21.029.000,00	(50.400,00)	99,76	
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.079.400,00	21.029.000,00	(50.400,00)	99,76	
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	100,00	
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	200.894.000,00	185.988.992,00	(14.905.008,00)	92,58	
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	186.294.000,00	171.388.992,00	(14.905.008,00)	92,00	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	186.294.000,00	171.388.992,00	(14.905.008,00)	92,00	
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	186.294.000,00	171.388.992,00	(14.905.008,00)	92,00	
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	100,00	
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	105.650.000,00	77.873.700,00	(27.776.300,00)	73,71	
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	93.760.000,00	66.123.700,00	(27.636.300,00)	70,52	
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	93.760.000,00	66.123.700,00	(27.636.300,00)	70,52	
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.760.000,00	66.123.700,00	(27.636.300,00)	70,52	
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.890.000,00	11.750.000,00	(140.000,00)	98,82	
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	11.890.000,00	11.750.000,00	(140.000,00)	98,82	
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.890.000,00	11.750.000,00	(140.000,00)	98,82	
02	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	194.670.000,00	177.190.000,00	(17.480.000,00)	91,02	
02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	194.670.000,00	177.190.000,00	(17.480.000,00)	91,02	
02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	52.590.000,00	51.158.000,00	(1.432.000,00)	97,28	
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	52.590.000,00	51.158.000,00	(1.432.000,00)	97,28	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.590.000,00	51.158.000,00	(1.432.000,00)	97,28	
02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	50.000.000,00	49.132.000,00	(868.000,00)	98,26	
02.2.01.04.5.2	BELANJA MODAL	50.000.000,00	49.132.000,00	(868.000,00)	98,26	
02.2.01.04.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	50.000.000,00	49.132.000,00	(868.000,00)	98,26	
02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	92.080.000,00	76.900.000,00	(15.180.000,00)	83,51	
02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	92.080.000,00	76.900.000,00	(15.180.000,00)	83,51	
02.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.080.000,00	76.900.000,00	(15.180.000,00)	83,51	
03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	1.841.512.861,00	1.688.279.475,00	(153.233.386,00)	91,68	
03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.012.995.675,00	1.004.031.275,00	(8.964.400,00)	99,12	
03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.012.995.675,00	1.004.031.275,00	(8.964.400,00)	99,12	
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	139.600.000,00	132.890.000,00	(6.710.000,00)	95,19	
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.600.000,00	132.890.000,00	(6.710.000,00)	95,19	
03.2.01.01.5.2	BELANJA MODAL	873.395.675,00	871.141.275,00	(2.254.400,00)	99,74	
03.2.01.01.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	873.395.675,00	871.141.275,00	(2.254.400,00)	99,74	
03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	828.517.186,00	684.248.200,00	(144.268.986,00)	82,59	
03.2.02.02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	828.517.186,00	684.248.200,00	(144.268.986,00)	82,59	
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	828.517.186,00	684.248.200,00	(144.268.986,00)	82,59	
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	828.517.186,00	684.248.200,00	(144.268.986,00)	82,59	
04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	174.362.925,00	103.358.500,00	(71.004.425,00)	59,28	
04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	174.362.925,00	103.358.500,00	(71.004.425,00)	59,28	
04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	174.362.925,00	103.358.500,00	(71.004.425,00)	59,28	
04.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	174.362.925,00	103.358.500,00	(71.004.425,00)	59,28	
04.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	174.362.925,00	103.358.500,00	(71.004.425,00)	59,28	
06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	61.118.000,00	59.391.000,00	(1.727.000,00)	97,17	
06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	61.118.000,00	59.391.000,00	(1.727.000,00)	97,17	
06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	61.118.000,00	59.391.000,00	(1.727.000,00)	97,17	
06.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	61.118.000,00	59.391.000,00	(1.727.000,00)	97,17	
06.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.118.000,00	59.391.000,00	(1.727.000,00)	97,17	
	SURPLUS / DEFISIT	(3.314.675.066,00)	(4.758.800.884,00)	(1.444.125.818,00)	0	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**(3.314.675.066,00)**	**(4.758.800.884,00)**	**(1.444.125.818,00)**	**0**	

BUPATI BANGLI,

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

SEKRETARIAT DAERAH

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Bangli
Nomor : 2 Tahun 2023
Tanggal : 15 Agustus 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2022

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH

SKPD : 4-01.2-23.2-24.01 Sekretariat Daerah

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	70.779.316.640,00	66.315.280.316,00	(4.464.036.324,00)	93,69	
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	53.689.434.290,00	49.848.145.391,00	(3.841.288.899,00)	92,85	
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	270.720.000,00	270.040.000,00	(680.000,00)	99,75	
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	270.720.000,00	270.040.000,00	(680.000,00)	99,75	
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	270.720.000,00	270.040.000,00	(680.000,00)	99,75	
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	270.720.000,00	270.040.000,00	(680.000,00)	99,75	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.314.490.640,00	21.400.042.218,00	(914.448.422,00)	95,90	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22.314.490.640,00	21.400.042.218,00	(914.448.422,00)	95,90	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	22.314.490.640,00	21.400.042.218,00	(914.448.422,00)	95,90	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	22.314.490.640,00	21.400.042.218,00	(914.448.422,00)	95,90	
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	11.881.308.300,00	11.556.816.856,00	(324.491.444,00)	97,27	
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.013.800,00	10.122.300,00	(3.891.500,00)	72,23	
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	14.013.800,00	10.122.300,00	(3.891.500,00)	72,23	
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.013.800,00	10.122.300,00	(3.891.500,00)	72,23	
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.261.009.700,00	2.224.904.250,00	(36.105.450,00)	98,40	
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	21.009.700,00	20.321.500,00	(688.200,00)	96,72	
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.009.700,00	20.321.500,00	(688.200,00)	96,72	
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	2.240.000.000,00	2.204.582.750,00	(35.417.250,00)	98,42	
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.240.000.000,00	2.204.582.750,00	(35.417.250,00)	98,42	
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	36.300.000,00	35.750.000,00	(550.000,00)	98,48	
01.2.06.03.5.2	BELANJA MODAL	36.300.000,00	35.750.000,00	(550.000,00)	98,48	
01.2.06.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.300.000,00	35.750.000,00	(550.000,00)	98,48	
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	841.952.300,00	736.749.100,00	(105.203.200,00)	87,50	
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	841.952.300,00	736.749.100,00	(105.203.200,00)	87,50	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	841.952.300,00	736.749.100,00	(105.203.200,00)	87,50	
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	106.662.500,00	88.325.600,00	(18.336.900,00)	82,81	
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	106.662.500,00	88.325.600,00	(18.336.900,00)	82,81	
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.662.500,00	88.325.600,00	(18.336.900,00)	82,81	
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.086.050.000,00	944.779.000,00	(141.271.000,00)	86,99	
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	1.086.050.000,00	944.779.000,00	(141.271.000,00)	86,99	
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.086.050.000,00	944.779.000,00	(141.271.000,00)	86,99	
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.535.320.000,00	7.516.186.606,00	(19.133.394,00)	99,75	
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	7.535.320.000,00	7.516.186.606,00	(19.133.394,00)	99,75	
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.535.320.000,00	7.516.186.606,00	(19.133.394,00)	99,75	
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.170.000.000,00	14.250.000,00	(1.155.750.000,00)	1,22	
01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	900.000.000,00	0,00	(900.000.000,00)	0	
01.2.07.01.5.2	BELANJA MODAL	900.000.000,00	0,00	(900.000.000,00)	0	
01.2.07.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	900.000.000,00	0,00	(900.000.000,00)	0	
01.2.07.05	Pengadaan Mebel	15.000.000,00	14.250.000,00	(750.000,00)	95,00	
01.2.07.05.5.2	BELANJA MODAL	15.000.000,00	14.250.000,00	(750.000,00)	95,00	
01.2.07.05.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	14.250.000,00	(750.000,00)	95,00	
01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	0	
01.2.07.09.5.2	BELANJA MODAL	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	0	
01.2.07.09.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	0	
01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	155.000.000,00	0,00	(155.000.000,00)	0	
01.2.07.11.5.2	BELANJA MODAL	155.000.000,00	0,00	(155.000.000,00)	0	
01.2.07.11.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	155.000.000,00	0,00	(155.000.000,00)	0	
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.749.470.000,00	1.418.166.491,00	(331.303.509,00)	81,06	
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	857.000.000,00	615.155.491,00	(241.844.509,00)	71,78	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	857.000.000,00	615.155.491,00	(241.844.509,00)	71,78	
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	857.000.000,00	615.155.491,00	(241.844.509,00)	71,78	
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	840.470.000,00	751.011.000,00	(89.459.000,00)	89,36	
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	840.470.000,00	751.011.000,00	(89.459.000,00)	89,36	
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	840.470.000,00	751.011.000,00	(89.459.000,00)	89,36	
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.179.009.000,00	9.358.482.036,00	(820.526.964,00)	91,94	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	539.815.000,00	440.113.020,00	(99.701.980,00)	81,53	
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	539.815.000,00	440.113.020,00	(99.701.980,00)	81,53	
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	539.815.000,00	440.113.020,00	(99.701.980,00)	81,53	
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.094.744.000,00	691.799.672,00	(402.944.328,00)	63,19	
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.094.744.000,00	691.799.672,00	(402.944.328,00)	63,19	
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.094.744.000,00	691.799.672,00	(402.944.328,00)	63,19	
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	65.200.000,00	56.901.969,00	(8.298.031,00)	87,27	
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	65.200.000,00	56.901.969,00	(8.298.031,00)	87,27	
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.200.000,00	56.901.969,00	(8.298.031,00)	87,27	
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.479.250.000,00	8.169.667.375,00	(309.582.625,00)	96,35	
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	194.250.000,00	151.272.000,00	(42.978.000,00)	77,87	
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	194.250.000,00	151.272.000,00	(42.978.000,00)	77,87	
01.2.09.09.5.2	BELANJA MODAL	8.285.000.000,00	8.018.395.375,00	(266.604.625,00)	96,78	
01.2.09.09.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8.285.000.000,00	8.018.395.375,00	(266.604.625,00)	96,78	
01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	625.480.000,00	574.370.290,00	(51.109.710,00)	91,83	
01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	625.480.000,00	574.370.290,00	(51.109.710,00)	91,83	
01.2.11.01.5.1	BELANJA OPERASI	625.480.000,00	574.370.290,00	(51.109.710,00)	91,83	
01.2.11.01.5.1.01	Belanja Pegawai	625.480.000,00	574.370.290,00	(51.109.710,00)	91,83	
01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1.700.000.000,00	1.688.051.000,00	(11.949.000,00)	99,30	
01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	980.000.000,00	968.328.000,00	(11.672.000,00)	98,81	
01.2.12.01.5.1	BELANJA OPERASI	980.000.000,00	968.328.000,00	(11.672.000,00)	98,81	
01.2.12.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	980.000.000,00	968.328.000,00	(11.672.000,00)	98,81	
01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	720.000.000,00	719.723.000,00	(277.000,00)	99,96	
01.2.12.02.5.1	BELANJA OPERASI	720.000.000,00	719.723.000,00	(277.000,00)	99,96	
01.2.12.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	720.000.000,00	719.723.000,00	(277.000,00)	99,96	
01.2.13	Penataan Organisasi	397.697.450,00	308.953.100,00	(88.744.350,00)	77,69	
01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	102.997.550,00	83.177.200,00	(19.820.350,00)	80,76	
01.2.13.01.5.1	BELANJA OPERASI	97.997.550,00	83.177.200,00	(14.820.350,00)	84,88	
01.2.13.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.997.550,00	83.177.200,00	(14.820.350,00)	84,88	
01.2.13.01.5.2	BELANJA MODAL	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0	
01.2.13.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0	
01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	83.774.350,00	55.425.850,00	(28.348.500,00)	66,16	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.13.02.5.1	BELANJA OPERASI	78.774.350,00	55.425.850,00	(23.348.500,00)	70,36	
01.2.13.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.774.350,00	55.425.850,00	(23.348.500,00)	70,36	
01.2.13.02.5.2	BELANJA MODAL	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0	
01.2.13.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0	
01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	210.925.550,00	170.350.050,00	(40.575.500,00)	80,76	
01.2.13.03.5.1	BELANJA OPERASI	195.925.550,00	170.350.050,00	(25.575.500,00)	86,95	
01.2.13.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	195.925.550,00	170.350.050,00	(25.575.500,00)	86,95	
01.2.13.03.5.2	BELANJA MODAL	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	0	
01.2.13.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	0	
01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	3.401.258.900,00	3.258.973.400,00	(142.285.500,00)	95,82	
01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	1.633.150.000,00	1.612.257.000,00	(20.893.000,00)	98,72	
01.2.14.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.633.150.000,00	1.612.257.000,00	(20.893.000,00)	98,72	
01.2.14.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.633.150.000,00	1.612.257.000,00	(20.893.000,00)	98,72	
01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	311.034.900,00	235.598.400,00	(75.436.500,00)	75,75	
01.2.14.02.5.1	BELANJA OPERASI	292.834.900,00	219.170.400,00	(73.664.500,00)	74,84	
01.2.14.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	292.834.900,00	219.170.400,00	(73.664.500,00)	74,84	
01.2.14.02.5.2	BELANJA MODAL	18.200.000,00	16.428.000,00	(1.772.000,00)	90,26	
01.2.14.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.200.000,00	16.428.000,00	(1.772.000,00)	90,26	
01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1.457.074.000,00	1.411.118.000,00	(45.956.000,00)	96,85	
01.2.14.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.457.074.000,00	1.411.118.000,00	(45.956.000,00)	96,85	
01.2.14.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.457.074.000,00	1.411.118.000,00	(45.956.000,00)	96,85	
02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	26.929.950,00	25.705.025,00	(1.224.925,00)	95,45	
02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	26.069.950,00	25.705.025,00	(364.925,00)	98,60	
02.2.01.05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	4.775.000,00	5.292.250,00	517.250,00	110,83	
02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	4.775.000,00	5.292.250,00	517.250,00	110,83	
02.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.775.000,00	5.292.250,00	517.250,00	110,83	
02.2.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	14.607.950,00	13.727.275,00	(880.675,00)	93,97	
02.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	14.607.950,00	13.727.275,00	(880.675,00)	93,97	
02.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.607.950,00	13.727.275,00	(880.675,00)	93,97	
02.2.01.07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	6.175.000,00	6.173.500,00	(1.500,00)	99,98	
02.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	6.175.000,00	6.173.500,00	(1.500,00)	99,98	
02.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.175.000,00	6.173.500,00	(1.500,00)	99,98	
02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	512.000,00	512.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	512.000,00	512.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	512.000,00	512.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	860.000,00	0,00	(860.000,00)	0	
02.2.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	860.000,00	0,00	(860.000,00)	0	
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	860.000,00	0,00	(860.000,00)	0	
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	860.000,00	0,00	(860.000,00)	0	
02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	3.489.500,00	3.489.400,00	(100,00)	100,00	
02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	3.489.500,00	3.489.400,00	(100,00)	100,00	
02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	1.984.500,00	1.984.500,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.984.500,00	1.984.500,00	0,00	100,00	
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.984.500,00	1.984.500,00	0,00	100,00	
02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	1.505.000,00	1.504.900,00	(100,00)	99,99	
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.505.000,00	1.504.900,00	(100,00)	99,99	
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.505.000,00	1.504.900,00	(100,00)	99,99	
02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	15.314.244.850,00	14.855.232.250,00	(459.012.600,00)	97,00	
02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	1.010.144.900,00	907.091.650,00	(103.053.250,00)	89,80	
02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	935.367.350,00	856.866.650,00	(78.500.700,00)	91,61	
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	935.367.350,00	856.866.650,00	(78.500.700,00)	91,61	
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	935.367.350,00	856.866.650,00	(78.500.700,00)	91,61	
02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	17.099.750,00	1.295.000,00	(15.804.750,00)	7,57	
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	17.099.750,00	1.295.000,00	(15.804.750,00)	7,57	
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.099.750,00	1.295.000,00	(15.804.750,00)	7,57	
02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	57.677.800,00	48.930.000,00	(8.747.800,00)	84,83	
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	57.677.800,00	48.930.000,00	(8.747.800,00)	84,83	
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.677.800,00	48.930.000,00	(8.747.800,00)	84,83	
02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	13.060.504.100,00	12.789.450.100,00	(271.054.000,00)	97,92	
02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	12.935.510.500,00	12.667.846.000,00	(267.664.500,00)	97,93	
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	12.935.510.500,00	12.667.846.000,00	(267.664.500,00)	97,93	
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.624.510.500,00	12.356.846.000,00	(267.664.500,00)	97,88	
02.2.02.01.5.1.05	Belanja Hibah	311.000.000,00	311.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	49.996.600,00	48.638.600,00	(1.358.000,00)	97,28	
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	49.996.600,00	48.638.600,00	(1.358.000,00)	97,28	
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.996.600,00	48.638.600,00	(1.358.000,00)	97,28	
02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	74.997.000,00	72.965.500,00	(2.031.500,00)	97,29	
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	74.997.000,00	72.965.500,00	(2.031.500,00)	97,29	
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.997.000,00	72.965.500,00	(2.031.500,00)	97,29	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1.235.596.000,00	1.157.308.000,00	(78.288.000,00)	93,66	
02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	329.670.000,00	309.060.000,00	(20.610.000,00)	93,75	
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	329.670.000,00	309.060.000,00	(20.610.000,00)	93,75	
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	329.670.000,00	309.060.000,00	(20.610.000,00)	93,75	
02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	751.906.000,00	734.424.000,00	(17.482.000,00)	97,67	
02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	690.706.000,00	674.256.000,00	(16.450.000,00)	97,62	
02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	690.706.000,00	674.256.000,00	(16.450.000,00)	97,62	
02.2.03.02.5.2	BELANJA MODAL	61.200.000,00	60.168.000,00	(1.032.000,00)	98,31	
02.2.03.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	61.200.000,00	60.168.000,00	(1.032.000,00)	98,31	
02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	154.020.000,00	113.824.000,00	(40.196.000,00)	73,90	
02.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	119.270.000,00	113.824.000,00	(5.446.000,00)	95,43	
02.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.270.000,00	113.824.000,00	(5.446.000,00)	95,43	
02.2.03.03.5.2	BELANJA MODAL	34.750.000,00	0,00	(34.750.000,00)	0	
02.2.03.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.750.000,00	0,00	(34.750.000,00)	0	
02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	7.999.850,00	1.382.500,00	(6.617.350,00)	17,28	
02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	7.999.850,00	1.382.500,00	(6.617.350,00)	17,28	
02.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	7.999.850,00	1.382.500,00	(6.617.350,00)	17,28	
02.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.999.850,00	1.382.500,00	(6.617.350,00)	17,28	
03	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	109.814.750,00	109.494.250,00	(320.500,00)	99,71	
03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	109.814.750,00	109.494.250,00	(320.500,00)	99,71	
03.2.01.02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	109.814.750,00	109.494.250,00	(320.500,00)	99,71	
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	109.814.750,00	109.494.250,00	(320.500,00)	99,71	
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.814.750,00	109.494.250,00	(320.500,00)	99,71	
03	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	2.383.400,00	2.233.200,00	(150.200,00)	93,70	
03.2.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	2.383.400,00	2.233.200,00	(150.200,00)	93,70	
03.2.05.03	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	2.383.400,00	2.233.200,00	(150.200,00)	93,70	
03.2.05.03.5.1	BELANJA OPERASI	2.383.400,00	2.233.200,00	(150.200,00)	93,70	
03.2.05.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.383.400,00	2.233.200,00	(150.200,00)	93,70	
03	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	50.000.000,00	49.975.000,00	(25.000,00)	99,95	
03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	50.000.000,00	49.975.000,00	(25.000,00)	99,95	
03.2.01.05	Penyuluhan Transmigrasi	50.000.000,00	49.975.000,00	(25.000,00)	99,95	
03.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	49.975.000,00	(25.000,00)	99,95	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.975.000,00	(25.000,00)	99,95	
03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	1.583.019.900,00	1.421.005.800,00	(162.014.100,00)	89,77	
03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	258.510.000,00	217.999.000,00	(40.511.000,00)	84,33	
03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	141.083.850,00	141.005.350,00	(78.500,00)	99,94	
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	141.083.850,00	141.005.350,00	(78.500,00)	99,94	
03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	141.083.850,00	141.005.350,00	(78.500,00)	99,94	
03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	58.993.650,00	58.630.650,00	(363.000,00)	99,38	
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	41.993.650,00	41.758.650,00	(235.000,00)	99,44	
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.993.650,00	41.758.650,00	(235.000,00)	99,44	
03.2.01.03.5.2	BELANJA MODAL	17.000.000,00	16.872.000,00	(128.000,00)	99,25	
03.2.01.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.000.000,00	16.872.000,00	(128.000,00)	99,25	
03.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	58.432.500,00	18.363.000,00	(40.069.500,00)	31,43	
03.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	58.432.500,00	18.363.000,00	(40.069.500,00)	31,43	
03.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.432.500,00	18.363.000,00	(40.069.500,00)	31,43	
03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	401.749.900,00	394.249.900,00	(7.500.000,00)	98,13	
03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	52.539.900,00	52.539.900,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	52.539.900,00	52.539.900,00	0,00	100,00	
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.539.900,00	52.539.900,00	0,00	100,00	
03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	308.520.000,00	301.020.000,00	(7.500.000,00)	97,57	
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	308.520.000,00	301.020.000,00	(7.500.000,00)	97,57	
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	308.520.000,00	301.020.000,00	(7.500.000,00)	97,57	
03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	40.690.000,00	40.690.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	40.690.000,00	40.690.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.690.000,00	40.690.000,00	0,00	100,00	
03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	838.070.000,00	740.013.400,00	(98.056.600,00)	88,30	
03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	655.325.000,00	560.310.800,00	(95.014.200,00)	85,50	
03.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	553.825.000,00	512.480.000,00	(41.345.000,00)	92,53	
03.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	553.825.000,00	512.480.000,00	(41.345.000,00)	92,53	
03.2.03.01.5.2	BELANJA MODAL	101.500.000,00	47.830.800,00	(53.669.200,00)	47,12	
03.2.03.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	101.500.000,00	47.830.800,00	(53.669.200,00)	47,12	
03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	163.295.000,00	160.667.600,00	(2.627.400,00)	98,39	
03.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	47.288.900,00	47.224.000,00	(64.900,00)	99,86	
03.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.288.900,00	47.224.000,00	(64.900,00)	99,86	
03.2.03.02.5.2	BELANJA MODAL	116.006.100,00	113.443.600,00	(2.562.500,00)	97,79	
03.2.03.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.000.000,00	15.943.600,00	(1.056.400,00)	93,79	
03.2.03.02.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	99.006.100,00	97.500.000,00	(1.506.100,00)	98,48	
03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	19.450.000,00	19.035.000,00	(415.000,00)	97,87	
03.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	19.450.000,00	19.035.000,00	(415.000,00)	97,87	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.450.000,00	19.035.000,00	(415.000,00)	97,87	
03.2.04	Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam	84.690.000,00	68.743.500,00	(15.946.500,00)	81,17	
03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	84.690.000,00	68.743.500,00	(15.946.500,00)	81,17	
03.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	84.690.000,00	68.743.500,00	(15.946.500,00)	81,17	
03.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.690.000,00	68.743.500,00	(15.946.500,00)	81,17	
	SURPLUS / DEFISIT	(70.779.316.640,00)	(66.315.280.316,00)	4.464.036.324,00	0	
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		**(70.779.316.640,00)**	**(66.315.280.316,00)**	**4.464.036.324,00**	**0**	

BUPATI BANGLI,

I GUSTI NGURAH SANG NYOMAN SEDANA ARTA

SEKRETARIAT DPRD

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Bangli
Nomor : 2 Tahun 2023
Tanggal : 15 Agustus 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2022

Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD

SKPD : 4-02.0-00.0-00.01 Sekretariat DPRD

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	53.494.364.450,00	51.641.158.952,00	(1.853.205.498,00)	96,54	
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	48.487.839.802,00	47.238.888.946,00	(1.248.950.856,00)	97,42	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.710.069.252,00	3.631.348.577,00	(78.720.675,00)	97,88	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.710.069.252,00	3.631.348.577,00	(78.720.675,00)	97,88	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.710.069.252,00	3.631.348.577,00	(78.720.675,00)	97,88	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	3.710.069.252,00	3.631.348.577,00	(78.720.675,00)	97,88	
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	233.310.000,00	185.682.300,00	(47.627.700,00)	79,59	
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	233.310.000,00	185.682.300,00	(47.627.700,00)	79,59	
01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	233.310.000,00	185.682.300,00	(47.627.700,00)	79,59	
01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	233.310.000,00	185.682.300,00	(47.627.700,00)	79,59	
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.178.356.100,00	1.023.197.350,00	(155.158.750,00)	86,83	
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.637.000,00	2.590.000,00	(1.047.000,00)	71,21	
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.637.000,00	2.590.000,00	(1.047.000,00)	71,21	
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.637.000,00	2.590.000,00	(1.047.000,00)	71,21	
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	445.653.000,00	362.367.000,00	(83.286.000,00)	81,31	
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	445.653.000,00	362.367.000,00	(83.286.000,00)	81,31	
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	445.653.000,00	362.367.000,00	(83.286.000,00)	81,31	
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	68.216.100,00	67.129.100,00	(1.087.000,00)	98,41	
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	68.216.100,00	67.129.100,00	(1.087.000,00)	98,41	
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.216.100,00	67.129.100,00	(1.087.000,00)	98,41	
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	534.600.000,00	496.119.250,00	(38.480.750,00)	92,80	
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	534.600.000,00	496.119.250,00	(38.480.750,00)	92,80	
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	534.600.000,00	496.119.250,00	(38.480.750,00)	92,80	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	126.250.000,00	94.992.000,00	(31.258.000,00)	75,24	
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	126.250.000,00	94.992.000,00	(31.258.000,00)	75,24	
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.250.000,00	94.992.000,00	(31.258.000,00)	75,24	
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12.977.320.000,00	12.649.481.929,00	(327.838.071,00)	97,47	
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	697.000.000,00	673.680.000,00	(23.320.000,00)	96,65	
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	697.000.000,00	673.680.000,00	(23.320.000,00)	96,65	
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	697.000.000,00	673.680.000,00	(23.320.000,00)	96,65	
01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.280.320.000,00	11.975.801.929,00	(304.518.071,00)	97,52	
01.2.07.10.5.1	BELANJA OPERASI	280.320.000,00	279.240.000,00	(1.080.000,00)	99,61	
01.2.07.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	280.320.000,00	279.240.000,00	(1.080.000,00)	99,61	
01.2.07.10.5.2	BELANJA MODAL	12.000.000.000,00	11.696.561.929,00	(303.438.071,00)	97,47	
01.2.07.10.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	12.000.000.000,00	11.696.561.929,00	(303.438.071,00)	97,47	
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.610.112.000,00	1.358.756.356,00	(251.355.644,00)	84,39	
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.000.000,00	23.000.000,00	(2.000.000,00)	92,00	
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	23.000.000,00	(2.000.000,00)	92,00	
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	23.000.000,00	(2.000.000,00)	92,00	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	232.100.000,00	17.662.131,00	(214.437.869,00)	7,61	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	232.100.000,00	17.662.131,00	(214.437.869,00)	7,61	
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	232.100.000,00	17.662.131,00	(214.437.869,00)	7,61	
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.353.012.000,00	1.318.094.225,00	(34.917.775,00)	97,42	
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	1.353.012.000,00	1.318.094.225,00	(34.917.775,00)	97,42	
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.353.012.000,00	1.318.094.225,00	(34.917.775,00)	97,42	
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	301.614.400,00	149.718.435,00	(151.895.965,00)	49,64	
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	230.614.400,00	124.408.435,00	(106.205.965,00)	53,95	
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	230.614.400,00	124.408.435,00	(106.205.965,00)	53,95	
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	230.614.400,00	124.408.435,00	(106.205.965,00)	53,95	
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	71.000.000,00	25.310.000,00	(45.690.000,00)	35,65	
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	51.000.000,00	25.310.000,00	(25.690.000,00)	49,63	
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.000.000,00	25.310.000,00	(25.690.000,00)	49,63	
01.2.09.06.5.2	BELANJA MODAL	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	0	
01.2.09.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	0	
01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	20.072.818.050,00	19.916.521.806,00	(156.296.244,00)	99,22	
01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	20.072.818.050,00	19.916.521.806,00	(156.296.244,00)	99,22	
01.2.15.01.5.1	BELANJA OPERASI	20.072.818.050,00	19.916.521.806,00	(156.296.244,00)	99,22	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.15.01.5.1.01	Belanja Pegawai	20.072.818.050,00	19.916.521.806,00	(156.296.244,00)	99,22	
01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	8.404.240.000,00	8.324.182.193,00	(80.057.807,00)	99,05	
01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0	
01.2.16.02.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0	
01.2.16.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0	
01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	8.354.240.000,00	8.324.182.193,00	(30.057.807,00)	99,64	
01.2.16.03.5.1	BELANJA OPERASI	8.354.240.000,00	8.324.182.193,00	(30.057.807,00)	99,64	
01.2.16.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.354.240.000,00	8.324.182.193,00	(30.057.807,00)	99,64	
02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	5.006.524.648,00	4.402.270.006,00	(604.254.642,00)	87,93	
02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	299.200.000,00	85.042.500,00	(214.157.500,00)	28,42	
02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	299.200.000,00	85.042.500,00	(214.157.500,00)	28,42	
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	299.200.000,00	85.042.500,00	(214.157.500,00)	28,42	
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	299.200.000,00	85.042.500,00	(214.157.500,00)	28,42	
02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	3.997.824.648,00	3.681.547.506,00	(316.277.142,00)	92,09	
02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	2.899.537.148,00	2.803.047.506,00	(96.489.642,00)	96,67	
02.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	2.899.537.148,00	2.803.047.506,00	(96.489.642,00)	96,67	
02.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.899.537.148,00	2.803.047.506,00	(96.489.642,00)	96,67	
02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1.056.000.000,00	878.500.000,00	(177.500.000,00)	83,19	
02.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.056.000.000,00	878.500.000,00	(177.500.000,00)	83,19	
02.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.056.000.000,00	878.500.000,00	(177.500.000,00)	83,19	
02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	42.287.500,00	0,00	(42.287.500,00)	0	
02.2.04.06.5.1	BELANJA OPERASI	42.287.500,00	0,00	(42.287.500,00)	0	
02.2.04.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.287.500,00	0,00	(42.287.500,00)	0	
02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	709.500.000,00	635.680.000,00	(73.820.000,00)	89,60	
02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	709.500.000,00	635.680.000,00	(73.820.000,00)	89,60	
02.2.05.03.5.1	BELANJA OPERASI	709.500.000,00	635.680.000,00	(73.820.000,00)	89,60	
02.2.05.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	709.500.000,00	635.680.000,00	(73.820.000,00)	89,60	
	SURPLUS / DEFISIT	(53.494.364.450,00)	(51.641.158.952,00)	1.853.205.498,00	0	
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		**(53.494.364.450,00)**	**(51.641.158.952,00)**	**1.853.205.498,00**	**0**	

BUPATI BANGLI,

I GUSANG NYOMAN SEDANA ARTA

UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

PERENCANAAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Bangli
Nomor : 2 Tahun 2023
Tanggal : 15 Agustus 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2022

Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN

SKPD : 5-01.5-05.0-00.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	5.785.869.200,00	5.667.700.198,00	(118.169.002,00)	97,96	
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	4.587.236.950,00	4.482.402.377,00	(104.834.573,00)	97,71	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.025.851.200,00	3.962.278.739,00	(63.572.461,00)	98,42	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.980.329.200,00	3.916.762.739,00	(63.566.461,00)	98,40	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.980.329.200,00	3.916.762.739,00	(63.566.461,00)	98,40	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	3.980.329.200,00	3.916.762.739,00	(63.566.461,00)	98,40	
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	45.522.000,00	45.516.000,00	(6.000,00)	99,99	
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	45.522.000,00	45.516.000,00	(6.000,00)	99,99	
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.522.000,00	45.516.000,00	(6.000,00)	99,99	
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	124.498.750,00	97.763.600,00	(26.735.150,00)	78,53	
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	870.800,00	850.000,00	(20.800,00)	97,61	
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	870.800,00	850.000,00	(20.800,00)	97,61	
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	870.800,00	850.000,00	(20.800,00)	97,61	
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.058.900,00	13.046.000,00	(12.900,00)	99,90	
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	13.058.900,00	13.046.000,00	(12.900,00)	99,90	
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.058.900,00	13.046.000,00	(12.900,00)	99,90	
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	85.133.550,00	58.967.600,00	(26.165.950,00)	69,26	
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	85.133.550,00	58.967.600,00	(26.165.950,00)	69,26	
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.133.550,00	58.967.600,00	(26.165.950,00)	69,26	
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	23.335.500,00	22.800.000,00	(535.500,00)	97,71	
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	23.335.500,00	22.800.000,00	(535.500,00)	97,71	
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.335.500,00	22.800.000,00	(535.500,00)	97,71	
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	220.650.000,00	219.887.996,00	(762.004,00)	99,65	
01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	220.650.000,00	219.887.996,00	(762.004,00)	99,65	
01.2.07.10.5.2	BELANJA MODAL	220.650.000,00	219.887.996,00	(762.004,00)	99,65	
01.2.07.10.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	220.650.000,00	219.887.996,00	(762.004,00)	99,65	
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86.385.000,00	80.658.575,00	(5.726.425,00)	93,37	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.835.000,00	15.232.075,00	(4.602.925,00)	76,79	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	19.835.000,00	15.232.075,00	(4.602.925,00)	76,79	
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.835.000,00	15.232.075,00	(4.602.925,00)	76,79	
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	66.550.000,00	65.426.500,00	(1.123.500,00)	98,31	
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	66.550.000,00	65.426.500,00	(1.123.500,00)	98,31	
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.550.000,00	65.426.500,00	(1.123.500,00)	98,31	
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	129.852.000,00	121.813.467,00	(8.038.533,00)	93,81	
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	114.252.000,00	111.223.467,00	(3.028.533,00)	97,35	
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	114.252.000,00	111.223.467,00	(3.028.533,00)	97,35	
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.252.000,00	111.223.467,00	(3.028.533,00)	97,35	
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.600.000,00	10.590.000,00	(5.010.000,00)	67,88	
01.2.09.10.5.1	BELANJA OPERASI	15.600.000,00	10.590.000,00	(5.010.000,00)	67,88	
01.2.09.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.600.000,00	10.590.000,00	(5.010.000,00)	67,88	
02	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	584.265.800,00	575.092.400,00	(9.173.400,00)	98,43	
02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	381.675.000,00	376.073.000,00	(5.602.000,00)	98,53	
02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	304.425.000,00	303.406.800,00	(1.018.200,00)	99,67	
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	304.425.000,00	303.406.800,00	(1.018.200,00)	99,67	
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	304.425.000,00	303.406.800,00	(1.018.200,00)	99,67	
02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	48.125.000,00	44.977.300,00	(3.147.700,00)	93,46	
02.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	48.125.000,00	44.977.300,00	(3.147.700,00)	93,46	
02.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.125.000,00	44.977.300,00	(3.147.700,00)	93,46	
02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	29.125.000,00	27.688.900,00	(1.436.100,00)	95,07	
02.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	29.125.000,00	27.688.900,00	(1.436.100,00)	95,07	
02.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.125.000,00	27.688.900,00	(1.436.100,00)	95,07	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	121.308.300,00	118.616.400,00	(2.691.900,00)	97,78	
02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	96.558.300,00	95.696.400,00	(861.900,00)	99,11	
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	96.558.300,00	95.696.400,00	(861.900,00)	99,11	
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.558.300,00	95.696.400,00	(861.900,00)	99,11	
02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	24.750.000,00	22.920.000,00	(1.830.000,00)	92,61	
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	24.750.000,00	22.920.000,00	(1.830.000,00)	92,61	
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.750.000,00	22.920.000,00	(1.830.000,00)	92,61	
02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	81.282.500,00	80.403.000,00	(879.500,00)	98,92	
02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	49.040.000,00	48.669.000,00	(371.000,00)	99,24	
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	49.040.000,00	48.669.000,00	(371.000,00)	99,24	
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.040.000,00	48.669.000,00	(371.000,00)	99,24	
02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	32.242.500,00	31.734.000,00	(508.500,00)	98,42	
02.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	32.242.500,00	31.734.000,00	(508.500,00)	98,42	
02.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.242.500,00	31.734.000,00	(508.500,00)	98,42	
02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	462.120.000,00	460.191.200,00	(1.928.800,00)	99,58	
02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	462.120.000,00	460.191.200,00	(1.928.800,00)	99,58	
02.2.01.14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	462.120.000,00	460.191.200,00	(1.928.800,00)	99,58	
02.2.01.14.5.1	BELANJA OPERASI	462.120.000,00	460.191.200,00	(1.928.800,00)	99,58	
02.2.01.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	462.120.000,00	460.191.200,00	(1.928.800,00)	99,58	
03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	152.246.450,00	150.014.221,00	(2.232.229,00)	98,53	
03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	21.300.000,00	21.200.000,00	(100.000,00)	99,53	
03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	10.650.000,00	10.600.000,00	(50.000,00)	99,53	
03.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	10.650.000,00	10.600.000,00	(50.000,00)	99,53	
03.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.650.000,00	10.600.000,00	(50.000,00)	99,53	
03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	10.650.000,00	10.600.000,00	(50.000,00)	99,53	
03.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	10.650.000,00	10.600.000,00	(50.000,00)	99,53	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.650.000,00	10.600.000,00	(50.000,00)	99,53	
03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	43.530.000,00	42.432.771,00	(1.097.229,00)	97,48	
03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3.530.000,00	3.480.000,00	(50.000,00)	98,58	
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.530.000,00	3.480.000,00	(50.000,00)	98,58	
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.530.000,00	3.480.000,00	(50.000,00)	98,58	
03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	40.000.000,00	38.952.771,00	(1.047.229,00)	97,38	
03.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	38.952.771,00	(1.047.229,00)	97,38	
03.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	38.952.771,00	(1.047.229,00)	97,38	
03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	87.416.450,00	86.381.450,00	(1.035.000,00)	98,82	
03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3.730.000,00	3.705.000,00	(25.000,00)	99,33	
03.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.730.000,00	3.705.000,00	(25.000,00)	99,33	
03.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.730.000,00	3.705.000,00	(25.000,00)	99,33	
03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	7.620.000,00	7.570.000,00	(50.000,00)	99,34	
03.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	7.620.000,00	7.570.000,00	(50.000,00)	99,34	
03.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.620.000,00	7.570.000,00	(50.000,00)	99,34	
03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	63.766.450,00	63.066.450,00	(700.000,00)	98,90	
03.2.03.05.5.1	BELANJA OPERASI	63.766.450,00	63.066.450,00	(700.000,00)	98,90	
03.2.03.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.766.450,00	63.066.450,00	(700.000,00)	98,90	
03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	12.300.000,00	12.040.000,00	(260.000,00)	97,89	
03.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	12.300.000,00	12.040.000,00	(260.000,00)	97,89	
03.2.03.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.300.000,00	12.040.000,00	(260.000,00)	97,89	
	SURPLUS / DEFISIT	(5.785.869.200,00)	(5.667.700.198,00)	118.169.002,00	0	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**(5.785.869.200,00)**	**(5.667.700.198,00)**	**118.169.002,00**	**0**	

BUPATI BANGLI,

I GEDE NYOMAN SEDANA ARTA

KEUANGAN

BADAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Bangli
Nomor : 2 Tahun 2023
Tanggal : 15 Agustus 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2022

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN

SKPD : 5-02.0-00.0-00.04 Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.4	**PENDAPATAN DAERAH**	1.028.140.559.508,00	969.347.549.798,24	(58.793.009.709,76)	94,28	
00.0.00.00.4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	32.061.905.049,00	46.138.271.808,24	14.076.366.759,24	143,90	
00.0.00.00.4.1.01	Pajak Daerah	21.862.350.000,00	36.707.060.479,07	14.844.710.479,07	167,90	
00.0.00.00.4.1.02	Retribusi Daerah	27.500.000,00	16.504.880,00	(10.995.120,00)	60,02	
00.0.00.00.4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.020.327.749,00	5.597.430.541,18	577.102.792,18	111,50	
00.0.00.00.4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	5.151.727.300,00	3.817.275.907,99	(1.334.451.392,01)	74,10	
00.0.00.00.4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	995.207.663.459,00	922.506.660.280,00	(72.701.003.179,00)	92,69	
00.0.00.00.4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	831.842.424.560,00	767.371.084.017,00	(64.471.340.543,00)	92,25	
00.0.00.00.4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	163.365.238.899,00	155.135.576.263,00	(8.229.662.636,00)	94,96	
00.0.00.00.4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	870.991.000,00	702.617.710,00	(168.373.290,00)	80,67	
00.0.00.00.4.3.01	Pendapatan Hibah	870.991.000,00	702.617.710,00	(168.373.290,00)	80,67	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	161.314.024.047,00	157.623.258.886,00	(3.690.765.161,00)	97,71	
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	13.182.032.181,00	11.149.728.673,00	(2.032.303.508,00)	84,58	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.069.979.781,00	9.391.298.838,00	(1.678.680.943,00)	84,84	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.069.979.781,00	9.391.298.838,00	(1.678.680.943,00)	84,84	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	11.069.979.781,00	9.391.298.838,00	(1.678.680.943,00)	84,84	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	11.069.979.781,00	9.391.298.838,00	(1.678.680.943,00)	84,84	
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	762.947.100,00	735.464.795,00	(27.482.305,00)	96,40	
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.896.000,00	3.702.000,00	(194.000,00)	95,02	
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.896.000,00	3.702.000,00	(194.000,00)	95,02	
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.896.000,00	3.702.000,00	(194.000,00)	95,02	
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.116.100,00	10.251.800,00	(864.300,00)	92,22	
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	11.116.100,00	10.251.800,00	(864.300,00)	92,22	
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.116.100,00	10.251.800,00	(864.300,00)	92,22	
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	656.482.300,00	638.701.870,00	(17.780.430,00)	97,29	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	656.482.300,00	638.701.870,00	(17.780.430,00)	97,29	
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	656.482.300,00	638.701.870,00	(17.780.430,00)	97,29	
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	49.332.700,00	46.329.125,00	(3.003.575,00)	93,91	
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	49.332.700,00	46.329.125,00	(3.003.575,00)	93,91	
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.332.700,00	46.329.125,00	(3.003.575,00)	93,91	
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.120.000,00	8.770.000,00	(3.350.000,00)	72,36	
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	12.120.000,00	8.770.000,00	(3.350.000,00)	72,36	
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.120.000,00	8.770.000,00	(3.350.000,00)	72,36	
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.000.000,00	27.710.000,00	(2.290.000,00)	92,37	
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	27.710.000,00	(2.290.000,00)	92,37	
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	27.710.000,00	(2.290.000,00)	92,37	
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	452.625.000,00	405.718.800,00	(46.906.200,00)	89,64	
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	240.625.000,00	195.970.800,00	(44.654.200,00)	81,44	
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	240.625.000,00	195.970.800,00	(44.654.200,00)	81,44	
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	240.625.000,00	195.970.800,00	(44.654.200,00)	81,44	
01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	212.000.000,00	209.748.000,00	(2.252.000,00)	98,94	
01.2.07.09.5.2	BELANJA MODAL	212.000.000,00	209.748.000,00	(2.252.000,00)	98,94	
01.2.07.09.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	212.000.000,00	209.748.000,00	(2.252.000,00)	98,94	
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	194.110.000,00	166.668.504,00	(27.441.496,00)	85,86	
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	18.450.000,00	16.095.400,00	(2.354.600,00)	87,24	
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	18.450.000,00	16.095.400,00	(2.354.600,00)	87,24	
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.450.000,00	16.095.400,00	(2.354.600,00)	87,24	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	133.860.000,00	109.023.104,00	(24.836.896,00)	81,45	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	133.860.000,00	109.023.104,00	(24.836.896,00)	81,45	
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	133.860.000,00	109.023.104,00	(24.836.896,00)	81,45	
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	41.800.000,00	41.550.000,00	(250.000,00)	99,40	
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	41.800.000,00	41.550.000,00	(250.000,00)	99,40	
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.800.000,00	41.550.000,00	(250.000,00)	99,40	
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	702.370.300,00	450.577.736,00	(251.792.564,00)	64,15	
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	625.640.300,00	387.736.786,00	(237.903.514,00)	61,97	
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	625.640.300,00	387.736.786,00	(237.903.514,00)	61,97	
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	625.640.300,00	387.736.786,00	(237.903.514,00)	61,97	
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	76.730.000,00	62.840.950,00	(13.889.050,00)	81,90	
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	76.730.000,00	62.840.950,00	(13.889.050,00)	81,90	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.730.000,00	62.840.950,00	(13.889.050,00)	81,90	
02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	146.038.708.155,00	144.773.669.463,00	(1.265.038.692,00)	99,13	
02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	868.010.000,00	758.194.745,00	(109.815.255,00)	87,35	
02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	0	
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	0	
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	0	
02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	111.720.000,00	80.783.695,00	(30.936.305,00)	72,31	
02.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	111.720.000,00	80.783.695,00	(30.936.305,00)	72,31	
02.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.720.000,00	80.783.695,00	(30.936.305,00)	72,31	
02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	49.250.000,00	40.649.800,00	(8.600.200,00)	82,54	
02.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	49.250.000,00	40.649.800,00	(8.600.200,00)	82,54	
02.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.250.000,00	40.649.800,00	(8.600.200,00)	82,54	
02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	141.000.000,00	100.282.250,00	(40.717.750,00)	71,12	
02.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	141.000.000,00	100.282.250,00	(40.717.750,00)	71,12	
02.2.01.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	141.000.000,00	100.282.250,00	(40.717.750,00)	71,12	
02.2.01.13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	563.640.000,00	536.479.000,00	(27.161.000,00)	95,18	
02.2.01.13.5.1	BELANJA OPERASI	563.640.000,00	536.479.000,00	(27.161.000,00)	95,18	
02.2.01.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	563.640.000,00	536.479.000,00	(27.161.000,00)	95,18	
02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	131.770.000,00	131.240.000,00	(530.000,00)	99,60	
02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	131.770.000,00	131.240.000,00	(530.000,00)	99,60	
02.2.02.09.5.1	BELANJA OPERASI	131.770.000,00	131.240.000,00	(530.000,00)	99,60	
02.2.02.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	131.770.000,00	131.240.000,00	(530.000,00)	99,60	
02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	158.520.000,00	156.871.000,00	(1.649.000,00)	98,96	
02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	14.320.000,00	13.786.000,00	(534.000,00)	96,27	
02.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	14.320.000,00	13.786.000,00	(534.000,00)	96,27	
02.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.320.000,00	13.786.000,00	(534.000,00)	96,27	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	144.200.000,00	143.085.000,00	(1.115.000,00)	99,23	
02.2.03.05.5.1	BELANJA OPERASI	144.200.000,00	143.085.000,00	(1.115.000,00)	99,23	
02.2.03.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	144.200.000,00	143.085.000,00	(1.115.000,00)	99,23	
02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	144.664.858.155,00	143.542.514.268,00	(1.122.343.887,00)	99,22	
02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	141.175.949.080,00	141.112.057.268,00	(63.891.812,00)	99,95	
02.2.04.08.5.4	BELANJA TRANSFER	141.175.949.080,00	141.112.057.268,00	(63.891.812,00)	99,95	
02.2.04.08.5.4.01	Belanja Bagi Hasil	6.711.232.500,00	6.717.100.000,00	5.867.500,00	100,09	
02.2.04.08.5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	134.464.716.580,00	134.394.957.268,00	(69.759.312,00)	99,95	
02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	3.488.909.075,00	2.430.457.000,00	(1.058.452.075,00)	69,66	
02.2.04.09.5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.488.909.075,00	2.430.457.000,00	(1.058.452.075,00)	69,66	
02.2.04.09.5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.488.909.075,00	2.430.457.000,00	(1.058.452.075,00)	69,66	
02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	215.550.000,00	184.849.450,00	(30.700.550,00)	85,76	
02.2.05.03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	215.550.000,00	184.849.450,00	(30.700.550,00)	85,76	
02.2.05.03.5.1	BELANJA OPERASI	215.550.000,00	184.849.450,00	(30.700.550,00)	85,76	
02.2.05.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	215.550.000,00	184.849.450,00	(30.700.550,00)	85,76	
03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	531.161.500,00	360.008.050,00	(171.153.450,00)	67,78	
03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	531.161.500,00	360.008.050,00	(171.153.450,00)	67,78	
03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	50.000.000,00	48.990.000,00	(1.010.000,00)	97,98	
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	48.990.000,00	(1.010.000,00)	97,98	
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	48.990.000,00	(1.010.000,00)	97,98	
03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	15.000.000,00	14.380.000,00	(620.000,00)	95,87	
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	14.380.000,00	(620.000,00)	95,87	
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.380.000,00	(620.000,00)	95,87	
03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	145.884.000,00	52.164.750,00	(93.719.250,00)	35,76	
03.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	145.884.000,00	52.164.750,00	(93.719.250,00)	35,76	
03.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	145.884.000,00	52.164.750,00	(93.719.250,00)	35,76	
03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	168.446.800,00	131.180.500,00	(37.266.300,00)	77,88	
03.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	168.446.800,00	131.180.500,00	(37.266.300,00)	77,88	
03.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	168.446.800,00	131.180.500,00	(37.266.300,00)	77,88	
03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	115.590.700,00	85.700.600,00	(29.890.100,00)	74,14	
03.2.01.08.5.1	BELANJA OPERASI	115.590.700,00	85.700.600,00	(29.890.100,00)	74,14	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.01.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.590.700,00	85.700.600,00	(29.890.100,00)	74,14	
03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	36.240.000,00	27.592.200,00	(8.647.800,00)	76,14	
03.2.01.10.5.1	BELANJA OPERASI	36.240.000,00	27.592.200,00	(8.647.800,00)	76,14	
03.2.01.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.240.000,00	27.592.200,00	(8.647.800,00)	76,14	
04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	1.562.122.211,00	1.339.852.700,00	(222.269.511,00)	85,77	
04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.562.122.211,00	1.339.852.700,00	(222.269.511,00)	85,77	
04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	218.103.500,00	208.960.500,00	(9.143.000,00)	95,81	
04.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	118.103.500,00	109.560.000,00	(8.543.500,00)	92,77	
04.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.103.500,00	109.560.000,00	(8.543.500,00)	92,77	
04.2.01.04.5.2	BELANJA MODAL	100.000.000,00	99.400.500,00	(599.500,00)	99,40	
04.2.01.04.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	100.000.000,00	99.400.500,00	(599.500,00)	99,40	
04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	340.663.000,00	253.744.200,00	(86.918.800,00)	74,49	
04.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	340.663.000,00	253.744.200,00	(86.918.800,00)	74,49	
04.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	340.663.000,00	253.744.200,00	(86.918.800,00)	74,49	
04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	98.475.811,00	98.200.000,00	(275.811,00)	99,72	
04.2.01.06.5.2	BELANJA MODAL	98.475.811,00	98.200.000,00	(275.811,00)	99,72	
04.2.01.06.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	98.475.811,00	98.200.000,00	(275.811,00)	99,72	
04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	904.879.900,00	778.948.000,00	(125.931.900,00)	86,08	
04.2.01.13.5.1	BELANJA OPERASI	904.879.900,00	778.948.000,00	(125.931.900,00)	86,08	
04.2.01.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	904.879.900,00	778.948.000,00	(125.931.900,00)	86,08	
	SURPLUS / DEFISIT	866.826.535.461,00	811.724.290.912,24	(55.102.244.548,76)	93,64	
	PEMBIAYAAN					
00.0.00.00.6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	181.524.630.492,00	178.301.212.748,51	(3.223.417.743,49)	98,22	
00.0.00.00.6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	117.208.560.192,00	117.208.560.191,51	(0,49)	100,00	
00.0.00.00.6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	64.316.070.300,00	61.092.652.557,00	(3.223.417.743,00)	94,99	
00.0.00.00.6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	100,00	
00.0.00.00.6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	100,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	178.524.630.492,00	175.301.212.748,51	(3.223.417.743,49)	98,19	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**1.045.351.165.953,00**	**987.025.503.660,75**	**(58.325.662.292,25)**	**94,42**	

BUPATI BANGLI,

I GUSTI PUTU SANG NYOMAN SEDANA ARTA

KEPEGAWAIAN

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Bangli
Nomor : 2 Tahun 2023
Tanggal : 15 Agustus 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2022

Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN

SKPD : 5-03.5-04.0-00.01 Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	10.227.760.440,00	9.809.611.305,00	(418.149.135,00)	95,91	
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	8.640.715.890,00	8.493.880.765,00	(146.835.125,00)	98,30	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.481.576.440,00	4.415.064.902,00	(66.511.538,00)	98,52	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.481.576.440,00	4.415.064.902,00	(66.511.538,00)	98,52	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.481.576.440,00	4.415.064.902,00	(66.511.538,00)	98,52	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	4.481.576.440,00	4.415.064.902,00	(66.511.538,00)	98,52	
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.714.009.050,00	3.698.067.030,00	(15.942.020,00)	99,57	
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	3.672.034.000,00	3.659.328.000,00	(12.706.000,00)	99,65	
01.2.05.02.5.1	BELANJA OPERASI	3.672.034.000,00	3.659.328.000,00	(12.706.000,00)	99,65	
01.2.05.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.672.034.000,00	3.659.328.000,00	(12.706.000,00)	99,65	
01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	41.975.050,00	38.739.030,00	(3.236.020,00)	92,29	
01.2.05.10.5.1	BELANJA OPERASI	41.975.050,00	38.739.030,00	(3.236.020,00)	92,29	
01.2.05.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.975.050,00	38.739.030,00	(3.236.020,00)	92,29	
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	215.538.400,00	183.760.650,00	(31.777.750,00)	85,26	
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.005.000,00	860.000,00	(145.000,00)	85,57	
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.005.000,00	860.000,00	(145.000,00)	85,57	
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.005.000,00	860.000,00	(145.000,00)	85,57	
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.091.800,00	2.047.000,00	(44.800,00)	97,86	
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	2.091.800,00	2.047.000,00	(44.800,00)	97,86	
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.091.800,00	2.047.000,00	(44.800,00)	97,86	
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	200.030.200,00	169.106.450,00	(30.923.750,00)	84,54	
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	200.030.200,00	169.106.450,00	(30.923.750,00)	84,54	
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.030.200,00	169.106.450,00	(30.923.750,00)	84,54	
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.071.400,00	6.407.200,00	(664.200,00)	90,61	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	7.071.400,00	6.407.200,00	(664.200,00)	90,61	
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.071.400,00	6.407.200,00	(664.200,00)	90,61	
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.340.000,00	5.340.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	5.340.000,00	5.340.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.340.000,00	5.340.000,00	0,00	100,00	
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	35.600.000,00	35.436.750,00	(163.250,00)	99,54	
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.600.000,00	35.436.750,00	(163.250,00)	99,54	
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	35.600.000,00	35.436.750,00	(163.250,00)	99,54	
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.600.000,00	35.436.750,00	(163.250,00)	99,54	
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	73.200.000,00	61.061.350,00	(12.138.650,00)	83,42	
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.500.000,00	19.361.350,00	(6.138.650,00)	75,93	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	25.500.000,00	19.361.350,00	(6.138.650,00)	75,93	
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.500.000,00	19.361.350,00	(6.138.650,00)	75,93	
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	45.300.000,00	39.300.000,00	(6.000.000,00)	86,75	
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	45.300.000,00	39.300.000,00	(6.000.000,00)	86,75	
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.300.000,00	39.300.000,00	(6.000.000,00)	86,75	
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120.792.000,00	100.490.083,00	(20.301.917,00)	83,19	
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	117.592.000,00	97.405.083,00	(20.186.917,00)	82,83	
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	117.592.000,00	97.405.083,00	(20.186.917,00)	82,83	
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.592.000,00	97.405.083,00	(20.186.917,00)	82,83	
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.200.000,00	3.085.000,00	(115.000,00)	96,41	
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	3.200.000,00	3.085.000,00	(115.000,00)	96,41	
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	3.085.000,00	(115.000,00)	96,41	
02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	396.552.050,00	344.495.040,00	(52.057.010,00)	86,87	
02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	123.950.600,00	119.609.760,00	(4.340.840,00)	96,50	
02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	6.039.900,00	5.731.340,00	(308.560,00)	94,89	
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	6.039.900,00	5.731.340,00	(308.560,00)	94,89	
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.039.900,00	5.731.340,00	(308.560,00)	94,89	
02.2.01.04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	14.249.750,00	13.966.350,00	(283.400,00)	98,01	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	14.249.750,00	13.966.350,00	(283.400,00)	98,01	
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.249.750,00	13.966.350,00	(283.400,00)	98,01	
02.2.01.07	Evaluasi Pemberhentian ASN	23.925.650,00	23.591.290,00	(334.360,00)	98,60	
02.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	23.925.650,00	23.591.290,00	(334.360,00)	98,60	
02.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.925.650,00	23.591.290,00	(334.360,00)	98,60	
02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	44.685.600,00	41.656.760,00	(3.028.840,00)	93,22	
02.2.01.10.5.1	BELANJA OPERASI	7.049.900,00	4.793.660,00	(2.256.240,00)	68,00	
02.2.01.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.049.900,00	4.793.660,00	(2.256.240,00)	68,00	
02.2.01.10.5.2	BELANJA MODAL	37.635.700,00	36.863.100,00	(772.600,00)	97,95	
02.2.01.10.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	37.635.700,00	36.863.100,00	(772.600,00)	97,95	
02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	27.999.800,00	27.942.680,00	(57.120,00)	99,80	
02.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	27.999.800,00	27.942.680,00	(57.120,00)	99,80	
02.2.01.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.999.800,00	27.942.680,00	(57.120,00)	99,80	
02.2.01.12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	7.049.900,00	6.721.340,00	(328.560,00)	95,34	
02.2.01.12.5.1	BELANJA OPERASI	7.049.900,00	6.721.340,00	(328.560,00)	95,34	
02.2.01.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.049.900,00	6.721.340,00	(328.560,00)	95,34	
02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	28.226.000,00	26.651.600,00	(1.574.400,00)	94,42	
02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	17.176.000,00	16.281.600,00	(894.400,00)	94,79	
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	17.176.000,00	16.281.600,00	(894.400,00)	94,79	
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.176.000,00	16.281.600,00	(894.400,00)	94,79	
02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	11.050.000,00	10.370.000,00	(680.000,00)	93,85	
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	11.050.000,00	10.370.000,00	(680.000,00)	93,85	
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.050.000,00	10.370.000,00	(680.000,00)	93,85	
02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	172.875.650,00	128.441.000,00	(44.434.650,00)	74,30	
02.2.03.03	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	50.000.000,00	36.417.500,00	(13.582.500,00)	72,84	
02.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	36.417.500,00	(13.582.500,00)	72,84	
02.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	36.417.500,00	(13.582.500,00)	72,84	
02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	37.960.350,00	24.061.500,00	(13.898.850,00)	63,39	
02.2.03.04.5.1	BELANJA OPERASI	37.960.350,00	24.061.500,00	(13.898.850,00)	63,39	
02.2.03.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.960.350,00	24.061.500,00	(13.898.850,00)	63,39	
02.2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	84.915.300,00	67.962.000,00	(16.953.300,00)	80,04	
02.2.03.14.5.1	BELANJA OPERASI	84.915.300,00	67.962.000,00	(16.953.300,00)	80,04	
02.2.03.14.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.915.300,00	67.962.000,00	(16.953.300,00)	80,04	
02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	71.499.800,00	69.792.680,00	(1.707.120,00)	97,61	
02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	34.999.900,00	34.771.340,00	(228.560,00)	99,35	
02.2.04.04.5.1	BELANJA OPERASI	34.999.900,00	34.771.340,00	(228.560,00)	99,35	
02.2.04.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.999.900,00	34.771.340,00	(228.560,00)	99,35	
02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	36.499.900,00	35.021.340,00	(1.478.560,00)	95,95	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.04.07.5.1	BELANJA OPERASI	36.499.900,00	35.021.340,00	(1.478.560,00)	95,95	
02.2.04.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.499.900,00	35.021.340,00	(1.478.560,00)	95,95	
02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	1.190.492.500,00	971.235.500,00	(219.257.000,00)	81,58	
02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1.190.492.500,00	971.235.500,00	(219.257.000,00)	81,58	
02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1.190.492.500,00	971.235.500,00	(219.257.000,00)	81,58	
02.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	1.190.492.500,00	971.235.500,00	(219.257.000,00)	81,58	
02.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.190.492.500,00	971.235.500,00	(219.257.000,00)	81,58	
	SURPLUS / DEFISIT	(10.227.760.440,00)	(9.809.611.305,00)	418.149.135,00	0	
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		**(10.227.760.440,00)**	**(9.809.611.305,00)**	**418.149.135,00**	**0**	

BUPATI BANGLI,

I GUSTI NGURAH SANG NYOMAN SEDANA ARTA

UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN

INSPEKTORAT

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Bangli
Nomor : 2 Tahun 2023
Tanggal : 15 Agustus 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2022

Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	7.693.854.665,00	7.498.103.365,00	(195.751.300,00)	97,46	
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	7.040.699.665,00	6.858.558.365,00	(182.141.300,00)	97,41	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.219.304.665,00	6.110.972.277,00	(108.332.388,00)	98,26	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.219.304.665,00	6.110.972.277,00	(108.332.388,00)	98,26	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	6.219.304.665,00	6.110.972.277,00	(108.332.388,00)	98,26	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	6.219.304.665,00	6.110.972.277,00	(108.332.388,00)	98,26	
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60.640.000,00	35.019.500,00	(25.620.500,00)	57,75	
01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	60.640.000,00	35.019.500,00	(25.620.500,00)	57,75	
01.2.05.09.5.1	BELANJA OPERASI	60.640.000,00	35.019.500,00	(25.620.500,00)	57,75	
01.2.05.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.640.000,00	35.019.500,00	(25.620.500,00)	57,75	
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	307.835.000,00	297.686.000,00	(10.149.000,00)	96,70	
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.568.300,00	3.175.500,00	(392.800,00)	88,99	
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.568.300,00	3.175.500,00	(392.800,00)	88,99	
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.568.300,00	3.175.500,00	(392.800,00)	88,99	
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	245.606.700,00	237.471.500,00	(8.135.200,00)	96,69	
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	245.606.700,00	237.471.500,00	(8.135.200,00)	96,69	
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	245.606.700,00	237.471.500,00	(8.135.200,00)	96,69	
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.210.000,00	13.600.000,00	(610.000,00)	95,71	
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	14.210.000,00	13.600.000,00	(610.000,00)	95,71	
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.210.000,00	13.600.000,00	(610.000,00)	95,71	
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.520.000,00	4.620.000,00	(900.000,00)	83,70	
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	5.520.000,00	4.620.000,00	(900.000,00)	83,70	
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.520.000,00	4.620.000,00	(900.000,00)	83,70	
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	38.930.000,00	38.819.000,00	(111.000,00)	99,71	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	38.930.000,00	38.819.000,00	(111.000,00)	99,71	
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.930.000,00	38.819.000,00	(111.000,00)	99,71	
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	140.000.000,00	129.984.997,00	(10.015.003,00)	92,85	
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	140.000.000,00	129.984.997,00	(10.015.003,00)	92,85	
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	140.000.000,00	129.984.997,00	(10.015.003,00)	92,85	
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	140.000.000,00	129.984.997,00	(10.015.003,00)	92,85	
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88.200.000,00	79.994.536,00	(8.205.464,00)	90,70	
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.700.000,00	4.272.500,00	(427.500,00)	90,90	
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.700.000,00	4.272.500,00	(427.500,00)	90,90	
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.700.000,00	4.272.500,00	(427.500,00)	90,90	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.400.000,00	16.631.936,00	(6.768.064,00)	71,08	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	23.400.000,00	16.631.936,00	(6.768.064,00)	71,08	
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.400.000,00	16.631.936,00	(6.768.064,00)	71,08	
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60.100.000,00	59.090.100,00	(1.009.900,00)	98,32	
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	60.100.000,00	59.090.100,00	(1.009.900,00)	98,32	
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.100.000,00	59.090.100,00	(1.009.900,00)	98,32	
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	224.720.000,00	204.901.055,00	(19.818.945,00)	91,18	
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	197.720.000,00	177.926.055,00	(19.793.945,00)	89,99	
01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	197.720.000,00	177.926.055,00	(19.793.945,00)	89,99	
01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	197.720.000,00	177.926.055,00	(19.793.945,00)	89,99	
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.000.000,00	26.975.000,00	(25.000,00)	99,91	
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	27.000.000,00	26.975.000,00	(25.000,00)	99,91	
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	26.975.000,00	(25.000,00)	99,91	
02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	261.200.000,00	254.900.000,00	(6.300.000,00)	97,59	
02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	261.200.000,00	254.900.000,00	(6.300.000,00)	97,59	
02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	220.200.000,00	215.700.000,00	(4.500.000,00)	97,96	
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	220.200.000,00	215.700.000,00	(4.500.000,00)	97,96	
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	220.200.000,00	215.700.000,00	(4.500.000,00)	97,96	
02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	41.000.000,00	39.200.000,00	(1.800.000,00)	95,61	
02.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	41.000.000,00	39.200.000,00	(1.800.000,00)	95,61	
02.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.000.000,00	39.200.000,00	(1.800.000,00)	95,61	
03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	391.955.000,00	384.645.000,00	(7.310.000,00)	98,13	
03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	391.955.000,00	384.645.000,00	(7.310.000,00)	98,13	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	34.800.000,00	33.000.000,00	(1.800.000,00)	94,83	
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	34.800.000,00	33.000.000,00	(1.800.000,00)	94,83	
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.800.000,00	33.000.000,00	(1.800.000,00)	94,83	
03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	322.155.000,00	316.645.000,00	(5.510.000,00)	98,29	
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	322.155.000,00	316.645.000,00	(5.510.000,00)	98,29	
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	322.155.000,00	316.645.000,00	(5.510.000,00)	98,29	
03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00	
	SURPLUS / DEFISIT	(7.693.854.665,00)	(7.498.103.365,00)	195.751.300,00	0	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**(7.693.854.665,00)**	**(7.498.103.365,00)**	**195.751.300,00**	**0**	

BUPATI BANGLI,

I GEDE SANG NYOMAN SEDANA ARTA

UNSUR KEWILAYAHAN

KECAMATAN

KECAMATAN BANGLI

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Bangli
Nomor : 2 Tahun 2023
Tanggal : 15 Agustus 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN

SKPD : 7-01.0-00.0-00.01 Kecamatan Bangli

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	10.670.015.320,00	10.251.399.933,00	(418.615.387,00)	96,08	
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	8.967.530.970,00	8.720.567.183,00	(246.963.787,00)	97,25	
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.216.410.320,00	6.172.340.572,00	(44.069.748,00)	99,29	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.216.410.320,00	6.172.340.572,00	(44.069.748,00)	99,29	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	6.216.410.320,00	6.172.340.572,00	(44.069.748,00)	99,29	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	6.216.410.320,00	6.172.340.572,00	(44.069.748,00)	99,29	
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	800.275.000,00	760.396.703,00	(39.878.297,00)	95,02	
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.355.300,00	4.335.800,00	(19.500,00)	99,55	
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.355.300,00	4.335.800,00	(19.500,00)	99,55	
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.355.300,00	4.335.800,00	(19.500,00)	99,55	
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.139.200,00	14.714.000,00	(425.200,00)	97,19	
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	15.139.200,00	14.714.000,00	(425.200,00)	97,19	
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.139.200,00	14.714.000,00	(425.200,00)	97,19	
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	649.082.200,00	626.729.353,00	(22.352.847,00)	96,56	
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	649.082.200,00	626.729.353,00	(22.352.847,00)	96,56	
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	649.082.200,00	626.729.353,00	(22.352.847,00)	96,56	
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	32.795.300,00	28.187.800,00	(4.607.500,00)	85,95	
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	32.795.300,00	28.187.800,00	(4.607.500,00)	85,95	
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.795.300,00	28.187.800,00	(4.607.500,00)	85,95	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13.020.000,00	13.020.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	13.020.000,00	13.020.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.020.000,00	13.020.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	85.883.000,00	73.409.750,00	(12.473.250,00)	85,48	
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	85.883.000,00	73.409.750,00	(12.473.250,00)	85,48	
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.883.000,00	73.409.750,00	(12.473.250,00)	85,48	
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	91.842.650,00	78.580.000,00	(13.262.650,00)	85,56	
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	91.842.650,00	78.580.000,00	(13.262.650,00)	85,56	
01.2.07.06.5.1	BELANJA OPERASI	2.393.150,00	0,00	(2.393.150,00)	0	
01.2.07.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.393.150,00	0,00	(2.393.150,00)	0	
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	89.449.500,00	78.580.000,00	(10.869.500,00)	87,85	
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	89.449.500,00	78.580.000,00	(10.869.500,00)	87,85	
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.642.585.000,00	1.508.467.608,00	(134.117.392,00)	91,83	
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	64.770.000,00	35.930.108,00	(28.839.892,00)	55,47	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	64.770.000,00	35.930.108,00	(28.839.892,00)	55,47	
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.770.000,00	35.930.108,00	(28.839.892,00)	55,47	
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.562.615.000,00	1.457.337.500,00	(105.277.500,00)	93,26	
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	1.562.615.000,00	1.457.337.500,00	(105.277.500,00)	93,26	
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.562.615.000,00	1.457.337.500,00	(105.277.500,00)	93,26	
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	200.818.000,00	185.182.300,00	(15.635.700,00)	92,21	
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	71.418.000,00	62.768.300,00	(8.649.700,00)	87,89	
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	71.418.000,00	62.768.300,00	(8.649.700,00)	87,89	
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.418.000,00	62.768.300,00	(8.649.700,00)	87,89	
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.400.000,00	22.945.000,00	(6.455.000,00)	78,04	
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	29.400.000,00	22.945.000,00	(6.455.000,00)	78,04	
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.400.000,00	22.945.000,00	(6.455.000,00)	78,04	
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000,00	99.469.000,00	(531.000,00)	99,47	
01.2.09.09.5.2	BELANJA MODAL	100.000.000,00	99.469.000,00	(531.000,00)	99,47	
01.2.09.09.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	99.469.000,00	(531.000,00)	99,47	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	26.965.400,00	25.034.500,00	(1.930.900,00)	92,84	
02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	26.965.400,00	25.034.500,00	(1.930.900,00)	92,84	
02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	26.965.400,00	25.034.500,00	(1.930.900,00)	92,84	
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	26.965.400,00	25.034.500,00	(1.930.900,00)	92,84	
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.965.400,00	25.034.500,00	(1.930.900,00)	92,84	
03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	1.370.661.950,00	1.223.765.750,00	(146.896.200,00)	89,28	
03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	350.108.600,00	336.224.750,00	(13.883.850,00)	96,03	
03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	350.108.600,00	336.224.750,00	(13.883.850,00)	96,03	
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	350.108.600,00	336.224.750,00	(13.883.850,00)	96,03	
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.108.600,00	336.224.750,00	(13.883.850,00)	96,03	
03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.020.553.350,00	887.541.000,00	(133.012.350,00)	86,97	
03.2.02.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	42.517.450,00	33.711.850,00	(8.805.600,00)	79,29	
03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	42.517.450,00	33.711.850,00	(8.805.600,00)	79,29	
03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.517.450,00	33.711.850,00	(8.805.600,00)	79,29	
03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	802.524.800,00	772.886.650,00	(29.638.150,00)	96,31	
03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	791.762.550,00	762.341.650,00	(29.420.900,00)	96,28	
03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	791.762.550,00	762.341.650,00	(29.420.900,00)	96,28	
03.2.02.02.5.2	BELANJA MODAL	10.762.250,00	10.545.000,00	(217.250,00)	97,98	
03.2.02.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.762.250,00	10.545.000,00	(217.250,00)	97,98	
03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	172.186.100,00	77.780.000,00	(94.406.100,00)	45,17	
03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	158.996.100,00	77.780.000,00	(81.216.100,00)	48,92	
03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	158.996.100,00	77.780.000,00	(81.216.100,00)	48,92	
03.2.02.03.5.2	BELANJA MODAL	13.190.000,00	0,00	(13.190.000,00)	0	
03.2.02.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.190.000,00	0,00	(13.190.000,00)	0	
03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	3.325.000,00	3.162.500,00	(162.500,00)	95,11	
03.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	3.325.000,00	3.162.500,00	(162.500,00)	95,11	
03.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.325.000,00	3.162.500,00	(162.500,00)	95,11	
04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	204.150.000,00	193.710.000,00	(10.440.000,00)	94,89	
04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	204.150.000,00	193.710.000,00	(10.440.000,00)	94,89	
04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	204.150.000,00	193.710.000,00	(10.440.000,00)	94,89	
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	204.150.000,00	193.710.000,00	(10.440.000,00)	94,89	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	204.150.000,00	193.710.000,00	(10.440.000,00)	94,89	
05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	88.347.000,00	76.637.500,00	(11.709.500,00)	86,75	
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	88.347.000,00	76.637.500,00	(11.709.500,00)	86,75	
05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	88.347.000,00	76.637.500,00	(11.709.500,00)	86,75	
05.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	88.347.000,00	76.637.500,00	(11.709.500,00)	86,75	
05.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.347.000,00	76.637.500,00	(11.709.500,00)	86,75	
06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	12.360.000,00	11.685.000,00	(675.000,00)	94,54	
06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12.360.000,00	11.685.000,00	(675.000,00)	94,54	
06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	12.360.000,00	11.685.000,00	(675.000,00)	94,54	
06.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	12.360.000,00	11.685.000,00	(675.000,00)	94,54	
06.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.360.000,00	11.685.000,00	(675.000,00)	94,54	
	SURPLUS / DEFISIT	(10.670.015.320,00)	(10.251.399.933,00)	418.615.387,00	0	
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		**(10.670.015.320,00)**	**(10.251.399.933,00)**	**418.615.387,00**	**0**	

BUPATI BANGLI,

I GUSTI NGURAH SANG NYOMAN SEDANA ARTA

KECAMATAN KINTAMANI

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Bangli
Nomor : 2 Tahun 2023
Tanggal : 15 Agustus 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN

SKPD : 7-01.0-00.0-00.02 Kecamatan Kintamani

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	3.951.823.600,00	3.910.936.427,00	(40.887.173,00)	98,97	
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	3.696.849.850,00	3.655.983.677,00	(40.866.173,00)	98,89	
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.437.000,00	13.427.000,00	(10.000,00)	99,93	
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	685.000,00	675.000,00	(10.000,00)	98,54	
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	685.000,00	675.000,00	(10.000,00)	98,54	
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	685.000,00	675.000,00	(10.000,00)	98,54	
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.752.000,00	12.752.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	12.752.000,00	12.752.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.752.000,00	12.752.000,00	0,00	100,00	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.251.013.600,00	3.215.479.727,00	(35.533.873,00)	98,91	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.251.013.600,00	3.215.479.727,00	(35.533.873,00)	98,91	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.251.013.600,00	3.215.479.727,00	(35.533.873,00)	98,91	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	3.251.013.600,00	3.215.479.727,00	(35.533.873,00)	98,91	
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	174.689.350,00	174.588.650,00	(100.700,00)	99,94	
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	408.400,00	408.400,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	408.400,00	408.400,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	408.400,00	408.400,00	0,00	100,00	
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	172.025.950,00	171.925.250,00	(100.700,00)	99,94	
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	172.025.950,00	171.925.250,00	(100.700,00)	99,94	
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	172.025.950,00	171.925.250,00	(100.700,00)	99,94	
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.175.000,00	1.175.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	1.175.000,00	1.175.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.175.000,00	1.175.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	100,00	
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	108.610.000,00	105.034.100,00	(3.575.900,00)	96,71	
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.400.000,00	14.824.100,00	(3.575.900,00)	80,57	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	18.400.000,00	14.824.100,00	(3.575.900,00)	80,57	
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.400.000,00	14.824.100,00	(3.575.900,00)	80,57	
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	86.660.000,00	86.660.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	86.660.000,00	86.660.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.660.000,00	86.660.000,00	0,00	100,00	
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	149.099.900,00	147.454.200,00	(1.645.700,00)	98,90	
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	147.599.900,00	145.954.200,00	(1.645.700,00)	98,89	
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	147.599.900,00	145.954.200,00	(1.645.700,00)	98,89	
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	147.599.900,00	145.954.200,00	(1.645.700,00)	98,89	
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	119.205.500,00	119.205.500,00	0,00	100,00	
02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	64.385.500,00	64.385.500,00	0,00	100,00	
02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	21.947.500,00	21.947.500,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	21.947.500,00	21.947.500,00	0,00	100,00	
02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.947.500,00	21.947.500,00	0,00	100,00	
02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	42.438.000,00	42.438.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	42.438.000,00	42.438.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.438.000,00	42.438.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	54.820.000,00	54.820.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	54.820.000,00	54.820.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	54.820.000,00	54.820.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.820.000,00	54.820.000,00	0,00	100,00	
03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	46.719.250,00	46.698.250,00	(21.000,00)	99,96	
03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	46.719.250,00	46.698.250,00	(21.000,00)	99,96	
03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	39.830.000,00	39.830.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	39.830.000,00	39.830.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.830.000,00	39.830.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6.889.250,00	6.868.250,00	(21.000,00)	99,70	
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	6.889.250,00	6.868.250,00	(21.000,00)	99,70	
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.889.250,00	6.868.250,00	(21.000,00)	99,70	
04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	33.435.000,00	33.435.000,00	0,00	100,00	
04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	33.435.000,00	33.435.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	33.435.000,00	33.435.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	33.435.000,00	33.435.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.435.000,00	33.435.000,00	0,00	100,00	
06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	55.614.000,00	55.614.000,00	0,00	100,00	
06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	55.614.000,00	55.614.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	55.614.000,00	55.614.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	55.614.000,00	55.614.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.614.000,00	55.614.000,00	0,00	100,00	
	SURPLUS / DEFISIT	(3.951.823.600,00)	(3.910.936.427,00)	40.887.173,00	0	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**(3.951.823.600,00)**	**(3.910.936.427,00)**	**40.887.173,00**	**0**	

BUPATI BANGLI,

I GUSTI NGURAH PUTU SEDANA ARTA

KECAMATAN SUSUT

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Bangli
Nomor : 2 Tahun 2023
Tanggal : 15 Agustus 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN

SKPD : 7-01.0-00.0-00.03 Kecamatan Susut

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	3.069.790.720,00	3.005.458.615,00	(64.332.105,00)	97,90	
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	2.955.375.720,00	2.891.193.615,00	(64.182.105,00)	97,83	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.655.480.720,00	2.598.347.204,00	(57.133.516,00)	97,85	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.655.480.720,00	2.598.347.204,00	(57.133.516,00)	97,85	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.655.480.720,00	2.598.347.204,00	(57.133.516,00)	97,85	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.655.480.720,00	2.598.347.204,00	(57.133.516,00)	97,85	
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	222.287.000,00	220.088.000,00	(2.199.000,00)	99,01	
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.897.000,00	22.897.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	22.897.000,00	22.897.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.897.000,00	22.897.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	167.689.000,00	165.709.000,00	(1.980.000,00)	98,82	
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	167.689.000,00	165.709.000,00	(1.980.000,00)	98,82	
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	167.689.000,00	165.709.000,00	(1.980.000,00)	98,82	
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.381.000,00	7.381.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	7.381.000,00	7.381.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.381.000,00	7.381.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	22.220.000,00	22.001.000,00	(219.000,00)	99,01	
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	22.220.000,00	22.001.000,00	(219.000,00)	99,01	
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.220.000,00	22.001.000,00	(219.000,00)	99,01	
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.038.000,00	11.468.611,00	(569.389,00)	95,27	
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.490.000,00	1.490.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.490.000,00	1.490.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.490.000,00	1.490.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.248.000,00	9.678.611,00	(569.389,00)	94,44	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	10.248.000,00	9.678.611,00	(569.389,00)	94,44	
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.248.000,00	9.678.611,00	(569.389,00)	94,44	
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.570.000,00	61.289.800,00	(4.280.200,00)	93,47	
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	64.570.000,00	60.289.800,00	(4.280.200,00)	93,37	
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	64.570.000,00	60.289.800,00	(4.280.200,00)	93,37	
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.570.000,00	60.289.800,00	(4.280.200,00)	93,37	
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	59.725.000,00	59.615.000,00	(110.000,00)	99,82	
03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	59.725.000,00	59.615.000,00	(110.000,00)	99,82	
03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3.025.000,00	2.975.000,00	(50.000,00)	98,35	
03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.025.000,00	2.975.000,00	(50.000,00)	98,35	
03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.025.000,00	2.975.000,00	(50.000,00)	98,35	
03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	56.700.000,00	56.640.000,00	(60.000,00)	99,89	
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	56.700.000,00	56.640.000,00	(60.000,00)	99,89	
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.700.000,00	56.640.000,00	(60.000,00)	99,89	
04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	54.690.000,00	54.650.000,00	(40.000,00)	99,93	
04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	54.690.000,00	54.650.000,00	(40.000,00)	99,93	
04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	54.690.000,00	54.650.000,00	(40.000,00)	99,93	
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	54.690.000,00	54.650.000,00	(40.000,00)	99,93	
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.690.000,00	54.650.000,00	(40.000,00)	99,93	
	SURPLUS / DEFISIT	(3.069.790.720,00)	(3.005.458.615,00)	64.332.105,00	0	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**(3.069.790.720,00)**	**(3.005.458.615,00)**	**64.332.105,00**	**0**	

BUPATI BANGLI,

I SANG NYOMAN SEDANA ARTA

KECAMATAN TEMBUKU

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Bangli
Nomor : 2 Tahun 2023
Tanggal : 15 Agustus 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN

SKPD : 7-01.0-00.0-00.04 Kecamatan Tembuku

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	4.026.068.400,00	3.910.220.490,00	(115.847.910,00)	97,12	
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	3.958.961.900,00	3.843.977.490,00	(114.984.410,00)	97,10	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.695.628.400,00	3.583.930.669,00	(111.697.731,00)	96,98	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.695.628.400,00	3.583.930.669,00	(111.697.731,00)	96,98	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.695.628.400,00	3.583.930.669,00	(111.697.731,00)	96,98	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	3.695.628.400,00	3.583.930.669,00	(111.697.731,00)	96,98	
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	139.322.500,00	138.699.500,00	(623.000,00)	99,55	
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.817.900,00	2.817.900,00	0,00	100,00	
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.817.900,00	2.817.900,00	0,00	100,00	
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.817.900,00	2.817.900,00	0,00	100,00	
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.109.500,00	4.109.500,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	4.109.500,00	4.109.500,00	0,00	100,00	
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.109.500,00	4.109.500,00	0,00	100,00	
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	120.400.100,00	119.884.600,00	(515.500,00)	99,57	
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	120.400.100,00	119.884.600,00	(515.500,00)	99,57	
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.400.100,00	119.884.600,00	(515.500,00)	99,57	
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.340.000,00	3.340.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	3.340.000,00	3.340.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.340.000,00	3.340.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.575.000,00	7.467.500,00	(107.500,00)	98,58	
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	7.575.000,00	7.467.500,00	(107.500,00)	98,58	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.575.000,00	7.467.500,00	(107.500,00)	98,58	
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.740.000,00	60.575.021,00	(2.164.979,00)	96,55	
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.690.000,00	14.525.021,00	(2.164.979,00)	87,03	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	16.690.000,00	14.525.021,00	(2.164.979,00)	87,03	
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.690.000,00	14.525.021,00	(2.164.979,00)	87,03	
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	43.800.000,00	43.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	43.800.000,00	43.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.800.000,00	43.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.271.000,00	60.772.300,00	(498.700,00)	99,19	
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	58.871.000,00	58.372.300,00	(498.700,00)	99,15	
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	58.871.000,00	58.372.300,00	(498.700,00)	99,15	
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.871.000,00	58.372.300,00	(498.700,00)	99,15	
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	32.110.000,00	31.890.000,00	(220.000,00)	99,31	
02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	32.110.000,00	31.890.000,00	(220.000,00)	99,31	
02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	26.050.000,00	25.950.000,00	(100.000,00)	99,62	
02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	26.050.000,00	25.950.000,00	(100.000,00)	99,62	
02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.050.000,00	25.950.000,00	(100.000,00)	99,62	
02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6.060.000,00	5.940.000,00	(120.000,00)	98,02	
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	6.060.000,00	5.940.000,00	(120.000,00)	98,02	
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.060.000,00	5.940.000,00	(120.000,00)	98,02	
03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	21.866.500,00	21.433.500,00	(433.000,00)	98,02	
03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	21.866.500,00	21.433.500,00	(433.000,00)	98,02	
03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	21.866.500,00	21.433.500,00	(433.000,00)	98,02	
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	21.866.500,00	21.433.500,00	(433.000,00)	98,02	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.866.500,00	21.433.500,00	(433.000,00)	98,02	
04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	6.060.000,00	5.940.000,00	(120.000,00)	98,02	
04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6.060.000,00	5.940.000,00	(120.000,00)	98,02	
04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	6.060.000,00	5.940.000,00	(120.000,00)	98,02	
04.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	6.060.000,00	5.940.000,00	(120.000,00)	98,02	
04.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.060.000,00	5.940.000,00	(120.000,00)	98,02	
05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	3.030.000,00	3.019.500,00	(10.500,00)	99,65	
05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	3.030.000,00	3.019.500,00	(10.500,00)	99,65	
05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	3.030.000,00	3.019.500,00	(10.500,00)	99,65	
05.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	3.030.000,00	3.019.500,00	(10.500,00)	99,65	
05.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.030.000,00	3.019.500,00	(10.500,00)	99,65	
06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	4.040.000,00	3.960.000,00	(80.000,00)	98,02	
06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4.040.000,00	3.960.000,00	(80.000,00)	98,02	
06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	4.040.000,00	3.960.000,00	(80.000,00)	98,02	
06.2.01.13.5.1	BELANJA OPERASI	4.040.000,00	3.960.000,00	(80.000,00)	98,02	
06.2.01.13.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.040.000,00	3.960.000,00	(80.000,00)	98,02	
	SURPLUS / DEFISIT	(4.026.068.400,00)	(3.910.220.490,00)	115.847.910,00	0	
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		**(4.026.068.400,00)**	**(3.910.220.490,00)**	**115.847.910,00**	**0**	

BUPATI BANGLI,

I GUSTI PUTU SANG NYOMAN SEDANA ARTA

UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Bangli
Nomor : 2 Tahun 2023
Tanggal : 15 Agustus 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2022

Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

SKPD : 8-01.0-00.0-00.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	5.161.450.038,00	5.024.313.937,00	(137.136.101,00)	97,34	
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	3.698.514.300,00	3.569.873.999,00	(128.640.301,00)	96,52	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.407.962.800,00	3.298.425.690,00	(109.537.110,00)	96,79	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.301.642.800,00	3.192.405.690,00	(109.237.110,00)	96,69	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.301.642.800,00	3.192.405.690,00	(109.237.110,00)	96,69	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	3.301.642.800,00	3.192.405.690,00	(109.237.110,00)	96,69	
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	106.320.000,00	106.020.000,00	(300.000,00)	99,72	
01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	106.320.000,00	106.020.000,00	(300.000,00)	99,72	
01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.320.000,00	106.020.000,00	(300.000,00)	99,72	
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	120.946.100,00	111.640.050,00	(9.306.050,00)	92,31	
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.477.300,00	1.459.500,00	(17.800,00)	98,80	
01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.477.300,00	1.459.500,00	(17.800,00)	98,80	
01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.477.300,00	1.459.500,00	(17.800,00)	98,80	
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	73.189.400,00	73.156.000,00	(33.400,00)	99,95	
01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	73.189.400,00	73.156.000,00	(33.400,00)	99,95	
01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.189.400,00	73.156.000,00	(33.400,00)	99,95	
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33.459.750,00	24.884.850,00	(8.574.900,00)	74,37	
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	33.459.750,00	24.884.850,00	(8.574.900,00)	74,37	
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.459.750,00	24.884.850,00	(8.574.900,00)	74,37	
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.979.650,00	5.299.700,00	(679.950,00)	88,63	
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	5.979.650,00	5.299.700,00	(679.950,00)	88,63	
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.979.650,00	5.299.700,00	(679.950,00)	88,63	
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.520.000,00	5.520.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	5.520.000,00	5.520.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.520.000,00	5.520.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	100,00	
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	51.987.900,00	50.341.750,00	(1.646.150,00)	96,83	
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	51.987.900,00	50.341.750,00	(1.646.150,00)	96,83	
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	51.987.900,00	50.341.750,00	(1.646.150,00)	96,83	
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51.987.900,00	50.341.750,00	(1.646.150,00)	96,83	
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.010.000,00	11.071.462,00	(3.938.538,00)	73,76	
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.810.000,00	4.810.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.810.000,00	4.810.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.810.000,00	4.810.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.200.000,00	6.261.462,00	(3.938.538,00)	61,39	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	10.200.000,00	6.261.462,00	(3.938.538,00)	61,39	
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	6.261.462,00	(3.938.538,00)	61,39	
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	102.607.500,00	98.395.047,00	(4.212.453,00)	95,89	
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	94.607.500,00	90.750.047,00	(3.857.453,00)	95,92	
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	94.607.500,00	90.750.047,00	(3.857.453,00)	95,92	
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.607.500,00	90.750.047,00	(3.857.453,00)	95,92	
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.000.000,00	7.645.000,00	(355.000,00)	95,56	
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	8.000.000,00	7.645.000,00	(355.000,00)	95,56	
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	7.645.000,00	(355.000,00)	95,56	
02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	90.866.700,00	89.584.500,00	(1.282.200,00)	98,59	
02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	90.866.700,00	89.584.500,00	(1.282.200,00)	98,59	
02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	31.631.400,00	30.538.000,00	(1.093.400,00)	96,54	
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	31.631.400,00	30.538.000,00	(1.093.400,00)	96,54	
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.631.400,00	30.538.000,00	(1.093.400,00)	96,54	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	59.235.300,00	59.046.500,00	(188.800,00)	99,68	
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	59.235.300,00	59.046.500,00	(188.800,00)	99,68	
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.235.300,00	59.046.500,00	(188.800,00)	99,68	
03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	1.145.677.238,00	1.141.769.238,00	(3.908.000,00)	99,66	
03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1.145.677.238,00	1.141.769.238,00	(3.908.000,00)	99,66	
03.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	772.467.238,00	772.467.238,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	772.467.238,00	772.467.238,00	0,00	100,00	
03.2.01.02.5.1.05	Belanja Hibah	772.467.238,00	772.467.238,00	0,00	100,00	
03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Pol	11.958.000,00	10.954.000,00	(1.004.000,00)	91,60	
03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	11.958.000,00	10.954.000,00	(1.004.000,00)	91,60	
03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.958.000,00	10.954.000,00	(1.004.000,00)	91,60	
03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Po	269.120.000,00	269.120.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	269.120.000,00	269.120.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.04.5.1.05	Belanja Hibah	269.120.000,00	269.120.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	92.132.000,00	89.228.000,00	(2.904.000,00)	96,85	
03.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	92.132.000,00	89.228.000,00	(2.904.000,00)	96,85	
03.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.132.000,00	89.228.000,00	(2.904.000,00)	96,85	
04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	21.708.500,00	21.553.000,00	(155.500,00)	99,28	
04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	21.708.500,00	21.553.000,00	(155.500,00)	99,28	
04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	21.708.500,00	21.553.000,00	(155.500,00)	99,28	
04.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	21.708.500,00	21.553.000,00	(155.500,00)	99,28	
04.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.708.500,00	21.553.000,00	(155.500,00)	99,28	
05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	56.130.900,00	53.854.000,00	(2.276.900,00)	95,94	
05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	56.130.900,00	53.854.000,00	(2.276.900,00)	95,94	
05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	56.130.900,00	53.854.000,00	(2.276.900,00)	95,94	
05.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	56.130.900,00	53.854.000,00	(2.276.900,00)	95,94	
05.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.130.900,00	53.854.000,00	(2.276.900,00)	95,94	
06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	148.552.400,00	147.679.200,00	(873.200,00)	99,41	
06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	148.552.400,00	147.679.200,00	(873.200,00)	99,41	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik	94.681.400,00	94.201.200,00	(480.200,00)	99,49	
06.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	94.681.400,00	94.201.200,00	(480.200,00)	99,49	
06.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.681.400,00	94.201.200,00	(480.200,00)	99,49	
06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	53.871.000,00	53.478.000,00	(393.000,00)	99,27	
06.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	53.871.000,00	53.478.000,00	(393.000,00)	99,27	
06.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.871.000,00	53.478.000,00	(393.000,00)	99,27	
	SURPLUS / DEFISIT	(5.161.450.038,00)	(5.024.313.937,00)	137.136.101,00	0	
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		**(5.161.450.038,00)**	**(5.024.313.937,00)**	**137.136.101,00**	**0**	

BUPATI BANGLI,

I G NYOMAN SEDANA ARTA

LAMPIRAN I.4

REKAPITULASI REALISASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Lampiran I.4 : Peraturan Daerah Kabupaten Bangli
Nomor : 2 Tahun 2023
Tanggal : 15 Agustus 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

REKAPITULASI REALISASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN

Tahun Anggaran 2022

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	551.068.368.820,00	264.017.204.678,00	0,00	0,00
		512.408.163.696,63	248.520.060.769,85	0,00	0,00
1.01	**PENDIDIKAN**	261.528.088.274,00	47.616.106.493,00	0,00	0,00
		249.005.417.736,96	46.806.259.534,00	0,00	0,00
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	203.286.113.542,00	495.467.500,00	0,00	0,00
		193.888.347.709,00	460.610.500,00	0,00	0,00
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	201.077.231.042,00	0,00	0,00	0,00
		191.931.605.457,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	201.077.231.042,00	0,00	0,00	0,00
		191.931.605.457,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	97.197.500,00	0,00	0,00	0,00
		65.617.500,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	97.197.500,00	0,00	0,00	0,00
		65.617.500,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	428.869.200,00	7.140.000,00	0,00	0,00
		345.459.900,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.895.900,00	0,00	0,00	0,00
		8.873.500,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.077.300,00	7.140.000,00	0,00	0,00
		13.986.800,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	308.856.200,00	0,00	0,00	0,00
		255.777.200,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50.169.800,00	0,00	0,00	0,00
		45.889.400,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.970.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.370.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	38.900.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.563.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	142.580.000,00	134.962.500,00	0,00	0,00
		137.730.000,00	129.814.500,00	0,00	0,00
1.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	142.580.000,00	134.962.500,00	0,00	0,00
		137.730.000,00	129.814.500,00	0,00	0,00
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.161.710.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.130.723.252,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		18.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	172.610.000,00	0,00	0,00	0,00
		141.623.252,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	971.100.000,00	0,00	0,00	0,00
		971.100.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	337.725.800,00	353.365.000,00	0,00	0,00
		277.211.600,00	330.796.000,00	0,00	0,00
1.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	287.425.800,00	0,00	0,00	0,00
		263.121.600,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.300.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.090.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	353.365.000,00	0,00	0,00
		0,00	330.796.000,00	0,00	0,00
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	58.175.855.032,00	47.120.638.993,00	0,00	0,00
		55.069.521.527,96	46.345.649.034,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	31.752.436.218,00	28.608.772.144,00	0,00	0,00
		30.070.142.039,90	28.135.499.752,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	176.270.000,00	2.760.428.000,00	0,00	0,00
		173.155.000,00	2.760.428.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	61.680.000,00	368.424.000,00	0,00	0,00
		60.000.000,00	368.424.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	31.280.000,00	478.802.000,00	0,00	0,00
		30.000.000,00	478.802.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	129.295.400,00	1.763.950.000,00	0,00	0,00
		121.764.000,00	1.761.169.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	25.580.000,00	1.241.158.600,00	0,00	0,00
		24.000.000,00	1.239.791.600,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.01.02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	0,00	182.265.000,00	0,00	0,00
		0,00	179.111.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	48.883.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	87.696.000,00	0,00	0,00	0,00
		87.696.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	0,00	16.250.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	16.109.340.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	46.955.750,00	70.364.000,00	0,00	0,00
		24.195.248,00	68.578.464,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	11.280.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.268.250.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	96.880.000,00	0,00	0,00	0,00
		87.925.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	19.779.019.068,00	4.921.484.544,00	0,00	0,00
		18.157.156.791,90	4.599.076.688,00	0,00	0,00
1.01.02.2.01.31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	37.280.000,00	521.896.000,00	0,00	0,00
		36.000.000,00	521.896.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	20.708.611.314,00	16.822.801.599,00	0,00	0,00
		19.373.856.488,06	16.591.802.032,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	47.520.000,00	791.154.000,00	0,00	0,00
		45.000.000,00	791.154.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	57.180.000,00	1.606.440.000,00	0,00	0,00
		54.000.000,00	1.606.440.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	62.507.000,00	840.120.000,00	0,00	0,00
		59.760.000,00	840.120.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	93.180.000,00	9.352.823.000,00	0,00	0,00
		90.000.000,00	9.350.878.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	15.960.000,00	285.590.000,00	0,00	0,00
		15.000.000,00	285.590.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	12.840.000,00	40.799.000,00	0,00	0,00
		12.000.000,00	40.799.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	15.960.000,00	285.590.000,00	0,00	0,00
		15.000.000,00	285.590.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	0,00	350.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	345.494.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	50.860.000,00	1.145.261.001,00	0,00	0,00
		48.000.000,00	1.144.511.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	160.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		154.400.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.36	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	253.388.300,00	0,00	0,00	0,00
		226.304.500,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	7.120.750.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.024.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	12.802.239.014,00	2.125.024.598,00	0,00	0,00
		11.614.366.988,06	1.901.226.032,00	0,00	0,00
1.01.02.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	16.227.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.525.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	5.619.547.500,00	1.689.065.250,00	0,00	0,00
		5.530.663.000,00	1.618.347.250,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	66.000.750,00	1.183.074.250,00	0,00	0,00
		52.587.000,00	1.181.814.250,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	0,00	369.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	299.542.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	2.019.469.000,00	136.991.000,00	0,00	0,00
		1.950.629.000,00	136.991.000,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	3.496.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.491.250.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	37.577.750,00	0,00	0,00	0,00
		36.197.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	95.260.000,00	0,00	0,00	0,00
		94.860.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	95.260.000,00	0,00	0,00	0,00
		94.860.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.04	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	66.119.700,00	0,00	0,00	0,00
		47.548.500,00	0,00	0,00	0,00
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	66.119.700,00	0,00	0,00	0,00
		47.548.500,00	0,00	0,00	0,00
1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	32.310.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.210.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	33.809.700,00	0,00	0,00	0,00
		27.338.500,00	0,00	0,00	0,00
1.02	**KESEHATAN**	226.154.941.066,00	138.993.572.552,00	0,00	0,00
		204.927.242.065,87	131.143.728.173,85	0,00	0,00
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	155.366.495.307,00	46.335.174.652,00	0,00	0,00
		144.628.214.217,30	43.807.176.161,00	0,00	0,00
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		13.808.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		13.808.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	82.027.047.931,00	0,00	0,00	0,00
		80.847.969.261,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	82.027.047.931,00	0,00	0,00	0,00
		80.847.969.261,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	500.132.000,00	34.556.100,00	0,00	0,00
		443.699.771,00	32.935.000,00	0,00	0,00
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	33.774.300,00	0,00	0,00	0,00
		33.294.228,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.579.400,00	34.556.100,00	0,00	0,00
		10.657.500,00	32.935.000,00	0,00	0,00
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	386.153.200,00	0,00	0,00	0,00
		332.388.743,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	63.105.100,00	0,00	0,00	0,00
		61.879.300,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.520.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.480.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.050.000,00	26.742.000,00	0,00	0,00
		4.050.000,00	20.300.000,00	0,00	0,00
1.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0,00	22.852.000,00	0,00	0,00
		0,00	20.300.000,00	0,00	0,00
1.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.050.000,00	3.890.000,00	0,00	0,00
		4.050.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	799.721.000,00	0,00	0,00	0,00
		587.868.885,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	26.860.000,00	0,00	0,00	0,00
		26.860.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	469.601.000,00	0,00	0,00	0,00
		269.148.885,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	303.260.000,00	0,00	0,00	0,00
		291.860.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	563.440.000,00	0,00	0,00	0,00
		375.504.174,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	503.440.000,00	0,00	0,00	0,00
		331.770.174,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		43.734.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	71.452.104.376,00	46.273.876.552,00	0,00	0,00
		62.355.314.126,30	43.753.941.161,00	0,00	0,00
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	71.452.104.376,00	46.273.876.552,00	0,00	0,00
		62.355.314.126,30	43.753.941.161,00	0,00	0,00
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	68.903.704.759,00	92.658.397.900,00	0,00	0,00
		58.727.397.237,57	87.336.552.012,85	0,00	0,00
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	10.416.842.147,00	92.658.397.900,00	0,00	0,00
		6.568.733.201,57	87.336.552.012,85	0,00	0,00
1.02.02.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	4.845.729.167,00	64.820.070.300,00	0,00	0,00
		3.297.019.892,57	61.595.604.880,85	0,00	0,00
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	198.223.471,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	300,00	833.999.700,00	0,00	0,00
		0,00	803.550.300,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	1.095.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	1.082.251.662,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	553.955.680,00	25.707.033.500,00	0,00	0,00
		552.030.500,00	23.654.627.299,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	1.163.717.000,00	2.294.400,00	0,00	0,00
		584.006.601,00	2.294.400,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	3.793.440.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.076.873.958,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		58.802.250,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	58.106.233.612,00	0,00	0,00	0,00
		51.929.346.860,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	663.415.200,00	0,00	0,00	0,00
		636.950.535,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	328.798.000,00	0,00	0,00	0,00
		258.486.800,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	238.384.500,00	0,00	0,00	0,00
		222.665.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	789.059.600,00	0,00	0,00	0,00
		763.003.100,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	372.946.000,00	0,00	0,00	0,00
		348.455.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	172.863.300,00	0,00	0,00	0,00
		158.074.600,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	296.549.000,00	0,00	0,00	0,00
		267.437.600,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	97.700.000,00	0,00	0,00	0,00
		96.730.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	71.450.000,00	0,00	0,00	0,00
		70.080.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	60.431.000,00	0,00	0,00	0,00
		57.506.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	103.530.000,00	0,00	0,00	0,00
		89.980.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	71.430.000,00	0,00	0,00	0,00
		58.630.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	878.324.000,00	0,00	0,00	0,00
		767.901.900,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	353.380.000,00	0,00	0,00	0,00
		351.559.037,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.007.612.750,00	0,00	0,00	0,00
		855.245.670,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	56.678.000,00	0,00	0,00	0,00
		53.652.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	641.512.500,00	0,00	0,00	0,00
		516.438.885,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	257.484.950,00	0,00	0,00	0,00
		219.025.600,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	106.245.000,00	0,00	0,00	0,00
		79.869.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	4.595.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.595.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	39.900.000,00	0,00	0,00	0,00
		39.750.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	218.175.000,00	0,00	0,00	0,00
		202.325.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	62.690.000,00	0,00	0,00	0,00
		46.528.100,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2.017.965.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.600.371.182,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	47.059.495.112,00	0,00	0,00	0,00
		42.673.510.200,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	7.715.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.115.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraaan Kabupaten/Kota Sehat	33.361.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.188.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.590.272.700,00	0,00	0,00	0,00
		1.268.418.651,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	317.316.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	21.955.000,00	0,00	0,00	0,00
		21.955.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	165.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		162.900.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	48.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		46.385.500,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	48.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		46.385.500,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota	332.629.000,00	0,00	0,00	0,00
		182.931.676,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	332.629.000,00	0,00	0,00	0,00
		182.931.676,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	1.760.850.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.449.977.500,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota	31.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.920.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.2.01.02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	31.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.920.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	1.538.850.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.233.250.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	1.538.850.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.233.250.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	191.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		185.807.500,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	191.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		185.807.500,00	0,00	0,00	0,00
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	123.891.000,00	0,00	0,00	0,00
		121.653.111,00	0,00	0,00	0,00
1.02.05.2.02	Pelaksadan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	110.777.000,00	0,00	0,00	0,00
		108.550.311,00	0,00	0,00	0,00
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	110.777.000,00	0,00	0,00	0,00
		108.550.311,00	0,00	0,00	0,00
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	13.114.000,00	0,00	0,00	0,00
		13.102.800,00	0,00	0,00	0,00
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	13.114.000,00	0,00	0,00	0,00
		13.102.800,00	0,00	0,00	0,00
1.03	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	36.162.050.740,00	77.107.740.633,00	0,00	0,00
		33.060.786.849,80	70.301.687.266,00	0,00	0,00
1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	13.460.584.700,00	620.027.300,00	0,00	0,00
		12.968.994.386,00	611.086.998,00	0,00	0,00
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.838.282.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.619.640.584,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.838.282.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.619.640.584,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	537.207.600,00	340.350.000,00	0,00	0,00
		499.694.600,00	334.636.998,00	0,00	0,00
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.320.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.320.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	340.350.000,00	0,00	0,00
		0,00	334.636.998,00	0,00	0,00
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	471.277.800,00	0,00	0,00	0,00
		441.711.600,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	52.889.800,00	0,00	0,00	0,00
		44.943.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.720.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.720.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	270.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	267.000.000,00	0,00	0,00
1.03.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	270.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	267.000.000,00	0,00	0,00
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94.194.700,00	4.677.300,00	0,00	0,00
		73.699.052,00	4.500.000,00	0,00	0,00
1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	61.650.000,00	0,00	0,00	0,00
		42.928.052,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.544.700,00	4.677.300,00	0,00	0,00
		15.771.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	990.900.400,00	5.000.000,00	0,00	0,00
		775.960.150,00	4.950.000,00	0,00	0,00
1.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.920.000,00	0,00	0,00	0,00
		34.076.100,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	429.940.400,00	0,00	0,00	0,00
		346.868.127,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	495.230.000,00	0,00	0,00	0,00
		372.410.923,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.810.000,00	0,00	0,00	0,00
		22.605.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	4.950.000,00	0,00	0,00
1.03.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	200.420.000,00	440.703.333,00	0,00	0,00
		196.765.000,00	306.360.450,00	0,00	0,00
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	200.420.000,00	440.703.333,00	0,00	0,00
		196.765.000,00	306.360.450,00	0,00	0,00
1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	200.420.000,00	440.703.333,00	0,00	0,00
		196.765.000,00	306.360.450,00	0,00	0,00
1.03.03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	10.278.847.700,00	0,00	0,00	0,00
		8.469.869.600,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	10.278.847.700,00	0,00	0,00	0,00
		8.469.869.600,00	0,00	0,00	0,00
1.03.03.2.01.19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	10.278.847.700,00	0,00	0,00	0,00
		8.469.869.600,00	0,00	0,00	0,00
1.03.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	2.526.307.500,00	0,00	0,00	0,00
		2.526.045.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	2.526.307.500,00	0,00	0,00	0,00
		2.526.045.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.04.2.01.03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	2.526.307.500,00	0,00	0,00	0,00
		2.526.045.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	3.027.755.840,00	0,00	0,00	0,00
		3.005.025.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.027.755.840,00	0,00	0,00	0,00
		3.005.025.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05.2.01.12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	3.027.755.840,00	0,00	0,00	0,00
		3.005.025.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	0,00	90.400.000,00	0,00	0,00
		0,00	89.979.000,00	0,00	0,00
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	0,00	90.400.000,00	0,00	0,00
		0,00	89.979.000,00	0,00	0,00
1.03.06.2.01.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	0,00	90.400.000,00	0,00	0,00
		0,00	89.979.000,00	0,00	0,00
1.03.07	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**	1.300.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.063.793.182,80	0,00	0,00	0,00
1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota	1.300.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.063.793.182,80	0,00	0,00	0,00
1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota	1.300.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.063.793.182,80	0,00	0,00	0,00
1.03.08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	846.995.000,00	22.189.340.000,00	0,00	0,00
		763.984.800,00	22.188.229.500,00	0,00	0,00
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	846.995.000,00	22.189.340.000,00	0,00	0,00
		763.984.800,00	22.188.229.500,00	0,00	0,00
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	646.995.000,00	0,00	0,00	0,00
		570.039.800,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000,00	16.737.511.500,00	0,00	0,00
		193.945.000,00	17.687.715.160,00	0,00	0,00
1.03.08.2.01.13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	0,00	5.451.828.500,00	0,00	0,00
		0,00	4.500.514.340,00	0,00	0,00
1.03.09	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	985.690.000,00	10.582.184.000,00	0,00	0,00
		960.602.000,00	10.350.004.700,00	0,00	0,00
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	985.690.000,00	10.582.184.000,00	0,00	0,00
		960.602.000,00	10.350.004.700,00	0,00	0,00
1.03.09.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	99.191.000,00	0,00	0,00
1.03.09.2.01.02	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	0,00	82.184.000,00	0,00	0,00
		0,00	81.742.000,00	0,00	0,00
1.03.09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	985.690.000,00	10.400.000.000,00	0,00	0,00
		960.602.000,00	10.169.071.700,00	0,00	0,00
1.03.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	3.095.510.000,00	43.107.406.000,00	0,00	0,00
		2.711.328.881,00	36.679.325.618,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	3.095.510.000,00	43.107.406.000,00	0,00	0,00
		2.711.328.881,00	36.679.325.618,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	258.463.017,00	42.690.806.000,00	0,00	0,00
		257.380.000,00	36.645.651.618,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	2.837.046.983,00	16.600.000,00	0,00	0,00
		2.453.948.881,00	16.600.000,00	0,00	0,00
1.03.10.2.01.23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	0,00	400.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	17.074.000,00	0,00	0,00
1.03.12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	439.940.000,00	77.680.000,00	0,00	0,00
		394.379.000,00	76.701.000,00	0,00	0,00
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	356.440.000,00	77.680.000,00	0,00	0,00
		311.729.000,00	76.701.000,00	0,00	0,00
1.03.12.2.01.01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	96.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		96.396.100,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12.2.01.03	Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	259.640.000,00	77.680.000,00	0,00	0,00
		215.332.900,00	76.701.000,00	0,00	0,00
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	83.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		82.650.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.03.12.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum bidang Penataan Ruang	83.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		82.650.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04	**PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	4.018.631.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.119.621.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	125.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		112.722.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	125.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		112.722.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.2.06.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	125.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		112.722.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	3.393.631.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.609.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	54.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		54.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.2.02.01	Survei dan Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh	54.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		54.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	3.339.631.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.555.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	3.339.631.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.555.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		397.899.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		397.899.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		397.899.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05	**KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	17.684.910.918,00	258.235.000,00	0,00	0,00
		17.048.850.612,00	227.085.576,00	0,00	0,00
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	15.966.002.500,00	44.100.000,00	0,00	0,00
		15.341.414.112,00	15.873.000,00	0,00	0,00
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	227.459.900,00	0,00	0,00	0,00
		192.769.900,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	225.072.400,00	0,00	0,00	0,00
		190.422.400,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.387.500,00	0,00	0,00	0,00
		2.347.500,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.167.629.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.616.519.056,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.167.629.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.616.519.056,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	125.193.600,00	0,00	0,00	0,00
		115.755.220,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.469.700,00	0,00	0,00	0,00
		2.444.900,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.938.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.889.800,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	300.000,00	0,00	0,00	0,00
		300.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	91.910.800,00	0,00	0,00	0,00
		84.061.470,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.973.100,00	0,00	0,00	0,00
		17.984.050,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.380.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.900.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.222.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.175.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	44.100.000,00	0,00	0,00
		0,00	15.873.000,00	0,00	0,00
1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	44.100.000,00	0,00	0,00
		0,00	15.873.000,00	0,00	0,00
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	135.215.500,00	0,00	0,00	0,00
		121.687.103,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.420.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.420.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37.415.500,00	0,00	0,00	0,00
		23.887.103,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	91.380.000,00	0,00	0,00	0,00
		91.380.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	310.504.500,00	0,00	0,00	0,00
		294.682.833,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	291.854.500,00	0,00	0,00	0,00
		277.122.833,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.560.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	932.631.418,00	0,00	0,00	0,00
		927.719.500,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	771.139.500,00	0,00	0,00	0,00
		768.465.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	642.288.300,00	0,00	0,00	0,00
		640.213.800,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	116.457.200,00	0,00	0,00	0,00
		116.127.200,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	12.394.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.124.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	151.491.918,00	0,00	0,00	0,00
		149.292.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	18.588.000,00	0,00	0,00	0,00
		18.408.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota	132.903.918,00	0,00	0,00	0,00
		130.884.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.962.500,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.962.500,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	494.557.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
		487.997.000,00	197.093.376,00	0,00	0,00
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	494.557.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
		487.997.000,00	197.093.376,00	0,00	0,00
1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	30.765.000,00	0,00	0,00	0,00
		29.715.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	446.190.000,00	0,00	0,00	0,00
		440.730.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	17.602.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
		17.552.000,00	197.093.376,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.05.04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	291.720.000,00	14.135.000,00	0,00	0,00
		291.720.000,00	14.119.200,00	0,00	0,00
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	291.720.000,00	0,00	0,00	0,00
		291.720.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	291.720.000,00	0,00	0,00	0,00
		291.720.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	0,00	14.135.000,00	0,00	0,00
		0,00	14.119.200,00	0,00	0,00
1.05.04.2.02.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	0,00	14.135.000,00	0,00	0,00
		0,00	14.119.200,00	0,00	0,00
1.06	**SOSIAL**	5.519.746.822,00	41.550.000,00	0,00	0,00
		5.246.245.432,00	41.300.220,00	0,00	0,00
1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	5.136.260.322,00	41.550.000,00	0,00	0,00
		4.911.760.304,00	41.300.220,00	0,00	0,00
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.332.747.472,00	0,00	0,00	0,00
		4.196.383.988,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.332.747.472,00	0,00	0,00	0,00
		4.196.383.988,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	425.644.850,00	0,00	0,00	0,00
		376.955.250,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.018.500,00	0,00	0,00	0,00
		1.986.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.938.900,00	0,00	0,00	0,00
		7.465.900,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	379.759.700,00	0,00	0,00	0,00
		342.934.850,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.190.350,00	0,00	0,00	0,00
		14.160.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.420.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.520.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.317.400,00	0,00	0,00	0,00
		4.888.500,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	41.550.000,00	0,00	0,00
		0,00	41.300.220,00	0,00	0,00
1.06.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	41.550.000,00	0,00	0,00
		0,00	41.300.220,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		40.226.918,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.450.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.253.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.050.000,00	0,00	0,00	0,00
		19.673.918,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	15.300.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.300.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	330.068.000,00	0,00	0,00	0,00
		298.194.148,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	277.168.000,00	0,00	0,00	0,00
		246.324.148,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.900.000,00	0,00	0,00	0,00
		22.205.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		29.665.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	144.619.000,00	0,00	0,00	0,00
		125.687.130,00	0,00	0,00	0,00
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	144.619.000,00	0,00	0,00	0,00
		125.687.130,00	0,00	0,00	0,00
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	37.562.000,00	0,00	0,00	0,00
		37.218.760,00	0,00	0,00	0,00
1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	70.577.500,00	0,00	0,00	0,00
		57.565.370,00	0,00	0,00	0,00
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	36.479.500,00	0,00	0,00	0,00
		30.903.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	117.621.000,00	0,00	0,00	0,00
		95.281.918,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	78.641.950,00	0,00	0,00	0,00
		69.968.118,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	8.925.950,00	0,00	0,00	0,00
		7.360.718,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	69.716.000,00	0,00	0,00	0,00
		62.607.400,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	38.979.050,00	0,00	0,00	0,00
		25.313.800,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.02.02	Pemberian Layanan Kedaruratan	13.540.050,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.2.02.03	Penyediaan Permakanan	25.439.000,00	0,00	0,00	0,00
		25.313.800,00	0,00	0,00	0,00
1.06.05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	82.876.450,00	0,00	0,00	0,00
		81.725.830,00	0,00	0,00	0,00
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	82.876.450,00	0,00	0,00	0,00
		81.725.830,00	0,00	0,00	0,00
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	82.876.450,00	0,00	0,00	0,00
		81.725.830,00	0,00	0,00	0,00
1.06.06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	38.370.050,00	0,00	0,00	0,00
		31.790.250,00	0,00	0,00	0,00
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	38.370.050,00	0,00	0,00	0,00
		31.790.250,00	0,00	0,00	0,00
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	38.370.050,00	0,00	0,00	0,00
		31.790.250,00	0,00	0,00	0,00
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	87.566.270.711,00	19.960.214.475,00	0,00	0,00
		82.068.270.199,27	19.380.351.599,96	0,00	0,00
2.07	**TENAGA KERJA**	460.694.000,00	0,00	0,00	0,00
		449.048.900,00	0,00	0,00	0,00
2.07.03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	332.154.000,00	0,00	0,00	0,00
		322.604.000,00	0,00	0,00	0,00
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	310.134.000,00	0,00	0,00	0,00
		304.498.000,00	0,00	0,00	0,00
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	310.134.000,00	0,00	0,00	0,00
		304.498.000,00	0,00	0,00	0,00
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	22.020.000,00	0,00	0,00	0,00
		18.106.000,00	0,00	0,00	0,00
2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	22.020.000,00	0,00	0,00	0,00
		18.106.000,00	0,00	0,00	0,00
2.07.04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	70.020.000,00	0,00	0,00	0,00
		67.935.500,00	0,00	0,00	0,00
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	70.020.000,00	0,00	0,00	0,00
		67.935.500,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.07.04.2.03.03	Job Fair/Bursa Kerja	70.020.000,00	0,00	0,00	0,00
		67.935.500,00	0,00	0,00	0,00
2.07.05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	58.520.000,00	0,00	0,00	0,00
		58.509.400,00	0,00	0,00	0,00
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	58.520.000,00	0,00	0,00	0,00
		58.509.400,00	0,00	0,00	0,00
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	58.520.000,00	0,00	0,00	0,00
		58.509.400,00	0,00	0,00	0,00
2.08	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	106.707.200,00	0,00	0,00	0,00
		96.770.100,00	0,00	0,00	0,00
2.08.02	**PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	41.465.200,00	0,00	0,00	0,00
		40.729.820,00	0,00	0,00	0,00
2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	11.465.200,00	0,00	0,00	0,00
		11.287.320,00	0,00	0,00	0,00
2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	11.465.200,00	0,00	0,00	0,00
		11.287.320,00	0,00	0,00	0,00
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		29.442.500,00	0,00	0,00	0,00
2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		29.442.500,00	0,00	0,00	0,00
2.08.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	19.154.800,00	0,00	0,00	0,00
		16.068.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	19.154.800,00	0,00	0,00	0,00
		16.068.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	19.154.800,00	0,00	0,00	0,00
		16.068.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	46.087.200,00	0,00	0,00	0,00
		39.972.280,00	0,00	0,00	0,00
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	46.087.200,00	0,00	0,00	0,00
		39.972.280,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	40.770.000,00	0,00	0,00	0,00
		35.108.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5.317.200,00	0,00	0,00	0,00
		4.864.280,00	0,00	0,00	0,00
2.09	**PANGAN**	717.184.000,00	0,00	0,00	0,00
		541.046.100,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	635.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		459.753.100,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	511.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		336.287.100,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	31.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.138.800,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	156.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		154.082.300,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	324.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		152.066.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	124.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		123.466.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	124.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		123.466.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09.04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	41.184.000,00	0,00	0,00	0,00
		40.662.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	41.184.000,00	0,00	0,00	0,00
		40.662.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	41.184.000,00	0,00	0,00	0,00
		40.662.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09.05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	41.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		40.631.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	41.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		40.631.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09.05.2.01.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	41.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		40.631.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11	**LINGKUNGAN HIDUP**	33.216.429.225,00	4.464.427.675,00	0,00	0,00
		31.782.271.437,00	4.249.316.708,00	0,00	0,00
2.11.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	26.241.394.050,00	116.853.125,00	0,00	0,00
		25.221.893.675,00	114.423.005,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.560.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.578.900,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.350.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.038.900,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00
		540.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25.347.954.700,00	0,00	0,00	0,00
		24.547.254.357,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25.347.339.700,00	0,00	0,00	0,00
		24.546.800.157,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	615.000,00	0,00	0,00	0,00
		454.200,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	378.379.350,00	0,00	0,00	0,00
		335.115.692,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.022.500,00	0,00	0,00	0,00
		3.618.600,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.742.000,00	0,00	0,00	0,00
		18.374.940,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	324.412.500,00	0,00	0,00	0,00
		288.004.901,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.582.350,00	0,00	0,00	0,00
		17.497.251,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.620.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.620.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.200.000,00	116.853.125,00	0,00	0,00
		1.200.000,00	114.423.005,00	0,00	0,00
2.11.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0,00	26.562.500,00	0,00	0,00
		0,00	25.718.700,00	0,00	0,00
2.11.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.200.000,00	90.290.625,00	0,00	0,00
		1.200.000,00	88.704.305,00	0,00	0,00
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	97.170.000,00	0,00	0,00	0,00
		86.221.052,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.900.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.900.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	68.970.000,00	0,00	0,00	0,00
		58.021.052,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	21.300.000,00	0,00	0,00	0,00
		21.300.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	411.130.000,00	0,00	0,00	0,00
		247.523.674,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	395.980.000,00	0,00	0,00	0,00
		235.898.674,00	0,00	0,00	0,00
2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.150.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.625.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	64.182.475,00	50.000.000,00	0,00	0,00
		55.522.400,00	49.931.130,00	0,00	0,00
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	22.490.925,00	50.000.000,00	0,00	0,00
		14.943.800,00	49.931.130,00	0,00	0,00
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	15.481.125,00	50.000.000,00	0,00	0,00
		12.789.300,00	49.931.130,00	0,00	0,00
2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	7.009.800,00	0,00	0,00	0,00
		2.154.500,00	0,00	0,00	0,00
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		29.424.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		29.424.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	11.691.550,00	0,00	0,00	0,00
		11.154.600,00	0,00	0,00	0,00
2.11.03.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	11.691.550,00	0,00	0,00	0,00
		11.154.600,00	0,00	0,00	0,00
2.11.04	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	1.057.275.100,00	3.257.539.000,00	0,00	0,00
		950.564.696,00	3.085.968.473,00	0,00	0,00
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	1.057.275.100,00	3.257.539.000,00	0,00	0,00
		950.564.696,00	3.085.968.473,00	0,00	0,00
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.057.275.100,00	3.257.539.000,00	0,00	0,00
		950.564.696,00	3.085.968.473,00	0,00	0,00
2.11.05	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	22.287.750,00	499.277.550,00	0,00	0,00
		22.162.750,00	483.870.850,00	0,00	0,00
2.11.05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	22.287.750,00	499.277.550,00	0,00	0,00
		22.162.750,00	483.870.850,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	22.287.750,00	499.277.550,00	0,00	0,00
		22.162.750,00	483.870.850,00	0,00	0,00
2.11.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	81.365.000,00	0,00	0,00	0,00
		81.070.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	81.365.000,00	0,00	0,00	0,00
		81.070.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	81.365.000,00	0,00	0,00	0,00
		81.070.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.09	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	49.014.400,00	0,00	0,00	0,00
		46.399.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	49.014.400,00	0,00	0,00	0,00
		46.399.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	49.014.400,00	0,00	0,00	0,00
		46.399.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.10	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	23.290.000,00	0,00	0,00	0,00
		23.200.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	23.290.000,00	0,00	0,00	0,00
		23.200.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	23.290.000,00	0,00	0,00	0,00
		23.200.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11.11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	5.677.620.450,00	540.758.000,00	0,00	0,00
		5.381.458.916,00	515.123.250,00	0,00	0,00
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	5.677.620.450,00	540.758.000,00	0,00	0,00
		5.381.458.916,00	515.123.250,00	0,00	0,00
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	5.321.168.250,00	0,00	0,00	0,00
		5.038.479.271,00	0,00	0,00	0,00
2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	52.634.000,00	0,00	0,00	0,00
		48.734.770,00	0,00	0,00	0,00
2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	303.818.200,00	540.758.000,00	0,00	0,00
		294.244.875,00	515.123.250,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.12	**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	6.049.825.724,00	21.100.000,00	0,00	0,00
		5.888.284.605,00	19.424.000,00	0,00	0,00
2.12.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	4.851.757.800,00	21.100.000,00	0,00	0,00
		4.763.372.255,00	19.424.000,00	0,00	0,00
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.847.500,00	0,00	0,00	0,00
		4.670.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.847.500,00	0,00	0,00	0,00
		4.670.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.310.307.800,00	0,00	0,00	0,00
		4.286.244.574,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.310.307.800,00	0,00	0,00	0,00
		4.286.244.574,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	185.949.400,00	1.100.000,00	0,00	0,00
		162.042.600,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.406.900,00	0,00	0,00	0,00
		21.174.800,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.015.700,00	1.100.000,00	0,00	0,00
		7.590.300,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	123.281.800,00	0,00	0,00	0,00
		100.932.500,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.625.000,00	0,00	0,00	0,00
		18.725.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.620.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.620.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	211.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		201.055.981,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.400.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	53.950.000,00	0,00	0,00	0,00
		43.805.981,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	153.850.000,00	0,00	0,00	0,00
		153.850.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	139.453.100,00	20.000.000,00	0,00	0,00
		109.359.100,00	19.424.000,00	0,00	0,00
2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	105.479.700,00	0,00	0,00	0,00
		91.884.100,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.973.400,00	20.000.000,00	0,00	0,00
		17.475.000,00	19.424.000,00	0,00	0,00
2.12.02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	669.462.900,00	0,00	0,00	0,00
		644.676.150,00	0,00	0,00	0,00
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	20.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		19.300.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	20.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		19.300.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	303.862.900,00	0,00	0,00	0,00
		296.008.400,00	0,00	0,00	0,00
2.12.02.2.02.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	303.862.900,00	0,00	0,00	0,00
		296.008.400,00	0,00	0,00	0,00
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	345.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		329.367.750,00	0,00	0,00	0,00
2.12.02.2.03.02	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	345.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		329.367.750,00	0,00	0,00	0,00
2.12.03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	309.587.100,00	0,00	0,00	0,00
		287.891.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	165.079.500,00	0,00	0,00	0,00
		147.022.500,00	0,00	0,00	0,00
2.12.03.2.01.05	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	165.079.500,00	0,00	0,00	0,00
		147.022.500,00	0,00	0,00	0,00
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	144.507.600,00	0,00	0,00	0,00
		140.868.500,00	0,00	0,00	0,00
2.12.03.2.02.03	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	23.980.000,00	0,00	0,00	0,00
		23.903.500,00	0,00	0,00	0,00
2.12.03.2.02.04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	120.527.600,00	0,00	0,00	0,00
		116.965.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	194.017.924,00	0,00	0,00	0,00
		192.345.200,00	0,00	0,00	0,00
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	22.220.000,00	0,00	0,00	0,00
		21.950.200,00	0,00	0,00	0,00
2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	17.050.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.050.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.12.04.2.01.02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	5.170.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.900.200,00	0,00	0,00	0,00
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	146.630.000,00	0,00	0,00	0,00
		145.985.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.04.2.03.05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	146.630.000,00	0,00	0,00	0,00
		145.985.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	25.167.924,00	0,00	0,00	0,00
		24.410.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.04.2.04.01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	25.167.924,00	0,00	0,00	0,00
		24.410.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12.05	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	6.257.758.570,00	0,00	0,00	0,00
		5.935.049.443,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	5.106.138.420,00	0,00	0,00	0,00
		4.851.456.093,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.317.025.120,00	0,00	0,00	0,00
		4.224.369.232,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.317.025.120,00	0,00	0,00	0,00
		4.224.369.232,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	398.409.300,00	0,00	0,00	0,00
		326.217.535,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.571.750,00	0,00	0,00	0,00
		1.535.685,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.075.500,00	0,00	0,00	0,00
		26.875.500,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	337.331.500,00	0,00	0,00	0,00
		271.740.450,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.952.550,00	0,00	0,00	0,00
		14.733.900,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.940.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.940.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.538.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.392.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72.770.000,00	0,00	0,00	0,00
		40.160.888,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.670.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.670.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	52.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		19.890.888,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.600.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	317.934.000,00	0,00	0,00	0,00
		260.708.438,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	284.434.000,00	0,00	0,00	0,00
		229.803.438,00	0,00	0,00	0,00
2.13.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.905.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13.02	**PROGRAM PENATAAN DESA**	400.000,00	0,00	0,00	0,00
		400.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	400.000,00	0,00	0,00	0,00
		400.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13.02.2.01.06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	400.000,00	0,00	0,00	0,00
		400.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	336.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		295.398.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa	336.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		295.398.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	87.745.000,00	0,00	0,00	0,00
		85.050.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		27.867.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	136.160.000,00	0,00	0,00	0,00
		111.550.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	28.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		28.440.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	6.255.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.765.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.830.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13.04.2.01.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	33.840.000,00	0,00	0,00	0,00
		25.820.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.076.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	815.220.150,00	0,00	0,00	0,00
		787.795.350,00	0,00	0,00	0,00
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	815.220.150,00	0,00	0,00	0,00
		787.795.350,00	0,00	0,00	0,00
2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	64.626.000,00	0,00	0,00	0,00
		64.596.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.476.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		24.930.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	23.246.000,00	0,00	0,00	0,00
		21.319.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	700.848.150,00	0,00	0,00	0,00
		675.474.350,00	0,00	0,00	0,00
2.14	**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	3.589.724.000,00	337.985.000,00	0,00	0,00
		2.326.503.633,00	282.027.926,00	0,00	0,00
2.14.02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	587.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		532.503.868,00	0,00	0,00	0,00
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	587.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		532.503.868,00	0,00	0,00	0,00
2.14.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	553.165.000,00	0,00	0,00	0,00
		505.462.750,00	0,00	0,00	0,00
2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	34.035.000,00	0,00	0,00	0,00
		27.041.118,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	1.493.487.000,00	52.985.000,00	0,00	0,00
		943.599.765,00	44.327.926,00	0,00	0,00
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	397.241.000,00	0,00	0,00	0,00
		296.492.915,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4.375.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.148.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		16.720.920,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.01.03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		33.890.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang	70.640.000,00	0,00	0,00	0,00
		49.997.995,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	62.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		59.160.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.01.07	Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK	81.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		47.278.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	93.826.000,00	0,00	0,00	0,00
		85.298.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	345.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		345.534.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	345.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		345.534.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	457.396.000,00	52.985.000,00	0,00	0,00
		110.271.850,00	44.327.926,00	0,00	0,00
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.100.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	437.896.000,00	0,00	0,00	0,00
		96.127.850,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.500.000,00	52.985.000,00	0,00	0,00
		169.000,00	44.327.926,00	0,00	0,00
2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.875.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	293.250.000,00	0,00	0,00	0,00
		191.301.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	293.250.000,00	0,00	0,00	0,00
		191.301.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.14.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	1.509.037.000,00	285.000.000,00	0,00	0,00
		850.400.000,00	237.700.000,00	0,00	0,00
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.509.037.000,00	285.000.000,00	0,00	0,00
		850.400.000,00	237.700.000,00	0,00	0,00
2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	388.057.000,00	285.000.000,00	0,00	0,00
		329.980.000,00	237.700.000,00	0,00	0,00
2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1.120.980.000,00	0,00	0,00	0,00
		520.420.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15	**PERHUBUNGAN**	8.691.037.550,00	310.917.000,00	0,00	0,00
		8.121.022.404,00	300.513.946,96	0,00	0,00
2.15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	5.585.297.550,00	83.800.000,00	0,00	0,00
		5.301.129.450,00	79.154.688,00	0,00	0,00
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.588.656.300,00	0,00	0,00	0,00
		4.411.027.706,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.588.656.300,00	0,00	0,00	0,00
		4.411.027.706,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	208.812.750,00	0,00	0,00	0,00
		191.756.100,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.995.400,00	0,00	0,00	0,00
		4.995.400,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.615.300,00	0,00	0,00	0,00
		6.697.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	133.206.200,00	0,00	0,00	0,00
		122.063.700,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40.605.850,00	0,00	0,00	0,00
		39.760.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.220.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.220.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	17.170.000,00	0,00	0,00	0,00
		13.020.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	83.800.000,00	0,00	0,00
		0,00	79.154.688,00	0,00	0,00
2.15.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	83.800.000,00	0,00	0,00
		0,00	79.154.688,00	0,00	0,00
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	427.305.000,00	0,00	0,00	0,00
		386.649.794,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49.445.000,00	0,00	0,00	0,00
		29.789.794,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	370.860.000,00	0,00	0,00	0,00
		349.860.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	360.523.500,00	0,00	0,00	0,00
		311.695.850,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	287.023.500,00	0,00	0,00	0,00
		239.140.850,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		23.305.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		49.250.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	3.005.033.700,00	227.117.000,00	0,00	0,00
		2.719.237.354,00	221.359.258,96	0,00	0,00
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	635.221.900,00	0,00	0,00	0,00
		634.901.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.01.03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	635.221.900,00	0,00	0,00	0,00
		634.901.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1.734.900.600,00	222.117.000,00	0,00	0,00
		1.491.077.184,00	216.459.258,96	0,00	0,00
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1.734.900.600,00	222.117.000,00	0,00	0,00
		1.491.077.184,00	216.459.258,96	0,00	0,00
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	126.618.600,00	0,00	0,00	0,00
		86.455.600,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.04.01	Fasilitasi pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	126.618.600,00	0,00	0,00	0,00
		86.455.600,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	369.340.600,00	5.000.000,00	0,00	0,00
		367.927.070,00	4.900.000,00	0,00	0,00
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	369.340.600,00	5.000.000,00	0,00	0,00
		367.927.070,00	4.900.000,00	0,00	0,00
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	81.049.500,00	0,00	0,00	0,00
		80.974.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.07.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	81.049.500,00	0,00	0,00	0,00
		80.974.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	57.902.500,00	0,00	0,00	0,00
		57.902.500,00	0,00	0,00	0,00
2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	57.902.500,00	0,00	0,00	0,00
		57.902.500,00	0,00	0,00	0,00
2.15.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	100.706.300,00	0,00	0,00	0,00
		100.655.600,00	0,00	0,00	0,00
2.15.03.2.05	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai Dengan Domisili Badan Usaha	100.706.300,00	0,00	0,00	0,00
		100.655.600,00	0,00	0,00	0,00
2.15.03.2.05.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	100.706.300,00	0,00	0,00	0,00
		100.655.600,00	0,00	0,00	0,00
2.16	**KOMUNIKASI & INFORMATIKA**	7.419.508.173,00	101.111.700,00	0,00	0,00
		6.897.795.126,00	90.663.575,00	0,00	0,00
2.16.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	4.033.868.373,00	0,00	0,00	0,00
		3.935.069.345,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.753.438.373,00	0,00	0,00	0,00
		3.700.708.074,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.753.438.373,00	0,00	0,00	0,00
		3.700.708.074,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	43.404.500,00	0,00	0,00	0,00
		30.782.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.522.500,00	0,00	0,00	0,00
		1.460.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.259.900,00	0,00	0,00	0,00
		330.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.862.100,00	0,00	0,00	0,00
		20.992.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.040.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.280.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.720.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.720.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	178.009.500,00	0,00	0,00	0,00
		159.588.327,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.130.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.880.500,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	95.599.500,00	0,00	0,00	0,00
		77.427.827,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	78.280.000,00	0,00	0,00	0,00
		78.280.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.016.000,00	0,00	0,00	0,00
		43.990.944,00	0,00	0,00	0,00
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	59.016.000,00	0,00	0,00	0,00
		43.990.944,00	0,00	0,00	0,00
2.16.02	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	1.133.088.800,00	32.400.000,00	0,00	0,00
		1.020.332.720,00	22.563.575,00	0,00	0,00
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.133.088.800,00	32.400.000,00	0,00	0,00
		1.020.332.720,00	22.563.575,00	0,00	0,00
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1.080.661.500,00	7.000.000,00	0,00	0,00
		975.804.220,00	6.710.000,00	0,00	0,00
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	43.825.100,00	0,00	0,00	0,00
		36.063.500,00	0,00	0,00	0,00
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	8.602.200,00	25.400.000,00	0,00	0,00
		8.465.000,00	15.853.575,00	0,00	0,00
2.16.03	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	2.252.551.000,00	68.711.700,00	0,00	0,00
		1.942.393.061,00	68.100.000,00	0,00	0,00
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.234.970.000,00	0,00	0,00	0,00
		930.889.567,00	0,00	0,00	0,00
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1.234.970.000,00	0,00	0,00	0,00
		930.889.567,00	0,00	0,00	0,00
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.017.581.000,00	68.711.700,00	0,00	0,00
		1.011.503.494,00	68.100.000,00	0,00	0,00
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	200.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
		198.000.000,00	49.500.000,00	0,00	0,00
2.16.03.2.02.08	Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	647.338.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00
		644.775.000,00	15.900.000,00	0,00	0,00
2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	9.323.000,00	2.711.700,00	0,00	0,00
		7.808.494,00	2.700.000,00	0,00	0,00
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	160.920.000,00	0,00	0,00	0,00
		160.920.000,00	0,00	0,00	0,00
2.17	**KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**	5.693.846.686,00	165.000.000,00	0,00	0,00
		5.542.703.844,00	139.120.385,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.17.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	5.031.377.636,00	40.000.000,00	0,00	0,00
		4.888.665.344,00	39.605.000,00	0,00	0,00
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.698.666.686,00	0,00	0,00	0,00
		4.596.287.143,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.698.666.686,00	0,00	0,00	0,00
		4.596.287.143,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	179.630.950,00	0,00	0,00	0,00
		167.203.650,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.131.700,00	0,00	0,00	0,00
		1.131.700,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.406.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.329.000,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	161.195.600,00	0,00	0,00	0,00
		148.911.400,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.497.650,00	0,00	0,00	0,00
		13.431.550,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.400.000,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	39.605.000,00	0,00	0,00
2.17.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0,00	30.110.000,00	0,00	0,00
		0,00	29.780.000,00	0,00	0,00
2.17.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	9.890.000,00	0,00	0,00
		0,00	9.825.000,00	0,00	0,00
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78.662.500,00	0,00	0,00	0,00
		56.527.319,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57.762.500,00	0,00	0,00	0,00
		35.627.319,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	15.900.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.900.000,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74.417.500,00	0,00	0,00	0,00
		68.647.232,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	65.617.500,00	0,00	0,00	0,00
		60.052.232,00	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.595.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.17.03	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	26.219.750,00	0,00	0,00	0,00
		26.219.750,00	0,00	0,00	0,00
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Kean;taannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	26.219.750,00	0,00	0,00	0,00
		26.219.750,00	0,00	0,00	0,00
2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	26.219.750,00	0,00	0,00	0,00
		26.219.750,00	0,00	0,00	0,00
2.17.04	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	39.839.300,00	0,00	0,00	0,00
		36.439.300,00	0,00	0,00	0,00
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	39.839.300,00	0,00	0,00	0,00
		36.439.300,00	0,00	0,00	0,00
2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	21.329.700,00	0,00	0,00	0,00
		18.249.700,00	0,00	0,00	0,00
2.17.04.2.01.02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	18.509.600,00	0,00	0,00	0,00
		18.189.600,00	0,00	0,00	0,00
2.17.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	190.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		188.399.650,00	0,00	0,00	0,00
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	190.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		188.399.650,00	0,00	0,00	0,00
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	190.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		188.399.650,00	0,00	0,00	0,00
2.17.06	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	101.950.000,00	0,00	0,00	0,00
		101.940.800,00	0,00	0,00	0,00
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	101.950.000,00	0,00	0,00	0,00
		101.940.800,00	0,00	0,00	0,00
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	101.950.000,00	0,00	0,00	0,00
		101.940.800,00	0,00	0,00	0,00
2.17.07	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	304.460.000,00	0,00	0,00	0,00
		301.039.000,00	0,00	0,00	0,00
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	304.460.000,00	0,00	0,00	0,00
		301.039.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	90.260.000,00	0,00	0,00	0,00
		89.995.000,00	0,00	0,00	0,00
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	214.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		211.044.000,00	0,00	0,00	0,00
2.17.08	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	0,00	125.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	99.515.385,00	0,00	0,00
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	0,00	125.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	99.515.385,00	0,00	0,00
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	0,00	125.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	99.515.385,00	0,00	0,00
2.18	**PENANAMAN MODAL**	6.528.780.083,00	150.000.000,00	0,00	0,00
		6.239.659.269,00	149.154.890,00	0,00	0,00
2.18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	5.930.904.083,00	150.000.000,00	0,00	0,00
		5.784.637.269,00	149.154.890,00	0,00	0,00
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.618.678.083,00	0,00	0,00	0,00
		5.517.376.881,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.618.678.083,00	0,00	0,00	0,00
		5.517.376.881,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	81.910.800,00	0,00	0,00	0,00
		66.602.850,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	734.300,00	0,00	0,00	0,00
		521.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.780.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.353.150,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	70.329.900,00	0,00	0,00	0,00
		56.777.900,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.044.100,00	0,00	0,00	0,00
		4.139.800,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.076.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	922.500,00	0,00	0,00	0,00
		735.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	149.154.890,00	0,00	0,00
2.18.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	29.700.000,00	0,00	0,00
2.18.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	99.454.890,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.18.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	140.070.000,00	0,00	0,00	0,00
		131.257.114,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.700.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.700.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.290.000,00	0,00	0,00	0,00
		23.477.114,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	103.080.000,00	0,00	0,00	0,00
		103.080.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.245.200,00	0,00	0,00	0,00
		69.400.424,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	83.045.200,00	0,00	0,00	0,00
		62.240.424,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.160.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	40.136.000,00	0,00	0,00	0,00
		35.975.900,00	0,00	0,00	0,00
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	16.146.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.375.900,00	0,00	0,00	0,00
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	10.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.596.800,00	0,00	0,00	0,00
2.18.02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	5.746.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.779.100,00	0,00	0,00	0,00
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	23.990.000,00	0,00	0,00	0,00
		23.600.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	23.990.000,00	0,00	0,00	0,00
		23.600.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	11.459.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.332.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	11.459.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.332.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	875.000,00	0,00	0,00	0,00
		830.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	10.584.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.502.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	148.280.000,00	0,00	0,00	0,00
		142.232.500,00	0,00	0,00	0,00
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	148.280.000,00	0,00	0,00	0,00
		142.232.500,00	0,00	0,00	0,00
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	65.440.000,00	0,00	0,00	0,00
		61.310.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	39.210.000,00	0,00	0,00	0,00
		39.110.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	13.680.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.440.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.04.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	29.950.000,00	0,00	0,00	0,00
		29.372.500,00	0,00	0,00	0,00
2.18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	394.226.000,00	0,00	0,00	0,00
		261.706.600,00	0,00	0,00	0,00
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	394.226.000,00	0,00	0,00	0,00
		261.706.600,00	0,00	0,00	0,00
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	299.163.550,00	0,00	0,00	0,00
		193.025.800,00	0,00	0,00	0,00
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	95.062.450,00	0,00	0,00	0,00
		68.680.800,00	0,00	0,00	0,00
2.18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	3.775.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.775.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.775.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.775.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	3.775.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.775.000,00	0,00	0,00	0,00
2.19	**KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	4.637.244.400,00	14.409.673.100,00	0,00	0,00
		4.367.477.259,27	14.150.130.169,00	0,00	0,00
2.19.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	431.730.000,00	0,00	0,00	0,00
		390.234.000,00	0,00	0,00	0,00
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	431.730.000,00	0,00	0,00	0,00
		390.234.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.19.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	431.730.000,00	0,00	0,00	0,00
		390.234.000,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	4.030.514.400,00	14.409.673.100,00	0,00	0,00
		3.802.243.259,27	14.150.130.169,00	0,00	0,00
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	61.187.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	61.187.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.379.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.354.381.859,27	0,00	0,00	0,00
2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	3.379.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.354.381.859,27	0,00	0,00	0,00
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	590.326.900,00	14.409.673.100,00	0,00	0,00
		447.861.400,00	14.150.130.169,00	0,00	0,00
2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	590.326.900,00	14.409.673.100,00	0,00	0,00
		447.861.400,00	14.150.130.169,00	0,00	0,00
2.19.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	175.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		175.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	175.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		175.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.19.04.2.01.03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	175.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		175.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.20	**STATISTIK**	42.348.500,00	0,00	0,00	0,00
		39.509.200,00	0,00	0,00	0,00
2.20.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	42.348.500,00	0,00	0,00	0,00
		39.509.200,00	0,00	0,00	0,00
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	42.348.500,00	0,00	0,00	0,00
		39.509.200,00	0,00	0,00	0,00
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	42.348.500,00	0,00	0,00	0,00
		39.509.200,00	0,00	0,00	0,00
2.21	**PERSANDIAN**	148.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		101.930.004,00	0,00	0,00	0,00
2.21.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	148.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		101.930.004,00	0,00	0,00	0,00
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	148.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		101.930.004,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.21.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	40.925.000,00	0,00	0,00	0,00
		29.925.000,00	0,00	0,00	0,00
2.21.02.2.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	88.700.000,00	0,00	0,00	0,00
		59.387.500,00	0,00	0,00	0,00
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.077.504,00	0,00	0,00	0,00
2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	9.375.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.540.000,00	0,00	0,00	0,00
2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.21.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	**KEBUDAYAAN**	3.864.565.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.598.277.000,00	0,00	0,00	0,00
2.22.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	2.719.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.481.570.000,00	0,00	0,00	0,00
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	302.362.000,00	0,00	0,00	0,00
		278.750.000,00	0,00	0,00	0,00
2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	302.362.000,00	0,00	0,00	0,00
		278.750.000,00	0,00	0,00	0,00
2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.416.638.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.202.820.000,00	0,00	0,00	0,00
2.22.02.2.03.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	2.416.638.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.202.820.000,00	0,00	0,00	0,00
2.22.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	948.565.000,00	0,00	0,00	0,00
		942.404.000,00	0,00	0,00	0,00
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	948.565.000,00	0,00	0,00	0,00
		942.404.000,00	0,00	0,00	0,00
2.22.03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	948.565.000,00	0,00	0,00	0,00
		942.404.000,00	0,00	0,00	0,00
2.22.04	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	93.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		79.562.000,00	0,00	0,00	0,00
2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	93.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		79.562.000,00	0,00	0,00	0,00
2.22.04.2.01.03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	93.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		79.562.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.22.05	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	103.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		94.741.000,00	0,00	0,00	0,00
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	103.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		94.741.000,00	0,00	0,00	0,00
2.22.05.2.01.02	Penetapan Cagar Budaya	103.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		94.741.000,00	0,00	0,00	0,00
2.23	**PERPUSTAKAAN**	136.744.700,00	0,00	0,00	0,00
		135.199.275,00	0,00	0,00	0,00
2.23.02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	26.929.950,00	0,00	0,00	0,00
		25.705.025,00	0,00	0,00	0,00
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	26.069.950,00	0,00	0,00	0,00
		25.705.025,00	0,00	0,00	0,00
2.23.02.2.01.05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	4.775.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.292.250,00	0,00	0,00	0,00
2.23.02.2.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	14.607.950,00	0,00	0,00	0,00
		13.727.275,00	0,00	0,00	0,00
2.23.02.2.01.07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	6.175.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.173.500,00	0,00	0,00	0,00
2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	512.000,00	0,00	0,00	0,00
		512.000,00	0,00	0,00	0,00
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	860.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	860.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.03	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	109.814.750,00	0,00	0,00	0,00
		109.494.250,00	0,00	0,00	0,00
2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	109.814.750,00	0,00	0,00	0,00
		109.494.250,00	0,00	0,00	0,00
2.23.03.2.01.02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	109.814.750,00	0,00	0,00	0,00
		109.494.250,00	0,00	0,00	0,00
2.24	**KEARSIPAN**	5.872.900,00	0,00	0,00	0,00
		5.722.600,00	0,00	0,00	0,00
2.24.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	3.489.500,00	0,00	0,00	0,00
		3.489.400,00	0,00	0,00	0,00
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	3.489.500,00	0,00	0,00	0,00
		3.489.400,00	0,00	0,00	0,00
2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	1.984.500,00	0,00	0,00	0,00
		1.984.500,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
2.24.02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	1.505.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.504.900,00	0,00	0,00	0,00
2.24.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	2.383.400,00	0,00	0,00	0,00
		2.233.200,00	0,00	0,00	0,00
2.24.03.2.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	2.383.400,00	0,00	0,00	0,00
		2.233.200,00	0,00	0,00	0,00
2.24.03.2.05.03	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	2.383.400,00	0,00	0,00	0,00
		2.233.200,00	0,00	0,00	0,00
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	60.392.354.801,00	2.743.568.075,00	0,00	0,00
		51.143.180.752,89	1.866.480.125,00	0,00	0,00
3.25	**KELAUTAN DAN PERIKANAN**	1.931.711.000,00	270.800.000,00	0,00	0,00
		1.817.833.814,00	230.269.500,00	0,00	0,00
3.25.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	1.536.788.500,00	258.800.000,00	0,00	0,00
		1.466.252.811,00	218.569.500,00	0,00	0,00
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1.536.788.500,00	258.800.000,00	0,00	0,00
		1.466.252.811,00	218.569.500,00	0,00	0,00
3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	126.029.500,00	50.800.000,00	0,00	0,00
		122.736.500,00	48.672.300,00	0,00	0,00
3.25.04.2.04.04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	115.430.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
		108.672.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00
3.25.04.2.04.06	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	1.295.329.000,00	183.000.000,00	0,00	0,00
		1.234.844.311,00	148.897.200,00	0,00	0,00
3.25.06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	394.922.500,00	12.000.000,00	0,00	0,00
		351.581.003,00	11.700.000,00	0,00	0,00
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	35.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		19.664.003,00	0,00	0,00	0,00
3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	35.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		19.664.003,00	0,00	0,00	0,00
3.25.06.2.03	Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	359.522.500,00	12.000.000,00	0,00	0,00
		331.917.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00
3.25.06.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	359.522.500,00	12.000.000,00	0,00	0,00
		331.917.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00
3.26	**PARIWISATA**	25.895.576.283,00	1.524.415.000,00	0,00	0,00
		18.005.948.163,89	698.837.350,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.26.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	7.744.379.483,00	12.100.000,00	0,00	0,00
		5.552.833.131,00	12.075.000,00	0,00	0,00
3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.620.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.960.000,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.650.000,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19.620.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.310.000,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.944.549.483,00	0,00	0,00	0,00
		4.918.119.916,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.943.549.483,00	0,00	0,00	0,00
		4.917.394.916,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		725.000,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	473.997.600,00	0,00	0,00	0,00
		378.122.643,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.403.300,00	0,00	0,00	0,00
		3.376.500,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.568.700,00	0,00	0,00	0,00
		3.511.500,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	267.902.600,00	0,00	0,00	0,00
		230.614.500,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	189.925.000,00	0,00	0,00	0,00
		135.029.143,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.080.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.080.000,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.118.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.511.000,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	12.100.000,00	0,00	0,00
		0,00	12.075.000,00	0,00	0,00
3.26.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	12.100.000,00	0,00	0,00
		0,00	12.075.000,00	0,00	0,00
3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	188.820.000,00	0,00	0,00	0,00
		139.083.153,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	141.520.000,00	0,00	0,00	0,00
		91.783.153,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.26.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	33.300.000,00	0,00	0,00	0,00
		33.300.000,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	115.392.400,00	0,00	0,00	0,00
		109.547.419,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	108.312.400,00	0,00	0,00	0,00
		102.617.419,00	0,00	0,00	0,00
3.26.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.080.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.930.000,00	0,00	0,00	0,00
3.26.02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	16.841.976.800,00	1.508.815.000,00	0,00	0,00
		11.630.830.532,89	686.762.350,00	0,00	0,00
3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	16.694.700.800,00	1.188.500.000,00	0,00	0,00
		11.513.991.690,00	644.046.350,00	0,00	0,00
3.26.02.2.01.02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	80.000.000,00	720.000.000,00	0,00	0,00
		77.283.250,00	205.791.350,00	0,00	0,00
3.26.02.2.01.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	16.614.700.800,00	468.500.000,00	0,00	0,00
		11.436.708.440,00	438.255.000,00	0,00	0,00
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	97.276.000,00	320.315.000,00	0,00	0,00
		75.186.882,89	42.716.000,00	0,00	0,00
3.26.02.2.03.04	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	97.276.000,00	320.315.000,00	0,00	0,00
		75.186.882,89	42.716.000,00	0,00	0,00
3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		41.651.960,00	0,00	0,00	0,00
3.26.02.2.04.05	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		41.651.960,00	0,00	0,00	0,00
3.26.03	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	324.000.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
		258.039.000,00	0,00	0,00	0,00
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	324.000.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
		258.039.000,00	0,00	0,00	0,00
3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	158.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		129.750.000,00	0,00	0,00	0,00
3.26.03.2.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik dalam dan Luar Negeri	86.250.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
		73.844.000,00	0,00	0,00	0,00
3.26.03.2.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri	79.250.000,00	0,00	0,00	0,00
		54.445.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.26.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	985.220.000,00	0,00	0,00	0,00
		564.245.500,00	0,00	0,00	0,00
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	985.220.000,00	0,00	0,00	0,00
		564.245.500,00	0,00	0,00	0,00
3.26.05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	985.220.000,00	0,00	0,00	0,00
		564.245.500,00	0,00	0,00	0,00
3.27	**PERTANIAN**	25.974.828.127,00	24.957.400,00	0,00	0,00
		25.343.564.866,00	17.100.000,00	0,00	0,00
3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	24.925.614.800,00	7.557.400,00	0,00	0,00
		24.395.087.566,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		35.383.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	35.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		35.383.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	24.235.072.200,00	0,00	0,00	0,00
		23.770.235.346,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	24.235.072.200,00	0,00	0,00	0,00
		23.770.235.346,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	333.501.200,00	0,00	0,00	0,00
		325.273.500,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35.080.000,00	0,00	0,00	0,00
		35.018.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		34.201.500,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	203.413.650,00	0,00	0,00	0,00
		198.055.200,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	32.842.550,00	0,00	0,00	0,00
		31.658.800,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	27.765.000,00	0,00	0,00	0,00
		26.340.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	125.730.000,00	0,00	0,00	0,00
		119.280.120,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	23.770.000,00	0,00	0,00	0,00
		23.770.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	101.960.000,00	0,00	0,00	0,00
		95.510.120,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	195.911.400,00	7.557.400,00	0,00	0,00
		144.915.600,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.27.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	116.611.000,00	0,00	0,00	0,00
		96.819.600,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48.097.800,00	0,00	0,00	0,00
		48.096.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	31.202.600,00	7.557.400,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	462.713.327,00	0,00	0,00	0,00
		389.343.700,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	316.713.327,00	0,00	0,00	0,00
		249.134.200,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	316.713.327,00	0,00	0,00	0,00
		249.134.200,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	146.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		140.209.500,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02.2.02.01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	146.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		140.209.500,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	301.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		298.277.500,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	251.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		251.531.500,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	251.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		251.531.500,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		46.746.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		46.746.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	56.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		54.564.300,00	0,00	0,00	0,00
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	56.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		54.564.300,00	0,00	0,00	0,00
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	56.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		54.564.300,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.27.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	228.900.000,00	17.400.000,00	0,00	0,00
		206.291.800,00	17.100.000,00	0,00	0,00
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	228.900.000,00	17.400.000,00	0,00	0,00
		206.291.800,00	17.100.000,00	0,00	0,00
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	35.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		35.270.000,00	0,00	0,00	0,00
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	84.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		61.913.600,00	0,00	0,00	0,00
3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	109.400.000,00	17.400.000,00	0,00	0,00
		109.108.200,00	17.100.000,00	0,00	0,00
3.30	**PERDAGANGAN**	1.203.598.111,00	873.395.675,00	0,00	0,00
		979.887.700,00	871.141.275,00	0,00	0,00
3.30.03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	968.117.186,00	873.395.675,00	0,00	0,00
		817.138.200,00	871.141.275,00	0,00	0,00
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	139.600.000,00	873.395.675,00	0,00	0,00
		132.890.000,00	871.141.275,00	0,00	0,00
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	139.600.000,00	873.395.675,00	0,00	0,00
		132.890.000,00	871.141.275,00	0,00	0,00
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	828.517.186,00	0,00	0,00	0,00
		684.248.200,00	0,00	0,00	0,00
3.30.03.2.02.02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	828.517.186,00	0,00	0,00	0,00
		684.248.200,00	0,00	0,00	0,00
3.30.04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	174.362.925,00	0,00	0,00	0,00
		103.358.500,00	0,00	0,00	0,00
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	174.362.925,00	0,00	0,00	0,00
		103.358.500,00	0,00	0,00	0,00
3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	174.362.925,00	0,00	0,00	0,00
		103.358.500,00	0,00	0,00	0,00
3.30.06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	61.118.000,00	0,00	0,00	0,00
		59.391.000,00	0,00	0,00	0,00
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	61.118.000,00	0,00	0,00	0,00
		59.391.000,00	0,00	0,00	0,00
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	61.118.000,00	0,00	0,00	0,00
		59.391.000,00	0,00	0,00	0,00
3.31	**PERINDUSTRIAN**	5.336.641.280,00	50.000.000,00	0,00	0,00
		4.945.971.209,00	49.132.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.31.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	5.191.971.280,00	0,00	0,00	0,00
		4.817.913.209,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.847.850,00	0,00	0,00	0,00
		580.000,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.847.850,00	0,00	0,00	0,00
		580.000,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.580.771.880,00	0,00	0,00	0,00
		4.258.233.017,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.570.019.880,00	0,00	0,00	0,00
		4.247.496.017,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.752.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.737.000,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	302.807.550,00	0,00	0,00	0,00
		295.237.500,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.993.500,00	0,00	0,00	0,00
		2.627.000,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.499.400,00	0,00	0,00	0,00
		1.379.500,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	269.985.250,00	0,00	0,00	0,00
		263.952.000,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.079.400,00	0,00	0,00	0,00
		21.029.000,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.900.000,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.350.000,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	200.894.000,00	0,00	0,00	0,00
		185.988.992,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.500.000,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	186.294.000,00	0,00	0,00	0,00
		171.388.992,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.100.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.100.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	105.650.000,00	0,00	0,00	0,00
		77.873.700,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	93.760.000,00	0,00	0,00	0,00
		66.123.700,00	0,00	0,00	0,00
3.31.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.890.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.750.000,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	144.670.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
		128.058.000,00	49.132.000,00	0,00	0,00
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	144.670.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
		128.058.000,00	49.132.000,00	0,00	0,00
3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	52.590.000,00	0,00	0,00	0,00
		51.158.000,00	0,00	0,00	0,00
3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	49.132.000,00	0,00	0,00
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	92.080.000,00	0,00	0,00	0,00
		76.900.000,00	0,00	0,00	0,00
3.32	**TRANSMIGRASI**	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		49.975.000,00	0,00	0,00	0,00
3.32.03	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		49.975.000,00	0,00	0,00	0,00
3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		49.975.000,00	0,00	0,00	0,00
3.32.03.2.01.05	Penyuluhan Transmigrasi	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		49.975.000,00	0,00	0,00	0,00
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	99.259.107.390,00	24.821.956.100,00	0,00	0,00
		94.867.579.939,00	22.897.962.454,00	0,00	0,00
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**	58.481.742.940,00	12.104.956.100,00	0,00	0,00
		55.596.662.916,00	10.527.720.525,00	0,00	0,00
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	41.914.934.290,00	11.774.500.000,00	0,00	0,00
		39.558.739.266,00	10.289.406.125,00	0,00	0,00
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	270.720.000,00	0,00	0,00	0,00
		270.040.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	270.720.000,00	0,00	0,00	0,00
		270.040.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.314.490.640,00	0,00	0,00	0,00
		21.400.042.218,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22.314.490.640,00	0,00	0,00	0,00
		21.400.042.218,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	9.605.008.300,00	2.276.300.000,00	0,00	0,00
		9.316.484.106,00	2.240.332.750,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.013.800,00	0,00	0,00	0,00
		10.122.300,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.009.700,00	2.240.000.000,00	0,00	0,00
		20.321.500,00	2.204.582.750,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0,00	36.300.000,00	0,00	0,00
		0,00	35.750.000,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	841.952.300,00	0,00	0,00	0,00
		736.749.100,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	106.662.500,00	0,00	0,00	0,00
		88.325.600,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.086.050.000,00	0,00	0,00	0,00
		944.779.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.535.320.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.516.186.606,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	1.170.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	14.250.000,00	0,00	0,00
4.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	900.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	14.250.000,00	0,00	0,00
4.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	155.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.749.470.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.418.166.491,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	52.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		52.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	857.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		615.155.491,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	840.470.000,00	0,00	0,00	0,00
		751.011.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.894.009.000,00	8.285.000.000,00	0,00	0,00
		1.340.086.661,00	8.018.395.375,00	0,00	0,00
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	539.815.000,00	0,00	0,00	0,00
		440.113.020,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.094.744.000,00	0,00	0,00	0,00
		691.799.672,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	65.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		56.901.969,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	194.250.000,00	8.285.000.000,00	0,00	0,00
		151.272.000,00	8.018.395.375,00	0,00	0,00
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	625.480.000,00	0,00	0,00	0,00
		574.370.290,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	625.480.000,00	0,00	0,00	0,00
		574.370.290,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1.700.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.688.051.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	980.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		968.328.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	720.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		719.723.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	372.697.450,00	25.000.000,00	0,00	0,00
		308.953.100,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	97.997.550,00	5.000.000,00	0,00	0,00
		83.177.200,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	78.774.350,00	5.000.000,00	0,00	0,00
		55.425.850,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	195.925.550,00	15.000.000,00	0,00	0,00
		170.350.050,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	3.383.058.900,00	18.200.000,00	0,00	0,00
		3.242.545.400,00	16.428.000,00	0,00	0,00
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	1.633.150.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.612.257.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	292.834.900,00	18.200.000,00	0,00	0,00
		219.170.400,00	16.428.000,00	0,00	0,00
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1.457.074.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.411.118.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	15.218.294.850,00	95.950.000,00	0,00	0,00
		14.795.064.250,00	60.168.000,00	0,00	0,00
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	1.010.144.900,00	0,00	0,00	0,00
		907.091.650,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	935.367.350,00	0,00	0,00	0,00
		856.866.650,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	17.099.750,00	0,00	0,00	0,00
		1.295.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	57.677.800,00	0,00	0,00	0,00
		48.930.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	13.060.504.100,00	0,00	0,00	0,00
		12.789.450.100,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	12.935.510.500,00	0,00	0,00	0,00
		12.667.846.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	49.996.600,00	0,00	0,00	0,00
		48.638.600,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	74.997.000,00	0,00	0,00	0,00
		72.965.500,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1.139.646.000,00	95.950.000,00	0,00	0,00
		1.097.140.000,00	60.168.000,00	0,00	0,00
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	329.670.000,00	0,00	0,00	0,00
		309.060.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	690.706.000,00	61.200.000,00	0,00	0,00
		674.256.000,00	60.168.000,00	0,00	0,00
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	119.270.000,00	34.750.000,00	0,00	0,00
		113.824.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	7.999.850,00	0,00	0,00	0,00
		1.382.500,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	7.999.850,00	0,00	0,00	0,00
		1.382.500,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	1.348.513.800,00	234.506.100,00	0,00	0,00
		1.242.859.400,00	178.146.400,00	0,00	0,00
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	241.510.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00
		201.127.000,00	16.872.000,00	0,00	0,00
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	141.083.850,00	0,00	0,00	0,00
		141.005.350,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	41.993.650,00	17.000.000,00	0,00	0,00
		41.758.650,00	16.872.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
4.01.03.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	58.432.500,00	0,00	0,00	0,00
		18.363.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	401.749.900,00	0,00	0,00	0,00
		394.249.900,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	52.539.900,00	0,00	0,00	0,00
		52.539.900,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	308.520.000,00	0,00	0,00	0,00
		301.020.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	40.690.000,00	0,00	0,00	0,00
		40.690.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	620.563.900,00	217.506.100,00	0,00	0,00
		578.739.000,00	161.274.400,00	0,00	0,00
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	553.825.000,00	101.500.000,00	0,00	0,00
		512.480.000,00	47.830.800,00	0,00	0,00
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	47.288.900,00	116.006.100,00	0,00	0,00
		47.224.000,00	113.443.600,00	0,00	0,00
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	19.450.000,00	0,00	0,00	0,00
		19.035.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam	84.690.000,00	0,00	0,00	0,00
		68.743.500,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	84.690.000,00	0,00	0,00	0,00
		68.743.500,00	0,00	0,00	0,00
4.02	**SEKRETARIAT DPRD**	40.777.364.450,00	12.717.000.000,00	0,00	0,00
		39.270.917.023,00	12.370.241.929,00	0,00	0,00
4.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	35.770.839.802,00	12.717.000.000,00	0,00	0,00
		34.868.647.017,00	12.370.241.929,00	0,00	0,00
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.710.069.252,00	0,00	0,00	0,00
		3.631.348.577,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.710.069.252,00	0,00	0,00	0,00
		3.631.348.577,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	233.310.000,00	0,00	0,00	0,00
		185.682.300,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	233.310.000,00	0,00	0,00	0,00
		185.682.300,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.178.356.100,00	0,00	0,00	0,00
		1.023.197.350,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.637.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.590.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	445.653.000,00	0,00	0,00	0,00
		362.367.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	68.216.100,00	0,00	0,00	0,00
		67.129.100,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	534.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		496.119.250,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	126.250.000,00	0,00	0,00	0,00
		94.992.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	280.320.000,00	12.697.000.000,00	0,00	0,00
		279.240.000,00	12.370.241.929,00	0,00	0,00
4.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	697.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	673.680.000,00	0,00	0,00
4.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	280.320.000,00	12.000.000.000,00	0,00	0,00
		279.240.000,00	11.696.561.929,00	0,00	0,00
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.610.112.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.358.756.356,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		23.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	232.100.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.662.131,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.353.012.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.318.094.225,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	281.614.400,00	20.000.000,00	0,00	0,00
		149.718.435,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	230.614.400,00	0,00	0,00	0,00
		124.408.435,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	51.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
		25.310.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	20.072.818.050,00	0,00	0,00	0,00
		19.916.521.806,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	20.072.818.050,00	0,00	0,00	0,00
		19.916.521.806,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	8.404.240.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.324.182.193,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	8.354.240.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.324.182.193,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
4.02.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	5.006.524.648,00	0,00	0,00	0,00
		4.402.270.006,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	299.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		85.042.500,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	299.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		85.042.500,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	3.997.824.648,00	0,00	0,00	0,00
		3.681.547.506,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	2.899.537.148,00	0,00	0,00	0,00
		2.803.047.506,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1.056.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		878.500.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	42.287.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	709.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		635.680.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	709.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		635.680.000,00	0,00	0,00	0,00
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	31.717.809.021,00	944.986.511,00	3.488.909.075,00	141.175.949.080,00
		28.662.548.975,00	895.507.146,00	2.430.457.000,00	141.112.057.268,00
5.01	**PERENCANAAN**	5.103.099.200,00	220.650.000,00	0,00	0,00
		4.987.621.002,00	219.887.996,00	0,00	0,00
5.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	4.366.586.950,00	220.650.000,00	0,00	0,00
		4.262.514.381,00	219.887.996,00	0,00	0,00
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.025.851.200,00	0,00	0,00	0,00
		3.962.278.739,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.980.329.200,00	0,00	0,00	0,00
		3.916.762.739,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	45.522.000,00	0,00	0,00	0,00
		45.516.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	124.498.750,00	0,00	0,00	0,00
		97.763.600,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	870.800,00	0,00	0,00	0,00
		850.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.058.900,00	0,00	0,00	0,00
		13.046.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	85.133.550,00	0,00	0,00	0,00
		58.967.600,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	23.335.500,00	0,00	0,00	0,00
		22.800.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.100.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	220.650.000,00	0,00	0,00
		0,00	219.887.996,00	0,00	0,00
5.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	220.650.000,00	0,00	0,00
		0,00	219.887.996,00	0,00	0,00
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86.385.000,00	0,00	0,00	0,00
		80.658.575,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.835.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.232.075,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	66.550.000,00	0,00	0,00	0,00
		65.426.500,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	129.852.000,00	0,00	0,00	0,00
		121.813.467,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	114.252.000,00	0,00	0,00	0,00
		111.223.467,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.590.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	584.265.800,00	0,00	0,00	0,00
		575.092.400,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	381.675.000,00	0,00	0,00	0,00
		376.073.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	304.425.000,00	0,00	0,00	0,00
		303.406.800,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	48.125.000,00	0,00	0,00	0,00
		44.977.300,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	29.125.000,00	0,00	0,00	0,00
		27.688.900,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	121.308.300,00	0,00	0,00	0,00
		118.616.400,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	96.558.300,00	0,00	0,00	0,00
		95.696.400,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	24.750.000,00	0,00	0,00	0,00
		22.920.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	81.282.500,00	0,00	0,00	0,00
		80.403.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	49.040.000,00	0,00	0,00	0,00
		48.669.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	32.242.500,00	0,00	0,00	0,00
		31.734.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	152.246.450,00	0,00	0,00	0,00
		150.014.221,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	21.300.000,00	0,00	0,00	0,00
		21.200.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	10.650.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.600.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	10.650.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.600.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	43.530.000,00	0,00	0,00	0,00
		42.432.771,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3.530.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.480.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		38.952.771,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	87.416.450,00	0,00	0,00	0,00
		86.381.450,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3.730.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.705.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	7.620.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.570.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	63.766.450,00	0,00	0,00	0,00
		63.066.450,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	12.300.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.040.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.02	**KEUANGAN**	15.998.065.081,00	651.100.811,00	3.488.909.075,00	141.175.949.080,00
		13.477.425.318,00	603.319.300,00	2.430.457.000,00	141.112.057.268,00
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	12.729.407.181,00	452.625.000,00	0,00	0,00
		10.744.009.873,00	405.718.800,00	0,00	0,00
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.069.979.781,00	0,00	0,00	0,00
		9.391.298.838,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.069.979.781,00	0,00	0,00	0,00
		9.391.298.838,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	762.947.100,00	0,00	0,00	0,00
		735.464.795,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.896.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.702.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.116.100,00	0,00	0,00	0,00
		10.251.800,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	656.482.300,00	0,00	0,00	0,00
		638.701.870,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	49.332.700,00	0,00	0,00	0,00
		46.329.125,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.120.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.770.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		27.710.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	452.625.000,00	0,00	0,00
		0,00	405.718.800,00	0,00	0,00
5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	240.625.000,00	0,00	0,00
		0,00	195.970.800,00	0,00	0,00
5.02.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	212.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	209.748.000,00	0,00	0,00
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	194.110.000,00	0,00	0,00	0,00
		166.668.504,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	18.450.000,00	0,00	0,00	0,00
		16.095.400,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	133.860.000,00	0,00	0,00	0,00
		109.023.104,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	41.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		41.550.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	702.370.300,00	0,00	0,00	0,00
		450.577.736,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	625.640.300,00	0,00	0,00	0,00
		387.736.786,00	0,00	0,00	0,00
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	76.730.000,00	0,00	0,00	0,00
		62.840.950,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	1.373.850.000,00	0,00	3.488.909.075,00	141.175.949.080,00
		1.231.155.195,00	0,00	2.430.457.000,00	141.112.057.268,00
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	868.010.000,00	0,00	0,00	0,00
		758.194.745,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	111.720.000,00	0,00	0,00	0,00
		80.783.695,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	49.250.000,00	0,00	0,00	0,00
		40.649.800,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	141.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		100.282.250,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.01.13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	563.640.000,00	0,00	0,00	0,00
		536.479.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	131.770.000,00	0,00	0,00	0,00
		131.240.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	131.770.000,00	0,00	0,00	0,00
		131.240.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	158.520.000,00	0,00	0,00	0,00
		156.871.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	14.320.000,00	0,00	0,00	0,00
		13.786.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	144.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		143.085.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	0,00	0,00	3.488.909.075,00	141.175.949.080,00
		0,00	0,00	2.430.457.000,00	141.112.057.268,00
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	141.175.949.080,00
		0,00	0,00	0,00	141.112.057.268,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	0,00	0,00	3.488.909.075,00	0,00
		0,00	0,00	2.430.457.000,00	0,00
5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	215.550.000,00	0,00	0,00	0,00
		184.849.450,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02.2.05.03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	215.550.000,00	0,00	0,00	0,00
		184.849.450,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	531.161.500,00	0,00	0,00	0,00
		360.008.050,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	531.161.500,00	0,00	0,00	0,00
		360.008.050,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		48.990.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.380.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	145.884.000,00	0,00	0,00	0,00
		52.164.750,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	168.446.800,00	0,00	0,00	0,00
		131.180.500,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	115.590.700,00	0,00	0,00	0,00
		85.700.600,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	36.240.000,00	0,00	0,00	0,00
		27.592.200,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	1.363.646.400,00	198.475.811,00	0,00	0,00
		1.142.252.200,00	197.600.500,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.363.646.400,00	198.475.811,00	0,00	0,00
		1.142.252.200,00	197.600.500,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	118.103.500,00	100.000.000,00	0,00	0,00
		109.560.000,00	99.400.500,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	340.663.000,00	0,00	0,00	0,00
		253.744.200,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	0,00	98.475.811,00	0,00	0,00
		0,00	98.200.000,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	904.879.900,00	0,00	0,00	0,00
		778.948.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.03	**KEPEGAWAIAN**	8.964.032.240,00	73.235.700,00	0,00	0,00
		8.766.075.955,00	72.299.850,00	0,00	0,00
5.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	8.605.115.890,00	35.600.000,00	0,00	0,00
		8.458.444.015,00	35.436.750,00	0,00	0,00
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.481.576.440,00	0,00	0,00	0,00
		4.415.064.902,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.481.576.440,00	0,00	0,00	0,00
		4.415.064.902,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.714.009.050,00	0,00	0,00	0,00
		3.698.067.030,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	3.672.034.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.659.328.000,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	41.975.050,00	0,00	0,00	0,00
		38.739.030,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	215.538.400,00	0,00	0,00	0,00
		183.760.650,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.005.000,00	0,00	0,00	0,00
		860.000,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.091.800,00	0,00	0,00	0,00
		2.047.000,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	200.030.200,00	0,00	0,00	0,00
		169.106.450,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.071.400,00	0,00	0,00	0,00
		6.407.200,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.340.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.340.000,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	35.600.000,00	0,00	0,00
		0,00	35.436.750,00	0,00	0,00
5.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	35.600.000,00	0,00	0,00
		0,00	35.436.750,00	0,00	0,00
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	73.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		61.061.350,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.400.000,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		19.361.350,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	45.300.000,00	0,00	0,00	0,00
		39.300.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120.792.000,00	0,00	0,00	0,00
		100.490.083,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	117.592.000,00	0,00	0,00	0,00
		97.405.083,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.085.000,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	358.916.350,00	37.635.700,00	0,00	0,00
		307.631.940,00	36.863.100,00	0,00	0,00
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	86.314.900,00	37.635.700,00	0,00	0,00
		82.746.660,00	36.863.100,00	0,00	0,00
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	6.039.900,00	0,00	0,00	0,00
		5.731.340,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.01.04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	14.249.750,00	0,00	0,00	0,00
		13.966.350,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.01.07	Evaluasi Pemberhentian ASN	23.925.650,00	0,00	0,00	0,00
		23.591.290,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	7.049.900,00	37.635.700,00	0,00	0,00
		4.793.660,00	36.863.100,00	0,00	0,00
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	27.999.800,00	0,00	0,00	0,00
		27.942.680,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.01.12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	7.049.900,00	0,00	0,00	0,00
		6.721.340,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	28.226.000,00	0,00	0,00	0,00
		26.651.600,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	17.176.000,00	0,00	0,00	0,00
		16.281.600,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	11.050.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.370.000,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	172.875.650,00	0,00	0,00	0,00
		128.441.000,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.03.03	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		36.417.500,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	37.960.350,00	0,00	0,00	0,00
		24.061.500,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	84.915.300,00	0,00	0,00	0,00
		67.962.000,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	71.499.800,00	0,00	0,00	0,00
		69.792.680,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	34.999.900,00	0,00	0,00	0,00
		34.771.340,00	0,00	0,00	0,00
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	36.499.900,00	0,00	0,00	0,00
		35.021.340,00	0,00	0,00	0,00
5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**	1.190.492.500,00	0,00	0,00	0,00
		971.235.500,00	0,00	0,00	0,00
5.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	1.190.492.500,00	0,00	0,00	0,00
		971.235.500,00	0,00	0,00	0,00
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1.190.492.500,00	0,00	0,00	0,00
		971.235.500,00	0,00	0,00	0,00
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1.190.492.500,00	0,00	0,00	0,00
		971.235.500,00	0,00	0,00	0,00
5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	462.120.000,00	0,00	0,00	0,00
		460.191.200,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	462.120.000,00	0,00	0,00	0,00
		460.191.200,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	462.120.000,00	0,00	0,00	0,00
		460.191.200,00	0,00	0,00	0,00
5.05.02.2.01.14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	462.120.000,00	0,00	0,00	0,00
		460.191.200,00	0,00	0,00	0,00
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**	7.553.854.665,00	140.000.000,00	0,00	0,00
		7.368.118.368,00	129.984.997,00	0,00	0,00
6.01	**INSPEKTORAT**	7.553.854.665,00	140.000.000,00	0,00	0,00
		7.368.118.368,00	129.984.997,00	0,00	0,00
6.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	6.900.699.665,00	140.000.000,00	0,00	0,00
		6.728.573.368,00	129.984.997,00	0,00	0,00
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.219.304.665,00	0,00	0,00	0,00
		6.110.972.277,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.219.304.665,00	0,00	0,00	0,00
		6.110.972.277,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60.640.000,00	0,00	0,00	0,00
		35.019.500,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	60.640.000,00	0,00	0,00	0,00
		35.019.500,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	307.835.000,00	0,00	0,00	0,00
		297.686.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.568.300,00	0,00	0,00	0,00
		3.175.500,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	245.606.700,00	0,00	0,00	0,00
		237.471.500,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.210.000,00	0,00	0,00	0,00
		13.600.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.520.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.620.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	38.930.000,00	0,00	0,00	0,00
		38.819.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	140.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	129.984.997,00	0,00	0,00
6.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	140.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	129.984.997,00	0,00	0,00
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		79.994.536,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.700.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.272.500,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		16.631.936,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60.100.000,00	0,00	0,00	0,00
		59.090.100,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	224.720.000,00	0,00	0,00	0,00
		204.901.055,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	197.720.000,00	0,00	0,00	0,00
		177.926.055,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		26.975.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	261.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		254.900.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	261.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		254.900.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	220.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		215.700.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	41.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		39.200.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	391.955.000,00	0,00	0,00	0,00
		384.645.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	391.955.000,00	0,00	0,00	0,00
		384.645.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	34.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		33.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	322.155.000,00	0,00	0,00	0,00
		316.645.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		35.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**	21.504.296.290,00	213.401.750,00	0,00	0,00
		20.889.421.465,00	188.594.000,00	0,00	0,00
7.01	**KECAMATAN**	21.504.296.290,00	213.401.750,00	0,00	0,00
		20.889.421.465,00	188.594.000,00	0,00	0,00
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	19.389.268.940,00	189.449.500,00	0,00	0,00
		18.933.672.965,00	178.049.000,00	0,00	0,00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.037.000,00	0,00	0,00	0,00
		29.027.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	685.000,00	0,00	0,00	0,00
		675.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	28.352.000,00	0,00	0,00	0,00
		28.352.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.818.533.040,00	0,00	0,00	0,00
		15.570.098.172,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.818.533.040,00	0,00	0,00	0,00
		15.570.098.172,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.336.573.850,00	0,00	0,00	0,00
		1.293.772.853,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.173.200,00	0,00	0,00	0,00
		7.153.700,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.554.100,00	0,00	0,00	0,00
		42.128.900,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.109.197.250,00	0,00	0,00	0,00
		1.084.248.203,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	44.691.300,00	0,00	0,00	0,00
		40.083.800,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	17.280.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.280.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	115.678.000,00	0,00	0,00	0,00
		102.878.250,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.393.150,00	89.449.500,00	0,00	0,00
		0,00	78.580.000,00	0,00	0,00
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.393.150,00	89.449.500,00	0,00	0,00
		0,00	78.580.000,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.825.973.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.685.545.340,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22.490.000,00	0,00	0,00	0,00
		22.490.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	110.108.000,00	0,00	0,00	0,00
		74.957.840,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.693.375.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.588.097.500,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	376.758.900,00	100.000.000,00	0,00	0,00
		355.229.600,00	99.469.000,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	342.458.900,00	0,00	0,00	0,00
		327.384.600,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		26.345.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	99.469.000,00	0,00	0,00
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	178.280.900,00	0,00	0,00	0,00
		176.130.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	123.460.900,00	0,00	0,00	0,00
		121.310.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	21.947.500,00	0,00	0,00	0,00
		21.947.500,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	26.050.000,00	0,00	0,00	0,00
		25.950.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	75.463.400,00	0,00	0,00	0,00
		73.412.500,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	54.820.000,00	0,00	0,00	0,00
		54.820.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	54.820.000,00	0,00	0,00	0,00
		54.820.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	1.475.020.450,00	23.952.250,00	0,00	0,00
		1.340.967.500,00	10.545.000,00	0,00	0,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	478.419.350,00	0,00	0,00	0,00
		463.971.500,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	42.855.000,00	0,00	0,00	0,00
		42.805.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	435.564.350,00	0,00	0,00	0,00
		421.166.500,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	996.601.100,00	23.952.250,00	0,00	0,00
		876.996.000,00	10.545.000,00	0,00	0,00
7.01.03.2.02.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	42.517.450,00	0,00	0,00	0,00
		33.711.850,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	791.762.550,00	10.762.250,00	0,00	0,00
		762.341.650,00	10.545.000,00	0,00	0,00
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	158.996.100,00	13.190.000,00	0,00	0,00
		77.780.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	3.325.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.162.500,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	298.335.000,00	0,00	0,00	0,00
		287.735.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	298.335.000,00	0,00	0,00	0,00
		287.735.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	298.335.000,00	0,00	0,00	0,00
		287.735.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	91.377.000,00	0,00	0,00	0,00
		79.657.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	91.377.000,00	0,00	0,00	0,00
		79.657.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	91.377.000,00	0,00	0,00	0,00
		79.657.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	72.014.000,00	0,00	0,00	0,00
		71.259.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	72.014.000,00	0,00	0,00	0,00
		71.259.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	55.614.000,00	0,00	0,00	0,00
		55.614.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	12.360.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.685.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	4.040.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.960.000,00	0,00	0,00	0,00
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**	5.109.462.138,00	51.987.900,00	0,00	0,00
		4.973.972.187,00	50.341.750,00	0,00	0,00
8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	5.109.462.138,00	51.987.900,00	0,00	0,00
		4.973.972.187,00	50.341.750,00	0,00	0,00
8.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	3.646.526.400,00	51.987.900,00	0,00	0,00
		3.519.532.249,00	50.341.750,00	0,00	0,00
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.407.962.800,00	0,00	0,00	0,00
		3.298.425.690,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.301.642.800,00	0,00	0,00	0,00
		3.192.405.690,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	106.320.000,00	0,00	0,00	0,00
		106.020.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	120.946.100,00	0,00	0,00	0,00
		111.640.050,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.477.300,00	0,00	0,00	0,00
		1.459.500,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	73.189.400,00	0,00	0,00	0,00
		73.156.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33.459.750,00	0,00	0,00	0,00
		24.884.850,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.979.650,00	0,00	0,00	0,00
		5.299.700,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.520.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.520.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.320.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	51.987.900,00	0,00	0,00
		0,00	50.341.750,00	0,00	0,00
8.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	51.987.900,00	0,00	0,00
		0,00	50.341.750,00	0,00	0,00
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.010.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.071.462,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.810.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.810.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.261.462,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	102.607.500,00	0,00	0,00	0,00
		98.395.047,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	94.607.500,00	0,00	0,00	0,00
		90.750.047,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.645.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	90.866.700,00	0,00	0,00	0,00
		89.584.500,00	0,00	0,00	0,00
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	90.866.700,00	0,00	0,00	0,00
		89.584.500,00	0,00	0,00	0,00
8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	31.631.400,00	0,00	0,00	0,00
		30.538.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	59.235.300,00	0,00	0,00	0,00
		59.046.500,00	0,00	0,00	0,00
8.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	1.145.677.238,00	0,00	0,00	0,00
		1.141.769.238,00	0,00	0,00	0,00
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1.145.677.238,00	0,00	0,00	0,00
		1.141.769.238,00	0,00	0,00	0,00
8.01.03.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	772.467.238,00	0,00	0,00	0,00
		772.467.238,00	0,00	0,00	0,00
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Pol	11.958.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.954.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Po	269.120.000,00	0,00	0,00	0,00
		269.120.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	92.132.000,00	0,00	0,00	0,00
		89.228.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	21.708.500,00	0,00	0,00	0,00
		21.553.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	21.708.500,00	0,00	0,00	0,00
		21.553.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	21.708.500,00	0,00	0,00	0,00
		21.553.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	56.130.900,00	0,00	0,00	0,00
		53.854.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	56.130.900,00	0,00	0,00	0,00
		53.854.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	56.130.900,00	0,00	0,00	0,00
		53.854.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	148.552.400,00	0,00	0,00	0,00
		147.679.200,00	0,00	0,00	0,00
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	148.552.400,00	0,00	0,00	0,00
		147.679.200,00	0,00	0,00	0,00
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik	94.681.400,00	0,00	0,00	0,00
		94.201.200,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TDK TERDUGA	TRANSFER
8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	53.871.000,00	0,00	0,00	0,00
		53.478.000,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		864.171.523.836,00	312.893.319.489,00	3.488.909.075,00	141.175.949.080,00
		802.381.255.582,79	293.929.282.841,81	2.430.457.000,00	141.112.057.268,00

BUPATI BANGLI,

I GANG NYOMAN SEDANA ARTA

LAMPIRAN II

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Bangli
Nomor : 2 Tahun 2023
Tanggal : 15 Agustus 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(DALAM RUPIAH)

URAIAN		2022	2021
Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1	117.208.560.191,51	65.112.931.141,46
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.2	117.202.607.549,06	65.052.046.750,85
Subtotal		**5.952.642,45**	**60.884.390,61**
Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	5.2.3	40.882.706.881,96	117.208.560.191,51
Subtotal		**40.888.659.524,41**	**117.269.444.582,12**
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	5.2.4	-5.952.642,45	-60.884.390,61
Lain - Lain			
Saldo Anggaran Lebih Akhir	**5.2.5**	**40.882.706.881,96**	**117.208.560.191,51**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

BUPATI BANGLI

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

LAMPIRAN III

LAPORAN OPERASIONAL

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Bangli
Nomor : 2 Tahun 2023
Tanggal : 15 Agustus 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	REFF CALK	2022	2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
KEGIATAN OPERASIONAL	**5.4**				
PENDAPATAN	**5.4.1**	**1.095.624.789.264,36**	**1.116.874.509.338,52**	**(21.249.720.074,16)**	**-1,90**
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**5.4.1.1**	**162.362.768.249,39**	**158.846.073.455,98**	**3.516.694.793,41**	**2,21**
Pajak Daerah	5.4.1.1.1	38.308.122.487,60	26.829.823.928,24	11.478.298.559,36	42,78
Retribusi Daerah	5.4.1.1.2	36.421.180.795,00	8.298.523.911,79	28.122.656.883,21	338,89
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.4.1.1.3	8.088.493.469,20	8.520.574.208,41	-432.080.739,21	-5,07
Lain - lain PAD yang Sah	5.4.1.1.4	79.544.971.497,59	115.197.151.407,54	-35.652.179.909,95	-30,95
PENDAPATAN TRANSFER	**5.4.1.2**	**916.646.787.691,00**	**884.853.395.351,54**	**31.793.392.339,46**	**3,59**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		***759.593.691.037,00***	***783.564.595.602,00***	-23.970.904.565,00	-3,06
Dana Perimbangan	5.4.1.2.1	749.077.902.037,00	693.976.408.602,00	55.101.493.435,00	7,94
Dana Insentif Daerah (DID)	5.4.1.2.2	10.515.789.000,00	89.588.187.000,00	-79.072.398.000,00	-88,26
Pendapatan Transfer Antar Daerah	**5.4.1.2.3**	***157.053.096.654,00***	***101.288.799.749,54***	55.764.296.904,46	55,05
Pendapatan Bagi Hasil	5.4.1.2.3.1	94.827.825.602,00	76.400.595.475,54	18.427.230.126,46	24,12
Bantuan Keuangan	5.4.1.2.3.2	62.225.271.052,00	24.888.204.274,00	37.337.066.778,00	150,02
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**5.4.1.3**	**16.615.233.323,97**	**73.175.040.531,00**	**-56.559.807.207,03**	**-77,29**
Pendapatan Hibah	5.4.1.3.1	16.615.233.323,97	73.175.040.531,00	-56.559.807.207,03	-77,29
BEBAN	**5.4.2**	**1.023.137.809.771,11**	**1.011.897.091.672,75**	**11.240.718.098,36**	**1,11**
BEBAN OPERASI	**5.4.2.1**	**937.591.585.503,11**	**926.822.379.210,75**	**10.769.206.292,36**	**1,16**
Beban Pegawai	5.4.2.1.1	516.014.432.127,00	499.024.662.090,38	16.989.770.036,62	3,40
Beban Barang dan Jasa	5.4.2.1.2	279.439.427.417,05	260.297.315.636,53	19.142.111.780,52	7,35
Beban Bunga	5.4.2.1.3	3.672.260.844,57		3.672.260.844,57	0,00
Beban Hibah	5.4.2.1.4	8.067.691.302,07	12.740.451.027,00	-4.672.759.724,93	-36,68
Beban Bantuan Sosial	5.4.2.1.5	253.030.998,00	238.566.000,00	14.464.998,00	6,06
Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.1.6	2.532.893.519,88	2.373.158.702,26	159.734.817,62	6,73
Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4.2.1.7	126.736.069.106,70	150.833.692.301,43	-24.097.623.194,73	-15,98
Beban Lain-Lain	5.4.2.1.8	875.780.187,84	1.314.533.453,15	-438.753.265,31	-33,38
BEBAN TRANSFER	**5.4.2.2**	**85.546.224.268,00**	**85.074.712.462,00**	**471.511.806,00**	**0,55**
Beban Bagi Hasil	5.4.2.2.1	6.711.196.000,00	3.410.243.000,00	3.300.953.000,00	96,80
Beban Bantuan Keuangan	5.4.2.2.2	78.835.028.268,00	81.664.469.462,00	-2.829.441.194,00	-3,46
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		**72.486.979.493,25**	**104.977.417.665,77**	**(32.490.438.172,52)**	**(30,95)**
KEGIATAN NON-OPERASIONAL					
SURPLUS NON-OPERASIONAL	**5.4.3**	**66.642.290.115,50**	**5.508.998.682,13**	**61.133.291.433,37**	**1.109,70**
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar		66.642.290.115,50	5.508.998.682,13	61.133.291.433,37	1.109,70
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang					
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya					
DEFISIT NON-OPERASIONAL	**5.4.4**	**65.459.168.059,49**	**18.698.475.334,06**	**46.760.692.725,43**	**250,08**
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar		64.571.319.049,96	17.416.638.038,40	47.154.681.011,56	270,75
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		887.849.009,53	1.281.837.295,66	-393.988.286,13	-30,74
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya					
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON-OPERASIONAL		**1.183.122.056,01**	**(13.189.476.651,93)**	**14.372.598.707,94**	**(108,97)**
SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA		**72.486.979.493,25**	**104.977.417.665,77**	**(32.490.438.172,52)**	**(30,95)**
POS LUAR BIASA	**5.4.5**	**(41.000.000,00)**	**(136.094.690,65)**	**95.094.690,65**	**(69,87)**
Pendapatan Luar Biasa	5.4.5.1				
Beban Luar Biasa	5.4.5.2	41.000.000,00	136.094.690,65	-95.094.690,65	-69,87
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA		**(41.000.000,00)**	**(136.094.690,65)**	**95.094.690,65**	**(69,87)**
SURPLUS/(DEFISIT) - LO	**5.4.6**	**73.629.101.549,26**	**91.651.846.323,19**	**(18.022.744.773,93)**	**(19,66)**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

BUPATI BANGLI

I NYOMAN SEDANA ARTA

LAMPIRAN IV

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Bangli
Nomor : 2 Tahun 2023
Tanggal : 15 Agustus 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	REFF CALK	2022	2021
Ekuitas Awal	5.6.1	**1.336.079.836.287,24**	**1.244.850.145.953,19**
Surplus/(Defisit) LO	5.6.2	**73.629.101.549,26**	**91.651.846.323,19**
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:	5.6.3	**7.643.948.504,14**	**(422.155.989,14)**
Koreksi Ekuitas - Kas		1.596.447.184,83	(170.200,00)
Koreksi Ekuitas - Penyisihan Piutang		58.202.704,18	
Koreksi Ekuitas - Aset Persediaan		145.411.110,40	
Koreksi Ekuitas - Aset Tetap		7.624.009.989,89	
Koreksi Ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		(1.951.545.261,00)	
Koreksi Ekuitas - Investasi Jangka Panjang		21.775.103,84	
Koreksi Ekuitas - Aset Lainnya		(56.515.416,00)	(421.985.789,14)
Koreksi Ekuitas - Kewajiban		206.163.088,00	
Ekuitas Akhir	5.6.4	**1.417.352.886.340,64**	**1.336.079.836.287,24**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

BUPATI BANGLI

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

LAMPIRAN V

NERACA

Lampiran V : Peraturan Daerah Kabupaten Bangli
Nomor : 2 Tahun 2023
Tanggal : 15 Agustus 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
NERACA
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER 2021

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	REFF CALK	2022	2021
ASET	**5.3.1**	**1.517.960.855.187,34**	**1.385.330.610.911,74**
ASET LANCAR	**5.3.1.1**	**108.732.696.272,71**	**178.949.771.262,04**
Kas dan Setara Kas	**5.3.1.1.1**	42.470.903.814,35	117.209.643.226,51
Kas di Kas Daerah	**5.3.1.1.1.1**	35.085.330.183,85	58.212.830.752,33
Kas di Bendahara Penerimaan	**5.3.1.1.1.2**	398.411.000,00	51.528.600,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	**5.3.1.1.1.3**	54.916.900,00	
Kas di BLUD RSUD	**5.3.1.1.1.4**	3.116.826.347,75	54.323.932.097,68
Kas di BLUD Puskesmas	**5.3.1.1.1.5**	1.505.055.748,48	3.909.741.517,21
Kas Dana BOS	**5.3.1.1.1.6**	722.912.155,88	711.610.259,29
Kas Lainnya	**5.3.1.1.1.7**	1.587.451.478,39	
Investasi Jangka Pendek	**5.3.1.1.2**		
Piutang Pajak Daerah	**5.3.1.1.3.1**	38.817.107.320,78	37.191.988.336,85
Piutang Retribusi Daerah	**5.3.1.1.3.2**	422.021.095,81	322.620.095,81
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	**5.3.1.1.3.3**	3.625.614.352,71	3.439.795.200,80
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	**5.3.1.1.3.4**	12.370.489.737,55	3.195.864.735,52
Piutang Transfer Pemerintah Pusat			
Piutang Transfer Antar Daerah	**5.3.1.1.3.5**	17.540.579.457,00	15.623.059.066,00
Piutang Lainnya	**5.3.1.1.4**		10.456.764.213,91
Penyisihan Piutang	**5.3.1.1.5**	-27.854.226.847,91	-25.379.536.032,21
Beban Dibayar Dimuka	**5.3.1.1.6**	511.080.692,61	347.444.355,56
Persediaan	**5.3.1.1.7**	20.829.126.649,81	16.542.128.063,29
INVESTASI JANGKA PANJANG	**5.3.1.2**	**68.396.974.646,40**	**61.860.525.954,29**
Investasi Jangka Non-Permanen	**5.3.1.2.1**	210.204.167,67	188.429.063,83
Investasi Jangka Panjang Permanen	**5.3.1.2.2**	68.186.770.478,73	61.672.096.890,46
ASET TETAP	**5.3.1.3**	**1.322.302.236.652,85**	**1.131.812.237.421,41**
Tanah	5.3.1.3.1	182.690.383.171,00	163.234.788.899,00
Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	438.946.426.286,18	357.667.592.558,25
Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	643.314.788.999,19	464.765.258.821,12
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.3.1.3.4	1.255.416.002.811,16	1.187.642.494.878,20
Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	75.929.952.477,76	79.076.307.886,96
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	5.901.638.883,11	16.304.806.709,45
Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	-1.279.896.955.975,55	-1.136.879.012.331,57
PROPERTI INVESTASI	**5.3.1.4**		
Properti Investasi			
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi			
DANA CADANGAN	**5.3.1.5**		
Dana Cadangan			
ASET LAINNYA	**5.3.1.6**	**18.528.947.615,38**	**12.708.076.274,00**
Tagihan Jangka Panjang	5.3.1.6.1		
Aset Tidak Berwujud	5.3.1.6.2	7.752.412.242,25	6.189.039.766,67
Aset Lain - Lain	5.3.1.6.3	10.776.535.373,13	6.519.036.507,33
KEWAJIBAN	**5.3.2**	**100.607.968.846,70**	**49.250.774.624,50**
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**5.3.2.1**	**29.828.283.644,70**	**38.566.844.924,50**
Utang Perhitungan Fihak Ketiga	5.3.2.1.1	745.454,00	1.083.035,00
Utang Bunga	5.3.2.1.2	382.589.121,00	
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	5.3.2.1.3	996.897.055,00	
Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.4	197.958.598,50	118.937.034,06
Utang Belanja	5.3.2.1.5	22.278.573.989,77	18.244.202.011,77
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.6	5.971.519.426,43	20.202.622.843,67

URAIAN	REFF CALK	2022	2021
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	**5.3.2.2**	**70.779.685.202,00**	**10.683.929.700,00**
Utang kepada Pemerintah Pusat	5.3.2.2	70.779.685.202,00	10.683.929.700,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)			
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank			
Utang kepada Masyarakat			
EKUITAS	**5.3.3**	**1.417.352.886.340,64**	**1.336.079.836.287,24**
EKUITAS			
Ekuitas	5.3.3	1.417.352.886.340,64	1.336.079.836.287,24
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**1.517.960.855.187,34**	**1.385.330.610.911,74**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

BUPATI BANGLI

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

LAMPIRAN VI

LAPORAN ARUS KAS

Lampiran VI : Peraturan Daerah Kabupaten Bangli
Nomor : 2 Tahun 2023
Tanggal : 15 Agustus 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

DALAM RUPIAH

URAIAN	REFF CALK	TAHUN 2022	TAHUN 2021
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	**5.5.1**		
Arus Masuk Kas	**5.5.1.1**		
Penerimaan Pajak Daerah		36.707.060.479,07	23.318.329.220,50
Penerimaan Retribusi Daerah		36.328.299.166,20	8.281.617.975,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		5.597.430.541,18	6.101.592.913,01
Penerimaan Lain - lain PAD yang Sah		65.144.751.773,05	124.750.796.009,31
Penerimaan Dana Perimbangan		739.520.734.637,00	703.032.171.031,00
Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID)		66.075.718.000,00	154.701.450.000,00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur			
Penerimaan Dana Keistimewaan			
Penerimaan Dana Desa			
Penerimaan Bagi Hasil		92.910.305.211,00	66.727.321.041,74
Penerimaan Bantuan Keuangan		62.225.271.052,00	24.888.204.274,00
Penerimaan Hibah		702.617.710,00	37.397.273.549,00
Penerimaan Dana Darurat			
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			
Jumlah Arus Masuk Kas		**1.105.212.188.569,50**	**1.149.198.756.013,56**
Arus Keluar Kas	**5.5.1.2**		
Pembayaran Pegawai		515.867.247.541,00	504.713.738.147,38
Pembayaran Barang dan Jasa		273.728.730.016,95	258.938.376.121,93
Pembayaran Bunga		3.297.009.892,57	138.750.000,00
Pembayaran Hibah		9.234.589.134,27	7.904.115.473,00
Pembayaran Bantuan Sosial		253.030.998,00	238.566.000,00
Pembayaran Tak Terduga		2.430.457.000,00	3.409.319.517,00
Pembayaran Bagi Hasil		6.717.100.000,00	3.410.243.000,00
Pembayaran Bantuan Keuangan		134.394.957.268,00	146.777.732.462,00
Jumlah Arus Keluar Kas		**945.923.121.850,79**	**925.530.840.721,31**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		**159.289.066.718,71**	**223.667.915.292,25**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	**5.5.2**		
Arus Masuk Kas	**5.5.2.1**		
Pencairan Dana Cadangan			
Penjualan atas Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan			
Penjualan atas Aset Lainnya		227.662.899,00	1.084.759.650,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
Penerimaan Penjualan Investasi Nonpermanen			
Jumlah Arus Masuk Kas		**227.662.899,00**	**1.084.759.650,00**
Arus Keluar Kas	**5.5.2.2**		
Pembentukan Dana Cadangan			
Perolehan Tanah		14.134.423.669,00	
Perolehan Peralatan dan Mesin		60.358.662.837,00	40.977.923.944,00
Perolehan Gedung dan Bangunan		180.104.496.229,81	89.033.687.223,59
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		37.746.357.806,00	49.366.499.234,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya		1.585.342.300,00	3.901.980.800,00
Perolehan Aset Lainnya			
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah			
Pengeluaran Pembelian Investasi Nonpermanen			
Jumlah Arus Keluar Kas		**293.929.282.841,81**	**183.280.091.201,59**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		**-293.701.619.942,81**	**-182.195.331.551,59**

URAIAN	REFF CALK	TAHUN 2022	TAHUN 2021
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	**5.5.3**		
Arus Masuk Kas	**5.5.3.1**		
Penerimaan Pinjaman Daerah		61.092.652.557,00	10.683.929.700,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah			
Jumlah Arus Masuk Kas		**61.092.652.557,00**	**10.683.929.700,00**
Arus Keluar Kas	**5.5.3.1**		
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		3.000.000.000,00	
Pemberian Pinjaman Daerah			
Jumlah Arus Keluar Kas		**3.000.000.000,00**	**-**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		**58.092.652.557,00**	**10.683.929.700,00**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	**5.5.4**		
Arus Masuk Kas	**5.5.4.1**		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		88.185.699.305,00	81.357.506.528,49
Penerimaan Kembali Uang Persediaan dari Bend. Pengeluaran			
Kiriman Uang Masuk			
Jumlah Arus Masuk Kas		**88.185.699.305,00**	**81.357.506.528,49**
Arus Keluar Kas	**5.5.4.2**		
Pembayaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		88.186.036.886,00	81.363.180.654,49
Pemberian Kembali Uang Persediaan kepada Bend. Pengeluaran			
Kiriman Uang Keluar			
Jumlah Arus Keluar Kas		**88.186.036.886,00**	**81.363.180.654,49**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		**-337.581,00**	**-5.674.126,00**
Kenaikan / (Penurunan) Kas	**5.5.5**	**-76.320.238.248,10**	**52.150.839.314,66**
Saldo Awal Kas	**5.5.6**	**117.209.643.226,51**	**65.119.688.302,46**
Koreksi SILPA Tahun Lalu	**5.5.7**	**-5.952.642,45**	**-60.884.390,61**
Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD) - Terkait PFK	**5.5.8**	**1.587.451.478,39**	**-**
Saldo Akhir Kas	**5.5.9**	**42.470.903.814,35**	**117.209.643.226,51**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



BUPATI BANGLI

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

LAMPIRAN VII

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Lampiran VII
Peraturan Daerah Kabupaten Bangli
Nomor 2 Tahun 2023
Tanggal 15 Agustus 2023

BAB I
PENDAHULUAN

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bangli harus dipertanggungjawabkan pelaksanaannya setiap tahun yaitu dengan menyusun Laporan Keuangan. Hal itu sebagaimana terkandung dalam UU Nomor 17 Tahun 2003, mewajibkan Presiden dan Gubernur/Walikota/Bupati untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN/APBD) berupa Laporan Keuangan.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 32 bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli telah mengacu pada PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dimana Laporan Keuangan yang disusun sebanyak tujuh terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuagan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli disusun dengan maksud:

a. Memenuhi tanggung jawab konstitusi sesuai dengan ketentuan UU Nomor 17 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 dan PP Nomor 12 Tahun 2019;
b. Memenuhi akuntabilitas publik yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan mandat yang dipercayakan kepada Pemerintah Kabupaten Bangli;
c. Menyediakan informasi keuangan secara komprehensif yang berguna bagi perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta meningkatkan efektivitas pengendalian atas seluruh aset, hutang dan ekuitas dana;
d. Menyediakan informasi keuangan yang transparan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Sedangkan tujuan pelaporan keuangan pemerintah secara spesifik adalah:

a. Untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan;
b. Untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan cara:
    1) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
    2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
    3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
    4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
    5) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi

kebutuhan kasnya;

6) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas suatu entitas pelaporan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

a. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
b. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
c. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
d. UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
e. UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
f. PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
g. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
h. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
i. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
j. Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
k. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1114 Tahun 2019);
l. Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
m. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
n. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/316/BAKD tentang Pedoman Sistem dan

Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

o. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2022;
p. Peraturan Bupati Bangli Nomor 49 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Bangli Nomor 83 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2022; dan
q. Peraturan Bupati Bangli Nomor 91 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bangli.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

CaLK meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LP SAL, Neraca, LPE, LO dan LAK. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya. Adapun sistematika isi CaLK adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan
- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi
- 4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan LKPD
- 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan LKPD
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam SAP Pemerintah Daerah

Bab V Penjelasan Pos - Pos Laporan Keuangan
- 5.1. Rincian dari Penjelasan dari Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan
- 5.1.1 Pendapatan-LRA
- 5.1.2 Belanja
- 5.1.3 Pembiayaan
- 5.1.4 Pendapatan-LO
- 5.1.5 Beban
- 5.1.6 Aset
- 5.1.7 Kewajiban
- 5.1.8 Ekuitas Dana

5.2. Pengungkapan atas Pos-Pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual pada Pemerintah Daerah

Bab VI Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan Pemerintah Daerah

Bab VII Penutup

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 mengacu pada indikator sosial ekonomi Statistik Kabupaten Bangli Tahun 2021 menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangli yaitu:

a. Tingkat Kemiskinan sebesar 5,28%;
b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 1,8%;
c. Gini Ratio sebesar 0,285%;
d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 69,37%;
e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar -0,33%;
f. Tingkat Inflasi sebesar 2,01%; dan
g. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB) sebesar Rp6.799,14 miliar rupiah.

2.1.1 Tingkat Kemiskinan

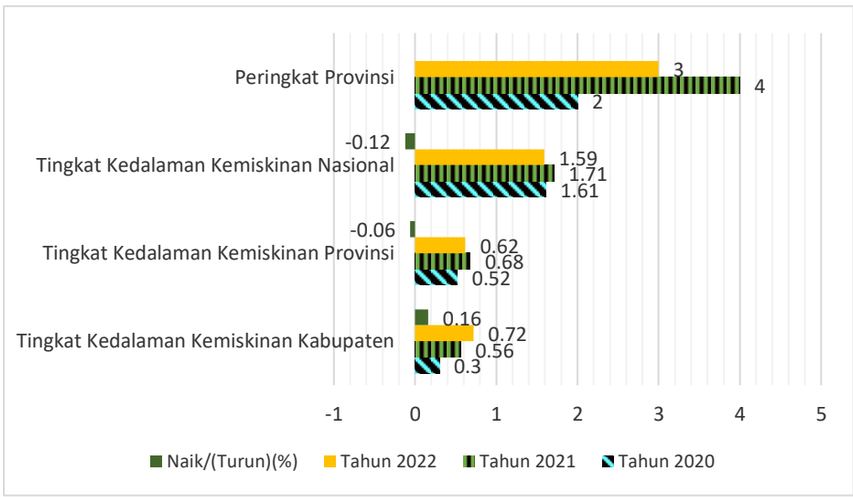
Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Kabupaten Bangli periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel 2.1. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bangli

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/(Turun)(%) 2022 thd 2021
1	Kab. Bangli (%)	4,19	5,09	5,28	0,19
2	Kab. Bangli (Ribu Orang)	9,56	11,68	12,17	0,49
3	Provinsi Bali(%)*	3,78	4,53	4,57	0,04
4	Nasional (%)*	9,78	10,14	9,54	-0,60
5	Peringkat Provinsi	6	5	5	-

Sumber Dokumen: BPS Prov/Kab/Kota Bangli
**Hasil Susenas Maret*

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa selama 3 (tiga) tahun terakhir terjadi peningkatan angka kemiskinan di Kabupaten Bangli. Persentase penduduk miskin Kabupaten Bangli pada Tahun 2021 sebesar 5,09% mengalami kenaikan dimana pada Tahun 2022 persentase penduduk miskin naik hingga menjadi 5,28% dan diharapkan pada tahun 2023 dapat menurun hingga angka 4%. Peningkatan angka kemiskinan tersebut merupakan dampak pandemi *covid-19* yang masih terasa. Dampak pandemi menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangli. Pertumbuhan ekonomi yang menurun berpengaruh pada pendapatan perkapita dan juga pengeluaran perkapita, dan secara tidak langsung berpengaruh pada tingkat kemiskinan. Walaupun perekonomian Kabupaten Bangli sudah mulai bangkit dan mulai menyerap tenaga kerja, namun penurunan pengangguran tersebut belum berdampak pada peningkatan pendapatan dan pengeluaran masyarakat. Penurunan pengangguran belum diikuti dengan peningkatan kualitas pekerjaan penduduk, dimana penurunan penganguran ini didominasi oleh masyarakat yang bekerja di sektor informal, sehingga peningkatan pendapatan tidak signifikan. Persentase penduduk miskin Kabupaten Bangli masih di atas provinsi dan nasional atau di atas provinsi dan di bawah nasional, maka dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan.

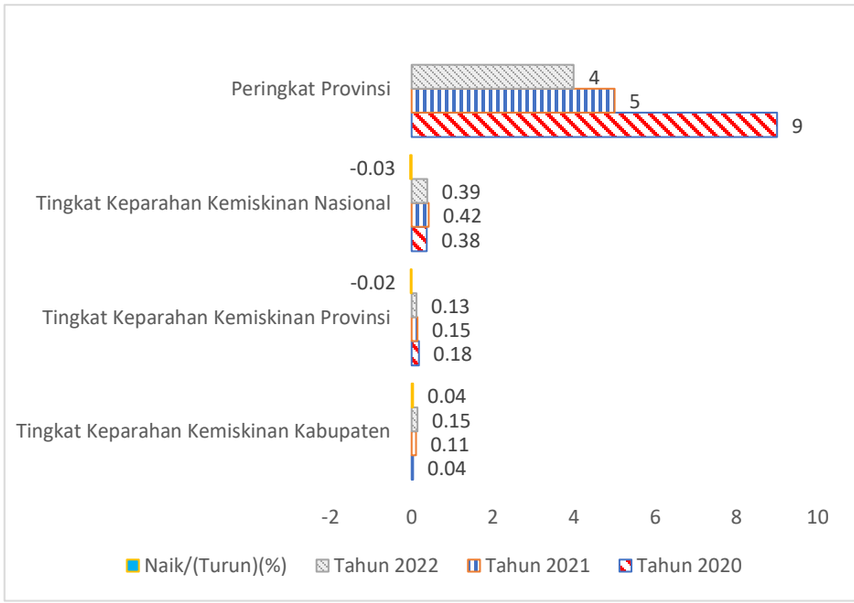


Gambar 2.1 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Bangli

Sumber Dokumen: BPS Prov/Kab/Kota Bangli

Program Penanggulangan Kemiskinan

Pada tahun 2022 Program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bangli dilaksanakan oleh beberapa OPD yaitu Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kecamatan Bangli, Kecamatan Kintamani, Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan Susut dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Tatal anggaran untuk penanggulangan kemiskinan dari semua OPD tersebut adalah Rp110.805.760.248,00 dengan realisasi Rp104.641.651.398,00.

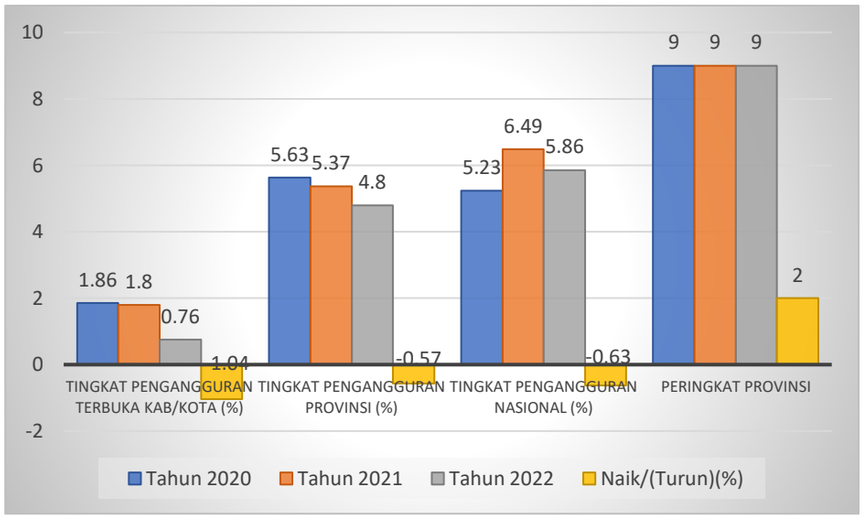


Gambar 2.2. Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Bangli
Sumber Dokumen: BPS Prov/Kab/Kota Bangli

2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka**)** adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka**,** terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan; (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha; (iii) mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangli Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bangli Tahun 2022 adalah sebesar 0,76%, sebagaimana dijelaskan gambar di bawah ini.



Gambar 2.3. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bangli
Sumber Dokumen: BPS

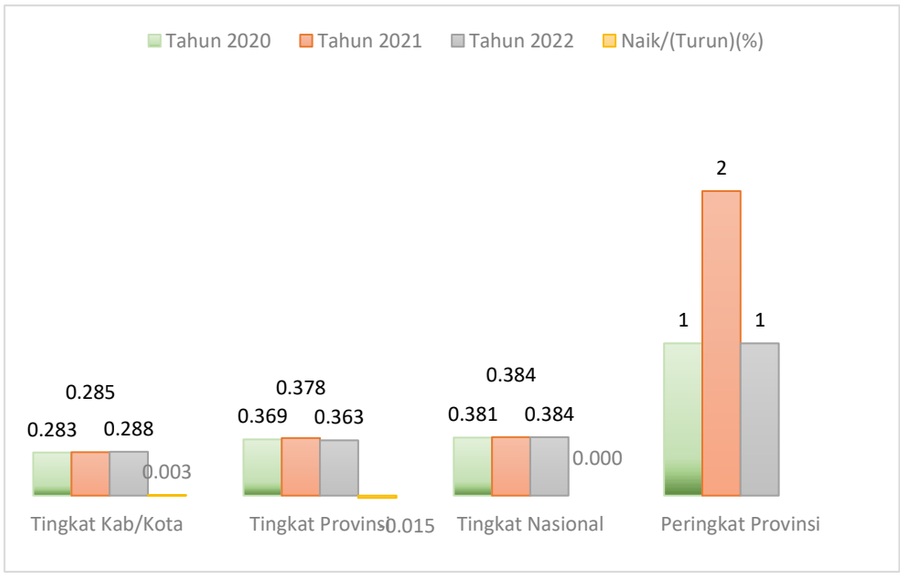
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Bangli Tahun 2021 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 1,8%, sedangkanTPT pada Tahun 2020 adalah sebesar 1,86%. Namun demikian TPT Kabupaten Bangli 2022 masih lebih rendah dibandingkan TPT Provinsi Bali yang sebesar 4,8%.

2.1.3 Indeks Gini (*Gini Ratio*)

Indeks Gini atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara nol dan satu dimana:

a. Indeks Gini sama dengan nol, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama
b. Indeks Gini sama dengan satu, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangli Realisasi pencapaian Gini Ratio Kabupaten Bangli Tahun 2022 adalah sebesar 0,288 poin. Artinya bahwa tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat di Kabupaten Bangli adalah rendah. Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di Kabupaten Bangli membuat distribusi pendapatan merata antar masyarakat. Koefisien gini di Kabupaten Bangli dijelaskan gambar di bawah ini:



Gambar 2.4 Gini Ratio Kabupaten Bangli
Sumber Dokumen:BPS Prov/Kab/Kota Bangli

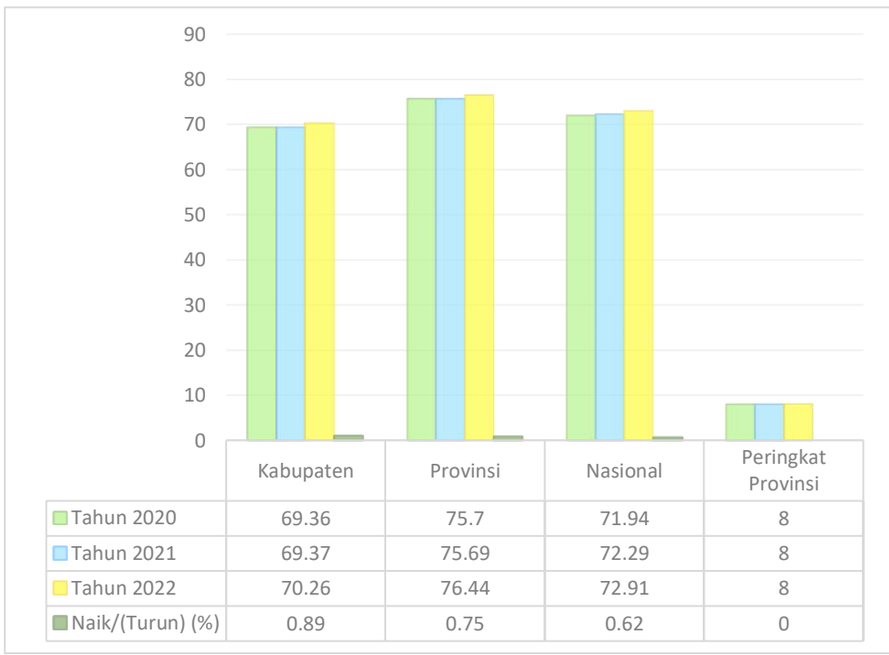
Pada Tahun 2021, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Bangli yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,285 Angka ini naik 0,002 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Tahun 2020 yang sebesar 0,283. lebih rendah jika dibandingkan dengan Gini Ratio Provinsi dan 0,106 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Nasional.

2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat *(a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

a. Rendah (< 60);
b. Sedang (60≤IPM<70);
c. Tinggi (70 ≤IPM<80); dan
d. Sangat Tinggi (>80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangli, Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Bangli Tahun 2022 adalah sebesar 70,26 poin. Tingkat IPM Kabupaten Bangli pada tahun 2022 masuk dalam kategori tinggi, hal ini mengindikasikan keberhasilan pemerintah Kabupaten Bangli dalam melaksanakan pembangunan di berbagai sektor. IPM Kabupaten Bangli dapat dijelaskan dalam gambar di bawah ini.



	Kabupaten	Provinsi	Nasional	Peringkat Provinsi
Tahun 2020	69.36	75.7	71.94	8
Tahun 2021	69.37	75.69	72.29	8
Tahun 2022	70.26	76.44	72.91	8
Naik/(Turun) (%)	0.89	0.75	0.62	0

Gambar 2.5 Indeks Pembangunan Manusia

Sumber Dokumen BPS Prov/Kab/Kota Bangli

Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Bangli Tahun 2022 adalah sebesar 70,26 poin, dibandingkan Tahun 2021 sebesar 69,37 poin mengalami kenaikan sebesar 0,89 poin. Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya umur harapan hidup saat lahir (AHH), atau dan harapan lama sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), atau dan standar hidup, berkaitan dengan PNB per kapita. Usia Harapan Hidup (UHH) mencapai 70,97 tahun pada Tahun 2022, lebih lama 0,35 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Kemudian, rata-rata lama sekolah selama 7,47 tahun dengan harapan lama sekolah 12,49 tahun. Sementara, Standar Hidup, pengeluaran per kapita pada tahun 2022 sebesar Rp11.424,00 atau nail sebesar Rp223,00 dibandingkan tahun sebelumnya. IPM di Kabupaten Bangli pada saat ini berada pada urutan delapan dari sembilan Kab/Kota yang ada di Provinsi Bali.

2.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor

produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 2.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangli

No	Uraian	Kabupaten Bangli		Provinsi	Nasional
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2022
1	PDRB (harga konstan 2010) (milyar Rp)	4.384,67	4.507,10	150.821,44	11.710.397,80
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	-0,33	2,79	4,84	5,31
3	Peringkat Provinsi	2	8	-	-

Sumber Dokumen: BPS Prov/Kab/Kota Bangli

Selama kurun waktu Tahun 2021-Tahun 2022 perekonomian Kabupaten Bangli mengalami kenaikan rata rata 2,79%. Pada periode Tahun 2020 – Tahun 2021 pertumbuhan perkonomian Kabupaten Bangli sebesar -0,33%. Dalam skala provinsi laju pertumbuhan Kabupaten Bangli menempati urutan delapan dari laju pertumbuhan kota atau kabupaten lain dalam wilayah Provinsi Bali.

2.1.6 Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Bangli dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, (i)Inflasi ringan (*creeping inflation*) Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun. (ii) Inflasi Sedang (*Galloping Inflation*) Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun, (iii) Inflasi Berat (*High Inflation*) kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan. Dan (iv) Hiperinflasi (*Hyper Inflation*) Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangli Tingkat Inflasi Kabupaten Bangli Tahun 2022 hanya menerbitkan inflasi kota Denpasar sebesar 6,44% dan Singaraja adalah sebesar 4,63% dengan kategori ringan sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.3.Tingkat Inflasi Provinsi Bali

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Inflasi Kab/Kota Dps (%)	0,55	2,01	6,44	4,43
2	Tingkat Inflasi Singaraja (%)	2,48	2,39	4,63	2,24
3	Tingkat Inflasi Provinsi (%)	-	-	-	-
4	Tingkat inflasi Nasional (%)	1,68	1,87	5,51	3,64
5	Peringkat Provinsi	-	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Prov/Kab/Kota Bangli

Tingkat inflasi di Prov/Kab/Kota di Bali (Denpasar) Tahun 2022 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 6,44%, sedangkan tingkat inflasi pada Tahun 2021 adalah sebesar 2,01% atau lebih rendah dibandingkan dengan angka inflasi pada Tahun 2022. Namun demikian, inflasi Kota Denpasar lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi Nasional sebesar 1,13%.

2.1.7 Struktur Perekonomian Kabupaten Bangli

Struktur perekonomian Kabupaten Bangli dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.4. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

(dalam miliar rupiah)

No	Uraian	Tahun 2021*	Tahun 2022**
1	Pertanian, Kehutanan, dan perikanan	1.928,29	2.034,85
2	Pertambangan dan Penggalian	125,19	131,48
3	Industri Pengolahan	603,80	641,49
4	Pengadaan Listrik dan Gas	2,88	3,06
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,73	4,77
6	Konstruksi	613,10	654,52
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	672,89	738,90
8	Transportasi dan Pergudangan	72,46	79,73
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	704,73	821,50
10	Informasi dan Komunikasi	329,75	338,27
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	189,42	222,15
12	Real Estat	220,63	232,42
13	Jasa Perusahaan	36,89	40,36
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	811,02	843,22
15	Jasa Pendidikan	177,00	179,58
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	113,04	119,68
17	Jasa Lainnya	219,63	251,51
18	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	6.825,46	7.337,51
19	PDRB Provinsi	220.467,45	245.233,24
20	PDRB Nasional	16.976.690,80	19.588.445,60
22	Peringkat Provinsi	9	9

*Angka Sementara
**Angka Sangat Sementara
Sumber Dokumen: BPS Prov/Kab/Kota Bangli

Kondisi-kondisi tersebut yang mendasari penyusunan APBD Tahun 2022. APBD TA 2022 disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021. Dalam tahun anggaran 2022, Pemerintah Kabupaten Bangli melakukan perubahan APBD dan disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 yang susunannya berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Beberapa hal utama yang terkait dengan perubahan anggaran tersebut sebagai berikut:

a. Anggaran Pendapatan

Anggaran pendapatan mengalami kenaikan sebesar Rp3.282.126.908,00 atau 0,29%. Kenaikan ini merupakan akumulasi dari beberapa jenis pendapatan seperti PAD turun sebesar 13,29%, Pendapatan Transfer naik sebesar 2,57%, dan Lain- Lain Pendapatan Daerah yang Sah menjadi Rp870.991.000,00 dari semula sebesar Rp. 0,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.5 Anggaran Pendapatan Awal dan Perubahan

(dalam rupiah)

Jenis Pendapatan	Anggaran Semula	Anggaran Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
PAD	169.679.401.929,00	147.126.416.529,00	(22.552.985.400,00)
Pendapatan Transfer	970.243.542.151,00	995.207.663.459.00	24.964.121.308,00
Lain- Lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	870.991.000,00	870.991.000,00
Jumlah	**1.139.922.944.080,00**	**1.143.205.070.988,00**	**3.282.126.908,00**

Secara garis besar upaya-upaya yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah dengan:

1) Mengupayakan dan mengintensifkan peningkatan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari PAD
2) Mengintensifkan tingkat kesadaran masyarakat akan kewajiban membayar pajak maupun retribusi daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
3) Evaluasi dan pemberlakuan tarif pajak dan retribusi daerah yang sudah disesuaikan; dan
4) Peningkatan penegakan hukum atas pelanggaran kebijakan pajak dan retribusi daerah.

b. Anggaran Belanja

Anggaran belanja mengalami kenaikan sebesar Rp65.490.687.100,00 dari anggaran semula Rp1.256.239.014.380,00 menjadi Rp1.321.729.701.480,00 atau mengalami kenaikan 5,21%.

Dalam konteks penganggaran berdasar pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, belanja tersebut terinci atas:

1) Belanja Operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, dari anggaran semula Rp812.483.898.269,00 menjadi Rp864.171.523.836,00 naik sebesar Rp51.687.625.567 atau 6,36% yang terinci sebagai berikut:

Tabel 2.6 Anggaran Belanja Operasi Awal dan Perubahan

(dalam rupiah)

Jenis Belanja	Anggaran Semula (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)(Rp)
Belanja Pegawai	541.299.595.677,00	542.479.656.508,00	1.180.060.831,00
Belanja Barang dan Jasa	257.883.590.187,00	307.036.954.923,00	49.153.364.736,00
Belanja Bunga	4.845.729.167,00	4.845.729.167,00	0,00
Belanja Hibah	8.193.787.238,00	9.547.987.238,00	1.354.200.000,00
Belanja Bantuan Sosial	261.196.000,00	261.196.000,00	0,00
Jumlah	**812.483.898.269,00**	**864.171.523.836,00**	**51.687.625.567,00**

2) Belanja Modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi, dari anggaran semula Rp302.272.800.111,00 menjadi Rp312.893.319.489,00 bertambah sebesar Rp10.734.689.605,00 atau 3,55% yang terinci sebagai berikut:

Tabel 2.7 Anggaran Belanja Modal Awal dan Perubahan

(dalam rupiah)

Jenis Belanja	Anggaran Semula	Anggaran Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
Belaja Modal Tanah	14.550.798.400,00	14.393.673.100,00	(157.125.300,00)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	61.339.842.311,00	66.300.747.644,00	4.960.905.333,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	180.270.476.250,00	185.928.218.376,00	5.657.742.126,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan Irigasi	44.278.369.350,00	44.494.451.733,00	216.082.282,00
Belanja Modal Aset Tetap lainnya	1.833.313.800,00	1.776.228.636,00	57.085.164,00
Jumlah	**302.272.800.111,00**	**312.893.319.489,00**	**10.734.689.605,00**

3) Belanja Tidak Terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, mengalami perubahan dari anggaran semula yaitu sebesar Rp5.250.000.000,00 menjadi Rp3.488.909.075,00 berkurang sebesar Rp1.761.090.925,00 atau 33,54% yang terinci sebagai berikut:

Tabel 2.8. Anggaran Belanja Tidak Terduga Awal dan Perubahan

(dalam rupiah)

Jenis Belanja	Anggaran Semula	Anggaran Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
Belanja Tidak Terduga	5.250.000.000,00	3.488.909.075,00	(1.761.090.925,00)
Jumlah	**5.250.000.000,00**	**3.488.909.075,00**	**(1.761.090.925,00)**

4) Belanja Transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa, mengalami perubahan dari anggaran semula Rp136.232.316.000,00 menjadi Rp141.175.949.080,00 bertambah sebesar Rp4.943.633.080,00 atau 3,63% yang terinci sebagai berikut:

Tabel 2.9 Anggaran Belanja Transfer Awal dan Perubahan

(dalam rupiah)

Jenis Belanja	Anggaran Semula	Anggaran Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
Belanja Bagi Hasil	3.937.127.000,00	6.711.232.500,00	2.774.105.500,00
Belanja Bantuan Keuangan	132.295.189.000,00	134.464.716.580,00	2.169.527.580,00
Jumlah	**136.232.316.000,00**	**141.175.949.080,00**	**4.943.633.080,00**

Permasalahan utama dalam pengelolaan anggaran belanja, yaitu terbatasnya alokasi dan akumulasi dana yang dikelola Pemerintah Kabupaten Bangli untuk membiayai program dan kegiatan sebagai akibat masih relatif rendahnya PAD dan proporsinya terhadap APBD, sehingga sebagian besar sumber dana untuk membiayai pengeluaran/belanja berasal dari Dana Perimbangan, terutama Dana Alokasi Umum dan Dana Perimbangan lainnya yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat.

c. Anggaran Pembiayaan

Anggaran pembiayaan terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Dalam perubahan APBD tahun 2022, pembiayaan netto mengalami perubahan dari anggaran semula Rp116.316.070.300,00 menjadi Rp178.524.630.492,00 bertambah sebesar Rp62.208.560.192,00 atau 53,48% yang terinci sebagai berikut:

Tabel 2.10 Anggaran Pembiayaan Awal dan Perubahan

(dalam rupiah)

Jenis Pembiayaan (Rp)	Anggaran Semula	Anggaran Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
Penerimaan :			
Silpa Tahun Sebelumnya	54.000.000.000,00	117.208.560.192,00	63.208.560.192,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	64.316.070.300,00	64.316.070.300,00	0,00
Sub Jumlah	**118.316.070.300,00**	**181.524.630.492,00**	**63.208.560.192,00**
Pengeluaran :			
Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000,00	3.000.000.000,00	1.000.000.000,00
Sub Jumlah	**2.000.000.000,00**	**3.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**
Pembiayaan Netto	**116.316.070.300,00**	**178.524.630.492,00**	**62.208.560.192,00**

2.2 Kebijakan Keuangan

Dalam mengelola keuangan daerah, agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna maka perlu kebijakan dan perencanaan yang matang dalam memperoleh sumber pendanaan dan penggunaan dana yang telah diperoleh. Kebijakan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli menetapkan baik berkaitan dengan Pendapatan, Belanja maupun Pembiayaan Daerah secara umum sebagai berikut:

2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

a. Kebijakan Pendapatan Murni

Kebijakan peningkatan pendapatan, Pemerintah Kabupaten Bangli diarahkan pada:

1) Optimalisasi penerimaan PAD melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah dengan lebih menitikberatkan pada (1) potensi daripada jumlah atau jenis pungutan yang banyak; (2) tidak memberatkan masyarakat; (3) tidak merusak lingkungan; (4) Mudah diterapkan dan dilaksanakan (5) Penyesuaian pendapatan baik mengenai tarif maupun materinya serta optimalisasi aset dan kekayaan Pemerintah Kabupaten Bangli. Kebijakan pengelolaan keuangan ini diharapkan dapat memberikan akuntabilitas yang obyektif dan proporsional pada kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan serta meningkatkan akselerasi aktivitas ekonomi dengan memfasilitasi kegiatan ekonomi yang memprioritaskan pada perdagangan dan jasa.
2) Peningkatan koordinasi dan melibatkan berbagai OPD yang berhubungan dengan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan regulasi perundangan/kebijakan yang berlaku serta mengacu pada perencanaan yang telah ditetapkan.

b. Kebijakan Pendapatan Perubahan

Perkembangan dan asumsi pendapatan daerah pada APBD Perubahan Kabupaten Bangli Tahun 2022 setelah dilakukan perhitungan ulang secara cermat terhadap seluruh komponen penerimaan daerah dapat ditingkatkan dari target prediksi pendapatan daerah yang telah ditetapkan.

Kenaikan penerimaan pendapatan daerah dari target sebelum perubahan berasal dari pos PAD dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sedangkan pos Pendapatan Transfer mengalami penurunan. Kenaikan pendapatan pada pos PAD berasal dari Pajak Daerah dan pada pos lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

a. Kebijakan Belanja Daerah Murni

Kebijakan Belanja Daerah murni diarahkan pada empat hal yaitu belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Secara umum belanja operasi adalah:

1) Belanja Pegawai
   a) Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   b) Kompensasi diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/ anggota DPRD, dan Pegawai ASN.
      (1) Belanja Pegawai bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada belanja OPD Sekretariat Daerah;
      (2) Belanja Pegawai bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja OPD Sekretariat DPRD; dan
      (3) Belanja Pegawai ASN dianggarkan pada belanja OPD bersangkutan.
2) Belanja Barang dan Jasa
   Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain.
3) Belanja Bunga
   Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman.
4) Belanja Subsidi
   Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
5) Belanja Hibah
   Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6) Belanja Bantuan Sosial
   Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:

1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
3) batas minimal kapitalisasi aset.

Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:

1) berwujud;
2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Penetapan belanja hibah dan bantuan sosial mengacu pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana terdapat mekanisme yang mengatur tentang penerimaan hibah dan bantuan sosial. Untuk optimalisasi fungsi APBD sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 63Ayat (3) hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah, tepat waktu sesuai tahapan dan jadwal, transparan, partisipatif, memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya, maka kebijakan belanja daerah pada tahun 2022 diarahkan untuk:

1) Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bangli, yang terdiri enam bidang urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan 17 bidang urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, enam bidang urusan pilihan dan lima unsur urusan pemerintahan; dan
2) Belanja daerah disusun sesuai dengan prioritas pembangunan tahun 2022 yang tertuang dalam RKPD 2022 dalam rangka mewujudkan Visi Kabupaten Bangli.

b. Kebijakan Belanja Daerah Perubahan

Kebijakan belanja pada perubahan APBD Kabupaten Bangli Tahun 2022 diarahkan pada:

1) Pergeseran anggaran antar OPD, antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek yang disebabkan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi atau ditambah dalam perubahan APBD apabila asumsi kebijakan umum anggaran tidak dapat tercapai atau melampaui asumsi KUA dan penyesuaian karena adanya Peraturan Pemerintah;
2) Kegiatan lanjutan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-OPD tahun 2022 yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam Tahun Anggaran 2022;
3) Program dan kegiatan baru yang merupakan prioritas yang harus ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD untuk Tahun Anggaran 2022;dan
4) Program dan kegiatan baru yang merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi.

Belanja daerah Pemerintah Kabupaten Bangli terdiri dari:

Kebijakan Belanja Operasi

Perubahan Belanja Operasi pada APBD Perubahan tahun 2022 terjadi pada:

a) Belanja Pegawai;
b) Belanja Barang dan Jasa; dan
c) Belanja Hibah

Kebijakan Belanja Modal

Kebijakan Umum Perubahan APBD TA 2022 pada Modal di Perubahan APBD TA 2022 mengalami kenaikan dari prediksi, karena diprioritaskan pada:

a) Pergeseran, pengurangan atau penambahan rincian obyek belanja dan atau indikator capaian kinerja program dan kegiatan karena ada penyesuaian terhadap regulasi terbaru dan penyesuaian terhadap capaian dalam KUA tahun 2022;
b) Program/kegiatan yang merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Pemerintah pusat atau Pemerintah provinsi;
c) Program/kegiatan lanjutan dari tahun anggaran 2021 yang belum teranggarkan di APBD TA 2021;dan
d) Program/kegiatan baru yang berdampak langsung ke masyarakat dan mendesak untuk dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi, misiserta RPJMD-SB Tahun 2021-2026, dengan memperhatikan sisa waktu pelaksanaan perubahan APBD TA 2022.

Kebijakan Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga pada APBD Perubahan tahun 2022 mengalami perubahan

Kebijakan Belanja Transfer

Perubahan Belanja Transfer pada APBD Perubahan tahun 2022 terjadi pada:

a) Belanja Bagi Hasil; dan
b) Belanja Bantuan Keuangan.

2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan merupakan langkah-langkah yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Bangli dalam rangka mencukupi kebutuhan belanja daerah. Dalam perubahan APBD Kabupaten Bangli TA 2022 terdapat peningkatan pembiayaan yang berasal Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan yang terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya dan penerimaan pinjaman daerah. SiLPA berasal dari selisih lebih antara realisasi penerimaan dan realisasi pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA dan penerimaan pinjaman mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan. Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari penyertaan modal daerah.

a. Kebijakan Pembiayaan Daerah Murni

1) Kebijakan Penerimaan Pembiayaan
   Kebijakan penerimaan pembiayaan tahun 2022 diarahkan pada penerimaan dari SiLPA dan penerimaan pinjaman daerah.
2) Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan
   Kebijakan pengeluaran pembiayaan tahun 2022 adalah yang diarahkan untuk pengeluaran pembiayaan yaitu penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah.

b. Kebijakan Pembiayaan Daerah Perubahan

Kebijakan pembiayaan pada perubahan APBD Kabupaten Bangli TA 2022mengalami peningkatan pada Penerimaan Pembiayaan yaitu pada SiLPA dan penerimaan pinjaman daerah, serta pada Pengeluaran Pembiayaan yaitu penyertaan modal Daerah.

Perubahan SiLPa digunakan untuk menutup defisit belanja daerah sehingga kondisi perubahan APBD TA 2022 adalah anggaran berimbang.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

2.3.1 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Indikator pencapaian target kinerja APBD, sesuai dengan konteks Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, tercermin dari penyerapan anggaran Belanja pada masing-masing urusan pemerintahan.

A. **Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar** dilaksanakan oleh:

1) **Bidang Pendidikan,** dilaksanakan oleh **Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga(Disdikpora)**, melaksanakan program diantaranya program: Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Program Pengelolaan Pendidikan, Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp309.144.194.767.00 terealisasi sebesar Rp295.811.677.270,96 atau 95,69%.
2) **Bidang Kesehatan**, dilaksanakan oleh:
   a. **Dinas Kesehatan**, melaksanakan program diantaranya program: Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp131.791.936.118,00 terealisasi sebesar Rp115.665.265.136,75 atau 87,76%
   b. **Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)**, melaksanakan program diantaranya program: Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyaratkat, dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp233.356.577.500,00 terealisasi sebesar Rp220.405.057.102,97 atau 94,45%.
3) **Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** dilaksanakan oleh **Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PUPR dan Perkim)**, melaksanakan program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Ait Minum, Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional, Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, Pengembangan Pemukiman, Penataan Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Penyelenggaraan Jalan, dan Penyelenggaraan Penataan Ruang, dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp113.269.791.373,00 terealisasi sebesar Rp103.231.636.675,80 atau 91,14%.
4) Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang dilaksanakan oleh **Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PUPR dan Perkim)**, melaksanakan program yaitu Program Pengembangan Perumahan, Kawasan Pemukiman, Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp4.018.631.000,00 terealisasi sebesar Rp3.119.621.000,00 atau 77,63%.

5) **Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat** dilaksanakan oleh :
   a) **Satuan Polisi Pamong Praja**, melaksanakan program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp10.938.585.118,00 terealisasi sebesar Rp10.496.350.111,00 atau 95,96%.
   b) **Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran**, melaksanakan program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Penanggulangan Bencana, Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp7.004.560.800,00 terealisasi sebesar Rp6.779.586.077,00 atau 96,79%.
6) **Bidang Sosial** dilaksanakan oleh **Dinas Sosial**, **Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,** melaksanakan program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Penanganan Bencana, dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp5.561.296.822,00 terealisasi sebesar Rp5.287.545.652,00 atau 95,08%.

B. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar dilaksanakan oleh:

1) **Bidang Tenaga Kerja**, dilaksanakan oleh **Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja,** melaksanakan program yaitu Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Penempatan Tenaga Kerja, dan Hubungan Industrial dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp460.694.000,00 terealisasi sebesar Rp449.048.900,00 atau 97,47%.
2) **Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** dilaksanakan oleh **Dinas Sosial**, **Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** melaksanakan program yaitu Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak (PHA), dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp106.707.200,00 terealisasi sebesar Rp96.770.100,00 atau 90,69%.
3) **Bidang Pangan**, dilaksanakan oleh **Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan**, **dan Perikanan**melaksanakan program yaitu Program Peningkatan Diversivikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Penanganan Kerawanan Pangan dan Pengawasan Keamanan Pangan dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp717.184.000,00 terealisasi sebesar Rp541.046.100,00 atau 75,44%.
4) **Bidang Lingkungan Hidup**, dilaksanakan oleh **Dinas Lingkungan Hidup** melaksanakan program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI), Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup (PPLH), Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Persampahan dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp37.680.856.900,00 terealisasi sebesar Rp36.031.588.145,00 atau 95,62%.
5) **Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**, dilaksanakan oleh **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**, melaksanakan program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dan Pengelolaan Profil Kependudukan,

dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp6.070.925.724,00 terealisasi sebesar Rp5.907.708.605,00 atau 97,31%.

6) **Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa** dilaksanakan oleh **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**,**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** melaksanakan program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Penataan Desa, Administrasi Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp6.257.758.570,00 terealisasi sebesar Rp5.935.049.443,00 atau 94,84%.
7) **Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** dilaksanakan oleh **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**, **Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** melaksanakan program yaitu program Pengendalian Penduduk, Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dan pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS), dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp3.927.709.000,00 terealisasi sebesar Rp2.608.531.559,00 atau 66,41%.
8) **Bidang Perhubungan,** dilaksanakan oleh **Dinas Perhubungan,** melaksanakan program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan Pengelolaan Pelayaran total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp9.001.954.550,00 terealisasi sebesar Rp8.421.536.350,96 atau 93,55%.
9) **Bidang Komunikasi dan Informatika** dilaksanakan oleh **Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian**, melaksanakan program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp7.520.619.873,00 terealisasi sebesar Rp6.988.458.701,00 atau 92,92%.
10) **Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**, dilaksanakan oleh **Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah danTenaga Kerja,** melaksanakan program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi, Pendidikan dan Latihan Perkoperasian, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM), Pengembangan UMKM dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp5.858.846.686,00 terealisasi sebesar Rp5.681.824.229,02 atau 96,98%.
11) **Bidang Penanaman Modal** dilaksanakan oleh **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**, melaksanakan program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Pelayanan Penanaman Modal, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp6.678.780.083,00 terealisasi sebesar Rp6.388.814.159,00 atau 95,66%.
12) **Bidang Kepemudaan dan Olah Raga,** dilaksanakan oleh **Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga**, melaksanakan program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan dan Pengembangan Kapasitas Kepramukaan, dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp19.046.917.500,00 terealisasi sebesar Rp18.517.607.428,27 atau 97,22%.
13) **Bidang Statistik** dilaksanakan oleh **Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian**, melaksanakan program yaitu Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan total anggaran

belanja setelah perubahan sebesar Rp42.348.500,00 terealisasi sebesar Rp39.509.200,00 atau 93,30%.

14) **Bidang Persandian** dilaksanakan oleh **Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian**, melaksanakan program yaitu Program Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan Informasi dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp148.000.000,00 terealisasi sebesar Rp101.930.004,00 atau 68,87%
15) **Bidang Kebudayaan**, dilaksanakan oleh **Dinas Periwisata dan Kebudayaan**, melaksanakan program yaitu Program Pengembangan Kebudayaan, Pengembangan Kesenian Tradisional, Pembinaan Sejarah, dan pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp3.864.565.000,00 terealisasi sebesar Rp3.598.277.000,00 atau 93,11%.
16) **Bidang Perpustakaan** dilaksanakan oleh **Sekretariat Daerah**, melaksanakan program yaitu Program Pembinaan Perpustakaan dan Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno, dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp136.744.700,00 terealisasi sebesar Rp135.199.275,00 atau 98,87%.
17) **Bidang Kearsipan** dilaksanakan oleh **Sekretariat Daerah**,melaksanakan program yaitu Program Pengelolaan Arsip dan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip, dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp5.872.900,00 terealisasi sebesar Rp5.722.600,00 atau 97,44%.

C. Urusan Pilihan dilaksanakan oleh:

1) **Bidang Kelautan dan Perikanan**, dilaksanakan oleh **Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan**, **dan Perikanan**melaksanakan program yaitu Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp2.202.511.000,00 terealisasi sebesar Rp2.048.103.314,00 atau 92,99%.
2) **Bidang Pariwisata**, dilaksanakan oleh **Dinas Pariwisata dan Kebudayaan**, melaksanakan program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp27.419.991.283,00 terealisasi sebesar Rp18.704.785.513,89 atau 68,22%.
3) **Bidang Pertanian**, dilaksanakan oleh **Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan**, **dan Perikanan**melaksanakan program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, dan Penyuluhan Pertanian total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp25.999.785.527,00 terealisasi sebesar Rp25.360.664.866 atau 97,54%.
4) **Bidang Perdagangan** dilaksanakan oleh **Dinas Perindustrian dan Perdagangan**, melaksanakan program yaitu Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, dan Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp2.076.993.786,00 terealisasi sebesar Rp1.851.028.975,00 atau 89,12%.
5) **Bidang Perindustrian** dilaksanakan oleh **Dinas Perindustrian dan Perdagangan**, melaksanakan program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp5.386.641.280,00 terealisasi sebesar Rp4.995.103.209,00 atau 92,73%.

6) **Bidang Trasmigrasi** dilaksanakan oleh **Sekretariat Daerah,** melaksanakan program yaitu Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi, dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp50.000.000,00 terealisasi sebesar Rp49.975.000,00 atau 99,95%.

D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan terdiri dari:

1) **Bidang Sekretariat Daerah**dilaksanakan oleh:
   a. **Sekretariat Daerah** yang melaksanakan program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan Program Perekonomian dan Pembangunan, dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp70.586.699.040,00 dan terealisasi sebesar Rp66.124.383.441,00 atau 93,68%.
   b. **Sekretariat Daerah**, melaksanakan program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp53.484.364.450,00 dan terealisasi sebesar Rp51.641.158.952,00 atau 96,55%.

E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan terdiri dari:

1) **Bidang Perencanaan**yang dilaksanakan oleh**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan**, melaksanakan program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Darah dan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp5.323.749.300,00 terealisasi sebesar Rp5.207.508.998,00 atau 97,82%.
2) **Bidang Keuangan**, dilaksanakan oleh **Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah**, melaksanakan program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp161.314.024.047,00 terealisasi sebesar Rp157.623.258.886,00 atau 97,71%.
3) **Bidang Kepegawaian** dilaksanakan oleh **Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**, melaksanakan program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Program Kepegawaian Daerah, dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp9.037.267.940,00 terealisasi sebesar Rp8.838.375.805,00 atau 97,80%.
4) **Bidang Pendidikan dan Pelatihan** dilaksanakan oleh **Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**, melaksanakan program yaitu Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp1.190.492.500,00 terealisasi sebesar Rp971.235.500,00 atau 81,58%.

F. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh **Inspektorat,** melaksanakan program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp7.693.854.665,00 terealisasi sebesar Rp7.498.103.365,00 atau 97,46%.

G. Unsur Kewilayahan Urusan Pemerintahan dilaksanakan oleh **Kecamatan**, melaksanakan program/kegiatan di 4 (empat) Kecamatan yaitu:

1) **Kecamatan Bangli** melaksanakan Program diantaranya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum,

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp10.670.015.320,00 terealisasi sebesar Rp10.251.399.933,00 atau 96,08%.

2) **Kecamatan Kintamani** melaksanakan Program diantaranya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp3.951.823.600,00 terealisasi sebesar Rp3.910.936.427,00 atau 98,97%.
3) **Kecamatan Susut** melaksanakan Program diantaranya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp3.069.790.720,00 terealisasi sebesar Rp3.005.458.615,00 atau 97,90%.
4) **Kecamatan Tembuku** melaksanakan Program diantaranya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp4.026.068.400,00 terealisasi sebesar Rp3.910.220.490,00 atau 97,12%.

H. Unsur Pemerintahan Umum Urusan Pemerintahan terdiri dari**Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik** dilaksanakan oleh **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**, melaksanakan Program diantaranya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Peningkatan Peran Partai politik dan Lembaga Pendidikan Melaluai Pendidikan Politik dan pengembangan Etika Serta Budaya Politik, Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik, dengan total anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp5.161.450.038,00 terealisasi sebesar Rp5.024.313.937,00 atau 97,34%.

2.3.2 *Mandatory Spending* dalam Postur APBD

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh Undang-Undang. Tujuan *mandatory spending* ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli meliputi belanja wajib untuk pendidikan, kesehatan, pengawasan dan perlindungan sosial.

A. *Mandatory Spending* Fungsi Kesehatan

Bidang kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah, dengan alokasi anggaran pada Dinas Kesehatan Rp131.791.936.118,00 dan pada Rumah Sakit Umum Daerah Rp233.356.577.500,00. Total alokasi anggaran bidang kesehatan adalah Rp365.148.513.618,00 atau 36,35% dari postur APBD Kabupaten Bangli. Realisasi bidang kesehatan pada Dinas Kesehatan adalah 87,76% dan pada Rumah Sakit Daerah yaitu 90,79%.

1. Dinas Kesehatan

   Hambatan

   Hambatan yang terjadi saat pelaksanaan program bidnag kesehatan pada Dinas Kesehatan yaitu pada tahun 2022, 12 puskesmas di Kabupaten Bangli ditetapkan menjadi BLUD sehingga puskesmas sedang mempelajari mekanisme dan manajemen PPK-BLUD. Sumber daya manusia yang tersedia di Puskesmas merangkap pekerjaan sebagai tenaga admnistrasi dan tenaga fungsional, beberapa puskesmas minim SDM dan belum sepenuhnya memahami prinsip pengelolaan keuangan.

   Capaian Kinerja

   Pada Dinas Kesehatan delapan indikator sasaran kinerja sudah mencapai target, diantaranya cakupan angka harapan hidup, angka kematian ibu, angka kematian bayi, angka kematian balita, cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin,cakupan pelayanan kesehatan masyarakat miskin , dan peningkatan mutu sumber daya kesehatan serta persediaan obat dan perbekalan kesehatan. Berdasarkanindikator SPM, Dinas Kesehatan sudah mencapai target yaitu jumlah Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta sudah mencapai target 100%, jumlah ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar difasilitas kesehatan sudah mencapai target 100%, jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar sudah mencapai target 100%, jumlah balita 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun sudah mencapai target 100%, jumah anak usia pendidikan dasar kelas satu dan tujuh yang mendapat pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar sudah mencapai target 100%, jumlah pengunjung usia 15-59 tahun mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai dalam kurun waktu satu tahun sudah mencapai target 100%, jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun sudah mencapai target 100%, jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun sudah mencapai 100%, jumlah ODGJ berat (*psikotik*) di wilayah kerjakabupaten/kota yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa *promotif, preventif* standar dalam kurun waktu satu tahun.

2. Rumah Sakit Umum Daerah

   Belanja bidang kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari 5 (lima) sub kegiatan:

   1) Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya pada Prangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dengan capaian 2 (dua) unit gedung pada RSU Bangli;
   2) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Prangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dengan capaian pengembangan SIM RS sebagai penunjang digitalisasi pelayanan kesehatan dengan menambahkan sebanyak 32 (tiga puluh dua) printer dan 62 (enam puluh dua) unit PC;
   3) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Prangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dengan capaian tersedianya alkes dari sumber dana DAK Fisik bidang kesehatan untuk :
      a) IGD;
      b) ICU;
      c) Ruang operasi;
      d) PICU;
      e) Laboratorium;dan

f) CSSD;

4) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pada Prangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah; dan
5) Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Prangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah. Capaiannya yaitu peningkatan jumlah pasien, peningkatan nilai BOR (B*ed Okupansi Rate*) serta penambahan layanan sub spesialis: Bedah onkologi, Bedah digestif, Bedah mulut, dental ortodenatis, gizi klinik urologi.

Rumah Sakit Umum Bangli memiliki rencana strategis teknologi informasi pelayanan publik yang dapat mempercepat dalam mencapai visi misi RSU Bangli serta memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat menuju *SMART HOSPITAL*. Salah satu rencana strategis pelayanan publiknya yang dilakukan adalah pengadaan SIMRS yang sesuai standardan memenuhi perkembangan / dinamika yang berkembang di masyarakat, maupun perkembangan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi serta kondisi lingkungan baik internal maupun eksternal. Pengadaan SIMRS yang lebih ideal, memungkinkan RSU Bangli dapat melakukan penyesuaian terhadap sumber dayayang dimiliki dalam melaksanakan upaya pelayanan kesehatan, yaitu dengan cara memprioritaskan dan mendorong terjadinya lintas fungsi perencanaan dan komunikasi, serta membangun kerjasama yang kondusif serta menuju *SMART HOSPITAL*

Di Era digital ini, dituntut serba efisien dengan penggunaan teknologi informasi. Dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit diperlukan adanya catatan medis pasien yang bisa ditemukan dengan cepat. Berkas atau catatan medik pasien yang berisikan data pasien dapat dengan mudah diambil kembali berkas atau catatan medis pasien yang dimaksud dalam praktek kedokteran dikenal dengan nama REKAM MEDIS (Medical Record). Pengembangan SIMRS di fasilitas pelayanan kesehatan bukan saja untuk kepentingan catatan medis pasien, namun dapat dikembangkan untuk aplikasi lainnya. Adapun pengembangan SIMRS di Rumah Sakit Bangli dikembangkan untuk berbagai hal diantaranya yaitu ERM Rawat Jalan, SIMRS aplikasi Keuangan, SIMRS Mobile Aplication, SIMRS Aplikasi Kepegawaian, SIMRS Aplikasi Keuangan.

B. *Mandatory Spending* Fungsi Pendidikan

Bidang pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga memperoleh anggaran Rp328.191.112.627,00 atau sebesar 24,38% dari postur APBD Kabupaten Bangli, dengan realisasi 95,78%. Sasaran belanja bidang pendidikan ini adalah meningkatnya pelayanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan kesetaraan yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas. *Outcome* yang diharapkan dengan terlaksananya kegiatan bidang pendidikan ini adalah meningkatnya persentase kualitas pengelolaan pendidikan. Namun dalam pelaksanaannya mengalami beberapa kendala yaitu:

1. Pada Program Pendidikan Anak Usia Dini terjadi kendala pelaporan ke pusat karena susahnya mengakses *link* terutama untuk satuan Pendidikan yang berada di balik bukit
2. Pada Program Pengelolaan Pendidikan Dasar dan Menengah terdapat kegiatan untuk menunjang kreatifitas siswa yang tidak bisa direalisasikan karena terkendala pandemi *Covid-19* sehingga pelaksanaannya secara daring.

C. *Mandatory Spending* Fungsi Infrastruktur

Berdasarkan Peraturan Menteri KeuanganNomor 207/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penundaan Penyaluran Dana Transfer Umum atas Pemenuhan Kewajiban Pemerintah Daerah untuk Mengalokasikan Belanja Wajib yang Bersumber dari DTU sebagaimana ditetapkan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) atau persentase yang ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai APBN tahun

anggaran berkenaan. Belanja Wajib yang Bersumber dari DTU sebagaimana dimaksud berupa belanja yang langsung untuk mendukug program pemulihan ekonomi daerah yang terkait dengan pembangunan infrastruktur untuk percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurang kesenjangan penyediaan layanan publik antar Daerah termasuk pembangunan sumber daya manusia dukungan pendidikan.

Perhitungan anggaran pada APBD Induk Kabupaten Bangli pada fungsi infastruktur dialokasikan sebesar Rp315.827.249.349,00 dari total belanja daerah Rp1.256.239.014.380,00 atau sebesar 28,20%. Pada APBD perubahan Pengembangan Kompetensi dialokasikan sebesar Rp327.932.122.427,00 dari total belanja daerah Rp1.321.729.701.480,00 atau sebesar 27,78%.

Tabel 2.11 Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Infrastruktur Dalam APBD dan APBD Perubahan TA 2022 Kabupaten Bangli

(dalam rupiah)

No	Komponen Perhitungan	APBD Induk	APBD Perubahan	Realisasi	%
1	Total Belanja Daerah	**1.256.239.014.380,00**	**1.321.729.701.480,00**	**1.239.853.052.692,60**	**93,81**
2	Belanja Bagi Hasil Dan/Atau Transfer Ke Pada Daerah dan/atau Desa				
	a. Belanja Bagi Hasil	3.937.127.000,00	6.711.232.500,00	6.717.100.000,00	100,09
	b. Bantuan Keuangan	132.295.189.000,00	134.464.716.580,00	134.394.957.268,00	99,95
	Jumlah (a = b)	**136.232.316.000,00**	**141.175.949.080,00**	**141.112.057.268,00**	**99,95**
3	Selisih (1-2)	1.120.006.698.380,00	1.180.553.752.400,00	1.098.740.995.424,60	93,07
4	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x selisih)	448.002.679.352,00	472.221.500.960,00	439.496.398.169,84	93,07
5	a. Belanja Modal	302.272.800.111,00	312.183.425.489,00	293.929.282.841,81	94,15
	1) Tanah	14.550.798.400,00	14.393.673.100,00	14.134.423.669,00	98,20
	2) Peralatan dan Mesin	61.339.842.311,00	66.300.747.644,00	60.358.662.837,00	91,04
	3) Bangunan dan Gedung	180.270.476.250,00	185.928.218.376,00	180.104.496.229,81	96,87
	4) Jalan, Jaringan dan Irigasi	44.278.369.350,00	43.784.557.733,00	37.746.357.806,00	86,21
	5) Aset tetap Lainnya	1.833.313.800,00	1.776.228.636,00	1.585.342.300,00	89,25
	6) Aset Lainnya				
	b. Belanja Pemeliharaan	5.099.466.000,00	5.939.512.700,00	4.655.361.716,89	78,38
6	1) Belanja Hibah	8.193.787.238,00	9.547.987.238,00	9.234.589.134,27	96,72
	2) Belanja Bantuan Sosial	261.196.000,00	261.196.000,00	253.030.998,00	96,87
7	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (5 + 6)	315.827.249.349,00	327.932.121.427,00	308.072.264.690,97	93,94
Persentase Belanja Infrastruktur Daerah		**28,20%**	**27,78%**		

D. *Mandatory Spending* Fungsi Aparatur

Berdasarkan Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2022 menyaratkan Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN

dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggaraan Pemerintah Daerah dimaksud, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah bagi pemerintah kabupaten/kota, yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional menangani pengembangan sumber daya manusia, yaitu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) atau Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi/Kabupaten/Kota atau sebutan lain.
Perhitungan anggaran pada APBD Induk Kabupaten Bangli pada Pengembangan Kompetensi dialokasikan sebesar Rp562.238.150,00 dari total belanja daerah Rp1.256.239.014.380,00 atau sebesar 0,04%. Pada APBD perubahan Pengembangan Kompetensi dialokasikan sebesar Rp1.363.368.150,00 dari total belanja daerah Rp1.321.729.701.480,00 atau sebesar 0,10%.

Tabel 2.12 Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pengembangan Kompetensi Dalam APBD dan APBD Perubahan TA 2022 Kabupaten Bangli

(dalam rupiah)

No	Komponen Perhitungan	APBD Induk	APBD Perubahan	Realisasi	%
1	Total Belanja Daerah	1.256.239.014.380,00	1.321.729.701.480,00	1.239.852.404.692,60	93,81
2	Program Kepegawaian Daerah				
	Pengembangan Kompetensi ASN	167.775.650,000	172.875.650,000	128.441.000,000	74,30
3	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia				
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	394.462.500,000	1.190.492.500,000	971.235.500,000	81,58
4	Jumlah Belanja Pengembangan Kompetensi (2+3)	**562.238.150,000**	**1.363.368.150,000**	**1.099.676.500,000**	**80,66**
Persentase Belanja Infrastruktur Daerah		**0,04%**	**0,10%**	**0,09%**	

E. *Mandatory Spending* Fungsi Pengawasan

Belanja wajib untuk pengawasan pada tahun anggaran 2022 sesuai Permendagri 27 Tahun 2021 belum dapat terpenuhi karena kemampuan keuangan daerah, dan baru dianggarkan untuk pengawasan tahun anggaran 2022 sebesar Rp7.693.854.665,00 (tujuh milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh empat ribu enam ratus enam puluh lima rupiah), atau sebesar 0,58 % (nol koma lima puluh delapan persen) dari jumlah APBD tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.321.729.701.480,00 (satu triliun tiga ratus dua puluh satu milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus satu ribu empat ratus delapan puluh rupiah)

Belanja wajib untuk pengawasan pada Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp7.693.854.665,00 (tujuh milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh empat ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) digunakan untuk belanja:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp7.040.699.665,00 (tujuh milyar empat puluh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) Dengan melaksanakan kegiatan untuk Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Gaji dan Tunjangan serta Pendidikan dan Pelatihan), Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah, Penyediaan Jasa dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah.
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan sebesar Rp261.200.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta dua ratus ribu rupiah)

Dengan melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal, dan melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.

3. Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi sebesar: Rp391.955.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah)
   Dengan melaksanakan untuk pemenuhan kegiatan Pendampingan dan Asistensi, Penilaian Reformasi Birokrasi, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta Pendampingan Penegakan Integritas.Dalam melaksanakan kegiatan pengawasan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bangli Nomor 700/743/2021 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat daerah Kabupaten Bangli Tahun 2022 dan Keputusan Bupati Bangli Nomor : 700/811/2022 Tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Pada Inspektorat Daerah Tahun 2022. Pada PKPT Tahun Anggaran 2022, telah memasukkan Mandatory Pengawasan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022.

Dari angggaran yang tersedia, dalam melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan untuk Tahun Anggaran 2022, dapat disampaikan capaian Kinerja Pengawasan Tahun 2022 sebagai berikut:

Capaian hasil melaksanakan pengawasan:

1. Melaksanakan audit ketaatan, dengan menghasilkan: 12 LHA
2. Melaksanakan audit kinerja, dengan menghasilkan: 1 LHA
3. Melaksanakan audit investigasi, dengan menghasilkan: 2 LHA
4. Melaksanakan audit tujuan tertentu, dengan menghasilkan: 8 LHA
5. Melaksanakan reviu, dengan menghasilkan: 71 LHR
6. Melaksanakan evaluasi dana desa, LKJiP, Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas, dengan menghasilkan: 42 LHE
7. Melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan, dengan menghasilkan: 37 LHE
8. Melaksanakan fungsi konsultasi sebanyak: 16 kali

Capaian kinerja atas penilain dari lembaga external antara lain:

1. Levelisasi kapabilitas APIP mencapai predikat: level III
2. Nilai MCP KPK mencapai: 95,77 %
3. Nilai Indeks SPI KPK mencapai: 80,20 %

Dalam proses pelaksanaan kebijakan pengawasan terdapat beberapa kendala yang dihadapi antara lain :

1. Karena keterbatasan kemampuan anggaran daerah, maka Mandatory Spending belanja wajib untuk pengawasan belum dapat dipenuhi minimal 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari jumlah APBD tahun 2022;
2. Masih kecilnya anggaran belanja untuk pendidikan dan pelatihan bagi APIP, sehingga peluang untuk mengikuti peningkatan kapasitas bagi Auditor dan PPUPD masih rendah; dan
3. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam melakukan kegiatan pengawasan. Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah jabatan fungsional Auditor dan jabatan Fungsional PPUPD, sesuai rekomendasi dari BPKP dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

F. *Mandatory Spending* Fungsi Penanganan Dampak Inflasi

Belanja wajib perlindungan sosial dampak kenaikan inflasi pada Kabupaten Bangli dialokasikan sebesar Rp2.757.396.925,00 atau 0,21% dari postur APBD, dengan realisasi sebesar 85,06%. Belanja perlindungan sosial dilaksanakan oleh beberapa OPD yaitu

1. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja

- Bantuan sosial UMKM Terealisasi 100%, senilai Rp46.080.00,00. Penciptaan lapangan kerja baru di 4 (empat) kecamatan dengan jumlah 144 orang, dengan memberikan masing-masing orang alat membuat kue berupa *mixer*, loyang dan timbangan.
- Penciptaan Lapangan Kerja
  Penciptaan lapangan kerja baru di empat kecamatan dengan jumlah 288 orang. Di dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan tersebut akan dilaksanakan di dua tempat yaitu di gedung BLK Kayuambua Kecamatan Susut dan Kantor Camat Kintamani namun setelah berjalan terjadi perubahan dengan kendala ruang kantor Camat Kintamani tidak mencukupi sehingga acara tersebut difokuskan di BLK Kayuambua.

2. Dinas Perhubungan
   - Bantuan Sosial Angkutan Umum
     Anggaran bantuan sosial untuk angkutan umum orang dalam trayek selama 90 hari dari bulan (Oktober sampai dengan Desember 2022) dengan total Rp150.120.000,00 dan terealisasi sebesar Rp140.388.000,00 sesuai dengan armada yang beroperasi.
   - Bantuan Sosial Penyebrangan Danau
     Bantuan Sosial untuk penyeberangan Danau Batur diberikan untuk 21 unit dengan keberangkatan tujuh unit/hari. Besaran bantuan sosial sebesar Rp100.000,00 untuk 1 (satu) unitnya. Besaran anggaran yang dibutuhkan selama 3 (tiga) bulan dari bulan Oktober sampai dengan Desember 2022 sebesar Rp63.000.000,00 terelisasi sebesar Rp32.270.000,00 sesuai dengan armada yang beroperasi.
   - Bantuan Sosial Ojek
     Bantuan sosial akan diberikan kepada ojek dalam selama 3 (tiga) bulan dari bulan Oktober sampai dengan Desember 2022. Jumlah ojek yang ada di Kabupaten Bangli sebanyak 78 kendaraan roda dua. Besaran BLT yang diterima masing-masing ojek sebesar Rp150.000,00 per bulan. Total anggaran untuk ojek selama tiga bulan (Oktober sampai dengan Desember 2022) Rp35.100.000,00 terelisasi sebesar Rp28.800.000,00 sesuai dengan armada yang beroperasi.
3. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
   Bantuan Sosial Disabilitas dan Pemberian Sembako.
   Anggaran dialokasikan sebesar Rp1.665.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.546.950.000,00 untuk masyarakat penerima sejumlah 3.387 orang. Masing-masing orang mendapatkan bantuan BLT sebesar Rp450.000,00 bagi KK miskin dan Rp600.000,00 bagi disabilitas. Tidak dapat direalisasikan sebesar Rp118.050.000,00 karena ada beberapa Desa yang tidak menyetorkan berkas fotocopy KK dan KTP sebagai persyaratan pembukaan rekening.
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
   Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp164.362.925,00 dengan realisasi sebesar Rp94.788.500,00 sehingga tersisa anggaran sebesar Rp69.574.425,00
5. Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan
   Biaya transportasi pemasaran produk pertanian. Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp324.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp152.066.000,00 dengan sasaran 10.940 liter sehingga tersisa anggaran sebesar Rp171.934.000,00 hal ini disebabkan kelompok tani/pedagang yang pelaksanaannya berupa pasar tani kehadirannya kurang lebih sepuluh orang petani/produsen.

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pencapaian kinerja keuangan tergambar pada pencapaian/realisasi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan. Berikut disajikan gambaran realisasi APBD TA 2022 dan perbandingan dengan realisasi TA 2021.

Pada bagian pendapatan, realisasi kurang dari target sebesar Rp37.764.571.519,50 dari target yang ditetapkan yaitu anggaran setelah perubahan sebesar Rp1.143.205.070.988,00 terealisasi sebesar Rp1.105.440.499.468,50 atau 96,70%. Sementara itu dari sisi belanja, terdapat efisiensi pengeluaran sebesar Rp81.876.648.787,40 yaitu dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp1.321.729.701.480,00 terealisasi sebesar Rp1.239.853.052.692,60 atau 93,81%.

Pembiayaan netto terealisasi sebesar 98,19% yaitu dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp178.524.630.492,00 terealisasi sebesar Rp175.295.260.106,06.

Realisasi pendapatan dan efisiensi belanja serta pembiayaan menghasilkan SiLPA TA 2022 sebesar Rp40.882.706.881,96. Saldo SiLPA ini akan memberikan fleksibilitas pengelolaan APBD untuk tahun mendatang.

Capaian bagian pendapatan sebesar 96,70% terinci untuk masing-masing komponen pendapatan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp147.126.416.529,00 terealisasi sebesar Rp144.005.842.858,50 atau 97,88%.

b. Pendapatan Transfer, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp995.207.663.459,00 terealisasi sebesar Rp960.732.038.900,00 atau 96,54%.

c. Lain- Lain Pendapatan yang Sah target anggaran setelah perubahan sebesar Rp870.991.000,00 dan terealisasi sebesar Rp702.617.710,00 atau 80,67%.

Capaian bagian belanja sebesar 93,81% terinci untuk masing-masing komponen belanja sebagai berikut:

a. Belanja Operasi, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp864.171.523.836,00 terealisasi sebesar Rp802.381.255.582,79 atau 92,85%.

b. Belanja Modal, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp312.893.319.489,00 terealisasi sebesar Rp293.929.282.841,81 atau 93,94%.

c. Belanja Tak Terduga, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp3.488.909.075,00 terealisasi sebesar Rp2.430.457.000,00 atau 69,66%.

d. Belanja Transfer, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp141.175.949.080,00 terealisasi sebesar Rp141.112.057.268,00 atau 99,95%.

Capaian bagian pembiayaan netto sebesar 98,19% terinci untuk penerimaan pembiayaan yaitu jumlah penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pinjaman dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp184.524.630.492,00 terealisasi sebesar Rp181.295.260.106,06 atau 98,25%.

Dibandingkan dengan realisasi APBD TA 2021, realisasi Pendapatan TA 2022 mengalami penurunan 3,90%, yaitu dari Rp1.150.283.515.663,56 pada tahun 2021 menjadi Rp1.105.440.499.468,50 pada tahun 2022. Dari sisi belanja, terjadi kenaikan realisasi sebesar 11,82%, yaitu Rp1.108.810.931.922,90 pada tahun 2021 menjadi Rp1.239.853.052.692,60 pada tahun 2022. Dari sisi pembiayaan, terjadi peningkatan realisasi pembiayaan neto sebesar 135,42%, yaitu Rp75.735.976.450,85 pada tahun 2021 menjadi Rp178.295.260.106,06 pada tahun 2022. Sedangkan dari sisi SiLPA terjadi penurunan sebesar 65,12%, yaitu Rp117.208.560.191,51 di tahun 2021 menjadi Rp40.882.706.881,96 di tahun 2022.

3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Realisasi belanja Tahun Anggaran 2022 mengalami efisiensi dan pendapatan tidak memenuhi target yang telah ditetapkan, hal ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan belum mampu terpenuhi sehingga perlu optimalisasi pemungutan sehingga realisasi terpenuhi. Secara umum, karena pendapatan daerah lebih dominan diperoleh dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi oleh Pemerintah Kabupaten Bangli. Hal tersebut disebabkan besarnya penerimaan pendapatan tersebut tergantung/disesuaikan dengan penerimaan yang diperoleh Pemerintah Pusat Pemerintah Pusat atau pemerintah provinsi Pemerintah Provinsi.

Hambatan dan kendala dalam mencapai target pendapatan adalah adanya kekurang patuhan masyarakat untuk melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak serta kurang optimalnya pemanfaatan potensi sumber pendapatan yang ada di Kabupaten Bangli

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi adalah merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Dalam tahun 2022, entitas pelaporan masih tersentralisasi pada Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bangli. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Laporan Keuangan disusun berdasarkan data keuangan yang disiapkan oleh entitas akuntansi, yakni para pengguna anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli. Dalam Tahun Anggaran 2022, entitas akuntansi tersebut terdiri dari: 2 (dua) sekretariat,14 (empat belas) dinas, 5 (lima) badan, 3 (tiga) perangkat daerah lainnya, dan 4 (empat) kecamatan. Untuk lebih jelasnya, uraian diatas dapat digambarkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.1. Daftar OPD

No	OPD	Alamat / Nomor Telepon
1	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Jl. Brigjen Ngurah Rai No 80 Bangli Telp. (0366) 91124
2	Dinas Kesehatan	Jl. Brigjen Ngurah Rai No 29 Bangli Telp. (0366) 91043
3	Rumah Sakit Umum Daerah	Jl. Brigjen Ngurah Rai No Bangli Telp. (0366) 91521
4	Dinas PUPR dan Perkim	Jl. Lettu Sobat Nomor 7 Bangli Telp. (0366) 91049
5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jl. Brigjen Ngurah Rai No 85 Bangli Telp. (0366) 91045
6	Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan tenaga Kerja	Jl. Brigjen Ngurah Rai No 78 Bangli Telp. (0366) 91033
7	Dinas Lingkungan Hidup	Jl. Sriwijaya No 23 Bangli Telp. (0366) 91023
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jl. Merdeka No 89 Bangli Telp. (0366) 91620
9	Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	Jl. Brigjen Ngurah Rai No 76 Bangli Telp. (0366) 91123
10	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Jl. Lettu Lila No. 9 Bangli Telp. (0366) 91537
11	Dinas Perhubungan	JL. Merdeka No 71 Bangli Telp. (0366) 91406
12	Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan	JL. Merdeka No 81 Bangli Telp. (0366) 91021
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jl. Brigjen Ngurah Rai No 24 Bangli Telp. (0366) 91267
14	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	JL. Merdeka No 71 Bangli Telp. (0366) 91406
15	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Jl. Brigjen Ngurah Rai No 25 Bangli Telp. (0366) 91547
16	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Jl. Brigjen Ngurah Rai No 30 Bangli Telp. (0366) 91032, 91011
17	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jl. Brigjen Ngurah Rai No 30 Bangli Telp. (0366) 91293

No	OPD	Alamat / Nomor Telepon
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Jl. Brigjen Ngurah Rai No 28 Bangli Telp. (0366) 91448
19	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jl. Brigjen Ngurah Rai No 22 Bangli Telp. (0366) 93048
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Jl. Lettu Kanten Bangli Telp. (0366) 91044
21	Inspektorat	JL. Merdeka No 41 Bangli Telp. (0366) 93600
22	Sekretariat Daerah	Jl. Brigjen Ngurah Rai No 30 Bangli Telp. (0366) 91032, 91010
23	Sekretariat DPRD	Jl. Brigjen Ngurah Rai No 32 Bangli Telp. (0366) 91003, 91367
24	Satuan Polisi Pamong Praja	Jl. Lettu Sobat Nomor 3 Bangli Telp. (0366) 92124
25	Kecamatan Bangli	Jl. Brigjen Ngurah Rai No 33 Bangli Telp. (0366) 91018
26	Kecamatan Kintamani	Jl. Raya Kintamani telp. (0366) 51338
27	Kecamatan Susut	Jl. Kusumayuda Susu Telp (0366) 91006
28	Kecamatan Tembuku	Jl. Raya Besakih Tembuku Telp. (0366) 91007

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam menyusun laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli mengacu pada delapan prinsip, kedelapan prinsip tersebut yaitu:

a. Basis Akuntansi;
b. Prinsip Nilai Historis;
c. Prinsip Realisasi;
d. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Normal;
e. Prinsip Periodisasi;
f. Prinsip Konsistensi;
g. Prinsip Pengungkapan Lengkap; dan
h. Prinsip Penyajian Wajar.

Dari delapan prinsip tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli adalah Basis Akrual untuk pengakuan pada Laporan Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas. Basis Akrual adalah pendapatan, beban dan kewajiban diakui pada saat terjadinya transaksi atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah bukan pada saat kas diterima /dibayar oleh kas daerah.

Basis akrual tercermin pada Pendapatan -LO dan Beban dalam Laporan Operasional, pengakuan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas dana dalam neraca. Basis akrual mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun LRA berdasarkan basis kas. Artinya bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan;

demikian pula belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Periode akuntansi yang digunakan adalah jangka waktu satu tahun anggaran dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021. Periode berkenaan adalah periode akuntansi selama tahun anggaran yang sedang berlangsung.

b. Prinsip Nilai Historis (*historical cost*)

Pemerintah Kabupaten Bangli menerapkan nilai historis karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

Aset Pemerintah Kabupaten Bangli dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

c. Prinsip Realisasi (*realization*)

Anggaran pemerintah selama suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat Pemerintah Kabupaten Bangli masih diwajibkan menyusun LRA, maka pendapatan atau belanja kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah kas atau mengurangi.

d. **Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*substance over form*)**

Penyajian laporan diupayakan dengan wajar yaitu dimana transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

e. **Prinsip Periodisasi (*periodicity*)**

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli dibagi menjadi periode-periode pelaporan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan, triwulanan, dan semesteran. Bulanan untuk laporan pendapatan, triwulan untuk Laporan LRA dan penjabarannya, semester untuk LRA, LO, Neraca, Arus Kas (PPKD), tahunan untuk LRA, LO, Neraca, LPE, LP SAL dan LAK (PPKD) serta CaLK.

f. Prinsip Konsistensi (*consistency*)

Konsistensi adalah perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain, selama dapat memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pemerintah Kabupaten Bangli pada tahun 2016 telah menggunakan akuntansi Basis Akrual.

g. Prinsip Pengungkapan Lengkap (*full disclosure)*

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

h. Prinsip Penyajian Wajar (*fair presentation*)

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli.Pengukuran pada masing-masing pos laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli sebagai berikut:

4.3.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Bangli, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah, sedangkan **Pendapatan-LO** adalah hak Pemerintah Kabupaten Bangli yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan meskipun belum diterima aliran kasnya.

Pendapatan LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada akun SILPA pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Pendapatan-LO diakui pada saat:

a. Timbulnya hak atas pendapatan
b. Pendapatan direalisasikan yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih, misalnya:

a. Timbulnya hak untuk menagih Pendapatan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Retribusi Parkir.
b. Timbulnya hak untuk menagih Pendapatan Pajak Reklame, Retribusi, IMB, dan HO langsung ditetapkan didepan.

Pendapatan-LO yang diperoleh dari Pajak Reklame sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih jika kemungkinan besar kas akan diterima oleh pemerintah, dapat diukur secara andal, dan kemungkinan besar potensi ekonomi akan mengalir masuk ke rekening kas umum daerah. Pendapatan-LO diakui pada saat direalisasi artinya pendapatan diakui apabila kas telah diterima oleh Kabupaten Bangli di Rekening Kas Umum Daerah. Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep keterukuran dan ketersediaan digunakan dalam pengertian derajat kepastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos pendapatan tersebut akan mengalir ke Pemerintah Kabupaten Bangli dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan atau segera dapat digunakan untuk membayar kewajiban pada periode anggaran yang bersangkutan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional Pemerintah Kabupaten Bangli. Pengkajian atas keterukuran dan ketersediaan yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bangli.

Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

Pendapatan LRA dan Pendapatan LO diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan diterima. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing akan dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

4.3.2 Kebijakan Akuntansi Belanja dan Beban

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah, sedangkan **Beban** adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dana, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Belanja diakui pada saat:

a. timbulnya kewajiban; dan
b. terjadinya pengeluaran kas.

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan kewajiban dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah pemerintah Kabupaten Bangli. Contohnya tagihan rekening air yang belum dibayar pemerintah.

Yang dimaksud dengan terjadinya pengeluaran kas adalah saat terjadinya pengeluaran uang dari bendahara pengeluaran OPD atau bendahara umum daerah pemerintah Kabupaten Bangli untuk pembayaran gaji pegawai dan membiayai pelaksanaan suatu kegiatan. Contoh pada saat pemerintah membayar gaji pegawai dan pemeliharaan gedung kantor.

Belanja diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan, pengukuran belanja non modal menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan.

Pengukuran belanja modal menggunakan dasar yang digunakan dalam pengukuran aset tetap. Belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan belanja.

Beban diakui pada saat:

a. Timbulnya kewajiban;
b. Terjadinya konsumsi asset; dan
c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa.

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Rekening Kas Umum Daerah.

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan asset bersangkutan/berlalunya waktu. Contoh adalah penyusutan atau amortisasi.

Dalam hal Badan Layanan Umum, Beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.

Beban diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan dan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan. Beban yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan beban.

4.3.3 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah Kabupaten Bangli, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Bangli terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan Pembiayaan adalah Semua penerimaan rekening Kas Umum Daerah yang berasal dari: penerimaan pinjaman, penjualan obligasi Pemerintah Kabupaten Bangli, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

Pengeluaran Pembiayaan adalah Semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain: Pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bangli, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat direalisasi atau dapat direalisasi, sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat timbulnya kewajiban.

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan asas bruto.

Akuntansi pembiayaan neto adalah Selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurang pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih atau kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama 1 (satu) periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto.

Sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama 1 (satu) periode pelaporan. Selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluran selama 1 (satu) periode pelaporan dicatat dalam Pos Silpa atau Sikpa.

4.3.4 Kebijakan Akuntansi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bangli sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Bangli, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Bangli, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Aset Lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya untuk mempermudah pemahaman atas pos-pos aset nonlancar yang disajikan di neraca.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi nonpermanen dan investasi permanen.

Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Yang termasuk dalam Investasi nonpermanen di Pemerintah Kabupaten Bangli adalah dana bergulir (dana yang digulirkan/dipinjamkan) melalui Bappeda dan Penanaman Modal melalui Dana Kpel yang sudah diberhentikan penyalurannya.

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Yang termasuk dalam Investasi permanen di Pemerintah Kabupaten Bangli adalah penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah, yaitu:

a. PT BPD Bali;
b. PD BPR Bank Daerah Bangli;
c. PDAM Bangli;
d. PT Jamkrida Bali; dan
e. PD Bukti Mukti Bhakti.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Bangli atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih satu periode.

Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Konstruksi dalam pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi atau satu periode anggaran. Pemerintah Kota tidak membentuk dana cadangan.

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

Pemanfaatan Aset Tetap daerah dapat berupa kerja sama dengan pihak ketiga melalui pinjam pakai, penyewaan, kerjasama pemanfaatan dan penggunausahaan tanpa mengubah status kepemilikan.

Aset tak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. Pengukuran aset adalah sebagai berikut:

a. Kas dicatat sebesar nilai nominal.
b. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan.
c. Piutang dicatat sebesar nilai nominal.
d. Persediaan dicatat sebesar:
e. Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
f. Biaya Standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
g. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Investasi Jangka Panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

Aset Tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

4.3.5 Kebijakan Akuntansi Kewajiban dan Ekuitas

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Bangli.

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari fihak ketiga, utang PFK, dan bagian lancar utang jangka panjang.

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan untuk diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

a. jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
b. entitas bermaksud mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
c. maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadualan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

Jumlah setiap kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka pendek sesuai dengan paragraf ini, bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (*refinancing*) atau digulirkan (*roll over*) berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Namun dalam situasi di mana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam kasus tidak adanya persetujuan pendanaan kembali), pendanaan kembali ini tidak dapat dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi kewajiban pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang.

Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu (*covenant*) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*) jika persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan demikian, kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang hanya jika:

a. pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran; dan
b. tidak mungkin terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat sekarang dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dapat timbul dari:

a. transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
b. transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
c. kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*); dan
d. kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah Kabupaten Bangli menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa mendatang.

Dalam transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan. Kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan pemerintah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran.

Kewajiban diakui, dalam kaitannya dengan kejadian yang diakui pemerintah, apabila memenuhi kriteria berikut: (1) Badan Legislatif telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya yang akan digunakan, (2) transaksi dengan pertukaran timbul atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah Kabupaten Bangli pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada surat utang pemerintah Kabupaten Bangli yang substansinya sama dengan SUN. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Untuk utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah Kabupaten Bangli baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

Pengukuran dan penyajian utang bunga juga berlaku untuk sekuritas pemerintah Kabupaten Bangli yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangli dalam bentuk dan substansi yang sama dengan SUN.

Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa perhitungan fihak ketiga (PFK) yang belum disetorkan kepihak lain harus dicatat sebagai utang perhitungan pihak ketiga pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam kategori bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

4.3.6 Kebijakan Akuntansi Konsolidasi

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Bangli sebagaimana ditetapkan didalam peraturan perundang-undangan. (Dalam hal ini Bagian Keuangan Setda Kabupaten Bangli selaku BUD)

Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.

Entitas akuntansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli adalah OPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli.

Laporan Keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

Laporan keuangan konsolidasian pada Pemerintah Kabupaten Bangli sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi yang meliputi OPD dan PPKD.

Prosedur Konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi yang meliputi OPD dan PPKD dengan mengeliminasi akun timbal balik di Neraca.

Akun-akun yang dieliminasi adalah R/K Dinas dieliminasi menjadi R/K Kasda dan R/K Dinas Aset dieliminasi menjadi R/K Aset.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, penerapan SAP dalam Laporan keuangan pemerintah diberlakukan konsisten untuk pelaporan keuangan Tahun Anggaran 2020. Kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan tahun 2020 dapat dijabarkan sebagai berikut:

Dalam melaksanakan kebijakan akuntansi, ada beberapa hal khusus yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangli antara lain sebagai berikut:

a. Pencatatan Persediaan

Pencatatan Persediaan menggunakan Metode Fisik dan Metode Penilaian Persediaan menggunakan Metode FIFO atau MPKP (masuk pertama keluar pertama), kecuali Penilaian Persediaan obat termasuk obat untuk tanaman, hewan atau lainnya menggunakan perpetual dengan Metode FIFO dengan mempertimbangkan batas yang sudah melebihi jangka waktu / kadaluarsa.

Persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stock opname), meliputi persediaan yang nilai satuannya relatif rendah dan perputarannya cepat, antara lain berupa barang konsumsi, barang pakai habis, barang cetakan, obat-obatan dan bahan farmasi, dan yang sejenis.

Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti karcis peron, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.

Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan sediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

b. Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Piutang yang melebihi jatuh tempo dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih atau penyisihan/cadangan kerugian piutang dengan besaran prosentase sesuai dengan umur piutang tertentu sesuai dengan prosentase cadangan penyisihan piutang. Untuk lebih jelasnya, uraian diatas dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini:

Untuk menetapkan kreteria piutang berdasarkan penggolongan jenis piutang yaitu:

1) Piutang Pajak Daerah, Piutang Bagian Lancar TGR dan Piutang Lainnya sebagai berikut:

Tabel 4.2 Penyisihan Piutang Pajak Daerah, Piutang Bagian Lancar TGR dan Piutang Lainnya Tak Tertagih TA 2021

Umur Piutang Melebihi Jatuh Tempo	Kategori	Peny.Piutang Tak Tertagih
Kurang dari 1 tahun	Lancar	0,5%
1 sampai 2 tahun	Kurang Lancar	10%
Lebih dari 2 sampai 5 tahun	Ragu - ragu	50%
Lebih dari 5 tahun	Macet	100%

2) Piutang Dana Bergulir sebagai berikut:

Tabel 4.3. Penyisihan Piutang Dana Bergulir Tak Tertagih TA 2021

Umur Piutang Melebihi Jatuh Tempo	Kategori	Peny. Piutang Tak Tertagih
0 sampai dengan 1 tahun	Lancar	0,5%
Lebih dari 1 sampai 3 tahun	Kurang Lancar	10%
Lebih dari 3 sampai 5 tahun	Ragu - ragu	50%
Lebih dari 5 tahun	Macet	100%

3) Piutang Retribusi sebagai berikut:

Tabel 4.4 Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih TA 2021

Umur Piutang Melebihi Jatuh Tempo	Kategori	Peny. Piutang Tak Tertagih
0 sampai 1 bulan	Lancar	0,5%
Lebih dari 1 sampai 3 bulan	Kurang Lancar	10%
Lebih dari 3 sampai 12 bulan	Ragu - ragu	50%
Lebih dari 12 bulan	Macet	100%

c. Pengakuan Belanja Modal

Pengadaan barang modal pada tahun berjalan karena penyerahannya rata - rata pada bulan akhir periode tahun pelaporan maka tahun berjalan tidak dilakukan penyusutan. Terhadap Aset tersebut baru dilakukan proses penyusutan mulai awal tahun berikutnya dengan menggunakan metode garis lurus.

Kegiatan *Feasibility Study* (FS) dan *Detail Engineering Design* (DED) merupakan bagian dari Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Aset Tetap yang bersangkutan sehingga belum diperhitungkan beban penyusutannya.

Sedangkan pada saat Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut dinyatakan selesai 100,00% dan telah dikapitalisasi ke dalam jenis aset tetap maka FS dan DED yang bersangkutan melekat dan menambah biaya perolehan aset tetap dimaksud sebesar nilai FS dan DED.

d. Kapitalisasi Belanja Menjadi Aset Tetap

Kapitalisasi adalah penentuan nilai buku terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.

Pengeluaran-pengeluaran dalam rangka perolehan asset merupakan belanja modal apabila memenuhi semua kriteria berikut:

1) Pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang yang manfaat ekonominya lebih dari satu periode akuntansi (lebih dari 12 bulan);
2) Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan;
3) Barang tersebut dibeli dengan tujuan tidak untuk dijual; dan
4) Barang yang dibeli tersebut pada waktu penggunaannya akan membutuhkan belanja pemeliharaan.

Pengeluaran-pengeluaran setelah perolehan merupakan belanja modal apabila memenuhi semua kriteria berikut:

1) Pengeluaran-pengeluaran yang akan menambah efisiensi;
2) Pengeluaran-pengeluaran yang memperpanjang umur aset;
3) Pengeluaran-pengeluaran yang meningkatkan kapasitas atau mutu produksi; dan
4) Jumlah pengeluaran melebihi batasan minimal jumlah biaya yang dikapitalisasi sebagaimana telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Bangli.

Untuk lebih jelasnya, uraian diatas dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.5 Batas Minimal Kapitalisasi Aset Tetap

No.	Uraian	Jumlah Harga (lusin/set/satuan)
1.	Tanah	1,00
2.	Peralatan dan Mesin	1.000.000,00
3.	Gedung dan Bangunan	10.000.000,00
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	10.000.000,00
5.	Aset Tetap Lainnya	200.000,00
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1,00

e. Penyusutan Aset Tetap

Suatu aset disebut sebagai aset tetap adalah karena manfaatnya dapat dinikmati lebih dari 12 bulan atau satu periode akuntansi. Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin lama semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah dan sejalan dengan itu maka nilai aset tetap tersebut juga semakin menurun.

Metode Penyusutan adalah Penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset serta bukan alokasi biaya. Metode Penyusutan yang digunakan Pemerintah Kabupaten Bangli adalah Metode Garis Lurus dengan rumusan:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai Perolehan/Penilaian}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Aktiva tetap yang tidak dilakukan penyusutan antara lain:

1) Tanah;
2) Gedung dan bangunan berupa candi dan bangunan bersejarah;
3) Aset tetap lainnya berupa buku perpustakaan, barang bercorak kebudayaan, tanaman, dan hewan/ternak; dan
4) Konstruksi dalam pekerjaan.

Persentase penyusutan dihitung sesuai dengan masa manfaat sebagai berikut:

Tabel 4.6. Persentase Penyusutan Sesuai Masa Manfaat

Nama aktiva tetap	Masa manfaat (Tahun)	Penyusutan (%)
Peralatan dan Mesin	10	10
Gedung dan Bangunan	25	4
Jalan, irigasi, dan jaringan	10	10
Aset tetap lainnya	5	20

Penyusutan aset tetap mempergunakan pendekatan bulanan.
Penambahan Umur Ekonomis Barang/Aset
Umur ekonomis barang dapat bertambah jika terdapat pemeliharaan yang secara kapitalisasi memenuhi kriteria secara akuntansi serta menambah nilai aset tetap barang tersebut;
Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

1. Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
   a) Bertambah ekonomis/efisien;
   b) Bertambah manfaat;
   c) Bertambah volume/ukuran; dan
   d) Bertambah kapasitas atau mutu produksi.
2. Nilai rupiah pemeliharaan barang/aset tetap tersebut melebihi batasan minimal jumlah biaya yang harus dikapitalisasi:

Tabel 4.7. Persentase Nilai Pemeliharaan yang Dikapitalisasi Menjadi Aset Tetap

No	Uraian	% Terhadap Perolehan Aset
1	Tanah	
2	Peralatan dan Mesin yang terdiri dari:	
2.1	Alat - alat berat	Lebih dari 15%
2.2	Alat - alat angkutan	Lebih dari 15%
2.3	Alat - alat bengkel dan alat ukur	Lebih dari 15%
2.4	Alat - alat pertanian / peternakan	Lebih dari 15%
2.5	Alat - alat kantor dan rumah tangga	Lebih dari 15%
2.6	Alat - alat studio dan alat komunikasi	Lebih dari 15%
2.7	Alat - alat kedokteran	Lebih dari 15%
2.8	Alat - alat laboratorium	Lebih dari 15%
2.9	Alat - alat keamanan	Lebih dari 15%
3	Gedung dan Bangunan yang terdiri dari:	
3.1	Bangunan Gedung	Lebih dari 10%
3.2	Bangunan monumen	Lebih dari 10%
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiri atas:	
4.1	Jalan dan jembatan	Lebih dari 6%
4.2	Bangunan air/irigasi	Lebih dari 6%
4.3	Instalasi	Lebih dari 15%
4.4	Jaringan	Lebih dari 15%
5	Aset Tetap Lainnya yang terdiri dari:	
5.1	Buku perpustakaan	Lebih dari 20%

No	Uraian	% Terhadap Perolehan Aset
5.2	Barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga	Lebih dari 20%
6	Kosntruksi Dalam Pengerjaan	

3. Penentuan Masa Manfaat Berdasarkan Persentase Pemeliharaan Aset dengan nilai perolehan

Tabel 4.8 Penambahan Masa Manfaat Berdasarkan Prosentase Pemeliharaan

No	Uraian		% Terhadap Perolehan Aset	Penambahan Masa Manfaat
1	Tanah			
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:			
2.1	Alat - Alat Besar	Overhaul	>0% s.d. 30%	1 Tahun
			>30% s.d. 45%	3 Tahun
			>45% s.d. 60%	5 Tahun
			>60% s.d. 75%	7 Tahun
			>75% s.d. 90%	9 Tahun
			>90% s.d. 100%	10 Tahun
2.2	Alat - Alat Angkutan	Overhaul	>0% s.d. 25%	1 Tahun
			>25% s.d. 50%	5 Tahun
			>50% s.d. 75%	7 Tahun
			>75% s.d. 90%	9 Tahun
			>90% s.d. 100%	10 Tahun
2.3	Alat - Alat Bengkel dan Alat Ukur	Overhaul	>0% s.d. 25%	1 Tahun
			>25% s.d. 50%	5 Tahun
			>50% s.d. 75%	7 Tahun
			>75% s.d. 90%	9 Tahun
			>90% s.d. 100%	10 Tahun
2.4	Alat - Alat Pertanian/Peternakan	Overhaul	>0% s.d. 25%	1 Tahun
			>25% s.d. 50%	5 Tahun
			>50% s.d. 75%	7 Tahun
			>75% s.d. 90%	9 Tahun
			>90% s.d. 100%	10 Tahun
2.5	Alat - Alat Kantor dan Rumah Tangga	Overhaul	>0% s.d. 25%	1 Tahun
			>25% s.d. 50%	5 Tahun
			>50% s.d. 75%	7 Tahun
			>75% s.d. 90%	9 Tahun
			>90% s.d. 100%	10 Tahun
2.6	Alat - Alat Studio dan Komunikasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1 Tahun
			>25% s.d. 50%	5 Tahun
			>50% s.d. 75%	7 Tahun
			>75% s.d. 90%	9 Tahun
			>90% s.d. 100%	10 Tahun

No	Uraian		% Terhadap Perolehan Aset	Penambahan Masa Manfaat
2.7	Alat - Alat Kedokteran	Overhaul	>0% s.d. 25%	1 Tahun
			>25% s.d. 50%	5 Tahun
			>50% s.d. 75%	7 Tahun
			>75% s.d. 90%	9 Tahun
			>90% s.d. 100%	10 Tahun
2.8	Alat - Alat Laboratorium	Overhaul	>0% s.d. 30%	1 Tahun
			>30% s.d. 45%	3 Tahun
			>45% s.d. 60%	5 Tahun
			>60% s.d. 75%	7 Tahun
			>75% s.d. 90%	9 Tahun
			>90% s.d. 100%	10 Tahun
2.9	Alat - Alat Keamanan	Overhaul	>0% s.d. 25%	1 Tahun
			>25% s.d. 50%	5 Tahun
			>50% s.d. 75%	7 Tahun
			>75% s.d. 90%	9 Tahun
			>90% s.d. 100%	10 Tahun
3	Gedung dan Bangunan			
3.1	Bangunan Gedung	Renovasi	>0% s.d. 25%	5 Tahun
			>25% s.d. 50%	10 Tahun
			>50% s.d. 75%	15 Tahun
			>75% s.d. 100%	25 Tahun
3.2	Bangunan Monumen	Renovasi	>0% s.d. 25%	5 Tahun

f. Pengakuan Belanja Modal

Pengadaan barang modal pada tahun berjalan karena penyerahannya rata - rata pada bulan akhir periode tahun pelaporan maka tahun berjalan tidak dilakukan penyusutan. Terhadap Aset tersebut baru dilakukan proses penyusutan mulai awal tahun berikutnya dengan menggunakan metode garis lurus.

Kegiatan *Feasibility Study* (FS) dan *Detail Engineering Design* (DED) merupakan bagian dari Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Aset Tetap yang bersangkutan sehingga belum diperhitungkan beban penyusutannya.

Sedangkan pada saat Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut dinyatakan selesai 100,00% dan telah dikapitalisasi ke dalam jenis aset tetap maka FS dan DED yang bersangkutan melekat dan menambah biaya perolehan aset tetap dimaksud sebesar nilai FS dan DED.

g. Kapitalisasi Belanja Menjadi Aset Tetap

Kapitalisasi adalah penentuan nilai buku terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.

Pengeluaran-pengeluaran dalam rangka perolehan asset merupakan belanja modal apabila memenuhi semua kriteria berikut:

1) Pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang yang manfaat ekonominya lebih dari satu periode akuntansi (lebih dari 12 bulan);
2) Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan;

3) Barang tersebut dibeli dengan tujuan tidak untuk dijual; dan
4) Barang yang dibeli tersebut pada waktu penggunaannya akan membutuhkan belanja pemeliharaan.

Pengeluaran-pengeluaran setelah perolehan merupakan belanja modal apabila memenuhi semua kriteria berikut:

1) Pengeluaran-pengeluaran yang akan menambah efisiensi;
2) Pengeluaran-pengeluaran yang memperpanjang umur aset;
3) Pengeluaran-pengeluaran yang meningkatkan kapasitas atau mutu produksi; dan
4) Jumlah pengeluaran melebihi batasan minimal jumlah biaya yang dikapitalisasi sebagaimana telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Bangli.

Untuk lebih jelasnya, uraian diatas dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.9 Batas Minimal Kapitalisasi Aset Tetap

No.	Uraian	Jumlah Harga (lusin/set/satuan)
1.	Tanah	1,00
2.	Peralatan dan Mesin	1.000.000,00
3.	Gedung dan Bangunan	10.000.000,00
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	10.000.000,00
5.	Aset Tetap Lainnya	200.000,00
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1,00

h. Penyusutan Aset Tetap

Suatu aset disebut sebagai aset tetap adalah karena manfaatnya dapat dinikmati lebih dari 12 bulan atau satu periode akuntansi. Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin lama semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah dan sejalan dengan itu maka nilai aset tetap tersebut juga semakin menurun.

Metode Penyusutan adalah Penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset serta bukan alokasi biaya. Metode Penyusutan yang digunakan Pemerintah Kabupaten Bangli adalah Metode Garis Lurus dengan rumusan:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai Perolehan/Penilaian}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Aktiva tetap yang tidak dilakukan penyusutan antara lain:

1) Tanah;
2) Gedung dan bangunan berupa candi dan bangunan bersejarah;
3) Aset tetap lainnya berupa buku perpustakaan, barang bercorak kebudayaan, tanaman, dan hewan/ternak; dan
4) Konstruksi dalam pekerjaan.

Persentase penyusutan dihitung sesuai dengan masa manfaat sebagai berikut:

Tabel 4.10 Persentase Penyusutan Sesuai Masa Manfaat

Nama aktiva tetap	Masa manfaat (Tahun)	Penyusutan (%)
Peralatan dan Mesin	10	10
Gedung dan Bangunan	25	4

Jalan, irigasi, dan jaringan	10	10
Aset tetap lainnya	5	20

Penyusutan aset tetap mempergunakan pendekatan bulanan.
Penambahan Umur Ekonomis Barang/Aset
Umur ekonomis barang dapat bertambah jika terdapat pemeliharaan yang secara kapitalisasi memenuhi kriteria secara akuntansi serta menambah nilai aset tetap barang tersebut;
Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

1. Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
   a) Bertambah ekonomis/efisien;
   b) Bertambah manfaat;
   c) Bertambah volume/ukuran; dan
   d) Bertambah kapasitas atau mutu produksi.
2. Nilai rupiah pemeliharaan barang/aset tetap tersebut melebihi batasan minimal jumlah biaya yang harus dikapitalisasi:

Tabel 4.11 Persentase Nilai Pemeliharaan yang Dikapitalisasi Menjadi Aset Tetap

No	Uraian	% Terhadap Perolehan Aset
1	Tanah	
2	Peralatan dan Mesin yang terdiri dari:	
2.1	Alat - alat berat	Lebih dari 15%
2.2	Alat - alat angkutan	Lebih dari 15%
2.3	Alat - alat bengkel dan alat ukur	Lebih dari 15%
2.4	Alat - alat pertanian / peternakan	Lebih dari 15%
2.5	Alat - alat kantor dan rumah tangga	Lebih dari 15%
2.6	Alat - alat studio dan alat komunikasi	Lebih dari 15%
2.7	Alat - alat kedokteran	Lebih dari 15%
2.8	Alat - alat laboratorium	Lebih dari 15%
2.9	Alat - alat keamanan	Lebih dari 15%
3	Gedung dan Bangunan yang terdiri dari:	
3.1	Bangunan Gedung	Lebih dari 10%
3.2	Bangunan monumen	Lebih dari 10%
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiri atas:	
4.1	Jalan dan jembatan	Lebih dari 6%
4.2	Bangunan air/irigasi	Lebih dari 6%
4.3	Instalasi	Lebih dari 15%
4.4	Jaringan	Lebih dari 15%
5	Aset Tetap Lainnya yang terdiri dari:	
5.1	Buku perpustakaan	Lebih dari 20%
5.2	Barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga	Lebih dari 20%
6	Kosntruksi Dalam Pengerjaan	

3. Penentuan Masa Manfaat Berdasarkan Persentase Pemeliharaan Aset dengan nilai perolehan

Tabel 4.12 Penambahan Masa Manfaat Berdasarkan Prosentase Pemeliharaan

No	Uraian		% Terhadap Perolehan Aset	Penambahan Masa Manfaat
1	Tanah			
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:			
2.1	Alat - Alat Besar	Overhaul	>0% s.d. 30%	1 Tahun
			>30% s.d. 45%	3 Tahun
			>45% s.d. 60%	5 Tahun
			>60% s.d. 75%	7 Tahun
			>75% s.d. 90%	9 Tahun
			>90% s.d. 100%	10 Tahun
2.2	Alat - Alat Angkutan	Overhaul	>0% s.d. 25%	1 Tahun
			>25% s.d. 50%	5 Tahun
			>50% s.d. 75%	7 Tahun
			>75% s.d. 90%	9 Tahun
			>90% s.d. 100%	10 Tahun
2.3	Alat - Alat Bengkel dan Alat Ukur	Overhaul	>0% s.d. 25%	1 Tahun
			>25% s.d. 50%	5 Tahun
			>50% s.d. 75%	7 Tahun
			>75% s.d. 90%	9 Tahun
			>90% s.d. 100%	10 Tahun
2.4	Alat - Alat Pertanian/Peternakan	Overhaul	>0% s.d. 25%	1 Tahun
			>25% s.d. 50%	5 Tahun
			>50% s.d. 75%	7 Tahun
			>75% s.d. 90%	9 Tahun
			>90% s.d. 100%	10 Tahun
2.5	Alat - Alat Kantor dan Rumah Tangga	Overhaul	>0% s.d. 25%	1 Tahun
			>25% s.d. 50%	5 Tahun
			>50% s.d. 75%	7 Tahun
			>75% s.d. 90%	9 Tahun
			>90% s.d. 100%	10 Tahun
2.6	Alat - Alat Studio dan Komunikasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1 Tahun
			>25% s.d. 50%	5 Tahun
			>50% s.d. 75%	7 Tahun
			>75% s.d. 90%	9 Tahun
			>90% s.d. 100%	10 Tahun
2.7	Alat - Alat Kedokteran	Overhaul	>0% s.d. 25%	1 Tahun
			>25% s.d. 50%	5 Tahun
			>50% s.d. 75%	7 Tahun
			>75% s.d. 90%	9 Tahun
			>90% s.d. 100%	10 Tahun
2.8	Alat - Alat Laboratorium	Overhaul	>0% s.d. 30%	1 Tahun

No	Uraian		% Terhadap Perolehan Aset	Penambahan Masa Manfaat
			>30% s.d. 45%	3 Tahun
			>45% s.d. 60%	5 Tahun
			>60% s.d. 75%	7 Tahun
			>75% s.d. 90%	9 Tahun
			>90% s.d. 100%	10 Tahun
2.9	Alat - Alat Keamanan	Overhaul	>0% s.d. 25%	1 Tahun
			>25% s.d. 50%	5 Tahun
			>50% s.d. 75%	7 Tahun
			>75% s.d. 90%	9 Tahun
			>90% s.d. 100%	10 Tahun
3	Gedung dan Bangunan			
3.1	Bangunan Gedung	Renovasi	>0% s.d. 25%	5 Tahun
			>25% s.d. 50%	10 Tahun
			>50% s.d. 75%	15 Tahun
			>75% s.d. 100%	25 Tahun
3.2	Bangunan Monumen	Renovasi	>0% s.d. 25%	5 Tahun
			>25% s.d. 50%	10 Tahun
			>50% s.d. 75%	15 Tahun
			>75% s.d. 100%	25 Tahun
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan			
4.1	Jalan dan Jembatan	Renovasi	>0% s.d. 30%	2 Tahun
			>30% s.d. 60%	5 Tahun
			>60% s.d. 100%	10 Tahun
4.2	Bangunan Air/Irigasi	Renovasi	>0% s.d. 30%	2 Tahun
			>30% s.d. 60%	5 Tahun
			>60% s.d. 100%	10 Tahun
4.3	Instalasi	Renovasi	>0% s.d. 30%	2 Tahun
			>30% s.d. 45%	5 Tahun
			>45% s.d. 60%	7 Tahun
			>60% s.d. 100%	10 Tahun
4.4	Jaringan	Overhaul	>0% s.d. 30%	2 Tahun
			>30% s.d. 60%	5 Tahun
			>60% s.d. 100%	10 Tahun

4. Jika pemeliharaan melebihi 100% nilai perolehan maka dikenakan maksimal masa manfaat maka akan dikenakan masa manfaat maksimal golongan aset tetap tersebut.
   Pemeliharaan terhadap sebagian aset tetap menambah masa manfaat secara keseluruhan aset tersebut.

5. Aset Tak Berwujud

Tabel 4.13 Pemeliharaan *Software*

No	Uraian		% Terhadap Perolehan Aset	Penambahan Masa Manfaat
1	*Software*	Peningkatan Kapasitas, Efektivitas dan Efisiensi	>0% s.d. 20%	1 Tahun

i. Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari LRA, LP SAL, Neraca, LPE, LO, LAK dan CaLK. Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya. Dalam kebijakan ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*).

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan Laporan yang mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan ini menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan. Secara lebih rinci LRA Pemerintah Kabupaten Bangli pada TA 2022 (dalam satuan mata uang rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

		Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
5.1.1	**Pendapatan**	**1.143.205.070.988,00**	**1.105.440.499.468,50**	**96,70**	**1.150.283.515.663,56**

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021, dengan rincian sebagai berikut:

- Pendapatan Asli Daerah	147.126.416.529,00	144.005.842.858,50	97,88	163.537.095.767,82
- Pendapatan Transfer	995.207.663.459,00	960.732.038.900,00	96,54	949.349.146.346,74
- Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	870.991.000,00	702.617.710,00	80,67	37.397.273.549,00
Jumlah	**1.143.205.070.988,00**	**1.105.440.499.468,50**	**96,70**	**1.150.283.515.663,56**

Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2022 sebesar Rp1.105.440.499.468,50 atau sebesar 96,70% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.143.205.070.988,00.

Capaian realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp44.843.016.195,06 atau sebesar 3,90% dibandingkan dengan TA 2021.

		Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
5.1.1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**147.126.416.529,00**	**144.005.842.858,50**	**97,88**	**163.537.095.767,82**

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021, dengan rincian sebagai berikut:

- Pendapatan Pajak Daerah	21.862.350.000,00	36.707.060.479,07	167,90	23.318.329.220,50
- Pendapatan Retribusi Daerah	45.249.975.000,00	36.328.299.166,20	80,28	8.281.617.975,00
- Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.020.327.749,00	5.597.430.541,18	111,50	6.101.592.913,01
- Lain-lain PAD yang Sah	74.993.763.780,00	65.373.052.672,05	87,18	125.835.555.659,31
Jumlah	**147.126.416.529,00**	**144.005.842.858,50**	**97,88**	**163.537.095.767,82**

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2022 sebesar Rp144.005.842.858,50 atau sebesar 97,88% dari yang dianggarkan sebesar Rp147.126.416.529,00.

Capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp19.531.252.909,32 atau sebesar 11,94% dibandingkan dengan TA 2021.

		Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
5.1.1.1.1	**Pendapatan Pajak Daerah**	**21.862.350.000,00**	**36.707.060.479,07**	**167,90**	**23.318.329.220,50**
	Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Pajak Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021, dengan rincian sebagai berikut:				
	Pajak Hotel	**220.000.000,00**	**1.765.288.243,00**	**802,40**	**18.349.311,00**
	- Pajak Hotel	220.000.000,00	1.765.288.243,00	802,40	18.349.311,00
	Pajak Restoran	**5.000.000.000,00**	**5.654.717.702,00**	**113,09**	**1.110.576.560,00**
	- Pajak Restoran dan Sejenisnya	4.835.000.000,00	4.444.228.079,00	91,92	527.092.353,00
	- Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	165.000.000,00	1.210.489.623,00	733.63	414.700.232,00
	- Pajak Warung dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	168.783.975,00
	Pajak Hiburan	**88.000.000,00**	**103.949.194,57**	**118,12**	**0,00**
	- Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	88.000.000,00	103.949.194,57	118,12	0,00
	Pajak Reklame	**550.000.000,00**	**1.380.934.821,00**	**251,08**	**780.719.576,50**
	- Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	535.700.000,00	292.132.321,00	54,53	246.729.576,50
	- Pajak Reklame Kain	11.550.000,00	1.079.452.500,00	9.345,91	530.415.000,00
	- Pajak Reklame Melekat/Stiker	550.000,00	9.350.000,00	1.700,00	3.575.000,00
	- Pajak Reklame Selebaran	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00
	Pajak Penerangan Jalan	**8.360.000.000,00**	**10.145.156.104,00**	**121,35**	**9.027.755.104,00**
	- Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	8.360.000.000,00	10.145.156.104,00	121,35	9.027.755.104,00
	Pajak Parkir	**9.350.000,00**	**2.610.000,00**	**27,91**	**3.240.000,00**
	- Pajak Parkir	9.350.000,00	2.610.000,00	27,91	3.240.000,00
	Pajak Air Tanah	**385.000.000,00**	**323.259.895,50**	**83,96**	**174.964.250,00**
	- Pajak Air Tanah	385.000.000,00	323.259.895,50	83,96	174.964.250,00
	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	**2.750.000.000,00**	**2.869.152.783,00**	**104,33**	**2.454.419.172,00**
	- PBBP2	2.750.000.000,00	2.869.152.783,00	104,33	2.454.419.172,00
	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	**4.500.000.000,00**	**14.461.991.736,00**	**321,38**	**9.748.305.247,00**
	- BPHTB-Pemindahan Hak	4.500.000.000,00	14.461.991.736,00	321,38	9.748.305.247,00
	Jumlah	**21.862.350.000,00**	**36.707.060.479,07**	**167,90**	**23.318.329.220,50**

Dalam pemungutan pajak daerah, peraturan yang mendasari yaitu:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan;
8. Peraturan Bupati Bangli Nomor 86 tahun 2020 tentang tata Cara Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran
9. Peraturan Bupati Bangli Nomor 29 tahun 2011 tentang tata Harga Dasar Air Pengenaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah, Perizinan, Tata Cara Pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Penerbitan, Pembayaran, Angsuran, Penundaan, Pengurangan, Kelebihan Pembayaran Pajak; dan
10. Peraturan Bupati Bangli Nomor 24 tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Tanah.

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2022 sebesar Rp36.707.060.479,07 atau sebesar 167,90% dari yang dianggarkan sebesar Rp21.862.350.000,00. Capaian realisasi Pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp13.388.731.258,57 atau sebesar 57,42% dibandingkan dengan Tahun 2021.

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah yang melampaui target yang direncanakan adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Penjelasan mengenai Realisasi Pendapatan Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

1. Pajak Hotel

   Target Pajak Hotel di Tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) baik di APBD induk maupun perubahan, target ini naik Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) atau sebesar 10% dari target Pajak Hotel Tahun 2021. Pada Triwulan II 2022 pendapatan Pajak Hotel telah melampaui target yang ditetapkan yaitu Rp323.850.210,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu dua ratus sepuluh rupiah) atau sebesar 147% dan pada akhir tahun anggaran pendapatan Pajak Hotel mencapai Rp1.765.288.243,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh lima juta dua ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah) atau sebesar 802,40% dari target yang ditetapkan. Adapun faktor yang mendukung realisasi Pajak Hotel ini adalah mulai adanya kelonggaran dalam perjalanan wisata, adanya *trend* peningkatan kunjungan ke Kintamani, pelaksanaan kebijakan Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah dengan pemasangan alat perekam data transaksi (intensifikasi) serta penambahan Wajib Pajak Hotel potensial yang terdaftar sepanjang tahun 2022 (ekstensifikasi).

2. Pajak Restoran

   Realisasi Pajak Restoran di Tahun 2022 melebihi target, terutama pada penerimaan pajak dari jenis objek Rumah Makan dan Sejenisnya mencapai Rp1.210.489.623,00 (satu milyar dua ratus sepuluh juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah) atau sebesar 733,63% dari target yang ditetapkan sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah). Adapun faktor yang mendukung realiasi tersebut adalah tidak dilakukannya perubahan target pajak untuk jenis objek Rumah Makan dan Sejenisnya pada anggaran perubahan 2022, walaupun penerimaan Pajak Restoran jenis objek Rumah Makan dan Sejenisnya pada bulan Januari 2022 sudah melampui target yaitu Rp202.690.065,00 (dua ratus dua juta enam ratus sembilan puluh ribu enam puluh lima rupiah). Faktor pendukung lainnya

adalah pelaksanaan kebijakan Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah dengan pemasangan alat perekam data transaksi serta penempatan Petugas Pengawas Pajak pada WP Rumah Makan yang potensial;

3. Pajak Reklame

   Pada tahun 2022 persentase realisasi Pajak Reklame secara keseluruhan mencapai 251,08%. Dengan rincian sebagai berikut :

   a. Jenis objek Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron realisasinya Rp292.132.321,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta seratus tiga puluh dua ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) atau 54.53% dari target yang ditetapkan, hal ini disebabkan karena kurang optimalnya dalam penetapan target;
   b. Jenis objek Reklame Kain mencapai realisasi sampai 9.345,91%, sebagian besar bersumber dari WP produk rokok yang memasang media promosi berupa spanduk atau banner dimana hal ini bersifat insidentil serta sulit diprediksi;
   c. Jenis objek Reklame Melekat/Stiker mencapai realisasi sampai 1.700%, hal ini disebabkan karena kurang optimalnya dalam penetapan target;
   d. Jenis objek Reklame Selebaran realisasinya 0% dari target Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), hal ini disebabkan karena kurang optimalnya dalam penentuan target.

4. Pajak Parkir

   Tidak tercapainya target Pajak Parkir yang ditetapkan tersebut disebabkan oleh beberapa hal yaitu:

   a. Penentuan besaran target realisasi pajak parkir belum optimal;
   b. Pengendalian dan pengawasan pajak parkir belum optimal;
   c. Per bulan September 2022 LPM Kelurahan Bebalang tidak lagi mengelola pemungutan parkir pad Sakit BMC Bangli; dan
   d. Pendataan dan pendaftaran potensi pajak parkir belum terselenggara secara optimal.

5. Realisasi Pajak Air Tanah tidak mencapai target disebabkan oleh beberapa hal seperti kurang sadarnya W memenuhi kewajiban pajak air tanah, adanya tunggakan, meter air belum diterapkan secara keseluruhar kerancuan perhitungan volume air tanah pada usaha yang melekat pada rumah tangga, serta penda pendaftaran potensi pajak air tanah yang belum optimal.

		Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
5.1.1.1.2	**Pendapatan Retribusi Daerah**	**45.249.975.000,00**	**36.328.299.166,20**	**80,28**	**8.281.617.975,00**

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Retribusi Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 se direalisasikan pada TA 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Retribusi Jasa Umum	**2.186.728.000,00**	**1.103.775.171,20**	**50,48**	**3.524.058.375,00**
- Retribusi Pelayanan Kesehatan	681.311.000,00	63.687.500,00	9,35	569.236.175,00
- Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	125.928.000,00	88.953.000,00	70,64	115.834.000,00
- Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	536.813.000,00	380.464.000,00	70,87	363.779.000,00
- Retribusi Pelayanan Pasar	195.000.000,00	152.037.000,00	77,97	2.114.589.000,00
- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	456.500.000,00	302.131.000,00	66,18	194.457.000,00

- Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	15.000.000,00	15.903.300,00	106,02	10.658.200,00
- Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	176.176.000,00	100.599.371,20	57,10	155.505.000,00
Retribusi Jasa Usaha	**42.061.523.000,00**	**34.899.171.995,00**	**82,97**	**4.528.545.700,00**
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	130.900.000,00	63.954.880,00	48,86	51.618.200,00
- Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	4.133.960.000,00	2.071.428.000,00	50,11	0,00
- Retribusi Terminal	6.964.000,00	7.046.500,00	101,18	6.113.500,00
- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	37.557.930.000,00	32.575.707.115,00	86,73	4.280.607.000,00
- Retribusi Penyebrangan di Air	61.709.000,00	62.850.500,00	101,85	35.183.000,00
- Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	170.060.000,00	118.185.000,00	69,50	155.024.000,00
Retribusi Perizinan Tertentu	**1.001.724.000,00**	**325.352.000,00**	**32,48**	**229.013.900,00**
- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.000.000.000,00	323.974.500,00	32,40	227.873.900,00
- Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1.724.000,00	1.377.500,00	79,90	1.140.000,00
Jumlah	**45.249.975.000,00**	**36.328.299.166,20**	**80,28**	**8.281.617.975,00**

Dalam penungutan retribusi daerah, peraturan yang mendasari yaitu:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
2. Peraturan Bupati Bangli Nomor 46 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Trayek;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 5 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga; dan
11. Peraturan Bupati Bangli Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2014 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga Kabupaten Bangli.

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2022 sebesar Rp36.328.299.166,20 atau sebesar 80,28% dari yang dianggarkan sebesar Rp45.249.975.000,00

Capaian realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp28.046.681.191,20 atau sebesar 338,66% dibandingkan dengan TA 2021. Kenaikan ini terjadi sebagai akibat sektor pariwisata di Kabupaten Bangli berangsur-angsur membaik sejak pandemi *covid-19* serta penambahan target retribusi untuk Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan yang pada tahun sebelumnya tidak dianggarkan dan direalisasikan.

Ada beberapa target retribusi yang tidak tercapai yaitu:

1. Pada Pendapatan Retribusi Jasa Umum pada tahun 2022, realisasi yang tercapai adalah 50,48%. Beberapa penyebab kecilnya realiasasi yaitu pada Retirbusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan, realisasi yang tercapai hanya 9,35% hal ini disebabkan oleh karena terjadinya peralihan status dari puskesmas menjadi BLUD sehingga Dinas Kesehatan hanya mempunyai pendapatan dari UPT Laboratorium, selain itu karena belum maksimalnya sumber daya dan sarana di UPT Laboratorium sehingga belum bisa melakukan pemeriksaan secara lengkap;
2. Pada Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian, Realisasi pada Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi hanya 57,10% hal ini disebabkan karena adanya keterlambatan pembayaran dari pihak provider serta adanya beberapa menara telekomunikasi yang berpindah tangan/akuisisi oleh provider lainnya;
3. Pendapatan Retribusi Jasa Usaha pada tahun 2022, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan tercapai realisasi sebesar 50,11% disebabkan karena saat penentuan target oleh Dinas Perindustian dan Perdagangan menggunakan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2017 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan tarif Rp4.000.000,00 per tahun, namun Peraturan Bupati saat ini masih mengacu pada Peraturan Daerah No 22 Tahun 2011 sehingga pungutan retribusi masih menggunakan Peraturan Daerah No 22 Tahun 2011 dengan tarif Rp700.000,00 per tahun;
4. Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu tahun 2022 pada retribusi izin mendirikan bangunan, mencapai realisasi 32,40%. Hal ini karena realisasi yang tercapai berdasarkan permohonan PBG dan SLF yang masuk ke Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pemukiman;
5. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum mencapai realisasi 79,90% pada Dinas Perhubungan, hal ini disebabkan karena:
    a. Jumlah angkutan umum yang ada sebanyak 55 (lima puluh lima) armada dimana hanya melayani 4 (empat) trayek angkutan pedesaan. Dari jumlah tersebut ada beberapa armada yang tidak memenuhi persyaratan untuk pengurusan ijin trayek. Dari 55 (lima puluh lima) unit jumlah angkutan umum dalam trayek yang beroperasi di Kabupaten Bangli sampai saat ini belum semua memiliki ijin trayek.;
    b. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, dalam pasal 212 ayat 1 dijelaskan bahwa Nomor Induk Berusaha (NIB) berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hal ini jelas akan mempengaruhi capaian target retribusi izin trayek; dan
    c. Jumlah Angkutan umum dalam trayek yang terus mengalami penurunan seiring dengan menurunya minat masyarakat untuk menggunakan moda transportasi umum sehingga pelaku usaha jasa angkutan umum banyak yang menghentikan usahanya.
6. Pada Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan, Realisasi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah tercapai 69,50% hal ini disebabkan adanya indukan pada kolam Balai Benih Ikan yang umurnya sudah melewati batas (tua) sehingga produktivitasnya berkurang. Beberapa hal yang dilakukan untuk tindak

lanjut masalah ini adalah dengan proses lelang untuk ikam yamh sudah ua dan digantikan dengan indukan yang lebih muda dan produktif;

7. Pada Dinas Perhubungan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor mencapai realisasi 66,18%, masih di bawah target. Hal ini dikarenakan:
   a. Minimnya kendaraan angkutan umum dan kendaraan pariwisata (suburband) yang datang melakukan uji kir akibat rendahnya minat masyarakat menggunakan angkutan umum dan adanya Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur batas usia kendaraan bermotor angkutan umum;
   b. Mobil barang jenis *pick-up* dan *truck* yang digunakan untuk kegiatan operasional pendistribusian barang pasca pandemi *Covid-19* minim beroperasi dikarenakan belum pulihnya perekonomian masyarakat;
8. Realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum di bawah target yaitu sebesar 70,87%. Hal ini dikarenakan adanya renovasi pasar dan lahan parkir digunakan oleh pedagang selama masa renovasi, sehingga berdampak bagi petugas parkir dan berkurangnya retribusi parkir. Selain itu karena hal tersebut beberapa petugas parkir mengundurkan diri karena tidak adanya lahan parkir; dan
9. Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tidak sesuai target yaitu 48,86 % dari target yang ditetapkan, disebabkan oleh kurang optimalnya dalam pendataan potensi serta penetapan target retribusi.

Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah pada masing-masing OPD Pengelola Retribusi dapat dilihat pada **lampiran 1**.

		Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
5.1.1.1.3	**Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**	**5.020.327.749,00**	**5.597.430.541,18**	**111,50**	**6.101.592.913,01**
	Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021, dengan rincian sebagai berikut:				
	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	**4.740.796.494,00**	**5.493.321.297,18**	**115,87**	**5.895.181.339,01**
	- Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) yaitu pada PT. BPD Bali dan PT.BPR Bank Daerah Bangli	4.740.796.494,00	5.493.321.297,18	115,87	5.895.181.339,01

	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	**4.531.255,00**	**4.109.244,00**	**90,69**	**6.411.574,00**
	- Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) yaitu pada PT. Jamkrida Bali Mandara	4.531.255,00	4.109.244,00	90,69	6.411.574,00
	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	**275.000.000,00**	**100.000.000,00**	**36,36**	**200.000.000,00**
	- Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) yaitu pada PDAM Bangli	275.000.000,00	100.000.000,00	36,36	200.000.000,00
	Jumlah	**5.020.327.749,00**	**5.597.430.541,18**	**111,50**	**6.101.592.913,01**

Jumlah realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di TA 2022 merupakan dividen/bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD selama TA 2021 yang dibagikan dan diterima di Kas Daerah selama TA 2022.

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di TA 2022 sebesar Rp5.597.430.541,18 atau sebesar 111,50% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.020.327.749,00

Capaian realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp504.162.371,83 atau sebesar 8,26% dibandingkan dengan TA 2021. Hal tersebut diakibatkan adanya penurunan pembagian dividen PT Bank BPD Bali sebesar Rp461.363.485,73 adanya kenaikan pembagian deviden PT BPR Bank Daerah Bangli sebesar Rp59.503.443,90 dan adanya penurunan pembagian deviden PT Jamkrida Bali Mandara sebesar Rp2.302.330,00 serta pada PDAM Bangli adanya penurunan pembagian dividen sebesar Rp100.000.000,00.

Pembagian dividen oleh BUMD tersebut berdasarkan Rapat Umum Pemengang Saham

1. PT Bank BPD Bali dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 47 tanggal 22 Februari 2023;
2. PT Jamkrida Bali Mandara dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) Nomor 4 tanggal 3 Maret 2023; dan
3. PT BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda) dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Saham PT Bank BPR Daerah Bangli tanggal 16 Maret 2023.

		Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
5.1.1.1.4	**Lain-lain PAD yang Sah**	**74.993.763.780,00**	**65.373.052.672,05**	**87,18**	**125.835.555.659,31**
	Jumlah tersebut merupakan Lain-lain PAD yang Sah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021, dengan rincian sebagai berikut :				
	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	**0,00**	**227.662.899,00**	**0,00**	**1.084.759.650,00**
	- Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	217.575.899,00	4. 0,00	699.136.650,00
	- Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	0,00	10.087.000,00	0,00	385.623.000,00
	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	**0,00**	**81.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
	- Hasil Sewa BMD	0,00	81.000.000,00	0,00	0,00
	Jasa Giro	**3.025.000.000,00**	**1.220.909.422,84**	**40,36**	**1.427.956.348,94**
	- Jasa Giro pada Kas Daerah	2.585.000.000,00	1.151.981.008,39	44,56	1.218.135.702,62
	- Jasa Giro pada Kas Bendahara	440.000.000,00	68.927.434,75	15,67	209.590.795,90
	- Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	0,00	979,70	0,00	229.850,42
	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	**0,00**	**7.876.985,00**	**0,00**	**0,00**
	- Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	7.876.985,00	0,00	0,00
	Pendapatan Bunga	**1.100.000.000,00**	**1.020.833.333,38**	**92,80**	**1.253.125.000,03**
	- Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.100.000.000,00	1.020.833.333,38	92,80	1.253.125.000,03
	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	**0,00**	**164.799.086,00**	**0,00**	**125.562.071,50**
	- Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	164.799.086,00	0,00	125.562.071,50
	Pendapatan Denda Pajak Daerah	**0,00**	**764.084.308,60**	**0,00**	**462.970.592,82**

- Pendapatan Denda Pajak Hotel	0,00	21.342.857,00	0,00	654.386,00
- Pendapatan Denda Pajak Restoran	0,00	52.562.546,00	0,00	22.785.196,82
- Pendapatan Denda Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	10.800,00
- Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	0,00	51.247.055,60	0,00	5.715.095,00
- Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	0,00	638.931.850,00	0,00	429.125.115,00
- Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	0,00	0,00	0,00	4.680.000,00
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	**0,00**	**46.478.538,80**	**0,00**	**24.235.700,00**
- Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	0,00	46.478.538,80	0,00	24.235.700,00
Pendapatan dari Pengembalian	**1.026.727.300,00**	**523.602.012,17**	**51,00**	**6.203.156.072,51**
- Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	1.026.727.300,00	523.602.012,17	51,00	6.203.156.072,51
Pendapatan BLUD	**69.842.036.480,00**	**61.297.460.785,26**	**87,77**	**107.222.388.004,37**
- Pendapatan BLUD	69.842.036.480,00	61.297.460.785,26	87,77	107.222.388.004,37
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.020.190.714,00**
- Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0,00	0,00	0,00	8.020.190.714,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.060.097,14**
- Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	1.060.097,14
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**10.100.000,00**

- Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah		0,00	1.500.000,00	0,00	10.100.000,00
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA		**0,00**	**16.845.301,00**	**0,00**	**51.408,00**
- Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA		0,00	16.845.301,00	0,00	51.408,00
Jumlah	**74.993.763.780,00**	**65.373.052.672,05**	**87,18**	**125.835.555.659,31**	

Lain-lain PAD yang Sah Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp60.462.502.987,26 atau sebesar 48,05% dibandingkan dengan TA 2021. Hal ini sebagian besar adalah kontribusi dari pendapatan BLUD RSUD, jika dibandingkan dengan tahun 2021, realisasi pendapatan BLUD yang besar karena pelayanan Covid-19 yang dibayarkan oleh kementerian kesehatan dengan tarif nilai klaim yang lebih besar daripada tahun 2022. Pada tahun 2022, selain turunnya kasus Covid-19, klaim pelayanan atas pasien Covid-19 dibayarkan sesuai tarif InaCBDS JKN yang nilainya jauh lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2021.

Beberapa penjelasan mengenai realisasi Lain-Lain PAD yang sah adalah sebagai berikut:

1. Atas pendapatan BLUD puskesmas yang telah disetor ke Rekening Kas Umum Daerah sebesar Rp.26.187.000,00 sesuai dengan Berita Acara Rekonsiliasi Keuangan antara Dinas Kesehatan dan Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bangli Nomor: 900/524/Dinkes.V/2022, tanggal 19 Mei 2022, telah dikembalikan ke masing-masing rekening BLUD Puskesmas melalui pemindahbukuan pada tanggal 30 Mei 2022;
2. Realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp. 227.662.899,00 terdiri dari Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin Rp.217.575.899,00 merupakan hasil lelang, dan Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan senilai Rp. 10.087.000,00 adalah hasil penjualan bongkaran bangunan gedung Bhukti Mukti Bhakti dan bongkaran pos jaga permanen;
3. Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp. 81.000.000 merupakan sewa 9 (sembilan) kios pada food court Alun-Alun Kabupaten Bangli;
4. Realisasi Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum sebesar Rp. 46.478.538,80 merupakan Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Denda Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi. Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan sanksi administrasi bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besaran retribusi yang terhutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah sesuai Perda Nomor 25 Tahun 2011;
5. Pendapatan Denda Pajak Daerah dengan realisasi sebesar Rp764.084.308,60 terdiri dari:
   a. Pendapatan Denda Pajak Hotel
      Realisasi pendapatan denda Pajak Hotel sebesar Rp21.342.857,00 (dua puluh satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) diperoleh dari pembayaran denda pajak 32 (tiga puluh dua) WP sepanjang tahun 2022;
   b. Pendapatan Denda Pajak Restoran
      Realisasi pendapatan denda Pajak Restoran sebesar Rp52.562.546,00 (lima puluh dua juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) diperoleh dari pembayaran denda pajak 27 (dua puluh tujuh) WP jenis objek Restoran dan 96 (sembilan puluh enam) jenis objek Rumah Makan dan Sejenisnya sepanjang tahun 2022;
   c. Pendapatan Denda Pajak Air Tanah

Realisasi pendapatan denda Pajak Air Tanah sebesar Rp51.247.055,60,00 (lima puluh satu juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima puluh lima rupiah enam puluh sen) diperoleh dari pembayaran denda pajak 41 (empat puluh satu) WP sepanjang tahun 2022; dan

d. Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
Realisasi pendapatan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebesar Rp638.931.850,00 merupakan denda pajak dari tahun1998 hingga 2022.

		Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
5.1.1.2	**Pendapatan Transfer**	**995.207.663.459,00**	**960.732.038.900,00**	**96,54**	**949.349.146.346,74**

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Transfer yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021 dengan rincian sebagai berikut:

- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	765.766.706.560,00	739.520.744.637,00	96,57	703.032.171.031,00
- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	66.075.718.000,00	66.075.718.000,00	100,00	154.701.450.000,00
- Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	100.289.668.615,00	92.910.305.211,00	92,64	66.727.321.041,74
- Bantuan Keuangan	63.075.570.284,00	62.225.271.052,00	98,65	24.888.204.274,00
Jumlah	**995.207.614.459,00**	**960.732.038.900,00**	**96,76**	**949.349.146.346,74**

Realisasi Pendapatan Transfer TA 2022 sebesar Rp960.732.038.900,00 atau sebesar 96,54% dari anggaran ditetapkan sebesar Rp995.207.614.459,00. Capaian realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Bang 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp11.382.892.553,26 atau sebesar 1,20% dibandingkan dengan TA Pendapatan Transfer tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi s Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

		Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
5.1.1.2.1	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan**	**765.766.706.560,00**	**739.520.744.637,00**	**96,57**	**703.032.171.031,00**

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021, dengan rincian sebagai berikut:

- Pendapatan Bagi Hasil Pajak	17.555.270.560,00	17.740.696.711,00	101,06	23.204.074.660,00
- Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1.958.360.000,00	1.958.360.000,00	100,00	1.674.500.150,00
- Dana Alokasi Umum	525.978.399.000,00	524.703.553.041,00	99,76	525.978.399.000,00
- Dana Alokasi Khusus	220.274.677.000,00	195.118.134.885,00	88,58	152.175.197.221,00
Jumlah	**765.766.706.560,00**	**739.520.744.637,00**	**96,57**	**703.032.171.031,00**

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan TA 2022 sebesar Rp739.520.744.637,00 atau sebesar 96,57% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp765.766.706.560,00 Capaian realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan TA 2022 mengalami kenaikan sebesar

Rp36.488.573.606,00 atau sebesar 5,19% dibandingkan dengan TA 2021. Pendapatan Transfer tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan Pemerintah Pusat sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

		Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
5.1.1.2.1.1	**Pendapatan Bagi Hasil Pajak**	**17.555.270.560,00**	**17.740.696.711,00**	**101,06**	**23.204.074.660,00**

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021, dengan rincian sebagai berikut:

- Bagi Hasil Pajak Penghasilan (Pasal 21, 25 dan 29)	11.909.105.136,00	11.757.114.255,00	98,72	15.634.207.491,00
- Bagi Hasil Pajak Cukai Hasil Tembakau	269.506.151,00	262.501.781,00	97,40	335.254.085,00
- Bagi Hasil PBB	5.376.659.273,00	5.721.080.675,00	106,41	7.234.613.084,00
Jumlah	**17.555.270.560,00**	**17.740.696.711,00**	**101,06**	**23.204.074.660,00**

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2022 sebesar 17.740.696.711,00 atau sebesar 101,06% dari anggaran yang ditetapkan sebesarRp17.555.270.560,00. Capaian realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp5.463.377.949,00 atau sebesar 23,54% dibandingkan dengan TA 2021.

		Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
5.1.1.2.1.2	**Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam**	**1.958.360.000,00**	**1.958.360.000,00**	**100**	**1.674.500.150,00**

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021, dengan rincian sebagai berikut:

- Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	0,00	49.000,00	0,00	0,00
- Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	49.000,00	0,00	0,00	0,00
- Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.958.311.000,00	1.958.311.000,00	100,00	1.674.500.150,00
Jumlah	**1.958.360.000,00**	**1.958.360.000,00**	**100,00**	**1.674.500.150,00**

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam TA 2022 sebesar Rp1.958.360.000,00 atau sebesar 100% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.958.360.000,00. Capaian realisasi Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp283.859.850,00 atau sebesar 16,95% dibandingkan dengan TA 2021

		Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
5.1.1.2.1.3	**Dana Alokasi Umum**	**525.978.399.000,00**	**524.703.553.041,00**	**99,76**	**525.978.399.000,00**

Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2022 sebesar Rp524.703.553.041,00 atau sebesar 99,76% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp525.978.399.000,00.

Adanya pemotongan DAU TA 2022 yang digunakan sebagai penyelesaian kewajiban pembayaran bunga atas pinjaman dalam rangka PEN Tahun 2021 sebesar Rp2.440.504.070,00 sesuai dengan Perjanjian Pemberian Pinjaman pada PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Nomor PERJ-145A/SMI/0921 tanggal 23 September 2021.

Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp1.274.855.959,00 atau sebesar 0,24% dibandingkan dengan TA 2021, hal tersebut disebabkan karena adanya penggantian dana yang bersumber dari APBN yang digunakan untuk dukungan operasional untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dan pendanaan untuk pembayaran insentif atau honor pelaksanaan vaksinasi COVID-19 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebesar Rp405.840.000,00 dan adanya kompensasi atas SiLPA Tahun 2021 dari Dana BOKT sebesar Rp28.818.155,00, Dana BOP PAUD sebesar Rp537.400.000,00, Dana BOP Kesetaraan sebesar Rp74.850.000,00 dan Dana Tunjangan Khusus Guru sebesar Rp228.650.000,00 serta adanya pelampauan Pendapatan sebesar Rp702.196,00.

Untuk DAU TA 2022 diterima berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara TA 2022 pada Lampiran V tentang Rincian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

		Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
5.1.1.2.1.4	**Dana Alokasi Khusus**	**220.274.677.000,00**	**195.118.134.885,00**	**88,58**	**152.175.197.221,00**

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Dana Alokasi Khusus yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Dana Alokasi Khusus - Fisik	**111.442.549.000,00**	**99.489.151.070,00**	**89,27**	**88.363.575.610,00**
- DAK Reguler	107.762.754.000,00	97.129.389.112,00	90,13	55.228.717.991,00
- DAK Penugasan	3.679.795.000,00	2.359.761.958,00	64,13	33.134.857.619,00
Dana Alokasi Khusus – Non Fisik	**108.832.128.000,00**	**95.628.983.815,00**	**87,87**	**63.811.621.611,00**
- Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler	38.773.740.000,00	36.145.918.620,00	93,22	0,00
- Dana Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah (TPG PNSD)	50.558.770.000,00	48.180.645.500,00	95,30	51.972.270.000,00
- Dana Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah (Tamsil Guru PNSD)	2.415.000.000,00	1.092.000.000,00	45,22	326.399.500,00
- Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	0,00	0,00	0,00	0,00
- Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan	2.148.300.000,00	2.079.460.000,00	96,80	1.439.697.000,00

	Pendidikan Usia Dini (BOP PAUD)				
	- Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional KB (BOKB)	2.529.046.000,00	1.511.607.835,00	59,77	1.399.524.906,00
	- Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	8.677.132.000,00	5.034.014.510,00	58,01	6.619.158.985,00
	- Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, UMKM dan Ketenagakerjaan	404.200.000,00	397.353.550,00	98,31	434.740.700,00
	- Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	0,00	0,00	0,00	972.887.520,00
	- Dana Pelayanan Kepariwisataan	935.220.000,00	735.957.000,00	78,69	283.787.000,00
	- Fasilitasi Penanaman Modal	360.216.000,00	309.798.800,00	86,00	171.906.000,00
	- Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	145.500.000,00	142.228.000,00	97,75	191.250.000,00
	- Dana Bantuan Operasional Kesehatan dan Keluarga Berencana (BOKKB) – Pengawasan Obat dan Makanan	198.576.000,00	0,00	0,00	0,00
	- Dana Bantuan Operasional Kesehatan dan Keluarga Berencana (BOKKB) – Akreditasi Puskesmas	1.606.369.000,00	0,00	0,00	0,00
	- Dana Bantuan Operasional Kesehatan dan Keluarga Berencana (BOKKB) – Jaminan Persalinan	80.059.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**220.274.677.000,00**	**195.118.134.885,00**	**88,58**	**152.175.197.221,00**

Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp42.942.937.664,00 atau sebesar 28,22% dibandingkan dengan TA 2021.

		Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
5.1.1.2.2	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya**	**66.075.718.000,00**	**66.075.718.000,00**	**100,00**	**154.701.450.000,00**

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021, dengan rincian sebagai berikut:

- Dana Insentif Daerah	10.515.789.000,00	10.515.789.000,00	100,00	89.588.187.000,00
- Dana Desa	55.559.929.000,00	55.559.929.000,00	100,00	65.113.263.000,00
Jumlah	**66.075.718.000,00**	**66.075.718.000,00**	**100,00**	**154.701.450.000,00**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp88.625.732.000,00 atau sebesar 57,29% dibandingkan dengan TA 2021.

		Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
5.1.1.2.3	**Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya**	**100.289.668.615,00**	**92.910.305.211,00**	**92,64**	**66.727.321.041,74**

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021 berupa Pendapatan Bagi Hasil Pajak, dengan perincian sebagai berikut:

- Pajak Penerimaan Pajak Air Permukaan	137.430.231,00	116.045.810,00	84,44	99.347.108,59
- Pajak Rokok	18.275.232.781,00	20.131.612.015,00	110,16	12.612.127.394,73
- Pajak Kendaraan Bermotor	41.522.602.919,00	38.045.430.667,00	91,63	30.221.428.639,49
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	18.428.933.354,00	16.321.594.428,00	88,57	9.470.913.100,43
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	21.925.469.330,00	18.295.622.291,00	83,44	14.323.504.798,50
Jumlah	**100.289.668.615,00**	**92.910.305.211,00**	**92,64**	**66.727.321.041,74**

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp26.182.984.169,26 atau sebesar 39,24% dibandingkan dengan TA 2021. Pendapatan Bagi Hasil Pajak sangat tergantung dari penerimaan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi Bali.

		Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
5.1.1.2.4	**Bantuan Keuangan**	**63.075.570.284,00**	**62.225.271.052,00**	**98,65**	**24.888.204.274,00**

Jumlah tersebut merupakan Bantuan Keuangan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021 berupa Bantuan Keuangan yang diterima dari Pemerintah Provinsi Bali dengan perincian sebagai berikut:

- Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Bali	63.075.570.284,00	62.225.271.052,00	98,65	24.888.204.274,00
Jumlah	**63.075.570.284,00**	**62.225.271.052,00**	**98,65**	**24.888.204.274,00**

Pendapatan Bantuan Keuangan TA 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp37.337.066.778,00 atau sebesar 1 dibandingkan dengan TA 2021.

		Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
5.1.1.3	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**870.991.000,00**	**702.617.710,00**	**80,67**	**37.397.273.549,00**

Jumlah tersebut merupakan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021 berupa Pendapatan Hibah yang terdiri dari:

- Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	37.397.273.549,00
- Sumbangan Pihak Ketiga/ Sejenisnya	870.991.000,00	702.617.710,00	80,67	0,00
Jumlah	**870.991.000,00**	**702.617.710,00**	**80,67**	**37.397.273.549,00**

Pendapatan Hibah Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp36.694.655.839,00,00 atau sebesar 98,12% dibandingkan dengan TA 2021. Hal ini disebabkan karena TA 2022 tidak ada anggaran dan realisasi Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat. Jumlah realisasi Pendapatan Hibah selama TA 2022 merupakan penerimaan Hibah dari Bank BPD Bali berupa penataan Tapal Batas Bangli-Gianyar.

		Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
5.1.2	**Belanja Daerah**	**1.321.729.701.480,00**	**1.239.853.052.692,60**	**93,81**	**1.108.810.931.922,90**

Jumlah tersebut merupakan Belanja Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021, dengan rincian sebagai berikut:

- Belanja Operasi	864.171.523.836,00	802.381.255.582,79	92,85	771.933.545.742,31
- Belanja Modal	312.893.319.489,00	293.929.282.841,81	93,94	183.280.091.201,59
- Belanja Tak Terduga	3.488.909.075,00	2.430.457.000,00	69,66	3.409.319.517,00
- Belanja Transfer	141.175.949.080,00	141.112.057.268,00	99,95	150.187.975.462,00
Jumlah	**1.321.729.701.480,00**	**1.239.853.052.692,60**	**93,81**	**1.108.810.931.922,90**

Realisasi total Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bangli sebesar Rp1.239.853.052.692,60 atau sebesar 93,81% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.321.729.701.480,00. Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp131.042.120.769,70atau sebesar 11,82% dibandingkan dengan TA 2021.

		Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
5.1.2.1	**Belanja Operasi**	**864.171.523.836,00**	**802.381.255.582,79**	**92,85**	**771.933.545.742,31**

Jumlah tersebut merupakan Belanja Operasi yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direa TA 2021, dengan rincian sebagai berikut:

- Belanja Pegawai	542.479.656.508,00	515.867.247.541,00	95,09	504.713.738.147,38
- Belanja Barang dan Jasa	307.036.954.923,00	273.729.368.016,95	89,15	258.938.376.121,93
- Belanja Bunga	4.845.729.167,00	3.297.019.892,57	68,04	138.750.000,00
- Belanja Hibah	9.547.987.238,00	9.234.589.134,27	96,72	7.904.115.473,00
- Belanja Bantuan Sosial	261.196.000,00	253.030.998,00	96,87	238.566.000,00
Jumlah	**864.171.523.836,00**	**802.381.255.582,79**	**92,85**	**771.933.545.742,31**

Realisasi Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2022 sebesar Rp802.381.255.582,79 atau sebesar 92,81% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp864.171.523.836,00. Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Bangli Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp30.447.709.840,48 atau sebesar 3,94% dibandingkan dengan Tahun 2021. Rincian Belanja Operasi pada masing-masing OPD dapat dilihat pada **lampiran 2**.

		Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
5.1.2.1.1	**Belanja Pegawai**	**542.479.656.508,00**	**515.867.247.541,00**	**95,09**	**504.713.738.147,38**

Jumlah tersebut merupakan Belanja Pegawai yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021, dengan rincian sebagai berikut:

	- Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	317.227.934.804,00	308.846.806.933,00	97,36	306.806.625.114,00
	- Belanja Tambahan Penghasilan ASN	98.496.289.121,00	96.137.888.574,00	97,61	94.907.375.314,00
	- Belanja Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	57.978.642.585,00	50.208.741.600,00	86,60	54.217.060.034,00
	- Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	20.072.818.050,00	19.916.521.806,00	99,22	18.393.640.206,00
	- Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	618.247.409,00	292.692.188,00	47,34	175.267.566,00
	- Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	510.880.000,00	510.480.000,00	99,92	493.830.000,00
	- Belanja Pegawai Dana BOS	7.151.212.000,00	6.844.758.467,00	95,71	5.437.047.713,38
	- Belanja Pegawai BLUD	40.423.632.539,00	33.109.357.973,00	81,91	24.282.892.200,00
	Jumlah	**542.479.656.508,00**	**515.867.247.541,00**	**95,09**	**504.713.738.147,38**

Realisasi Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2022 sebesar Rp515.867.247.541,00 atau sebesar 95,09% dari anggaran sebesar Rp542.479.656.508,00. Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp11.153.509.393,62atau sebesar 2,21% dibandingkan dengan TA 2021.

		Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
5.1.2.1.2	**Belanja Barang dan Jasa**	**307.036.954.923,00**	**273.729.368.016,95**	**89,15**	**258.938.376.121,93**

Jumlah tersebut merupakan Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 sert direalisasikan pada TA 2021, dengan rincian sebagai berikut:

- Belanja Barang	72.509.773.897,00	62.534.463.320,80	86,24	48.212.278.757,60
- Belanja Jasa	147.543.856.090,00	131.340.941.338,00	89,02	141.689.137.903,60
- Belanja Pemeliharaan	6.102.829.217,00	4.655.361.716,89	76,28	2.384.901.781,00
- Belanja Perjalanan Dinas	24.422.627.800,00	23.044.295.375,00	94,36	13.417.982.910,00
- Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	142.850.000,00	125.050.000,00	87,54	139.900.000,00
- Belanja Barang dan Jasa BOS	25.286.546.082,00	22.783.265.312,96	90,10	25.445.249.355,79
- Belanja Barang dan Jasa BLUD	31.028.471.837,00	29.245.990.953,30	94,25	27.648.925.413,94
Jumlah	**307.036.954.923,00**	**273.729.368.016,95**	**89,15**	**258.938.376.121,93**

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2022 sebesar Rp273.729.368.016,95 atau sebesar 89,15% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp307.036.954.923,00.

		Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
5.1.2.1.3	**Belanja Bunga**	**4.845.729.167,00**	**3.297.019.892,57**	**68,04**	**138.750.000,00**
	Jumlah tersebut merupakan Belanja Bunga yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direa TA 2021, dengan perincian sebagai berikut:				
	- Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	4.845.729.167,00	3.297.019.892,57	68,04	138.750.000,00
	Jumlah	**4.845.729.167,00**	**3.297.019.892,57**	**68,04**	**138.750.000,00**

Jumlah tersebut merupakan biaya pengelolaan pinjaman sebesar 0,185% (nol koma satu delapan lima persen) per tahun yang dianggarkan di belanja bunga dan direalisasikan pada TA 2022, sesuai dengan Pasal 5 point 7 Perjanjian Pemberian Pinjaman pada PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Nomor PERJ-145A/SMI/0921 tanggal 23 September 2021 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk pertama kalinya sebesar 0,185% (nol koma satu delapan lima persen) dari Limit Pinjaman, yang dibayarkan selambat-lambatnya sebelum efektifnya Perjanjian;
2. Untuk tahun-tahun berikutnya sebesar 0,185% (nol koma satu delapan lima persen) pertahun dari jumlah baki debet/outstanding/terutang pada tanggal ulang tahun Perjanjian, yang dibayarkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal ulang tahun Perjanjian yang berkenaan.

		Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
5.1.2.1.4	**Belanja Hibah**	**9.547.987.238,00**	**9.234.589.134,27**	**96,72**	**7.904.115.473,00**
	Jumlah tersebut merupakan Belanja Hibah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021, dengan perincian sebagai berikut:				
	- Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	175.000.000,00	175.000.000,00	100,00	0,00
	- Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	8.600.520.000,00	8.287.121.896,27	96,36	7.131.648.235,00
	- Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	772.467.238,00	772.467.238,00	100,00	772.467.238,00
	- Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**9.547.987.238,00**	**9.234.589.134,27**	**96,72**	**7.904.115.473,00**

Realisasi Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2022 sebesar Rp9.234.589.134,27 atau sebesar 96,72% dari yang dianggarkan sebesar Rp9.547.987.238,00.

Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp1.330.473.661,27,00 atau sebesar 16,83% dibandingkan dengan TA 2021. Kenaikan belanja hibah disebabkan karena pada TA 2022 adanya pengalokasian belanja hibah uang kepada Pemerintah Pusat. Jumlah Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik merupakan bantuan keuangan kepada partai politik yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bangli. Untuk TA 2022, pemberian bantuan keuangan didasarkan kepada Keputusan Bupati Bangli Nomor 210/44/2022 tanggal 12 Januari 2022 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2022. Besar nilai bantuan yang diterima oleh masing-masing partai politik sebagai berikut:

(*dalam rupiah*)

No	Partai Politik	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	395.422.596,00	395.422.596,00
2	Partai Golongan Karya	129.986.758,00	129.986.758,00
3	Partai Demokrat	97.677.046,00	97.677.046,00
4	Partai Hati Nurani Rakyat	47.922.978,00	47.922.978,00
5	Partai Nasional Demokrat	41.893.276,00	41.893.276,00
6	Partai Gerakan Indonesia Raya	31.732.016,00	31.732.016,00
7	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	27.832.568,00	27.832.568,00
Jumlah		**772.467.238,00**	**772.467.238,00**

		Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
5.1.2.1.5	**Belanja Bantuan Sosial**	**261.196.000,00**	**253.030.998,00**	**96,87**	**238.566.000,00**
	Jumlah tersebut merupakan Belanja Bantuan Sosial kepada Individu yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021, dengan perincian sebagai berikut:				
	- Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Individu	252.696.000,00	246.096.000,00	97,39	219.996.000,00
	- Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakn kepada individu	8.500.000,00	6.934.998,00	81,59	18.570.000,00
	- Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00,00
	Jumlah	**261.196.000,00**	**253.030.998,00**	**96,87**	**238.566.000,00**

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2022 sebesar Rp253.030.998,00 atau sebesar 96,87% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp261.196.000,00. Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp14.464.998,00 atau sebesar 6,06% dibandingkan dengan TA 2021. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu berupa Bantuan Siswa Miskin (BSM), hadiah siswa dalam rangka Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD dan SMP, bantuan alat bantu kepada penyandang disabilitas. Belanja Bantuan Sosial di TA 2022 dianggaran dan realisasikan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Bangli dan Dinas Sosial Kab. Bangli.

		Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
5.1.2.2	**Belanja Modal**	**312.893.319.489,00**	**293.929.282.841,81**	**93,94**	**183.280.091.201,59**
	Jumlah tersebut merupakan Belanja Modal yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021, dengan rincian sebagai berikut:				
	- Belanja Modal Tanah	14.393.673.100,00	14.134.423.669,00	98,20	0,00
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	66.300.747.644,00	60.358.662.837,00	91,04	40.977.923.944,00
	- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	185.928.218.376,00	180.104.496.229,81	96,87	89.033.687.223,59
	- Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	44.494.451.733,00	37.746.357.806,00	84,83	49.366.499.234,00
	- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.776.228.636,00	1.585.342.300,00	89,25	3.901.980.800,00
	- Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**312.893.319.489,00**	**293.929.282.841,81**	**93,94**	**183.280.091.201,59**

Realisasi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2022 sebesar Rp293.929.282.841,81 atau sebesar 93,94% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp312.893.319.489,00. Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp110.649.191.640,22atau sebesar 60,37% dibandingkan dengan TA 2021. Kenaikan Belanja Modal tersebut disebabkan karena arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bangli masih dititik beratkan pada peningkatan infrastruktur dalam rangka meningkatkan pelayanan publik sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bangli yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Bangli, sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2021-2026.

		Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
5.1.2.2.1	**Belanja Modal Tanah**	**14.393.673.100,00**	**14.134.423.669,00**	**98,20**	**0,00**
	Jumlah tersebut merupakan Belanja Modal Tanah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021.				

Belanja Modal Tanah TA 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp14.134.423.669,00 atau sebesar 100% dibandingkan dengan TA 2021. Hal tersebut diakibatkan adanya pengadaan tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olah Raga pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangli.

		Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
5.1.2.2.2	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**66.300.747.644,00**	**60.358.662.837,00**	**91,04**	**40.977.923.944,00**
	Jumlah tersebut merupakan Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021, dengan rincian sebagai berikut:				
	- Pengadaan Alat Besar	2.935.068,00	2.259.000,00	76,97	839.300.000,00
	- Pengadaan Alat Angkutan	1.205.000.000,00	302.000.000,00	25,06	6.277.240.563,00
	- Pengadaan Alat Bengkel dan Alat Ukur	165.154.750,00	146.736.640,00	88,85	35.708.000,00
	- Pengadaan Alat Pertanian	145.000.000,00	136.974.000,00	94,46	1.000.000,00

- Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.473.664.306,00	3.684.740.327,00	82,37	9.364.279.838,00
- Pengadaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	3.028.080.000,00	2.962.003.299,00	97,82	944.631.110,00
- Pengadaan Alat Kedokteran dan Kesehatan	26.611.609.788,00	23.898.363.582,00	89,80	13.613.714.469,00
- Pengadaan Alat Laboratorium	2.859.940.000,00	2.634.784.397,00	92,13	206.105.118,00
- Pengadaan Komputer	27.446.046.732,00	26.295.297.301,00	95,81	9.357.008.746,00
- Pengadaan Alat Eksplorasi	9.000.000,00	3.413.250,00	37,93	0,00
- Pengadaan Alat Keselamatan Kerja	198.300.000,00	186.904.999,00	94,25	13.400.000,00
- Pengadaan Rambu-rambu	156.017.000,00	105.186.042,00	67,42	227.604.600,00
- Pengadaan Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00	97.931.500,00
Jumlah	**66.300.747.644,00**	**60.358.662.837,00**	**91,04**	**40.977.923.944,00**

Realisasi Belanja Modal peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2022 sebesar Rp60.358.662.837,00 atau sebesar 91,04% dari anggaran sebesar Rp66.300.747.644,00. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp19.380.738.893,00 atau sebesar 47,30% dibandingkan dengan TA 2021. Kenaikan Belanja Modal Peralatan dan Mesin disebabkan karena arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bangli lebih besar mengarah pada peningkatan infrastruktur sehingga dibutuhkan sarana dan prasarana penunjang infrastruktur dalam rangka meningkatkan pelayanan publik sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bangli yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Bangli, sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2021-2026.

Beberapa hal yang menjelaskan realisasi belanja modal masih jauh di bawah target yaitu, Belanja modal Pengadaan Alat Eksplorasi pada tahun 2022 terealisasi 37,93% merupakan pengadaan pada BLUD Puskesmas. Nilai realisasi tersebut disebabkan karena pada e-Katalog tidak ditemukan barang dengan spesifikasi yang telah direncanakan, selain hal tersebut dengan keterbatasan waktu, maka pengadaan dilakukan dengan membeli produk yang sesuai dengan harga yang lebih murah dengan spesifikasi yang sama.

		Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
5.1.2.2.3	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**	**185.928.218.376,00**	**180.104.496.229,81**	**96,87**	**89.033.687.223,59**

Jumlah tersebut merupakan Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang dianggarkan dan direalisasikan pada ' yang direalisasikan pada TA 2021, dengan rincian sebagai berikut:

- Pengadaan Bangunan Gedung.	185.047.227.376,00	179.392.422.519,81	96,94	88.953.707.223,59
- Pengadaan Tugu Titik Kontrol/Pasti	880.991.000,00	712.073.710,00	80,83	79.980.000,00
Jumlah	**185.928.218.376,00**	**180.104.496.229,81**	**96,87**	**89.033.687.223,59**

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2022 sebesar Rp180.104.496.229,81 atau sebesar 96,87% dari yang dianggarkan sebesar Rp185.928.218.376,00.

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp91.070.809.006,22 atau sebesar 102,29% dibandingkan dengan TA 2021. Kenaikan Belanja Modal Gedung dan Bangunan disebabkan karena arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bangli masih dititik beratkan pada peningkatan infrastruktur dalam rangka meningkatkan pelayanan publik sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bangli yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Bangli, sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2021-2026.

		Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
5.1.2.2.4	**Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan**	**44.494.451.733,00**	**37.746.357.806,00**	**84,83**	**49.366.499.234,00**

Jumlah tersebut merupakan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021, dengan rincian sebagai berikut:

- Pengadaan Jalan dan Jembatan	43.506.206.000,00	37.013.080.394,00	85,08	41.924.783.550,00
- Pengadaan Bangunan Air	456.703.333,00	321.342.750,00	70,36	6.589.432.109,00
- Pengadaan Instalasi	210.000.000,00	207.910.662,00	99,01	127.720.000,00
- Pengadaan Jaringan	321.542.400,00	204.024.000,00	63,45	724.563.575,00
Jumlah	**44.494.451.733,00**	**37.746.357.806,00**	**84,83**	**49.366.499.234,00**

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2022 sebesar Rp37.746.357.806,00 atau sebesar 84,83% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp44.494.451.733,00.

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp11.620.141.428,00 atau sebesar 23,54% dibandingkan dengan TA 2021.

Pada Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringanada beberapa kegiatan yang realisasinya di bawah anggaran yaitu:

Pengadaan Bangunan Air pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Permukiman, realisasi menurun sebesar 95,12% dari realisasi TA 2021. Hal ini disebabkan karena pendanaan pada tahun 2021 lebih besar yaitu berasal dari DAK dan APBS, sedangkan untuk tahun 2022 pendanaan hanya dari APBD. Realisasi sebesar 70,36% diakibatkan karena penawaran kegiatan di bawah 80% sehingga terjadi efisiensi pada belanja pengadaan bangunan air.

Realisasi Pengadaan Jaringan hanya 63,45% merupakan kontribusi dari belanja modal jaringan pada Rumah Sakit Umum Daerah yang tidak direalisasikan sebesar Rp.100.000.000,00. Sesuai dengan *Master Plan* RSU Bangli Tahun 2021, dilakukan revitalisasi seluruh bangunan gedung secara bertahap dimulai dengan gedung IA dan IB RSU Bangli pada tahun 2021 dan 2022. Sepanjang tahun 2022 pagu anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi tidak terserap, hal inidikarenakan seluruh belanja dioptimalkan untuk operasional pelayanan. Mengoptimalkan pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilaksanakan secara swakelola, terkait hal ini dilaksanakan oleh Instalasi Prasaran dan Sarana Rumah Sakit (IPSRS).

		Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
5.1.2.2.5	**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**	**1.776.228.636,00**	**1.585.342.300,00**	**89,25**	**3.901.980.800,00**

Jumlah tersebut merupakan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2 direalisasikan pada TA 2021, dengan rincian sebagai berikut:

- Pengadaan Bahan Perpustakaan	164.111.025,00	64.346.700,00	39,21	143.028.400,00

- Pengadaan Biota Perairan	77.000.000,00	43.800.000,00	56,88	0,00
- Pengadaan Tanaman	600.000.000,00	595.914.000,00	99,32	197.384.000,00
- Pengadaan Aset Tidak Berwujud	935.117.611,00	881.281.600,00	94,24	3.561.568.400,00
Jumlah	**1.776.228.636,00**	**1.585.342.300,00**	**89,25**	**3.901.980.800,00**

Realisasi Belanja Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2022 sebesar Rp1.585.342.300,00 atau sebesar 89,25% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.776.228.636,00.

Belanja Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp2.316.638.500,00atau sebesar 59,37% dibandingkan dengan TA 2021. Penurunan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya disebabkan berkurangnya anggaran dan realisasi terutama pada Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebesar 75,26% dari TA 2021 salah satunya untuk pengadaan Software/Aplikasi.

Beberapa hal yang menjelaskan realisasi belanja:

1. Untuk Pengadaan Biota Perairan pada tahun 2022 tercapai realisasi hanya 56,88%. Hal ini disebabkan karena dari 3 (tiga) item pengadaan calon induk ikan pada Dinas Pertanian, Ketahan Pangan dan perikanan, 1 (satu) item yaitu pengadaan calon induk ikan mas tidak dapat diadakan karena rekanan tidak dapat memenuhi spesifikasi serta terjadinya kenaikan harga pada saat pengadaann; dan
2. Untuk pengadaan Bahan Perpustakaan pada tahun 2022 tercapai realisasi hanya 39,21%. Hal ini merupakan kontribusi dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dimana disebabkan oleh pengurangan dana salur dari RKUN ke satuan pendidikan. Besaran pagu dana BOS sesuai PMK adalah Rp38.773.740.000,- sedangkan yang disalurkan sebesar Rp36.493.793.753 dikarenakan adanya saldo akhir tahun 2021 di satuan pendidikan. Pengurangan dana salur RKUN dimaksud menyebabkan kegiatan yang semula dianggarkan pada aset tetap tidak dapat direalisasikan sesuai rencana, sehingga menyebabkan realisasi kegiatan dimaksud di bawah 50%.

Rincian belanja modal per masing-masing OPD dapat dilihat pada **lampiran 3**.

		Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
5.1.2.3	**Belanja Tak Terduga**	**3.488.909.075,00**	**2.430.457.000,00**	**69,66**	**3.409.319.517,00**

Realisasi Belanja Tak Terduga sebesar Rp2.430.457.000,00 (69,66%) dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp3.488.909.075,00 dengan rincian penggunaan adalah untuk penganan *COVID-19* sebesar Rp635.969.000,00, penanganan dampak *COVID-19* sebesar Rp201.458.000,00, penanganan dampak inflasi sebesar Rp46.080.000,00, dan Bantuan Langsung Tunai sebesar Rp1.546.950.000,00.

		Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
5.1.3	**Belanja Transfer**	**141.175.949.080,00**	**141.112.057.268,00**	**99,95**	**150.187.975.462,00**

Jumlah tersebut merupakan Transfer yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021, dengan rincian sebagai berikut:

- Belanja Transfer Bagi Hasil Pendapatan	6.711.232.500,00	6.717.100.000,00	100,09	3.410.243.000,00
- Belanja Transfer Bantuan Keuangan	134.464.716.580,00	134.394.957.268,00	99,95	146.777.732.462,00
Jumlah	**141.175.949.080,00**	**141.112.057.268,00**	**99,95**	**150.187.975.462,00**

Belanja Transfer Pemerintah Kabupaten Bangli Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp9.075.918.194,(6,04% dibandingkan dengan Tahun 2021.

		Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
5.1.3.1	**Belanja Transfer Bagi Hasil Pendapatan**	**6.711.232.500,00**	**6.717.100.000,00**	**100,09**	**3.410.243.000,00**
	Jumlah tersebut merupakan Transfer Bagi Hasil Pendapatan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021, dengan rincian sebagai berikut:				
	- Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Desa	2.186.235.000,00	2.192.139.000,00	100,27	1.573.650.000,00
	- Belanja Bagi Hasil Pendapatan Lainnya (Retribusi Daerah kepada Desa)	4.524.997.500,00	4.524.961.000,00	100,00	1.836.593.000,00
	Jumlah	**6.711.232.500,00**	**6.717.100.000,00**	**100,09**	**3.410.243.000,00**

Jumlah tersebut sesuai Peraturan Bupati Bangli Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pengalokasian Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Kepada Desa dan Peraturan Bupati Bangli Nomor 31 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangli Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pengalokasian Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Kepada Desa. Anggaran Belanja Transfer Bagi Hasil Pendapatan Tahun Anggaran 2022yaitu sebesar 10% dari Anggaran Pendapatan Pajak Daerah dan Pendapatan Retribusi Daerah.Realisasi Belanja Bagi Hasil Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp3.306.857.000,00 atau sebesar 96,97% dibandingkan dengan TA 2021.

		Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
5.1.3.1.1	**Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Desa**	**2.186.235.000,00**	**2.192.139.000,00**	**100,27**	**1.573.650.000,00**

Jumlah tersebut merupakan Transfer Bagi Hasil Pajak yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021. Transfer Bagi Hasil Pajak TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp618.489.000,00 atau sebesar 39,30% jika dibandingkan dengan TA 2021. Realisasi Belanja Transfer Bagi Hasil kepada desa melebihi anggaran yaitu sebesar 100,27%, hal ini disebabkan karena adanya kelebihan merealisasikan belanja pada Desa Abang Batudinding, Kecamatan Kintamani sebesar Rp5.947.000,00 dan kekurangan merealisasikan belanja pada Desa Undisan, Kecamatan Susut sebesar Rp43.000,00. Hal tersebut tidak sesuai dengan Lampiran I Peraturan Bupati Bangli Nomor 31 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangli Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pengalokasian Bagian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa, dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Desa	Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak kepada Desa				
		Pagu	Realisasi			Selisih
			Tahap I	Tahap II	Jumlah Realisasi	
1	Desa Abang Batudinding, Kec. Kintamani	33.501.000,00	13.278.000,00	26.170.000,00	39.448.000,00	5.947.000,00
2	Desa Undisan, Kec. Tembuku	30.526.000,00	12.145.500,00	18.337.500,00	30.483.000,00	(43.000,00)
			Jumlah			**5.904.000,00**

Hal ini dapat dijelaskan:

1. Pagu Anggaran Dana Bagi Hasil pajak untuk Desa Abang Batu Dinding sesuai dengan Dokumen pelaksanaan Anggaran adalah sebesar Rp.33.501.000,00 dan terealisasi sebesar Rp39.448.000,00 sehingga adanya kelebihan merealisasikan sebesar Rp5.947.000,00

a) Amprah Tahap I sudah direalisasikan sebesar Rp13.278.000,00 dengan Nomor SP2D 01001/SP2D/5-02.0.00.0-00.4.0.1/2022 tertanggal 24 Maret 2022;
b) Amprah tahap II sudah direalisasikan sebesar Rp26.170.000,00 dengan nomor SP2D 11657/SP2D/5-02.0.00.0-00.4.0.1/2022 tanggal 14 Nopember 2022.

2. Pagu Anggaran Dana Bagi Hasil pajak untuk Desa Undisan, Kecamatan Tembuku sesuai dengan Dokumen pelaksanaan Anggaran adalah sebesar Rp.30.526.000,00 dan terealisasi sebesar Rp30.483.000,00 sehingga adanya kekurangan merealisasikan sebesar Rp43.000,00.
   a) Amprah Tahap I sudah dilakukan sebesar Rp12.145.500,00 dengan Nomor SP2D 01010/SP2D/5-02.0.00.0-00.4.0.1/2022 tertanggal 24 Maret 2022;
   b) Amprah tahap II sudah direalisasikan sebesar Rp18.337.500,00 dengan nomor SP2D 11687/SP2D/5-02.0.00.0-00.4.0.1/2022 tanggal 14 Nopember 2022.

Adapun kelebihan amprah tersebut terjadi karena memang faktor kelalaian dari petugas verifikasi pada PPKD, kurang ketelitian dari mulai dari tenaga pemeriksa dokumen, PPTK dan juga PPK SKPD dan atas kelebihan tersebut sudah dikembalikan ke Kas Daerah tanggal 20 Februari 2023.

		Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
5.1.3.1.2	**Belanja Bagi Hasil Pendapatan Lainnya (Retribusi Daerah kepada Desa)**	**4.524.997.500,00**	**4.524.961.000,00**	**100,00**	**1.836.593.000,00**

Jumlah tersebut merupakan Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021. Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp2.688.368.000,00atau sebesar 146,38% jika dibandingkan dengan TA 2021.

		Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
5.1.3.2	**Belanja Bantuan Keuangan**	**134.464.716.580,00**	**134.394.957.268,00**	**99,95**	**146.777.732.462,00**

Jumlah tersebut merupakan Transfer Bantuan Keuangan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021, dengan rincian sebagai berikut:

- Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	134.464.716.580,00	134.394.957.268,00	99,95	146.777.732.462,00
Jumlah	**134.464.716.580,00**	**134.394.957.268,00**	**99,95**	**146.777.732.462,00**

Belanja Transfer Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp12.382.775,194,00 atau sebesar 8,44% dibandingkan dengan TA 2021. Hal ini disebabkan adanya rasionalisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Desa pada TA 2022.

		Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
5.1.3.2.1	**Belanja Bantuan Keuangan ke Desa**	**134.464.716.580,00**	**134.394.957.268,00**	**99,95**	**146.777.732.462,00**

Jumlah tersebut merupakan Transfer Bantuan Keuangan ke Desa yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021, dengan rincian sebagai berikut:

- Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Desa	127.879.456.580,00	127.877.985.470,00	100,00	134.105.962.098,00

	- Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa	6.585.260.000,00	6.516.971.798,00	98,96	12.671.770.364,00
	Jumlah	**134.464.716.580,00**	**134.394.957.268,00**	**99,95**	**146.777.732.462,00**

Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa tahun 2022 tersebut terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Alokasi Dana Desa	72.319.527.580,00	72.318.056.470,00
2	Dana Desa	55.559.929.000,00	55.559.929.000,00
3	BKK Bantuan Desa Pekraman	105.000.000,00	105.000.000,00
4	BKK Bantuan Banjar Adat	3.340.000.000,00	3.330.000.000,00
5	BKK BPJS Kesehatan Perangkat Desa	1.087.260.000,00	1.058.971.798,00
6	BKK Hadiah Lomba Desa	75.000.000,00	75.000.000,00
7	BKK Insentif Bendesa Adat	966.000.000,00	957.000.000,00
8	BKK Insentif Kelian Banjar Adat	1.002.000.000,00	981.000.000,00
9	BKK Bantuan Subak	10.000.000,00	10.000.000,00
Jumlah		**134.464.716.580,00**	**134.394.957.268,00**

Rincian laporan dana desa dapat dilihat pada **lampiran 4.**

		Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
5.1.4	**Pembiayaan**	**178.524.630.492,00**	**175.295.260.106,06**	**98,25**	**75.735.976.450,85**
	Jumlah tersebut merupakan Pembiayaan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021, dengan rincian sebagai berikut:				
	- Penerimaan Pembiayaan	181.524.630.492,00	178.295.260.106,06	98,22	75.735.976.450,85
	- Pengeluaran Pembiayaan	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	**178.524.630.492,00**	**175.295.260.106,06**	**98,25**	**75.735.976.450,85**

		Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
5.1.4.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**181.524.630.492,00**	**178.295.260.106,06**	**98,22**	**75.735.976.450,85**
	Jumlah tersebut merupakan Penerimaan Pembiayaan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021, dengan perincian sebagai berikut:				
	- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	117.208.560.192,00	117.202.607.549,06	99,99	65.052.046.750,85
	- Penerimaan Pinjaman Daerah	64.316.070.300,00	61.092.652.557,00	94,99	10.683.929.700,00
	Jumlah	**181.524.630.492,00**	**178.295.260.106,06**	**98,22**	**75.735.976.450,85**

		Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
5.1.4.1.1	**Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**	**117.208.560.192,00**	**117.202.607.549,06**	**99,99**	**65.052.046.750,85**

Jumlah tersebut merupakan Penggunaan SILPA Tahun Sebelumnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 202.

		Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
5.1.4.1.2	**Penerimaan Pinjaman Daerah**	**64.316.070.300,00**	**61.092.652.557,00**	**94,99**	**10.683.929.700,00**

Jumlah tersebut merupakan Penerimaan Pinjaman Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 bersumber dari PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Nomor : PERJ.-145A/SMI/0921 tanggal 23 September 2021, nama Pinjaman PEN Daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan gedung RSUD Bangli dan di tahun 2022 sudah direalisasikan untuk pembayaran tahap I dan Tahap II sebesar Rp61.092.652.557,00

		Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
5.1.4.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**3.000.000.000,00**	**3.000.000.000,00**	**100,00**	**0,00**

Jumlah tersebut merupakan Pengeluaran Pembiayaan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021, berupa penyertaan modal daerah pada BUMD Tahun 2022.

		Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
5.1.5	**Sisa Lebih/ (Kurang) Perhitungan Anggaran**	**0,00**	**43.079.501.852,96**	**0,00**	**117.208.560.191,51**

Jumlah tersebut merupakan Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021, dengan rincian sebagai berikut:

- Kas di Kas Daerah	35.085.330.183,85	58.212.830.752,33
- Kas di Bendahara Penerimaan	398.411.000,00	51.528.600,00
- Kas di Bendahara Pengeluaran	54.916.900,00	0,00
- Kas di Bendahara BLUD Puskesmas	1.505.055.748,48	3.909.741.517,21
- Kas di Bendahara BLUD RSUD Bangli	3.116.826.347,75	54.323.932.097,68
- Kas di Bendahara BOS	722.912.155,88	711.610.259,29
- Hutang PFK Dana BOS 2020	(745.454,00)	(745.454,00)
- Hutang PFK Dana BOS 2021	0,00	(337.581,00)
Jumlah	**40.882.706.881,96**	**117.208.560.191,51**

Rincian SiLPA Tahun 2022 sebesar Rp40.882.706.881,96 termasuk di dalamnya Utang Kelebihan Transfer merupakan kelebihan transfer atas klaim pembayaran pasien *COVID*-19 dari Kemenkes sebesar Rp.5.924.329.120,00 pada Rumah Sakit Umum.

Pemerintah Kabupaten Bangli memiliki SiLPA sebesar Rp40.882.706.881,96 yang terdiri dari Silpa Terikat dan SiLPA Non-Terikat yang dapat diuraikan sebagai berikut:

URAIAN	NILAI
Dana SILPA Terikat	
Kas di BLUD	3.116.826.347,75
Kas Dana BOS	722.912.155,88
Kas Dana BLUD Puskesmas	1.505.055.748,48

Kas Bendahara Penerimaan		398.411.000,00
Kas Bendahara Pengeluaran		54.916.900,00
Hutang PFK Dana BOS 2020		(745.454,00)
DID Reguler		765.844.421,00
DAK Fisik yang terdiri dari		
DAK bidang pendidikan PAUD	152.000,00	
DAK bidang pendidikan SD	16.466.400,00	
DAK bidang pendidikan SMP	17.247.000,00	
DAK bidang Kesehatan penguatan sistem Kesehatan	55.500,00	
DAK bidang Keluarga Berencana	520.000,00	
DAK bidang Jalan	30.000,00	
DAK bidang air minum	648.400,00	
DAK bidang sanitasi	1.110.000,00	
DAK bidang perumahan dan pemukiman	93.000,00	
		36.322.300,00
DAK Non-Fisik yang terdiri dari		
Dana Tunjangan Profesi Guru	520.017.300,00	
Dana Tunjangan Penghasilan Guru	244.000.000,00	
Bantuan Operasional Kesehatan	1.625.178.886,00	
Bantuan Operasional Keluarga Berencana	1.122.709.117,00	
Dana Peningkatan Kapasitas UMKM	4.756.350,00	
Dana Pelayanan Kepariwisataan	401.277.600,00	
Dana Fasililitas Penanaman Modal	98.509.400,00	
Dana Kesehatan Pangan dan Pertanian	3.604.000,00	
		4.020.052.653,00
BKK Provinsi Bali		
Bantuan Keuangan Subak dan Subak Abian se-Bali	10.000.000,00	
BKK Tim Penggerak PKK untuk Kabupaten/Kota	10.793.600,00	
		20.793.600,00
Utang Belanja Pegawai tahun 2022		13.485.113.161,00
Utang Belanja Jasa tahun 2022		8.793.417.828,77
Utang Belanja Transfer		43.000,00
Jumlah Dana SILPA TERIKAT		**35.115.758.632,88**
Dana SILPA Non-Terikat		
Lain-lain		7.963.743.220,08
Jumlah Dana SILPA Non-Terikat		**7.963.743.220,08**
SiLPA		**40.882.706.881,96**

Jumlah SiLPA tersebut di atas tidak sama dengan nilai Saldo Kas Akhir dalam LAK sebagaimana dijelaskan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LAK pada Poin 5.5.9 dan juga telah sama dengan Saldo Anggaran Lebih Akhir sebagaimana dijelaskan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LP SAL pada **Poin 5.2.3** dan **Poin 5.2.5**. Perbedaan tersebut dikarenakan adanya Kas Lainnya, berupa kas penangan bencana dan *COVID-19* sebesar Rp1.587.541.478,39 dan Utang Perhitungan Fihak Ketiga sebesar Rp745.454,00.

5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

LP SAL merupakan laporan yang menyajikan gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. LP SAL Pemerintah Kabupaten Bangli (dalam satuan mata uang rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

		Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.2.1	**Saldo Anggaran Lebih Awal**	**117.208.560.191,51**	**65.112.931.141.46**

Jumlah tersebut merupakan saldo SiLPA Pemerintah Kabupaten Bangli pada TA 2022 dan 2021, yang terdiri dari:

- Kas di Kas Daerah	58.212.830.752,33	50.242.780.570,15
- Kas di Bendahara Penerimaan	51.528.600,00	242.260.422,00
- Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
- Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN	3.909.741.517,21	4.644.364.346,81
- Kas di Bendahara BLUD RSUD Bangli	54.323.932.097,68	6.710.966.746,25
- Kas di Bendahara BOS	711.610.259,29	3.272.559.056.25
- Hutang PFK Dana BOS 2020	(745.4540,00)	0,00
- Hutang PFK Dana BOS 2021	(337.581,00)	0,00
Jumlah	**117.208.560.191,51**	**65.112.931.141,46**

		Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.2.2	**Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan**	**117.202.607.549,06**	**65.052.046.750,85**

Jumlah tersebut merupakan saldo SiLPA Pemerintah Kabupaten Bangli pada TA 2022 dan 2021 ditambah dan dikurangi dengan koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya yang dialokasikan sebagai penerimaan pembiayaan pada TA 2022 dan 2021 dan digunakan seluruhnya dalam kegiatan operasional serta pembiayaan Pemerintah Kabupaten Bangli selama TA 2022 dan 2021.

		Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.2.3	**Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)**	**40.882.706.881,96**	**117.208.560.191,51**

Jumlah tersebut merupakan SiLPA dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Bangli pada TA 2022 dan 2021. Jumlah tersebut sama dengan jumlah SiLPA pada tahun anggaran berkenaan

		Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.2.4	**Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya**	**(5.952.642,45)**	**(60.884.390,61)**

Jumlah tersebut merupakan koreksi kesalahan pembukuan pada tahun sebelumnya pada saldo kas pada bendahara BOS, yaitu pengurangan sebesar Rp5.952.642,45 yang berakibat pada penyajian jumlah kas awal tahun pada Neraca dan SiLPA dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Bangli pada TA 2022. Koreksi tersebut terdiri dari:

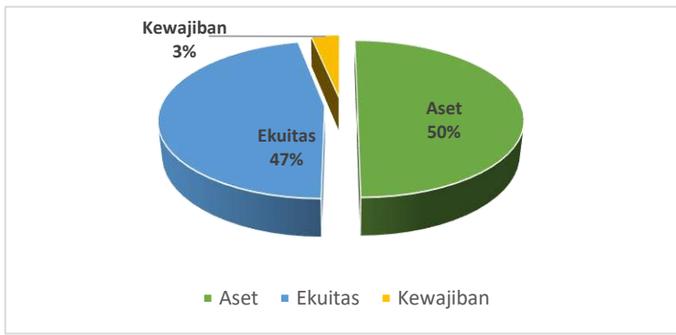
- Koreksi SiLPA karena utang pajak PPN SDN 5 Yang Api sudah dibayarkan tahun 2021	337.581,00	
- Koreksi SiLPA atas Pendapatan Bunga Kas BOS TA 2022	(37.399,75)	
- Koreksi SiLPA atas Kas BOS karena sekolah tutup (SDN 3 Dausa)	(6.211.471,68)	
- Koreksi SiLPA atas Pendapatan Bunga BOS Tahun 2020	(41.352,02)	
Jumlah	**(5.952.642,45)**	

		Tahun 2022 (Rp)	**Tahun 2021 (Rp)**
5.2.5	**Saldo Anggaran Lebih Akhir**	**40.882.706.881,96**	**117.208.560.191,51**
	Jumlah tersebut merupakan Saldo Anggaran Lebih Akhir Pemerintah Kabupaten Bangli pada TA 2022 dan 2021. Jumlah tersebut terdiri dari:		
	- Kas di Kas Daerah	35.085.330.183,85	58.212.830.752,33
	- Kas di Bendahara Penerimaan	398.411.000,00	51.528.600,00
	- Kas di Bendahara Pengeluaran	54.916.900,00	0,00
	- Kas di Bendahara BLUD Puskesmas	1.505.055.748,48	3.909.741.517,21
	- Kas di Bendahara BLUD RSUD Bangli	3.116.826.347,75	54.323.932.097,68
	- Kas di Bendahara BOS	722.912.155,88	711.610.259,29
	- Hutang PFK Dana BOS 2020	(745.454,00)	(745.454,00)
	- Hutang PFK Dana BOS 2021	0,00	(337.581,00)
	Jumlah	**40.882.706.881,96**	**117.208.560.191,51**

Saldo anggaran lebih akhir yang disajikan dalam CaLK Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih **sama besarnya** dengan yang disajikan dalam CaLK Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana dijelaskan pada ***poin 5.1.5***.

5.3 Penjelasan atas Pos-Pos Neraca

Neraca Pemerintah Kabupaten Bangli terdiri dari pos-pos yang menggambarkan kondisi mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca menunjukkan aset diperoleh dengan bersumber dari dana yang berasal dari kewajiban dan kekayaan sendiri atau ekuitas. Neraca Pemerintah Kabupaten Bangli untuk per tanggal 31 Desember 2022 secara umum digambarkan sebagai berikut:



Secara lebih rinci, Neraca Pemerintah Kabupaten Bangli per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dalam satuan mata uang rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

		31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	%
5.3.1	**Aset**	**1.517.960.855.187,34**	**1.385.330.610.911,74**	**132.630.244.275,60**	**9.57**
	Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut:				
	Aset Lancar	108.732.696.272,71	178.949.771.262,04	(70.217.074.989,33)	(39,24)
	Investasi Jangka Panjang	68.396.974.646,40	61.860.525.954,29	6.536.448.692,11	10,57
	Aset Tetap	1.322.302.236.652,85	1.131.812.237.421,41	190.489.999.231,44	16,83
	Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aset Lainnya	18.528.947.615,38	12.708.076.274,00	5.820.571.341,38	45,80
	Jumlah	**1.517.960.855.187,34**	**1.385.330.610.911,74**	**132.630.244.275,60**	**9,57**

		31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	%
5.3.1.1	**Aset Lancar**	**108.732.696.272,71**	**178.949.771.262,04**	**(70.217.074.989,33)**	**(39,24)**
	Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut:				
	Kas dan Setara Kas	42.470.903.814,35	1117.209.643.226,51	(74.738.739.412,16)	(63,77)
	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00
	Piutang Pendapatan	72.851.042.796,00	59.773.327.434,98	13.077.715.361,02	21,88
	Piutang Lainnya	0,00	10.456.764.213,91	(10.456.764.213,91)	(100,00)
	Penyisihan Piutang	(27.854.226.847,91)	(25.379.536.032,21)	(2.474.690.815,70)	9,75
	Beban Dibayar Dimuka	511.080.692,61	347.444.355,56	163.636.337,05	47,10
	Persediaan	20.829.126.649,81	16.542.128.063,29	4.286.998.586,52	25,92

	Jumlah	**108.732.696.272,71**	**178.949.771.262,04**	**(70.141.844.157,18)**	**(39,20)**

		31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	%
5.3.1.1.1	**Kas dan Setara Kas**	**42.470.903.814,35**	**117.209.643.226,51**	**(74.738.739.412,16)**	**(63,77)**

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas dan Setara Kas Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Kas di Kas Daerah	35.085.330.183,85	58.212.830.752,33	(23.127.500.568,48)	(39,73)
Kas di Bendahara Penerimaan	398.411.000,00	51.528.600,00	346.882.400,00	673,18
Kas di Bendahara Pengeluaran	54.916.900,00	0,00	54.916.900,00	100,00
Kas di BLUD RSUD	3.116.826.347,75	54.323.932.097,68	(51.207.105.749,93)	(94,26)
Kas di BLUD Puskesmas	1.505.055.748,48	3.909.741.517,21	(2.404.685.768,59)	(61,50)
Kas di Bendahara BOS	722.912.155,88	711.610.259,29	11.301.896,59	1,59
Kas Lainnya	1.587.451.478,39	0,00	1.587.451.478,39	100,00
Jumlah	**42.470.903.814,35**	**117.209.643.226,51**	**(74.738.739.412,16)**	**(63,77)**

		31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	%
5.3.1.1.1.1	**Kas di Kas Daerah**	**35.085.330.183,85**	**58.212.830.752,33**	**(23.127.500.568,48)**	**(39,73)**

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas di Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 yang tersimpan dalam Rekening Kas Umum Daerah Nomor 01.00.00221-0 di Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD Bali). Jumlah Kas di Kas Daerah diatas merupakan saldo setelah rekonsiliasi bank yang dilakukan antara pihak BPD Bali dengan Pemerintah Kabupaten Bangli.

Berdasarkan rekon dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) terdapat selisih sebesar Rp3.793.319,20. Selisih tersebut merupakan kesalahan transfer oleh Bank karena lebih transfer sebesar Rp3.793.320,00 dan sudah dikembalikan ke kasda pada tanggal 19 Januari 2023 dam kurang transfer SP2D No. 15444/SP2D/1-03.1-04.0-00.1.0.0/2022 sebesar Rp0,80 dan sudah ditransfer dari kasda tanggal 24 Januari 2023.

		31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	%
5.3.1.1.1.2	**Kas di Bendahara Penerimaan**	**398.411.000,00**	**51.528.600,00**	**346.882.400,00**	**673,18**

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas di Bendahara Penerimaan Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Dinas Kesehatan	0.00	1.947.600,00	(1.947.600,00)	(100,00)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	386.413.000,00	38.125.000,00	348.288.000,00	913,54

Dinas Perindustrian dan Perdagangan	11.998.000,00	11.456.000,00	542.000,00	4,73
Jumlah	**398.411.000,00**	**51.528.600,00**	**346.882.400,00**	**673,18**

Dari saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp398.411.000,00 tersebut, seluruhnya telah disetorkan ke Kas Daerah pada tahun 2023. Rincian penyetoran saldo Kas di Bendahara Penerimaan diungkapkan berikut ini:

a. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan tahun 2022 sebesar Rp389.413.000,00 merupakan retribusi pelayanan tempat rekreasi dan olah raga yang masih disimpan oleh petugas pemungut di pengelola masing-masing objek wisata yang belum disetorkan ke Kasda sampai tanggal 31 Desember 2022, dengan rincian:

No	DTW	Jumlah	Tanggal disetor ke Kasda
1	Objek Wisata Kintamani	174.370.000,00	02/01/2023
2	Objek Wisata Kintamani	4.650.000,00	02/01/2023
3	Objek Wisata Kehen	1.750.000,00	02/01/2023
4	Objek Wisata Penglipuran	205.643.000,00	02/01/2023
	Jumlah	**386.413.000,00**	

b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan:

Saldo tersebut merupakan pendapatan retribusi pelayanan pasar yang masih disimpan oleh petugas pemungut di masing-masing pasar dan belum sempat disetorkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, dengan rincian:

No	Objek Retribusi	Jumlah	Tanggal disetor ke Kasda
1	Pasar Kidul	7.547.000,00	9 Januari 2023
2	Pasar Yang Api	584.000,00	9 Januari 2023
3	Pasar Kintamani	3.867.000,00	9 Januari 2023
	Jumlah	**11.998.000,00**	

		31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	%
5.3.1.1.1.3	**Kas di Bendahara Pengeluaran**	**54.916.900,00**	**0,00**	**54.916.900,00**	**100%**

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021. Saldo per 31 Desember 2022 merupakan saldo kas di Kas Bendahara Pengeluaran pada Dinas Lingkungan Hidup Nomor 0200105003053 senilai Rp7.417.200,00 yang disetorkan ke kasda tanggal 18 Januari 2023 dan Kas Bendahara Pengelauaran pada DPUPERKIM Nomor 0200100001760 senilai Rp47.499.700,00 yang disetorkan ke kasda tanggal 9 Januari 2023.

		31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	%
5.3.1.1.1.4	**Kas di BLUD RSUD**	**3.116.826.347,75**	**54.323.932.097,68**	**(51.207.105.749,93)**	**(94,26)**

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas di Bendahara BLUD RSU Bangli Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 yang terdapat di rekening BPD Bali dengan Nomor 020.01.05.00401-9 sebesar Rp3.109.687.747,75 dan Saldo Kas Tunai pada Bendahara Penerimaan RSUD sebesar Rp7.138.600,00

Tahun 2022 BLUD RSUD melakukan transfer ke kas daerah sebesar Rp8.799.962.216,62 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Tanggal	Jumlah
1	Pembayaran Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Rumah Sakit	29 Maret 2022	119.633.354,33
2.	Pembayaran Biaya Provisi Pinjaman PEN	26 Juli 2022	717.765.822,57
3.	Pembayaran Biaya Pengelolaan Pinjaman PEN	28 Desember 2022	138.750.000,00
4.	Pembayaran Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Rumah Sakit	29 Desember 2022	383.318.969,00
5.	Pembayaran untuk pembanguna gedung BMB	29 Desember 2022	5.000.000.000,00
6	Pembayaran Bunga atas Pinjaman Daerah (PEN)	29 Desember 2022	2.440.494.070,00
	Jumlah		**8.799.962.216,62**

Saldo Kas di BLUD RSU Bangli per 31 Desember 2022 diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

Saldo awal rekening BLUD	54.319.971.217,68	6.710.966.746,25
Penerimaan BLUD	50.313.655.386,24	107.233.788.004,37
Pengeluaran BLUD	(101.523.938.856,17)	(59.620.822.652,94)
Saldo Kas Tunai di Bendahara Penerimaan	7.138.600,00	0.00
Jumlah	**3.116.826.347,75**	**54.323.932.097,68**

Laporan keuangan Tahun Buku 2022 RSUD Bangli telah diaudit oleh Auditor Independen KAP I Gede Oka Nomor 00056/2.1274/AU.5/11/0463-1/1/IV/2023 tanggal 03 April dengan opini Wajar, rincian pada **lampiran 49**.

		31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	%
5.3.1.1.1.5	**Kas di BLUD Puskesmas**	**1.505.055.748,48**	**3.909.741.517,21**	**(2.404.685.768,73)**	**(61,50)**

Berdasar Keputusan Bupati Bangli Nomor 440.05/197/2022 tentang Penetapan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelayanan Teknis Puskesmas di Kabupaten Bangli tanggal 26 Januari 2022, maka Unit Pelayanan Teknis Puskesmas di Kabupaten Bangli menerapkan Badan Layanan Umum Daerah. Dengan penetapan ini maka Unit Pelayanan Puskesmas Kab. Bangli dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Jumlah saldo merupakan Kas di BLUD Puskesmas Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2022 dan saldo Kas di Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per 31 Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut:

No	Puskesmas	No. Rekening	31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)
1	Bangli	020.01.05.00147-6	37.063.355,19	165.208.945,00
2	Bangli Utara	020.01.05.00147-4	202.218.308,01	169.871.552,40
3	Tembuku I	020.01.05.00147-9	270.895.630,06	607.329.132,84
4	Tembuku II	020.01.05.00146-1	31.672.863,49	160.327.491,00
5	Susut I	020.01.05.00148-0	143.663.635,79	817.607.597,00
6	Susut II	020.01.05.00147-2	99.120.990,63	342.571.879,00
7	Kintamani I	048.01.05.00002-7	142.459.887,05	315.910.259,57
8	Kintamani II	048.01.05.00004-0	236.532.994,69	329.969.146,00
9	Kintamani III	048.01.05.00001-5	112.150.300,39	100.461.501,40
10	Kintamani IV	048.01.05.00003-9	39.623.431,44	346.328.950,00
11	Kintamani V	020.01.05.00146-7	177.783.227,64	343.776.734,00
12	Kintamani VI	020.01.05.00146-5	11.871.124,10	210.378.329,00
Jumlah			**1.505.055.748,48**	**3.909.741.517,21**

Saldo di Kas BLUD per 31 Desember 2022 tersebut terdiri dari saldo di rekening bank dan saldo tunai, dengan rincian sebagai berikut:

No	Puskesmas	No. Rekening	Saldo RC/Bank	Saldo Tunai	Jumlah
1	Bangli	020.01.05.00147-6	37.060.455,19	0.00	37.060.455,19
2	Bangli Utara	020.01.05.00147-4	202.218.308,01	0.00	202.218.308,01
3	Tembuku I	020.01.05.00147-9	270.895.630,06	0.00	270.895.630,06
4	Tembuku II	020.01.05.00146-1	31.003.363,49	281.000,00	31.284.363,49
5	Susut I	020.01.05.00148-0	143.663.635,79	0.00	143.663.635,79
6	Susut II	020.01.05.00147-2	99.120.490,63	500,00	99.120.990,63
7	Kintamani I	048.01.05.00002-7	141.111.387,05	1.348.500,00	142.459.887,05
8	Kintamani II	048.01.05.00004-0	236.532.994,69	0.00	236.532.994,69
9	Kintamani III	048.01.05.00001-5	113.112.183,39	261.000,00	113.373.183,39
10	Kintamani IV	048.01.05.00003-9	39.623.431,44	0.00	39.623.431,44
11	Kintamani V	020.01.05.00146-7	177.783.227,64	0.00	177.783.227,64
12	Kintamani VI	020.01.05.00146-5	11.871.124,10	0.00	11.871.124,10
Jumlah			**1.503.996.231,48**	**1.891.000,00**	**1.505.887.231,48**

Terdapat perbedaan saldo kas pada Puskesmas Bangli, Tembuku II dan Kintamani III dengan saldo Neraca. Pada Puskesmas Bangli terdapat kekurangan saldo senilai Rp2.900,00 karena kelebihan pembayaran uang jasa transfer bank dan sudah dikembalikan ke sas BLUD tanggal 9 Januari 2023. Pada Puskesmas Tembuku II terdapat kekurangan saldo senilai Rp388.500,00 karena kelebihan pembayaran belanja papan pengumuman sebesar Rp333.000,00 dan pembayaran Alat Rumah Tangga Lainnya (Kasur) senilai RP55.000,00 dan sudah disetorkan ke kas BLUD tanggal 9 Januari 2022. Pada Puskesmas Kintamani III terdapat kelebihan senilai Rp1.222.883,00 belum bayarkan iuran BPJS 1% bulan September, Nopember dan Desember sebesar Rp1.255.336,00 yang sudah dibayarkan tanggal 02 Januari 2023 sebesar Rp913.077,00 dan tanggal 06 Maret 2023 sebesar Rp342.259,00 dan adanya kelebihan pembayaran belanja BBM sebesar Rp27.000,00 serta adanya kelebihan pembayarann jaspel sebesar 5.453,00 yangb sudah dikembalikan ke kas BLUD pada tanggal 6 Maret 2023.

Masing - masing Puskesmas di Kabupaten Bangli telah diaudit oleh KAP Erfan & Rakhmawan dengan opini opini sebagai berikut:

No.	Nama Puskesmas	Nomor LHP	Tanggal	Opini
1	Puskesmas Bangli	00156/3.0290/AU.5/11/1183-1/1/III/2023	30 Maret 2023	Wajar
2	Puskesmas Bangli Utara	00157/3.0290/AU.5/11/1183-1/1/III/2023	30 Maret 2023	Wajar
3	Puskesmas Tembuku 1	00152/3.0290/AU.5/11/1183-1/1/III/2023	30 Maret 2023	Wajar
4	Puskesmas Tembuku 2	00153/3.0290/AU.5/11/1183-1/1/III/2023	30 Maret 2023	Wajar

5	Puskesmas Susut 1	00154/3.0290/AU.5/11/1183-1/1/III/2023	30 Maret 2023	Wajar
6	Puskesmas Susust 2	00155/3.0290/AU.5/11/1183-1/1/III/2023	30 Maret 2023	Wajar
7	Puskesmas Kintamani 1	00146/3.0290/AU.5/11/1183-/1/1/III/2023	30 Maret 2023	Wajar
8	Puskesmas Kintamani 2	00147/3.0290/AU.5/11/1183-/1/1/III/2023	30 Maret 2023	Wajar
9	Puskesmas Kintamani 3	00148/3.0290/AU.5/11/1183-/1/1/III/2023	30 Maret 2023	Wajar
10	Puskesmas Kintamani 4	00151/3.0290/AU.5/11/1183-/1/1/III/2023	30 Maret 2023	Wajar
11	Puskesmas Kintamani 5	00150/3.0290/AU.5/11/1183-/1/1/III/2023	30 Maret 2023	Wajar
12	Puskesmas Kintamani 6	00151/3.0290/AU.5/11/1183-/1/1/III/2023	30 Maret 2023	Wajar

Rincian Laporan Keuangan BLUD (*audited*) dapat dilihat pada **Lampiran 49**.

		31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	%
5.3.1.1.1.6	**Kas di Bendahara BOS**	**722.912.155,88**	**711.610.259,29**	**11.301.896,59**	**1,59**

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas di Bendahara BOS Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021. Saldo tersebut termasuk Utang PFK SDN 1 Bunutin sebesar Rp754.454,00 pada Rincian Kas di Bendahara BOS untuk masing-masing sekolah dapat dilihat pada **lampiran 5**.

		31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	%
5.3.1.1.1.7	**Kas Lainnya**	**1.587.451.478,39**	**0,00**	**1.587.451.478,39**	**100,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas Lainnya Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021. Rincian Kas Lainnya tahun 2022 adalah sebagai berikut:

a. Rekening nomor 020.01.05.00149-2 untuk bencana alam tanah longsor di Desa Songan B. Saldo per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.483.341.978,39 tersebut merupakan sumbangan dan pihak ketiga untuk bencana sehingga pemanfaatan ke depannya sesuai peruntukan awalnya;
b. Rekening nomor 020.01.05.00191-4 untuk percepatan penanganan *COVID-19*. Saldo per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp70.000.000,00.; dan
c. Rekening Nomor 020.01.05.00218-8 untuk penanganan darurat bencana gempa bumi. Saldo per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp34.109.500,00.

		31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	%
5.3.1.1.2	**Investasi Jangka Pendek**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Tidak terdapat saldo Investasi Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2022.

		31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	%
5.3.1.1.2.1	**Investasi Jangka Pendek Lainnya**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Tidak terdapat Investasi Jangka Pendek Lainnya Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2022.

		31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	%

5.3.1.1.2.2	**Penyisihan Investasi Jangka Pendek Lainnya**	**(0,00)**	**(0,00)**	**0,00**	**0,00**

Tidak terdapat Penyisihan Investasi Jangka Pendek Lainnya Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2022

		31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	%
5.3.1.1.3	**Piutang Pendapatan**	**72.775.881.963,85**	**59.773.327.434,98**	**13.002.484.528,87**	**21,75**

Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Piutang Pajak	38.817.107.320,78	37.191.988.336,85	1.625.118.983,93	4,37
Piutang Retribusi	422.021.095,81	322.620.095,81	99.401.000,00	30,81
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.625.614.352,71	3.439.795.200,80	261.049.984,31	5,40
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	12.370.489.737,55	3.195.864.735,52	9.174.625.002,03	287,08
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	17.540.579.457,00	15.623.059.066,00	1.917.520.391,00	12,27
Jumlah	**72.775.811.963,85**	**59.773.327.434,98**	**13.002.484.528,87**	**21,75**

		31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	%
5.3.1.1.3.1	**Piutang Pajak**	**38.817.107.320,78**	**37.191.988.336,85**	**1.625.118.983,93**	**4,37**

Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Pajak Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 yang telah terbit ketetapan pajak namun belum terealisasi pembayarannya dari wajib pajak (WP). Rincian piutang pajak dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Piutang Pajak Hotel	235.859.995,55	275.688.693,55	(39.828.698,00)	(14,45)
Piutang Pajak Restoran	1.444.450.765,30	1.516.116.824,30	(71.666.059,00)	(4,73)
Piutang Pajak Reklame	2.649.880,00	2.779.880,00	(130.000,00)	(4,68)
Piutang Pajak Penerangan Jalan	876.496.630,00	761.033.304,00	115.463.326,00	15,17
Piutang Pajak Air Tanah	793.973.820,50	751.003.030,00	42.970.790,50	5,72
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	5.359.716.655,00	33.760.192.540,00	1.599.524.115,00	4,74
Piutang Bea Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan	90.000.000,00	111.000.000,00	111.000.000,00	(18,92)

Piutang Pajak Hiburan	13.959.574,43	14.174.065,00	14.174.065,00	1,51
Jumlah	**38.817.107.320,78**	**37.191.988.336,85**	**37.191.988.336,85**	**4,37**

Pemerintah Kabupaten Bangli pada TA 2022 menyajikan piutang dalam lembar muka laporan keuangan dan juga dalam penjelasan catatan atas laporan keuangan mengikuti struktur penyajian dalam Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Berikut penjelasan atas saldo Piutang Pajak tersebut:

a. Piutang Pajak Hotel merupakan saldo tagihan Pajak Hotel yang belum disetor WP sampai dengan 31 Desember 2022. Piutang Pajak Hotel tersebut merupakan saldo tagihan kepada16 WP Hotel sebesar Rp235.859.995,55. Piutang Pajak Hotel dapat dilihat pada **lampiran 6**;
b. Piutang Pajak Restoran merupakan saldo tagihan Pajak Restoran yang belum disetor WP sampai dengan 31 Desember 2022. Piutang Pajak Restoran tersebut merupakan saldo tagihan kepada 83 WP Restoran sebesar Rp1.444.450.765,30. Pajak Restoran dapat dilihat pada **lampiran 7**;
c. Piutang Reklame merupakan saldo tagihan Pajak Reklame yang belum disetor WP sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Piutang Reklame adalah tagihan atas pajak pemasangan reklame oleh pengusaha. Jumlah tersebut merupakan tagihan kepada 30 WP sebesarRp2.649.880,00.Rincian Piutang Pajak Reklame dapat dilihat pada **lampiran 8**;
   Terjadi penurunan piutang pajak hotel, restoran dan reklame di tahun 2022. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangli adalah dengan membentuk tim pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak yang terdiri dari Pemda dan APH (Aparat Penegak Hukum). Dalam hal penyelesaian piutang pajak dilakukan dengan kegiatan pendampingan hokum dari kejaksaan dalam hal pembinaan terhadap WP dan Surat Kuasa Khusus dalam hal penagihan piutang pajak daerah yang nilai minimalnya Rp10.000.000,00;
d. Piutang Pajak Penerangan Jalan merupakan saldo tagihan Pajak Penerangan Jalan yang belum disetor WP sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Jumlah tersebut merupakan tagihan PPJ bulan Desember yang dibayarkan pada bulan Januari tahun berikutnya sebesar Rp876.496.630,00;
e. Piutang Pajak Air Tanah merupakan saldo tagihan Pajak Air Tanah yang belum disetor WP sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Jumlah tersebut merupakan tagihan kepada 31 WP sebesar Rp793.973.820,50. Rincian Piutang Pajak Air Tanah dapat dilihat pada **lampiran 9**;
f. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan piutang PBB-P2yang diserahterimakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar sesuai Berita AcaraSerah Terima Nomor BA-26/WPJ.17/KP.07/2014 tanggal 27 Januari 2014. PBB-P2 dipungut berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan danPerkotaan. Pemerintah Kabupaten Bangli telah melakukan verifikasi dan validasi data piutang PBB-P2 di tahun 2016 untuk dapat menyajikan nilai piutang yang lebih akurat. Berikut penjelasan atas proses pelaksanaan verifikasi danvalidasi piutang PBB-P2;
   1) Pada tahun 2022 dilakukan validasi terhadap 27.814 NOP pada dua wilayah yaitu Kecamatan Bangli dan Susut. Dengan hasil 26.061 NOP diakui dan 1.713 NOP tidak diakui yang akan diusulkan untuk dihapuskan. Tim yang melakukan validasi tertuang dalam Keputusan Bupati Bangli Nomor 973/870/2021 tentang Tim Validasi Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2022. Tingginya NOP yang tidak diakui berpengaruh besar pada peningkatan piutang PBB-P2 tahun 2022;
   2) Piutang pajak PBB-P2 sampai 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp35.359.716.655,00; dan
   3) Terdapat selisih nilai piutang antara neraca dengan di sismiop sebesar Rp497.841.000,00. Selisih tersebut disebabkan oleh dua hal, yang pertama merupakan selisih piutang kategori macet atas data piutang sebelum tahun 2014 yang disebabkan perbedaan nilai yang ada di BAST dengan Basis Data PBB yang diserahkan ke Pemkab Bangli oleh KPP Pratama.Penyebab kedua adalah adanya bug/error

pada sistem sinkronisasi pembayaran yang berakibat terjadi selisih jumlah pengurangan antara data pembayaran dengan data SPPT yang terbayar pada database SPPT, data SPPT terbayar dengan data pembayaran (lebih besar data pembayaran daripada jumlah data SPPT yang statusnya terbayar untuk tahun data piutang sebelum tahun 2014).

g. Piutang BPHTB pada 31 Desember 2021 sebesar Rp90.000.000,00. Piutang ini timbul berdasarkan tagihan pembayaran BPHTB yang dipungut berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
h. Piutang Pajak Hiburan pada 31 Desember 2021 sebesar Rp13.959.574,43 yang merupakan piutang terhadap pada PT Toyo Bungkah Villas.

		31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	%
5.3.1.1.3.2	**Piutang Retribusi**	**422.021.095,81**	**322.620.095,81**	**99.401.000,00**	**30,81**

Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Retribusi Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 yang telah terbit ketetapan retribusi namun belum terealisasi pembayarannya dari wajib retribusi (WR). Rincian Piutang Retribusi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00
Piutang Retribusi Kebersihan/Persampahan	28.324.000,00	7.348.000,00	20.976.000,00	285,47
Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	142.135.000,00	70.910.000,00	71.225.000,00	100,44
Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	251.448.095,81	244.248.095,81	7.200.000,00	2,95
Jumlah	**422.021.095,81**	**322.620.095,81**	**99.401.000,00**	**30,81**

Berikut penjelasan atas saldo Piutang Retribusi:

a. Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan-Jamkesmas sebesar Rp114.000,00 merupakan Piutang Pelayanan Kesehatan yang ada di Puskesmas;
b. Piutang Retribusi Kebersihan/Persampahan sebesar Rp28.324.000,00 merupakan saldo piutang terhadap 310 WR. Pemungutan Retribusi Kebersihan/Persampahan dilaksanakan setiap bulan oleh juru pungut dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangli pada setiap WR. Tingginya kenaikan piutang Retribusi Kebersihan/Persamahan disebabkan karena:
   - Adanya beberapa objek retribusi yang sudah tidak beroperasi lagi atau pindah lokasi ke tempat yang tidak lagi mendapat mendapat pelayanan persampahan/kebersihan namun sudah dibuatkan ketetapan objek retribusi. Tercatat ada 20 WR yang tidak beroperasi yang tersebar di Kecamatan Susut;
   - Kurangnya pengadaan karcis untuk pemungutan retribusi, dimana penganggaran terhadap pengadaan karcis dilakukan dilakukan di akhir tahun sehingga pemungutan dilakukan di tahun 2023;
   - Petugas pemungut retibusi yang kurang, karena masih menugaskan tenaga satgas lapangan yang diperbantukan dalam melakukan pemungutan;

- Adanya Wajib Pajak yang mengurangi jumlah Obyek Wajib Pajaknya berdasarkan DPA Desanya (Desa Kayubihi yang dibuatkan ketetapan 400 KK per bulan, realisasinya 300 KK per bulan)

Rincian Piutang Retribusi Kebersihan/Persampahan dapat dilihat pada **lampiran 10**.

c. Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah sebesarRp142.135.000,00. Piutang tersebut merupakan saldo piutang 2021 dan keterlambatan pembayaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tahun 2022 yang jatuh tempo pada tanggal 30 Desember 2022, namun sampai dengan 31 Desember 2021 belum dilakukan pembayaran terhadap retribusi dari 6WR Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi untuk 58 buah menara yang tersebar di Kabupaten Bangli. Tingginya piutang Retribusi Pengendalian Menara dan Telekomunikasi disebabkan karena keterlamabatan pembayaran dari pihak provider menara telekomunikasi serta adanya beberapa menara telekomunikasi yang berpindah tangan/diakuisisi oleh provider lain. Rincian Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dapat dilihat pada **lampiran 11**.

d. Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp251.448.095,81 merupakan pungutan daerah kepada pengguna/pedagang yang menempati tanah/kios/ruko/pasar di Pasar Kidul, Pasar Kayuamba dan Pasar Kintamani dan sewa tanah eks CTA di beberapa desa serta sewa kantin di masing-masing Perangkat Daerah dan sekolah-sekolah, yang belum dibayar sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, dengan rincian sebagai berikut:

No	Piutang	Jumlah WR Menunggak	Unit Layanan/Lokasi	Nilai (Rp)
1.	Retribusi Pasar	237 WR	Pasar Kidul	19.856.670,00
		326 WR	Pasar Kayuamba	8.410.206,00
		6 WR	Desa Kedisan	1.830.000,00
		311 WR	Pasar Kintamani	27.744.852,00
2.	Sewa Tanah eks CTA	135 orang	Desa Langgahan	14.900.004,00
		152 orang	Desa Satra	45.800.468,00
		32 orang	Desa Mengani	3.515.545,00
		3 orang	Desa Manikliyu	1.197.500,00
		5 orang	Desa Belancan	365.000,00
		45 orang	Desa Selulung	11.943.600,00
		37 orang	Desa Catur	10.919.620,00
		14 orang	Desa Siakin	1.813.350,00
		9 orang	Desa Bunutin	313.514,00
		19 orang	Desa Bayung Cerik	2.571.100,00
3.	Pemanfaatan Kantin	126 orang	Kab Bangli	100.266.666,81
Jumlah				**251.448.095,81**

Rincian Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dapat dilihat pada **lampiran 12**.

		31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	%
5.3.1.1.3.3	**Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**	**3.625.614.352,71**	**3.439.795.200,80**	**185.819.151,91**	**5,40**

Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut:

PT BPR Bank Daerah Bangli	2.600.764.186,00	2.456.470.186,50	144.293.999,50	5,87
PDAM Bangli	1.024.850.166,71	983.325.014,30	41.525.152,41	4,22
Jumlah	**3.625.614.352,71**	**3.439.795.200,80**	**185.819.151,91**	**5,40**

Piutang Bagian Laba PDAM per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp1.024.850.166,71 merupakan piutang bagian laba PDAM tahun 2022 yang belum/kurang disetor ke kas daerah. Terdiri dari Rp141.525.152,41 piutang tahun 2022 dan Rp883.325.014,30 piutang bagian laba PDAM tahun 2021 belum disetorkan ke kasda karena keterbatasan dana pada PDAM. Karena Piutang bagian laba PDAM merupakan bagian laba atas keuntungan PDAM tahun 2022 sebesar 55% dari Rp257.318.458,92.

Piutang bagian laba PT BPR Bank Pasar Bangli sebesar Rp2.600.764.186,00 merupakan bagian laba atas keuntungan PT BPR Pasar Bangli tahun 2022 yaitu 55% dari Rp4.728.662.156,00 yang belum/kurang disetor ke kas daerah. Perhitungan bagian laba ke daerah sesuai dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bangli (PERSERODA) tanggal 16 Maret 2023. Persentase pembagian laba tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Pekreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah. Pengakuan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan atas kedua BUMD tersebut disebabkan karena menggunakan metode ekuitas dengan kepemilikan Pemerintah Kabupaten Bangli sebesar 100%. Perlu diketahui bahwa masih terdapat satu BUMD lagi, yaitu PD Bhukti Mukti Bhakti yang tidak terdapat pengakuan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan karena tidak terdapat pembagian laba kepada Pemerintah Kabupaten Bangli atas laba tahun buku 2022 (mengalami kerugian).

Pengakuan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan atas kedua BUMD tersebut dikarenakan menggunakan metode ekuitas dengan kepemilikan Pemerintah Kabupaten Bangli sebesar 100%. Untuk PD Bhukti Mukti Bhakti tidak terdapat pengakuan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan karena tidak terdapat pembagian kepada Pemerintah Kabupaten Bangli atas laba tahun buku 2021 (mengalami kerugian).

		31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	%
5.3.1.1.3.4	**Piutang Lain-lain PAD yang Sah**	**12.370.489.737,55**	**3.195.864.735,52**	**9.174.625.002,03**	**287,08**

Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021, dengan perincian sebagai berikut:

Piutang Denda Pajak	15.220.000,00	15.220.000,00	0,00	0,00
Piutang Denda Retribusi	5.499.720,20	7.800.349,00	(2.300.628,00)	(29,49)
Piutang Bunga	532.789,58	0,00	532.789,58	100,00
Piutang BLUD RSU	11.567.567.150,00	2.436.490.700,00	9.131.076.450,00	374,76
Piutang BLUD Puskesmas	26.314.900,00	1.231.650,00	25.083.250,00	2036,56
Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	151.158.177,77	136.872.036,52	14.286.141,25	10,44
Piutang Kredit Pembelian Gabah, Penguatan Modal Kopi dan Bantuan UP3HP	598.250.000,00	598.250.000,00	0,00	0,00

Piutang Kelebihan DBH Pajak kepada Desa	5.947.000,00	0,00	5.947.000,00	100,00
Jumlah	**12.370.489.737,55**	**3.195.864.735,52**	**9.174.625.002,23**	**287,08**

Penjelasan atas Piutang Lain-lain PAD yang Sah tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a. Piutang Denda Pajak sebesar Rp15.220.000,00 merupakan Denda Pajak Restoran per 31 Desember 2022 yang belum dibayar oleh 27 WP Restoran. Rincian Piutang Denda Pajak dapat dilihat pada **lampiran 13**;
b. Piutang Denda Retribusi sebesar Rp5.499.720,20 merupakan Denda Pajak Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi per 31 Desember 2022 yang belum dibayar oleh 54 Wajib Retribusi. Rincian Piutang Denda Retribusi dapat dilihat pada **lampiran 14**;
c. Piutang Bunga sebesar 532.789,58 mencatat Piutang Lain – Lain PAD yang sah untuk remunerisasi Treasury Deposit Facility Transfer Daerah (TKF-TKD) Tahun 2022 berdasarkan surat dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Propinsi Bali Nomor : S-233/WPB-22/2023 Perihal Penyampaian Data Saldo dan Remunerasi Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah (TKF-TKD) Tahun 2022 tanggal 10 Februari 2023, serta surat Nomor : S-504/WPB.22/2023 tanggal 13 Maret 2023 Perihal Penyesuaian Kebijakan Akuntansi atas Penyaluran Dana Bagi Hasil/Dana Alokasi Umum melalui Fasilitas TDF, atas dana tersebut disalurkan secara non tunai oleh Bendahara Umum Negara (BUN) dan disimpan pada rekening TDF di Bank Indonesia;
d. Piutang BLUD sebesar Rp11.567.567.150,00 merupakan piutang yang dimiliki RSU Bangli yang pembayarannya belum diterima sampai dengan 31 Desember 2022 dengan perincian sebagai berikut:
    1) Piutang Klaim Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atas pelayanan kesehatan oleh RSUD Bangli kepada masyarakat pengguna JKN yang belum dibayarkan klaimnya dan telah diverifikasi oleh BPJS sebesar Rp9.280.971.550,00 terdiri dari:
        a) Klaim JKN atas susulan II bulan Juli sebesar Rp11.442.000,00;
        b) Klaim JKN atas susulan bulan Agustus sebesar Rp517.862.050,00;
        c) Klaim JKN atas susulan bulan September sebesar Rp539.597.600,00;
        d) Klaim JKN atas susulan bulan Oktober sebesar Rp326.503.000,00;
        e) Klaim JKN atas bulan Nopember sebesar Rp3.664.236.600,00; dan
        f) Klaim JKN atas bulan Desember sebesar Rp4.221.330.300,00.
    2) Piutang Rujukan Parsial pada RSUD Bangli sebesar Rp8.838.600,00;
    3) Piutang Ambulance pasien JKN pada RSUD Bangli sebesar Rp19.269.000,00; dan
    4) Piutang Kalin Pasien Covid 19 TA 2022 sebesar Rp2.258.488.000,00.

Rincian Piutang BLUD RSUD dapat dilihat pada **lampiran 15**.

e. Piutang BLUD Puskesmas pada 31 Desember 2022 sebesar Rp26.314.900,00 merupakan Klain Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas tahun 2022 yang belum diterima dari BPJS. Rincian Piutang BLUD Puskesmas dapat dilihat pada **lampiran 16**.
f. Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2022 sebesar Rp151.158.177,77 terdiri dari:
    1) Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir CTKI sebesar Rp129.084.077,77;
    2) Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir KPEL sebesar Rp22.074.100,00

Rincian Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dapat dilihat pada **lampiran 17 dan 18**.

g. Piutang Kredit Pembelian Gabah, Penguatan Modal Kopi dan Bantuan UP3HP Kabupaten Bangli per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2021	**31 Desember 2020**
Kredit Pembelian Gabah KUD tahun 2003	265.250.000,00	265.250.000,00

Penguatan Modal Kopi tahun 2004	318.000.000,00	318.000.000,00
Bantuan UP3HP tahun 2004	15.000.000,00	15.000.000,00
Jumlah	**598.250.000,00**	**598.250.000,00**

Kredit Pembelian Gabah KUD terjadi tahun 2003, Kredit Penguatan Modal Kopi terjadi tahun 2004, dan Bantuan UP3HP terjadi tahun 2004. Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan telah melakukan upaya-upaya penagihan secara terus menerus mendatangi peminjam, dan informasi yang berhasil diperoleh dari peminjam adalah siap untuk melakukan pembayaran. Akan tetapi karena terjadi pandemi Covid-19 pembayaran masih tertunda.

		31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	%
5.3.1.1.3.5	**Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya**	**17.540.579.457,00**	**15.623.059.066,00**	**1.917.520.391,00**	**12,27**

Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya pada Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021. Rincian Piutang Transfer dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Pajak Kendaraan Bermotor	8.991.956.798,00	7.575.424.498,00	1.416.532.300,00	18,70
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	4.368.985.244,00	2.256.837.653,00	2.112.147.591,00	93,59
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	4.156.075.694,00	3.022.902.663,00	1.133.173.031,00	37,49
Pajak Pemanfaatan Air Permukaan	23.561.721,00	19.696.898,00	3.864.823,00	19,62
Pajak Rokok	0,00	2.748.197.354,00	(-2.748.197.354,00)	(100,00)
Jumlah	**17.540.579.457,00**	**15.623.059.066,00**	**1.917.520.391,00**	**12,27**

Jumlah tersebut merupakan Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi Bali yang belum terealisasikan kepada Pemerintah Kabupaten Bangli sampai dengan 31 Desember 2022 sesuai surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor B.13.900/389/PADFE/BPKAD tanggal 18 Pebruari 2023 perihal Kewajiban Sementara Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi Bali kepada Kabupaten/Kota se-Bali Tahun Anggaran 2022.

		31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	%
5.3.1.1.4	**Piutang Lainnya**	**0,00**	**10.456.764.213,91**	**(10.456.764.213,91)**	**(100,00)**

Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Lainnya Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2022. Rincian Piutang Lainnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	10.456.764.213,91	(10.456.764.213,91)	(100,00)
Jumlah	**0,00**	**10.456.764.213,91**	**(10.456.764.213,91)**	**(100,00)**

Saldo piutang Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa tersebut merupakan uang muka pengadaan Gedung RSUD Kabupaten Bangli yang sudah direklas menjadi aset tetap gedung dan bangunan karena pengerjaan

fisik atas aset gedung dan bagunan RSUD sudah 100%, sesuai dengan berita acara serah terima asset nomor 027/77/PPK/RSUD/XI/2022 tanggal 03 Nopember 2022.

		31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	%
5.3.1.1.5	**Penyisihan Piutang**	**(27.854.226.847,91)**	**(25.379.536.032,21)**	**(2.474.690.815,70)**	**(9.75)**

Jumlah tersebut merupakan saldo Penyisihan Piutang Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021. Nilai penyisihan piutang tersebut dihitung berdasarkan Kebijakan Akuntansi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bangli. Rincian penyisihan piutang tersebut terdiri dari:

Penyisihan Piutang Pajak	(26.681.020.323,47)	(24.310.743.822,99)	(2.370.276.500,48)	(9,75)
Penyisihan Piutang Retribusi	(306.181.590,81)	(291.184.920,81)	(14.996.670,00)	(5,15)
Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	(102.420.102,28)	(18.116.932,35)	(84.303.169,93)	(465,33)
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(764.604.831,35)	(707.206.534,99)	(57.398.296,36)	(8,12)
Penyisihan Piutang Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa	(0.00)	(52.283.821,07)	52.238.821,07	100,00
Jumlah	**(27.854.226.847,91)**	**(25.379.536.032,21)**	**(2.474.690.815,70)**	**(9,75)**

Rincian perhitungan penyisihan piutang dapat dilihat pada **lampiran 19**.

		31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	%
5.3.1.1.6	**Beban Dibayar Dimuka**	**511.080.692,61**	**347.444.355,56**	**163.636.337,05**	**47,10**

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Dibayar Dimuka Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021. Beban Dibayar Dimuka terdiri atas:

1. Sisa belanja sewa *Domain dan Hiting VPS* pada CV Rumah Media selama 1 tahun yang dimulai tanggal 1 Agustus 2022 s/d 31 Agustus 2023 dengan nilai Rp74.325.600,00 sehingga belum jatuh tempo selama 243 hari atau sebesar Rp45.608.890,91 pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
2. Sisa belanja sewa *license/setting konfigurasi dan fitur dashboard* pada PT. Mitra Kasih Perkasa selama 1 tahun mulai dari 8 Desember 2022 s/d 7 Desember 2023 dengan nilai Rp25.000.000,00 sehingga beban belum jatuh tempo selama 341 hari atau Rp23.356.164,38 pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3. Dan sewa tanah untuk *drag race* berdasarkan akta perjanian sewa tanah nomor 11 tanggal 25 Juli 2022 dan Addendum Sewa Tanah Nomor 3 tanggal 14 desember 2022. Pemerintah Kabupaten Bangli melakukan sewa tanah di Desa Landih Kec. Bangli untuk Drag Race seluas 20.000 m² kepada Ni Luh Murni yang beralamat di Br Palaktiying Desa Landih Kecamatan Bangli, selama 25 tahun yang mulai

dari tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan 25 Juli 2047, dengan nilai Rp450.000.000,00. Sehingga yang belum jatuh tempo selama 8972 hari atau sebesar Rp442.115.637,32 pada Dinas PUPERKIM

Rincian perhitungan beban dibayar dimuka dapat dilihat pada **lampiran 20**.

		31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	%
5.3.1.1.7	**Persediaan**	**20.829.126.649,81**	**16.542.128.063,29**	**4.286.998.586,52**	**25,92**

Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021. Persediaan yang disajikan telah berdasarkan hasil perhitungan fisik yang dilakukan oleh entitas pada akhir tahun yang didokumentasikan dalam berita acara *stock opname*. Rincian daftar masing-masing jenis persediaan pada masing-masing OPD dapat dilihat pada **lampiran 21**.

Saldo Persediaan per 31 Desember 2022 tersebut tidak termasuk dengan persediaan yang telah kadaluwarsa sebesar Rp1.533.243.476,61 yang tersebar pada enam OPD dengan rincian sebagai berikut:

No	OPD	Nilai (Rp)
1	Sekretariat Daerah	16.001.800,00
2	Dinas Kesehatan	1.222.193.580,22
3	Rumah Sakit Umum Daerah	215.597.355,19
4	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	24. 665.670,00
5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.125.000,00
6	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	52.660.071,20
	Jumlah	**1.533.243.476,61**

Rincian Persediaan kadaluwarsa dapat dilihat pada **lampiran 22**.

Dari nilai saldo Persediaan Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2022 sebesar Rp20.828.761099,81 tersebut, diantaranya terdapat persediaan berupa barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp7.752.940.000,00 yang menurut rencana akan menjadi penyertaan modal ke PDAM Bangli dengan rincian:

a. Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) melalui Penambahan Kapasitas Produksi Mata Air Pebini di Desa Catur sebesar Rp4.620.000.000,00 ; dan
b. Supervisi Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum Melalui Penambahan Kapasitas Produksi Mata Air Pebini di Desa Catur sebesar Rp69.456.000,00 .
c. Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan kapasitas 5 liter/detik di Desa Peninjoan sebesar 2.993.972.000,00
d. Supervisi Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan kapasitas 5 liter/detik di Desa Peninjoan sebesar Rp69.512.000,00

Sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang dari awal pengadaanya direncanankan untuk dijadikan sebagai penertaan modal pemrintah daerah, maka Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul kepada Gubernur/Bupati/Walikota disertai pertimbangan dan kelengkapan data berupa:

a. Data Administrasitif antara laian:
    1. Dokumen anggaran dan/atau dakumen perencanaanya;
    2. Nilai realisasi pelaksanaan anggaran; dan
    3. Keputusan penetapan status penggunaan
b. Dokumen hasil analisis kelayakan investasi mengenai penyertaan modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk SPAM mata air Pebini di Desa Catur sampai saat ini usulan dari Pengguna barang belum diajukan ke Bupati melalui Pengelola Barang dan tahapan akan reklasifikasi dari Persediaan ke Belanja Modal untuk dapat ditetapkan status penggunaannya. Dokumen kelayakan investasi sudah ada sejak tahun 2021.

		31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	%
5.3.1.2	**Investasi Jangka Panjang**	**68.396.974.646,40**	**61.860.525.954,29**	**6.536.448.692,11**	**10,57**

Jumlah tersebut merupakan saldo Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember2021. Rincian Investasi Jangka Panjang tersebut terdiri dari:

Investasi Jangka Panjang Non Permanen	210.204.167,67	188.429.063,83	21.775.103,84	11,56
Investasi Jangka Panjang Permanen	68.186.770.478,73	61.672.096.890,46	6.514.673.588,27	10,56
Jumlah	**68.396.974.646,40**	**61.860.525.954,29**	**6.536.448.692,11**	**10,57**

		31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	%
5.3.1.2.1	**Investasi Jangka Panjang Non Permanen**	**210.204.167,67**	**188.429.063,83**	**21.775.103,84**	**11,56**

Jumlah tersebut merupakan saldo Investasi Jangka Panjang Non Permanen Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021. Rincian Investasi Jangka Panjang Non Permanen tersebut terdiri dari:

Dana Bergulir	613.548.525,00	613.548.525,00	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00
Penyisihan Invetasi Non Permanen	(423.144.357,33)	(444.919.461,17)	21.775.103,84	11,56
Jumlah	**210.204.167,67**	**188.429.063,83**	**21.775.103,84**	**11,56**

		31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	%
5.3.1.2.1.1	**Dana Bergulir**	**613.548.525,00**	**613.548.525,00**	**0,00**	**0,00**

Jumlah tersebut merupakan Dana Bergulir yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2022 yang terdiri dari :

a. Dana Bergulir Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) sebesar Rp576.000.000,00 dikelola oleh Dinas Koperasi, UMKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangli. Dana Bergulir CTKI disalurkan dengan pola *channeling*, melalui PT BPR Bank Daerah Bangli (d/h PD Bank Pasar) dengan Perjanjian Kerjasama Nomor 415.4/33/Pem/2011/02/PKS/XII/2011. Dari jumlah Dana Bergulir sebesar

Rp576.000.000,00 per 31 Desember 2022, sebesar Rp488.623.592,12 disalurkan kepada CTKI dan sebesar Rp87.376.407,88 belum digulirkan dan berada pada rekening PT BPR Bank Daerah Bangli (d/h PD Bank Pasar) dengan Nomor 330.80.01.00564.2. Pada rekening tersebut terdapat pula dana sebesar Rp365.245,00 yang merupakan kelebihan pembayaran debitur. Dana tersebut belum bisa dikembalikan karena belum diketahui identitas debitur yang melakukan kelebihan pembayaran.

b. Dana Bergulir Program Kemitraan Pengembangan Ekonomi Lokal (KPEL) sebesar Rp37.548.525,00 dikelola melalui 2 OPD yaitu Dinas Pertanian Perkebunan dan Perhutanan (OPD lama) dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Rincian Dana Bergulir CTKI dan KPEL dapat dilihat pada **lampiran 23** dan **24**.

		31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	%
5.3.1.2.1.2	**Investasi Non Permanen Lainnya**	**19.800.000,00**	**19.800.000,00**	**0,00**	**0,00**

Jumlah tersebut merupakan Investasi Non Permanen Lainnya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2022 sebesar Rp19.800.000,00 berupa pemberian pinjaman (*leasing*) alat mesin pertanian (Alsintan) traktor tangan kepada kelompok tani UPJA dengan jangka waktu selama 5 tahun. Investasi non permanen atas leasing traktor ini sudah jatuh tempo tahun 2008 atas nama UPJA Tampuagan, Karya Sejati dan Sri Artha Galih sebesar Rp18.400.000,00 dan jatuh tempo tahun 2012 atas leasing traktor Kelompok Sidakarya sebesar Rp1.400.000,00 Sampai tahun 2022 belum melakukan pelunasan kelompuk usah tani tersebut belum bisa menyelesaikan tunggakannya karena usaha tani tersebut tidak aktif lagi. Rincian Investasi Non Permanen Lainnya dapat dilihat pada **lampiran 25.**

		31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	%
5.3.1.2.1.3	**Penyisihan Investasi Non Permanen**	**(423.144.357,33)**	**(444.919.461,17)**	**21.775.103,84**	**(4,89)**

Jumlah tersebut merupakan Penyisihan Dana Bergulir dan Investasi Non Permanen Lainnya berpedoman pada Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bangli dengan menggunakan metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan (NRV) dengan perincian sebagai berikut:

Dana Bergulir CTKI	(365.795.832,33)	(387.570.963,17)	21.775.130,84	(5,62)
Dana Bergulir KPEL	(37.548.525,00)	(37.548.525,00)	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	(19.800.000,00)	(19.800.000,00)	0,00	0,00
Jumlah	**(423.144.357,33)**	**(444.919.461,17)**	**21.775.103,84**	

Khusus Dana Bergulir CTKI sesuai perjanjian kredit dengan PD Bank Pasar, peminjam diberikan masa tenggang untuk melakukan setoran awal setelah 2 tahun dari tanggal akad kredit, sehingga penyisihannya mengikuti klausul perjanjian ini. Rincian Penyisihan Dana Bergulir dan Investasi Non Permanen Lainnya dapat dilihat pada **lampiran 26 s.d.27**.

Upaya-upaya penagihan yang dilakukan terhadap dana bergulir CTKI dan KPEL adalah bekerjasama dengan Bank BPR Pasar Bangli sebagai *bank chanelling* untuk melakukan penagihan serta melibatkan Kepala Desa dan Kelian Dusun untuk membantu penagihan bagi peminjam yang telah melewati masa pinjaman lebih dari lima tahun atau kategori piutang macet.

	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%

		(Rp)	**(Rp)**		
5.3.1.2.2	**Investasi Jangka Panjang Permanen**	**68.186.770.478,73**	**61.672.096.890,46**	**6.514.673.588,27**	**10,56**

Jumlah tersebut merupakan saldo Investasi Jangka Panjang Permanen Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021.

		31 Desember 2022 (Rp)	**31 Desember 2021 (Rp)**	**Kenaikan/(Penurunan)**	**%**
5.3.1.2.2.1	**Penyertaan Modal Pemerintah Daerah**	**68.186.770.478,73**	**61.672.096.890,46**	**6.514.673.588,27**	**10,56**

Jumlah tersebut merupakan saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan rincian sebagai berikut:

PT Bank BPD Bali	13.577.726.125,83	13.577.726.125,83	0,00	0,00
PT Jamkrida Bali Mandara	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00
PDAM Bangli	26.562.327.562,48	26.446.534.255.97	115.793.306,51	0,44
PT BPR Bank Daerah Bangli	27.446.716.790,42	21.047.836.508.66	6.398.880.281,76	30,40
PD Bhukti Mukti Bhakti	0.00	0.00	0,00	0,00
Jumlah	**68.186.770.478,73**	**61.672.096.890,46**	**6.514.673.588,27**	**10,56**

Penjelasan atas nilai Investasi Jangka Panjang Permanen pada masing-masing BUMD per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

a. Nilai penyertaan modal pada PT Bank BPD Bali sebesar Rp13.577.726.125,83 disajikan dengan menggunakan metode biaya. Selama tahun 2021 tidak terdapat penambahan penyertaan modal pada PT Bank BPD Bali. Dengan demikian nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bangli pada PT Bank BPD Bali masih tercatat sama dengan tahun lalu, yaitu sebesar Rp13.577.726.125,83. Dari nilai tersebut, terdapat nilai penyertaan modal sebesar Rp726.125,83 yang belum disahamkan;

b. Nilai penyertaan modal pada PT Jamkrida Bali Mandara sebesar Rp600.000.000,00 disajikan dengan menggunakan metode biaya. Selama tahun 2021 tidak terdapat penambahan penyertaan modal pada PT Jamkrida Bali Mandara sehingga nilai penyertaan modalnya masih sama dengan tahun lalu, yaitu sebesar Rp600.000.000,00;

c. Nilai penyertaan modal pada PDAM Bangli sebesar Rp26.562.327.562,48 disajikan dengan menggunakan metode ekuitas karena PDAM Bangli merupakan BUMD yang 100% kepemilikiannya dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Bangli. Selama tahun 2022 tidak terdapat penambahan penyertaan modal pada PDAM Bangli;

d. Nilai penyertaan modal pada PT BPR Bank Daerah Bangli sebesar Rp27.446.716.790,42 disajikan dengan menggunakan metode ekuitas karena PT BPR Bank Daerah Bangli merupakan BUMD yang 100% kepemilikiannya dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Bangli. Selama tahun 2022 terdapat penambahan penyertaan modal berupa tanah pada PT BPR Bank Daerah Bangli dengan nilai wajar Rp2.085.210.000,00 seluas 340m² di jln Merdeka No. 27 Bangli berdasarkan Keputusan Bupati Bangli Nomor 032/971/2022

tanggal 21 Nopember 2022 dan penyertaan modal berupa uang sebesar Rp3.000.000.000,00 berdasarkan Peraturan Bupati Bangli Nomor 52 Tahun 2022 tanggal 5 Desember 2022; dan

e. Nilai penyertaan modal pada PD Bhukti Mukti Bhakti disajikan dengan menggunakan metode ekuitas karena PD Bhukti Mukti Bhakti merupakan BUMD yang 100% kepemilikannya dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Bangli. Selama tahun 2021 tidak terdapat penambahan penyertaan modal pada PD Bhukti Mukti Bhakti.

Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bangli pada BUMD dapat dilihat pada **lampiran 26**.

		31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan	%
5.3.1.3	**Aset Tetap**	**1.322.302.236.652,85**	**1.131.812.237.421,41**	**190.489.999.231,44**	**16,83**

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Tanah	182.690.383.171,00	163.234.788.899,00	19.455.594.272,00	11,92
Peralatan dan Mesin	438.946.426.286,18	357.667.592.558,25	81.278.833.727,93	22,72
Gedung dan Bangunan	643.314.788.999,19	464.765.258.821,12	178.549.530.178,07	38,42
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.255.416.002.811,16	1.187.642.494.878,20	67.773.507.932,96	5,71
Aset Tetap Lainnya	75.929.952.477,76	79.076.307.886,96	(3.146.355.409,20)	(3,98)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.901.638.883,11	16.304.806.709,45	(10.403.167.826,34)	(63,80)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(1.279.896.955.975,55)	(1.136.879.012.331,57)	(143.017.943.643,98)	12,58
Jumlah Aset Tetap	**1.322.302.236.652,85**	**1.131.812.237.421,41**	**190.489.999.231,44**	**16,83**

		31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	%
5.3.1.3.1	**Tanah**	**182.690.383.171,00**	**163.234.788.899,00**	**19.455.594.272,00**	**11,92**

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap Tanah Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021. Rincian mutasi Aset Tetap Tanah Pemerintah Kabupaten Bangli selama tahun 2022 diuraikan sebagai berikut:

Saldo Awal	**163.234.788.899,00**
Mutasi Tambah:	
- B. Modal	14.134.423.669,00
- Inventarisasi	7.123.898.000,00
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	366.420.000,00
- Hibah	1.914.738.603,00
- Mutasi Antar OPD	6.304.000.000,00
Jumlah Mutasi Tambah	**29.843.480.272,00**
Mutasi Kurang:	
- Mutasi Antar OPD	6.304.000.000,00

-	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	165.000.000,00
-	Pemberian Hibah	491.956.000,00
-	Inventarisasi	2.786.170.000,00
-	Penghapusan	640.760.000,00
	Jumlah Mutasi Kurang	**10.387.886.000,00**
	Saldo Akhir Tanah	**182.690.383.171,00**

Rincian mutasi Aset Tetap Tanah pada masing-masing OPD dapat dilihat pada **lampiran 27**.

Penjelasan atas mutasi aset tanah adalah sebagai berikut:

- Mutasi tambah sebesar Rp14.134.423.669,00 berasal dari belanja modal tahun 2022 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
- Mutasi Tambah Inventarisasi sebesar Rp7.123.898.000,00:
  - Sekretariat Daerah senilai Rp6.421.760.000 akibat pemecahan sertifikat Kantor Bupati Depan dan Belakang
  - Dinas Kesehatan senilai Rp2.288.000,00 akibat pencatatan Puskesmas Pembantu Bunut
  - Dinas Perindustrian dan Perdagangan senilai Rp471.520.000 akibat Inventarisasi Pasar Kintamani
  - Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran senilai Rp228.330.000,00 berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah luas 430 m2 akibat Tanah Kantor BPBD dan Damkar yang belum tercatat
- Mutasi Tambah Reklasifikasi dari Aset Lainnya pada Sekretariat Daerah senilai Rp366.420.000,00 berupa Tanah yang dipinjam pakaikan ke KONI dan Bawaslu sudah dikembalikan ke Pemerintah Kabupaten Bangli.
- Mutasi Tambah Hibah sebesar Rp1.914.738.603,00:
  - Hibah Tanah dari Provinsi Bali ke Dinas Sosial senilai Rp148.785.000,00 berupa Tanah Kantor Dinas Sosial dengan luas 1300 m^2.
  - Hibah Tanah dari Provinsi Bali ke Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan senilai Rp711.035.100,00 berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dan Tanah Bangunan Pasar dengan total luas 21.878 m^2.
  - Hibah Tanah dari Provinsi Bali ke Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp1.019.668.503,00 berupa Tanah Bangunan Kantor Rumah Sakit luas 7.100 m^2 berupa Tanah Bangunan Rumah Sakit milik RSJ Provinsi Bali yang direahkan ke RSUD Bangli untuk perluasan.
- Mutasi Tambah Mutasi Antar OPD sebesar Rp6.304.000.000,00:
  - Mutasi ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa senilai Rp3.600.000,00 dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dengan luas 800 m^2 akibat perampingan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.
  - Mutasi ke Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan dari Sekretariat Daerah senilai Rp20.000.000,00 berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dengan luas 30.000 m^2 berlokasi di Desa Mengani dipergunakan untuk Pabrik Kopi Mengani.
  - Mutasi ke Dinas Lingkungan Hidup dari Sekretariat Daerah senilai 6.280.400.000 berupa Tanah Kosong yang sudah diperuntukan dengan luas 22.430 m^2 berlokasi di Jalan Brigjen Ngurah Rai berupa Tanah untuk Alun-Alun Pemerintah Kabupaten Bangli
- Mutasi Kurang Mutasi Antar OPD sebesar Rp6.304.000.000,00:
  - Mutasi dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak senilai Rp3.600.000,00 ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berupa

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dengan luas 800 m^2 akibat perampingan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.

- Mutasi dari Sekretariat Daerah ke Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan senilai Rp20.000.000,00 berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dengan luas 30.000 m^2 berlokasi di Desa Mengani dipergunakan untuk Pabrik Kopi Mengani
- Mutasi dari Sekretariat Daerah ke Dinas Lingkungan Hidup senilai 6.280.400.000 berupa Tanah Kosong yang sudah diperuntukan dengan luas 22.430 m^2 berlokasi di Jalan Brigjen Ngurah Rai berupa Tanah untuk Alun-Alun Pemerintah Kabupaten Bangli

- Mutasi Kurang Reklasifikasi ke Aset Lainnya sebesar Rp165.000.000,00 dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman berupa Tanah Bangunan Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman yang dipinjam pakaikan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli
- Mutasi Kurang Pemberian Hibah sebesar Rp491.956.000,00 berasal dari Pemberian Hibah dari Dinas Pertanian Ketahanan Pangan ke Pemerintah Provinsi Bali berupa Tanah Bangunan Kantor Bangunan Pemerintah dan Tanah Bangunan Pasar dengan total luas 3.520 m^2.
- Mutasi Tambah Inventarisasi pada Sekretariat Daerah senilai Rp2.786.170.000,00 akibat pemecahan sertifikat Kantor Bupati Depan dan Belakang.
- Mutasi Kurang Penghapusan senilai Rp640.760.000,00 terdiridari
  - Sekretariat Daerah senilai Rp21.760.000 berupa Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst) seluas 340 m^2 berupa Tanah Gedung PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda) karena telah dilaksanakan Penyertaan Modal kepada PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda);
  - Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan senilai Rp490.000.000,00 berupa Tanah Tambak/Empang/Kolam Ikan/Akuarium seluas 4.900 m^2 berupa Tanah Kolam BBI Yang Api karena pencatatan ganda dengan Pemerintah Provinsi Bali; dan
  - Dinas Perhubungan senilai Rp129.000.000,00 berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah seluas 860 m^2 berupa Tanah Kantor Dinas Perhubungan karena pencatatan ganda dengan Pemerintah Provinsi Bali.

Per 31 Desember 2022 Pemerintah Kabupaten Bangli juga melakukan Pinjam Pakai Tanah ke berbagai Instansi Vertikal antara lain:

1. Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Koranmil Susut senilai Rp4.500.000,00 berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dengan luas 450 m^2 berlokasi di Desa Sulahan, Kecamatan Susut dipergunakan untuk Bangunan Gedung Koranmil dengan nomor perjanjian 028/252/2016 tertanggal 27 April 2016;
2. Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU Bangli) sesuai dengan perjanjian nomor 415.4/12/PP/PKP/2021; 46.1/RT.02.1-BA/5106/KPU-Kab/VI/2021 tertanggal 3 Juni 2021 dengan rincian:
   a. Tanah Bangunan Rumah Negara Gol I senilai Rp68.000.000,00 dengan luas 340 m^2 berlokasi di Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli dipergunakan untuk Kantor KPU Bangli;
   b. Tanah Bangunan Rumah Negara Gol I senilai Rp100.000.000,00 dengan luas 500 m^2 berlokasi di Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli dipergunakan untuk Kantor KPU Bangli;
   c. Tanah Bangunan Rumah Negara Gol I senilai Rp700.000.000,00 dengan luas 2.500 m^2 berlokasi di Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli dipergunakan untuk Kantor KPU Bangli;
3. Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli senilai Rp165.000.000 berupa Tanah Bangunan Kantor dengan Nomor Berita Acara 032/246/DPUPRPERKIM tertanggal 9 Februari 2022

Pada SIMDA BMD tercatat 20 Bidang Tanah yang masing-masing bernilai Rp1,00 di Sekretariat Daerah dengan Kode Kepemilikan Provinsi (Kode Pemilik nomor 11) sesuai Surat Keputusan Gubernur Bali nomor 433 Tahun 1995 tentang Pemanfaatan Tanah Aset Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Bali untuk Tanah Kas Desa. Dalam Pasal 2 SK Gubernur Bali tersebut berbunyi: "Tanah Provinsi yang dimanfaatkan sebagai Tanah Kas Desa dalam lampiran keputusan ini disertifikatkan atas nama Pemerintah Provinsi Bali dan bukti-bukti hak atas tanah dimaksud akan disimpan masing-masing oleh Bupati/Walikota Madya yang bersangkutan ". Dengan demikian tanah tersebut tidak masuk dalam Neraca Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Bangli.

Saat ini terdapat beberapa Tanah dalam penguasaan Pemerintah Kabupaten Bangli teridentifikasi sebagai dobel catat dengan Pemerintah Provinsi Bali. Tanah-tanah tersebut antara lain:

1. Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dengan Kode Barang 01.01.01.04.001.000001 dengan luas 860 m^2 dengan Tahun Perolehan 1996 seharga Rp192.000.000 yang dipergunakan oleh Dinas Perhubungan; dan
2. Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama dengan Kode Barang 01.01.01.01.005.000001 dengan luas 230 m^2 dengan Tahun Perolehan 1985 seharga Rp45.000.000 yang dipergunakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah.

		31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	%
5.3.1.3.2	**Peralatan dan Mesin**	**438.946.426.286,18**	**357.667.592.558,25**	**81.278.833.727,93**	**22,72**

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Dese 2022 dan per 31 Desember 2021. Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten E selama tahun 2022 diuraikan sebagai berikut:

Saldo Awal	**357.667.592.558,25**
Mutasi Tambah:	
- Belanja Modal	60.358.662.837,00
- Koreksi Saldo Awal	125.131.600,00
- Reklasifikasi Antar Aset Tetap	21.520.374.867,93
- Penerimaan Hibah	2.838.420.275,00
- Reklasifikasi dari Barang/Jasa	4.639.050,00
- Mutasi Antar OPD	15.707.561.885,00
- **Jumlah Mutasi Tambah**	**100.554.790.514,93**
- *Mutasi Kurang:*	
Reklasifikasi ke Ekstrakomptabel	2.125.254.471,00
- Reklasifikasi Antar Aset Tetap	140.495.200,00
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	885.606.033,00
- Reklasifikasi ke Barang/Jasa	53.450.000,00
- Koreksi Saldo Awal	363.589.198,00
- Mutasi Antar OPD	15.707.561.885,00
- **Jumlah Mutasi Kurang**	**19.275.956.787,00**
- **Saldo Akhir Peralatan dan Mesin**	**438.946.426.286,18**

Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada masing-masing OPD dapat dilihat pada **lampiran 28**.

Penjelasan atas mutasi aset peralatan dan mesin adalah sebagai berikut:

1. Mutasi tambah sebesar Rp60.358.662.837,00 berasal dari belanja modal tahun 2022.
2. Mutasi Tambah Koreksi Pencatatan Saldo Awal senilai pada Dinas Perhubungan senilai Rp125.131.600,00 berupa koreksi pencatatan Time Switch PJU dan SIM PKB.
3. Mutasi Tambah Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp21.520.374.867,93:
    - Sekretariat Daerah senilai Rp1.101.120.728,00 direklasifikasi dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan.
    - Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah senilai Rp11.711.500,00 direklasifikasi dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan
    - Sekretariat Dewan senilai Rp4.026.077.728,00 direklasifikasi dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan
    - Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman senilai Rp356.678.752,00 direklasifikasi dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan.
    - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga senilai Rp510.450.000,00 direklasifikasi dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan
    - Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan senilai Rp14.982.300,00 direklasifikasi dari Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan.
    - Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp15.499.353.859,93 direklasifikasi dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan.
4. Mutasi Tambah Penerimaan Hibah sebesar Rp2.838.420.275,00:
    - Hibah dari Kementrian PUPR ke Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman senilai Rp2.172.275.275,00;
    - Hibah dari Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga senilai Rp181.785.000,00; dan
    - Hibah dari Pemerintah Provinsi Bali ke Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp484.360.000,00.
5. Mutasi Tambah Reklasifikasi dari Barang/Jasa berasal dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga senilai Rp4.639.050,00 yakni Belanja Barang/Jasa BOP.
6. Mutasi Tambah Mutasi Antar OPD sebesar Rp15.707.561.885,00:
    - Mutasi ke Sekretariat Daerah dari Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kab. Bangli senilai Rp1.748.760.325,00 akibat restrukturisasi OPD;
    - Mutasi ke Sekretariat Daerah dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak senilai Rp300.370.000,00 berupa beberapa kendaraan Roda 4;
    - Mutasi ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak senilai Rp7.483.895.989,00 akibat restrukturisasi OPD;
    - Mutasi ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan dari Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman senilai Rp92.704.100,00 berupa AC dan Televisi.
    - Mutasi ke Dinas Sosial dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak senilai Rp140.240.500,00 akibat restrukturisasi OPD.
    - Mutasi ke Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan dari Sekretariat Daerah senilai Rp459.012.023,00 berupa barang-barang Pabrik Kopi Mengani.
    - Mutasi ke Dinas Lingkungan Hidup dari Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman senilai Rp834.815.198,00 berupa barang-barang di Alun-Alun Kota Bangli.

- Mutasi ke Rumah Sakit Umum Daerah dari Sekretariat Daerah senilai Rp297.800.000,00 berupa Kendaraan Roda 4.
- Mutasi ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari Satuan Polisi Pamong Praja senilai Rp4.349.963.750,00 akibat retsrukturisasi OPD.

7. Mutasi Kurang Reklasifikasi ke Ekstrakompetabel sebesar Rp2.125.254.471,00:
   - Sekretariat Daerah senilai Rp18.750.000 yang berasal dari Pengadaan Belanja Modal 2022 namun nilai satuan barangnya tidak memenuhi batasan minimum Kapitalisasi Aset (Rp1.000.000,00) sehingga harus direklas ke Ekstrakomptabel;
   - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah senilai Rp16.642.818,00 yang berasal dari Pengadaan Belanja Modal 2022 namun nilai satuan barangnya tidak memenuhi batasan minimum Kapitalisasi Aset (Rp1.000.000,00) sehingga harus direklas ke Ekstrakomptabel;
   - Dinas Kesehatan senilai Rp179.776.203,00 yang berasal dari Pengadaan Belanja Modal 2022 namun nilai satuan barangnya tidak memenuhi batasan minimum Kapitalisasi Aset (Rp1.000.000,00) sehingga harus direklas ke Ekstrakomptabel;
   - Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman senilai Rp12.304.998 yang berasal dari Pengadaan Belanja Modal 2022 namun nilai satuan barangnya tidak memenuhi batasan minimum Kapitalisasi Aset (Rp1.000.000,00) sehingga harus direklas ke Ekstrakomptabel;
   - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga senilai Rp1.546.390.490,00 yang berasal dari Pengadaan Belanja Modal 2022 namun nilai satuan barangnya tidak memenuhi batasan minimum Kapitalisasi Aset (Rp1.000.000,00) sehingga harus direklas ke Ekstrakomptabel;
   - Dinas Perhubungan senilai Rp79.017.600,00 yang berasal dari Pengadaan Belanja Modal 2022 namun nilai satuan barangnya tidak memenuhi batasan minimum Kapitalisasi Aset (Rp1.000.000,00) sehingga harus direklas ke Ekstrakomptabel;
   - Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian senilai Rp780.000,00 yang berasal dari Pengadaan Belanja Modal 2022 namun nilai satuan barangnya tidak memenuhi batasan minimum Kapitalisasi Aset (Rp1.000.000,00) sehingga harus direklas ke Ekstrakomptabel;
   - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa senilai Rp10.704.659,00 yang berasal dari Pengadaan Belanja Modal 2022 namun nilai satuan barangnya tidak memenuhi batasan minimum Kapitalisasi Aset (Rp1.000.000,00) sehingga harus direklas ke Ekstrakomptabel
   - Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi senilai Rp21.880.000,00 yang berasal dari Pengadaan Belanja Modal 2022 namun nilai satuan barangnya tidak memenuhi batasan minimum Kapitalisasi Aset (Rp1.000.000,00) sehingga harus direklas ke Ekstrakomptabel;
   - Dinas Sosial senilai Rp1.554.000,00 00 yang berasal dari Pengadaan Belanja Modal 2022 namun nilai satuan barangnya tidak memenuhi batasan minimum Kapitalisasi Aset (Rp1.000.000,00) sehingga harus direklas ke Ekstrakomptabel;
   - Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan senilai Rp3.400.000,00 yang berasal dari Pengadaan Belanja Modal 2022 namun nilai satuan barangnya tidak memenuhi batasan minimum Kapitalisasi Aset (Rp1.000.000,00) sehingga harus direklas ke Ekstrakomptabel;
   - Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp19.617.350,00 yang berasal dari Pengadaan Belanja Modal 2022 namun nilai satuan barangnya tidak memenuhi batasan minimum Kapitalisasi Aset (Rp1.000.000,00) sehingga harus direklas ke Ekstrakomptabel;
   - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan senilai Rp2.450.000,00 yang berasal dari Pengadaan Belanja Modal 2022 namun nilai satuan barangnya tidak memenuhi batasan minimum Kapitalisasi Aset (Rp1.000.000,00) sehingga harus direklas ke Ekstrakomptabel;

- Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp209.486.303,00 yang berasal dari Pengadaan Belanja Modal 2022 namun nilai satuan barangnya tidak memenuhi batasan minimum Kapitalisasi Aset (Rp1.000.000,00) sehingga harus direklas ke Ekstrakomptabel; dan
- Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan senilai Rp2.500.050,00 yang berasal dari Pengadaan Belanja Modal 2022 namun nilai satuan barangnya tidak memenuhi batasan minimum Kapitalisasi Aset (Rp1.000.000,00) sehingga harus direklas ke Ekstrakomptabel;

8. Mutasi Kurang Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp140.495.200,00:
   - Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah senilai Rp44.270.800,00 direklasifikasi Ke Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan;
   - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga senilai Rp5.309.400,00 direklasifikasi ke Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
   - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa senilai Rp80.370.000,00 direklasifikasi ke Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
   - Kecamatan Bangli senilai Rp10.545.000,00 direklasifikasi ke Belanja Modal Gedung dan Bangunan.
9. Mutasi Kurang Reklasifikasi ke Aset Lainnya sebesar Rp885.606.033,00:
   - Sekretariat DPRD senilai Rp46.479.000,00;
   - Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu senilai Rp24.660.000,00;
   - Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan senilai Rp409.267.600,00;
   - Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp66.500.000,00;
   - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan senilai Rp84.700.000,00;
   - Satuan Polisi Pamong Praja senilai Rp32.235.000,00;
   - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik senilai Rp83.823.400,00;
   - Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia senilai Rp121.222.533,00; dan
   - Kecamatan Susut senilai Rp16.718.500,00.
10. Mutasi Kurang Reklas ke Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp53.450.000,00:
    - Dinas Perhubungan senilai Rp4.900.000,00 berupa pemeliharaan yang nilainya di bawah batasan kapitalisasi;
    - Dinas Sosial senilai Rp450.000,00 karena tidak memenuhi kriteria aset tetap;
    - Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan senilai Rp17.600.000,00 karena tidak memenuhi kriteria aset tetap;
    - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan senilai Rp30.500.000,00 berupa sewa alat dan barang persediaan;
11. Mutasi Kurang Koreksi Saldo Awal sebesar Rp363.589.198,00:
    - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil senilai Rp9.920.000,00 akibat perubahan pencatatan Papan Nama Instansi yang digabung ke Gedung Bangunan;
    - Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan senilai Rp1.750.000,00 akibat perubahan pencatatan Papan Nama Instansi yang digabung ke Gedung Bangunan; dan
    - Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp327.944.198,00 akibat koreksi Tiang Bendera di Alun-Alun Kota Bangli;
    - Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan senilai Rp23.975.000,00 akibat perubahan pencatatan Papan Nama Instansi yang digabung ke Gedung Bangunan;
12. Mutasi Kurang Mutasi Antar OPD sebesar Rp5.707.561.885,00:

- Mutasi dari Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kab. Bangli ke Sekretariat Daerah senilai Rp1.748.760.325,00 akibat restrukturisasi OPD;
- Mutasi dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak ke Sekretariat Daerah senilai Rp300.370.000,00 berupa beberapa kendaraan Roda 4;
- Mutasi dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa senilai Rp7.483.895.989,00 akibat restrukturisasi OPD;
- Mutasi dari Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan senilai Rp92.704.100,00 berupa AC dan Televisi.
- Mutasi dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak ke Dinas Sosial senilai Rp140.240.500,00 akibat restrukturisasi OPD.
- Mutasi dari Sekretariat Daerah ke Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan senilai Rp459.012.023,00 berupa barang-barang Pabrik Kopi Mengani.
- Mutasi dari Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman ke Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp834.815.198,00 berupa barang-barang di Alun-Alun Kota Bangli.
- Mutasi dari Sekretariat Daerah ke Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp297.800.000,00 berupa Kendaraan Roda 4.
- Mutasi dari Satuan Polisi Pamong Praja ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp4.349.963.750,00 akibat retsrukturisasi OPD.

Pemerintah Kabupaten Bangli juga melakukan Pinjam Pakai Peralatan dan Mesin ke berbagai Instansi Vertikal antara lain:

1. Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Pengadilan Negeri Bangli senilai Rp22.275.000,00 berupa Genzet dengan nomor perjanjian 028/758/Umum/2016 tertanggal 09 Agustus 2016;
2. Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Pengadilan Negeri Bangli senilai Rp272.450.000,00 berupa Station Wagon dengan nomor perjanjian 032/14.1/PP/PKKP/2017; B 898/P.1.13/CPL.1/05/2017 tertanggal 06 Juni 2017;
3. Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Kejaksaan Tinggi Bali senilai Rp410.000.000,00 berupa Station Wagon dengan nomor perjanjian 032/24/PP/PKKP/2017; B-3833/P1/CPL.2/11/2017 tertanggal 30 November 2017;
4. Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Kejaksaan Negeri Bangli senilai Rp415.120.000,00 berupa Station Wagon dengan nomor perjanjian 032/38/PP/PKKD/2018; B-1984/P.I.13/CPL.1/12/2018 tertanggal 31 Desember 2018;
5. Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Polres Bangli senilai Rp415.120.000,00 berupa Station Wagon dengan nomor perjanjian 032/48/PP/PKKD/2019; SP/48/XII/2019/PPK/POLRES BANGLI tertanggal 31 Desember 2019;
6. Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Kejaksaan Negeri Bangli sesuai dengan nomor perjanjian 032/49/PP/PKKD/2019; B-2453/N.I.13/CPL.1/12/2019 tertanggal 31 Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut:
   a. Pick Up senilai Rp218.000.000,00;
   b. Alat Kantor Lainnya (Lain-lain) senilai Rp21.230.000,00;
   c. Alat Kantor Lainnya (Lain-lain) senilai Rp21.230.000,00;
   d. Server senilai Rp28.750.000,00;
   e. Televisi senilai Rp4.823.610,00;

f. Notebook senilai Rp14.160.000,00;
g. Notebook senilai Rp14.160.000,00;
h. Notebook senilai Rp14.160.000,00;
i. PC Unit senilai Rp14.160.000,00;
j. PC Unit senilai Rp14.160.000,00;
k. PC Unit senilai Rp14.160.000,00;
l. PC Unit senilai Rp14.160.000,00;
m. PC Unit senilai Rp14.160.000,00;
n. PC Unit senilai Rp14.160.000,00;
o. PC Unit senilai Rp14.160.000,00;
p. PC Unit senilai Rp14.160.000,00;
q. PC Unit senilai Rp14.160.000,00;
r. PC Unit senilai Rp14.160.000,00;
s. PC Unit senilai Rp18.200.000,00;
t. Karpet senilai Rp3.397.425,00;
u. AC Split senilai Rp4.950.000,00; dan
v. AC Unit senilai Rp4.955.000,00.

7. Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Komando Distrik Militer (KODIM) 1626 Bangli senilai Rp415.120.000,00 berupa Station Wagon dengan nomor perjanjian 032/50/PP/PKKD/2019; B/1914/XII/2019 tertanggal 31 Desember 2019;
8. Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Pengadilan Negeri Bangli senilai Rp415.120.000,00 berupa Station Wagon dengan nomor perjanjian 032/51/PP/PKKD/2019; W.24-U8/PL.06/12/2019 tanggal 31 Desember 2019;
9. Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Polres Bangli senilai Rp271.500.000,00 berupa Station Wagon dengan nomor perjanjian 032/52/PP/PPKP/2019; B/3489/XII/LOG.4.1.2/2019/Res.Bangli tertanggal 31 Desember 2019.

		31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	%
5.3.1.3.3	**Gedung dan Bangunan**	**643.314.788.999,19**	**464.765.258.821,12**	**178.549.530178,07**	**38,42**

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021. Rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Bangli selama tahun 2022 diuraikan sebagai berikut:

Saldo Awal	**464.765.258.821,12**
Mutasi Tambah:	
- Belanja Modal	180.104.496.229,81
- Penilaian	4.788.418.000,00
- Pembayaran Uang Muka	10.456.764.213,91
- Reklasifikasi dari Belanja Barang/Jasa	136.903.500,00
- Penerimaan Hibah	11.207.751.000,87
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	926.538.593,04
- Reklasifikasi Antar Aset Tetap	17.094.396.321,29
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	581.864.564,00

- Mutasi Antar OPD	31.529.426.133,00
- **Jumlah Mutasi Tambah**	**256.826.558.555,92**
- *Mutasi Kurang:*	
- Reklasifikasi Antar Aset Tetap	38.217.692.192,89
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	4.633.955.323,80
- Reklasifikasi ke Barang/Jasa	743.923.609,20
- Penghapusan	3.152.031.118,96
- Mutasi Antar OPD	31.529.426.133,00
- **Jumlah Mutasi Kurang**	**78.277.028.377,85**
- **Saldo Akhir Gedung dan Bangunan**	**643.314.788.999,19**

Rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada masing-masing OPD dapat dilihat pada **lampiran 29**.

Pada penyusunan LKPD tahun 2022, terdapat mutasi-mutasi dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Mutasi tambah dari belanja modal sebesar Rp180.104.496.229,81
2. Mutasi Tambah Penilaian sebesar Rp4.788.418.000,00:
   - Sekretariat Daerah senilai Rp651.824.000,00 berupa penilaian Gedung yang dipergunakan oleh KPU;
   - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga senilai Rp1.203.871.000,00 berupa Gedung-gedung sekolah yang belum tercatat di tahun sebelumnya;
   - Dinas Perindustrian dan Perdagangan senilai Rp2.281.688.000,00 berupa Bangunan Ruko di Pasar Kayuambua; dan
   - Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp651.035.000,00 berupa tugu tanda batas dan tugu lainnya
3. Mutasi Tambah Pembayaran Uang Muka sebesar Rp10.456.764.213,91 pada Rumah Sakit Umum Daerah
4. Mutasi Tambah Reklasifikasi dari Belanja Barang/Jasa sebesar Rp136.903.500,00:
   - Sekretariat Daerah senilai Rp88.722.000,00 berupa Belanja Pemeliharaan Gedung;
   - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga senilai Rp18.516.500,00 berupa Penyelsaian KDP; dan
   - Dinas Sosial senilai Rp29.665.000,00.
5. Mutasi Tambah Penerimaan Hibah sebesar Rp11.207.751.000,87:
   - Hibah dari Kementrian Kesehatan ke Dinas Kesehatan senilai Rp2.414.786.000,00;
   - Hibah dari Pemerintah Provinsi Daerah Bali ke Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp8.788.666.000,87; dan
   - Hibah dari Kementrian Pertanian ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran senilai Rp4.299.000,00.
6. Koreksi Pencatatan Saldo Awal sebesar Rp926.538.593,04:
   - Dinas Kesehatan senilai Rp574.619.395,04 akibat koreksi kapitalisasi di tahun 2017 berupa pemeliharaan Gedung Puskesmas;
   - Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp327.944.198,00 akibat koreksi Pencatatan Tiang Bendera di Alun-Alun Kota Bangli
   - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan senilai Rp23.975.000,00 akibat koreksi pencatatan papan nama
7. Mutasi Tambah Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp17.094.396.321,29:
   - Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah senilai Rp233.842.000,00 direklasifikasi dari KDP;
   - Sekretariat Dewan senilai Rp9.364.753.260,00 direklasifikasi dari KDP;

- Dinas Kesehatan senilai Rp6.025.632.254,20 direklasifikasi dari Aset Tetap Renovasi yang diserahkan dari RSUD;
- Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman senilai Rp726.845.150,00 direklasifikasi dari KDP;
- Dinas Penddidikan Pemuda dan Olahraga senilai Rp445.404.771,00 direklasifikasi dari KDP;
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan senilai Rp58.458.400,00 direklasifikasi dari KDP;
- Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan senilai Rp1.750.000,00 direklasifikasi dari Peralatan dan Mesin
- Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp227.165.486,09 direklasifikasi dari KDP; dan
- Kecamatan Bangli senilai Rp10.545.000,00 direklasifikasi dari Perlatan dan Mesin berupa Pemeliharaan Papan Nama.

8. Mutasi Tambah Reklasifikasi dari Aset Lainnya sebesar Rp581.864.564,00:
   - Sekretariat Daerah senilai Rp82.101.564,00 berupa Pinjam Pakai Bawaslu yang sudah dikembalikan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli; dan
   - Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp499.763.000,00 berupa DED Gedung RSUD yang sudah selesai dibangun.
9. Mutasi Tambah Mutasi Antar OPD sebesar Rp31.529.426.133,00:
   - Mutasi ke Sekretariat Daerah dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan senilai Rp98.920.000,00 akibat restrukturisasi OPD;
   - Mutasi ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa senilai Rp1.234.900.886,00 dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak akibat restrukturisasi OPD;
   - Mutasi ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan dari Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman senilai Rp6.959.039.150,00 berupa penyerahan pekerjaan pemeliharaan;
   - Mutasi ke Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan dari Sekretariat Daerah senilai Rp466.796.071,00 berupa Gedung Bangunan Kopi Mengani;
   - Mutasi ke Dinas Lingkungan Hidup dari Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman senilai Rp17.363.753.026,00 berupa Bangunan Alun-Alun Kota Bangli dan Penyerahan Hasil Pekerjaan peneliharaan; dan
   - Mutasi ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dari Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman senilai Rp5.406.017.000,00 berupa Penyerahan Hasil Pekerjaan peneliharaan.
10. Mutasi Kurang Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp38.217.692.192,89:
    - Sekretariat Daerah senilai Rp1.101.120.728,00 direklasifikasi ke Peralatan dan Mesin;
    - Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah senilai Rp11.711.500,00 direklasifikasi ke Peralatan dan Mesin;
    - Sekretariat Dewan senilai Rp4.443.610.528,00 direklasifikasi ke Peralatan dan Mesin dan ke Jalan Irigasi dan Jaringan;
    - Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman senilai Rp11.274.668.561,00 direklasifikasi ke Peralatan dan Mesin, Aset Tetap Renovasi dan KDP;
    - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga senilai Rp510.450.000,00 direklasifikasi ke Peralatan dan Mesin;
    - Dinas Perhubungan senilai Rp95.688.276,96 direklasifikasikan ke Jalan Irigasi dan Jaringan;
    - Dinas Koperasi UMKM senilai Rp99.515.385,00 direklasifikasi ke KDP;

- Dinas Perindustrian dan Perdagangan senilai Rp680.785.642,00 direklasifikasikan ke Peralatan dan Mesin dan ke Jalan Irigasi dan Jaringan;
- Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp736.738.473,00 direklasifikasi ke KDP;
- Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp19.263.403.098,93 direklasifikasi ke Perlatan dan Mesin, Jalan irigasi dan Jaringan dan KDP.

11. Mutasi Kurang Reklasifikasi ke Aset Lainnya sebesar Rp4.633.955.323,80:
    - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman senilai Rp1.485.315.999,80
    - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu senilai Rp99.454.890,00
    - Dinas Perindustrian dan Perdagangan senilai Rp216.877.600,00
    - Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp2.689.797.884,00
    - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan senilai Rp142.508.950,00.
12. Mutasi Kurang Reklasifikasi ke Barang/Jasa sebesar Rp743.923.609,20:
    - Sekretariat Daerah senilai Rp73.628.375,00 berupa Pemeliharaan yang tidak masuk Batasan kapitalisasi (10% dari harga perolehan);
    - Dinas Kesehatan senilai Rp395.977.934,20 berupa Pemeliharaan yang tidak masuk Batasan kapitalisasi (10% dari harga perolehan);
    - Dinas Perindustrian dan Perdagangan senilai Rp33.199.600,00 berupa Pemeliharaan yang tidak masuk Batasan kapitalisasi (10% dari harga perolehan);
    - Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp197.002.700,00 berupa Pemeliharaan yang tidak masuk Batasan kapitalisasi (10% dari harga perolehan);
    - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan senilai Rp3.566.000,00 berupa Pemeliharaan yang tidak masuk Batasan kapitalisasi (10% dari harga perolehan); dan
    - Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp44.115.000,00 berupa Pemeliharaan yang tidak masuk Batasan kapitalisasi (10% dari harga perolehan).
13. Mutasi Kurang Penghapusan sebesar Rp3.152.031.118,96:
    - Sekretariat Daerah senilai Rp39.473.000,00 berupa Bangunan Pos Jaga Permanen; dan
    - Dinas Perindustrian dan Perdagangan senilai Rp3.112.558.118,96 berupa Bangunan Pasar.
14. Mutasi Kurang Mutasi Antar OPD sebesar Rp31.529.426.133,00:
    - Mutasi dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ke Sekretariat Daerah senilai Rp98.920.000,00 akibat restrukturisasi OPD;
    - Mutasi dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa senilai Rp1.234.900.886,00 akibat restrukturisasi OPD;
    - Mutasi dari Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan senilai Rp6.959.039.150,00 berupa penyerahan pekerjaan pemeliharaan;
    - Mutasi dari Sekretariat Daerah ke Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan senilai Rp466.796.071,00 berupa Gedung Bangunan Kopi Mengani;
    - Mutasi dari Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman ke Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp17.363.753.026,00 berupa Bangunan Alun-Alun Kota Bangli dan Penyerahan Hasil Pekerjaan peneliharaan; dan
    - Mutasi dari Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan senilai Rp5.406.017.000,00 berupa Penyerahan Hasil Pekerjaan peneliharaan.

Saat ini terdapat beberapa Gedung Bangunan dalam penguasaan Pemerintah Kabupaten Bangli teridentifikasi sebagai dobel catat dengan Pemerintah Provinsi Bali. Gedung Bangunan tersebut antara lain:

1. Bangunan Gedung Kantor Permanen dengan Kode Barang 1.3.01.001.001.001.000007 dengan luas 129 m^2 dengan Tahun Perolehan 1976 seharga Rp494.327.000 yang dipergunakan oleh Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan.

Pemerintah Kabupaten Bangli juga melakukan Pinjam Pakai Gedung dan Bangunan ke berbagai Instansi antara lain:

1. Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Pemerintah Desa Batur Tengah senilai Rp47.000.000,00 berupa Bangunan Klinik/Puskesmas/Laboratorium dengan nomor perjanjian 032/05/PP/PKKP/2018 tertanggal 14 Februari 2018;
2. Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Komando Distrik Militer (KODIM 1626) Bangli senilai Rp250.000.000,00 berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen dengan nomor perjanjian 046/3625/DINSOS/2020 tertanggal 12 Desember 2020; dan
3. Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli senilai Rp1.485.315.999,80 berupa Bangunan Gedung Kantor dengan Nomor Berita Acara 032/246/DPUPRPERKIM tertanggal 9 Februari 2022.

		31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	%
5.3.1.3.4	**Jalan, Irigasi dan Jaringan**	**1.255.416.002.811,16**	**1.187.642.494.878,20**	**67.773.507.932,96**	**5,71**

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021. Rincian mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Bangli selama tahun 2022 diuraikan sebagai berikut:

Saldo Awal	**1.187.642.494.878,20**
Mutasi Tambah:	
- Belanja Modal	37.746.357.806,00
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	460.000.000,00
- Reklasifikasi Antar Aset Tetap	13.344.520.137,96
- Penerimaan Hibah	17.925.007.515,00
- Mutasi Antar OPD	3.605.914.076,00
Jumlah Mutasi Tambah	**73.081.799.534,96**
Mutasi Kurang:	
- Reklasifikasi ke Ekstrakomptabel	8.000.000,00
- Reklasifikasi Antar Aset Tetap	655.534.300,00
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	438.150.226,00
- Reklasifikasi ke Belanja Barang/Jasa	600.693.000,00
- Mutasi Antar OPD	3.605.914.076,00
Jumlah Mutasi Kurang	**5.308.291.602,00**
Saldo Akhir Jalan, Irigasi dan Jaringan	**1.255.416.002.811,16**

Rincian mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada masing-masing OPD dapat dilihat pada **lampiran 30**.

Pemerintah Kabupaten Bangli pada tahun 2023 menerbitkan Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor 620/362/2023 tentang Ruas Jalan menurut Fungsinya sebagai Jalan Kolektor -2, Kolektor-3, Kolektor-4, Lokal, dan Lingkungan (dalam Sistem Jaringan Primer) dan Jalan Arteri, Kolektor, Lokal, dan Lingkungan

(dalam Sistem Jaringan Sekunder) di Kabupaten Bangli. Berdasarkan surat keputusan tersebut, ruas jalan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bangli sebanyak 689 ruas.

Pada penyusunan LKPD tahun 2022, terdapat mutasi-mutasi dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Mutasi tambah dari belanja modal tahun 2022 sebesar Rp37.746.357.806,00 berasal dari seluruh OPD.
2. Mutasi tambah Inventarisasi berasal dari Dinas Perhubungan sebesar Rp460.000.000,00.
3. Mutasi Tambah Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp13.344.520.137,96:
   - Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah senilai Rp44.270.800,00 yang berasal dari Reklasifikasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
   - Sekretariat Dewan senilai Rp417.532.800,00 yang berasal dari Reklasifikasi Belanja Gedung dan Bangunan;
   - Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman senilai Rp8.919.381.480,00 yang berasal dari Reklasifikasi belanja Gedung dan Bangunan;
   - Dinas Perhubungan senilai Rp95.688.276,96 yang berasal dari Reklasifikasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
   - Dinas Perindustrian dan Perdagangan senilai Rp588.081.542,00 yang berasal dari Penyerahan Hasil Pekerjaan dari Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman; dan
   - Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp3.279.565.239,00 yang berasal dari Reklasifikasi belanja Modal Gedung dan Bangunan.
4. Mutasi Tambah Penerimaan Hibah sebesar Rp17.925.007.515,00:
   - Penerimaan Hibah dari Kementrian PUPR senilai Rp14.410.655.465,00 dan dari Provinsi Bali senilai Rp598.312.000,00 ke Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman; dan
   - Penerimaan Hibah dari Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbaru dan konservasi Energi sebesar Rp2.916.040.050,00 ke Dinas Perhubungan berupa PJU Tenaga Surya.
5. Mutasi Tambah Mutasi Antar OPD sebesar Rp3.605.914.076,00:
   - Mutasi ke Dinas Kesehatan dari Rumah Sakit Umum Daerah Rp312.816.600,00 berupa Jaringan Gedung IGD.
   - Mutasi ke Dinas Lingkungan Hidup dari Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman senilai Rp3.293.097.476,00 berupa Jaringan Listrik.
6. Mutasi Kurang Reklasifikasi ke Ekstrakomptabel sebesar Rp8.000.000,00:
   - Dinas Pariwisata senilai Rp8.000.000,00 yang berasal dari Pengadaan Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan karena nilai satuan barangnya tidak memenuhi batasan minimum Kapitalisasi Aset (Rp10.000.000,00) sehingga harus direklas ke Ekstrakompetabel.
7. Mutasi Kurang Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp655.534.300,00:
   - Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman senilai Rp640.552.000,00 ke Konstruksi Dalam Pengerjaan dan Aset Tetap Renovasi; dan
   - Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan sebesar Rp14.982.300,00 yang direklasifikasi ke Peralatan dan Mesin berupa Pompa Air.
8. Mutasi Kurang Reklasifikasi ke Aset Lainnya sebesar Rp438.150.226,00:
   - Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman senilai Rp177.774.450,00
   - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan senilai Rp63.282.400,00
   - Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran senilai Rp197.093.376,00.

9. Mutasi Kurang Reklasifikasi ke Barang/Jasa sebesar Rp600.693.000,00:
    - Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman senilai Rp600.693.000,00
10. Mutasi Kurang Mutasi Antar OPD sebesar Rp3.605.914.076,00:
    - Mutasi dari Rumah Sakit Umum Daerah ke Dinas Kesehatan Rp312.816.600,00 berupa Jaringan Gedung IGD.
    - Mutasi dari Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman ke Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp3.293.097.476,00 berupa Jaringan Listrik.

Berdasarkan hasil Evaluasi atas Efektivitas Pengelolaan Pusat Listrik Tenaga Surya (PLTS) dalam rangka Pengawasan Program Prioritas Nasional Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi (EBTKE) pada Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2011 sampai dengan 2017 berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bali Nomor ST-1924/PW22/2/2018, pengelolaan dan pemanfaatan hasil kegiatan fisik EBTKE belum dilakukan secara memadai yaitu:

a. PLTS tidak segera diserahterimakan oleh Kementrian ESDM kepada Pemkab Bangli sehingga terjadi kerusakan karena tidak ada pemeliharaan;
b. Setelah diserahterimakan kepada Pemkab Bangli, PLTS tersebut belum diserahkan kepada masyarakat karena belum adanya dokumen pengelolaan yang dipakai sebagai dasar pengelolaan oleh masyarakat;
c. Terbatasnya kemampuan ekonomi dan pengetahuan masyarakat penerima jaringan PLTS sehingga tidak dapat segera melakukan perbaikan apabila terjadi kerusakan;
d. Telah masuknya jaringan listrik oleh PLN, sehingga masyarakat lebih memilih beralih ke jaringan PLN dan berpotensi jaringan PLTS akan ditinggalkan oleh masyarakat dan rusak.

		31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan	%
5.3.1.3.5	**Aset Tetap Lainnya**	**75.929.952.477,76**	**79.076.307.886,96**	**(3.146.355.409,20)**	**(3.98)**

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021. Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Bangli selama tahun 2022 diuraikan sebagai berikut:

Saldo Awal	**79.076.307.886,96**
Mutasi Tambah:	
- Belanja Modal	1.585.342.300,00
- Reklasifikasi Antar Aset Tetap	9.508.472.579,00
- Inventarisasi	5.800.000,00
- Mutasi Antar OPD	13.223.906.758,20
Jumlah Mutasi Tambah	**24.323.521.637,20**
Mutasi Kurang:	
- Reklasifikasi ke Ekstrakomptabel	85.432.434,00
- Reklasifikasi Antar Aset Tetap	13.166.036.254,20
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	881.281.600,00
- Reklasifikasi ke Barang/Jasa	113.220.000,00
- Mutasi Antar OPD	13.223.906.758,20
Jumlah Mutasi Kurang	**27.469.877.046,40**

Saldo Akhir Aset Tetap Lainnya	**75.929.952.477,76**

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya pada masing-masing OPD dapat dilihat pada **lampiran 31**.

Pada penyusunan LKPD tahun 2022, terdapat mutasi-mutasi yang material dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Mutasi Tambah berasal dari belanja modal sebesar Rp1.585.342.300,00 berasal dari seluruh OPD.
2. Mutasi Tambah Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp9.508.472.579,00:
   - Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman senilai Rp9.422.793.179,00 yang berasal dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan dan Belanja Modal Jalan irigasi dan Jaringan;
   - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga senilai Rp5.309.400,00 yang berasal dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin berupa Buku-Buku Pelajaran; dan
   - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa senilai Rp80.370.000,00 yang berasal dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin berupa Alat Peraga Praktek Sekolah.
3. Mutasi Tambah Inventarisasi sebesar Rp5.800.000,00 berupa inventarisasi buku-buku di SMPN 1 Bangli.
4. Mutasi Tambah Mutasi Antar OPD sebesar Rp13.223.906.758,20:
   - Mutasi ke Sekretariat Daerah dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan senilai Rp45.480.504,00 berupa Buku-Buku.
   - Mutasi ke Dinas Kesehatan dari Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp6.025.632.254,20 berupa Aset Tetap Renovasi Gedung IGD.
   - Mutasi ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak senilai Rp12.390.000,00 berupa Buku-Buku
   - Mutasi ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran dari Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman senilai Rp7.140.404.000,00 berupa Aset Tetap Renovasi Jalan dan Jembatan.
5. Mutasi Kurang Reklasifikasi ke Ekstrakomptabel sebesar Rp85.432.434,00:
   - Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman senilai Rp33.865.500,00 yang berasal dari Pengadaan Belanja Modal BOS 2022 namun nilai satuan barangnya tidak memenuhi batasan minimum Kapitalisasi Aset (Rp200.000,00) sehingga harus direklas ke Ekstrakompetabel; dan
   - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga senilai Rp51.566.934,00 yang berasal dari Pengadaan Belanja Modal BOS 2022 namun nilai satuan barangnya tidak memenuhi batasan minimum Kapitalisasi Aset (Rp200.000,00) sehingga harus direklas ke Ekstrakompetabel.
6. Mutasi Kurang Reklasifikasi antar Aset Tetap sebesar Rp13.166.036.254,20:
   - Dinas Kesehatan senilai Rp6.025.632.254,20 yang direklas ke Gedung dan Bangunan; dan
   - Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman senilai Rp7.140.404.000,00 yang direklas ke Gedung dan Bangunan.
7. Mutasi Kurang Reklasifikasi ke Aset Lainnya sebesar Rp881.281.600,00:
   - Sekretariat Daerah senilai Rp97.500.000,00
   - Badan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah senilai Rp197.600.500,00;
   - Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian senilai Rp49.500.000,00;
   - Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp499.818.000,00; dan
   - Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia senilai Rp36.863.100,00.

8. Mutasi Kurang Reklasifikasi ke Barang/Jasa berasal dari Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp113.220.000,00 berupa Bibit-Bibit Tanaman
9. Mutasi Kurang Mutasi Antar OPD sebesar Rp13.223.906.758,20:
   - Mutasi dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ke Sekretariat Daerah senilai Rp45.480.504,00 berupa Buku-Buku.
   - Mutasi dari Rumah Sakit Umum Daerah ke Dinas Kesehatan senilai Rp6.025.632.254,20 berupa Aset Tetap Renovasi Gedung IGD.
   - Mutasi dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa senilai Rp12.390.000,00 berupa Buku-Buku
   - Mutasi dari Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran senilai Rp7.140.404.000,00 berupa Aset Tetap Renovasi Jalan dan Jembatan.

Informasi lainnya:

Terdapat Aset Tetap Renovasi pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupa saluran irigasi sebanyak 46 daerah irigasi, berdasarkan Revisi Kepmen PU Nomor 390/KPTS/M/2007 tentang Penetapan Status daerah Irigasi yang Pengelolaannya Menjadi Wewenang dan Tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota di wilayah Kerja BWS Bali-Penida Provinsi Bali.

		31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	%
5.3.1.3.6	**Konstruksi Dalam Pengerjaan**	**5.901.638.883,11**	**16.304.806.709,45**	**(10.403.167.826,34)**	**(63,80)**

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021. Rincian mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Bangli selama tahun 2022 diuraikan sebagai berikut:

Saldo Awal	**16.304.806.709,45**
Mutasi Tambah:	
- Reklasifikasi Antar Aset Tetap	1.999.819.808,00
- Reklasifikasi Dari Belanja Barang/Jasa	77.283.250,00
- Mutasi Antar OPD	99.320.100,00
Jumlah Mutasi Tambah	**2.176.423.158,00**
Mutasi Kurang:	
- Reklasifikasi Antar Aset Tetap	10.916.401.331,00
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	1.563.869.553,34
- Mutasi Antar OPD	99.320.100,00
Jumlah Mutasi Kurang	**12.579.590.984,34**
Saldo Akhir Konstruksi Dalam Pengerjaan	**5.901.638.883,11**

Rincian mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan pada masing-masing OPD dapat dilihat pada **lampiran 32.**

Pada penyusunan LKPD tahun 2022, terdapat mutasi-mutasi dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Mutasi Tambah Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp1.999.819.808,00:

- Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman senilai Rp536.573.000,00;
- Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi senilai Rp99.515.385,00 yang berasal dari belanja Modal Gedung dan Bangunan.
- Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp736.738.473,00 yang berasal dari belanja Modal Gedung dan Bangunan;
- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan senilai Rp142.508.950,00 yang berasal dari belanja Modal Gedung dan Bangunan; dan
- Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp484.484.000,00 yang berasal dari belanja Modal Gedung dan Bangunan.

2. Mutasi Tambah Reklasifikasi dari Belanja Barang/Jasa sebesar Rp77.283.250,00 berasal dari Pariwisata dan Kebudayaan berupa Pembuatan DED Panggung Kesenian terbuka di Kintamani (Pura Segara).
3. Mutasi Tambah Mutasi antar OPD sebesar Rp99.320.100,00:
   - Mutasi ke Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dari Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman senilai Rp99.320.100,00 berupa Belanja Modal Review DED pembangunan Gedung Cretive Hub menjadi DED Pembangunan PLUT.
4. Mutasi Kurang Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp10.916.401.331,00;
   - Badan Keuangan Pendapat dan Aset Daeran senilai Rp233.842.000,00 yang direklasifikasi ke Gedung dan Bangunan;
   - Sekretariat Dewan senilai Rp9.364.753.260,00 yang direklasifikasi ke Gedung dan Bangunan;
   - Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman senilai Rp813.942.900,00;
   - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga senilai Rp445.404.771,00 yang direklasifikasikan ke Gedung dan Bangunan.
   - Dinas Perindustrian dan Perdagangan senilai Rp58.458.400,00 yang direklasifikasikan ke Gedung dan Bangunan.
5. Mutasi Kurang Reklasifikasi ke Aset Lainnya sebesar Rp1.563.869.553,34:
   - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan senilai Rp750.586.067,25 berupa Kajian DED
   - Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp241.972.486,09 berupa Kajian DED
   - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan senilai Rp571.311.000,00 berupa Kajian DED
6. Mutasi Kurang Mutasi antar OPD sebesar Rp99.320.100,00:
   - Mutasi dari Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman ke Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi senilai Rp99.320.100,00 berupa Belanja Modal Review DED pembangunan Gedung Cretive Hub menjadi DED Pembangunan PLUT.

Informasi lainnya:

1. Pemerintah Kabupaten Bangli memiliki 90 Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan yang tersebar di berbagai OPD seperti Dinas PUPRPERKIM, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, RSU Bangli, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi UMKM, BKPAD, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangli dengan total nilai sebesar Rp5.901.638.883,11. Rincian data progres Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dilihat pada **lampiran 33**; dan
2. Pemerintah Kabupaten Bangli dalam merealisasikan belanja modal, telah meminta kepada pelaksana pekerjaan untuk memberikan jaminan pemeliharaan sebesar 5% dari nilai kontrak, Hal ini dilakukan untuk menjamin jika terjadi kerusakan pekerjaan selama masa pemeliharaan pekerjaan. Per 31 Desember

2022, Pemerintah Kabupaten Bangli menguasai sertifikat jaminan pemeliharaan yang diberikan pelaksana pekerjaan sebesar Rp8.406.853.389,60. Rincian data jaminan pemeliharaan dapat dilihat pada **lampiran 34**.

		31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	%
5.3.1.3.7	**Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**	**(1.279.896.955.975,55)**	**(1.136.879.012.331,57)**	**(143.017.943.643,98)**	**12,58**

Jumlah tersebut merupakan saldo Akumulasi Penyusutan Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021. Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Pemerintah Kabupaten Bangli selama tahun 2022 diuraikan sebagai berikut:

Saldo Awal	**(1.136.879.012.331,57)**
Mutasi Tambah:	
- Beban Penyusutan	(125.870.127.719,03)
- Koreksi Saldo Awal	(26.993.247.900,00)
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	(34.369.324,00)
- Mutasi Antar OPD	(13.212.188.916,00)
Jumlah Mutasi Tambah	**(166.109.933.859,03)**
Mutasi Kurang:	
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	(1.971.918.532,00)
- Koreksi Saldo Awal	(6.210.831.842,05)
- Penghapusan	(1.697.050.925,00)
- Mutasi Antar OPD	(13.212.188.916,00)
- **Jumlah Mutasi Kurang**	**(23.091.990.215,05)**
Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	**(1.279.896.955.975,55)**

Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per jenis Aset Tetap pada masing-masing OPD dapat dilihat pada **lampiran 35**.

Informasi lainnya:

Nilai akumulasi penyusutan atas aset peralatan mesin di RSUD Kab. Bangli menggunakan data yang tercatat di SIMDA BMD Pemerintah Kabupaten Bangli, tidak menggunakan nilai pada Laporan Keuangan Audited KAP per 31 Desember 2022 karena perhitungan penyusutan dengan SIMDA BMD sudah sesuai dengan kebijakan akuntansi yaitu penyusutan dihitung saat perolehan aset tetap, sedangkan oleh KAP menghitung penyusutan berdasarkan tanggal NPHD.

		31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	%
5.3.1.4	**Properti Investasi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dalam Aset Tetap Tanah dan Aset Tetap Gedung dan Bangunan terdapat Aset yang memiliki karakteristik seperti Properti Investasi, namun belum dapat dilakukan koreksi penyajian sebagai Aset Properti Investasi dikarenakan belum tersedianya kebijakan akuntansi untuk mengakui, mengukur, dan menilai aset tersebut, serta belum tersedianya Bagan Akun Standar (BAS) yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk mengikhtisarkan dalam Laporan Keuangan.

	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/(Penurunan)	%

		(Rp)	(Rp)		
5.3.1.5	**Dana Cadangan**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Tidak terdapat saldo Dana Cadangan Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2022.

		31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	%
5.3.1.6	**Aset Lainnya**	**18.528.947.615,38**	**12.708.076.274,00**	**3.624.076.370,38**	**28,52**

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut:

- Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aset Tidak Berwujud	7.752.412.242,25	6.189.039.766,67	1.563.372.475,58	25,26
- Aset Lain-Lain	10.776.535.373,13	6.519.036.507,33	2.060.703.894,80	31,61
Jumlah	**18.528.947.615,38**	**12.708.076.274,00**	**3.624.076.370,38**	**28,52**

		31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	%
5.3.1.6.1	**Tagihan Jangka Panjang**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo Tagihan Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut:

- Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
- Penyisihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Jumlah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Saldo Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 disajikan berdasarkan Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Daerah oleh BPK RI per 31 Desember 2022. Selain itu terdapat informasi atas hasil pemeriksaan APIP, data kerugian daerah Tahun 2004-2021 (s.d. 31 Desember 2022) yang belum ditetapkan Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), yaitu:

1. Proses Penyelesaian Rp295.042.296,00; dan
2. Belum ditindaklanjuti Rp15.946.023,00.

		31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	%
5.3.1.6.2	**Aset Tidak Berwujud**	**7.752.412.242,25**	**6.189.039.766,67**	**1.563.372.475,58**	**25,26**

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tidak Berwujud Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021, dengan perincian sebagai berikut:

- Aset Tidak Berwujud	10.582.906.873,25	7.491.699.510,00	3.091.207.363,25	41,26
- Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(2.830.494.631,00)	(1.302.659.743,33)	(1.527.834.887,67)	117,29
Jumlah	**7.752.412.242,25**	**6.189.039.766,67**	**1.563.372.475,58**	**25,26**

Rincian mutasi Aset Tidak Berwujud dan rincian mutasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud pada masing-masing OPD dapat dilihat pada **Lampiran 36** dan **37.**

		31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	%
5.3.1.6.3	**Aset Lain-Lain**	**10.776.535.373,13**	**6.519.036.507,33**	**4.257.498.865,80**	**65,31**
	Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Lain-Lain Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut:				
	- Aset Tetap Rusak Berat	27.567.654.256,83	26.881.553.223,83	686.101.033,00	2,55
	- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rusak Berat	(25.063.922.325,50)	(24.427.541.380,50)	636.380.945,00	2,61
	- Aset Tetap Digunakan Pihak Ketiga/Pinjam Pakai	8.100.302.938,80	4.789.512.599,00	3.310.790.339,80	69,13
	- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Digunakan Pihak Ketiga/Pinjam Pakai	(2.072.478.977,00)	(783.787.959,00)	(1.288.691.018,00)	164,42
	- Aset Tetap yang Akan Dihibahkan/ Disertakan	8.165.298,00	8.165.298,00	0,00	0,00
	- Kas yang Dibatasi Penggunaannya	40.019.211,00	51.134.726,00	(11.115.515,00)	(21,74)
	- Treasury Deposit Facility	2.196.794.971,00	0,00	2.196.794.971,00	100,00
	Jumlah	**10.776.535.373,13**	**6.519.036.507,33**	**4.257.498.865,80**	**65,31**

Rincian Jenis Saldo Aset Tetap Rusak Berat Tahun 2022 dilihat di bawah ini:

Jenis Aset Tetap Rusak Berat	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku Tahun 2022
Peralatan dan Mesin	23.897.627.256,83	22.128.708.275,50	1.768.918.981,33
Gedung dan Bangunan	3.281.917.000,00	2.710.648.550,00	571.268.450,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	369.365.000,00	224.565.500,00	144.799.500,00
Aset Tetap Lainnya	18.745.000,00	0,00	18.745.000,00

Jumlah	**27.567.654.256,83**	**25.063.922.325,50**	**2.503.731.931,33**

Aset Tetap Rusak Berat

Rincian mutasi Aset Tetap Rusak Berat dapat dilihat di bawah ini:

Saldo Awal		**26.881.553.223,83**
Mutasi Tambah:		
Reklasifikasi dari Aset Tetap	800.906.033,00	
Mutasi Antar OPD	13.200.000,00	
Jumlah Mutasi Tambah		**814.106.033,00**
Mutasi Kurang:		
Koreksi Saldo Awal	37.805.000,00	
Mutasi Antar OPD	13.200.000,00	
Penghapusan	77.000.000,00	
Jumlah Mutasi Kurang		**128.005.000,00**

Saldo Akhir Aset Tetap Rusak Berat **27.567.654.256,83**

Rincian mutasi Aset Tetap Rusak Berat untuk masing-masing OPD dapat dilihat pada **Lampiran 38**.

Informasi lainnya: Terdapat aset hilang senilai Rp11.500.000,00 belum diproses penelitian tuntutan ganti rugi dan masih tercatat pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DPPKBP3A).

Aset Tetap Digunakan Pihak Ketiga/Pinjam Pakai

Rincian mutasi Aset Tetap Digunakan Pihak Ketiga/Pinjam Pakai dapat dilihat di bawah ini:

Saldo Awal		**4.789.512.599,00**
Mutasi Tambah:		
Reklasifikasi dari Aset Tetap	3.806.311.903,80	
Jumlah Mutasi Tambah		**3.806.311.903,80**
Mutasi Kurang:		
Reklasifikasi ke Aset Tetap	495.521.564,00	
Jumlah Mutasi Kurang		**495.521.564,00**
Saldo Akhir Aset Tetap Digunakan Pihak Ketiga/Pinjam Pakai		**8.100.302.938,80**

Rincian Aset Tetap Digunakan Pihak Ketiga/Pinjam Pakai per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.789.512.599,00 pada masing-masing OPD dapat dilihat pada **Lampiran 39.**

Pinjam Pakai Pemerintah Kabupaten Bangli kepada Instansi Vertikal, diantaranya adalah sebagai berikut:

A. TANAH

1. Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Koramil Susut senilai Rp4.500.000,00 berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dengan luas 450 m^2 berlokasi di Desa Sulahan,

Kecamatan Susut dipergunakan untuk Bangunan Gedung Koranmil dengan nomor perjanjian 028/252/2016 tertanggal 27 April 2016;

2. Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU Bangli) sesuai dengan perjanjian nomor 415.4/12/PP/PKP/2021; 46.1/RT.02.1-BA/5106/KPU-Kab/VI/2021 tertanggal 3 Juni 2021 dengan rincian:
   - Tanah Bangunan Rumah Negara Gol I senilai Rp68.000.000,00 dengan luas 340 m^2 berlokasi di Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli dipergunakan untuk Kantor KPU Bangli;
   - Tanah Bangunan Rumah Negara Gol I senilai Rp100.000.000,00 dengan luas 500 m^2 berlokasi di Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli dipergunakan untuk Kantor KPU Bangli;
   - Tanah Bangunan Rumah Negara Gol I senilai Rp700.000.000,00 dengan luas 2.500 m^2 berlokasi di Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli dipergunakan untuk Kantor KPU Bangli;
   - Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli senilai Rp165.000.000 berupa Tanah Bangunan Kantor dengan Nomor Berita Acara 032/246/DPUPRPERKIM tertanggal 9 Februari 2022.

B. PERALATAN dan MESIN

1. Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Pengadilan Negeri Bangli senilai Rp22.275.000,00 berupa Genzet dengan nomor perjanjian 028/758/Umum/2016 tertanggal 09 Agustus 2016;
2. Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Pengadilan Negeri Bangli senilai Rp272.450.000,00 berupa Station Wagon dengan nomor perjanjian 032/14.1/PP/PKKP/2017; B 898/P.1.13/CPL.1/05/2017 tertanggal 06 Juni 2017;
3. Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Kejaksaan Tinggi Bali senilai Rp410.000.000,00 berupa Station Wagon dengan nomor perjanjian 032/24/PP/PKKP/2017; B-3833/P1/CPL.2/11/2017 tertanggal 30 November 2017;
4. Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Kejaksaan Negeri Bangli senilai Rp415.120.000,00 berupa Station Wagon dengan nomor perjanjian 032/38/PP/PKKD/2018; B-1984/P.I.13/CPL.1/12/2018 tertanggal 31 Desember 2018;
5. Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Polres Bangli senilai Rp415.120.000,00 berupa Station Wagon dengan nomor perjanjian 032/48/PP/PKKD/2019; SP/48/XII/2019/PPK/POLRES BANGLI tertanggal 31 Desember 2019;
6. Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Kejaksaan Negeri Bangli senilai Rp514.016.035,00 berupa kendaraan, alat lantor lainnya, server, televisi, Notebook, PC Unit, AC dan karpet dengan nomor perjanjian 032/49/PP/PKKD/2019; B-2453/N.I.13/CPL.1/12/2019 tertanggal 31 Desember 2019 \;
7. Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Komando Distrik Militer (KODIM) 1626 Bangli senilai Rp415.120.000,00 berupa Station Wagon dengan nomor perjanjian 032/50/PP/PKKD/2019; B/1914/XII/2019 tertanggal 31 Desember 2019;
8. Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Pengadilan Negeri Bangli senilai Rp415.120.000,00 berupa Station Wagon dengan nomor perjanjian 032/51/PP/PKKD/2019; W.24-U8/PL.06/12/2019 tertanggal 31 Desember 2019; dan
9. Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Polres Bangli senilai Rp271.500.000,00 berupa Station Wagon dengan nomor perjanjian 032/52/PP/PPKP/2019; B/3489/XII/LOG.4.1.2/2019/Res.Bangli tertanggal 31 Desember 2019.

C. GEDUNG dan BANGUNAN

1. Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Pemerintah Desa Batur Tengah senilai Rp47.000.000,00 berupa Bangunan Klinik/Puskesmas/Laboratorium dengan nomor perjanjian 032/05/PP/PKKP/2018 tertanggal 14 Februari 2018;
2. Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Komando Distrik Militer (KODIM 1626) Bangli senilai Rp250.000.000,00 berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen dengan nomor perjanjian 046/3625/DINSOS/2020 tertanggal 12 Desember 2020;
3. Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli senilai Rp1.485.315.999,80 berupa Bangunan Gedung Kantor dengan Nomor Berita Acara 032/246/DPUPRPERKIM tertanggal 9 Februari 2022

Aset Tetap yang Akan Dihibahkan/ Disertakan

Aset Tetap yang Akan Dihibahkan/Disertakan per 31 Desember 2022 sebesar Rp8.165.298,00 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan berupa *Detail Engineering Design* (DED) Pasar Desa Abang Batundinding sebesar Rp6.000.000,00 dan DED Pasar Desa Bayung Gede sebesar Rp2.165.298,00. Tidak ada mutasi tambah dan kurang atas Aset Tetap yang Akan Dihibahkan/ Disertakan selama Tahun 2022.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya dapat dilihat di bawah ini:

Saldo Awal		**(25.211.329.339,50)**
Mutasi Tambah:		
Reklasifikasi dari Akumulasi Penyusutan Aset Tetap ke Rusak Berat	(741.670.529,00)	
Reklasifikasi dari Akumulasi Penyusutan Aset Tetap ke Yang digunakan Pihak ketiga	(1.323.060.342,00)	
Mutasi Antar OPD Aset Tetap Rusak berat	(7.450.000,00)	
Jumlah Mutasi Tambah		**(2.072.180.871,00)**
Mutasi Kurang:		
Koreksi Pencatatan Saldo Awal Aset Rusak Berat	(28.289.584,00)	
Reklasifikasi dari Akumulasi Penyusutan Yang Digunakan ke Pihak Ketiga ke Aset tetap	(34.369.324,00)	
Penghapusan	(27.000.000,00)	
Mutasi Antar OPD	(7.450.000,00)	
Jumlah Mutasi Kurang		**(97.108.908,00)**
Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		**(27.186.401.302,50)**

Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada masing-masing OPD dapat dilihat pada **Lampiran 40 dan 41.**

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	%
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	**40.019.211,00**	**51.134.726,00**	**(11.115.515,00)**	**(21,74)**

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas yang Dibatasi Penggunaannya Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021. Jumlah tersebut sama dengan Utang Jangka Pendek Lainnya atas jaminan pembongkaran reklame. Jaminan pembongkaran reklame disimpan pada rekening tabungan di BPD Bali Nomor 020.02.02.64979-9 atas nama jaminan pembongkaran reklame di BKPAD. Rekening penampung ini telah ditetapkan dengan SK Bupati Nomor 973/407/2020 sebagai rekening Pemerintah Daerah. Saldo nilai jaminan pembongkaran reklame per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp40.019.211,00.

		31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	%
5.3.2	**Kewajiban**	**100.607.968.846,70**	**49.250.774.624,50**	**51.357.194.222,20**	**104,28**

Jumlah tersebut merupakan saldo Kewajiban Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut:

- Kewajiban Jangka Pendek	29.828.283.644,70	38.566.844.924,50	(8.738.561.280,50)	(22,66)
- Kewajiban Jangka Panjang	70.779.685.202,00	10.683.929.700,00	60.095.755.502,00	562,49
Jumlah	**100.607.968.846,70**	**49.250.774.624,50**	**51.357.194.221,50**	**104,28**

		31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	%
5.3.2.1	**Kewajiban Jangka Pendek**	**29.828.283.644,70**	**38.566.844.924,50**	**(8.738.561.279,80)**	**(22,66)**

Jumlah tersebut merupakan saldo Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut:

- Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	745.454,00	1.083.035,00	(337.581,00)	(31,17)
- Utang Bunga	382.589.121,00	0,00	382.589.121,00	100,00
- Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	996.897.055,00	0,00	996.897.055,00	100,00
- Pendapatan Diterima Dimuka	197.958.598,50	118.937.034.06	79.021.564,44	66,44
- Utang Beban	22.278.573.989,77	18.244.202.011,77	4.034.371.978,00	22,11
- Utang Jangka Pendek Lainnya	5.971.519.426,43	20.202.622.843,67	14.231.103.417,24	(70,44)
Jumlah	**29.828.283.644,70**	**38.566.844.924,50**	**(8.738.561.279,80)**	**(22,66)**

		31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	%
5.3.2.1.1	**Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)**	**745.454,00**	**1.083.035,00**	**(337.581,00)**	**31,17**

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021. Saldo Utang PFK yang merupakan utang pajak PPN dari Belanja Dana BOS yang belum dibayarkan ke Kas Negara per 31 Desember 2022 sebesar Rp745.454,00. Saldo utang PFK tahun 2020 yang belum dibayarkan ke Kas Negara sebesar Rp754.454,00.

		31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	%
5.3.2.1.2	**Utang Bunga**	**382.589.121,00**	**0,00**	**382.589.121,00**	**100,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Bunga Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021. Utang Bunga merupakan utang bunga atas Pinjaman Pemerintah Kabupaten Bangli ke pada PT SMI untuk periode Desember 2022. Dan sudah dibayarkan di bulan Januari 2023 yang pembayarannya dilakukan dengan pemotongan langsung pada dana DAU bulan Januari 2023.

		31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	%
5.3.2.1.3	**Bagian Lancar Utang Jangka Panjang**	**996.897.055,00**	**0,00**	**996.897.055,00**	**100,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan utang atas Pinjaman Pemerintah Kabupaten Bangli ke pada PT SMI yang jatuh tempo per 31 Desember 2023. Pembayaran pertama atas pembayaran bagian lamcar utang jangka panjang ini berdasarkan perjanjian dengan PT SMI Nomor PERJ-145A/SMI/0921 tanggal 23 September 2021 bahwa diberikannya masa tenggang/*grace period* pembayaran pokok pinjaman selama 24 bulan, terhitung dari pembayaran pertama bunga pinjaman yaitu tanggal 31 Desember 2021, dan atas pembayarannya akan dilakukan pemotongan langsung pada dana DAU bulan Januari 2024.

		31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	%
5.3.2.1.4	**Pendapatan Diterima Dimuka**	**197.958.598,50**	**118.937.034.06**	**79.021.564,44**	**66,44**

Jumlah tersebut merupakan saldo Pendapatan Diterima Dimuka Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021. Pendapatan Dibayar Dimuka merupakan pendapatan yang belum diakui sebagai Pendapatan dalam Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2022. Pendapatan Diterima Dimuka tersebut terdiri dari:

- Pajak Reklame	135.871.872,47	111.959.897,08	23.911.975,39	21,36
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	6.977.136,99	6.977.136,99	0,00	0,00
- Pendapatan Sewa BMD (*Food Court*)	55.109.589,04	0,00	55.109.589,04	100,00
Jumlah	**197.958.598,50**	**118.937.034.06**	**79.021.564,43**	**66,44**

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada **lampiran 42**

		31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	%
5.3.2.1.5	**Utang Belanja**	**22.278.573.989,77**	**18.244.202.011,77**	**4.034.371.978,00**	**22,11**

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Belanja pada Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut:

- Utang Belanja Pegawai	13.485.113.161,00	13.338.267.107,00	146.846.054,00	1,10
- Utang Belanja Barang dan Jasa	8.793.417.828,77	4.905.934.904,77	3.887.482.924,00	79,24
- Utang Belanja Transfer	43.000,00	0,00	43.000,00	100,00
Jumlah	**22.278.573.989,77**	**18.244.202.011,77**	**4.034.371.978,00**	**22,11**

Utang beban transfer merupakan utang Pemerintah Kabupaten Bangli kepada Desa Undisan karena kurang membayar atas Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Desa Undisan sebesar Rp43.000,00

Rincian masing-masing jenis Utang Belanja pada masing-masing OPD dapat dilihat pada **lampiran 43.**

		31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	%
5.3.2.1.6	**Utang Jangka Pendek Lainnya**	**5.971.519.426,43**	**20.202.622.843,67**	**(14.231.103.417,24)**	**(70,44)**

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Jangka Pendek Lainnya Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021. Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2022 terdiri dari:

- Utang Kelebihan Pembayaran PAD	7.171.095,43	278.666,67	6.892.428,76	2473,36
- Utang Jaminan Pembongkaran Reklame	40.019.211,00	51.134.726,00	(11.115.515,00)	(21,74)
- Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	0.00	9.194.015.931,00	(9.194.015.931,00)	(100)
- Utang Kelebihan Transfer Kemenkes	5.924.329.120,00	10.957.193.520,00	(5.032.864.400,00)	(45,94)
Jumlah	**5.971.519.426,43**	**20.202.622.843,67**	**(14.231.103.417,24)**	**(70,44)**

Penjelasan atas data diatas adalah sebagai berikut:

a. Saldo Utang Kelebihan Pembayaran PAD sebesar Rp7.171.095,43 tyerdiri atas kelebihan pembayaran pajak air tanah sebesar Rp12.000,00 dan retribusi pemanfaatan kantin sebesar Rp266.666,67 atas saldo yang belum dikompensasikan atas pendapatan utang tahun 2022. Kelebihan pembayaran pajak air tanah sebesar Rp145.000,00 terdiri dari I Nengah Daster sebesar Rp130.000,00 dan I Ketut Ratep sebesar Rp15.000,00. Kelebihan pembayaran pajak senilai Rp6.519.371,20 merupakan kelebihan pembayaran Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi atas nama WR Epid Menara. Kelebihan pembayaran Hasil Pengelolaan Dana Bergulir CTKI atas nama Ni Putu Galuh Ayumi Rimpi sebesar Rp228.057,56
b. Utang Jaminan Pembongkaran Reklame sebesar Rp40.019.211,00 merupakan jaminan bongkar yang diberikan WP Reklame kepada Pemerintah Kabupaten Bangli pada saat pemberian izin reklame dan yang belum jatuh tempo masa tayang per 31 Desember 2021. Rincian Utang Jaminan Pembongkaran Reklame dapat dilihat pada **lampiran 44.**

c. Utang Kelebihan Transfer Kemenkes sebesar Rp5.924.329.120,00merupakan kelebihan transfer atas klaim pembayaran pasien *Covid-19* dari Kemenkes pada Rumah Sakit Umum Daerah per 31 Desember 2022. Jumlah utang kelebihan transfer diatas merupakan saldo setelah rekonsiliasi antara RSUD Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Kemenkes RI.

		31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penuruna)	%
5.3.2.2	**Kewajiban Jangka Panjang**	**70.779.685.202,00**	**10.683.929.700,00**	**60.095.755.502,00**	**562,49**

Jumlah tersebut merupakan saldo Kewajiban Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021. Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2022 terdiri dari:

- Utang kepada Pemerintah Pusat	70.779.685.202,00	10.683.929.700,00	60.095.755.502,00	562,00
Jumlah	**70.779.685.202,00**	**10.683.929.700,00**	**60.095.755.502,00**	**562,00**

Utang kepada Pemerintah Pusat merupakan Utang Pemerintah Kabupaten Bangli kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Sesuai dengan perjanjian Pemerintah Kabupaten Bangli dengan PT SMI Nomor PERJ-145A/SMI/0921 tanggal 23 September 2021 bahwa Pemerintah Kabupaten Bangli melakukan Pinjaman PEN Daerah kepada PT. SMI untuk tujuan pembiayaan kegiatan pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Bangli, dengan jangka waktu pinjaman adalah 96 bulan yaitu dimulai sejak pencairan pinjaman pertama kali, termasuk masa tenggang/*grace period* pembayaran pokok pinjaman selama 24 bulan. Jumlah yang sudah dicaikan adalah senilai Rp10.683.929.700,00 tanggal 27 Desember 2021 yang merupakan uang muka 15 % dari kontrak pembangunan Gedung RSUD Bangli. Pada tahun 2022 disalurkan bertahap yaitu tahap II tanggal 28 April 2022 sebesar Rp32.051.789.100,00 dan tahap III tanggal 27 Juli 2022 sebesar Rp29.040.863.457,00.

		31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	%
5.3.3	**Ekuitas**	**1.417.352.886.340,64**	**1.336.079.836.287,24**	**81.273.050.053,40**	**6,08**

Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021. Rincian perhitungan nilai Ekuitas dapat dilihat pada CaLK bagian Penjelasan **Laporan Perubahan Ekuitas poin 5.6.4.**

5.4 Penjelasan atas Pos - Pos Laporan Operasional

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan informasi ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Bangli Tahun 2022 dan 2021 yang diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.4.1 Kegiatan Operasional

		Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.4.1.1	**Pendapatan - LO**	**1.095.624.789.264,36**	**1.116.874.509.338,52**

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Pendapatan Operasional Pemerintah Kabupaten Bangli untuk Tahun 2022 dan 2021, yang terdiri dari:

- Pendapatan Asli Daerah - LO	162.362.768.249,39	158.846.073.455,98
- Pendapatan Transfer - LO	916.646.787.691,00	884.853.395.351,54
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO	16.615.233.323,97	73.175.040.531,00
Jumlah	**1.095.624.789.264,36**	**1.116.874.509.338,52**

		Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.4.1.1.1	**Pendapatan Asli Daerah -LO**	**162.362.768.249,39**	**158.846.073.455,98**

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Pendapatan Asli Daerah– LO Pemerintah Kabupaten Bangli untuk Tahun 2022 dan 2021, yang terdiri dari:

- Pendapatan Pajak Daerah – LO	38.308.122.487,60	26.829.823.928,24
- Pendapatan Retribusi Daerah – LO	36.421.180.795,00	8.298.523.911,79
- Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	8.088.493.469,20	8.520.574.208,41
- Lain-lain PAD yang Sah – LO	79.544.971.497,59	115.197.151.407,54
Jumlah	**162.362.768.249,39**	**158.846.073.455,98**

		Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.4.1.1.1	**Pendapatan Pajak Daerah - LO**	**38.308.122.487,60**	**26.829.823.928,24**

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Pendapatan Pajak Daerah– LO Pemerintah Kabupaten Bangli untuk Tahun 2022 dan 2021, yang terdiri dari:

- Pajak Hotel - LO	1.725.459.545,00	190.554.267,00
- Pajak Restoran - LO	5.583.051.643,00	1.309.590.352,00
- Pajak Hiburan - LO	103.734.704,00	0,00
- Pajak Reklame - LO	1.356.892.845,60	717.855.040,24
- Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain-LO	10.260.619.430,00	9.120.769.135,00
- Pajak Parkir - LO	2.610.000,00	3.240.000,00
- Pajak Air Tanah - LO	366.085.686,00	539.272.980,00
- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LO	4.468.676.898,00	5.221.236.907,00
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan– LO	14.440.991.736,00	9.727.305.247,00
Jumlah	**38.308.122.487,60**	**26.829.823.928,24**

Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah - LO TA 2022 ini lebih besar dari saldo Pendapatan Pajak Daerah dalam LRA sebesar Rp1.601.062.008,53 (Rp38.308.122.487,60 - Rp36.707.060.479,07). Hal tersebut disebabkan karena adanya perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Pajak Daerah - LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

SELISIH LO – LRA	**1.601.062.008,53**
Penjelasan Selisih	
Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
- Piutang Pajak Hotel per 31 Desember 2022	235.859.995,55
- Piutang Pajak Restoran per 31 Desember 2022	1.444.450.765,30
- Piutang Pajak Hiburan per 31 Desember 2022	13.959.574,43
- Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2022	2.649.880,00
- Piutang Pajak Penerangan per 31 Desember 2022	876.496.630,00
- Piutang Pajak Air Tanah per 31 Desember 2022	793.973.820,50
- Piutang Pajak PBB-P2 per 31 Desember 2022	35.359.716.655,00
- Piutang Pajak BPHTB per 31 Desember 2022	90.000.000,00
- Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Reklame Tahun 2021 untuk Masa Pajak 2022	111.959.897,07
Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
- Piutang Pajak Hotel per 31 Desember 2021	(275.688.693,55)
- Piutang Pajak Restoran per 31 Desember 2021	(1.516.116.824,30)
- Piutang Pajak Hiburan per 31 Desember 2021	(14.174.065,00)
- Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2021	(2.779.880,00)
- Piutang Pajak Penerangan per 31 Desember 2021	(761.033.304,00)
- Piutang Pajak Air Tanah per 31 Desember 2021	(751.003.030,00)
- Piutang Pajak PBB-P2 per 31 Desember 2021	(33.760.192.540,00)
- Piutang Pajak BPHTB per 31 Desember 2021	(111.000.000,00)
- Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2022 atas Pajak Reklame	
- Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Reklame per 31 Desember 2022	(135.871.872,47)
- Utang atas kelebihan penerimaan Pajak Air Tanah Tahun 2022	(145.000,00)
Jumlah Penjelasan Selisih	**1.601.062.008,53**

		Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.4.1.1.1.2	**Pendapatan Retribusi Daerah-LO**	**36.421.180.795,00**	**8.298.523.911,79**

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Pendapatan Retribusi Daerah– LO Pemerintah Kabupaten Bangli untuk Tahun 2022 dan 2021, yang terdiri dari:

Retribusi Jasa Umum	**1.189.456.800,00**	**3.529.283.375,00**
- Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	63.687.500,00	569.236.175,00
- Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO	109.929.000,00	111.504.000,00
- Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum– LO	380.464.000,00	363.779.000,00
- Retribusi Pelayanan Pasar - LO	152.037.000,00	2.114.589.000,00
- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO	302.131.000,00	194.457.000,00
- Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang – LO	15.903.300,00	10.658.200,00
- Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO	165.305.000,00	165.060.000,00

Retribusi Jasa Usaha	**34.906.371.995,00**	**4.540.226.636,79**
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO	71.154.880,00	63.299.136,79
- Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan – LO	2.071.428.000,00	0,00
- Retribusi Terminal– LO	7.046.500,00	6.113.500,00
- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga – LO	32.575.707.115,00	4.280.607.000,00
- Retribusi Penyebrangan Air – LO	62.850.500,00	35.183.000,00
- Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah – LO	118.185.000,00	155.024.000,00
Retribusi Perizinan Tertentu	**325.352.000,00**	**22.9013.900,00**
- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO	323.974.500,00	227.873.900,00
- Retribusi Izin Trayek - LO	1.377.500,00	1.140.000,00
Jumlah	**36.421.180.795,00**	**8.298.523.911,79**

Pengakuan Pendapatan Retribusi Daerah – LO TA 2022 ini lebih besar dari saldo Pendapatan Retribusi Daerah dalam LRA sebesar Rp92.881.628,80 (Rp36.421.180.795,00 –Rp36.328.299.166,20), Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Retribusi Daerah - LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

SELISIH LO – LRA	**92.881.628,80**
Penjelasan Selisih	
Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
- Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan per 31 Desember 2022	28.324.000,00
- Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi per 31 Desember 2022	142.135.000,00
- Piutang Retribusi Sewa Kantin per 31 Desember 2022	7.200.000,00
Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
- Penerimaan pembayaran Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Tahun 2021 pada Tahun 2022	(7.348.000,00)
- Penerimaan pembayaran Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2021 pada Tahun 2022	(70.910.000,00)
- Kelebihan Bayar Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi pada Tahun 2022	(6.519.371,20)
Jumlah Penjelasan Selisih	**92.881.628,80**

		Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.4.1.1.1.3	**Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO**	**8.088.493.469,20**	**8.520.574.208,41**

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan– LO Pemerintah Kabupaten Bangli untuk Tahun 2022 dan 2021, yang terdiri dari:

- Bagian Laba Bank BPD Bali- LO	3.036.851.110,68	3.498.214.596,41
- Bagian Laba Bank Pasar Bangli - LO	4.790.214.655,60	4.266.309.430,00
- Bagian Laba dari PDAM Bangli - LO	257.318.458,92	749.638.608,00

- Baian Laba dari PT Jamkrida Bali - LO	4.109.244,00	6.411.574,00
Jumlah	**8.088.493.469,20**	**8.520.574.208,41**

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan– LO Pemerintah Kabupaten Bangli untuk Tahun 2022 dan 2021. Pengakuan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO Tahun 2021 ini lebih besar dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA sebesar Rp2.491.062.928,02 (Rp8.088.493.469,20 – Rp5.597.430.541,18). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

SELISIH LO – LRA	**2.491.062.928,02**
Penjelasan Selisih	
Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
- Pengakuan Laba PDAM Bangli Tahun Buku 2022 yang belum diterima	257.318.458,92
- Pengakuan Laba PD BPR Bank Pasar Tahun Buku 2022 yang belum diterima	4.790.214.655,60
Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
- Pembagian Laba PDAM Bangli Tahun Buku 2021 pada Tahun 2022	(100.000.000,00)
- Laba PD BPR Bank Pasar Tahun Buku 2021 pada Tahun 2022	(2.456.470.186,50)
Jumlah Penjelasan Selisih	**2.491.062.928,02**

		Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.4.1.1.1.4	**Lain-Lain PAD yang Sah - LO**	**79.544.971.497,59**	**115.197.151.407,54**

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Lain-Lain PAD yang Sah - LO oleh Pemerintah Kabupaten Bangli untuk Tahun 2022 dan 2021, yang terdiri dari:

- Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO	227.662.899,00	1.084.759.650,00
- Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan – LO	25.890.410,96	0.00
- Penerimaan Jasa Giro – LO	1.246.623.492,95	1.427.956.348,94
- Hasil Pengelolaan Dana Bergulir – LO	21.935.068,69	23.363.011,48
- Pendapatan Bunga – LO	1.021.366.122,96	1.253.125.000,03
- Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LO	164.799.086,00	125.562.071,50
- Pendapatan Denda Pajak Daerah – LO	764.084.308,60	462.970.592,82
- Pendapatan Denda Retribusi Daerah – LO	44.177.910,00	25.650.400,00
- Pendapatan dari Pengembalian – LO	523.917.115,17	6.203.156.072,51
- Pendapatan BLUD – LO	75.486.484.885,26	104.580.456.852,26
- Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda – LO	1.500.000,00	10.100.000,00
- Lain-lain PAD yang Sah Lainnya – LO	16.530.198,00	51.408,00
Jumlah	**79.544.971.497,59**	**115.197.151.407,54**

Pengakuan Lain-Lain PAD yang Sah - LO TA 2022 ini lebih kecil dari saldo Lain-Lain PAD yang Sah dalam LRA sebesar Rp14.171.918.825,54 (Rp79.544.971.497,59 – Rp65.373.052.672,05). Hal

tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Lain-Lain PAD yang Sah - LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

SELISIH LO – LRA	**14.171.918.825,54**
Penjelasan Selisih	
Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
- Piutang Pendapatan BLUD RSU Tahun 2022	11.567.567.150,00
- Pengakuan Pendapatan atas kompensasi Utang Kelebihan Transfer Klaim Covid-19 dari Kemenkes Tahun 2021	5.032.864.400,00
- Piutang Pendapatan BLUD DISKES Tahun 2022	26.314.900,00
- Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 2021	21.935.068,69
- Pendapatan Jasa Giro di Rekening Dana Bantuan Bencana	25.714.070,11
- Pendapatan Remunerasi/Bunga TDF-TDK di rekening	532.789,58
Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
- Pendapatan Diterima Dimuka atas Sewa *Food Court* PU Tahun 2022	(46.750.684,93)
- Pendapatan Diterima Dimuka atas Sewa *Food Court* DLH Tahun 2022	(8.358.904,11)
- Penerimaan pembayaran Piutang Pendapatan BLUD RSU Tahun 2021 pada Tahun 2022	(2.436.490.700,00)
- Penerimaan pembayaran Piutang Pendapatan BLUD DISKES Tahun 2021 pada Tahun 2022	(1.231.650,00)
- Penerimaan pembayaran Piutang Denda Retribusi Menara Telekomunikasi Tahun 2021 pada Tahun 2022	(2.300.628,80)
- Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Tahun 2022	(7.876.985,00)
Jumlah Penjelasan Selisih	**14.171.918.825,54**

		Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.4.1.1.2	**Pendapatan Transfer - LO**	**916.646.787.691,00**	**884.853.395.351,54**

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Pendapatan Transfer - LO oleh Pemerintah Kabupaten Bangli untuk Tahun 2022 dan 2021, yang terdiri dari:

- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	759.593.691.037,00	783.564.595.602,00
- Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO	157.053.096.654,00	101.288.799.749,54
Jumlah	**916.646.787.691,00**	**884.853.395.351,54**

		Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.4.1.1.2.1	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**759.593.691.037,00**	**783.564.595.602,00**

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO oleh Pemerintah Kabupaten Bangli untuk Tahun 2022 dan 2021, yang terdiri dari:

- Dana Perimbangan	749.077.902.037,00	693.976.408.602,00
- Dana Insentif Daerah (DID)	10.515.789.000,00	89.588.187.000,00
Jumlah	**759.593.691.037,00**	**783.564.595.602,00**

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)

5.4.1.1.2.1.1	**Dana Perimbangan**	**749.077.902.037,00**	**693.976.408.602,00**

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Pendapatan Dana Perimbangan oleh Pemerintah Kabupaten Bangli untuk Tahun 2022 dan 2021, yang terdiri dari:

Bagi Hasil Pajak – LO	**19.725.733.173,00**	**23.204.074.660,00**
- DBH PBB – LO	6.278.976.334,00	7.234.613.084,00
- DBH PPh Pasal 21 – LO	11.719.650.774,00	14.306.560.675,00
- DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/ WPOPD – LO	1.434.677.687,00	1.327.646.816,00
- DBH CHT – LO	292.428.378,00	335.254.085,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam – LO	**2.170.118.509,00**	**1.674.500.150,00**
- DBH SDA Kehutanan – PSDH – LO	54.298,00	0,00
- DBH SDA Perikanan – LO	2.170.064.211,00	1.674.500.150,00
Dana Alokasi Umum – LO	**524.703.553.041,00**	**525.978.399.000,00**
Dana Alokasi Khusus Fisik – LO	**99.489.151.070,00**	**88.363.575.610,00**
- DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD – LO	1.054.813.250,00	3.113.460.416,00
- DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD – LO	23.332.884.000,00	13.358.312.069,00
- DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP – LO	14.565.534.000,00	6.783.759.171,00
- DAK FisikûBidang Pendidikan-Reguler-SKB – LO	0,00	614.284.540,00
- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pelayanan Kesehatan Dasar – LO	0,00	1.442.739.145,00
- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pelayanan Kesehatan Rujukan – LO	0,00	2.286.205.000,00
- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pelayanan Kefarmasian – LO	1.551.055.101,00	1.257.609.318,00
- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB – LO	0,00	2.584.195.587,00
- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat – LO	829.761.958,00	0,00
- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- KB – LO	589.314.000,00	464.507.666,00
- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB) – LO	0,00	11.054.957.088,00
- DAK Fisik- Bidang Kelautan dan Perikanan - Penugasan – LO	0,00	302.128.811,00
- DAK Fisik - Bidang Pariwisata-Penugasan – LO	0,00	1.007.071.214,00
- DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler- Jalan – LO	18.825.519.000,00	22.595.008.161,00
- DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan – LO	0,00	5.484.981.789,00

- DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Keselamatan Jalan – LO	0,00	3.581.335.250,00
- DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler – LO	6.187.756.000,00	2.852.205.000,00
- DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler – LO	5.532.180.000,00	569.013.250,00
- DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan – LO	0,00	1.332.681.750,00
- DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan – LO	0,00	4.935.301.130,00
- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan – LO	25.490.333.761,00	2.743.819.255,00
- DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan – LO	1.530.000.000,00	0,00
Dana Alokasi Khusus Non Fisik – LO	**102.989.346.244,00**	**54.755.859.182,00**
- DAK Non Fisik-BOS Reguler – LO	36.145.918.620,00	0,00
- DAK Non Fisik-TPG PNSD – LO	49.447.991.700,00	50.704.923.800,00
- DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD – LO	1.137.000.000,00	281.399.500,00
- DAK Non Fisik-TKG PNSD – LO	228.650.000,00	(228.650.000,00)
- DAK Non Fisik-BOP PAUD – LO	921.460.000,00	902.297.000,00
- DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan – LO	74.850.000,00	(74.850.000,00)
- DAK Non Fisik-BOKKB-BOK – LO	10.562.136.000,00	1.091.037.495,00
- DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB – LO	2.529.046.000,00	382.086.741,00
- DAK Non Fisik-PK2UKM – LO	404.200.000,00	427.894.250,00
- DAK Non Fisik–Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan – LO	97.157.924,00	875.729.596,00
- DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan – LO	935.220.000,00	84.524.000,00
- DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal – LO	360.216.000,00	121.488.800,00
- DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian – LO	145.500.000,00	187.978.000,00

Pengakuan Pendapatan Dana Perimbangan - LO TA 2022 ini lebih Besar dari Pendapatan Dana Perimbangan LRA sebesar Rp9.557.157.400,00 (Rp749.077.902.037,00 – Rp 739.520.744.637,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Dana Perimbangan – LO, yang bisa dijelaskan sebagai berikut:

SELISIH LO – LRA	**9.557.157.400,00**
Penjelasan Selisih	
Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
- Pengakuan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Non Pajak yang disalurkan melalui rekening *Trasury Depositb Facillity* (TDF) Berdasarkan nota dinas Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor ND-67/PB.6/2023 tanggal 25 Januari 2023	2.196.794.971,00
- Utang Tahun 2021 atas kelebihan transfer Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD, yang dikompensasi di Tahun 2022 (Sesuai rekon TKDD TA 2022)	1.267.346.200,00
- Utang Tahun 2021 atas kelebihan transfer Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD yang dikompensasi di Tahun 2022 (Sesuai rekon TKDD TA 2022)	45.000.000,00

- Utang Tahun 2021 atas kelebihan transfer Dana Tunjangan Khusus Guru rekon TKDD yang dikompensasi di Tahun 2022 (Sesuai rekon TKDD TA 2022)	228.650.000,00
- Utang Tahun 2021 atas kelebihan transfer Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD yang dikompensasi di Tahun 2022 (Sesuai rekon TKDD TA 2022)	537.400.000,00
- Utang Tahun 2021 atas kelebihan transfer Dana BOP Pendidikan Kesetaraan yang dikompensasi di Tahun 2022 (Sesuai rekon TKDD TA 2022)	74.850.000,00
- Utang Tahun 2021 atas kelebihan transfer Dana Bantuan Operasional Kesehatan yang dikompensasi di Tahun 2022 (Sesuai rekon TKDD TA 2022)	5.528.121.490,00
- Utang Tahun 2021 atas kelebihan transfer Bantuan Operasional Keluarga Berencana yang dikompensasi di Tahun 2022 (Sesuai rekon TKDD TA 2022)	1.017.438.165,00
- Utang Tahun 2021 atas kelebihan transfer Dana P2UKM yang dikompensasi di Tahun 2022 (Sesuai rekon TKDD TA 2022)	6.846.450,00
- Utang Tahun 2021 atas kelebihan transfer Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan yang dikompensasi di Tahun 2022 (Sesuai rekon TKDD TA 2022)	97.157.924,00
- Utang Tahun 2021 atas kelebihan transfer Dana Pelayanan Kepariwisataan yang dikompensasi di Tahun 2022 (Sesuai rekon TKDD TA 2022)	199.263.000,00
- Utang Tahun 2021 atas kelebihan transfer dana fasilitas Penanaman Modal yang dikompensasi di Tahun 2022 (Sesuai rekon TKDD TA 2022)	50.417.200,00
- Utang Tahun 2021 atas kelebihan transfer Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian yang dikompensasi di Tahun 2022 (Sesuai rekon TKDD TA 2022)	3.272.000,00
- **Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:**	
- Dana BOP PAUD Swasta yang dianggarkan pada Dinas Pendidikan, namun dananya ditransfer langsung oleh pusat ke rekening PAUD	(1.695.400.000,00)
- **Jumlah Penjelasan Selisih**	**9.557.157.400,00**

		Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.4.1.1.2.1.2	**Dana Insentif Daerah (DID) – LO**	**10.515.789.000,00**	**89.588.187.000,00**

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Pendapatan Dana Insentif Daerah (DID) oleh Pemerintah Kabupaten Bangli untuk Tahun 2022 dan 2021. Tidak terdapat perbedaan nilai Dana Insentif Daerah (DID) antara LO dan LRA TA 2022.

		Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.4.1.1.2.1.3	**Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur – LO**	**0,00**	**0,00**

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Pendapatan Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur – LO oleh Pemerintah Kabupaten Bangli untuk Tahun 2022 dan 2021. Tidak terdapat perbedaan nilai Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur antara LO dan LRA TA 2022

		Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.4.1.1.2.1.4	**Dana Keistimewaan – LO**	**0,00**	**0,00**

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Pendapatan Dana Keistimewaan – LO oleh Pemerintah Kabupaten Bangli untuk Tahun 2022 dan 2021. Tidak terdapat perbedaan nilai Dana Keistimewaan antara LO dan LRA TA 2022.

		Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.4.1.1.2.1.5	**Dana Desa – LO**	**0,00**	**0,00**

Pengakuan Dana Desa - LO Tahun 2022 ini lebih kecil dari saldo Danda Desa - LRA sebesar Rp55.556.929.000,00 (Rp0,00 – Rp55.556.929.000,00). Penerimaan Dana Desa Tahun 2022 tidak diakui sebagai Pendapatan dan Beban pada Laporan Operasional, sesuai Bultek Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Akrual karena dana dimaksud merupakan hak Pemerintah Desa untuk memanfaatkannya, sedangkan Pemerintah Kabupaten Bangli sebagai penampung sementara sebelum disalurkan, sehingga Pendapatan dan Beban Dana Desa tidak dapat diukur sebagai bagian dari kinerja Pemerintah Kabupaten Bangli.

		Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.4.1.1.2.2	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**157.053.096.654,00**	**101.288.799.749,54**

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Pendapatan Transfer Antar Daerah oleh Pemerintah Kabupaten Bangli untuk Tahun 2022 dan 2021, yang terdiri dari:

- Pendapatan Bagi Hasil – LO	94.827.825.602,00	76.400.595.475,54
- Bantuan Keuangan – LO	62.225.271.052,00	24.888.204.274,00
Jumlah	**157.053.096.654,00**	**101.288.799.749,54**

		Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.4.1.1.2.2.1	**Pendapatan Bagi Hasil – LO**	**94.827.825.602,00**	**76.400.595.475,54**

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO oleh Pemerintah Kabupaten Tahun 2022 dan 2021, yang terdiri dari:

- Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	39.461.962.967,00	3.3961.283.892,51
- Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	18.433.742.019,00	10.926.433.348,85
- Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	19.428.795.322,00	16.043.642.007,43
- Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan- LO	119.910.633,00	108.911.478,02
- Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	17.383.414.661,00	15.360.324.748,73
Jumlah	**94.827.825.602,00**	**76.400.595.475,54**

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Pendapatan Bagi Hasil– LO oleh Pemerintah Kabupaten Bangli untuk Tahun 2022 dan 2021. Pengakuan Pendapatan Bagi Hasil – LO ini lebih kecil dari Pendapatan Bagi Hasil – LRA sebesar Rp1.917.520.391,00 (Rp94.827.825.602,00 – Rp92.910.305.211,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Transfer Pemerintah Provinsi dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

SELISIH LO – LRA	**1.917.520.391,00**

Penjelasan Selisih	
Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
- Pengakuan Pendapatan LO atas Piutang Bagi Hasil Pajak Tahun 2022	17.540.579.457,00
Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
- Penerimaan pembayaran Bagi Hasil Pajak Tahun 2021 pada Tahun 2022	(15.623.059.066,00)
Jumlah Penjelasan Selisih	**1.917.520.391,00**

		Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.4.1.1.2.2.2	**Bantuan Keuangan – LO**	**62.225.271.052,00**	**24.888.204.274,00**

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi - LO oleh Pemerintah Kabupaten Bangli untuk Tahun 2022 dan 2021. Tidak terdapat perbedaan nilai antara jumlah Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi – LO dengan jumlah Bantuan Keuangan - LRA TA 2022.

		Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.4.1.1.3	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO**	**14.986.646.781,87**	**73.175.040.531,00**

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Lain - Lain Pendapatan yang Sah– LO oleh Pemerintah Kabupaten Bangli untuk Tahun 2022 dan 2021 berupa Pendapatan Hibah - LO.

		Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.4.1.1.3.1	**Pendapatan Hibah - LO**	**16.615.233.323,97**	**73.175.040.531,00**

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Pendapatan Hibah – LO oleh Pemerintah Kabupaten Bangli untuk Tahun 2022 dan 2021. Adapun rincian pendapatan hibah Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat – LO	3.827.707.468,00	70.908.093.115,00
- Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah – LO	12.084.908.145,97	2.008.282.666,00
- Pendapatan hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri – LO	0,00	258.664.750,00
- Sumbangan Pihak Pihak Ketiga/Sejenis – LO	702.617.710,00	0,00
Jumlah	**16.615.233.323,97**	**73.175.040.531,00**

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Pendapatan Hibah – LO oleh Pemerintah Kabupaten Bangli untuk Tahun 2022 dan 2021. Pengakuan Pendapatan Hibah – LO TA 2022 ini lebih besar dari saldo Pendapatan Hibah dalam LRA sebesar Rp14.284.029.071,87 (Rp14.986.646.781,87 – Rp702.617.710,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa - peristiwa yang mempengaruhi penambahan saldo Pendapatan Hibah - LO, karena adanya hibah non kas/aset tetap yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bangli, yang dapat dijelaskan pada **lampiran 47**.

		Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.4.1.2	**Beban**	**1.023.137.809.771,11**	**1.011.897.091.672,75**

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban oleh Pemerintah Kabupaten Bangli untuk Tahun 2022 dan 2021, yang terdiri dari:

- Beban Operasi	937.591.585.503,11	926.822.379.210,75
- Beban Transfer	85.546.224.268,00	85.074.712.462,00
Jumlah	**1.023.137.809.771,11**	**1.011.897.091.672,75**

Rincian beban masing-masing OPD dapat dilihat pada **Lampiran 46**.

		Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.4.1.2.1	**Beban Operasi**	**937.591.585.503,11**	**926.822.379.210,75**

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban untuk kegiatan operasional oleh Pemerintah Kabupaten Bangli untuk Tahun 2022 dan 2021, yang terdiri dari:

- Beban Pegawai	516.014.432.127,00	499.024.662.090,38
- Beban Barang dan Jasa	279.439.427.417,05	260.297.315.636,53
- Beban Bunga	3.672.260.844,57	0,00
- Beban Hibah	8.067.691.302,07	12.740.451.027,00
- Beban Bantuan Sosial	253.030.998,00	238.566.000,00
- Beban Penyusutan dan Amortisasi	126.736.069.106,70	2.373.158.702,26
- Beban Penyisihan Piutang	2.532.893.519,88	150.833.692.301,43
- Beban Lain-Lain	875.780.187,84	1.314.533.453,15
Jumlah	**937.591.585.503,11**	**926.822.379.210,75**

		Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.4.1.2.1.1	**Beban Pegawai**	**516.014.432.127,00**	**499.024.662.090,38**

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Pegawai untuk kegiatan operasional oleh Pemerintah Kabupaten Bangli untuk Tahun 2022 dan 2021, yang terdiri dari:

- Beban Gaji dan Tunjangan ASN	308.542.243.553,00	307.557.601.492,00
- Beban Tambahan Penghasilan ASN	96.121.118.855,00	93.962.595.801,00
- Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	50.208.741.600,0	49.989.468.534,00
- Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	19.916.521.806,00	18.393.640.206,00
- Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	292.692.188,00	175.267.566,00
- Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan & Anggota DPRD serta KDH/WKDH	510.480.000,00	493.830.000,00
- Beban Pegawai BLUD	33.577.875.658,00	23.015.210.778,00
- Beban Pegawai BOS	6.844.758.467,00	5.437.047.713,38
Jumlah	**516.014.432.127,00**	**499.024.662.090,38**

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Pegawai – LO oleh Pemerintah Kabupaten Bangli untuk Tahun 2022 dan 2021. Pengakuan Beban Pegawai – LO ini lebih besar dari Belanja Pegawai – LRA sebesar Rp147.184.586,00 (Rp516.014.432.127,00 – Rp515.867.247.541,00), Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Beban Pegawai dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

SELISIH LO – LRA	**147.184.586,00**
Penjelasan Selisih	
Penambahan Beban LO:	

- Pengakuan Beban LO atas Utang Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan) pada OPD Non-BLUD TA 2022	440.986.653,00
- Pengakuan Beban LO atas Utang Belanja Pegawai (TPP) pada OPD Non-BLUD TA 2022	7.665.922.070,00
- Pengakuan Beban LO atas Utang Belanja Pegawai (TPP) pada OPD Non-BLUD TA 2022	5.378.542.970,0
Pengurangan Beban LO:	
- Pengurangan Beban LO atas pembayaran Utang Belanja Pegawai (TPP) yang Beban-nya telah diakui sebelum Tahun 2022 pada OPD Non-BLUD 2021	(745.550.033,00)
- Pengurangan Beban LO atas pembayaran Utang TPG yang bebannya telah diakui sebelum Tahun 2022	(7.682.691.789,00)
- Pengurangan Beban LO atas pembayaran Utang Belanja Pegawai BLUD yang Beban-nya telah diakui sebelum Tahun 2022	(4.910.025.285,00)
Jumlah Penjelasan Selisih	**147.184.586,00**

		Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.4.1.2.1.2	**Beban Barang dan Jasa**	**279.439.427.417,05**	**260.297.315.636,53**

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Barang dan Jasa – LO untuk kegiatan operasional oleh Pemerintah Kabupaten Bangli untuk Tahun 2022 dan 2021, yang terdiri dari:

- Beban Barang	100.442.779.491,21	76.239.734.761,23
- Beban Jasa	143.156.845.214,34	155.288.226.356,70
- Beban Pemeliharaan	10.379.662.986,50	3.752.039.051,00
- Beban Perjalanan Dinas	23.586.681.725,00	13.461.826.410,00
- Beban Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/pihak Lain/Masyarakat	1.873.458.000,00	11.555.489.057,60
Jumlah	**279.439.427.417,05**	**260.297.315.636,53**

		Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.4.1.2.1.2.1	**Beban Barang**	**100.442.779.491,21**	**76.239.734.761,23**

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Barang yang terdiri dari Beban Persediaan Habis Pakai dan Beban Persediaan Tak Habis Pakai untuk kegiatan operasional oleh Pemerintah Kabupaten Bangli untuk Tahun 2022 dan 2021. Pengakuan Beban Barang – LO ini lebih besar dari Belanja Barang – LRA sebesar Rp37.908.316.170,41 (Rp100.442.779.491,21 – Rp62.534.463.320,80), Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan-pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Beban Persediaan Habis Pakai dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

SELISIH LO – LRA	**37.908.316.170,41**
Penjelasan Selisih	
Penambahan Beban Barang LO:	
- Penambahan Beban LO karena Penggunanan Persediaan TA 2021 dalam pelaksanaaan kegiatan Operasional	16.117.015.732,62
- Pengakuan Beban LO karena adanya Penambahan Utang Belanja Barang Tahun 2022	6.958.109.958,77
- Penambahan Beban LO atas pengakuan Beban Barang yang berasal dari Reklas Belanja Modal	416.126.673,00
- Penambahan Beban atas Reklasifikasi Beban Persdiaan dari Dana BTT	353.624.000,00

- Pengakuan Beban LO yang berasal dari Reklasifikasi Beban Extracompatable Asset Tetap	2.198.428.503,00
- Pengakuan Beban LO yang berasal dari Reklassifikasi Beban BLUD	22.527.252.771,30
- Pengakuan Beban LO atas Pemakaian Obat buffer Dinas Kesehatan	531.015.358,45
- Pengakuan Beban LO dari Reklasifikasi Beban Barang Dana BOS	12.867.016.881,96
Pengurangan Beban Barang LO:	
- Pengurangan Beban LO atas Pengakuan Persediaan yang berasal dari barang TA 2022	(20.453.245.061,12)
- Pengurangan Beban LO karena adanya Pembayaran Utang Belanja yang bebannya diakui sebelum TA 2022	(3.227.093.254,77)
- Pengurangan Beban LO atas Pengakuan Beban Persediaan Obat yang di hibahkan ke BMC, LAPAS, BAWASLU	(238.076.342,80)
- Pengurangan Beban LO karena adanya kapitalisasi sebagai Aset Tetap atas Belanja Persediaan	(4.639.050,00)
- Pengurangan Beban LO akibat salah catat atas Pengurangan Aset Alat Kantor menjadi Aset *Ekstracompatable* atas Pengadaan aset tahun lalu	(9.920.000,00)
- Pengurangan Beban LO karena Reklas Beban Persedian Ke Beban Jasa (Sewa aset tetap)	(127.300.000,00)
Jumlah Penjelasan Selisih	**37.908.316.170,41**

		Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.4.1.2.1.2.2	**Beban Jasa**	**143.156.845.214,34**	**155.288.226.356,70**
	Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Jasa untuk kegiatan operasional oleh Pemerintah Kabupaten Bangli untuk Tahun 2022 dan 2021, yang terdiri dari:		
	- Beban Jasa Kantor	91.169.288.639,39	100.328.220.662,40
	- Beban Iuran Jaminan/Asuransi	42.956.907.200,00	49.482.690.514,75
	- Beban Sewa Tanah	67.338.362,68	2.000.000,00
	- Beban Sewa Peralatan dan Mesin	3.556.203.651,27	1.020.637.516,95
	- Beban Sewa Gedung dan Bangunan	308.040.000,00	221.270.000,00
	- Beban Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	10.703.524,00	0,00
	- Beban Jasa Konsultasi Konstruksi	268.050.000,00	0,00
	- Beban Jasa Konsultasi Non Konstruksi	769.905.031,00	1.604.336.666,60
	- Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.004.502.006,00	2.013.163.396,00
	- Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	45.906.800,00	615.907.600
	Jumlah	**143.156.845.214,34**	**155.288.226.356,70**

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Jasa – LO oleh Pemerintah Kabupaten Bangli untuk tahun 2022 dan 2021. Pengakuan Beban Jasa – LO ini lebih besar dari Belanja Jasa – LRA sebesar Rp11.815.903.876,34 (Rp143.156.845.214,34 – Rp131.340.941.338,00), Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Beban Jasa dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

SELISIH LO – LRA	**11.815.903.876,34**
Penjelasan Selisih	
Penambahan Beban Jasa LO:	

- Penambahan Beban LO karena adanya Penambahan Utang Jasa Tahun 2022	1.773.545.932,00
- Penambahan Beban LO atas Pengakuan Beban yang berasal dari Beban Dibayar Dimuka yang belum diakui sebagai Beban saat pengeluaran Kas	347.444.355,56
- Penambahan Beban LO atas Pengakuan beban yang berasal dari Reklasifikasi Belanja Modal	625.693000,00
- Penambahan Beban karena Reklas dari Beban Jasa BLUD	5.924.812.570,00
- Penambahan Beban LO karena Reklas dari Beban Persediaan	127.300.000,00
- Penambahan Beban LO karena Reklas dari Beban Jasa BOS	4.741.623.781,39
- Penambahan Beban atas Reklasifikasi Beban Jasa dari Dana BTT	328.425.000,00
Pengurangan Beban Jasa LO:	
- Pengurangan Beban LO karena adanya Pembayaran Utang Belanja Jasa yang Beban-nya telah diakui sebelum Tahun 2022	(1.541.860.070,00)
- Pengurangan Beban LO karena adanya pengakuan Beban Dibayar dimuka sehingga pengakuan Beban dialokasikan secara bertahap	(511.080.692,61)
Jumlah Penjelasan Selisih	**11.815.903.876,34**

		Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.4.1.2.1.2.3	**Beban Pemeliharaan**	**10.379.662.986,50**	**3.752.039.051,00**

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Pemeliharaan oleh Pemerintah Kabupaten Bangli untuk Tahun 2022 dan 2021. Pengakuan Beban Pemeliharaan dalam LO Tahun 2022 sebesar Rp10.386.883.861,50 yang terdiri dari:

- Beban Pemeliharaan Tanah	0,00	49.782.500,00
- Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.596.017.985,21	2.557.183.545,00
- Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.332.064.120,29	878.158.456,00
- Beban Pemeliharaan Jaringan	451.580.881,00	237.800.550,00
- Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	29.114.000,00
Jumlah	**10.379.662.986,50**	**3.752.039.051,00**

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Pemeliharaan – LO oleh Pemerintah Kabupaten Bangli untuk Tahun 2022 dan 2021. Pengakuan Beban Pemeliharaan – LO ini lebih besar dari Belanja Pemeliharaan – LRA sebesar Rp5.724.301.269,61 (Rp10.379.662.986,50 – Rp4.655.361.716,89), Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Beban Pemeliharaan dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

SELISIH LO – LRA	**5.724.301.269,61**
Penjelasan Selisih	
Penambahan Beban Pemeliharaan LO:	
- Penambahan Beban atas Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk pemeliharaan yang tidak dikapitalisasikan	308.617.446,00
- Penambahan Beban atas Belanja Modal JIJ untuk pemeliharaan yang tidak dikapitalisasikan	207.910.662,00
- Penambahan Beban karena Reklas dari Beban Barang dan Jasa BLUD	702.603.287,00
- Penambahan Beban karena Reklas dari Beban Barang dan Jasa BOS	4.722.922.624,61
Pengurangan Beban Pemeliharaan LO:	
- Pengurangan Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang dikapitalisasiken ke Aset Tetap	(217.752.750,00)
Jumlah Penjelasan Selisih	**5.724.301.269,61**

		Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.4.1.2.1.2.4	**Beban Perjalanan Dinas**	**23.586.681.725,00**	**13.461.826.410,00**

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Perjalanan Dinas oleh Pemerintah Kabupaten Bangli untuk Tahun 2022 dan 2021. Pengakuan Beban Perjalanan Dinas dalam LO Tahun 2022 sebesar Rp13.461.826.410,00, yang terdiri dari:

- Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.038.196.025,00	3.960.585.000,00
- Beban Perjalanan Dinas Luar Kota	15.548.485.700,00	9.501.241.410,00
Jumlah	**23.586.681.725,00**	**13.461.826.410,00**

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Perjalanan Dinas – LO oleh Pemerintah Kabupaten Bangli untuk Tahun 2022 dan 2021. Pengakuan Beban Perjalanan Dinas – LO ini lebih besar dari Belanja Perjalanan Dinas – LRA sebesar Rp542.386.350,00 (Rp23.586.681.725,00 – Rp23.044.295.375,00). Nilai tersebut merupakan Reklas dari Beban Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp90.684.325,00 dan Reklas dari Beban Barang dan Jasa BOS sebesar Rp451.702.025,00.

		Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.4.1.2.1.2.5	**Beban Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**	**1.873.458.000,00**	**11.555.489.057,60**

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain – LO oleh Pemerintah Kabupaten Bangli untuk tahun 2022 dan 2021. Beban Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain – LO ini lebih besar dari Belanja Beban Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain – LRA sebesar Rp1.748.408.000,00 (Rp1.873.458.000,00 – Rp125.050.000,00,00), Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Beban Jasa dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

SELISIH LO – LRA	**1.748.408.000,00**
Penjelasan Selisih	
Penambahan Beban LO:	
- Penambahan Beban atas Reklasifikasi Beban Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dari Dana BTT	1.748.408.000,00
Pengurangan Beban Pemeliharaan LO:	
Jumlah Penjelasan Selisih	**1.748.408.000,00**

		Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.4.1.2.1.3	**Beban Bunga**	**3.672.260.844,57**	**0,00**

Jumlah tersbut merupakan pengakuan Beban Bunga - LO oleh Pemerintah Kabupaten Bangli untuk Tahun 2022 dan Tahun 2021. Pengakuan Beban Bunga dalam LO Tahun 2022 lebih besar dari Belanja Bunga dalam LRA sebesar Rp375.250.952,00 (Rp3.672.250.844,57 – Rp3.297.009.892,57), - Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Beban Bunga dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

SELISIH LO – LRA	**375.250.952,00**
Penjelasan Selisih	
Penambahan Beban Bunga LO:	
- Penambahan Beban LO karena adanya Pengakuan Utang Bunga PEN RSUD Tahun 2022	382.599.121,00
Pengurangan Beban Bunga LO:	
- Pengurangan Beban atas Pembayaran Utang Bunga PEN RSUD Tahun 2021	(7.348.169,00)
Jumlah Penjelasan Selisih	**375.250.952,00**

		Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.4.1.2.1.5	**Beban Hibah**	**8.067.691.302,07**	**12.740.451.027,00**

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Hibah oleh Pemerintah Kabupaten Bangli untuk Tahun 2022 dan 2021. Pengakuan beban hibah Tahun 2022 dan 2021 dengan perincian sebagai berikut:

- Beban Hibah kepada Perusahaan daerah/BUMD	175.000.000,00	0,00
- Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	491.956.000,00	0,00
- Beban Hibah Uang kepada Badan/Lembaga yg bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Perundang-Undangan	605.666.167,80	1.900.413.015,00
- Beban Hibah Uang kepada Badan, Lembaga, Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar	3.154.381.859,27	300.000.000,00
- Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela, bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.868.220.037,00	9.767.570.774,00
- Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	772.467.238,00	772.467.238,00
Jumlah	**8.067.691.302,07**	**12.740.451.027,00**

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Hibah – LO oleh Pemerintah Kabupaten Bangli untuk Tahun 2021 dan 2020. Pengakuan Beban Hibah – LO ini lebih kecil dari Belanja Hibah – LRA sebesar Rp1.166.897.832,20 (Rp8.067.691.302,07 – Rp9.234.589.134,27). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Beban Pemeliharaan dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

SELISIH LO – LRA	**(1.166.897.832,20)**
Penjelasan Selisih	
Penambahan Beban Hibah LO:	
- Penambahan Beban LO karena adanya pengakuan Beban atas Hibah Tanah Kantor BPP Susut kepada Pemerintah Provinsi Bali 2022	443.933.500,00
- Penambahan Beban LO karena adanya Pengakuan Beban Hibah Tanah Pasar Hewan Kayuambua kepada Pemerintah Provinsi Bali 2022	48.022.500,00
- Penambahan Beban LO karena adanya pengakuan Beban Hibah Obat Dinas Kesehatan Kepada BMC, Lapas, BPOM, RSJ	36.546.167,80
Pengurangan Beban Hibah LO:	

- Pengurangan Beban LO atas Beban BOP PAUD Suasta yang tidak diakui Beban	(1.695.400.000,00)
Jumlah Penjelasan Selisih	**(1.166.897.832,20)**

		Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.4.1.2.1.6	**Beban Bantuan Sosial**	**253.030.998,00**	**238.566.000,00**

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Penyusutan dan Amortisasi oleh Pemerintah Kabupaten Bangli untuk Tahun 2022 dan 2021, yang terdiri dari:

- Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	246.096.000,00	219.996.000,00
- Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	6.934.998,00	18.570.000,00
Jumlah	**253.030.998,00**	**238.566.000,00**

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Bantuan Sosial oleh Pemerintah Kabupaten Bangli untuk Tahun 2022 dan 2021. Pengakuan Beban Bantuan Sosial dalam LO Tahun 2022 ini sama dengan saldo Belanja Bantuan Sosial kepada masyarakat dalam LRA sebesar Rp253.030.998,00.

		Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.4.1.2.1.7	**Beban Penyisihan Piutang**	**2.532.893.519,88**	**2.373.158.702,26**

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Penyisihan Piutang Pendapatan oleh Pemerintah Kabupaten Bangli untuk Tahun 2022 dan 2021, dengan perincian sebagai berikut:

Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	**2.370.937.364,54**	**2.267.376.564,88**
- Beban Penyisihan Piutang Pajak Hotel	43.872.903,76	10.359.419,02
- Beban Penyisihan Pajak Restoran	129.854.261,57	52.014.694,91
- Beban Penyisihan Pajak Hiburan	0,00	1.346.536,17
- Beban Penyisihan Pajak Reklame	0,00	650,00
- Beban Penyisihan Pajak Penerangan Jalan	577.316,63	465.070,15
- Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	153.100.943,95	74.374.929,65
- Beban Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	2.009.631.938,63	2.118.375.264,98
- Beban Penyisihan Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	33.900.000,00	10.440.000,00
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	**18.141.070,00**	**23.740.865,32**
- Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum	6.264.570,00	8.885.698,5
- Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha	11.876.500,00	14.855.166,82
Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	**84.303.169,93**	**1.726.979,74**
- Beban Penyisihan Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah	84.303.169,93	1.726.979,74
Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	**39.552.219,16**	**28.030.471,25**

- Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	13.696.279,71	22.388.395,00
- Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga	2.663,95	0,00
- Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	4.190.940,00
- Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian	29.735,00	0,00
- Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	25.823.540,50	1.446.271,00
- Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	0,00	4.865,25
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	**19.959.696,25**	**52.283.821,07**
- Beban Penyisihan Uang Muka	0,00	52.283.821,07
- Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya	19.959.696,25	0,00
Jumlah	**2.532.893.519,88**	**2.373.158.702,26**

		Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.4.1.2.1.8	**Beban Penyusutan dan Amortisasi**	**126.736.069.106,70**	**150.833.692.301,43**

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Penyusutan dan Amortisasi oleh Pemerintah Kabupaten Bangli untuk Tahun 2022 dan 2021, yang terdiri dari:

Beban Penyusutan Peralatan Mesin	**29.012.449.455,79**	**54.592.179.128,00**
- Beban Penyusutan Alat Besar	544.924.165,00	1.085.181.652,00
- Beban Penyusutan Alat Angkutan	4.917.170.318,00	5.387.981.567,00
- Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	278.138.950,00	531.035.918,00
- Beban Penyusutan Alat Pertanian	321.420.738,00	283.493.921,00
- Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.097.201.202,55	4.533.316.850,00
- Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	871.574.402,00	806.639.196,00
- Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	8.585.291.838,00	31.901.494.826,00
- Beban Penyusutan Alat Laboratorium	1.978.135.487,24	4.072.122.452,00
- Beban Penyusutan Komputer	7.145.553.558,00	5.615.655.657,00
- Beban Penyusutan Alat Eksplorasi	10.219.000,00	0,00
- Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	43.014.785,00	115.691.522,00
- Beban Penyusutan Alat Peraga	486.110,00	64.149.545,00
- Beban Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	31.084.494,00	315.326,00
- Beban Penyusutan Rambu-Rambu	166.984.537,00	181.459.309,00
- Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	21.249.871,00	13.641.387,00
Beban Penyusutan Gedung Bangunan	**17.102.897.052,00**	**18.332.745.780,05**
- Beban Penyusutan Bangunan Gedung	16.768.129.572,00	18.008.198.082,05
- Beban Penyusutan Monumen	253.081.996,00	257.034.190,00
- Beban Penyusutan Bangunan Menara	16.974.160,00	18.425.060,00
- Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	64.711.324,00	49.088.448,00

Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	**76.043.468.805,27**	**73.595.434.763,00**
- Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	70.019.899.574,93	68.371.609.977,00
- Beban Penyusutan Bangunan Air	805.002.395,34	611.260.651,00
- Beban Penyusutan Instalasi	887.347.933,00	840.565.243,00
- Beban Penyusutan Jaringan	4.331.218.902,00	3.771.998.892,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	**3.049.418.905,97**	**4.157.707.740,38**
- Beban Penyusutan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan /Olahraga	21.867.000,00	0,00
- Beban Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi	3.027.551.905,97	4.157.707.740,38
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	**1.527.834.887,67**	**155.624.890,00**
- Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	1.527.834.887,67	155.624.890,00
Jumlah	**126.736.069.106,70**	**150.833.692.301,43**

		Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.4.1.2.1.9	**Beban Lain-Lain**	**875.780.187,84**	**1.314.533.453,15**

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Lain-lain oleh Pemerintah Kabupaten Bangli untuk Tahun 2022 dan 2021. Beban Lain-lain Tahun 2022 merupakan beban atas penurunan nilai investasi pada PT BPR Bank Daerah Bangli sebesar Rp875.780.187,84 atas pembebanan dana kesejahteraan dan jasa produksi.

		Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.4.1.2.2	**Beban Transfer**	**85.546.224.268,00**	**85.074.712.462,00**

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Transfer oleh Pemerintah Kabupaten Bangli untuk Tahun 2022 dan 2021, yang terdiri dari:

- Beban Bagi Hasil	6.711.196.000,00	3.410.243.000,00
- Beban Bantuan Keuangan	78.835.028.268,00	81.664.469.462,00
Jumlah	**85.546.224.268,00**	**85.074.712.462,00**

		Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.4.1.2.2.1	**Beban Bagi Hasil**	**6.711.196.000,00**	**3.410.243.000,00**

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Transfer Bagi Hasil Pajak oleh Pemerintah Kabupaten Bangli untuk Tahun 2022 dan 2021, yang terdiri dari:

- Beban Bagi Hasil	2.186.235.000,00	1.573.650.000,00
- Beban Bantuan Keuangan	4.524.961.000,00	1.836.593.000,00
Jumlah	**6.711.196.000,00**	**3.410.243.000,00**

Pengakuan Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan – LO ini lebih kecil dari Belanja Transfer Bagi Hasil Pendapatan – LRA sebesar Rp5.904.000,00 (Rp6.711.196.000 – Rp6.717.100.000,00), Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

SELISIH LO – LRA	**(5.904.000,00)**
Penjelasan Selisih	
Penambahan Beban Transfer Bagi Hasil Pajak:	
- Utang Belanja Transfer DBH Pajak kepada Desa Undisan TA 2022	43.000,00

Pengurangan Beban Transfer Bagi Hasil Pajak:	
- Kelebihan Belanja Transfer DBH Pajak kepada desa Abang Batudinding TA 2022	(5.947.000,00)
Jumlah Penjelasan Selisih	**(5.904.000,00)**

		Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.4.1.2.2.2	**Beban Bantuan Keuangan**	**78.835.028.268,00**	**81.664.469.462,00**

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Transfer Bagi Hasil Pajak oleh Pemerintah Kabupaten Bangli untuk Tahun 2022 dan 2021, yang terdiri dari:

- Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	72.318.056.470,00	68.992.699.098,00
- Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Ke Desa	6.516.971.798,00	12.671.770.364,00
Jumlah	**78.835.028.268,00**	**81.664.469.462,00**

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Transfer Bantuan Keuangan kepada Desa oleh Pemerintah Kabupaten Bangli untuk Tahun 2022 dan 2021. Pengakuan Beban Transfer Bantuan Keuangan kepada Desa dalam LO Tahun 2022 ini lebih kecil dari saldo Belanja Transfer Bantuan Keuangan kepada Desa dalam LRA sebesar Rp55.559.929.000,00 (Rp78.835.028.268,00 – Rp134.394.957.268,00). Perbedaan tersebut karena Dana Desa tidak diakui pada Laporan Operasional, sesuai Bultek Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Akrual, bahwa dana dimaksud merupakan hak Pemerintah Desa untuk memanfaatkannya, sedangkan Pemerintah Kabupaten Bangli sebagai penampung sementara sebelum disalurkan, sehingga Pendapatan dan Beban Dana Desa tidak dapat diukur sebagai bagian dari kinerja Pemerintah Kabupaten Bangli.

		Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.4.1.3	**Surplus Non Operasional – LO**	**66.642.290.115,50**	**5.508.998.682,13**

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Surplus Non Operasional oleh Pemerintah Kabupaten Bangli untuk Tahun 2022 dan 2021 berupa Surplus dari Kegiatan Non Operasional – LO, yang terdiri dari :

- Surplus Tukar Menukar Tanah	6.300.400.000,00	553.540.000,00
- Surplus Tukar Menukar Peralatan dan Mesin	3.742.970.635,00	617.974.749,00
- Surplus Tukar Menukar Gedung dan Bangunan	32.800.962.915,00	514.918.165,00
- Surplus Tukar Menukar Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi	11.175.981.181,00	0,00
- Surplus Tukar Menukar Aset Tetap lainnya	6.025.632.254,20	0,00
- Surplus Tukar Menukar Aset lainnya	4.511.133.130,30	3.822.565.768,13
- Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang Permanen	2.085.210.000,00	0,00
Jumlah	**66.642.290.115,50**	**5.508.998.682,13**

		Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.4.1.4	**Defisit Non Operasional – LO**	**65.459.168.059,49**	**18.698.475.334,06**

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Defisit Non Operasional - LO oleh Pemerintah Kabupaten Bangli untuk Tahun 2022 dan 2021, yang terdiri dari:

- Defisit Penjualan Peralatan dan Mesin LO	0,00	243.105.944,00
- Defisit Penjualan Gedung dan Bangunan-LO	0,00	10.064.092.190,02
- Defisit Penjualan Gedung dan Bangunan-LO	0,00	1.602.857.872,25
- Defisit Penjualan Aset lainnya - LO	6.322.160.000,00	553.540.000,00
- Defisit Tukar Menukar Tanah-LO	4.109.258.612,00	617.974.749,00
- Defisit Tukar Menukar Peralatan dan Mesin -LO	31.577.391.817,96	512.501.515,00
- Defisit Tukar Menukar Gedung dan Bangunan-LO	5.756.999.865,00	0,00
- Defisit Tukas Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi	11.570.214.228,20	0,00
- Defisit Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya	5.235.294.526,80	3.822.565.768,13
- Defisit Tukar Menukar Aset lainnya -LO	887.849.009,53	1.281.837.295,66
Jumlah	**65.459.168.059,49**	**18.698.475.334,06**

		Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.4.1.5	**Pos Luar Biasa**		

		Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.4.1.5.1	**Pendapatan Luar Biasa – LO**	**0,00**	**0,00**

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Pendapatan Luar Biasa – LO oleh Pemerintah Kabupaten Bangli untuk Tahun 2022 dan 2021.

		Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.4.1.5.2	**Beban Luar Biasa – LO**	**41.000.000,00**	**(136.094.690,65)**

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Tidak Terduga – LO oleh Pemerintah Kabupaten Bangli untuk Tahun 2022 dan 2021. Pengakuan Beban Tidak Terduga – LO Tahun 2022 Tidak Sama dengan Belanja Tidak Terduga – LRA sebesar Rp2.389.457.000,00 (Rp41.000.000,00 – Rp2.430.457.000,00). Hal tersebut disebabkan adanya perbedaan pengakuan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan beban tidak terduga dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

SELISIH LO – LRA	**(2.389.457.000,00)**
Penjelasan Selisih	
Penambahan Beban Tak Terduga:	
- Beban atas Penggunaan Dana pada Rekening Bencana selama TA 2022	41.000.000,00
Pengurangan Beban Tak Terduga:	
- Reklas Ke Beban Persediaan	(353.624.000,00)

- Reklas Ke Beban Jasa Kantor	(328.425.000,00)
- Reklas Ke Beban Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	(1.748.408.000,00)
Jumlah Penjelasan Selisih	**(2.389.457.000,00)**

		Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.4.1.6	**Surplus /(Defisit) - LO**	**73.629.101.549,26**	**91.651.846.323,19**

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Surplus /(Defisit) - LO oleh Pemerintah Kabupaten Bangli unt 2022 dan 2021 yang dihitung dari:

Kegiatan Operasional - LO		
Pendapatan Daerah - LO		
- Pendapatan Asli Daerah - LO	162.362.768.249,39	158.846.073.455,98
- Pendapatan Transfer - LO	916.646.787.691,00	884.853.395.351,54
- Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO	16.615.233.323,97	73.175.040.531,00
Beban - LO		
- Beban - LO	(1.023.137.809.771,11)	(1.011.897.091.672,75)
Kegiatan Non Operasional - LO		
- Surplus Non - Operasional - LO	66.642.290.115,50	5.508.998.682,13
- Defisit Non Operasional - LO	(65.459.168.059,49)	(18.698.475.334,06)
Pos Luar Biasa		
- Beban Luar Biasa	(41.000.000,00)	(136.094.690,65)
Jumlah	**73.629.101.549,26**	**91.651.846.323,19**

Saldo Surplus/(Defisit) - LO yang disajikan di LO telah sama dengan Saldo Surplus/(Defisit) - LO di LPE seperti yang telah diungkapkan dalam CaLK LPE tekait penjelasan atas Pos-Pos LPE pada ***Poin 5.6.2.***

5.5 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Arus Kas

Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

Terdapat empat aktivitas yang mempengaruhi perubahan Kas dan Setara Kas selama satu periode akuntansi yaitu: aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Bangli untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 (dalam satuan mata uang rupiah) diungkapkan dan disajikan sebagai berikut:

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan dating tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus kas dari aktivitas operasi Pemerintah Kabupaten Bangli selama TA 2022 dan TA 2021 meliputi arus masuk kas dan arus keluar kas dalam satu periode terhitung 1 Januari s.d. 31 Desember 2022 dan 1 Januari s.d. 31 Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	1.105.212.188.569,50	1.149.198.756.013,56
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	945.923.769.850,79	925.530.840.721,31
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	**159.289.066.718,71**	**223.667.915.292,25**

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Operasi sebagai berikut:

5.5.1.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi sebagai berikut:

Arus Masuk Kas	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	36.707.060.479,07	23.318.329.220,50
Pendapatan Retribusi Daerah	36.328.299.166,20	8.281.617.975,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.597.430.541,18	6.101.592.913,01
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	65.144.751.773,05	124.750.796.009,31
Dana Perimbangan	739.520.734.637,00	703.032.171.031,00
Dana Insentif Daerah (DID)	10.515.789.000,00	89.588.187.000,00
Dana Desa	55.559.929.000,00	65.113.263.000,00
Pendapatan Bagi Hasil	92.910.305.211,00	66.727.321.041,74
Bantuan Keuangan	62.225.271.052,00	24.888.204.274,00
Pendapatan Hibah	702.617.710,00	37.397.273.549,00
Jumlah Arus Masuk Kas	**1.105.212.188.569,50**	**1.149.198.756.013,56**

5.5.1.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi sebagai berikut:

Arus Keluar Kas	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Belanja Pegawai	515.867.247.541,00	504.713.738.147,38
Belanja Barang dan Jasa	273.728.730.016,95	258.938.376.121,93
Belanja Bunga	3.297.009.892,57	138.750.000,00

Belanja Hibah	9.234.589.134,27	7.904.115.473,00
Belanja Bantuan Sosial	253.030.998,00	238.566.000,00
Belanja Tak Terduga	2.430.457.000,00	3.409.319.517,00
Bagi Hasil	6.717.100.000,00	3.410.243.000,00
Bantuan Keuangan	134.394.957.268,00	146.777.732.462,00
Jumlah Arus Keluar Kas	**945.923.121.850,79**	**925.530.840.721,31**

5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus kas dari aktivitas investasi Pemerintah Kabupaten Bangli selama TA 2022 dan TA 2021 meliputi arus masuk kas dan arus keluar kas dalam satu periode terhitung 1 Januari s.d. 31 Desember 2022 dan 1 Januari s.d. 31 Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	227.662.899,00	1.084.759.650,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	293.929.282.841,81	183.280.091.201,59
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	**(293.701.619.942,81)**	**(182.195.331.551,59)**

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Investasi sebagai berikut:

5.5.2.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi sebagai berikut:

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Penjualan atas Aset Lainnya	227.662.899,00	1.084.759.650,00
Jumlah Arus Masuk Kas	**227.662.899,00**	**1.084.759.650,00**

5.5.2.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi sebagai berikut:

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
- Belanja Modal Tanah	14.134.423.669,00	0,00
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.358.662.837,00	40.977.923.944,00
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	180.104.496.229,81	89.033.687.223,59
- Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	37.746.357.806,00	49.366.499.234,00
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.585.342.300,00	3.901.980.800,00
Jumlah Arus Keluar Kas	**293.929.282.841,81**	**183.280.091.201,59**

5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan deficit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan

datang. Arus kas dari aktivitas pendanaan Pemerintah Kabupaten Bangli selama TA 2022 dan TA 2021 meliputi arus masuk kas dan arus keluar kas dalam satu periode terhitung 1 Januaris.d. 31 Desember 2022 dan 1 Januaris.d. 31 Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan	61.092.652.557,00	10.683.929.700,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan	3.000.000.000,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	**58.092.652.557,00**	**10.683.929.700,00**

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan sebagai berikut:

5.5.3.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan sebagai berikut:

Arus Masuk Kas	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
- Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri	61.092.652.557,00	10.683.929.700,00
Jumlah Arus Masuk Kas	**61.092.652.557,00**	**10.683.929.700,00**

5.5.3.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuan atas LAK untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan sebagai berikut:

Arus Keluar Kas	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
- Penyertaan Modal BUMD	3.000.000.000,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	**3.000.000.000,00**	**0,00**

5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Pemerintah Kabupaten Bangli. Arus kas dari aktivitas transitoris Pemerintah Kabupaten Bangli selama TA 2022 dan TA 2021 meliputi arus masuk kas dan arus keluar kas dalam satu periode terhitung 1 Januaris.d. 31 Desember 2022 dan 1 Januaris.d. 31 Desember 2021, dengan uraian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris	88.185.699.305,00	81.357.506.528,49
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris	88.186.036.886,00	81.363.180.654,49
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	**(337.581,00)**	**(5.674.126,00)**

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Transitoris yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Transitoris sebagai berikut:

5.5.4.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris sebagai berikut:

Arus Masuk Kas	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
- Iuran Wajib PNS	19.352.495.108,00	19.506.441.176,00
- Potongan Taperum	0,00	0,00
- Iuran Askes	17.778.350.911,00	20.389.967.838,00

- PPh Pasal 21	17.314.814.495,00	16.662.306.608,00
- PPh Pasal 22	1.317.414.321,00	777.087.489,00
- PPh Pasal 23	233.207.775,00	211.801.879,00
- PPh Pasal 25	20.000,00	0,00
- PPh Pasal 4 ayat 2	3.247.017.758,00	3.549.595.048,29
- PPN	24.253.652.851,00	18.219.181.019,70
- PFK Lainnya	160.516.310,00	2.041.125.470,50
- Taspen (JKK & JKM)	2.160.105.155,00	0,00
- Iuran askes PTT	2.368.104.621,00	0,00
- PFK Lainnya (BOS)	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	**88.185.699.305,00**	**81.357.506.528,49**

5.5.4.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitorisyang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris sebagai berikut:

Arus Keluar Kas	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
- IuranWajib PNS	19.352.495.108,00	19.506.441.176,00
- PotonganTaperum	0,00	0,00
- Iuran Askes	17.778.350.911,00	20.389.967.838,00
- PPh Pasal 21	17.314.814.495,00	16.662.306.608,00
- PPh Pasal 22	1.317.414.321,00	777.087.489,00
- PPh Pasal 23	233.207.775,00	211.801.879,00
- PPh Pasal 25	20.000,00	0,00
- PPh Pasal 4 ayat 2	3.247.017.758,00	3.549.595.048,29
- PPN	24.253.990.432,00	18.224.855.145,70
- PFK Lainnya	160.516.310,00	2.041.125.470,50
- Taspen (JKK & JKM)	2.160.105.155,00	0,00
- Iuran askes PTT	2.368.104.621,00	0,00
- PFK Lainnya (BOS)	0,00	0,00
- Utang PFK BOS	337.581,00	
Jumlah Arus Keluar Kas	**88.186.036.886,00**	**81.363.180.654,49**

5.5.5 Kenaikan/(Penurunan) Kas

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Kenaikan/(Penurunan) Kas yang disebabkan keempat aktivitas yang dijabarkan di atas dengan diuraikan sebagai berikut:

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas	**(76.320.238.248,10)**	**52.150.839.314,66**
- Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	159.289.066.718,71	223.667.915.292,25
- Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(293.701.619.942,81)	(182.195.331.551,59)
- Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	58.092.652.557,00	10.683.929.700,00
- Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(337.581,00)	(5.674.126,00)
Jumlah Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas	**(76.320.238.248,10)**	**52.150.839.314,66**

		Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.5.6	**Saldo Awal Kas**	**117.209.643.226,51**	**65.119.688.302,46**

Jumlah tersebut merupakan saldo awal Kas yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bangli di tahun 2022 dan 2021. Saldo tersebut sama dengan saldo Kas yang disajikan di Neraca Per 31 Desember 2022 dan 2021 dan sesuai dengan saldo akhir Kas dalam Laporan Arus Kas Tahun 2022 dan 2021 yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Kas di Kas Daerah	58.212.830.752,33	50.242.780.570,15
Kas di Bendahara Penerimaan	51.528.600,00	242.260.422,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD Puskesmas	3.909.741.517,21	4.644.364.346,81
Kas di Bendahara BLUD RSUD Bangli	54.323.932.097,68	6.710.966.746,25
Kas Dana BOS	711.610.259,29	3.279.316.217,25
Setara Kas	0,00	0,00
Jumlah	**117.209.643.226,51**	**65.119.688.302,46**

		Tahun 2022	Tahun 2021
5.5.7	**Koreksi SiLPA Tahun Lalu**	**(5.952.642,45)**	**(60.884.390,61)**

Jumlah koreksi SiLPA Tahun Lalu untuk Tahun 2022 dan 2021. Saldo Koreksi SiLPA Tahun Lalu diatas juga telah diungkapkan dalam CaLK Perubahan Saldo Anggaran Lebih pada ***poin 5.2.4.***

		Tahun 2022	Tahun 2021
5.5.8	**Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD) - Terkait PFK**	**1.587.451.478,39**	**0,00**

Jumlah Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD) - Terkait PFK untuk Tahun 2022 dan 2021. Saldo Koreksi SiLPA Tahun Lalu diatas juga telah diungkapkan dalam CaLK Neraca pada ***poin 5.3.1.1.1.7***.

		Tahun 2022	Tahun 2021
5.5.9	**Saldo Akhir Kas**	**42.470.903.814,35**	**117.209.643.226,51**

Saldo Akhir Kas tersebut di atas terdiri dari:

- Kas di Kas Daerah	35.085.330.183,85	58.212.830.752,33
- Kas di Bendahara Penerimaan	398.411.000,00	51.528.600,00
- Kas di Bendahara Pengeluaran	54.916.900,00	0,00
- Kas di Bendahara BLUD	3.116.826.347,75	3.909.741.517,21
- Kas di Bendahara BLUD Puskesmas	1.505.055.748,48	54.323.932.097,68
- Kas di Bendahara BOS	722.912.155,88	711.610.259,29
- Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD)	1.587.451.478,39	0,00
Saldo Akhir Kas	**42.470.903.814,35**	**117.209.643.226,51**

5.6 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Dearah Kabupaten Bangli dapat dijelaskan sebagai berikut:

		Tahun 2022	Tahun 2021
5.6.1	**Ekuitas Awal**	**1.336.079.836.287,24**	**1.244.850.145.953,19**

Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas Awal Tahun 2022 dan 2021 yang merupakan saldo Ekuitas Akhir Tahun 2021 dan 2020.

		Tahun 2022	Tahun 2021
5.6.2	**Surplus/(Defisit) - LO**	**73.629.101.549,26**	**91.651.846.323,19**

Jumlah tersebut merupakan saldo Surplus/(Defisit) - LO Pemerintah Kabupaten Bangli untuk Tahun 2022 dan 2021. Pemerintah Kabupaten Bangli masing-masing memiliki surplus dan defisit atas kegiatan operasional dan non operasional serta atas kejadian luar biasa yang mempengaruhi posisi kas maupun tanpa mempengaruhi posisi kas atau merupakan surplus atas kegiatan operasional yang menambah nilai Ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Bangli Tahun 2022. Saldo Surplus/(Defisit) – LO yang disajikan dalam LO sebagaimana telah diungkapkan dalam Penjelasan Pos-Pos LO pada ***poin 5.4.6.***

		Tahun 2022	Tahun 2021
5.6.3	**Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar**	**7.643.948.504,14**	**(422.155.989,14)**

Jumlah tersebut merupakan saldo Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar Tahun 2022 dan 2021sebagai berikut:

Koreksi Ekuitas – Kas	1.596.447.184,83	(170.200,00)
Koreksi Ekuitas – Piutang	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas – Penyisihan Piutang	58.202.704,18	0,00
Koreksi Ekuitas – Aset Persediaan	145.411.110,40	0,00
Koreksi Ekuitas – Aset Tetap	7.624.009.989,89	0,00
Koreksi Ekuitas – Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(1.951.545.261,00)	0,00
Koreksi Ekuitas – Investasi Jangka Panjang	21.775.103,84	0,00
Koreksi Ekuitas – Aset Lainnya	(56.515.416,00)	(421.985.789,14)
Koreksi Ekuitas – Kewajiban	206.163.088,00	0,00
Koreksi Ekuitas – Lainnya	0,00	0,00

Jumlah Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	**7.643.948.504,14**	**(422.155.989,14)**

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang merupakan transaksi penyesuaian aset dan kewajiban yang disebabkan oleh adanya koreksi baik lebih catat maupun kurang catat dari tahun-tahun sebelumnya sehingga pada Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Bangli melakukan koreksi ekuitas sesuai rincian pada **Lampiran 45.**

		Tahun 2022	**Tahun 2021**
5.6.4	**Ekuitas Akhir**	**1.417.352.886.340,64**	**1.336.079.836.287,24**

Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas Akhir milik Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2022 dan 2021. Saldo Ekuitas Akhir tersebut diperoleh dari penjumlahan Ekuitas Awal ditambah Surplus/(Defisit) - LO dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar pada masing-masing tahunnya. Saldo Ekuitas Akhir yang tersaji dalam Laporan Ekuitas ini sama besarnya dengan nilai Ekuitas yang tersaji di Neraca per 31 Desember 2022 dan 2021 sebagaimana dijelaskan pada Penjelasan Pos-Pos Neraca pada ***poin 5.3.3***.

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Letak Geografis

Kabupaten Bangli merupakan salah satu Kabupaten dari 9 (sembilan) Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bali yang tidak memiliki laut atau berbatasan langsung dengan laut sehingga Kabupaten Bangli tidak memiliki pantai di tepi laut. Memiliki wilayah seluas 520,81 kilometer persegi atau 9,25 % dari luas wilayah Provinsi Bali. Sebagian besar wilayah Bangli berupa dataran tinggi.

Letaknya berbatasan dengan Kabupaten Gianyar di sebelah Barat dan Selatan, Kabupaten Singaraja di sebelah Utara, Kabupaten Karangasem dan Klungkung di sebelah Timur serta Kabupaten Badung sebelah Barat.

6.2 Dasar Hukum Pembentukan

Kabupaten Bangli dibentuk berdasarkan Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Pusat Pemerintahan Kabupaten Bangli terletak di Kota Bangli sekaligus sebagai ibu kota kabupaten.

6.3 Pemerintahan

Pemerintah Kabupaten Bangli merupakan bagian integral dari Pemerintah Republik Indonesia. Sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Bangli sebagai daerah otonom mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bangli dibagi dalam empat kecamatan yaitu Kecamatan Bangli, Kintamani, Tembuku dan Susut dengan 68 desa, empat kelurahan, 336 dusun dan 28 lingkungan.

Dalam menunjang pelayanan umum dan penyelenggaraan pemerintahan, OPD yang dibentuk meliputi:

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
2. Dinas Kesehatan;
3. Rumah Sakit Umum Daerah;
4. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
5. Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran;
7. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Dinas Lingkungan Hidup;
9. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan KB;
11. Dinas Perhubungan;
12. Dinas Komunikasi, Infomasi dan Persandian;

13. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja;
14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
16. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;
17. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
18. Sekretariat Daerah;
19. Sekretariat DPRD;
20. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
21. Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
22. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
23. Inspektorat;
24. Kantor Camat Bangli;
25. Kantor Camat Tembuku;
26. Kantor Camat Susut;
27. Kantor Camat Kintamani; dan
28. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

6.4 Informasi Penting Lainnya

1. Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan

   Selama tahun 2022 terjadi pergantian manajemen baru dalam kepemerintahan yaitu pada pejabat eksekutif, pada tanggal 12 Januari 2022 dengan Keputusan Bupati Bangli Nomor 821.2/30/2022 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli.

   Pergantian manajemen baru dalam kepemerintahaan tidak mempengaruhi perubahan kebijakan yang material dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bangli.

2. Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru

   Selama tahun 2022, walaupun terjadi pergantian manajemen baru, namun tidak terdapat adanya kesalahan dari manajemen terdahulu yang perlu dikoreksi oleh manajemen baru.

3. Penggabungan atau pemekaran entitas tahun berjalan

   Pada tahun 2022 terjadi penggabungan entitas. Berdasarkan Peraturan Bupati Bangli Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah dan Inspektorat, dan Peraturan Bupati Bangli Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, terdapat 2 (dua) entitas yang digabung dengan entitas lain.

   Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terbagi 2 (dua) yaitu bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bergabung dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sehingga menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan bergabung dengan Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah.

4. Kejadian yang mempunyai dampak sosial

   Selama tahun 2022 pada Pemerintah Kabupaten Bangli, tidak terdapat kejadian yang mempunyai dampak sosial.

5. Pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Bangli menggunakan 2 (dua) aplikasi pengelolaan keuangan daerah. Aplikasi SIPD dan SIMDA FMIS digunakan pada tahap penganggaran, untuk penatausahaan dan akuntansi hanya menggunakan SIMDA FMIS.

   Penggunaan 2 (dua) aplikasi ini karena masih banyaknya kendala dalam penatausahaan dan akuntansi pada aplikasi SIPD. Selain itu, sebelum menggunakan SIMDA FMIS Kabupaten Bangli telah menggunakan SIMDA sehingga dalam penatausahaan sudah fasih dalam pengenalan menu-menu pada aplikasi SIMDA FMIS. Koordinasi dan penyelesaian masalah pada aplikasi SIMDA FMIS juga lebih mudah dikarenakan terdapat perwakilan BPKP di Provinsi Bali, sedangkan jika menggunakan SIPD koordinasi lebih sulit dan memerlukan waktu yang lebih lama dalam penyelesaian masalah karena harus melalui Kementerian Dalam Negeri.

   Namun, dengan menggunakan 2 (dua) aplikasi tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Bangli, yaitu:

   a. Terdapat perbedaan terjemahan rekening belanja terutama pada Belanja Modal BLUD dan Belanja Modal BOS;
   b. Terjadi 2 (dua) kali proses input sehingga menambah pekerjaan serta menghabiskan lebih banyak waktu; dan
   c. Adanya risiko kesalahan dalam mengutip anggaran pada rincian objek/subrincian objek belanja.

BAB VII
PENUTUP

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Demi mewujudkan tata kelola dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang lebih baik serta penyajian informasi yang lebih komprehensif, Pemerintah Kabupaten Bangli menerapkan akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan semua laporan keuangan Perangkat Daerah. Implementasi tersebut di mulai sejak tahun 2015 sebagai tindak lanjut dari amanat yang tertuang dalam paket undang-undang dibidang keuangan.

Bupati Bangli

Sang Nyoman Sedana Arta, SE

LAMPIRAN VIII

DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Bangli
Nomor : 2 Tahun 2023
Tanggal : 15 Agustus 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	SKPD	URAIAN RINCIAN PIUTANG	SALDO AWAL PIUTANG	PENAMBAHAN PIUTANG	PENGURANGAN PIUTANG	SALDO AKHIR PIUTANG
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6
1		**Piutang Pajak**	**37.191.988.336,85**	**24.428.787.550,43**	**22.803.668.566,50**	**38.817.107.320,78**
	BKPAD	Piutang PHR	1.791.805.517,85	7.299.249.188,00	7.410.743.945,00	1.680.310.760,85
	BKPAD	Piutang Reklame	2.779.880,00	1.380.804.821,00	1.380.934.821,00	2.649.880,00
	BKPAD	Piutang Pajak Penerangan Jalan	761.033.304,00	10.260.619.430,00	10.145.156.104,00	876.496.630,00
	BKPAD	Piutang Pajak Air Tanah	751.003.030,00	366.230.686,00	323.259.895,50	793.973.820,50
	BKPAD	Piutang Pajak PBB	33.760.192.540,00	5.107.923.851,00	3.508.399.736,00	35.359.716.655,00
	BKPAD	Piutang Pajak BPHTB	111.000.000,00	-	21.000.000,00	90.000.000,00
	BKPAD	Piutang Pajak Hiburan	14.174.065,00	13.959.574,43	14.174.065,00	13.959.574,43
			-			
2		**Piutang Retribusi**	**322.620.095,81**	**307.099.000,00**	**207.698.000,00**	**422.021.095,81**
	Dinas Kesehatan	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00
	Disperindag	Piutang Retribusi Jasa Umum Pemakaian Kekayaan Daerah	56.011.728,00	0,00	0,00	56.011.728,00
	BKPAD	Piutang Retribusi Jasa Umum Pemakaian Kekayaan Daerah	132.769.701,00	23.045.000,00	15.845.000,00	139.969.701,00
	Dinas Pendidikan	Piutang Retribusi Jasa Umum Pemakaian Kekayaan Daerah	55.466.666,81	0,00	0,00	55.466.666,81
	Diskominfo	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	70.910.000,00	174.125.000,00	102.900.000,00	142.135.000,00
	DLH	Retribusi Kebersihan/Persampahan	7.348.000,00	109.929.000,00	88.953.000,00	28.324.000,00
3		**Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**	**3.439.795.200,80**	**2.817.520.170,81**	**2.631.701.018,90**	**3.625.614.352,71**
	BKPAD	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.439.795.200,80	2.817.520.170,81	2.631.701.018,90	3.625.614.352,71
4		**Piutang lain-lain PAD**	**3.195.864.735,52**	**11.622.296.908,27**	**2.447.671.906,24**	**12.370.489.737,55**
	BKPAD	Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran	15.220.000,00	0,00	0,00	15.220.000,00
	BKPAD	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	7.800.349,00	0,00	2.300.628,80	5.499.720,20
	BKPAD	Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	0,00	532.789,58	0,00	532.789,58
	RSUD	Piutang Pendapatan BLUD	2.436.490.700,00	11.567.567.150,00	2.436.490.700,00	11.567.567.150,00
	Dinas Kesehatan	Piutang Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	1.231.650,00	26.314.900,00	1.231.650,00	26.314.900,00
	BKPAD	Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	136.872.036,52	21.935.068,69	7.648.927,44	151.158.177,77
	BKPAD	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya	598.250.000,00	5.947.000,00	0,00	604.197.000,00

NO.	SKPD	URAIAN RINCIAN PIUTANG	SALDO AWAL PIUTANG	PENAMBAHAN PIUTANG	PENGURANGAN PIUTANG	SALDO AKHIR PIUTANG
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6
5		**Piutang Transfer**	**15.623.059.066,00**	**17.540.579.457,00**	**15.623.059.066,00**	**17.540.579.457,00**
	BKPAD	PKB	7.575.424.498,00	8.991.956.798,00	7.575.424.498,00	8.991.956.798,00
	BKPAD	PBBNKB	2.256.837.653,00	4.368.985.244,00	2.256.837.653,00	4.368.985.244,00
	BKPAD	PBBKB	3.022.902.663,00	4.156.075.694,00	3.022.902.663,00	4.156.075.694,00
	BKPAD	Pajak Air Permukaan	19.696.898,00	23.561.721,00	19.696.898,00	23.561.721,00
	BKPAD	Pajak Rokok	2.748.197.354,00	0,00	2.748.197.354,00	0,00
6		**Piutang Lainnya**	**10.456.764.213,91**	**0,00**	**10.456.764.213,91**	**0,00**
	BKPAD	Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa	10.456.764.213,91	0,00	10.456.764.213,91	0,00
JUMLAH			**70.230.091.648,89**	**56.716.283.086,51**	**54.170.562.771,55**	**72.775.811.963,85**

BUPATI BANGLI

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

LAMPIRAN IX

DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH

Lampiran IX : Peraturan Daerah Kabupaten Bangli
Nomor : 2 Tahun 2023
Tanggal : 15 Agustus 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Uraian/Nama	Jumlah Piutang	Jumlah Penyisihan	Jumlah Piutang Bersih
A	**Piutang Pajak**	**38.817.107.320,78**	**26.681.020.323,47**	**12.136.086.997,31**
1	Piutang Pajak Hotel	235.859.995,55	78.667.709,30	157.192.286,25
2	Piutang Pajak Restoran	1.444.450.765,30	1.214.372.677,58	230.078.087,72
3	Piutang Pajak Reklame	2.649.880,00	2.649.800,00	80,00
4	Piutang Pajak Penerangan Jalan	876.496.630,00	4.382.483,15	872.114.146,85
5	Piutang Pajak Air Tanah	793.973.820,50	336.659.536,60	457.314.283,90
6	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	35.359.716.655,00	24.998.530.844,40	10.361.185.810,60
7	Piutang Bea Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan	90.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
8	Piutang Pajak Hiburan	13.959.574,43	757.272,44	13.202.301,99
			-	-
B	**Piutang Retribusi**	**422.021.095,81**	**306.181.590,81**	**115.839.505,00**
1	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	114.000,00	114.000,00	-
2	Piutang Retribusi Kebersihan/Persampahan	28.324.000,00	12.649.270,00	15.674.730,00
3	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	142.135.000,00	49.134.225,00	93.000.775,00
4	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	251.448.095,81	244.284.095,81	7.164.000,00
			-	-
C	**Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**	**3.700.845.185,11**	**102.420.102,28**	**3.598.425.082,83**
			-	-
D	**Piutang Lain-lain PAD yang Sah**	**12.370.489.737,54**	**764.604.831,35**	**11.599.437.515,56**
1	Piutang Denda Pajak	15.220.000,00	15.220.000,00	-
2	Piutang Denda Retribusi	5.499.720,20	4.281.541,70	1.218.178,50
3	Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	532.789,58	2.663,95	
4	Piutang BLUD RSUD	11.567.567.150,00	57.837.835,75	11.509.729.314,25
5	Piutang BLUD Puskesmas	26.314.900,00	131.574,50	26.183.325,50

No	Uraian/Nama	Jumlah Piutang	Jumlah Penyisihan	Jumlah Piutang Bersih
6	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	151.158.177,76	88.851.480,45	62.306.697,31
7	Piutang Penguatan Modal Gabah, Kopi dan UP3HP	598.250.000,00	598.250.000,00	-
8	Piutang kelebihan DBH Pajak kepada Desa	5.947.000,00	29.735,00	
			-	-
	Jumlah	**55.310.463.339,24**	**27.854.226.847,91**	**27.449.789.100,70**

BUPATI BANGLI

I GEDE NYOMAN SEDANA ARTA

LAMPIRAN X

DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR

Lampiran X : Peraturan Daerah Kabupaten Bangli
Nomor : 2 Tahun 2023
Tanggal : 15 Agustus 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR
TAHUN ANGGARAN 2022

No	SKPD	Jumlah Dana Bergulir	Jumlah Penyisihan Dana Bergulir	Jumlah Piutang Bersih
1	2	3	4	5
1	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	576.000.000,00	365.795.832,33	210.204.167,67
2	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	37.548.525,00	37.548.525,00	-
3	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan Dan Perikanan	19.800.000,00	19.800.000,00	-
	Jumlah	**613.548.525,00**	**403.344.357,33**	**210.204.167,67**

BUPATI BANGLI

I GUSTI PUTU SANG NYOMAN SEDANA ARTA

LAMPIRAN XI

DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVENSTASI) PEMERINTAH DAERAH

Lampiran XI : Peraturan Daerah Kabupaten Bangli
Nomor : 2 Tahun 2023
Tanggal : 15 Agustus 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/Lembaga/Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan	Bentuk Penyertaan Modal (Investasi daerah)	Jumlah penyertaan modal daerah	Jml modal yg telah disertakan sampai dgn awal tahun	Penyertaan modal tahun Ini	Jml modal yg telah disertakan sampai akhir tahun ini	Sisa modal yg belum disertakan	Hasil penyertaan modal (investasi) Tahun ini	Jumlah modal (Investasi) yg diterima kembali tahun ini	Jumlah Sisa Modal (Investasi) yg disertakan sampai dengan tahun ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7+8	10 = 6-9	11	12	13 = 9-12
1	2017	BPD Bali	Perda No. 9 Tahun 2015	saham	13.577.726.125,83	13.577.726.125,83	-	13.577.726.125,83		3.036.851.110,68	-	13.577.726.125,83
2	2016	PDAM Bangli	Perda No. 4 Tahun 2017	kepemilikan 100%	26.562.327.562,48	26.446.534.255,97	115.793.306,51	26.562.327.562,48		100.000.000,00	-	26.562.327.562,48
3	2006	PD BPR Bank Pasar	Perda No. 5 Tahun 2017	kepemilikan 100%	27.446.716.790,42	21.047.836.508,66	6.398.880.281,76	27.446.716.790,42		2.456.470.186,50	-	27.446.716.790,42
4	2016	PT Jamkrida Bali Mandara Provinsi Bali	Perda No.10 Tahun 2015	saham	600.000.000,00	600.000.000,00	-	600.000.000,00	-	4.109.244,00	-	600.000.000,00
5	2015	PD Bhukti Mukti Bhakti	Perda No. 5 Tahun 2015	kepemilikan 100%	1.000.000.000,00		-	-	-	-	-	-
		Jumlah			69.186.770.478,73	61.672.096.890,46	6.514.673.588,27	68.186.770.478,73	-	5.597.430.541,18		68.186.770.478,73

BUPATI BANGLI

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

LAMPIRAN XII

DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH

Lampiran XII : Peraturan Daerah Kabupaten Bangli
Nomor : 2 Tahun 2023
Tanggal : 15 Agustus 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	SKPD	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Sekretariat Daerah	92.043.212.688,35	21.433.199.646,00	11.662.410.197,00	101.814.002.137,35
2	Badan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah	9.021.039.898,00	893.143.600,00	253.582.800,00	9.660.600.698,00
3	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	5.139.939.147,00	26.178.605.717,00	4.506.732.346,00	26.811.812.518,00
4	Inspektorat	2.400.608.393,00	129.984.997,00	-	2.530.593.390,00
5	Dinas Kesehatan	123.977.390.253,46	21.759.731.674,44	6.601.386.391,40	139.135.735.536,50
6	Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1.309.939.610.112,13	114.049.032.567,00	55.480.004.458,80	1.368.508.638.220,33
7	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	317.175.988.358,17	63.332.165.424,00	2.113.716.824,00	378.394.436.958,17
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.186.741.107,00	149.154.890,00	124.114.890,00	1.211.781.107,00
9	Dinas Perhubungan	15.152.919.722,19	3.897.373.873,92	308.605.876,96	18.741.687.719,15
10	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian	5.157.467.654,00	90.663.575,00	50.280.000,00	5.197.851.229,00
11	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9.175.397.375,00	-	9.175.397.375,00	0,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.739.510.777,00	19.424.000,00	9.920.000,00	6.749.014.777,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	1.954.045.400,00	9.097.184.801,00	91.074.659,00	10.960.155.542,00
14	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	7.187.454.322,02	139.120.385,00	121.395.385,00	7.205.179.322,02
15	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	66.545.684.530,17	11.371.764.467,00	4.043.420.960,96	73.874.028.036,21
16	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	2.688.084.951,00	359.990.720,00	2.004.000,00	3.046.071.671,00
17	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	40.192.545.949,11	1.956.194.994,00	1.428.955.900,00	40.719.785.043,11
18	Dinas Lingkungan Hidup	22.320.654.376,98	33.000.361.606,00	4.150.820.605,00	51.170.195.377,98
19	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	34.973.753.763,02	6.104.854.350,00	331.441.350,00	40.747.166.763,02
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.893.160.829,00	-	1.893.160.829,00	0,00
21	Rumah Sakit Umum Daerah	141.743.328.019,80	165.292.877.305,65	26.355.271.256,13	280.680.934.069,32
22	Satuan Polisi Pamong Praja	6.450.761.550,00	-	4.382.198.750,00	2.068.562.800,00
23	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.334.551.451,00	50.341.750,00	83.823.400,00	1.301.069.801,00
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Pemadam Kebakaran	9.398.369.542,00	4.809.678.326,00	7.337.497.376,00	6.870.550.492,00

NO.	SKPD	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6=3+4-5
25	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	1.990.518.876,00	243.862.996,00	26.475.050,00	2.207.906.822,00
26	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.162.172.634,75	72.299.850,00	158.085.633,00	2.076.386.851,75
27	Kecamatan Bangli	4.796.808.712,88	199.139.000,00	10.545.000,00	4.985.402.712,88
28	Kecamatan Kintamani	3.871.081.891,00	-	-	3.871.081.891,00
29	Kecamatan Susut	2.558.489.955,50	-	16.718.500,00	2.541.771.455,50
30	Kecamatan Tembuku	3.215.150.804,00	-	-	3.215.150.804,00
JUMLAH		**2.252.386.443.043,53**	**484.630.150.515,01**	**140.719.039.813,25**	**2.596.297.553.745,29**

BUPATI BANGLI,

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

LAMPIRAN XIII

DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP

Lampiran XIII : Peraturan Daerah Kabupaten Bangli
Nomor : 2 Tahun 2023
Tanggal : 15 Agustus 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	URAIAN	NILAI ASET TETAP PER 31 DESEMBER 2021	MUTASI		NILAI ASET TETAP PER 31 DESEMBER 2022
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Belanja Tanah	163.234.788.899,00	29.843.480.272,00	10.387.886.000,00	182.690.383.171,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	357.667.592.558,25	100.554.790.514,93	19.275.956.787,00	438.946.426.286,18
3	Belanja Gedung dan Bangunan	464.765.258.821,12	256.826.558.555,92	78.277.028.377,85	643.314.788.999,19
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.187.642.494.878,20	73.081.799.534,96	5.308.291.602,00	1.255.416.002.811,16
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	79.076.307.886,96	24.323.521.637,20	27.469.877.046,40	75.929.952.477,76
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	16.304.806.709,45	2.176.423.158,00	12.579.590.984,34	5.901.638.883,11
7	Akumulasi Penyusutan	(1.136.879.012.331,57)	(166.109.933.859,03)	(23.091.990.215,05)	(1.279.896.955.975,55)
JUMLAH		**1.131.812.237.421,41**	**320.696.639.813,98**	**130.206.640.582,54**	**1.322.302.236.652,85**

BUPATI BANGLI,

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

LAMPIRAN XIV

DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN

Lampiran XIV : Peraturan Da : Rancangan Peraturan Daerah
Nomor : 2 Tahun 2023
Tanggal : 15 Agustus 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN
PER 31 DESEMBER 2022

NO	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI								REKLASIFIKASI/ PENGHAPUSAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2022
			BERTAMBAH				BERKURANG					
			ASET TETAP LAINNYA	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	PERALATAN DAN MESIN	ASET TETAP LAINNYA	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	PERALATAN DAN MESIN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Sekretariat Daerah	-										0,00
2	Badan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah	278.512.000,00									-233.842.000,00	44.670.000,00
3	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	9.364.753.260,00									-9.364.753.260,00	0,00
4	Inspektorat Daerah	-										0,00
5	Dinas Kesehatan	100.017.700,00										100.017.700,00
6	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	3.984.118.641,28						99.320.100,00			(277.369.900,00)	3.607.428.641,28
7	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	445.404.771,00									-445.404.771,00	0,00
8	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-										0,00
9	Dinas Perhubungan	224.719.000,00										224.719.000,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian	-										0,00
11	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-										0,00
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	-										0,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	-										0,00
14	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	-		99.320.100,00							99.515.385,00	198.835.485,00
15	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	343.411.783,83									-58.458.400,00	284.953.383,83
16	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	-										0,00
17	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan Dan Perikanan	-										0,00
18	Dinas Lingkungan Hidup	-									736.738.473,00	736.738.473,00
19	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	750.586.067,25					750.586.067,25				219.792.200,00	219.792.200,00
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-										0,00
21	Rumah Sakit Umum Daerah	241.972.486,09					241.972.486,09				484.484.000,00	484.484.000,00
22	Satuan Polisi Pamong Praja	-										0,00

NO	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI								REKLASIFIKASI/ PENGHAPUSAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2022
			BERTAMBAH				BERKURANG					
			ASET TETAP LAINNYA	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	PERALATAN DAN MESIN	ASET TETAP LAINNYA	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	PERALATAN DAN MESIN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
23	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	-										0,00
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Pemadam Kebakaran	-										0,00
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	571.311.000,00					571.311.000,00					0,00
26	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-										0,00
27	Kecamatan Bangli	-										0,00
28	Kecamatan Tembuku	-										0,00
29	Kecamatan Susut	-										0,00
30	Kecamatan Kintamani	-										0,00
JUMLAH		**16.304.806.709,45**	**-**	**99.320.100,00**	**-**	**-**	**1.563.869.553,34**	**99.320.100,00**	**-**	**-**	**(8.839.298.273,00)**	**5.901.638.883,11**

BUPATI BANGLI,

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

LAMPIRAN XV

DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA

Lampiran XV : Peraturan Daerah Kabupaten Bangli
Nomor : 2 Tahun 2023
Tanggal : 15 Agustus 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
DAFTAR REKAPITULASI REALISASI ASET LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2022

NO.	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Sekretariat Daerah	812.181.040,00	1.700.000,00	-	813.881.040,00
2	Badan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah	0,00	-	-	0,00
3	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	273.966.674,00	46.479.000,00	-	320.445.674,00
4	Inspektorat	207.568.700,00	-	-	207.568.700,00
5	Dinas Kesehatan	1.073.330.535,50	-	-	1.073.330.535,50
6	Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	540.146.050,00	-	-	540.146.050,00
7	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	2.981.420.875,00	-	-	2.981.420.875,00
8	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	2.399.690.531,00	409.267.600,00	-	2.808.958.131,00
9	Dinas Perhubungan	35.605.000,00	-	-	35.605.000,00
10	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	162.000.000,00	-	-	162.000.000,00
11	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	184.022.623,00	-	-	184.022.623,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	46.098.500,00	-	-	46.098.500,00
13	Dinas Perhubungan	185.545.500,00	-	-	185.545.500,00
14	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	348.900.000,00	-	-	348.900.000,00
15	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	0,00	-	-	0,00
16	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	121.222.533,00	-	121.222.533,00
17	Dinas Lingkungan Hidup	1.057.396.243,00	66.500.000,00	-	1.123.896.243,00
18	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	11.500.000,00	-	11.500.000,00	0,00
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	6.250.000,00	11.500.000,00	-	17.750.000,00
20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	105.447.753,00	83.823.400,00	-	189.271.153,00
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.700.000,00	-	1.700.000,00	0,00
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	22.573.000,00	24.660.000,00	-	47.233.000,00
23	Satuan Polisi Pamong Praja	27.000.000,00	32.235.000,00	27.000.000,00	32.235.000,00
24	Kecamatan Bangli	244.659.866,33	-	-	244.659.866,33
25	Kecamatan Susut	44.805.000,00	16.718.500,00	37.805.000,00	23.718.500,00
26	Kecamatan Kintamani	161.878.338,00	-	-	161.878.338,00
27	Kecamatan Tembuku	0,00	-	-	0,00
28	Rumah Sakit Umum Daerah	15.923.866.995,00	-	-	15.923.866.995,00
29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	-	-	0,00
30	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	24.000.000,00	-	-	24.000.000,00
JUMLAH		**26.881.553.223,83**	**814.106.033,00**	**78.005.000,00**	**27.617.654.256,83**

BUPATI BANGLI,

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

LAMPIRAN XVI

DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH

Lampiran XVI : Peraturan Daerah Kabupaten Bangli
Nomor : 2 Tahun 2023
Tanggal : 15 Agustus 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIRENCANAKAN	SALDO AWAL	TRANSFER DARI KAS DAERAH	TRNASFER KE KAS DAERAH	SALDO AKHIR	SISA DANA YANG BELUM DICADANGKAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			NIHIL					
JUMLAH			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUPATI BANGLI,

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

LAMPIRAN XVII

DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Lampiran XVII : Peraturan Daerah Kabupaten Bangli
Nomor : 2 Tahun 2023
Tanggal : 15 Agustus 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
PER 31 DESEMBER 2022

NO.	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga PPN Pusat	1.083.035,00	88.185.699.305,00	88.186.036.886,00	745.454,00
	Utang Bunga	0,00	2.823.093.191,00	2.440.504.070,00	382.589.121,00
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	996.897.055,00	0,00	996.897.055,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka	118.937.034,06	197.958.598,50	118.937.034,06	197.958.598,50
3	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	909.334.498,00	631.311.960,00	909.673.030,00	630.973.428,00
4	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	7.518.907.324,00	7.590.783.538,00	7.518.907.324,00	7.590.783.538,00
5	Utang Belanja Pegawai BLUD	4.910.025.285,00	5.263.356.195,00	4.910.025.285,00	5.263.356.195,00
6	Utang Belanja Jasa	823.651.237,00	976.558.989,00	761.251.299,00	1.038.958.927,00
7	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	4.082.283.667,77	7.754.458.901,77	4.082.283.667,77	7.754.458.901,77
	Utang Belanja Transfer	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
8	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak	12.000,00	145.000,00	0,00	157.000,00
9	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi	266.666,67	6.519.371,20	0,00	6.786.037,87
	Utang Kelebihan Hasil Pengelolaan CTKI	0,00	228.057,56	0,00	228.057,56
10	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	9.194.015.931,00	0,00	9.194.015.931,00	0,00
11	Utang Jangka Pendek Lainnya	11.008.328.246,00	40.019.211,00	5.083.999.126,00	5.964.348.331,00
		38.566.844.924,50	**114.467.072.373,03**	**123.205.633.652,83**	**29.828.283.644,70**

BUPATI BANGLI,

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

LAMPIRAN XVIII

DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Lampiran XVIII : Peraturan Daerah Kabupaten Bangli
Nomor : 2 Tahun 2023
Tanggal : 15 Agustus 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
PER 31 DESEMBER 2022

NO.	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Utang atas Pinjaman Dalam Negeri	0,00	70.779.685.202,00	0,00	70.779.685.202,00
Jumlah			**70.779.685.202,00**	**0,00**	**70.779.685.202,00**

BUPATI BANGLI,

I NYOMAN SEDANA ARTA

LAMPIRAN XIX

DAFTAR SUB KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022 DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA

Lampiran XIX : Peraturan Daerah Kabupaten Bangli
Nomor : 2 Tahun 2023
Tanggal : 15 Agustus 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
DAFTAR SUB KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN 2022
DAN DIANGGARKAN KEMBALI PADA TAHUN BERIKUTNYA

No.	Nama SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH				JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN	DASAR HUKUM
			ANGGARAN	REALISASI	TAMBAH/KURANG	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dinas PUPRPERKIM Kab. Bangli	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	99.191.000,00	809.000,00	99,19		
2		Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	49.595.500,00	404.500,00	99,19		
3		Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	49.595.500,00	404.500,00	99,19		
4		Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	99.292.000,00	708.000,00	99,29		
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	99.320.100,00	679.900,00	99,32		
5		Penataan Bangunan dan Lingkungan	100.000.000,00	99.495.000,00	505.000,00	99,50		
6		Penataan Bangunan dan Lingkungan	100.000.000,00	98.655.150,00	1.344.850,00	98,66		

No.	Nama SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH				JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN	DASAR HUKUM
			ANGGARAN	REALISASI	TAMBAH/KURANG	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		sanitasi	120.000.000,00	114.602.000,00	5.398.000,00	95,50		
		Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota					4.900.000.000,00	Perda Nomor 13 Tahun 2022 tentang APBD TA 2023 dan Perbud Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD TA 2023
		Rekonstruksi Jalan	100.000.000,00	74.000.000,00	26.000.000,00	74,00		
		Rekonstruksi Jalan	26.222.934,00	26.143.660,00	79.274,00	99,70		
		Rekonstruksi Jalan	26.222.934,00	26.143.660,00	79.274,00	99,70		
		Rekonstruksi Jalan	26.222.934,00	26.143.680,00	79.254,00	99,70		
		Rekonstruksi Jalan	22.167.000,00	16.567.000,00	5.600.000,00	74,74	6.204.613.600,00	Perda Nomor 13 Tahun 2022 tentang APBD TA 2023 dan Perbud Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD TA 2023
		Rekonstruksi Jalan	22.167.000,00	16.567.000,00	5.600.000,00	74,74		
		Rekonstruksi Jalan	20.000.000,00	19.482.000,00	518.000,00	97,41	1.250.000.000,00	Perda Nomor 13 Tahun 2022 tentang APBD TA 2023 dan Perbud Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD TA 2023
		Rekonstruksi Jalan	76.000.000,00	74.828.000,00	1.172.000,00	98,46		
		Rekonstruksi Jalan	76.000.000,00	74.828.000,00	1.172.000,00	98,46		
		Rekonstruksi Jalan	76.000.000,00	75.074.000,00	926.000,00	98,78		
		Rekonstruksi Jalan	76.000.000,00	75.074.000,00	926.000,00	98,78		
		Rekonstruksi Jalan	20.000.000,00	19.482.000,00	518.000,00	97,41		
		Rekonstruksi Jalan	20.000.000,00	19.482.000,00	518.000,00	97,41		
		Rekonstruksi Jalan	20.000.000,00	19.482.000,00	518.000,00	97,41		
		Rekonstruksi Jalan	20.000.000,00	17.789.000,00	2.211.000,00	88,95	1.300.000.000,00	Perda Nomor 13 Tahun 2022 tentang APBD TA 2023 dan Perbud Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD TA 2023
		Rekonstruksi Jalan	20.000.000,00	17.789.000,00	2.211.000,00	88,95		
		Rekonstruksi Jalan	45.000.000,00	19.607.750,00	25.392.250,00	43,57	2.750.000.000,00	Perda Nomor 13 Tahun 2022 tentang APBD TA 2023 dan Perbud Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD TA 2023

No.	Nama SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH				JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN	DASAR HUKUM
			ANGGARAN	REALISASI	TAMBAH/KURANG	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Rekonstruksi Jalan	19.667.300,00	19.607.750,00	59.550,00	99,70	1.500.000.000,00	Perda Nomor 13 Tahun 2022 tentang APBD TA 2023 dan Perbud Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD TA 2023
		Rekonstruksi Jalan	19.667.300,00	19.607.750,00	59.550,00	99,70		
		Rekonstruksi Jalan	19.665.400,00	19.607.750,00	57.650,00	99,71		
		Rekonstruksi Jalan	19.667.300,00	19.607.750,00	59.550,00	99,70		
		Rekonstruksi Jalan	19.676.000,00	19.607.750,00	68.250,00	99,65		
		Rekonstruksi Jalan	19.676.000,00	19.607.750,00	68.250,00	99,65		
		Rekonstruksi Jalan	19.667.200,00	19.607.750,00	59.450,00	99,70		
		Rekonstruksi Jalan	19.667.200,00	19.607.750,00	59.450,00	99,70		
		Rekonstruksi Jalan	19.667.200,00	19.607.750,00	59.450,00	99,70		
		Rekonstruksi Jalan	19.667.200,00	16.567.000,00	3.100.200,00	84,24		
		Rekonstruksi Jalan	20.000.000,00	19.482.000,00	518.000,00	97,41		
		Rekonstruksi Jalan	20.000.000,00	19.482.000,00	518.000,00	97,41		
		Rekonstruksi Jalan	16.625.000,00	16.567.000,00	58.000,00	99,65		
		Rekonstruksi Jalan	16.375.000,00	15.207.000,00	1.168.000,00	92,87	2.357.850.000,00	Perda Nomor 13 Tahun 2022 tentang APBD TA 2023 dan Perbud Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD TA 2023
		Rekonstruksi Jalan	16.375.000,00	15.200.000,00	1.175.000,00	92,82	3.847.482.400,00	Perda Nomor 13 Tahun 2022 tentang APBD TA 2023 dan Perbud Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD TA 2023
		Rekonstruksi Jalan	22.917.000,00	22.583.000,00	334.000,00	98,54		
		Rekonstruksi Jalan	22.917.000,00	22.583.000,00	334.000,00	98,54		
		Rekonstruksi Jalan	16.625.000,00	16.567.000,00	58.000,00	99,65		
		Rekonstruksi Jalan	190.000.000,00	180.620.000,00	9.380.000,00	95,06		
		Rekonstruksi Jalan	35.000.000,00	34.494.500,00	505.500,00	98,56	1.755.000.000,00	Perda Nomor 13 Tahun 2022 tentang APBD TA 2023 dan Perbud Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD TA 2023

No.	Nama SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH				JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN	DASAR HUKUM
			ANGGARAN	REALISASI	TAMBAH/KURANG	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Rekonstruksi Jalan	35.000.000,00	34.494.500,00	505.500,00	98,56		
		Rekonstruksi Jalan	15.000.000,00	14.801.250,00	198.750,00	98,68	2.750.000.000,00	Perda Nomor 13 Tahun 2022 tentang APBD TA 2023 dan Perbud Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD TA 2023
		Rekonstruksi Jalan	15.000.000,00	14.801.250,00	198.750,00	98,68	2.750.000.000,00	Perda Nomor 13 Tahun 2022 tentang APBD TA 2023 dan Perbud Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD TA 2023
		Rekonstruksi Jalan	15.000.000,00	14.801.250,00	198.750,00	98,68	2.750.000.000,00	Perda Nomor 13 Tahun 2022 tentang APBD TA 2023 dan Perbud Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD TA 2023
		Rekonstruksi Jalan	22.400.000,00	22.108.000,00	292.000,00	98,70		
		Rekonstruksi Jalan	21.300.000,00	21.000.000,00	300.000,00	98,59	1.290.000.000,00	Perda Nomor 13 Tahun 2022 tentang APBD TA 2023 dan Perbud Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD TA 2023
		Rekonstruksi Jalan	21.300.000,00	21.000.000,00	300.000,00	98,59	1.300.000.000,00	Perda Nomor 13 Tahun 2022 tentang APBD TA 2023 dan Perbud Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD TA 2023
		Rekonstruksi Jalan	30.000.000,00	29.602.500,00	397.500,00	98,68	2.750.000.000,00	Perda Nomor 13 Tahun 2022 tentang APBD TA 2023 dan Perbud Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD TA 2023
		Rekonstruksi Jalan	30.000.000,00	29.602.500,00	397.500,00	98,68		
		Rekonstruksi Jalan	20.000.000,00	17.676.521,76	2.323.478,24	88,38		
		Rekonstruksi Jalan	15.000.000,00	12.078.956,52	2.921.043,48	80,53		
		Rekonstruksi Jalan	15.000.000,00	14.801.250,00	198.750,00	98,68	2.750.000.000,00	Perda Nomor 13 Tahun 2022 tentang APBD TA 2023 dan Perbud Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD TA 2023

No.	Nama SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH				JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN	DASAR HUKUM
			ANGGARAN	REALISASI	TAMBAH/KURANG	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Rekonstruksi Jalan	20.000.000,00	19.575.000,00	425.000,00	97,88		
		Rekonstruksi Jalan	10.000.000,00	8.413.111,00	1.586.889,00	84,13		
		Rekonstruksi Jalan	7.500.000,00	6.730.489,00	769.511,00	89,74		
		Rekonstruksi Jalan	7.500.000,00	6.730.489,00	769.511,00	89,74		
		Rekonstruksi Jalan	12.000.000,00	11.111.000,00	889.000,00	92,59	890.000.000,00	Perda Nomor 13 Tahun 2022 tentang APBD TA 2023 dan Perbud Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD TA 2023
		Rekonstruksi Jalan	250.000.000,00	221.143.000,00	28.857.000,00	88,46		
		Rekonstruksi Jalan	170.000.000,00	164.337.936,00	5.662.064,00	96,67		
		Rekonstruksi Jalan	400.000.000,00	388.684.953,00	11.315.047,00	97,17		
		Rekonstruksi Jalan	50.000.000,00	46.871.000,00	3.129.000,00	93,74		
		Rekonstruksi Jalan	35.000.000,00	33.396.000,00	1.604.000,00	95,42		
		Rekonstruksi Jalan	35.000.000,00	33.396.000,00	1.604.000,00	95,42		
		Rekonstruksi Jalan	70.000.000,00	67.948.490,00	2.051.510,00	97,07		
		Rekonstruksi Jalan	45.000.000,00	41.606.000,00	3.394.000,00	92,46		
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	100.000.000,00	99.374.000,00	626.000,00	99,37		
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	350.000.000,00	327.291.945,00	22.708.055,00	93,51		
2	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangli	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	657.500.000,00	97.931.350,00	559.568.650,00	14,89	5.047.000.000,00	Perda Nomor 13 Tahun 2022 tentang APBD TA 2023 dan Perbud Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD TA 2023
		Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	657.500.000,00	44.577.600,00	612.922.400,00	6,78	1.350.000.000,00	Perda Nomor 13 Tahun 2022 tentang APBD TA 2023 dan Perbud Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD TA 2023
		Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	80.000.000,00	77.283.250,00	2.716.750,00	96,60	2.310.000.000,00	Perda Nomor 13 Tahun 2022 tentang APBD TA 2023 dan Perbud Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD TA 2023

No.	Nama SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH				JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN	DASAR HUKUM
			ANGGARAN	REALISASI	TAMBAH/KURANG	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	RSU BANGLI	Konsultan Perencana Gedung 2A	485.000.000,00	484.484.000,00	516.000,00	99,89	-	-
4	Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangli	Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan,Pemasaran,SDM serta Desain dan Teknologi (Belanja Modal Feasibility/FS) Pembangunan PLUT	50.000.000,00	49.783.500,00	216.500,00	99,57	-	
		Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan,Pemasaran,SDM serta Desain dan Teknologi belanja Modal Review DED Pembangunan Gedung PLUT	50.000.000,00	49.731.885,00	268.115,00	99,46	-	
5	Dinas Lingkungan Hidup	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	905.991.000,00	736.738.473,00	169.252.527,00	81,32	804.735.000,00	Perda Nomor 13 Tahun 2022 tentang APBD TA 2023 dan Perbud Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD TA 2023
Jumlah			**6.688.515.902,00**	**5.147.958.699,28**	**1.540.557.202,72**		**52.606.681.000,00**	**-**

BUPATI BANGLI,

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

LAMPIRAN XX

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH

LAMPIRAN XX.1

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (NERACA) BADAN USAHA MILIK DAERAH/ PERUSAHAAN DAERAH

Lampiran XX.1 : Peraturan Daerah Kabupaten Bangli
Nomor : 2 Tahun 2023
Tanggal : 15 Agustus 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (NERACA) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAN DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

No	BUMD/Perusahaan Daerah Tahun 2021	Sumber a)	Status b)	Aset lancar	Aset Tidak Lancar	Aset lainnya	Total Aset	Kewajiban Jangka Pendek	Kewajiban Jangka Panjang	Total Kewajiban	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	BPYDS	Ekuitas Lainnya	Laba Ditahan	Total Ekuitas	% Sahan Daerah	Kepemilikan Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
1	**Bidang Perbankan**																	
	PT BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda)	APBD	BUMD	267.610.812.205,00	3.558.148.504,00	497.606.707,00	271.666.567.416,00	244.804.674.065,00	-	244.804.674.065,00	12.000.000.000,00	-	-	-	2.127.897.970,20	26.861.893.351,00	100%	100%
	PT Bank BPD Bali	APBD	BUMD	-	-	-	-	-	-	-	13.577.726.125,83	-	-	-	-	-	0.73%	0.73%
2	**Bidang Pemanfaatan Air Minum**																	
	Perumda Air Minum Tirta Danu Arta Kabupaten Bangli	APBD	BUMD	3.593.047.128,00	25.345.190.923,20	676.665.024,00	29.614.903.075,20	2.768.408.072,00	867.373.489,00	3.635.781.561,00	45.111.049.851,68	-	-	31.080.414,00	(19.970.270.575,72)	28.266.505.806,00	100%	100%
3	**Bidang Sumber Daya**																	
	Perusahaan Daerah Bhukti Mukti Bhakti	APBD	BUMD	291.312.564,00	130.327.843,00	-	421.640.407,00	432.537.015,00		432.537.015,00	1.000.000.000,00	-	-	-	-	(10.896.608,00)	100%	100%
4	**Bidang Asuransi**																	
	PT Jamkrida Bali Mandara	APBD	BUMD	-	-	-	-		-	-	600.000.000,00	-	-	-	-	-	0.40%	0.40%
	Total Seluruh Bidang Industri			271.495.171.897,00	29.033.667.270,20	1.174.271.731,00	301.703.110.898,20	248.005.619.152,00	867.373.489,00	248.872.992.641,00	72.288.775.977,51	-	-	31.080.414,00	(17.842.372.605,52)	55.117.502.549,00		

BUPATI BANGLI,

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

LAMPIRAN XX.2

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN LABA/RUGI) BADAN USAHA MILIK DAERAH/ PERUSAHAAN DAERAH

Lampiran XX.2 : Peraturan Daerah Kabupaten Bangli
Nomor : 2 Tahun 2023
Tanggal : 15 Agustus 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN LABA/RUGI) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAN DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

No	BUMD/Perusahaan Daerah Tahun 2022	Sumber a)	Status b)	Pendapatan	Beban	Laba (Rugi) Kotor	Pendapatan di luar usaha	Beban di Luar Usaha	Laba (Rugi) sebelum Pajak
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Bidang Perbankan**								
	PT BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda)	APBD	BUMD	26.579.173.768,00	20.420.982.171,00	6.158.191.597,00	1.787.800,00	185.073.583,00	5.974.905.814,00
2	**Bidang Pemanfaatan Air Minum**								
	Perumda Air Minum Tirta Danu Arta Kabupaten Bangli	APBD	BUMD	27.555.482.611,00	27.370.467.772,21	185.014.838,79	138.883.111,90	2.249.891,77	321.648.058,92
3	**Bidang Sumber Daya**								
	Perusahaan Daerah Bhukti Mukti Bhakti	APBD	BUMD	486.727.965,00	716.315.795,00	(230.149.622,00)	-	-	-
	Total Seluruh Bidang Industri			**54.621.384.344,00**	**48.507.765.738,21**	**6.113.056.813,79**	**140.670.911,90**	**187.323.474,77**	**6.296.553.872,92**

BUPATI BANGLI,

SANG NYOMAN SEDANA ARTA